

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH LOKAL

Kumpulan Makalah Diskusi

Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1995

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH LOKAL

Kumpulan Makalah Diskusi

939.803

SE

Penyunting :

Zulfikar Ghazali

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

1995

SEJARAH LOKAL : Kumpulan Makalah Diskusi

Penyunting : Zulfikar Ghazali

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Cetakan pertama tahun 1995

Jakarta 1995

Dicetak oleh : CV. DWI JAYA KARYA, Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Disamping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya ini dikemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130202962

PENGANTAR

Buku dengan judul *Sejarah Lokal* ini merupakan kumpulan makalah Diskusi Revolusi Kemerdekaan di Tingkat Lokal. Diskusi tersebut diselenggarakan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Semarang pada 13 -- 15 Oktober 1994.

Diskusi tersebut membahas kurang lebih 20 makalah tentang Revolusi Kemerdekaan di Tingkat Lokal dalam berbagai aspek. Di antaranya tentang Pemerintahan di daerah, KNI daerah, Persuratkabaran, Sosial Politik, ekonomi dan perdagangan, kemiliteran serta seni dan budaya yang tumbuh pada masa revolusi kemerdekaan itu.

Penerbitan kumpulan makalah diskusi sejarah lokal tersebut, diharapkan dapat memberi informasi kesejarahan mengenai situasi di masa revolusi kemerdekaan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat pada kajian yang berhubungan dengan masa revolusi. Di samping itu diharapkan dapat menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ohorella', with a large, sweeping loop above it.

Dra. GA. Ohorella

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Pengalaman Semasa Revolusi di Medan Gerilya Madura, oleh Mohammad Noer, mantan Gubernur Jawa Timur.	1
Kehidupan Persuratkabaran di Yogyakarta pada Masa Revolusi Fisik : Sebuah Studi Awal, oleh Suhartinah, Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.	19
Peranan Pers pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta, Tahun 1945 --1949, oleh Suratmin, Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.	32
Bertempur Atau Berunding : Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal Revolusi Indonesia, oleh Andi Suwitra, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	62
KNI dan Pergolakan Internal , oleh Dwi Purwoko, LIPI Jakarta.	88
Komite Nasional Indonesia Daerah dan Pergolakan Internal di Tingkat Lokal : Kasus Banten, oleh Mohammad Iskandar, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	98
Pemerintah Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria Kartalegawa : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat, oleh Susanto Zuhdi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	120
Dinamika Politik di Daerah MMTg Mranggen Semarang, 1945--1949, oleh Djuhar Noor & S. Sigit Wahyudi, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.	134
Ekonomi pada Mata Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945--1949), oleh Muhammad Gade Ismail, Fakultas Universitas Syiah Kuala.	151

Ekonomi Indonesia Zaman Revolusi : Kasus Palembang, 1945--1950. oleh Mestika Zed. FPIPS - IKIP Padang	168
Ekologi, Ekonomi dan Wajah Revolusi di Pedesaan : Kasus Dinamika Masyarakat Desa Gombang Tahun 1945--1949. oleh Yety Rochwulaningsih & Singgih Tri Sulistyono. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.....	182
Badan Perjuangan, Mobilisasi dan Rasionalisasi Tentara di Sulawesi Selatan. oleh Mukhlis Paeni. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.	207
Hizbullah-Sabilillah Divisi Sunan Bonang Dalam Revolusi Kemerdekaan : Lahir dan Pertumbuhannya. oleh Tashadi. Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.	221
Peranserta Hizbullah-Sabilillah Surakarta Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Tahun 1948. oleh A. Adaby Darban. Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada	235
Hizbullah - Sabilillah Divisi Sunan Bonang Dalam Kles II. oleh A. Adaby Darban. Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta.....	255
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat : Tinjauan di Dua Daerah. oleh Yuwono Dwi Priyantono. Arsip Nasional Jakarta.	274
Pemerintah Daerah, 1945--1950 Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh P.J. Suwarno. IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.	286
Revolusi Kemerdekaan Dalam Sastra Jawa dan Indonesia, oleh Yudiono K.S., Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	303
" Ubel-ubel" Sebagai Realitas Sejarah Dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis, oleh Prapto Yuwono. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	316
Karya-karya Seni Rupa Mewarnai Sejarah. oleh Soedarso Sp. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.	330
Revolusi dan Mentalitas : Cepu Sekitar Masa Revolusi Kemerdekaan, 1945--1949. oleh A.M. Djulianti Surojo. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.	337
Mentalitas Revolusi di Indonesia, oleh J. Kadjat Hartojo. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.	354
Sistem Pemerintah Militer di Daerah Gerilya Gunung Sumbing Masa Perang Kemerdekaan II, 1948--1949. oleh Supriya Priyanto. Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.	367

PENGALAMAN SEMASA REVOLUSI DI MEDAN GERILYA MADURA

Mohammad Noer

1. Pendahuluan

Ketika Panitia Penyelenggara Diskusi Sejarah Lokal ini meminta saya untuk ikut menyumbangkan sekelumit pengalaman pribadi yang saya miliki sehubungan dengan tema pertemuan, saya langsung menyatakan kesediaan saya untuk memenuhinya. Hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan, tetapi yang terutama ialah langkanya data dan informasi berdasarkan pengalaman tangan pertama yang dibahas secara terbuka mengenai periode revolusi kemerdekaan yang sebenarnya penuh romantika itu. Kebiasaan bangsa kita untuk tidak menuliskan pengalamannya merupakan salah satu kendala utama dalam mencoba memahami masa lalu Indonesia yang dapat kita jadikan cermin besar dalam melakukan kegiatan masa kini untuk menyongsong masa depan. Sejemput keterangan yang ada dan sampai pada kita sekarang biasanya bersumber pada cerita pengalaman yang disampaikan dari mulut-ke mulut, karena sebagian besar pelaku utama sejarah sudah dipanggil kehadirat Illahi. Alangkah kayanya Khasanah informasi yang akan terkumpul, seandainya saja setiap peserta aktif revolusi kemerdekaan itu sempat menyampaikan rekaman atau tulisan duka cerita kisah pengalamannya untuk dijadikan sumber telaahan oleh sarjana sejarah profesional nanti di belakang hari. Kelangkaan lebih terasa lagi untuk data dan informasi sejarah perang kemerdekaan pada

tingkat lokal terutama ditempat-tempat yang sementara ini dianggap tidak penting karena secara strategis kurang berarti dimata nasional. Penilaian Sesaat seperti itu dapat bersifat fatal, sebab kejadian disesuatu lokasi sebenarnya mungkin berperan vital kalau saja kita mampu mengkaitkannya dengan kerangka peristiwa sejenis yang terjadi ditempat lain. Memang pantas dipertanyakan, apa arti kejadian sewaktu revolusi kemerdekaan ditempat seperti pulau Madura yang gersang, yang secara ekonomi tidak penting, yang kegiatan perjuangan penduduknya tidak menonjol, sehingga memang sering dianggap begitu kecil dan tak bermakna, bila dibandingkan dengan peristiwa berskala nasional yang sudah menyita perhatian sejarawan kita ?. Dilain pihak kita pantas prihatin bahwa hanya satu dua kalimat saja yang sudah ditulis orang tentang kegagalan kita diawal perang kemerdekaan untuk menguasai persediaan senjata dari arsenal angkatan laut Jepang di Batu Poron di seberang Tanjung Perak. Padahal pergudangan timbunan senjata tadi dikomandani oleh seorang Kolonel, yang berarti bahwa gudang persenjataan tersebut dikawal oleh sekitar satu resimen tentara Jepang. Dengan demikian jalan sejarah perjuangan Indonesia mungkin akan lain seandainya senjata-senjata tadi jatuh ketangan kita sewaktu menghadapi serbuan tentara Inggris pada pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945

Oleh sebab itu sangatlah terpuji usaha Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional untuk membahas masalah sejarah lokal semasa revolusi kemerdekaan, yang harus segera diikuti dengan penggalian lebih lanjut dari segelintiran pelakunya yang sekarang masih hidup. Berdasarkan kenyataan ini apa yang akan diungkapkan dibawah sebenarnya tak lebih hanyalah setetes air dari lautan data dan informasi yang seharusnya terkumpul, sehingga masih harus dilengkapi dengan sumber-sumber peserta perjuangan revolusi kemerdekaan lainnya. Jika dalam tulisan berikut saya hanya menekankan pada tapak kejadian di Madura, pemilihan ini didasari oleh pertimbangan bahwa pengalaman saya bergerilya dari Tuban sampai Blitar sudah tentu akan dicakup oleh orang lain yaitu para pelaku perjuangan yang lebih lekat dengan dacrak bersangkutan.

2. Babad Tanah madura

Secara geografis pulau Madura terletak pada 7^o Lintang Utara dan 112^o - 114^o Bujur Timur. Luas pulau Madura kurang lebih 5.305 km² dengan panjang kurang lebih 190 km. Di sekitar pulau Madura terutama disebelah timurnya bertebaran pulau-pulau kecil.

sejarah pulau Madura bermula kira-kira sejak 4.000 tahun yang lalu, ketika di Asia Tenggara mulai terjadi perpindahan bangsa secara besar-besaran dari daratan Indocina ke Kepulauan Nusantara. Perpindahan melintasi lautan itu berlangsung secara bergelombang dalam rentang waktu sekitar 2.000 tahun. Salah satu kelompok bangsa berpindah yang mengarungi lautan itu terdampar kesebuah pulau kecil yang terletak di Utara Ujung Timur pulau jawa. Para Pendatang itu lalu menetap disana untuk kemudian menjadi nenek moyang suku Madura. Mereka adalah pelaut-pelaut sejati, yang senang berbantal ombak berselimutkan angin samudra. Bagi bangsa ini laut merupakan gantungan harapan masa depannya. Laut juga menjadi cermin pelambang kebebasan petualangannya dan wadah pelampias rasa kemerdekaannya.

Sejak jaman dahulu kala, orang-orang Madura memiliki semangat untuk malawan segala bentuk penindasan dan penjajahan baik yang dilakukan oleh kekuasaan dan kekuatan dari dalam Madura sendiri maupun oleh kekuasaan dan kekuatan dari luar. Hal ini dapat kita ketahui baik dari legenda-legenda yang berkembang dikalangan rakyat Madura maupun buku - buku atau tulisan - tulisan dan laporan - laporan penguasa yang pernah memerintah pulau Madura.

Salah satu legenda kepahlawanan orang-orang Madura, ialah terjadi di sekitar berdirinya kerajaan Majapahit dalam abad ke-13. Sewaktu Jayakatwang menghancurkan kerajaan Singosari, Raja Kertanegara terbunuh. Raden Wijaya, menantu Kartanegara melarikan diri ke Madura. Disana sang Pangeran mendapat perlindungan dan bantuan dari Aria Wiraraja, Adipati Madura. Berkat bantuan Aria Wiraraja akhirnya Raden Wijaya yang diperkuat dengan pasukan-pasukan Madura mampu mengalahkan Jayakatwang. Dengan bantuan pasukan-pasukan dari Madura itu kemudian Raden Wijaya membuka hutan Tarik yang akan dibangun sebagai kerjaan baru. Sewaktu

membabat hutan, pasukan-pasukan Madura itu mendapatkan buah maja yang pahit, sehingga daerah ini kemudian dikenal dengan nama Majapahit. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dengan bantuan Aria Wiraraja beserta balatentara Madura berhasil menghancurkan tentara Tartar dari Cina yang dikirim oleh Kubilai Khan yang telah berhasil mengalahkan Singosari. Dengan kemenangan tersebut Raden Wijaya kemudian menjadi penguasa baru sebagai raja Majapahit yang pertama.

Pada masa Majapahit berkembang tokoh legenda Madura yaitu seorang Adipati bernama Setiadiningrat yang memerintah Sumenep pada tahun 1415-1460. Adipati tersebut pada masa mudanya terkenal dengan nama Jaka Tole. Jaka Tole sangat terkenal di Madura karena kesaktiannya. Dia dikisahkan sangat berjasa kepada Majapahit kerana mampu mendirikan pintu besi istana seorang diri. Karena keberhasilannya Jaka Tole dikawinkan dengan salah seorang putri raja Majapahit. Banyaknya kehebatan Jaka Tole yang diceritakan, seperti misalnya mengalahkan perusuh dari Blambangan dengan memenggal kepalanya. Ada juga kisah Jaka Tole yang menunggang kuda terbang mengalahkan Dampo Awang yang menaiki Perahu yang melayang yang dibunuhnya dengan cambukan cemeti. Pengaruh Jaka Tole sangat besar dalam benak orang Madura sehingga beberapa nama tempat di pulau Madura dikaitkan dengan kisah petualangannya. Socah (yang berarti mata) mendapat namanya karena didesa itu tongkat Jaka Tole konon berhasil memercikkan air yang menyembuhkan kebutaan istrinya. dan banyak lagi kisah-kisah lainnya yang mengkaitkan asal mula nama desa dengan peristiwa kehebatan Jaka Tole.

Bersamaan dengan memudarnya kemegahan kerajaan besar Majapahit, fajar Islami mulai bersinar di pulau Jawa. Menurut catatan babad-babad populer, kerajaan Majapahit berakhir oleh serangan kerajaan Islam yang baru muncul. Masuknya pengaruh Islam di Majapahit telah menimbulkan transformasi masyarakat. Peranan pedagang Islam terlihat menguat dikota-kota pelabuhan. Sementara itu pula pada saat yang bersamaan disekitar abad XVI perniagaan di Nusantara semakin diramaikan oleh kedatangan pedagang Eropah yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Selain keperluan berdagang orang-orang Eropah yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Selain keperluan berdagang orang-orang Eropah juga berniat melanjutkan perang salib

dengan mmenyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1511 bangsa Portugis berhasil menaklukkan dan menguasai kota penting Malaka di semenanjung Malaya. Dari sana mereka melanjutkan ke Jawa sampai Maluku. Dari catatan mereka ditulis bahwa pada tahun 1515 Kerajaan Majapahit sudah tidak berarti lagi.

Sewaktu Sultan Agung memimpin Mataram, ia menjalankan politik pemerintah untuk mempersatukan Jawa dan Madura, bahkan ingin mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara, agar kompeni sukar melebarkan sayapnya. Karena itu Sultan Agung kadang-kadang menjalankan politik kekerasan. Dalam tahun 1614 Surabaya ditaklukkan, demikian pula Pasuruan dan Tuban. Akhirnya dalam tahun 1624, Madura dapat giliran. Pendekatan yang kurang bijaksana menimbulkan peperangan dahsyat. Tentara Madura yang berjumlah 2.000 orang melawan pasukan Mataram yang berjumlah 50.000 orang. perjuangan rakyat Madura menunjukkan keberanian yang luar biasa. Baik pria maupun wanita maju kegaris depan. Sebanyak 6.000 orang tentara Mataram dapat ditewaskan, tetapi Sultan Agung tidak putus asa, yang gugur segera diganti.

Akhirnya Madura dapat ditaklukkan. Satu-satunya keturunan raja Madura yang masih hidup ialah Raden Praseno yang masih belum dewasa. Ia dibawa ke Mataram oleh Sultan Agung dan setelah dewasa dikawinkan dengan salah seorang putri adik raja Mataram. Dalam zaman Sultan Agung, Mataram ditakuti oleh Kompeni Belanda, tetapi setelah Amangkurat I berkuasa, Kompeni menjalankan politik *divide et impera* dan Amangkurat I tidak mempunyai kewibawaan. Pangeran Alit (adik Amangkurat I) dicurigai dan diperintahkan untuk ditangkap dan dibunuh. Raden Maluyo ayah Trunojoyo juga menjadi korban. Akhirnya Cakraningrat I (Raden Praseno), penasihat umum kerajaan juga menjadi korban pembersihan. Orang yang ditunggu-tunggu untuk memimpin perlawanan akhirnya muncul, ialah Raden Trunojoyo. Trunojoyo maju kedepan hanya karena terdorong untuk membasmi ketidak-adilan, kemungkaran dan anti penjajah. Bukan kekuasaan dan kedudukan yang menjadi tujuan hidup Trunojoyo, dan ini terbukti waktu mahkota kerajaan Majapahit ada ditangan kekuasaannya. Mahkota ini secara turun temurun jatuh ketangan raja-raja yang menguasai Jawa. Trunojoyo tidak pernah menempatkan mahkota

Majapahit diatas kepalanya, pun juga tidak pernah menamakan dirinya sebagai Susuhunan. Mahkota yang ada padanya akan dikembalikan kepada Susuhunan, asal saja Susuhunan mau ke Kediri dengan tidak berteman dengan Belanda.

Dalam Abad ke-18 Kompeni Belanda mengadakan pembatasan-pembatasan serta penindasan-penindasan yang makin merajalela terhadap kekuasaan raja-raja dan rakyat Madura, sehingga di Madura Barat telah terjadi suatu perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Cakraningrat IV. Tetapi perlawanan tersebut dapat dipatahkan karena kompeni mendatangkan bala bantuan dari Batavia. Cakraningrat IV terus menyingkir ke Banjarmasin, tetapi oleh raja Banjarmasin ia diserahkan ke V.O.C yang lalu membuangnya ke Kaap de Goede Hoop di Afrika Selatan. Ia meninggal dunia disana dalam tahun 1753. Orang Madura memberinya nama Pangeran Sedingkap, atau Pangeran yang meninggal di Kaap (Tanjung Harapan). V.O.C. kemudian mengangkat Bupati Sedayu menjadi penguasa di Madura Barat dan memberinya gelar Raden Adipati Setiadinongrat. Dengan sedihnya ia harus mengikrarkan janji setia kepada V.O.C. dan menandatangani persyaratan (*conditien en voorwaarden*) yang lebih lunak isinya dibandingkan *acte van verband*. Tetapi pada tahun 1750 ia harus menghadapi pemberontakan Ke Lesap yang mengharu biru seluruh Madura. Ke Lesap berhasil mengalahkan Bupati Sumenep dan Pamekasan. bahkan bupati Pamekasan dapat dibunuhnya. Kerajaan Sampang dan Pamekasan kemudian dikalahkan pula, tetapi sayangnya kemudian ke Lesap menjadi lengah dan berhasil dikelabui Belanda yang berhasil membunuhnya dalam suatu serangan balasan.

Dalam masa pemerintahan Jepang, kekejaman tentara Jepang yang menginjak-injak nilai dan martabat rakyat Madura, serta keangkar-murkaannya telah menimbulkan penderitaan yang membebani rakyat, sehingga pada tahun 1943 telah berkobar suatu pemberontakan rakyat secara terbuka di desa Prajjan, Sampang, dipimpin pemuka pesantren setempat. Kemudian ia serta pemimpin-pemimpin pesantren lainnya ditangkap dan ditembak mati. Akhirnya atas campur tangan Panglima Tentara Jepang (Seiko Sikkan) di Jakarta, mereka yang masih ditahan dibebaskan kembali dan pembantaian lebih lanjut dapat dihentikan. Pada tahun-tahhhun berikutnya perlawanan diam-diam terhadap

pemerintahan militer Jepang sering dilakukan oleh penduduk setempat diberbagai pelosok Madura.

3. Tapak Adegan Kejadian

Dari berbagai terbitan yang sudah ada akan terbaca bahwa saya dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pamong rakyat. Pembinaan ini tidak saja saya peroleh ketika bersekolah di MOSVIA yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga oleh tradisi lingkungan keluarga saya sendiri. Sekalipun demikian sejarah hidup saya menggariskan lintasan agak sebagai selingan, karena ketika Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk oleh pemerintah penjajahan Jepang, saya terpilih sebagai salah seorang yang digembleng untuk menjadi perwiranya di Bogor. Demikianlah selama sekitar dua tahun saya sempat menjadi *chudanco*, atau seorang Kapten yang dicapai memimpin sebuah kompi PETA di Ketapang di pantai utara Madura tengah. Namun kehidupan dilingkungan ketentaraan ini terasa kurang pas untuk saya, sehingga ketika pemerintah penjajahan Jepang yang kalah perang membubarkan PETA dan Badan Keamanan Rakyat dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang baru merebut kedaulatan, saya memang diminta untuk memasuki dinas kemiliteran. Namun dengan memohon maaf saya menolaknya karena merasa lebih terpanggil untuk mengayomi rakyat secara profesional. Untuk itu kemudian saya mendapat surat pengangkatan untuk menjadi Asisten Wedana (istilah Camat waktu itu) di kota Bangkalan dan sekitarnya.

Ketika baru dibentuk tugas utama Badan Keamanan Rakyat adalah memperkuat dan menyiapkan diri untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman sisa tentara Jepang yang menjaga *status quo* serta rongrongan dari tentara sekutu (termasuk tentara Belanda) yang pasti akan datang untuk menggantikan tentara pendudukan Jepang. Karena mungkin dianggap kurang mendesak kepentingan maka baru dua bulan kemudian Badan Keamanan Rakyat itu diubah statusnya menjadi Tentara Keamanan rakyat (TKR). Kegiatan menjaga kedaulatan negara yang diemban TKR melibatkan diplomasi internasional, sehingga tugas ini memang dirasakan lamban dampaknya didaerah bila dibandingkan dengan tugas kepomongan. Hal ini sangat

terasa di wilayahh Bangkalan yang rakyatnya pada minggu-minggu pertama revolusi kemerdekaan itu menderita kekurangan bahan pangan yang gawat sebagai akibat politik pengurusan hasil pertanian oleh Jepang. Berbeda dengan wilayah Sumenep yang secara tradisi sudah mempunyai hubungan pertanian dengan daerah Besuki sehingga dapat segera mengatasi masalah kekurangan pangannya, Bangkalan betul-betul sulit untuk cepat memulihkan paceklik ini. Apalagi bulan-bulan September dan Oktober merupakan saat kering-keringnya cuaca di Madura.

Karena itu salah satu tugas penting seorang asisten wedana pada waktu itu ialah ikut memikirkan pemasokan jagung, beras dan bahan pangan lainnya dari Jawa. Beberapa bulan kemudian tugas ini menjadi semakin berat setelah Belanda berhasil menanamkan kekuasaannya di Surabaya serta terus meningkatkan kekuatan Angkatan Lautnya sehingga mereka dengan mudah mengadakan blokade ekonomi terhadap Madura. Sekali waktu armada perahu pengangkut dapat pengangkut bahan pangan yang saya ikuti pernah dicegat dan dibajak ditengah laut oleh patroli Belanda dan hanya dengan keajaiban saja bahwa saya berhasil lolos dari sergapan penculikan mereka itu. Masalah kekurangan pangan di daerah Bangkalan ini memang berlarut-larut dan berekor panjang, sehingga dijadikan salah satu alasan Belanda untuk menduduki Madura, yaitu katanya untuk meringankan penduduk dari bahaya kelaparan serta melepaskan kesengsaraan rakyat dari pemerasan tentara dan pemuda ekstremis.

Sekalipun waktu itu tugas pemerintah sipil seakan-akan hanya meneruskan tradisi yang sudah mapan, namun adanya masa selingan pendek oleh penjajahan Jepang terasa sangat menguntungkan untuk membangun bangsa Indonesia sesudah beberapa abad dijajah Belanda. Sebagai Aisten Wedana saya melihat bahwa rasa kenasionalan orang Madura telah dibina dan disalurkan secara menggelora oleh gaya pemerintah penjajahan Jepang yang senang menggerakkan massa (melalui gerakan *Keibodan*, *Fujinkai*, *Seinendan*), yang sangat berbeda dengan ketakutan kaum kolonial Belanda pada kegiatan yang melibatkan kumpulan orang banyak. Penjajahan Jepang mulai mengikis feodalisme dengan jalan tidak lagi mengakui hak-hak istimewa kaum bangsawan, antara lain dengan hanya mengenal satu macam sekolah

dasar untuk semua orang, entah itu anak ningrat, keluarga priyayi atau keturunan rakyat jelata. Kedudukan kewarganegaraan orang Indonesia pribumi disamakan dengan orang asing timur (Cina, Jepang, India, Arab), padahal sebelumnya oleh Belanda kita diberi status satu kelas lebih rendah. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pendidikan dan pemerintahan, sedangkan bahasa Belanda yang mencerminkan keelitan dan keningratan serba semu dilarang dipakai. Dengan demikian banyak hikmah yang telah saya ambil dari *interregnum* Jepang yang pendek itu, yang kemudian dijadikan modal upaya penggalangan keikutsertaan masyarakat Madura dalam dalam memperthahankan kemerdekaan nasional yang baru saja direbut.

Sesudah tentara Jepang dipulangkan dan tentara sekutu meninggalkan Indonesia, Belanda sebagai anggota sekutu mempunyai hak sejarah untuk kembali kebumi Indonesia. Sebelum itu mereka sudah melakukan infiltrasi dengan jalan memboncengkan pada tentara sekutu satuan pegawai administrasi sipil Hindia Belanda (NICA) yang selama itu mereka persiapkan di Australia. Untuk mengamankan penduduk mereka atas Surabaya, Belanda dari semula sudah mengincar untuk mencaplok Madura. Namun heroisme pemuda Madura yang dicontohkan oleh Letnan Mohammad Ramli, Letnan Abdullah dan Letnan Singasastra yang berani berjibaku di Kamal pada tanggal 5 Juli 1946 untuk melawan tank amfibi walaupun hanya bersenjatakan keris dan pistol, untuk sementara mengurungkan niat Belanda terbut. Belanda melihat bahwa penduduk Madura tidak berbeda dengan rakyat daerah Republik lainnya dalam menjaga dan membela dengan jiwa raga udara segar kemerdekaan negara yang telah diproklamsikan.

Sekalipun secara *de facto* dalam persetujuan Linggarjati Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa dan Madura, para pemimpin perjuangan di Madura tidak yakin akan kesungguhan Belanda untuk membiarkan Indonesia Merdeka. Melihat gelagat perkembangan ini, baik pimpinan pemerintah sipil maupun para komandan TKR di Madura segera mengatur siasat menentukan cara mempertahankan diri yang sebaik-baiknya menghadapi ancaman dan serangan Belanda. Karena dirasakan akan dijumpai kesulitan untuk berhasil mempertahankan daerah Bangkalan selatan bila diserang secara frontal oleh musuh bersenjata lengkap serba modern, diputuskan

untuk menyusun lapisan pertahanan kedua di daerah utara sekitar Arosbaya yang relatif banyak sawah ladangnya. Karena ini dirasakan rawan juga bila disusupi dari pantai, segi militer pengelolaan wilayah tersebut diperhatikan pula secara sungguh-sungguh. Berdasarkan pertimbangan bahwa saya sebagai mantan *chudanco* memiliki pengalaman kemiliteran, saya dipercaya untuk mempersiapkan daerah tersebut sebagai basis pertahanan grilya. Untuk itu pada tanggal 1 April 1947 saya diangkat menjadi Wedana Arosbaya dan segera menyingsing lengan baju berjaga-jaga menunggu serangan Belanda yang dipastika datang dalam waktu dekat.

Sebagai seorang pamongpraja, kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan rakyat untuk bahu-membahu bersama tentara dan satuan laskar pejuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah mulai dinikmati bangsa Indonesia. Misi tidak ringan mengingat belum banyak yang dapat dijadikan contoh nyata sebagai keuntungan hasil kemerdekaan yang sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ramai waktu itu. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya terhadap masyarakat Madura, untuk keperluan ini para ulama setempat segera saya dekati. Kedudukan mereka sebagai guru akan lebih banyak didengarkan masyarakat dibanding seorang pemimpin formal pemerintah atau struktural kenegaraan lainnya. Ini sejalan dengan tangga kuasa atau *Pecking Order* falsafah kehidupan orang Madura yang berbunyi *bu, pa', babu', guru, rato* (Ibu, Bapak, Sesepuh, Guru, Raja). Setiap desa dalam kewedanaan Arosbaya itu saya datangi untuk bersama ulama setempat mengajak dan menggerakkan rakyat mendukung perjuangan secara aktif jika saatnya tiba. Dengan demikian satuan-satuan perjuangan rakyat setempat yang berlandaskan keagamaan seperti *Sabilillah* dan *Hisbullah* dimotivasi pula untuk bekerjasama sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam menggalang pertahanan. Jadi semua potensi setempat, mulai dari Tentara Republik Indonesia (TRI), satuan laskar perjuangan dan rakyat ramai telah disiagakan sesuai dengan kondisi alam Madura.

4. Bergerilya di Madura

Berdasarkan beberapa pertimbangan politik, Belanda merasa perlu segera menguasai Madura sekalipun pulau itu tidak memiliki sumber

daya alam yang menguntungkan untuk mengisi perbendaharaan perang mereka yang sebenarnya sedang kosong. Tujuan utamanya adalah untuk merekrut pasukan yang dapat dipercaya untuk dijadikan tentara pendudukan. Pasukan seperti itu sangat berguna untuk dijadikan tentara teritorial diwilayah yang dikuasai Belanda nanti. Mereka berharap agar pasukan yang bakal direkrutnya akan dapat diandalkan seperti Barisan Madura yang banyak membantu mereka tempo doeloe dalam mengukuhkan penjajahan atas Hindia Belanda melalui penaklukan Minangkabau, Bali, Aceh dll. Selain itu Belanda pun berhasrat mendirikan negara boneka Madura sebagai sekutu baru dalam merongrong wibawa Republik yang semakin terjepit.

“Sejak setahun sebelum melakukan agresinya yang pertama, Belanda telah melakukan provokasi dan blokade ekonomi terhadap Madura. Belanda mengetahui betul bahwa pelabuhan Kamal di Bangkalan merupakan urat nadi ekonomi bagi pulau Madura. Maka pada tanggal 5 Juli 1946 Belanda melakukan serangan dari laut dan udara dalam upayanya memutuskan jalur pemasok kebutuhan ekonomi rakyat tersebut. Putra-putra Madura bertahan dengan gigih sehingga terjadilah pertempuran di pelabuhan DKA Kamal. Letnan Ramli gugur dalam serangan berani mati (jibaku) ketika ia berusaha menghadang pendaratan tank-tank ampibi Belanda. Beberapa orang putra Madura yang ikut gugur dalam peristiwa heroik itu diantaranya adalah Letnan Abdullah dan Letnan Singosastro. Setelah peristiwa itu kemudian Belanda memakai cara lain dalam melakukan provoksi dan blokade ekonomi.

Setahun kemudian Belanda melancarkan agresinya kewilayah Republik yang oleh mereka disebut aksi polisi-pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan ke Madura baru terjadi pada tanggal 4 Agustus 1947. Pada hari itu sejak pukul 06.00 dua pesawat tempur Belanda mulai melakukan pengintaian diatas daerah sekitar Kamal dan Bangkalan, yang kemudian disusul dengan pesawat-pesawat mustang yang menjatuhkan bom dan roket. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu barisan kita yang dipimpin oleh Kapten Abdul Fatah dan Letnan Jamaludin bertahan dengan gigih. Bahkan dua pesawat tempur Belanda dapat dirontokkannya tetapi meskipun secara gigih dan perkasa kita berusaha melawan Belanda, akhirnya karena kehabisan amunisi dan

untuk menghindarkan jatuhnya korban yang lebihh banyak lagi, pasukan kita bergerak mundur ke utara". Kebobolan pertahanan ini terjadi karena tingginya mobilitas gerak melingkar tentara perjuangan lalu mundur ke Arosbaya, untuk kemudian terus memasuki garis pertahanan baru yang sudah dipersiapkan di pedalaman. "Peristiwa rontoknya 2 pesawat tempur Belanda tersebut, benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa yang mampu menimbulkan kebanggaan dan mampu mempertebal semangat juang prajurit serta meningkatkan kepercayaan rakyat kepada tentaranya".

Seperti yang sudah pasti dialami oleh para pejuang lainnya, saya terpaksa terpisah dari keluarga dan meninggalkan isteri yang sedang hamil tua. Saya mundur sambil terus bertempur dan bergerilya, isteri saya mengungsi kedesa lain menghindari sergapan tentara Belanda yang diperkuat dengan barisan Cakra — suatu pasukan orang Madura yang direkrut Belanda dari buruh kasar pelabuhan, pengangguran serta tahanan yang dilepaskan dari penjara — yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Anak saya yang ketiga lahir dalam perjalanan pengungsian isteri saya tersebut dan diberi nama Sjaifuddin (yang berarti pedang agama) oleh Kyai Haji Marzuki. Beliau adalah salah seorang ulama setempat yang sangat gigih bertempur dan bahkan ikut hijrah bergerilya di Jawa serta kemudian kembali ke Madura bersama-sama sebagai pemenang perang.

Memang salah satu kesan yang sangat dalam membekas dalam diri saya ialah menonjolnya peran dan sumbangan ulama dalam perang gerilya di Madura itu. Kegiatan nyata ini sudah mulai mapan ketika pecah pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945. Mereka ikut menggembleng dan membakar semangat rakyat melalui ajaran agamanya sehingga persatuan antara tentara dan laskar pejuang dan rakyat beserta ulama dan pemimpinnya terbina secara terpadu sangat kuatnya. Tidak sedikit ulama Madura yang gugur sebagai syuhada dalam perang yang menurut keyakinan mereka merupakan perang suci itu.

Selanjutnya terasa sekali bahwa kami yang berjuang semasa revolusi itu semuanya melakukannya betul-betul tanpa pamrih, tetapi berjuang karena keyakinan akan kenikmatan menjadi bangsa merdeka. Gaji, imbalan, kedudukan, pangkat dan bentuk-bentuk insentif lainnya

seakan-akan tidak ada artinya ketika itu. Memang kalau dilihat dari kaca-mata sekarang mungkin dirasakan mungkin dirasakan keanehan bahwa pangkat pada waktu itu tidak begitu dihiraukan orang, yang dipentingkan dan diutamakan adalah ketundukan pada perintah dan aba-aba komandan. Jika kita menyimak nyanyian perjuangan kontemporer seorang berpangkat bintanga sudah akan dirasakan hebat, seperti tercermin dari lagu *Kopral Jono* yang sangat populer. Sikap yang sangat terpuji saat itu adalah kemauan untuk bersatu dan selalu bersiap, sikap mental yang nyata sangat ditakuti Belanda sehingga masa tersebut dikenal mereka sebagai periode bersiap.

Pada waktu itu kami bersama tentara dan laskar pejuang lainnya terkepung dalam kantong di wilayah pedalaman Kawedanan Arosbaya. Selain saya hanya Asisten Wedana Gegger yang masih bertahan dari pihak pamong praja, sedangkan pamong-pamong Kabupaten Bangkalan lainnya banyak yang sudah memilih bekerja sama dengan Belanda (termasuk didalamnya beberapa orang keluarga saya sendiri). Memang disadari bahwa posisi saya pada saat itu agak unik sebab setiap orang tahu bahwa selain merupakan seorang pamong praja yang resmi diangkat oleh pemerintah, saya juga adalah mantan perwira PETA yang aktif. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugas kepamongan dalam suasana itu saya tidak pernah kikuk, terutama karena perwira tentara disekeliling saya bergerilya tadi banyak yang merupakan kolega PETA dulu. Mungkin itulah pengejawantahan itu dwi-fungsi ABRI *Par Excellence*, yang secara nyata diterapkan dan dilaksanakan jauh sebelum gagasan dan sistem tersebut dimapankan secara terbuka melembaga.

Memang pengalaman bergerilya itu menyebabkan kita menyadari bagaimana rakyat Indonesia sudah memberikan sumbangan dan pengorbanan yang sangat besar nilainya secara hakiki bagi kemerdekaan bangsa kita ini. Hal ini juga di temukan di Madura pada masa revolusi kemerdekaan itu. Kadang-kadang kita kagum menyaksikan rakyat kecil yang sebenarnya melarat, dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa telah memberikan milik yang terbaik buat mendukung perjuangan kemerdekaan itu. Kami para tentara, laskar, pamong yang bergerilya beserta keluarganya yang mengungsi telah diterima dengan keterbukaan yang luar biasa.

disediakan rumah tempat tinggal yang baik, diberi makan dan masih dibantu berjuang secara aktif (karena banyak remaja dan pemuda desa yang menjadi kurir penghubung, pengangkut logistik, penunjuk jalan, pengamat kedatangan sergapan musuh lain-lain lagi). Padahal bulan-bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember ketika kami bergerilya itu merupakan saat terik-teriknya musim kemarau sehingga paceklik tengah mencekam daerah pedesaan Madura. Bulan-bulan itu merupakan *mosem laep* kata orang Madura, yang berarti musim sengsara kehidupan.

Pihak Belanda, tentunya atas informasi dari pamong yang bersedia berkooperasi dengan mereka, mengetahui sepenuhnya akan keprihatinan keadaan kami sehingga tekanan mereka secara militer semakin gencar. Tentara dan pejuang serta pamong yang bergerilya waktu itu tidak kekurangan bahan pangan tetapi juga mengalami kesukaran yang sangat serius untuk mendapatkan pemasokan peluru dan persenjataan lain serta obat-obatan. Berbagai serangan akan dilancarkan oleh pihak Belanda untuk menghentikan perlawanan kami, antara lain melalui pendekatan psikologi dengan ajakan menyerah dengan disertai janji-janji muluk. Mereka juga mengirimkan undangan kepada saya untuk berunding melalui Asisten Wedana Burneh yang sudah bekerja sama dengan mereka. Tetapi karena Ingat pengalaman Pangeran Diponegoro yang dijebak dengan tipu daya perundingan, undangan tersebut tidak pernah saya layani. Namun kami sepenuhnya menyadari kesulitan yang dihadapi, terutama karena keadaan medan dan topografi alam pedalaman Madura Barat tidak mungkin mendukung kegiatan bergerilya satu batalyon tentara serta sebanyak itu pula satuan perjuangan rakyat secara berlama-lama.

Melihat kenyataan ini dihadapan kami terbentang tiga pilihan, ialah menyerah dan berkooperasi (yang langsung ditolak), terus bergerilya dan menghadapi kehancuran total bersama rakyat mendukung (keadaan yang tidak diinginkan) atau mmenyingkir untuk meneruskan perjuangan ditempat lain (memperkuat perang gerilya di Sumenep atau Jawa). Demi kepentingan kesejahteraan rakyat yang kami perjuangkan, akhhirnya alternatif ketigalah yang secara bulat dipilih dan kami memutuskan untuk meneruskan perjuangan di Jawa serta membentuk pemerintahhan darurat Madura di Jawa. Demikianlah

diputuskan bahwa pada “Akhir bulan September 1947” itu, atau sesudah sekitar tiga bulan bergerilya dipedalaman Madura kami akan hijrah ke Jawa.

Kembali keputusan tidak akan mungkin terlaksana dukungan dan bantuan rakyat Arosbaya. Menghijrahkan satu batalyon dan laskar pejuang serta ulama pemimpinnya dalam keadaan damai dukungan sarana pengangkutan yang memadai bukan merupakan pekerjaan ringan karena memerlukan perencanaan logistik yang rapi. Dalam keadaan perang dengan patroli angkatan laut musuh kemungkinan besar menghadang ditengah jalan dan sarana pengangkutan yang tersedia hanyalah perahu layar milik nelayan atau pedagang menyebabkan semuanya jadi pekerjaan raksasa. Tetapi memang menakjubkan bahwa semuanya dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Anehnya lagi hijrah itu boleh dikatakan telah dilaksanakan tanpa biaya sama sekali, sebab pemilik perahu menolak untuk dibayar padahal mereka ikut mempertaruhkan nyawa jika ditengah laut terpergok oleh musuh. Tidak kurang dari 22 perahu yang dikerahkan dan berangkat pada sewaktu malam yang gelap gulita dari desa Kelampis menuju Tuban. Kemudian ternyata hanya 20 perahu yang sampai dengan selamat, sedangkan yang dua lagi tidak diketahui nasibnya. “Peristiwa ini apabila kita bandingkan dengan sejarah perang Dunia II mirip dengan embarkasi tentara Inggris dan Perancis yang melakukan evakuasi dari Dunkirk ke Inggris”. Untuk mengenang peristiwa tersebut, beberapa waktu yang lalu didirikanlah monumen yang diwujudkan dalam bentuk mushholla “Al-Hijrah” dipantai Kelampis, Bangkalan dimana tempat itu merupakan titik tolak pemberangkatan hijrahnya “Batalyon Hanafi ke pulau Jawa”.

Sesudah melalui jalan panjang akhirnya saya tiba di Blitar serta dipercaya memimpin pemerintahan sipil Madura dipengasingan yang berkedudukan di Lamongan. Sebenarnya waktu itu saya diberi pangkat Bupati oleh Gubernur Jawa Timur dr. Moerdjani. Tetapi tawaran kedudukan ini secara halus saya tolak karena kami berjuang bukan untuk mencari pangkat. Apalagi karena kenaikan itu meloncati pangkat Patih, sehingga pasti dirasakan kurang wajar dan akan menimbulkan penilaian positif yang negatif.

Dipengungsian itu ulama Madura Kyai Haji Amin Jakfar, juga seorang mantan *Daidancho* PETA, ditunjuk mengkoordinasi kegiatan kelaskan pejuang Madura di Jawa. Sesudah Sumenep jatuh kepada Belanda beberapa minggu kemudian bergabung pula Mayor Abu Jamal, Kepala Staff Resimen Jokotole, yang lalu ditugasi mengelola kegiatan tentara Madura yang hijrah ke Jawa. Tentara Madura tersebut kemudian diperbantukan pada Brigade 5 dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.

5. Epilog

Secara sepintas diatas sudah disinggung bahwa kebanyakan tentara dan laskar pejuang Madura kemudian kembali ke Madura sebagai pemenang sesudah dicapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk memperlancar tugas maka saya diberi lagi pangkat militer sebagai Kapten TNI-AD Titular. Sebagai perwira teritorial urusan pemerintahan saya dapat mudah membantu pihak militer di daerah Madura melakukan komunikasi dengan rakyat dalam menghadapi perkembangan perjuangan selanjutnya.

Dengan sendirinya para tentara dan pejuang yang pulang tadi tidak puas dengan keadaan yang mereka jumpai di Madura. Ketidak-puasan itu bertumpu pada kenyataan bahwa adanya Negara Madura sebagai bagian RIS hanyalah berarti melegasasi negara boneka ciptaan Belanda untuk terus mengikat Indonesia pada kepentingan kolonialisme ekonomi mereka. Kami para pejuang kemerdekaan menyadai bahwa Madura yang gersang dan miskin sumber daya itu tidaklah mungkin dapat mandiri dalam membiayai perangkat dan menyelenggarakan pemerintahan negara bagian sendiri. Para tentara, laskar pejuang dan pemuda serta sebagian rakyat Madura segera bergolak untuk membubarkan negara bagian ciptaan Belanda itu. "Karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap resolusi Front Pemuda maka pada tanggal 15 Pebruari 1950, diselenggarakan demonstrasi besar-besaran untuk membubarkan Negara Madura. Yang memegang peranan dalam demonstrasi itu sebenarnya adalah pemuda-pemuda yang tergabung dalam Gerakan Bawah Tanah. Tidak kurang pula pentingnya peran pemuda-pemuda SMP di Pamekasan yang dimotori oleh R. Soedirman

Mertoadikoesoemo dan Slamet Merto. Mereka berdemonstrasi didepan gedung DPR Madura di Pamekasan menuntut supaya dewan segera dibubarkan. Akibat tekanan para pemuda tersebut akhirnya Ketua DPR memenuhi kehendak rakyat. Setelah DPR Demissioner para pemuda kemudian menuntut agar Negara Madura dibubarkan. Wali Negara Madura tanpa banyak komentar segera mmenyerahkan mandatnya. Akhhirnya sebagai puncak perjuangan rakyat untuk membubarkan Negara Madura mendapatkan restu dari Presiden RI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI tanggal 9 Maret 1950 yang intinya pembubaran Negara Madura sekaligus penggabungan Madura kedalam Republik Indonesia. Pembubaran Negara Madura yang mempelopori dan diikuti pembubaran negara-negara bagian lainnya, membuktikan bahwa benar-benar pula mempunyai jiwa patriotisme, republikein yang tidak luntur dan tidak sekedar *noro bunte* (ikut yang menang)". Akhirnya RIS dibubarkan sehingga pada tanggal pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam merenungkan kembali berbagai pengalaman pribadi selama revolusi kemerdekaan itu dan menuangkannya menjadi tulisan memang sering datang pernyataan mengusik "untuk apa semua ini dilakukan?" dalam arti meniti karier yang panjang, saya banyak menelaah pengalaman, pendapat atau tulisan para pendahulu saya sehari-hari. Semuanya ternyata sangat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam memawas diri serta untuk bekal guna berkiprah dikemudian hari terutama dalam menyiapkan para remaja bunga bangsa mengisi fungsinya sebagai calon pemimpin di masa depan. Dengan landasan pemikiran demikian inilah sumbangan tulisan secuil ini saya persiapkan.

Daftar Pustaka

- Abdurachman. 1971 *Sejarah Madura Selayang Pandang*. Sun, Sumenep.
- Abdurachman Amindarmo SP, Hassan M, Adikara I.H.. 1991 *Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Madura*.

- Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Madura, Jakarta.
- Anonim, 1990 *Sejarah Perjuangan Rakyat Madura 1945-1950*. Naskah Tim Penyusun Sejarah Rakyat Madura, Jakarta.
- Noer, M. 1983 Kisah Liku-likunya suatu Perjuangan. Dalam Anonim. *Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan II*. Markas Besar Legiun Veteran, JAKARTA:218-225.
- Rifai, M.A. & Hendrowinoto, N.K.S. 1991. *Mohammas Noer. Yayasan Biografi Indonesia, Jakarta*.
- Rifai, M.A. 1993 *Lintasan Sejarah Madura, Yayasan Lebbur Legga, Surabaya*.
- Touwen-Bouwsma, E. 1991. The Dutch, The Indonesian Republicans and Negara Madura 1945-1950. Makalah dalam *International Workshop on Indonesian Studies 6:Madurese Culture and Society*. Kitlv Leiden.

KEHIDUPAN PERSURATKABARAN DI YOGYAKARTA PADA MASA REVOLUSI FISIK : Sebuah Studi Awal

Suhartinah

I

Pers dalam pengertian luas adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah maupun hasil-hasil penerbitan yang pada pokoknya memenuhi syarat untuk disebarluaskan, terbit secara periodik bersifat umum dan aktual.¹⁾

Makalah ini akan mencoba mengungkapkan episode kecil terutama tentang kehidupan persuratkabaran di Yogyakarta masa revolusi tahun 1945 - 1950.

Pers atau persuratkabaran dikenal sebagai media cetak yang mengantarkan berita dan informasi juga alat komunikasi yang bisa mengungkapkan suasana zaman. Sehubungan dengan hal ini meskipun pada masa revolusi peranannya cukup besar namun belum banyak yang mengungkapkannya khususnya untuk daerah Yogyakarta. Oleh karena itu makalah ini dimaksudkan sebagai studi awal untuk selanjutnya diharapkan ada penelitian yang lebih komprehensif. Dengan dikemukakannya kehidupan persuratkabaran saat itu yang meliputi jaringan sosial sehingga surat kabar tersebut eksis dalam masyarakat akan dapat mengetahui perkembangan yang khas dari pers pada masa revolusi.

Untuk memperoleh hasil penelitian seperti apa yang diharapkan, diperlukan suatu metode yakni pengumpulan data baik mengenai studi

kepastakaan dengan mencermati buku-buku yang ada kaitannya dengan hal ini juga surat kabar, majalah brosur maupun wawancara dengan orang-orang yang mengetahui tentang hal ini meskipun orang tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi di lingkungan pers. Wawancara dilakukan sesuai dengan metode sejarah lisan. Sesuai dengan sifatnya yang kontemporer maka sejarah lisan dapat dipakai sebagai sumber yakni memberi kemungkinan luas untuk menggali suatu peristiwa langsung dari pelakunya yang tidak diketemukan dalam dokumen tertulis. Sejarah kontemporer Indonesia sekitar tahun 1945 - 1950 kebanyakan masih tersimpan dalam ingatan para pelaku dan belum banyak yang menuliskannya. Dengan menggunakan metode sejarah lisan rupanya lebih dekat dengan pengalaman para pelaku, dengan demikian sejarah mampu menggambarkan revolusi sebagai peristiwa manusia biasa secara menyeluruh.²⁾

Agar memperoleh gambaran tentang persuratkabaran di Yogyakarta masa revolusi dalam hal ini akan dikemukakan surat kabar, majalah atau brosur yang ada di Yogyakarta pada masa tersebut serta pesan apa yang dibawakan. Bagaimana cara mendirikan maupun pengelolaannya misal modal dari mana, pengedaran serta sistem penggajian, kerjasama antar masing-masing surat kabar dan instansi pemerintah saat itu.

II

Pers pada zaman revolusi di Yogyakarta seperti di Indonesia pada umumnya berbeda dengan keadaan pers zaman penjajahan Hindia Belanda yang mengenal Pers Ordonantie tahun 1931 yakni mengenai peraturan penerbitan beserta sistem pembreidelan surat kabar. Begitu pula pada zaman Jepang dengan undang-undang nomor 16 tentang pers dan sensor preventif maupun surat izin (SIT). Pers saat itu tidak mengenal sensor maupun surat izin terbit, kemerdekaan pers benar-benar dapat dinikmati. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah pendudukan maupun republik.³⁾

Bersamaan dengan kepindahan pemerintah pusat ke Yogyakarta maka kantor berita Antara pun ikut pindah, begitu juga wartawan-wartawan di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda mereka menyingkir ke daerah republik.

Oleh karena itu di daerah republik yang kecil semacam Yogyakarta bermunculan surat kabar dan majalah seperti jamur di musim penghujan. Ada yang dapat bertahan hidup lama, tetapi tidak sedikit yang hanya hidup selama beberapa bulan atau beberapa kali terbit saja.⁴⁾ Hal ini disebabkan karena kebanyakan berdirinya suatu surat kabar orientasinya bukan ke arah bisnis atau mencari keuntungan finansial melainkan idealisme.⁵⁾

Mengenai warna atau suara surat kabar yang terbit di Yogyakarta kebanyakan bisa dikelompokkan sebagai berikut : surat kabar berhaluan keagamaan, berhaluan nasional atau kebangsaan, berhaluan kepartaian atau menyuarakan suatu partai serta yang tidak jelas haluannya. Hal semacam ini dapat saja terjadi karena sesuai dengan pandangan pengelolanya.

Seperti diketahui di dalam republik yang baru saja berdiri saat itu mulai muncul berbagai organisasi seperti organisasi kelasykaran, organisasi politik yang nanti mengarah ke partai politik. Selain kesadaran berorganisasi masyarakat cukup tinggi dan dukungan idealisme menjadikan setiap organisasi atau kelompok berusaha menerbitkan surat kabarnya. Bagi organisasi politik yang kemudian menjadi partai politik yang mampu menerbitkan surat kabar demi kepentingan partainya pasti akan menerbitkan surat kabarnya sendiri. Pendirian surat kabar ini dengan maksud untuk menarik massa dengan pemberitaan - pemberitaan tentang ideologi atau tujuan politiknya. Sedang partai yang tidak mampu mendirikan atau menerbitkan surat kabar sendiri melakukan kerjasama dengan surat kabar tertentu tanpa surat kabar tersebut secara resmi menyatakan sebagai organ dari partai tersebut.⁶⁾

Di muka telah disebutkan bahwa setiap organisasi atau kelompok menerbitkan surat kabarnya sendiri selain itu sesuai dengan suasana zaman revolusi untuk membangkitkan semangat juang organisasi pejuang pun menerbitkan brosur dan pamlet juga majalah yang berisi cerpen dan sebagainya. Penerbitan semaca ini dimaksudkan untuk hiburan di daerah perjuangan. Berdasarkan beberapa surat kabar yang bisa ditemukan untuk Yogyakarta pada masa revolusi suara surat kabar tersebut adalah sebagai berikut :

Suratkabar berhaluan keagamaan, suratkabar semacam ini dibedakan antara yang berhaluan Islam dan Kristen. Untuk golongan Islam diwakili oleh majalah Suara Muhammadiyah yang bertujuan sebagai alat dakwah, mengumpulkan orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kecakapan menulis, sebagai alat pengumpul dokumen dan media penyebaran agama. Suara Aisiyyah yang juga berbentuk majalah dikeluarkan oleh Aisiyyah yakni bagian wanita dari organisasi Muhammadiyah. Majalah ini bertujuan untuk memajukan kaum wanita agar sederajat dengan laki-laki sesuai tuntutan agama Islam dan sebagai media penyebarluasan ajaran Islam. Dari kalangan Katholik diwakili oleh Praba sebagai media untuk menggagalkan persatuan umat Katholik dan menyebarkan ajaran yang bernafaskan keagamaan.

Suratkabar berhaluan nasional diwakili antara lain oleh majalah Pusara dan Wasita milik Perguruan Taman Siswa. Keduanya banyak memuat tentang pendidikan nasional dan kebudayaan. Semula majalah ini diterbitkan dengan tujuan untuk kalangan sendiri namun pada perkembangan selanjutnya banyak permintaan dari luar kalangan Taman Siswa. Mereka ingin mengetahui khususnya tentang pendidikan dan kebudayaan nasional dan majalah tersebut dinilai cukup tajam pemberitaannya tentang hal ini. Suratkabar Kedaulatan Rakyat yang terbit pertama kali pada 27 September 1945 setelah Sumantoro, samawi dan Bramono berhasil mengambil alih harian Sinar Matahari yang dikelola oleh Jepang. Meskipun suratkabar ini yang mengelola ada yang dari golongan Murba seperti Sumantoro namun tetap netral bukan menjadi koran partai. Sewaktu terjadi pro dan kontra tentang memperoleh kemerdekaan seratus prosen tanpa melalui meja perundingan atau memperoleh kemerdekaan dengan jalan diplomatik yakni melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) sehingga terjadi pertentangan antara pengikut Tan Malaka dan Sutan Syahrir Kedaulatan Rakyat bersama harian nasional tetap berdiri di belakang pemerintah Soekarno - Hatta ? Dalam perkembangannya Kedaulatan Rakyat pada tahun 1948 menerbitkan majalah mingguan ringan berisi bernama Minggu Pagi.⁸¹ Suratkabar harian Nasional didirikan oleh Mr. Sumanang pada 15 November 1946. Suratkabar ini semula berhaluan netral akan tetapi dalam perkembangannya kemudian *berafiliasi* dengan Partai Nasional Indonesia. Harian ini berkantor di Jalan Beji

dicetak di percetakan Mardi Mulyo Jalan Gondamanan yang dahulu sebelum Jepang mencetak harian Sedyo Tomo. Dalam masa revolusi berkembang penerbitan mingguan nasional yang diberi nama *Revue Indonesia* yang hidup hanya sebentar saja. Majalah mingguan Masyarakat yang berkantor di Jalan Malioboro meskipun sebagai pimpinannya adalah tokoh pendidikan nasional berhaluan PNI yakni Sarmidi Mangun Sarkoro, namun haluannya nasional juga.⁹⁾

Beberapa surat kabar yang merupakan surat kabar partai atau paling tidak menyuarakan partai antara lain surat kabar harian Buruh pimpinan Jamal Ali berkantor di Jalan Loji Kecil dicetak di percetakan negara Jalan Gondamanan menyuarakan Partai Komunis Indonesia.¹⁰⁾ Mingguan *Revolusioner* pimpinan Brotokesowo yang kemudian berubah menjadi harian. Semula harian ini bersifat nasional kemudian berubah menjadi komunis setelah kemasukan Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia yang menjadi *onderbouw* PKI dan pimpinannya dipegang oleh Supeno. Harian Suara Ibukota yang pimpinan redaksi dipegang oleh Wikana ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 secara tegas harian ini mendukung gerakan tersebut.¹¹⁾ Majalah Pesat di Pakuningratan pimpinan Sayuti Melik dan S.K. Trimurti banyak menyuarakan partai Murba karena keduanya adalah orang-orang Murba. Selain Pesat juga tabloit Massa yang didirikan olehh Sumanoro sekeluarnya dari penjara karena dianggap tersangkut peristiwa 3 Juli 1946. Tabloit ini berkantor di kediamannya Jalan Gandekan membawa suara partai Murba.¹²⁾ Harian Al Jihat yang dikemudikan oleh Harun Al Rashid dengan nama samaran Firdaus juga mingguan Indonesia Raya pimpinan Zainal Abidin Ahmad berkantor di Jalan Panembahan Senopati menyuarakan partai Masyumi. Hal ini tidak mengherankan karena kantornya juga menjadi satu dengan kantor partai Masyumi.¹³⁾ Harian Patriot didirikan oleh Usmar Ismail pada tahun 1946. Semula harian ini bersifat patriotik kebangsaan tidak berpihak ke manapun namun setelahh masuknya Yusuf Ajitorop tokoh PKI dan berhasil merebut kekuasaan sehingga Usmar Ismail tersingkir, haluannya kemudian berubah membawakan suara Front Demokrasi Rakyat. Mingguan *Dinamika* karena diusahhakan oleh pemuda komunis tentu saja menyuarakan partai komunis. Majalah tengah bulanan Jiwa Islam pimpinan Hhaji Asdi

Narju yang berkantor di Jalan Magomulyo membawakan suara Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).

Selain berhaluan keagamaan, nasional dan kepartaian seperti tadi telah dikemukakan ada juga majalah atau surat kabar yang kurang jelas haluannya seperti Kawan Rakyat yang dikelola oleh Sayuti Melik dan Armiyn Pane. Kebetulan surat kabar ini umurnya hanya pendek yakni hanya terbit beberapa kali kemudian berhenti. Majalah tengah bulanan Api Merdeka yang berkantor di Jalan Tugu Kulon nomor 70 dikelola oleh Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Surat kabar minggu Tentara pimpinan Usmar Ismail yang banyak memuat aspirasi para sastrawan. Majalah kebudayaan Proses pimpinan pelukis S. Sujoyono, Revolusi Pemuda asuhan Immanuel Hutauruk.

Oleh karena hampir semua organisasi khususnya para pejuang mengeluarkan brosur meskipun tidak *ajeg* maka brosur ini sulit diteliti. Pada umumnya brosur tersebut mewakili pendapat yang menerbitkan seperti misalnya suara Pesindo.¹⁴⁾ Bahkan para tahanan politik di penjara Wirogunanpun untuk mengisi waktu dan membangkitkan semangat juang menerbitkan surat kabar Suara Tapa. Surat kabar ini tulisan tangan lengkap dengan rubriknya yang beritanya berasal dari sanak keluarga yang menengok, peredarannya dibaca secara bergantian antar penghuni penjara.¹⁵⁾

Meskipun antara surat kabar satu dengan lainnya berbeda haluan namun ada kesamaannya yakni sama-sama mengabdikan pada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Memang di zaman revolusi segi isi mewarnai persuratkabaran Indonesia. Mereka berpedoman lebih baik mati dari pada dijajah.¹⁶⁾

III

Pada masa revolusi penerbitan surat kabar baik yang berupa surat kabar harian, majalah maupun brosur sangat banyak untuk ukuran saat itu. Siapapun yang berniat menerbitkan surat kabar tanpa memperhitungkan untung-rugi asal memiliki modal pasti akan menerbitkan. Oleh karena itu banyak surat kabar atau majalah dan terbitan-terbitan hanya bertahan hidup sesaat kemudian mati. Hal semacam ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tenaga yang menangani belum ahli di bidangnya baik mengenai redaksi maupun

management perusahaannya. Pada masa revolusi tersebut untuk Yogyakarta persaingan antar surat kabar boleh dikata tidak ada. Mereka menerbitkan surat kabar semata-mata didorong oleh segi idiil yakni mensukseskan perjuangan bangsa tanpa memperhitungkan segi keuntungan. Hidupmatinya surat kabar diseleksi oleh alam artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, bagi yang tidak mampu tentu saja akan mati dengan sendirinya.¹⁷⁾ Hal semacam ini memang bisa dimaklumi karena waktu itu keadaan memang sulit. dalam suasana perjuangan tantangan untuk mengusahakan suatu penerbitan bisa lancar cukup besar. Tantangan tersebut antara lain kesulitan mencari pelanggan, pengadaan kertas serta alat cetak yang dipakai masih sangat sederhana yakni handzet. Oleh karena itu pada waktu tersebut surat kabar yang memiliki oplah sekitar 2000 - 3000 sudah bisa dikatakan besar. Kesulitan pengadaan kertas bisa dimaklumi karena dalam suasana perang, persediaan kertas koran pada waktu itu adalah sisa-sisa import sebelum perang Dunia II yang sebagian telah digunakan pada masa pendudukan Jepang. Usaha memasukkan kertas dari daerah pendudukan Belanda tidak mungkin karena ketatnya blokade musuh. Dalam keadaan demikian maka sebagian besar surat kabar-surat kabar di daerah republik terbit dengan kertas merang. Kertas merang yang digunakan hanya industri rumah tangga sehingga kualitasnya rendah.¹⁸⁾

Untuk mengelola suatu surat kabar pada saat itu diperlukan jiwa pengorbanan yakni tidak memikirkan keuntungan, modal yang cukup. *Ubed* atau trampil dalam management perusahaan. Sebagai contoh surat kabar harian Nasional dapat bertahan meskipun mengalami pasang-surut karena Mr. Sumanang tidak terlalu memikirkan keuntungan, pergaulannya luas, keuangannya mendukung dan terutama sekali *ubed* dalam menangani jalannya perusahaan dibantu saudaranya R.M. Sutio Suryowinoto dan staf yang dapat diandalkan seperti Drs. Marbangun Harjowirgo. Begitu pula harian kedaulatan Rakyat di samping dukungan kedaulatan kerja serta tenaga berpengalaman seperti Sumantoro, Sumawi, Bramono juga didukung keuangan yang kuat dari pengusaha seperti Jamaludin dan Mansur.¹⁹⁾

Kematian Surat kabar kebanyakan oleh faktor dari dalam sendiri yakni pengelolaan yang tidak sepenuhnya, kurang menguasai bidang

redaksi sehingga beritanya kurang menarik, keuangan yang sempit. Pengelolaan tidak sepenuhnya karena di samping giat menulis tajuk rencana, artikel, menghadiri konferensi pers kebanyakan masih berstatus pelajar sehingga masuk kantor bergiliran.²⁰⁾ Keuangan yang sempit misalnya dialami oleh Suara Aisyiyah sehingga penerbitannya tersendat-sendat namun tidak sampai mati walau hanya tipis lembarannya dan tidak *ajeg*. Hal ini disebabkan Suara Aisyiyah hidupnya hanya tergantung dari sokongan para pembaca. Pada waktu itu mengalami penurunan pemasukan uang karena pelanggan banyak yang pindah alamat atau berhenti berlangganan tanpa memberi tahu. Nasib serupa diderita oleh majalah Wanita milik Perguruan Taman Siswa yang tidak dikomersialkan melainkan hanya menunggu sumbangan dari anggota Taman Siswa khususnya para pendidik. Berbeda halnya dengan majalah Taman Siswa yang lain yakni Pusara yang masih dapat bertahan hidup, majalah Wasita ini kemudian mati.²¹⁾

Mengenai hidupmatinya surat kabar di masa revolusi yang ada kaitannya dengan masalah keuangan perlu diketahui pula tentang sistem penggajian di kalangan persuratkabaran saat itu. Di muka telah disebutkan bahwa pada saat revolusi orang mendirikan surat kabar lebih didorong oleh idealisme bukan komersial apalagi saat itu dalam keadaan sulit. Pada umumnya orang bekerja di perusahaan surat kabar tidak memikirkan soal gaji. Asal ada uang kemudian dibagi, sehingga besar kecilnya gaji tidak menentu bahkan kadang wartawan beberapa kali penerbit tidak digaji karena belum ada uang. Beruntung pada waktu itu kesadaran masyarakat terhadap kehidupan persuratkabaran sudah ada, mereka cukup tenggang rasa membayar sesuai ketentuan dengan dasar jangan merugikan penerbit. Kebanyakan wartawan tidak menggantungkan hidup dari tulisannya. Pada umumnya mereka mempunyai pekerjaan lain misalnya guru sehingga tidak begitu memikirkan berapa uang yang diperoleh dari tulisannya. Baru sesudah pengakuan kedaulatan mereka mulai memikirkan tentang gaji. sewaktu perjuangan ini apabila ada uang diutamakan penggajian karyawan di bagian percetakan, kemudian administrasi baru wartawan.²²⁾

Pada masa revolusi tersebut kartu pers sudah meskipun sangat sederhana digunakan sebagai tanda pengenalan bagi wartawan sehingga

mereka mudah untuk *mengkoover* berita ataupun suasana mewah. Ada kalanya seorang wartawan merasa *rikuh* sewaktu diundang menghadiri acara makan oleh presiden dalam acara kenegaraan karena tidak memiliki kaus kaki. Begitu sederhana keadaan saat itu apabila mencari berita ke Gedung Agung atau ke pelbagai kementerian yang harus berpakaian resmi hanya mengenakan stelan bahanya dari kain *blacu*. Merupakan hal yang umum saat itu apabila mengejar berita dengan naik sepeda ban mati, naik *andong* bahkan tidak jarang hanya berjalan kaki. Mereka tidak mengeluh karena sadar akan pengabdian serta bersedia menghadapi pahit getirnya perjuangan. Koran atau majalah yang mereka isi berguna bagi pejuang-pejuang di front selain pembaca di daerah republik. Sebagai prajurit pena jasanya tak kalah dengan mereka yang langsung berhadapan dengan musuh. Mereka mengorbankan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta menangkis hasutan-hasutan pihak Belanda melalui tulisannya.

Sebagai bukti tentang hal ini adalah siaran kilat yang dikeluarkan oleh harian Kedaulatan Rakyat. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 25 November 1945 terjadi pengeboman gedung siaran radio Yogyakarta dan gedung siaran radio Surakarta oleh pesawat sekutu. Harian kedaulatan Rakyat merasa terpanggil untuk mengorbankan semangat rakyat dalam melawan musuh. Sebab dengan dibomnya gedung siaran radio berarti membungkam siaran radio dan mematahkan semangat perjuangan rakyat. Mengingat tugas yang dipikulnya dengan segera setelah pesawat meninggalkan udara kota Yogyakarta menerbitkan siaran kilat dengan kepala berita "Semangat Rakyat Tak Dapat Dipatahkan".

Yogyakarta 25 November 1945 "Ksatria musuh dengan cara yang sangat gagah berani" pagi ini pukul 8.30 dengan menggunakan dua pesawat pembom telah berhasil merusakkan dengan bom-bomnya Gedung Siaran Radio Kita di Yogyakarta. Mungkin Gedung Siaran Radio Kita di Surakarta telah diserang pula. Musuh telah berhasil merusakkan gedung-gedung yang tak bernyawa itu dengan maksud mematahkan alat propaganda kita dan berhasil menewaskan tujuh orang penduduk yang tak berdosa serta beberapa orang mendapat luka-luka. Musuh menyangka bahwa rusaknya semangat rakyat Indonesia di Yogyakarta dan Surakarta. Tidak 1 sekali-kali tidak !!! Semangat rakyat Indonesia tak dapat dipatahkan dengan bom atau apapun juga. Malahan dengan terjadinya kebuasan musuh ini semangat rakyat tambah menyala-nyala. penduduk Yogyakarta dan Surakarta !!! Bulatkanlah hasrat dan tekad untuk

mempertahankan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka dan tetap merdeka.
merdeka !²³⁾

Kerjasama antar penerbitan surat kabar bisa diketahui dari adanya aturan para wartawan tidak boleh merangkap kerja pada surat kabar lain kecuali surat kabar luar daerah. Antar penerbit saling tukar secara gratis hasil cetakannya. Sedang kerjasama dengan instansi pemerintah adalah surat kabar menyebarluaskan berita tentang kebijaksanaan dan apa yang terjadi dengan instansi tersebut yang perlu diketahui oleh masyarakat. Setiap instansi pemerintah diberi secara gratis hasil penerbitannya khususnya Kementerian Penerangan yang ada kaitannya dengan hal ini. Kerjasama yang lain adalah menjalin hubungan yang erat dengan instansi pemerintah dengan jalan memberi dispensasi Humas untuk mengisi rubrik secara tetap. Pada masa tersebut pemerintah juga telah memperhatikan kesejahteraan wartawan sesuai dengan kemampuan yakni oleh Jawatan Kereta Api anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diberi jatah naik kereta api kemana saja dengan gratis. Bahkan wartawan diberi kesempatan untuk ikut menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Untuk wartawan surat kabar Yogyakarta diwakili oleh M. Wonohito dari surat kabar Kedaulatan Rakyat.

Catatan

- 1) Suratmin, *Sejarah Perkembangan Persuratkabaran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1908-1945*. (belum diterbitkan). hal.4.
- 2) Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hal. 25 - 26.
- 3) Yusac M. R. Wirosbroto, bekas wartawan Minggu Pagi kemudian memimpin harian Pelopor di Yogyakarta, *wawancara* Nopember 1993.
- 4) *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Djalan Tanah abang III no. 23 Djakarta. hal. 120.
- 5) Ki Suharto, pengelola museum Dewantara Krti Griya, *wawancara* 14 September 1994.

- Sugiyono, S.H., Pimpinan Kantor Berita Nasional Indonesia Cabang Yogyakarta, *wawancara* 14 September 1994.
- R. Subadi, wakil Pimpinan Redaksi Harian Berita Nasional, *wawancara* 18 September 1994.
- 6) H. Rosihan Anwar, *Seniman Dan Wartawan Dalam Perjuangan 1942 - 1940*, Seminar Sejarah Tanggal 20 - 21 Desember 1989 di Yogyakarta, diselenggarakan oleh MSI Cabang Yogyakarta bekerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, hal. 10.
 - 7) Ibid.
R. Subadi, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Berita Nasional, *wawancara* 18 September 1994, sebagai bahan pembanding.
 - 8) Subagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia*, hal. 407.
 - 9) Sugijono, S.H., *wawancara* 14 September 1994 dan Yussac M.R., *wawancara* November 1993
 - 10) Pruis Kartosentono, *wawancara* November 1993 selaku bekas karyawan percetakan negara.
 - 11) H. Rosihan Anwar, *ibid*.
Wawancara dengan R. Subadi tanggal 18 September 1994, lihat Suhartinah Sudiyo, *Perkembangan Persuratkabaran Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Revolusi 1945-1950* (belum diterbitkan), hal.25
 - 12) Sugijono, S.H., *wawancara* tanggal 14 September 1994 dan R. Subadi *wawancara* tanggal 18 September 1994.
 - 13) *Ibid*.
 - 14) R. Subadi, *wawancara*, tanggal 18 September 1994.
 - 15) Sugijono, S.H. *wawancara* tanggal 14 September 1994.
 - 16) Subagijo I.N., *Jagat Wartawan Indonesia*, *Ibid*.
 - 17) Sugijono, S.H., *wawancara* tanggal 14 September 1994 dan R.Subadi, *wawancara* tanggal 18 September 1994.
 - 18) *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, hhal. 17.

- 19) Sugijono, S.H., *wawancara* tanggal 14 September 1994 dan Yussac M.R. Wirosubroto, *wawancara* November 1993.
- 20) *Garis Besar perkembangan Pers Indonesia*. op.cit. 96.
- 21) Ki Suharto, *wawancara* tanggal 14 September 1994. lihat Suratuin, sejarah perkembangan persuratkabaran
- 22) R. Subadi, *wawancara* tanggal 18 September 1994.
- 23) Sugijono, S.H., *wawancara* tanggal 14 September 1994. Sedang teksnya diambil dari *Kedaulatan Rakyat*, Kamis Legi 29 September 1994 tulisan Sugijono, S.H. hanya ejaannya telah disempurnakan.

Daftar Informasi

1. Nama : Pruis Karto Sentono
 Umur : 78 tahun
 Pekerjaan : Mantan Pegawai GRAFIKA
 Alamat : Ledok Ramakan, Yogyakarta
2. Nama : Sugijono, S.H.
 Umur : 68 tahun
 Pekerjaan : Pimpinan Kantor Berita Nasional Indonesia
 Cabang Yogyakarta
 Alamat : Pakel Baru 35, Yogyakarta
3. Nama : R. Subadi
 Umur : 60 tahun
 Pekerjaan : Wakil Pemimpin Redaksi Harian Berita
 Nasional
 Alamat : Suryoputran PB III/107, Yogyakarta
4. Nama : Yussac M.R. Wirosubroto
 Umur : 59 tahun
 Pekerjaan : Mantan Pimpinan Harian pelopor Yogya
 Alamat : Mesan, Sinduadi, Mlati, Sleman
5. Nama : Ki Suharto
 Umur : 69 tahun

Pekerjaan : Pengelola Museum Dewantara Krti Griya
 Alamat : Jl. Tamansiswa 31, Yogyakarta

Daftar pustaka

- Abdurachman Surjomihhardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan R.I., Jakarta, 1980.
- H. Rosihan Anwar, *Seniman Dan Wartawan Dalam Perjuangan 1942-1950*, Seminar Sejarah "Peranan Generasi Muda Dalam Perjuangan Bangsa 1942-1950" Yogyakarta 20-21 Desember 1989, Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, P.T. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta, 1994.
- Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, Djalan Taman Tanah Abang III no. 23. Djakarta, 1971.
- Soebagijo, I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, Dewan Pers, Jakarta. 1977.
- , *Jagat Wartawan Indonesia*, P.T. Gunung Agung. Jakarta. 1981.
- Suhartinahh Sudijono, *Perkembangan Persuratkabaran Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Revolusi 1945-1950*, (belum diterbitkan), 1992.
- Suratmin, *Sejarah Perkembangan Persuratkabaran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1908-1945*, (belum diterbitkan). 1992.
- Sugijono, *Harian Kedaulatan Rakyat Lahir Dari Kawah Condroidimuko*, Kedaulatan Rakyat Kamis Legi 29 September 1994.

PERANAN PERS PADA MASA REVOLUSI FISIK DI YOGYAKARTA TAHUN 1945--1949

Suratmin

1. Latar

Sebelum sampai pada uraian pers masa Revolusi fisik 1945-1949, baiklah kiranya dikemukakan secara sekilas tentang keadaan pers sebelumnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh dalam mengungkap perjuangan bangsa Indonesia, khususnya melalui pers sebagai medianya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan pers sangatlah penting artinya dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Media pers kita dijadikan sarana menyebarluaskan paham kebangsaan dan menentang segala bentuk kedholiman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini telah disadari oleh Sutomo dan kawan-kawannya saat mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1980. Melalui pers digambarkan bagaimana nasib bangsa Indonesia selama penjajahan Belanda. Berita itu secara terus menerus dibicarakan serta dimuat dalam sebuah surat kabar dwi bahasa (bahasa Jawa dan Melayu) yang terbit di Yogyakarta bernama "Retnodumillah". Surat kabar ini terbit sejak tahun 1895 yang semakin berkembang dibawah redaktornya Dr. Wahhidin Sudirohusodo.¹

Surat kabar atau majalah jelas merupakan sarana komunikasi yang utama dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan membangkitkan

semangat perjuangan guna mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu sejak adanya keputusan penguasa kolonial menghapus pra sensor mulai tahun 1906, maka wartawan Indonesia memperoleh peluang untuk menerbitkan surat kabar sendiri.

Dalam alam penjajahan kolonial Belanda nasib pers dan wartawan pergerakan Indonesia berbeda dengan pers milik Belanda dan Cina. Pers Belanda dan Cina umumnya lebih unggul secara material dibanding pers pribumi. Ditinjau dari segi ideal perbedaan tersebut lebih tajam. Sejak pergerakan nasional pers dan wartawan Indonesia memenuhi dua syarat pokok.

Pertama, memperjuangkan cita rasa kebangsaan dengan motivasi dasar menegakkan kemerdekaan guna mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Kedua, mengusahakan keadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pers dalam kerangka perjuangan kebangsaan tersebut.² Nasib yang merundung bangsa Indonesia akibat kekejaman pemerintah kolonial menyebabkan bangsa Indonesia terbenam dalam duka, gelap gulita. Kaum pergerakan kebangsaan yang memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan diliputi juga iklim sunyi senyap karena ratusan pemimpin ditangkap dan dianiaya. Namun semangat serta tekad yang membaja dari kaum pergerakan membawa angin segar, membangkitkan pemuda pelajar kita tentang harga dirinya harus mendapat tempat yang layak sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu walaupun mereka sengsara, ditindas, dan dianiaya telah satu jiwa, satu tekad, serta hasrat untuk merdeka, maka Belanda tidak mampu menindas hasrat merdeka dari para pejuang kita. Pers kita tidaklah mati, karena pers itu merupakan jiwa dan semangat mereka. Lain halnya dengan pers Belanda yang bebas bergerak dan berenang dalam kemewahan, mendapat sokongan dari kapitalis Belanda yang melimpah-limpah. Kantor Berita Aneta merupakan sumber berita mereka.

Pejuang pena bangsa kita insaf dan sadar bahwa pers merupakan senjata tajam yang penting untuk membangkitkan dan mengobarkan semangat juang. Dalam keadaan yang demikian itu A.M. Sipahuntar, Sumanang dan Adam Malik merintis berdirinya kantor berita usaha bangsa sendiri bernama "Antara" lainnya ialah Pandhu Kartawinata.

Cita-cita mulia itu kadang-kadang kandas di tengah jalan karena kita tidak beruang, pula tidak ada alat. Kantor Berita nasional Antara tersebut untuk memperkuat jaringan pers yang sedang berjuang menegakkan kemerdekaan bangsa kita waktu berdiri. Kantor Berita Nasional Antara hanya bermodalkan satu meja dan satu buah mesin ketik disertai semangat membaja. Sipahutar dan kawan-kawannya bekerja membanting tulang dengan tekad bulat disertai keberanian dan kejujuran. Dengan berdirinya kantor Berita Antara itu gerakan rakyat terberita gegap gempita. Hal ini merupakan saingan Aneta. Maka tidak mengherankan apabila Aneta tidak mau memuat berita yang merupakan kegiatan pergerakan kita.

Berdirinya kantor berita nasional Antara banyak dikunjungi kaum pergerakan, partai, dan organisasi. Mereka beramai-ramai datang menyatakan pemikirannya. Bahkan sebelum berdirinya kantor berita Antara, Sipahhutar, Sumanang dan tokoh-tokoh lainnya sering menyalurkan berita-berita kepada berbagai surat kabar nasional dan ternyata usaha tersebut mendapat sambutan baik. Maka berdirinya kantor berita Antara dengan prinsip membantu surat-surat kabar nasional yang lemah dan membutuhkan sumber-sumber perikabaran yang murah. Dan berdirinya Antara membuat khawatir Aneta karena merasa mendapat saingan, maka mereka berusaha memasang ranjau dan rintangan. Walaupun demikian kerabat Antara tetap teguh, kuat dan awas serta waspada dan dengan tenang berjuang sampai mendaratnya Jepang. Mereka berkeyakinan bahwa usahanya akan tumbuh dan berkembang abadi.

Semuanya bekerja terus bahu-membahu dengan peralatan yang serba kurang, namun segala kekurangan uang dan peralatan itu tidak membuat kendor, karena mereka bekerja dan berjuang dilandasi dengan keikhlasan berkorban, Akhirnya perjuangan mereka diakui rakyat.

Kehadiran dan pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 membawa akibat yang tragis terhadap kehidupan pers dan juga organisasi-organisasi perjuangan. Antara yang merupakan pusat informasi dan menyampaikan pemikiran yang akan dilansir kepada masyarakat ditutup Jepang. Antara diharuskan merubah namanya menjadi *Yashika*. Sedang selanjutnya dijadikan bagian dari kantor

berita Jepang Domei. Surat kabar Belanda dan Cina dilarang terbit. Panglima militer Jepang kemudian menerbitkan sejumlah surat kabar dengan cara mengubah nama-nama surat kabar pribumi sesuai dengan keinginannya.³ Sensor dilakukan atas segala percetakan, bahkan berita-berita dan karangan-karangan disaring dahulu oleh petugas Domei mengadakan pemeriksaan kedua dan membubuhi paraf.⁴ Dalam prakteknya surat-surat kabar Jepang jurnalisnya bukan wartawan-wartawan kita, tetapi mereka hanyalah sebagai pegawai semata. Namun para wartawan pergerakan tetap berupaya menanamkan pesan-pesan berwarna nasionalisme.⁵ Pesan-pesan itu ada diantara berita dan tulisan yang dimuat dalam pers. Dengan demikian wartawan pergerakan telah menunaikan tiga tugas sekaligus. Pertama, menggalang semangat perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan, Kedua, menyumbang bagi bahasa persatuan Indonesia lebih lanjut, dan ketiga, memantapkan pengalaman dan ketrampilan di bidang jurnalistik dan penerbitan pers untuk kepentingan hari depan.⁶

Perlu dikemukakan disini bahwa salah satu surat kabar yang diterbitkan Jepang di Jakarta adalah *Asia Raja* dengan redaktur Sukarjo Wiryopranoto, R. Winarno A. Cokroaminoto, dan BM. Diah. Di Bandung *Tjahaja* dengan redaktornya Oto Iskandar Dinata, sedang di Yogyakarta Sinar Matahari dipimpin oleh Rujito, RM. Sutio, dan RM. Gondoyuwono dari keluarga pakualam.

Dalam masa pendudukan Jepang kerabat Antara bekerja diawasi militer, tetapi mereka tetap utuh dan kukuh berjiwa nasional. Kerabat Antara secara illegal mencari jalan dengan menyelundup. Mereka adalah tenaga Antara yang dipakai Domei untuk berhasilnya perjuangan Jepang, sedang lainnya mengadakan gerakan di bawah tanah. Kerjasama itu disebut juga dengan gerakan terbuka yaitu membentuk organisasi pendidikan dan kemiliteran atas petujuk Jepang, sedangkan gerakan di bawah tanah antara lain termasuk meningkatkan persatuan para pemuda dan mengadakan hubungan dengan pihak Sekutu.⁷

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang akhirnya sampailah saatnya bangsa Indonesia kepada hari yang berbahagia yaitu jatuhnya Jepang dan disusul proklamasi kemerdekaan Indonesia.

yang dilakukan oleh Sukarno dan Hatta atas wakil bangsa Indonesia. Hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jum'at Legi 10 Ramadhan berkumandanglah berita proklamasi itu keseluruh penjuru dunia. Mereka yang mendengar berita itu terkejut, hati berdebar, dan gemetar, disertai rasa syukur kehadiran Allah SWT. Berita proklamasi disiarkan melalui telepon, kawat, radio dan dibuat pamflet. Walaupun Jepang marah-marah karena tersiarnya berita proklamasi dan berita harus dicabut, tetapi kerabat Antara bersikap tegas, menolak pemerintah Jepang itu.

2. Pers pada Sekitar Proklamasi

Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa Jepang mengadakan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai. Wartawan Indonesia yang dituduh melakukan gerakan di bawah tanah dan ditangkap Jepang antara lain Herusukarto, Subekti, Tabrani, Sayuti Melik, SK Trimurti, dan Kusen yang meninggal dalam penjara Jepang.⁸

Teks Proklamasi telah disiapkan secara ketat tanggal 16 Agustus dan baru selesai tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Konsep naskah proklamasi dalam tulisan tangan Bung Karno kemudian disalin dan diketik oleh wartawan Sayuti Melik sebelum dibacakan tanggal 17 Agustus 1945.

Karena desakan pemuda dan atas pelarangan tentara Jepang dalam segala bentuk kegiatan, maka pendiri-pendiri republik memutuskan untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menurut Hatta selesai merumuskan teks proklamasi yang singkat itu kepada para pemuda dari kalangan wartawan, terutama BM. Diah yang hadir pada pertemuan 16 Agustus malam, dia berpesan supaya teks proklamasi tersebut diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.⁹

Khusus kepada wartawan pergerakan yang bertugas di Domei ditugaskan untuk menyiarkan berita proklamasi keseluruh penjuru dunia. Di samping naskah proklamasi, juga dirumuskan naskah dasar negara Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar sekaligus dengan Batang Tubuh Undang-undang Dasar tersebut, serta penetapan berlakunya. Dengan demikian dalam waktu dua hari

para pemimpin Indonesia telah memutuskan dua ketetapan yang revolusioner.

Dalam semua kegiatan penting mengenai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama bulan Agustus sejumlah wartawan pejuang ikut melibatkan diri secara aktif. Selain Bung Karno yang tercatat sebagai penulis di Benteng Priangan, pemimpin redaksi *Fikiran Rakjat* dan lain-lain serta Bung Hatta yang menulis untuk *Daulat Ra'jat* dan pernah memimpin Oetoesan Indonesia, dapat ditambahkan nama-nama seperti Sukarjo Wiryopranoto, Iwa Kusumasumantri. Ki Hadjar Dewantara, Otto Sikandardinata, GSJ. Ratulangi, Adam Malik, BM. Diah, Sayuti Melik, Syahrir dan beberapa orang lagi.¹⁰

Untuk menolak anggapan bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang, maka Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi mengatakan dalam pengantarnya bahwa bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang guna mencapai kemerdekaan tanah air. Pers nasional yang terbit dan menyiarkan proklamasi antara lain Kantor Berita Antara dengan pemasangan spanduk. Harian *Soeara Asia* Surabaya adalah harian pertama yang menyiarkan proklamasi. Berita utama *Harian Ra'jat*, Jakarta, edisi pertama 1 November 1945 antara lain menuliskan Kabinet *Soekarno Tetap Tegoeh*. Edisi pertama Berita Indonesia Jakarta tanggal 6 September 1945, *Soeara Ra'jat* Surabaya 5 Oktober 1945 memuat maklumat-maklumat pemerintah Republik Indonesia. *Perwarta Deli*, Medan terbit kembali setelah proklamasi, edisi 19 Oktober 1945. Surat kabar di Banda Aceh terbit setelah proklamasi adalah *Semangat Merdeka*, edisi tanggal 23 Oktober 1945. Demikian juga Madikin Wonohito, Pimpinan Redaksi Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta yang terbit setelah proklamasi kemerdekaan.

Demikian proklamasi kemerdekaan yang diucapkan Bung Karno tanggal 17 Agustus 1945 disambut gagap gempita oleh seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia berdiri lengkap dengan Presiden dan Wakil Presidennya. Dimana-mana diadakan rapat-rapat raksasa untuk lebih mengeratkan persatuan dan menggembleng semangat mempertahankan kemerdekaan. Dimana-mana terjadi perebutan dan perlucutan senjata Jepang oleh rakyat Indonesia. Berita proklamasi dirasakan suatu kebahagiaan batin luar biasa bagi bangsa Indonesia

umumnya, dan oleh para pejuang khususnya, karena hal semacam itu belum pernah dialami. Hati lega bebas, karena merasa menjadi bangsa merdeka, mengatur rumah tangga sendiri, tidak selalu diburu dan ditekan para penguasa Jepang.

Poster pertama sesudah proklamasi di kantor Jawa Hoko Kai bertambah ramai sekali dan menjadi pusat perhatian dan pertemuan berbagai golongan masyarakat. Di tempat ini berkumpul orang-orang politik, tokoh-tokoh masyarakat, seniman-seniman dari kalangan sastra, sandiwaran, pelukis dan lain-lain.¹¹

Pada suatu hari bertempat di kantor Jawa Hoko Kai jalan Budi Utomo Lapangan banteng Bung Karno memanggil Sudjojono sebagai kepala seksi kebudayaan. Ternyata di tengah-tengah kesibukannya itu Bung Karno menyampaikan idenya kepada Sudjojono untuk membuat poster sekaligus dengan tema poster itu. Setelah poster itu dimasak oleh Sudjojono, maka ide dan tema poster itu diserahkan kepada Affandi untuk dibuat gambarnya. Affandilah pelaksana pembuatan poster itu dengan model Dullah. Poster itu dibuat dengan cat minyak (cat gambar berukuran kurang lebih 80 cm x 100 cm, dua warna merah dan hitam dasar putih. Poster itu menggambarkan seorang pemuda yang membawa bendera merah putih berkibar di belakang kepalanya sambil mengangkat tangannya yang masih kelihatan ada rantai borgol yang putus sambil mulutnya menganga berteriak.¹²

Poster itu dibuat hanya dalam waktu yang tidak lama dengan gaya *realisme impresionisme*. Setelah poster itu selesai, Sudjojono, Affandi dan Dullah kebingungan tidak dapat menemukan kata-kata untuk dituliskan pada poster itu. Tidak disangka dari jauh muncul penyair Chairil Anwar bahwa yang jalannya terseok-seok dan matanya merah. Sudjojono cepat-cepat memanggil Chairil Anwar untuk dimintai bantuan membuat kata-kata yang akan dituliskan pada poster itu. Chairil Anwar nampak merenung sebentar, lalu mengangkat tangannya ke atas menirukan gambar poster itu sambil berteriak “Boeng. Ajo Boeng”. “Nah, gitu” kata Chairil Anwar.¹³ Ketiganya merasa cocok, maka oleh Affandi kata-kata itu dituliskan pada poster bagian bawah. Dullah mengatakan “Inilah poster pertama sesudah proklamasi. Saya kira tidak akan ada poster lain yang mempunyai proses sejarah yang

begitu unik dan luar biasa seperti poster itu. Coba kita simak: ide membuat poster sekaligus temanya dari Bung Karno, seorang Presiden, lalu dimatangkan dengan Sudjojono, seorang pelukis terkenal yang banyak jasanya dibelantara seni lukis Indonesia, penggarapannya diserahkan kepada Affandi, sedang kata-katanya oleh seorang penyair kenamaan Chairil Anwar.¹⁴

Sesudah selesai poster itu lalu diperbanyak sebanyak mungkin dengan cara diblok. Yang memperbanyak poster itu : Dullah, Sudarso, Trubus, kemudian menyusul Suromo, dari pagi sampai sore dengan mendapat jatah nasi sebungkus untuk makan siang. Meskipun mereka berempat sudah bekerja keras untuk memperbanyak poster itu, tetapi waktu tetap tidak cukup, habis dan kurang terus karena setiap rombongan utusan dari daerah-daerah pulangnya selalu membawa poster itu untuk diserahkan di daerahnya masing-masing.

Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah padahal Dulla berempat tidak lagi dapat mencukupi, maka oleh Suwiryo, walikota Jakarta pada waktu itu, diperintahkan kepada pelukis Abdulsalam untuk membuat klise yang terbuat dari cukilan kayu dua warna: merah dan hitam, persis dengan warna asli posternya. Klise cukilan kayu itu berukuran sekitar 25 cm x 30 cm. Kemudian dicetak dipercetakan. Dengan demikian poster itu telah dapat menjangkau daerah yang lebih luas karena jumlahnya menjadi berlipat ganda.¹⁵

Oleh karena itu di daerah-daerah sendiri juga bermunculan poster-poster perjuangan yang mengajak rakyat untuk tegar membela kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan. Di Yogyakarta juga muncul poster dengan tulisan "Le ajo le", yang dibuat berulang kali oleh pelukis yang tergabung dalam PTPI di Yogyakarta.¹⁶

Kecuali Dullah, Sudarso, Trubus dan Suromo di bekas kantor Jawa Hoko Kai terus memperbanyak poster "Boeng Ajo Boeng", maka pelukis Mohtar Apin dan pelukis Suromo dengan beberapa teman menulis gerbong-gerbong kereta api yang berada di setasiun-setasiun Manggarai dan lain-lain yang akan berangkat ke segala jurusan dengan kata-kata yang membangunkan dan mengobarkan semangat perjuangan seperti : Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka, berjuang sampai titik darah penghabisan dan lain-lain.

3. Pers Lokal di Daerah Yogyakarta

a. Media Cetak

Berbicara tentang pers Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikaitkan dengan revolusi, khususnya media cetak antara lain *koran*, *majalah*, *poster* dan *pamflet*. Sebagaimana kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi kenyataan sejarah pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi disiarkan oleh Marconis dan wartawan kantor berita Domei secara sembunyi-sembunyi, tetapi akhirnya tersebar secara luas. Berita itu ditangkap di Kantor Domei Cabang Yogyakarta pukul 12.00.¹⁷ Hari itu Jumat, maka berita yang menggembirakan itu dapat disebarluaskan kepada orang-orang yang sedang mengikuti sholat Jumat di Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Pakualam. Selanjutnya dengan cepat tersebar di kalangan masyarakat, sampai di kampung-kampung dan desa. Pada sore harinya Ki Hadjar Dewantara dengan berkendara sepeda, memimpin pawai murid Taman Siswa di jalan-jalan besar dalam kota untuk menyampaikan berita kemerdekaan kepada masyarakat.¹⁸ Namun sejauh itu masyarakat belum menyadari betul apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan berita itu di samping kegembiraan mereka juga bingung, karena waktu itu melihat kenyataan bahwa Jepang masih berkuasa. Bendera Hinomaru berkibar, dan kantor-kantor pemerintah masih diduduki orang-orang Jepang. Bala tentara Jepang di dalam kota masih bersenjata lengkap.

Baru pada tanggal 19 Agustus 1945 berita proklamasi kemerdekaan tersebar luas, setelah dimuat dalam surat kabar *Sinar Matahari* hari itu juga. Dalam hal ini Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang memerintah di Yogyakarta segera tanggap terhadap peristiwa penting itu. Maka pada tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta menyampaikan ucapan selamat atas berdirinya negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh itu menjadi presiden dan wakil presiden. Surat kabar *Sinar Matahari* yang terbit di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat sambutan Sultan atas pernyataan kemerdekaan Indonesia itu yang isinya antara lain :

Sekarang kemerdekaan telah berada ditangan kita, telah kita genggam, nasib noesa dan bangsa adalah ditangan poela, tergantung pada kita sendiri. Kita vapoos mengisjafi, bahwa lahirnja Indonesia Merdeka itoe dalam masa kegentingan. Maka semoea tiada ketjoecalinja, haroes bersedia dan sanggoep menjampingkan kepentingan masing-masing, oentoek kepentingan bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan noesa dan bangsa. Sekarang boekan waktoenja mengemoekakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan paham. Tiap-tiap golongan haroes sanggoep menjampingkan kepentingannja, sanggoep oentoek mentjapai persatoean jang baroe dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapat sendjata oentoek memperjoekangkan kemerdekaannja, boeat menjelesaikan tanggoengjawabnja terhadap angkatan-angkatan bangsa Indonesia jang akan datang dan membikin sedjarah jang gemilang.¹⁹

Pemerintah pusat memahami aspirasi berupa dukungan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII beserta seluruh rakyat Yogyakarta yang besar itu, maka pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan kedudukan Daerah Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa setingkat dengan daerah tingkat satu (propinsi). Piagam pemerintah pusat itu disampaikan pada tanggal 6 September 1945, dan sebagai utusan Presiden Republik Indonesia ditunjuklah Menteri-menteri Negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis.

Pengakuan serta kepercayaan pemerintah pusat berlanjut dengan tekad Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII mengatur pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu beliau berdua segera mengeluarkan amanat yang termuat dalam harian *Kedaulatan Rakyat* pada tanggal 5 Oktober 1945 guna mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Amanat beliau tersebut sebagai berikut :

Amanat

Sri Padoeka Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soeltan

Kami Hamengkubowana IX, Soeltan Negari Ngajokjakarta Hadiningrat menjatakan :

1. Bahhwa Negari Ngajokjakarta jang bersifat keradjaan adalah daerahh istimewa dari negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang kekoeasaan dalam negari Ngajokjakarta Hhadiningrat, dan oleh karena itoe berhoehoeng dengan keadaan pada dewasa ini segala oeroesan pemerintahan dalam negari Ngajokjakarta Hadiningrat moelai saat ini ditangan kami dan kekoeasaan-kekoeasaan lainnja kami pegang seloerochnya.
3. Bahwa perhoehoengan antara negari Ngajokjakarta Hadiningrat dengan poesat atas negari kami langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia.

Kami memerintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam negari Ngajokjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat kami ini.

Ngajokjakarta Hadiningrat
28 Poeasa Ehe 1876 ataue
5 September 1945
Hamengkoe Boewana IX.²⁰

Dengan dimuatnya berita-berita penting dalam peristiwa bersejarah itu dapatlah dikatakan bahwa surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memiliki andil yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari rongrongan musuh, dan juga dapat dikatakan bahwa *Kedaulatan Rakyat* sebagai surat kabar perjuangan. Dirunut dari awalnya *Kedaulatan Rakyat* merupakan pers tempat menampung pejuang bangsa kita. Kelahirannya dalam suasana negara berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang telah berhasil mengenyahkan Dasar Negara dan Undang-undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden masih berperan aktif menganjurkan dibentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Dalam suatu keputusan penting dalam rapatnya tanggal 22 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

- (1) Komite Nasional Pusat maupun Daerah harus dapat menampung serta mempersatukan rakyat. Oleh karena itu anggotanya terdiri tokoh-tokoh dari segala golongan dan aliran. KNI harus dapat menggerakkan rakyat serta bertugas mempertahankan negara dari penjajahan Belanda kembali ke Indonesia. walaupun waktu itu Jepang di negerinya telah menyerah kepada Sekutu, tetapi di Jawa mereka masih bersenjata lengkap, menguasai kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan.
- (2) Keputusan penting yang kedua agar segera dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di pusat maupun daerah untuk membantu mengamankan negara.²¹

Rakyat menyambut baik dibentuknya KNI dan BKR. Selanjutnya partai-partai di Yogyakarta bersama-sama menggerakkan rakyat. Namun perlu dikemukakan di sini bahwa walaupun KNI di DIY telah terbentuk dari berbagai golongan dan aliran tetapi tanpa keikutsertaan Sri Sultan Hamengku Buwana IX sulit rakyat digerakkan, karena

beliau menjadi panutannya. Dengan kata lain bahwa kunci geraknya rakyat terletak pada Sri Sultan.²²

Setelah Sri Sultan benar-benar menyatakan di pihak Republik, maka KNI bersama Sri Sultan Hamengku Buwana IX mudah sekali menggerakkan rakyat untuk merebut jawatan-jawatan yang masih diduduki dan dikuasai Jepang. Perebutan kantor-kantor itu secara serentak dimulai setelah amanat 5 September dan selesai 26 September 1945. Selama 20 hari gedung-gedung itu telah dapat dikuasai, kecuali Gedung Negara (Gedung Agung), Kido Butai di Kotabaru, serta Badug (Adisucipto). Satu hari kemudian tepatnya tanggal 27 September 1945 Kedaulatan Rakyat terbit.²³ Melihat kenyataan ini terbitnya Kedaulatan Rakyat terkait erat dengan situasi yang ada.

Dalam merebut pabrik-pabrik, kantor pemerintah, perusahaan-perusahaan, stasiun radio, penerbitan dan lain-lain merupakan perlawanan yang dilakukan secara lunak, sedang perebutan kekuasaan dengan pertempuran, misalnya aksi perebutan gedung negara (Gedung Agung), lapangan terbang Adisucipto dan Asrama militer Kotabaru. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memegang peranan penting dalam rangka mengobarkan semangat juang. Segala peristiwa dan pengumuman-pengumuman penting segera dapat disampaikan kepada rakyat melalui pemberitaannya. Demikian juga soal maklumat, amanat dari para pemimpin, berita tentang hasil perjuangan, penerangan kepada rakyat berupa pidato-pidato, poster-poster, slogan-slogan untuk memperhebat semangat perjuangan rakyat mudah dibaca dalam lembaran surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.²⁴

Penerbitan diciptakan demi keamanan di daerah Yogyakarta, maka atas perkenan Sri Sultan Hamenku Buwana IX pada tanggal 28 September 1945 beliau menyetujui pimpinan keamanan yang berkantor di Kepatihan diserahkan kepada KNI di bawah pimpinan langsung Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Oleh karena itu dikeluarkan maklumat nomor satu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang badan sensor, yang bertugas menyensor siaran, penerbitan, percetakan dan lain-lain sebagainya. Badan sensor itu diadakan dengan maksud membersihkan pemerintah dari anasir-anasir kolonial.²⁵

Dalam rangka mewujudkan pasal-pasal Undang-undang Dasar negara, maka Sri Sultan Hamengku Buwana IX memberikan saluran kehendak rakyat untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai penjelmaan dari azas Kedaulatan Rakyat, maka Sri Sultan Hamengku Buwana IX bersama Sri Paku Alam VIII dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Yogyakarta memerintahkan supaya di tiap-tiap Kelurahan dibentuk DPR Kelurahan.²⁶ Dewan ini merupakan penyaluran aspirasi rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya pembentukan DPR itu sampai ditingkat Kabupaten dan Kota Praja. Daerah yang semula terpecah belah akibat ulah pemerintah kolonial dipersatukan di bawah pemerintah DIY.

Kehadiran Sekutu di Indonesia dengan tujuan melucuti Jepang ternyata diboncengi Belanda dalam bentuk NICA, membuat semakin panasnya hati pejuang-pejuang kita. Lebih-lebih setelah Belanda melakukan pemecahbelahan terhadap semua kekuatan perjuangan dan pancingan-pancingan yang dibuat oleh Inggris, maka bentrokan dan pertempuran diberbagai kota besar tidak dapat dielakkan. Perang kemerdekaan berkobar di Jakarta, Bandung, Magelang, Ambarawa, Semarang dan Surabaya yang kemudian dikenal dengan hari pahlawan. Petempuran dan kerusuhan yang terjadi diberbagai tempat mudah membakar semangat perlawanan karena mereka mmengetahui dari berita-berita yang dimuat di Kedaulatan Rakyat. Pemberitaan Kedaulatan Rakyat itu sebagai berikut :

Rakjat Jogjakarta memprotes keras terhadap pemboman Inggris

Atas nama S.P. Soeltan, S.P. Pakoe Alam dan rakjat Jogjakarta mengirim kawat kepada P.J.M. Presiden dan Perdana Menteri Repoeblik Indonesia sebagai berikoet :

Djam 8.15 menit pagi ini ada kapal terbang moesoeh mendjatoehkan soerat-soerat sebaran, tidak ditekan, bermaksoed akan membom stasioen radio, digedoeng Nilmy Jogjakarta dan Balapan Solo, karena siaran radio itoe ditoeoeh telah menghasoet rakjat soepaja berontak. Moelai djam delapan tiga poeloeh menit hingga djam sembilan lebih datang doea bombers Inggris dan mendjatoehhkan bom-bom enamm kali mmengenai gedoeng Nilmy dan Sonoboedojo dan menembak dengan mitraljoer di sekitar pabrik Watson, hingga menimboelkan korban delapan orang tewas dan poeloehan loeka-loeka. Diantara korban-korban itor terdapat banjak perempoean dan anak-anak.²⁷

Dalam situasi yang demikian berita-berita koran Kedaulatan Rakyat banyak dicari dan ingin dibaca orang. Mereka ingin mengetahui berita-berita yang aktual, khususnya berita tentang pertempuran.

Mengingat gentingnya situasi, maka tanggal 4 Januari 1946 ibukota itu semata-mata pertimbangan keamanan.

Koordinasi keamanan adalah sangat *urgen* untuk menjaga Yogyakarta sebagai Republik Indonesia. Oleh karena itu diupayakan dipersatukan tentara, laskar dan rakyat di tiap-tiap kabupaten, kemmantren dan kelurahan di Daerah Yogyakarta dalam wadah Dewan Pertahan Daerah. Dengan demikian dapat dilaksanakan satu kommando. Bilamana di tiap-tiap daerah itu terputus hubungannya dengan daerah lain karena diduduki Belanda, daerah itu dapat mandiri mengurus diri sendiri.

Walaupun dunia internasional telah mengecam tindakan Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, tetapi Belanda semakin nekad dengan dilancarkan serangan kepada Republik tanggal 21 Juli 1947 dengan maksud menghancurkan Republik dan menduduki Yogyakarta. Atas tindakan itu timbul reaksi dari rakyat. Surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* memuat kebulatan tekad menggempur Agresi Belanda. Kebulatan tekad itu dicetuskan Tentara Laskar di bawah bimbingan Pemerintah. Dalam kebulatan tekad itu teramat membakar semangat rakyat melawan Agresi Belanda. Maka dipandang perlu diadakan pembaharuan tekad dan semangat dalam seluruh jiwa rakyat. Oleh karena itu rakyat Yogyakarta tidak mau ketinggalan menyatakan kebulatan tekad. Pada pagi hari pukul 09.00 atas usaha Dewan Kelaskaran Poesat, dilangsungkan rapat raksasa bertempat di alun-alun utara Yogyakarta, bertekad "Sekali Merdeka tetap Merdeka".

Media cetak yang juga ikut mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda yaitu Al Jihad yang dikeluarkan oleh Partai Masyumi. Surat kabar ini merupakan alat propaganda Partai Masyumi yang berupa pembinaan umat Islam. Di samping itu kritiknya terhadapkabinet Amir syarifuddin cukup tajam.²⁸ Bilamana dari Masyumi menggunakan medianya Al Jihad, maka Muhammadiyah juga

menerbitkan Suara Muhammadiyah yang berisi berita rumah tangga Muhammadiyah, pendidikan dan organisasi serta pembinaan umat. Mengingat perhatian orang tercurah kepada perjuangan melawan musuh, maka penerbitan Suara Muhammadiyah pun tidak lancar, karena sulitnya mencari kertas. Nasib yang juga dialami Majalah bulanan Pusara yang diterbitkan untuk kelangan Taman Siswa. Kehidupan Pusara dan Wanita yang pada awalnya berjalan baik itu akhirnya tersendat-sendat dan kadang-kadang terhenti. Majalah Pusara ini dikerjakan dengan mesin *hand press* yang sederhana.

Telah disebut dimuka bahwa pada awal proklamasi di Yogyakarta terdapat kelompok pemuda yang mengobarkan perjuangan tergabung dalam Pusat Tenaga pelukis Indonesia (PTPI). PTPI dalam masa perjuangan berkantor di Bintaran 12, yaitu di Swagaya/hotel Wilis. Rumah Perwita di Bintaran waktu itu dijadikan sebagai ajang mengerjakan poster-poster perjuangan. Tokoh-tokoh pembina PTPI antara lain Jayeng Asmara, Suryosugondo, Perwito, Winarso Condrosangkoyo, Sukirman Dharmomulyo, Kuntjaraningrat, Saptoto.²⁹ Tugas kelompok lukis ini ialah : 1) Pembuatan poster untuk mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan dan mempererat persatuan; 2) menulisi gerbong-gerbong, tembok-tembok. Saat itu sepur jurusan Purwokerto - Surabaya gerbongnya ditulisi oleh kelompok PTPI antara lain dipimpin oleh Ali Basah.³⁰ PTPI juga mengadakan penerangan kepada masyarakat untuk tetap bersemangat berjuang mempertahankan negara. Perjalanan penerangan ini sampai juga di Jawa Barat dan Jawa Timur (Malang). Mereka di waktu pagi pergi ke sekolah, kemudian siang hari atau malam hari datang di Bintaran membuat poster. Pengurus PTPI memberi bantuan uang sekolah, uang untuk makan dan minum sekedarnya. Dana PTPI ini dihimpun dari sumbangan berbagai pihak. Ada yang memberi cat, uang, kertas dsb.

Dalam masa revolusi fisik kekuatan perjuangan bergabung dari berbagai bidang menurut profesi masing - masing. Oleh karena itu jasa Jadug Jayakusuma dalam mengabdikan dirinya dalam bidang seni terutama seni teater dan film. Pada tahun 1946 ia masuk militer di Yogyakarta. Waktu itu markas Kementrian Pertahanan Bagian Pendidikan terletak di jalan Sumbing No. 5, Kotabaru. Di jalan Sumbing ini Jadug Joyokusuma ketemu dengan kawan-kawannya

Mayor Umar Ismail, Kapten Suryo Sumanto, Kapten Gayus Siagian, Kapten Suwardi Tasrif dan lain-lainnya lagi. Di markas inilah terbit mingguan "Patriot" dan majalah kebudayaan "Nusantara".³¹ Kapten Jadug Joyokusuma ikut mengasuh kedua majalah tersebut sebagai wartawannya. Kegiatan yang ada di jalan Sumbing No. 5 kecuali menerbitkan mingguan "Patriot" dan majalah kebudayaan "Nusantara" juga menyelenggarakan kursus perfilman dalam satu minggu sekali.

Pada tahun 1946 Kapten Jadug Joyokusuma bersama Kapten Suryo Sumanto, Lettu Sungkono, Lettu Suparjo, Lettu Sutopo Juwono disertai tugas sebagai penasihat rombongan "Dagelan Mataram". Dagelan penerangan ini mempunyai tugas penerangan dan Spinase.³² Dagelan Mataram dalam melaksanakan tugasnya keliling Yogyakarta menghibur para prajurit di garis depan. Tema penerangan berkisar pada masalah *patriotisme*, penjelasan tentang kegiatan mata-mata musuh, demokrasi dan bentuk negara Republik.³³ Tugas penerangan melalui Dagelan Mataram itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat maupun prajurit.

Pada awal tahun 1947 Kapten Jadug Joyokusuma mendapat tugas baru, mengawasi dan mengamati siaran radio, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua pidato yang akan disiarkan melalui RRI, teksnya harus diteliti lebih dahulu oleh Jadug Joyokusumo. Tanpa persetujuannya naskah pidato tidak dapat disiarkan.

Berita-berita dari luar negeri dimonitor melalui sebuah radio tua, yang tenaga listriknya menggunakan aki buatan CC Hardi seorang tokoh studio film *Golden Arrow* yang ikut mengungsi, sedang strom akinya menggunakan dinammo mobil yang diputar dengan roda sepeda.³⁴ Hasil monitoring berita radio tersebut kemudian disiarkan dengan selebaran stensilan kertas merang kemudian dibagikan kepada masyarakat luas.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya dengan menduduki ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pendudukan itu menyebabkan orang mengungsi ke desa-desa yang dianggap aman, termasuk tenaga-tenaga dari surat kabar Kedaulatan Rakyat. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota diikuti pejuang-pejuang untuk memimpin perang gerilya. Surat kabar tidak

ada yang terbit satupun. Kemudian timbullah ide pembuatan surat kabar oleh Soemihhardjo yang waktu itu sedang berumur 17 tahun.³⁵ Ide membuat surat kabar itu dibicarakan dengan S. Dhopo Djajengpoetro yang waktu itu sebagai tenaga di Kedaulatan Rakyat. Alat mencetaknya diambilkan dari Kedaulatan Rakyat oleh pak Dhopo, dengan seizin pimpinannya. Mesin cetak surat kabar itu dibawa dari Kantor Kedaulatan Rakyat jalan Mangkubumi dengan dokar dan ditutupi daun ketela. Mesin cetak melalui jalan Mataram dibawa ke Mangkuyudan.

Kertas untuk pembuatan koran itu diambil dari rumah Priyoutommo di Mangkuyudan yang saat itu dipergunakan sebagai gudang kertas Kedaulatan Rakyat. Keadaan dalam perang, sedang Belanda selalu mengadakan patroli ke berbaai daerah, untungya mesin cetak itu tidak diketahui oleh Belanda, karena dimasukkan ke dapur dengan dibuatkan lubang serta ditutupi dengan *gedeg*. Akhirnya setelah melalui kesepakatan dibuatlah surat kabar dengan nama "Gerdak" (Gerakan Dalam Kota). Wartawan dan pimpinan redaksi gerdak ditangani sendiri oleh Soemihardja, sedang S. Dhopo Djajengpoetro mengkoordinasikan percetakan serta mengumpulkan dana kepada masyarakat. Setter Gerdak juga ditangani tenaga dari Kedaulatan Rakyat.

Koran Gerdak tidak dapat terbit setiap hari mengingat banyak kesulitan yang dihadapi oleh Sumihardjo. Ia sendiri harus berjalan ke berbagai tempat mencari informasi sebagai wartawannya, selanjutnya disusun sendiri sebagai redaktornya. Masalah dana bantuan baik berupa beras, gula, uang dan lain-lain dihimpun dari masyarakat Mangkuyudan dan sekitarnya. Masyarakat di Mangkuyudan dengan sadar dan penuh keikhlasan memberi bantuan untuk kepentingan perjangkan. Kertas untuk pencetakan koran juga merupakan kendala yang tidak dapat dihindarkan. Untung waktu itu dapat diperoleh kertas yang diambil dari gudang Kedaulatan Rakyat di kampung Mangkuyudan. Pengedaran Gerdak hanyalah terbatas dalam kota termasuk dikirim ke kraton Yogyakarta.³⁶ Mengingat berbagai kendala tersebut maka Gerdak hanya dapat terbit 3 kali lalu terhenti.

Gerdak yang sangat sederhana itu ternyata telah dapat membangkitkan semangat dan mengobarkan perjuangan melawan Belanda. Disamping Gerdak, maka Sumihardjo bersama pemuda membuat pamflet. Pamflet-pamflet itu ditempel di tembok-tembok dan gerbang-gerbang, maupun gerbong kereta api. Pamflet itu berisi slogan untuk membakar semangat para pejuang kita. Ternyata berkat Gerdak dan pamflet yang menggunakan potongan kertas seadanya sangat besar nilainya karena dapat membangkitkan semangat pejuang dan masyarakat umumnya.

Pamflet perjuangan itu dibuat oleh pemuda-pemuda Mangkuyudan dibawah pimpinan Soemihardjo, kemudian dari mereka itu kurang lebih 60 orang di waktu malam hari atau dini hari telah menempelkannya di tempat-tempat yang strategis. Salah seorang korban dari penempel pamflet itu ialah Suradi yang ditangkap Belanda di Jalan Malioboro. kemudian dipenjara di Wirogunan. Di Wirogunan Suradi satu kamar dengan P. Wardoyo (P. Besut) yang dimasukkan ke Wirogunan karena mengobarkan perlawanan. Setelah kurang lebih 3 bulan Suradi dipindahkan ke penjara Ambarawa selama 7 bulan. Di Ambarawa bersama Adam Malik, Mr. Moh. Roem dan tawanan politik lainnya.

Walaupun para pengedar pamflet mempunyai resiko tinggi, tetapi hal itu tidak mengendorkan semangat mereka. Bahkan pada waktu menjelang Serangan umum 1 Maret 1949 koran dan pamflet itu berperan besar sekali dalam membakar semangat perjuangan. Pamflet-pamflet itu berkembang sampai di desa antara ke Tembi dan Pandak Bantul.

Militer yang waktu itu berjumlah satu kompi tinggal di rumah Soemihardjo. Mangkuyuban di bawah pimpinan pak Widodo mendapat bantuan secara penuh dari masyarakat. Laki-laki, perempuan, pemuda bekerja bersama membantu perjuangan melawan Belanda. Bagi militerpun merupakan kenangan yang tidak mudah dilupakan karena selama revolusi selalu terdapat kemanunggalan ABRI dan rakyat.

b. Media Elektronika/Radio

Setelah Belanda menyerang Maguwo kemudian masuk kota Yogyakarta, waktu itu di Istana Presiden diadakan sidang kilat Kabinet

Istimewa untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Kabinet mengambil keputusan bahwa segera dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi yang diserahkan kepada Mr. Syarifudin Prawiranegara. Keputusan kedua Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan tetap mempertahankan sampai tetes terakhir. “Tiap jengkal tanah harus kita pertahankan, maju terus pantang mundur”.

Keputusan itu dapat diumumkan RRI, kemudian semua karyawan RRI cepat-cepat meninggalkan studio, karena di luar telah dikepung serdadu belanda. Waktu itu studio berada di Secodiningratan. RRI dalam waktu yang tidak lama dikuasai Belanda, namun sebelum serdadu Belanda menyerang telah banyak alat-alat yang disimpan para karyawan RRI atas anjuran Sri Sultan Hamengku Buwana IX.

Atas dasar pembicaraan karyawan RRI di rumah Suryadipura, Panembahan diputuskan pemindahan tempat siaran di Gunungkidul. Alat-alat yang disimpan di rumah Wedana Salamun, Patangpuluhahn dibawa ke Gunungkidul. Berdasar hasil rapat: Sumarmadi, Sastrohardjo, Martono, Sumarman, Noorbei dan Syamsu Sugito diputuskan.³⁷

- (1) Keberangkatan ke Gunungkidul harus segera, dan ditentukan pada 20 Desember 1948.
- (2) Saudara Noorbei, Atmoko, Syamsu Sugito, ditugaskan menuju Tawangmangu, dengan menggabungkan diri dengan rombongan RRI Surakarta.
- (3) Sastrohardjo tetap diberi tugas berada di dalam kota dengan mengusahakan kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan luar.
- (4) Sumarmadi diputuskan menuju ke Yogya Selatan, supaya menemui Sukirman di Playen.
- (5) Saudara Haji, Budiman, Aryono, dan Suroso menuju ke Wonosari untuk mendirikan siaran post dengan memakai kode W.

Berhubung sebagian karyawan masih tinggal di kota, maka atas ide Sumardiono yang dibantu Suryodipuro berusaha mendirikan tempat monitoring radio secara rahasia di Kotabaru. Usaha ini berhasil dan dapat menerima kabar dari India mengenai keadaan di tanah air. Rupa-

rupanya Belanda mengetahui monitoring radio rahasia itu, maka tidak dapat berlanjut lama. Sumardiono dan kawan-kawannya segera meninggalkan Kotabaru menuju Gunungkidul.

Usaha mendirikan monitoring baru di luar kota bertempat di Desa Barongan, Bantul, tidak jauh dari markas gerilya di Imogiri. Monitoring radio ini ditangani Sumarmadi dan Sukanto guna menangkap berita baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka giat mengadakan gangguan terhadap berita-berita radio Belanda yang isinya menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang baru keadaannya serba kacau dan sudah lenyap. Berita yang dapat ditangkap melalui siaran radio kemudian distensil dan disebarluaskan ke berbagai daerah perjuangan. Dalam menghadapi kegiatan penempelan pamflet-pamflet untuk mengobarkan perjuangan, Belanda merasa kewalahan, karena pagi dihapus malamnya telah ditempel lagi.

Setelah monitoring radio yang didirikan di Barongan gagal, maka upaya selanjutnya meninggalkan tempat menuju ke Gunungkidul.³⁸ Sumarmadi mengikuti tugas ke Gunungkidul, sedang Hadisukanto kembali ke kota bertemu dengan Suryodipuro untuk mengatur siasat. Kabupaten Gunungkidul dipilih Sri Sultan Hamengku Buwana IX karena daerah ini dirasa aman untuk pertahanan melawan musuh. Dengan pertimbangan tersebut, maka berdirilah tempat siaran RRI di Gunungkidul dengan memakai kode post W. Dari tempat ini diterbitkan suatu berita dengan nama "Berita Gerilya".³⁹ Selain Wonosari, di Gading yang merupakan pangkalan AURI juga terdapat pemancar radio dibawah Opsir Muda Udara III, Sabar Wijonomukti dan opsir Muda I Suharto, Sersan Udara Basukiharjo dengan dibantu beberapa orang telegrafis.

Studio RRI Yogyakarta dikuasai Belanda, tetapi tidaklah berarti bahwa hubungan dengan berbagai kota besar didalam maupun luar negeri terputus. Dari stasiun radio di Wonosari dapat berhubungan dengan stasiun di Gunung Wilis, Jambi, Lubuklinggau, Bukittinggi, Kotaraja dan luar negeri yang disalurkan melalui perhubungan radio antara PDRI dengan wakil-wakil RI di PBB. Selain itu pemancar PHB Wonosari dapat berhubungan juga dengan pangkalan MBKD di Dekso, Kabupaten Kulonprogo.

Dalam rangka pertahanan dan pengaturan untuk saling berhubungan para pejuang yang di daerah Yogyakarta, maka di Dekso didirikan markas Staf Angkatan Perang di bawah mayor Gani. Untuk keperluan saling berkomunikasi itu di Dekso dipasang sebuah pemancar, selanjutnya dapat dikirim radiogram ke Wonosari, Balong di Gunungkidul, Lawu, Sumatera, dan dari sini dapat diadakan hubungan ke luar negeri.

Kabupaten Gunungkidul yang dijadikan daerah pertahanan dan perjuangan akhirnya tidak luput dari serangan Belanda. Oleh karena itu setelah Wonosari diduduki Belanda maka karyawan RRI dapat diselamatkan dengan mendirikan pemancar di Banaran Playen. Sebelumnya setelah diperintahkan oleh Opsir Muda III agar pangkalan udara Gading dibongkar dan pindah ke Desa Banaran. Bersama itu juga datang Kepala Staf PHB-AURI, Opsir Udara III Budiharjo dengan wakilnya Opsir Muda Udara I Sabar Wijonomukti di tempat yang sama.

Dalam rangka mengemban tugasnya yang strategis, maka AURI sejak tahun 1946-1947 sudah memelihara jaringan radio antara sepuluh lapangan terbang di Sumatera dan di Jawa, mulai dari luar negeri dengan Manila dan Birma.⁴⁰

Selama periode-periode kritis perang gerilya, PHB Radio baik yang dimiliki AURI, maupun instansi sipil berjasa di medan diplomasi. Dalam kondisi yang demikian hubungan radio merupakan "urat nadi" bagi bangsa Indonesia yang berjuang di berbagai bidang dalam usaha mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.⁴¹

Banaran Playen, Gunungkidul ternyata mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh desa lain, sehingga desa itu dijadikan pusat koordinasi untuk mengatur strategi politik militer. Di samping itu Banaran besar perannya dalam dukungan ekologi dan dukungan sosio ekonomi selama masa revolusi.⁴² Jadi tempat ini mempunyai peranan sebagai pusat koordinasi dan strategi perang gerilya. Dari Banaran ini memiliki jaringan luas dengan dalam dan luar negeri dan menjadi pusat penyiaran berita-berita politik yang dikeluarkan oleh "Pemerintah Yogyakarta".

Berita pemerintah RI Yogyakarta, khususnya berita perjuangan gerilya masa revolusi fisik disiarkan dari pemancar telegrafis yang bertempat di Banaran ini. Berita dari Banaran inilah yang kemudian menyebar dan beritanya diterima di mana-mana.

Di samping pemancar radio di Banaran Playen, maka di Balong, Kabupaten Karanganyar, Surakarta juga merupakan pusat penyiaran berita perjuangan. Bukan Balong dan Banaran dua pusat pemancar radio perjuangan yang saling berhubungan sehingga terjalin kerjasama. Dari kedua pemancar ini disiarkan berita-berita ke seluruh Indonesia. Siaran dari Balong dapat dengan mudah diterima di Bukittinggi oleh PDRI selanjutnya disiarkan ke India. Pada waktu itu Mr. Maramis secara giat memperjuangkan kedudukan Indonesia di PBB. Dari siaran ini situasi perjuangan, agresi Belanda, serangan umum 1 Maret dapat diterima dunia internasional. Dengan demikian PBB menangkap kenyataan yang sebenarnya sehingga dapat menekan dari berbagai negeri itu merupakan jawaban berita-berita bohong yang disiarkan oleh Belanda.

Pemancar radio di Banaran penting peranannya karena pemerintah yang berkedudukan di Yogyakarta menyiarkan berita melalui Banaran dan diteruskan ke Balong. Berita Serangan Umum 1 Maret dari Balong disiarkan. Radio berperan besar dalam membangkitkan semangat rakyat. Siaran radio yang dilakukan dalam berbagai bahasa itu menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mengetahui perkembangan di Indonesia, khususnya tindakan politik militer Belanda yang tidak dibenarkan.

Dalam rangka mengembangkan jaringan radio AURI yang berporoskan Aceh - Yogyakarta maka telah muncul stasiun-stasiun di berbagai tempat antara lain di Kotaraja, Tarutung, Bangkinang, Pasir Panguyen, Kotatinggi, stasiun mobil yang mengikuti PDRI di daerah Kerinci, Lubuk Linggau, Wonosari, dan di Jamus (Sekitar Gunung Lawu).⁴³ Kemudian masih diteruskan hubungan radio ke luar negeri, yaitu dengan satuan AURI Indonesia Airways yang berpangkalan di Birma lewat Aceh.

Operasi PHB yang serba darurat dalam perang itu dituangkan dalam rangkaian perintah secara bertahap, baik lisan maupun tertulis

di dalam amplop berlapis, yang boleh dibuka hanya pada saat ada gejala Belanda menyerang tempat dan posnya masing-masing. Perintah operasi ini disebut dalam Budihardjo meliputi hal-hal sebagai berikut :⁴⁴

- (a) Langsung “kukut” dengan teratur dan segera menuju tempat “evakuasi” yang sebelumnya sudah harus dipilih dan disiapkan secara rahasia;
- (b) Membumi hanguskan markas/stasiun radionya;
- (c) Setelah selesai menyiapkan alat-alat perlengkapan di lokasi yang baru, agar “to lay low” terlebih dahulu sebelum mengudara lagi (pura-pura mati);
- (d) Sementara itu “lapor” pada satuan tempur (Combat unit) yang terdekat akan kehadirannya di lokasi baru;
- (e) Selewat “waktu bungkam” satu minggu sampai 10 hari, supaya mengudara dengan frekuensi yang telah ditentukan (dalam amplop berlapis) dan mencari hubungan dengan panggilan baru yang telah disepakati, yaitu singkatan nama telegrafis (tiga huruf) yang sudah saling dikenal pada jam-jam yang telah ditetapkan.
- (f) Kalau sudah ter-establis saling hubungan atau jaringan, dalam pertukaran berita, selanjutnya menggunakan sistem sandi yang baru, hanya kalau perlu saja.

Lewat cara yang sederhana itu terbukti efektif, dan akhirnya jaringan PHB radio AURI itu memegang peranan penting dalam perjuangan. Untuk itu Budihardjo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banaran, Playen dan sekitarnya yang telah banyak berjasa membantu tugas-tugas perjuangan dengan menyelamatkan, dan mengamankan pemancar radio yang ada di desa tersebut sehingga terhindari serbuan Belanda. Di samping itu sajian makan, minum setiap hari yang ditangani serta dikumpulkan dari penduduk secara bergotongroyong untuk Budihardjo dan kawan-kawannya merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya. Ucapan itu terungkap dari tulisannya “Peran Perhubungan Radio TNI AU Dalam Perang Kemerdekaan” sebagai berikut :

".... pertama-tama kita wajib bersyukur ke hadirat Allah SWT. Atas ridho-Nya, serta merta berterima kasih kepada rakyat di desa Banaran atas segala bantuannya, yang memungkinkan kami-kami bergerilya menjalankan tugas membina hubungan radio jarak jauh dan internasional pada saat-saat kritis dengan selamat dan sukses. Sehingga tercatatlah dalam sejarah bahwa Playen benar-benar "instrumental" dalam melicinkan jalan dibidang politik di luar negeri khususnya, ke arah pengakuan "de yure" terhadap kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda."⁴⁵

Aspek-aspek humanistik yang diperbuat oleh masyarakat sekitar Playen, khususnya jasa Ibu Pawirosetomo karena rumahnya dijadikan markas dan pusat stasiun radio AURI PC 2 mulai awal Januari sampai awal Maret 1949 tidak terlupakan. Rumah Ibu Prawirosetomo tersebut sekarang berstatus sejarah, merupakan pilihan yang pilih tanding. Kenangan Budihardjo itu antara lain dikatakan :

"Keluarga Ibu Prawirosetomo merupakan suatu prototipe keluarga pedesaan di Wonosari, yang dalam kehidupannya termasuk sangat sederhana serba pas-pasan, tidak kecingrangan tetapi juga tidak berlebihan, yang ramahh dan cukup disegani oleh masyarakat sekelilingnya. Dalam keadaan yang "kekurangan tidak - berlebihan tidak" yang pas-pasan itu, kami malah semestinya dimanja sehingga kami "rumangsa" sangat membebani suwargi Ibu Prawirosetomo. Walaupun menu harian untuk daerah "mayoritas" gagik, dengan sayur yang didominasi oleh "so dan kroto", ataupun daun singkong kadang-kadang muncul masakan ayam (yang mewah), waktu itu "tempe" atau tahupun masih tergolong lauk yang istimewa"⁴⁶

Ungkapan di atas menggambarkan bagaimana sederhananya masyarakat Banaran, Playen tetap membantu dalam perjuangan untuk melawan Belanda memiliki dedikasi yang tinggi dilandasi hati ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Waktu itu kerjasama antara militer dan masyarakat terjalin sangat erat, sehingga hal ini merupakan faktor yang ikut menentukan kemenangan perjuangan.

Dengan mengikuti uraian Budihardjo dalam makalahnya "Peran Perhubungan TNI AU dalam perang Kemerdekaan" menyimpulkan sebagai berikut :⁴⁷

- (a) Dalam melancarkan perang gerilya dukungan rakyat di Medan operasi adalah mutlak;
- (b) Bantuan dan perlindungan total dari rakyat Gunungkidul diberikan dengan sadar, ikhlas;

- (c) Suatu perjuangan bangsa memerlukan rencana yang matang, baik dalam skalanya yang makro maupun mikro;
- (d) Hubungan radio adalah amat penting, betapapun rawannya terhadap pantauan musuh;
- (e) Betapapun perlengkapannya bermacam-macam beraneka ragam, diperlukan personil yang dedikatif dan “berani mati”;
- (f) Para petugas harus “ajur-ajer” mendapatkan simpati rakyat, dan harus bisa merakyat;
- (g) Personil harus kompak terintegrasi;
- (h) Nilai-nilai budaya gotong royong, ikhlas berkorban harus selalu ditumbuhkembangkan.

Catatan

1. Tribuana Said. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila. Departemen Penerangan RI. Jakarta 1987.* halaman 26.
2. *Ibid.* halaman 31
3. *Ibid.* halaman 51
4. *Ibid*
5. *Ibid.* halaman 54
6. *Ibid.* halaman 54-551
7. *Ibid.* halaman 55
8. *Ibid.*
9. Hisbaron Murvantoro. *Persiapan Menjelang Proklamasi 45 Sebuah Renungan.* 1994. hal. 8
10. Tribuana Said. *op.cit.* hal 60
11. Dullah. *Peranan Generasi Muda dalam Perjuangan bangsa 1942-1950.* 1989. hal 5
12. *Ibid.* hal 6
13. *Ibid.*

14. *Ibid* hal 7
15. *Ibid*
16. *Ibid.* hal 10
17. Hisbaron Murvantoro. op.cit. hal 8
18. *Ibid.* hal 9
19. Arufaida. *Peranan Kedaulatan Rakyat Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1950*. 1988. hal 9-10. dikutip dari Sinar Matahari. 19 Agustus 1945
20. *Ibid.* hal. 11 (dikutip dari Kedaulatan Rakyat tanggal 5 Oktober 1945)
21. Hasil wawancara dengan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo 15 Maret 1985 di Yogyakarta
22. *Ibid*
23. Hasil wawancara dengan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. tanggal 16 Maret 1985
24. Arufaida. op.cit 13-14
25. *Ibid.* hal 14
26. *Ibid*
27. *Ibid.* 116-17
28. Wawancara dengan H. Haiban Hadiid tanggal 15 September 1994 di Kauman Yogyakarta.
29. Wawancara dengan Sukirmman Dharmomulyo. tanggal 20 September 1994 di Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta.
30. *Ibid*
31. Suhatno. Pengabdian dan *Hasil Karya Jadug Jayakusuma 1990-1991*. hal 13
32. *Ibid*
33. *Ibid*
34. *Ibid.* hal 16

35. Wawancara simultan dengan Soemihardjo (redaktur dan wartawan Gerdak) dengan S. Dhopo Djajengpoetro. Suradi tanggal 5 september 1994 di Mangkuyudan..
36. Wawancara dengan Soemihardjo 5 September 1994.
37. Nurdiyanto dan Hisbaron Muryantoro. *Keterlibatan Radio Gerilya di Jawa Tengah dan Yogyakarta Pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)*. 1993/1994. hal 27-28.
38. *Ibid.* hal. 29
39. *Ibid* hal 31
40. *Ibid*
41. Budihardjo. Peran Perhubungan Radio TNI AU Dalam Perang Kemerdekaan 1993. hal 1
42. Suhartono. Banaran : *(Profil Desa Perjuangan) Perang Kemerdekaan* 1993. hal 1
43. Budihardjo. op.cit hal. 3
44. *Ibid*
45. *Ibid.* hal 2
46. *Ibid.* hal 4
47. *Ibid.* hal 7 - 8

Daftar Pustaka

- Abdurrachman Surjomihardjo. *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*. Proyek Penelitian Pengembangan Peneran Penerangan RI dan LEKNAS-LIPI. Jakarta. 1990
- , *Kekuatan-kekuatan Sosial dan Perjuangan Bangsa 1949-1950*. MSI Cabang Yogyakarta dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 1989.
- , *PDRI Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang* (penyunting) Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Jakarta. 1990

- Arufaida. *Peranan Kedaulatan Rakyat pada Masa Revolusi Fisik 1945-1950* (skripsi). Fakultas Sastra UGM 1988.
- Budihardjo. *Peran Perhubungan Radio TNI AU Dalam Perang Kemerdekaan*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Pemda Gunungkidul dan Benteng Vredeburg Yogyakarta, 1993.
- Dullah. *Peranan Generasi Muda Dalam Perjuangan Bangsa 1942-1950*. MSI Cabang Yogyakarta, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1989.
- . *Seniman dan Wawasan dalam Perjuangan 1942-1950* Pengakuan Pribadi, MSI Cabang Yogyakarta bersama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1989. isbaron MMurvantoro. *Persiapan Menjelang Proklamasi 45 Sebuah Renungan Pada Peringatan HUT Proklamasi ke 49*, Yogyakarta. 1994.
- Moedjanto. G., *Amanat Hamengku Buwana IX 5 September 1945*. Museum Benteng Yogyakarta. 1992
- Nurdiyanto dan Hisbaron Murvantoro. *Keterlibatan Radio Gerilya di Jawa Tengah dan Yogyakarta Pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta 1993/1994.
- Poliman. dkk. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek IDKD. Yogyakarta. 1982.
- Rosihan Anwar. *Seniman dan Wartawan*, MSI Cabang Yogyakarta bersama Balai Kajian sejarahh dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 1989.
- Saptoto. *Seni Lukis dan Wartawan Dari tahun 1982-1945*. MSI Cabang Yogyakarta bersama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 1989.
- Soebagyo. IN. *Sejarah Pers Indonesia*. Dewan Pers Jakarta 1978.
- Soedarjo Tjokrosiswono. *Sekilas Sedjarah Perdjuaan Pers Sebangsa-sebangsa*. Serikat Perusahaan Surat kabar. jakarta. 1958.

- Suhartono. *Banaran (Profil Desa Perjuangan) Perang Kemerdekaan*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 1993.
- Suhatno. *Pengabdian dan Hasil Karya Jadug Joyokusumo*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1990/1991.
- Suratmin. *Sejarah Perkembangan Persuratkabaran di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1908-1945*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta 1992/1993.
- Suwarno PJ. *Peranan Pemerintahan Sipil dan Rakyat Dalam Perang Kemerdekaan*. MSI Cabang Yogyakarta bersama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- . *Situasi Yogyakarta Sebagai Pusat Pemerintahan RI Periode 1946-1949*. Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 1994.
- Tashadi dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proyek IDSNI. Jakarta 1991.

Daftar Informan

- | | | |
|----------|---|---|
| Nama | : | Moh. Mawardi |
| Umur | : | 84 tahun |
| Perannya | : | Pengurus PP. Muhammadiyah Bagian Pendidikan |
| alamat | : | Kauman. Yogyakarta |
| Nama | : | Jindar Taminy |
| Umur | : | 72 tahun |
| Perannya | : | Penasehat PP. Muhammadiyah |
| Alamat | : | Kauman Yogyakarta |
| Nama | : | H. Haiban Hadjad |
| Umur | : | 72 tahun |
| Perannya | : | Pengurus Masyumi |
| Alamat | : | Kauman Yogyakarta |
| Nama | : | Ki Suharto |
| Umur | : | 69 tahun |
| Perannya | : | Pengurus Perpustakaan Taman Siswa |
| Alamat | : | Taman Siswa Yogyakarta |

Nama	:	Soemihardjo
Umur	:	65 tahun
Perannya	:	Redaktur dan wartawan Gerdak
Alamat	:	Mangkuyuban Yogyakarta
Nama	:	S. Dhopo Djajangpoetro
Umur	:	70 tahun
Perannya	:	Pengelola Koran Gerdak
Alamat	:	Mangkuyudan Yogyakarta
Nama	:	Suradi
Umur	:	74 tahun
Perannya	:	Penyebar Pamflet Gerdak
Alamat	:	Mangkuyudan Yogyakarta
Nama	:	Sukirman Dharmomulyo
Umur	:	72 tahun
Perannya	:	Anggota PTPI
Alamat	:	Santren Yogyakarta
Nama	:	Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo
Umur	:	70 tahun
Perannya	:	Sekretaris KNI Yogyakarta
Alamat	:	Yogyakarta

BERTEMPOER ATAU BEROENDING : Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal Revolusi Indonesia *)

Andi Suwirta

Salah satu isu politik penting pada masa awal revolusi Indonesia adalah : apakah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berunding. Pers yang lahir di tengah-tengah revolusi, juga tidak luput dari pengaruh isu politik itu. sebagaimana akan diperlihatkan nanti, pers memang tidak hanya menyajikan tentang berita (*news*) tetapi juga memberikan pandangan (*views*) terhadap kejadian-kejadian yang dinilai penting selama revolusi. Pandangan, sikap dan pendirian pers itu nampak jelas apabila kita melakukan analisa isi (*content nalysis*), tidak hanya pada sajian berita utama, tetapi juga tajuk rencana, pojok, motto, atau karikatur yang disajikan pers pada waktu itu.

Tulisan ini akan membahas pers, terutama tentang surat kabar, yang terbit pada masa awal revolusi di Jawa. Pembahasan akan difokuskan pada tiga surat kabar, yaitu *Berita Indonesia* (Jakarta), *Warta Indonesia* (Semarang), dan *Lasjkar* (Surakarta). Pemilihan pada surat kabar itu dilakukan secara acak, mengingat waktu penelitian yang terbatas, dengan pertimbangan dua surat kabar yang disebut pertama berada di daerah pendudukan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda), sedangkan surat kabar yang terakhir berada di daerah Republik. Adapun waktu yang dibahas, mulai Oktober 1945 sampai dengan Juli 1946. Dengan alasan, pada masa 10 bulan itulah revolusi Indonesia

mengalami, meminjam istilahnya Kahin, "the internal politics of the revolution ...",¹⁾ terutama ketika dihadapkan pada pilihan cara mempertahankan kemerdekaan dan kemana arus revolusi akan diarahkan.

1. Revolusi Kemerdekaan dan Kelahiran Pers.

Ambruknya regim militer Jepang yang otoriter dan represif di Indonesia pada pertengahan Agustus 1945, telah melahirkan dislokasi sosial. Kekuatan-kekuatan terpendam dan bersifat revolusioner dari masyarakat pada masa itu, mencuat ke permukaan dan mengalir laksana air bah yang dahsyat. Arus revolusi, dengan demikian, telah dimulai dan sepertinya sulit untuk dikendalikan.²⁾ Dalam suasana yang seperti itulah pers Republik dilahirkan, dengan maksud — selain untuk memberikan penerangan — mengkoordinasikan hasrat besar dari rakyat yang ingin lepas-bebas-merdeka di satu sisi, dan visi dari para pemimpin bangsa tentang bentuk kemerdekaan yang dicita-citakan di sisi lain.³⁾ Kira-kira sebulan setengah setelah proklamasi kemerdekaan, surat-surat kabar resmi yang semula milik Jepang diambil alih dan diubah menjadi surat kabar "milik Repoeublik". Pengambilalihan, biasanya, dilakukan oleh para pemuda yang berjiwa nasionalis, revolusioner dan punya pengalaman di bidang jurnalistik. Begitulah misalnya, surat kabar *Asia Raya* di Jakarta, *Tjahaja* di Bandung, *Sinar Matahari* di Yogyakarta, dan *Soeara Asia* di Surabaya, berubah menjadi surat kabar *Merdeka* (1 Oktober 1945 - sekarang), *Soeara Merdeka* (September 1945 - Juli 1947), *Kedaulatan Rakjat* (27 September 1945 - sekarang), dan *Soeara Rakjat* (Oktober 1945 - Juni 1946).⁴⁾

Surat kabar di kota-kota lain, juga bermunculan laksana cendawan di musim hujan. Hal itu sejalan dengan anjuran dari pemerintah, selain keinginan dari masyarakat tentunya, untuk mendirikan surat kabar sebanyak mungkin sebagai manifestasi dari revolusi yang demokratis. Maka di Jakarta, selain surat kabar *Merdeka*, terbit pula *Berita Indonesia*, *Ra'jat*, dan *Negara Baroe*; di Bogor ada *Gelora Rakjat*; di Cirebon ada *Republik* dan *Genderang*; di Semarang ada *Warta Indonesia*; di Magelang ada *Penghela Rakjat*; di Yogyakarta, selain

Kedaulatan Rakjat, ada *Al-Djihad*, *Boeroeh*, dan *Nasional*; di Surakarta ada *Lasjkar*, *Soeara Moeda*, *Menara*, dan *Perintis*; di Madiun ada *Api Rakjat*; di Mojokerto ada *Bhakti*; di Malang ada *Berdjoeang*; dan sebagainya.⁵¹

Kebebasan bagi pers untuk mengekspresikan pendirian, sikap dan pandangannya, sangat jelas pada masa awal revolusi kemerdekaan. Semangat yang meluap dari rakyat untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, radikalisme sebagian besar pemuda untuk merebut senjata dari Jepang dan pertempuran melawan tentara Sekutu yang diboncengi Nica-Belanda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, menjadi berita utama dan disorot dengan tajam dalam tajuk rencana surat kabar pada masa itu. Identifikasi pers sebagai pembawa suara dan aspirasi rakyat, nampak dari pemilihan nama penjaga kolom pojok pada masing-masing surat kabar. Misalnya, *Mas Klobot* atau *Notes Dr. Clenik* (Merdeka), *Mas Semprot* atau *Semar* (Kedaulatan Rakjat), *Bang Djeboel* (Berita Indonesia), *Bang Bedjad* (Al-Djihad), *Sepandri* (Lasjkar), *Fikiran Rakjat* (Warta Indonesia), *Pojok Kiri* (Genderang), *Soedoet Tikam* (Api Rakjat). dan sebagainya.

Aneka karikatur, walaupun tidak banyak, untuk menyindir atau mendiskreditkan pihak lawan, terutama tentara Inggris dan Belanda, disajikan dengan cara telanjang dan terus terang. Sedangkan slogan, motto, atau kata-kata mutiara untuk membangkitkan semangat rakyat, sebagai renungan dan arah perjuangan, ditempatkan pada bagian muka sudut kanan atau kiri surat kabar. Semuanya itu menunjukkan bahwa pers memiliki peranan yang tidak kecil sebagai “pengawal pendapat umum” selama revolusi berlangsung.

2. Revolusi Kemerdekaan dan Tanggapan Pers

Mungkin, peristiwa pertempuran yang terjadi pada Oktober dan November 1945, terutama di Surabaya yang banyak memakan korban itu (baik materil maupun jiwa manusia), merupakan titik balik bagi para elite-pemimpin Indonesia untuk melakukan refleksi : apakah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berdiplomasi. Pergumulan pemikiran dan

akhirnya konflik kepentingan antara elite politik yang berbeda itu. untuk sebagian, terekam dengan baik dalam pers. Dan pers juga tidak tinggal diam, melainkan turut memberikan pandangan, sikap dan pendiriannya secara bebas, sesuai dengan keyakinan politik dan warna ideologi masing-masing. Perbedaan visi terhadap revolusi, terutama yang menyangkut pilihan “bertempoer” atau “beroending”, menyajikan gaya wacana (*mode of discourse*) tersendiri bagi pers, setidaknya sampai dengan Juli 1946.⁶⁾

3. Berita Indonesia : Berita yang Beraneka Warna

Surat kabar *Berita Indonesia* (selanjutnya akan disingkat *BI*, as) mulai diterbitkan pada bulan September 1945 di Jakarta.⁷⁾ Alamat redaksi pada mulanya di Asrama Balai Pengajaran Tinggi, Jalan Prapatan 10 Jakarta. Kemudian, karena situasi yang tidak aman, pindah ke Jalan Cilacap 6 Jakarta pada 28 Nopember 1945. Harga langganan semula ditetapkan f 2,- sebulan. Kemudian berubah menjadi f 3.50 sebulan (3 Nopember 1945); dan berubah lagi menjadi f 6,- sebulan (18 Desember 1945) dengan ongkos kirim f 50 sen. Daerah penyebarannya, selain Jakarta, meliputi juga daerah Serang, Rangkasbitung, Bogor, dan Pekalongan.⁸⁾

Surat kabar *BI* selain menuliskan motto “soeara perjoeangan dalam kemerdekaan”, juga mengklaim dirinya sebagai “soeara Pemoeda”.⁹⁾ Akan tetapi, nampaknya, tidak semua pemuda memiliki persepsi dan visi yang sama dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Ada yang menghendaki cara berdiplomasi, dan ada pula yang menginginkan jalan pertempuran. Yang menarik, ternyata dua pandangan dan keinginan yang berbeda itu, berada dalam satu wadah. Sehingga *BI* memberikan kesan sebagai surat kabar yang beraneka warna.

Sebagai contoh, dalam tajuk nomor perdananya *BI* mengharapkan agar masyarakat, “... mendapat teontoenan² dan penerangan² jang djelas dan positip .. goena mentjapai toedjoean kita. yakni terwoedjoednja soeatoe Negara Repoeblik Indonesia jang diakoei oleh seloerouh doenia”.¹⁰⁾

Suatu pernyataan tujuan yang sejalan dengan politik diplomasinya Pemerintah pada waktu itu. tetapi dalam halaman yang sama terdapat

tulisan yang bertentangan dengan isi tajuk itu. “Tidak ada satoe bangsa diatas doenia ini boleh kita pertjajai. Bangsa jang mempertjajai bangsa lain... akan menoeliskan sendiri nasibnya : tertipoe dan terlantar!”¹¹⁾

Begitu juga ketika *BI* menurunkan tajuk tentang “POLITIK REPUBLIK INDONESIA”, yang secara jelas menyatakan :

Kami para Pemimpin sadar benar, bahwa tanggoeng djawab kepada Tanah-Air, bangsa dan sedjarah, kami pikoel sepenoeh-penoehnja. Kami sama sekali tidak mendjalankan “politik sandiwara”, akan tetapi adalah menoeroet pikiran dan menoeroet hati gewetan kami. Kami bersedia berhadapan dengan mahkamah sedjarah jang akan mendjatoehkan kepoatoesan benar atau tidaknja politik jang kami djalankan kini. Politik jang diambil oleh Repoeblrik Indonesia haroes dihadapkan kepada doenia international. Sekarang jang pertama perloe ialah : diplomasi!¹²⁾

Akan tetapi dalam nomor penerbitan berikutnya, *BI* menurunkan tulisan yang mengancam politik diplomasi itu. Tidak hanya mengancam. *BI* juga mengancam “... akan mematahkan dan memoesnahkan tindakan2 kaoem kompromis dan reformis jang telah bersiap-siap hendak mendjoel bangsa dan tanah air dengan djalan kompromi kepada imperialis dan pendjajah asing.”¹³⁾

Tentu saja tulisan-tulisan dalam *BI* yang isinya saling bertentangan itu, membuat bingung para pembacanya. Ketika ada pertanyaan dari pembaca bahwa sebenarnya *BI* ini dari, oleh, dan untuk siapa, maka reaksi dari pihak Redaksi adalah “Pertanjaan ini tidak oesah didjawab”. Dengan alasan yang klise bahwa *BI* ini dikerjakan dari, oleh, buat rakyat, pihak Redaksi selanjutnya menganjurkan (sekaligus memperingatkan) bahwa “kalau ada simpatie sebarikan (*BI* ini, as) soepaja seloeroeh oemat di Indonesia membatjanja Dan kalau ada jang anti djangan menghalangi, sebab nanti bisa hanjoet dalam Laoetan DARAH !”¹⁴⁾

Apa yang tersurat secara kontradiktif dalam *BI* itu, nampaknya sejajar dengan realitas sosial di kota Jakarta yang penuh ketegangan, sehubungan dengan kedatangan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) pada Oktober 1945. Bagi sebagian besar pemuda, kehadiran tentara Sekutu itu harus dilawan. Karena itu mereka berkesimpulan, sebagaimana dinyatakan dalam *BI*, “Hanja satoe djalan BERPERANG!”¹⁵⁾ sedangkan bagi Pemerintah (dalam hal ini Kabinet Sockarno-Hatta), masyarakat diharapkan tetap tenang, tentram,

berdisiplin, jangan bertindak sendiri-sendiri, dan siap sedia. "Djaga keamanan oemoem, singkirkan apa jang menggegerkan masjarakat, dan jang menimboelkan kesoelitan dengan tentara sekoetoe".¹⁶⁾ Sikap pasif dan ragu-ragu dari Pemerintah itu, tentu saja menggelisahkan masyarakat, lebih-lebih pihak pemuda yang tidak sabar melihat keganasan tentara Nica dengan Batalion X-nya yang brutal itu. *Bang Djeboel* (penjaga kolom pojok *BI*), menggambarkan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan rakyatnya itu dalam bahasa yang khas, sebagai berikut :

DJAMAN doeloe roepanja lain dengan djaman sekarang. Rakjat doeloe djoega lain dari rakjat sekarang. Dan begitoe poela pemimpin doeloe lain djoega dengan pemimpin sekarang. Kalau doeloe pemimpin bilang : "Ajo madjoe !" rakjat djawab : "Tonggoe doeloe, ah !" Tetapi sekarang kalau pemimpin bilang : "Tahan, sabar" rakjat djawab : "Kenapa sabar, kami maoe njerobot, golok kami pengen mandi !" ¹⁷⁾

Ketika sikap pemerintah tidak berubah, maka para pemuda mulai mencari tokoh lain yang dinilai sesuai dengan irama revolusi dan dapat menghadapi pihak Sekutu dengan kepercayaan diri yang besar. Harapan pemuda itu terlaksana, ketika pada 14 Nopember 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kabinet presidential Soekarno-Hatta kepada kabinet parlementer Sjahrir-Amir Sjarifoedin.¹⁸⁾ Sehari sebelum pembentukan kabinet baru itu, *BI* menurunkan tajuk dengan mengutip sebagian isi dari brosur *Perdjoeangan Kita* Sutan Sjahrir, terutama bab revolusi dan pembersihan.¹⁹⁾

Pada hari berikutnya, dimana pembentukan kabinet baru telah selesai, *BI* menyajikan dua tulisan sekaligus yang isinya *memuji* kabinet baru dan *mencela* kabinet lama. Dalam tulisan pertama dikatakan bahwa para menteri yang baru, "... meroepakan orang2 jang berperasaan tanggoeng djawab jang besar dan jang terboekti kedjoedjoerannja jang tahan oedji". Sedangkan anggota kabinet lama, "... adventurir2 politik dan desperado2 jang tidak ada perasaan tanggoeng djawab sedikitpoen".²⁰⁾ Begitu juga dalam tulisan kedua, para menteri baru ini, "... boekan sahabat karib Yamamoto, Shimizu atau Maeda. Mereka tidak mendjadi menteri boeat sandiwara. soetji moerni dan boet ketjakapannja jang soedah dikenal dalam praktijk". Sedangkan anggota kabinet lama, "... orang jang soeka berpidato dengan gembargembor, 2 atau 3 djam lamanja, meskipoen pidato itoe tak berisi sama sekali".²¹⁾

Harapan terhadap kabinet baru agar bertindak lebih revolusioner, nampaknya terlalu berlebihan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kabinet Sjahrir-Amir ini juga tidak kalah moderatnya dengan kabinet Soekarno-Hatta. Walaupun Sutan Sjahrir sendiri, sebagai perdana menteri, sering menyatakan kabinetnya tidak kenal kompromi dengan Belanda, tetapi pada saat yang sama ia minta kepada masyarakat untuk memahami betapa pentingnya perjuangan diplomasi itu.²²⁾

Tentu saja, sikap moderat kabinet baru dan politik diplomasinya yang mulai dijalankan terhadap Inggris dan Belanda, mengecewakan lagi sebagian besar pemuda. Mereka, sebagaimana dinyatakan dalam *BI*, tidak percaya pada jalan diplomasi. "Kalau hanya berdiplomasi kedoenia internasional sadja ... ini baroe 25% dari toedjoeannyja. Jang 75% lagi adalah memboeka mata rakjat selebar-lebarnja, siapakah Belanda dan Inggris ioe". Bagi mereka, Inggris itu "embahnja imperialis dan goeroe besar dari imperialis Belanda".²³⁾ Sedangkan dalam pandangan *Bang Djeboel*, Belanda itu ".... orang2 kepala kedjoe dari tanah betjek hollan, jang pernah minta ampoen kepada si kerdil (Jepang, as), jang maboer sebeloem melihat moesoeh, (tapi) sekarang datang lagi dan berlagak seperti orang jang menang."²⁴⁾ adalah pers juga yang memberikan citra kepada Belanda sebagai "boetho modern" yang rakus, jahat, dan — suatu saat — akan dapat dikalahkan oleh "satria-pemoeda" Indonesia. Karikatur berikut ini, barangkali, dapat memberikan gambaran citra Belanda itu :



(Sumber : *Merdeka*, 12 Oktober 1945, hlm 1)

Langkah Sutan Sjahrir untuk melakukan diplomasi semakin mantap. Pada 15 Desember 1945, ia berpidato di depan radio dengan menyatakan perlunya pikiran yang tenang, penuh perhitungan, tidak asal semangat meluap, kerja teratur dan disiplin dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. *BI*, nampaknya, menyetujui isi pidato itu dan meramunya dalam suatu tulisan dengan judul yang tepat, “Pikiran dan Semangat”.²⁵⁾ Sementara itu sebagian pemuda yang kecewa dengan kepemimpinan Sjahrir dan politik diplomasinya, mulai mencari tokoh idola lain yang lebih radikal dan revolusioner. Pencarian itu semakin jelas sosoknya, ketika Muhammad Yamin menulis secara panjang lebar dalam *BI* — dan ditempatkan sebagai sajian utama — dengan judul “TAN MALACCA, Bapak Republik Indonesia”.²⁶⁾ Tan Malaka sendiri kemudian menulis brosur *Moeslihat* sebagai tandingan terhadap brosur *Perdjoeangan Kita* Sutan Sjahrir.²⁷⁾

Pemikiran Tan Malaka yang radikal itu, segera mewarnai *BI*. Dalam tajuk “Rakjat Moerba Menoentoet!”, *BI* tidak hanya mengkritik pemerintah Sjahrir, tetapi juga menuntut kepemimpinan bentuk lain, “... jang mengerti dan toeroet merasai akan soeasana jang melingkoengi Rakjat Moerba itoe dengan arti kata jang sedalam-dalamnja”. Tajuk itu juga menyatakan, “... rakjat rela mentjoerahkan darahnya, bertempoer menjerahkan djiwanja, oentoek tetap berdirinja Negara Rakjat jang berbentoek Repoeblik Indonesia”. Akhirnya tajuk itu mengajak kepada golongan terpelajar, pemuda intelegensia, dan para hartawan agar, “... benar2 mentjeboerkan dirinya kedalam barisan Rakjat ... dalam perdjoeangan jang hebat ini”.²⁸⁾ Bersamaan dengan semakin menguatnya pihak oposisi, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan “revolusi sosial” di daerah-daerah seperti Banten, Tegal, Brebes dan Pekalongan.²⁹⁾ Sebagai konsekuensi dari politik diplomasi, tentu saja, pemerintah tidak menyetujui aksi-aksi “pendaulatan rakyat” dalam peristiwa itu. Dan *BI* yang penyebarannya sampai ke daerah Pekalongan, ternyata lebih memihak kepada pemerintah. *Bang Djeboel* bahkan mendiskreditkan para pelaku drama revolusi sosial itu, sebagai berikut :

BELAKANG ini hati Bang Djeboel sebenarnja sangat dipengaroehi angka 3 1
2. Karena memikirkan itoe sadja Bang Djeboel sampai 3 1/2 malam tidak bisa tidoer. Bangsa kita oedah didjajah sama Belanda 3 1/2 abad.

lantas datang si Djepang dan menghisap darah rakjat selamma 3 1/2 taheen. Kemoedian seorang pengchianat meradjalela di Tegal selama 3 1/2 boelan. penghabisan ia djadi (p)residen Pekalongan 3 1/2 hari. Hiiii, benar2 tjilaka 31.2!³⁰⁾

Namun setelah pemihakannya yang jelas kepada pemerintah, *BI* kembali menaruh simpati lagi kepada pihak oposisi. Himbauan Tan Malaka, "Meriam Menggoentoer Memanggil Pemoeda Melandjoetkan Perdjoangan Pahlawan2 Kita", dijadikan berita utama.³¹⁾ Sementara itu, bagian-bagian tertentu dari dialog "Si Paloe" dan "Si Godam" yang radikal — sebagaimana terdapat dalam brosur *Moeslihat* — dikutip sebagai motto perjuangan dan ditempatkan pada bagian atas kiri atau kanan *BI*.

Demikian isi *BI*, yang sampai pertengahan Pebruari 1946 pun masih menyajikan berita (*news*) dan pandangan (*views*) yang bertentangan dalam dirinya sendiri, terutama dalam menghadapi isu politik "bertempoer" atau "beroending". Dan tanggal 16 Pebruari 1946 merupakan hari terakhir bagi *BI* sebagai media massa yang beraneka warna. Kepada para pembacanya, pihak Redaksi hanya memberitahukan bahwa *BI* "boet sementara waktoe tidak terbit", yang kemudian dilanjutkan dengan harapan "moga-moga *Berita Indonesia* akan terbit kembali dengan segala tenaga dan kekoecatan baroe".³²⁾ Belum diketahui secara pasti mengapa *BI* menghentikan penerbitannya untuk sementara. Sangat boleh jadi, ia mendapat tekanan yang keras dari pemerintah.³³⁾

4. Warta Indonesia : Wartanya yang Berkuasa

Surat kabar *Warta Indonesia* (selanjutnya disingkat *WI*, as) mulai diterbitkan pada 29 September 1945. Alamat redaksi di Purwodinatan Tengah No. 22-24-26, Semarang. Harga langganan semula ditetapkan f 2. 60 perbulan, dimana "jang 10 sen oentoek Fonds Kemmerdekaan". Kemudian sejak 1 Nopember 1945, harga langganan dinaikkan lagi menjadi f 3.- perbulan, dimana "jang 50 sen oentoek Fonds Kemmerdekaan".

Walaupun terbit di daerah pendudukan, *WI* berbeda dengan *BI* (Jakarta) yang isinya beraneka warna itu. Surat kabar *WI* di Semarang

lebih tenang, bahkan cenderung pada satu warna, yakni dominannya suara pemerintah Republik Indonesia. Hal itu bisa dimaklumi, sebab tujuan diterbitkannya *WI* adalah “oentoek membantoe oesaha K.N.I. choesoensja, serta segenap oesaha bangsa Indonesia oemoemnja, jang bersifat membangoen (constructief) jang bermanfaat bagi langsoengnja Repoebliek Indonesia”.³⁴⁾ Dalam tajuk nomor perdananya, *WI* dengan jelas menunjukkan kemana arah kebijaksanaan politik pemerintah akan ditempuh. “Kita akan melakoean diplomasi dengan negeri2 Serikat. ...”³⁵⁾ Dan untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya politik yang ditetapkan oleh pemerintah itu, *WI* menjelaskan makna “diplomasi” dalam mempertahankan kemerdekaan, sebagai berikut :

Negara kita, Repoebliek Indonesia, berdjoeang berdiplomasi. Diplomasi jang bidjaksana, dalam soeasana perdamaian. ... Diplomasi boekan berarti hanja beroending bertjakap-tjakap berpoetar lidah, perdamaian boekan berarti hanja membitjarakan jang baik-baik. Sebaliknja, perdjoeangan boekan mesti saling bertoemboek, dan menjoesoen kekoeatan boekan berarti mesti saling bertindjoe. Negara kita berdjoeang-berdiplomasi. Artinja, Repoebliek Indonesia menghendaki peroendingan dengan doenia internasional oentoek mempertahankan kedoeoekan Repoebliek Indonesia itoe.³⁶⁾

WI terhenti penerbitannya selama satu minggu, karena ada pertempuran lima hari di kota Semarang. Bagi mereka yang berjiwa revolusioner, tentu saja, pertempuran “heroik” itu harus dilanjutkan sebagai wujud paling kongkrit dalam mempertahankan kemerdekaan. Tetapi *WI* berpendapat lain. Dalam tajuk berjudul “KENJATAAN”, *WI* ingin menunjukkan bahwa cara berjuang dengan bertempur itu “... lebih banjak menoempahkan darah, dan lebih banjak memberikan koerban djiwa”. Karena itu, *WI* berkesimpulan, “... kita haroes tjari djalan diplomasi jang sebaik-baiknja”.³⁷⁾

Akan tetapi, cukup menarik juga, *WI* memiliki persepsi yang agak berbeda dengan pemerintah, terutama dalam hal diplomasi dengan Belanda. Dalam tajuk yang berjudul “DENGAN BELANDA TIDAK ADA PEROENDINGAN”, *WI* menjelaskan pendiriannya itu sebagai berikut :

Benar kita akan mendjalankan diplomasi. Kita akan beroending baik-baik dengan siapapoen djoeaga, teroetama dengan negeri-negeri Serikat. Tetapi kita tidak maoe beroending, tidak maoe berdiplomasi dengan belanda. ... Moengkin kita nanti soeka beroending dengan belanda. jakni sesoedah kemerdekaan

Indonesia jang 100% diakoeinja. ... Moedah2an pendirian ini dimengerti betoel2 oleh Pemerintah kita. Tak ada peroendingan dengan belanda!³⁸

Walaupun tidak sependapat dengan pemerintah dalam memaknai arti “diplomasi dengan Belanda”, bukan berarti *WI* menghendaki jalan pertempuran. Hal itu terlihat, ketika terjadi pertempuran di Magelang pada Oktober 1945, *WI* menempatkan “AMANAT P.J.M. PRESIDEN R.I. kepada Rakyat jang bertempoer di Magelang” yang pada intinya meminta rakyat “... oentoeik menghentikan pertempoeran ...”, sebagai berita utamanya.³⁹⁾

Memasuki bulan Nopember 1945, pertempuran melawan tentara Sekutu di kota-kota besar di Jawa terus berlangsung. Pertempuran yang banyak memakan korban jiwa dan harta benda itu, memunculkan semacam renungan : apa makna pengorbanan dan apa arti kematian dalam mempertahankan kemerdekaan, bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi umat Islam Indonesia khususnya ? dalam pojok *Fikiran Rakyat*, yang ditulis oleh Haji Moenawar Cholil, *WI* mengeluarkan semacam fatwa — bersama dengan meletusnya pertempuran 10 Nopember di Surabaya — bahwa barang siapa mati terbunuh lantaran mempertahankan harta bendanya, dirinya, keluarganya, agamanya, dan tanah airnya dari bahaya penjajahan, ... maka mereka itoe termasuk mati syahid djoega”.⁴⁰⁾

Karena keadaan kota Semarang yang tidak aman lagi, maka *WI* hanya mampu meneruskan penerbitannya sampai 14 Nopember 1945, persis saat terjadi pergantian sistem pemerintahan dari Soekarno-Hatta ke Sultan Sjahrir - Amir Sjarifoedin. Bagaimana pandangan, sikap dan pendirian *WI* terhadap penguasa baru itu — seandainya masih terus terbit — tidak diketahui secara pasti. Kita hanya bisa menduga bahwa *WI*, bagaimanapun, adalah tetap wartanya pihak yang berkuasa.⁴¹⁾

5 Lasjkar : Pers Moderat di Daerah Republik

Surat kabar *Lasjkar*, mulai terbit pada 1 Desember 1945. Alamat redaksi di Lojiwurung No. 10 Solo.⁴²⁾ Harga langganan semula ditetapkan f 5,- sebulan, dengan eceran 30 sen. Kemudian berubah menjadi f 7.50 sebulan, dengan harga eceran 40 sen (1 Februari 1946). Dan terakhir harga langganan naik lagi menjadi f 13, - sebulan, dengan

harga eceran 60 sen (2 Mei 1946).⁴³⁾ Daerah penyebaran *Lasjkar*, selain Solo, sampai juga di daerah Klaten, Delangu, Rembang, Jombang, dan sebagainya.⁴⁴⁾ Pada nomor perdana penerbitannya, surat kabar ini dengan bangga mencantumkan motto : “Diseloeroeh Indone-sia ini ada banjak partai2, perkoempulan2, badan2 perdjoeangan, tapi satoe djangan diloepakan, TENAGA LASJKAR-lah jang teramat penting pada waktoe ini”.⁴⁵⁾

Adalah cukup menarik, *Lasjkar* yang terbit di Solo — yang dikenal sebagai kota oposisi terhadap pemerintahan RI yang berpusat di Yogyakarta pada masa revolusi itu — suaranya agak berbeda dengan kemauan tenaga lasjkar yang sebenarnya. Kalau *tenaga* lasjkar pada umumnya bersifat radikal dan menghendaki perjuangan dengan cara pertempuran, maka *suara*, “Lasjkar” (sebagai surat kabar) ternyata cukup moderat, bersifat mendamaikan dan cenderung berpihak kepada pemerintah.⁴⁶⁾ Ketika di berbagai daerah timbul aksi-aksi “pendaulatan rakyat” dalam revolusi sosial, misalnya *Lasjkar* menurun tajuk “Kedaulatan Rakjat” yang isinya mengecam aksi-aksi sepihak itu.⁴⁷⁾ Dengan menyadari bahwa para pembacanya berada dalam lingkungan kebudayaan Jawa, *Lasjkar* juga menyajikan tulisan Ki Hajar Dewantoro tentang “Arti Kata Kemerdekaan”, sebagai berikut :

Mardika ikoe djarwanja nora moeng lepasing pangreh. Nging Oega koewat Koewasa, aman diri prijangga. Wit saka Ikoe den emoet, wadjib lan wenang tan pisah. Artinya : merdeka itoe tidak hanya berarti lepas dari pengoeasa, tetapi berarti poela koeat dan berkoeasa berdiri sendiri. Karena itoelah haroes diganti, bahwa kewajiban dan hak kemerdekaan itoe tak boleh dipisah-pisahkan.⁴⁸⁾

Memasuki tahun 1946, signifikasi politik diplomasi dari pemerintah digugat secara kritis oleh pihak oposisi. Pembentukan “Persatoean Perdjoengan” yang digalang oleh pihak oposisi memang diberitakan *Lasjkar*, tetapi tidak ditempatkan sebagai berita utama.⁴⁹⁾ Bagitu juga dengan slogan paling populer dari pihak oposisi tentang “... toentoetan kemerdekaan 100 prosesn ... dengan siapapoen sebeloem moesoeh meninggalkan pantai dan laoet kita ...” dijadikan berita biasa oleh *Lasjkar*.⁵⁰⁾

Surat kabar ini baru menurunkan berita utamanya, ketika di Magelang diadakan “Permoesjawaratan Lasjkar Rakjat Seloeroeh In-

donesia" pada 27 Pebruari 1946. Dalam pemusyawaratan yang dihadiri oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman itu — yang juga menaruh simpati kepada pihak oposisi — lasykar-lasykar mmenyatakan siap berjuang dan bertempur dengan pihak Belanda apabila kemerdekaan Indonesia tidak diakui 100 persen. Surat kabar *Lasjkar* kemudian mencatat pernyataan Jenderal Sudirman, bahwa tentara tidak akan membiarkan rakyat Indonesia diterkam oleh imperialis dan kapitalis. Ia juga memnta agar tidak terjadi *provokasi*, yang diartikannya sebagai "pro dimoeke ... reaksi di belakang". Akhirnya ucapan Jenderal Sudirman yang terkenal dan membuat peserta rapat makin bersemangat adalah, "Lebih baik diatoom daripada merdeka koerang dari seratoes prosen!"⁵¹⁾ Tantangan dari pihak oposisi yang juga didukung oleh pihak tentara itu, menyebabkan kabinet Sjahrir jatuh pada 28 Pebruari 1946. Tetapi Presiden Soekarno memilih kembali Sutan Sjahrir sebagai formatuer kabinet. Dalam menyusun kabinet baru itu, Sjahrir tetap menempatkan "orang-orang seideologinya" memegang posisi kunci dalam pemerintahan, sehingga tidak terjadi koalisi dengan pihak oposisi. Melihat komposisi kabinet seperti itu, surat kabar *Lasjkar* hanya bisa menganjurkan agar pemerintah baru itu merupakan kabinet *koalisi*, yang diartikannya "... djangan seperti *koewali ta' isi*, tetapi ja *koewali isi betoel-betoel*".⁵²⁾

Karena harapan dan kepentingan politiknya tidak terpenuhi, maka pihak oposisi melanjutkan kegiatannya kembali. Tanda-tanda perpecahan, karena perbedaan visi dan interpretasi terhadap revolusi, mulai mengancam integrasi politik bangsa. Bagi masyarakat kebanyakan, harapan akan persatuan itu menjadi keniscayaan manakala sedang menghadapi musuh (Belanda) yang benar-benar nampak didepan mata. Dalam pojoknya yang berjudul "mbok ja ... bersatoe", *Lasjkar* menuliskan harapan akan persatuan dari berbagai golongan dalam masyarakat itu, sebagai berikut :

..... Pak Sepandri, heran seribu heran, kalau kita disaat yang segenting ini ... antara bangsa sama bangsa kita ada yang terjadi reodjak sentoel alias ngalor ngidoel. Pemerintah minta begini, rakyat maoenya begitoe. Padahal semua lasjkar dari macam-macam partai dan golongan tidak banyak rewel apa-apa. Tjoeming satoe hati satoe kata, jala "gempoer", sekali lagi gempoer. sampai moesoeh didjengkangkan disamoedera Djawa sana. Lhakok di belakang garis pating gedobrak, pating gedebog, pating pethithi, nggak bisa sela sekata.

Pak. atas kebidjaksanaan bapak, moelai ini detik kerahkanlah semoea lasjkar dengan barisannja jang teratoer. Soesoennja barisan begini : Dimoea sendiri. *Boeng Karno, naik Banteng. Boeng Hatta naik Koeda Poetih* dikirinja. *Boeng Sjahir naik Gadjah*, dikanannja (bier poenja semangat Gadjah Mada). Boeng Tan Malaka naik *Harimau Merah* dibelakang mmereka, bersama-sama dengan dr. Soekiman jang naik Oenta (pinjaman dari Pemoea Arab Indonesia). Boeng Dirman naik bomber, Boeng Tomo naik Jager ... dengan tidak ketinggalan boeng Moewardi naik otto lapis badja dengan tanda kepala bantengnja jang singer itoe.

Achirnja barisan pemimpin ini diikoeti oleh segenap Lasjkar dan T.R.I., B.P.R.I., Barisan Banteng, Lasjkar Poetrieri, Lasjkar Boeroeh, Lasjkar Merah, Lasjkar Pesindo, Hizboellah, Sabilillah, dan siapa lagi jang poenja lasjkar, dengan didjenderali oleh Chaoel Saleh serta Ibnuoe Parna, sementara sdr. Zainal Arifien memimpin pasoean berani mati. Moertier, Tommy Gun, tank2, lorie, lengkap Palang Merah kita, dapoer mobiel kita, dan barisan Tehniek kita ikeot dibelakang.

Barisan besar ini bikin demonstrasi, masoek kota Djakarta dengan seroean : Allahoe Akbar tiga kali, disamboeng dengan : *Belanda-nieadir uit*. Kalau tidak maoe, kita tendang sampai ketjempleong laoe! ...⁵³⁾

Persatuan yang "dilamoenkan" masyarakat dan "disetoejoei" oleh *Lasjkar* itu, ternyata tidak menjadi kenyataan. Pemerintah sendiri kemudian sikapnya lebih keras kepada pihak oposisi. Pada 18 Maret 1946, Pemerintah (dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan maklumat yang berisi ancaman keras kepada siapa saja, "... jang menjiarkan berita2 atau melakoekan perboeatan2 jang dapat menggelisahkan atau mengatjaukan masjarakat ... dengan maksoed mengadakan perpetjahan menghambat oesaha dalam menjempoernakan pertahan Negara".⁵⁴⁾ Segera, setelah maklumat dikeluarkan, diadakan razia politik dengan menangkap tokoh-tokoh oposisi yang dianggap "menggelisahkan atau mengatjaukan masjarakat" itu oleh pemerintah. Melihat kejadian itu pihak tentara segera menyatakan sikapnya, bahwa penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi itu sekali-kali bukan dilakukan atas perintah Markas Besar Tentara.⁵⁵⁾

Sementara itu situasi politik di Solo juga semakin tegang, sehubungan dengan adanya gerakan anti-swapraja. Sikap pemerintah sudah tegas — sebagaimana ditunjukkannya terhadap gerakan "pendaulatan rakyat" di Banten, Tegal, dan Pekalongan — yaitu tidak menyetujui gerakan itu. Kembali pemerintah menangkap tokoh-tokoh

gerakan anti-swaprja itu. Dan Lasjkar, sebagai surat kabar moderat, segera menurunkan tajuknya untuk menanggapi peristiwa itu dengan menyatakan, "... sebagai warga negara Repoeblk Indonesia jang setia, kami pertjaja atas kebidjaksanaan pemerintah ... moedah-moedahan jang (ber) wadjib segera dapat menjelesaikan perkara ini, sehingga oedara lekas terang".⁵⁶⁾ Udara politik di Solo, nampaknya, bukan lekas terang tetapi malah makin mendung. Tindakan Menteri Pertahanan (Amir Sjarifoedin) yang memenjarakan tokoh-tokoh oposisi dan tindakan Menteri Dalam Negeri (Dr. Soedarsono) yang menangkap tokoh-tokoh gerakan anti-swaprja, kini mendapat tantangan langsung dari pihak tentara. Dan ketika rumour politik beredar, bahwa buahh dari diplomasinya pemerintah dengan pihhak Belanda — untuk tahap pertama — hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja, serta akan diadakan reorganisasi tentara dari Menteri Pertahanan, maka tidak hanya masyarakat saja yang resah, pihak tentarapun marah.

Puncak kemarahan dan ketidak puasan pihak tentara itu ditunjukkan dengan menculik Sutan Sjahrir, yang kebetulan sedang berada di Solo, pada 27 Juni 1946. Segera terjadi krisis kabinet dan negara dalam keadaan bahaya. Presiden Soekarno kemudian berpidato di depan radio, meminta masyarakat untuk membebaskan Perdana Menteri dan mengingatkan betapa berbahayanya "musuh dari dalam", yang tidak membedakan antara oposisi dengan destruksi.⁵⁷⁾ Pidato ini ternyata epektif dan Sutan Sjahrir segera dibebaskan. Tapi pihak tentara tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan beberapa tokoh oposisi, yang baru saja dibebaskannya dari penjara, merekasegera menghhadap ke Istana pada 3 Juli 1946. Mereka meminta kepada Presiden agar kabinet Sjahrir yang telah demisioner itu diganti saja dengan kabinet baru yang lebih revolusioner.

Presiden Soekarno ternyata menolak permintaan itu, bahkan menuduhnya gerakan ini sebagai *Kudeta* terang-terangan. Mereka segera ditangkap. Dan razia politik pun dilanjutkan. Kali ini tidak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh politik, melainkan tokoh-tokoh pers juga terkena sasaran. Dengan demikian, tidak pelak lagi, pemihakan Presiden Soekarno (sebagai faktor integratif bangsa) yang tegas kepada pemerintah Sutan Sjahrir — Amir Sjarifoedin ini, merupakan kemenangan besar bagi dilanjutkannya politik diplomasi. Sebaliknya, hal itu merupakan kekalahan telak bagi pihhak oposisi yang menghendaki jalan pertempuran dalam mempertahankan

kemmerdekaan.⁵⁸⁾ Itulah, barangkali, salahh satu implikasi dari peristiwa 3 Juli 1946.

Akibat situasi politik yang gawat itu, surat kabar *Lasjkar* tidak terbit sejak 23 Juni sampai dengan 4 Juli 1946. Ketika terbit kembali pada 5 Juli 1946, *Lasjkar* segera menunjukkan ketidak setujuannya terhadap pihak oposisi, dengan menyatakan : "Sembojan jang hebat-hebat sering boeahnja tidak akan menginsjafkan orang, tetapi malah menjebabkan orang silau dan (tak) tahoe kenjataan lagi".⁵⁹⁾ Sementara itu keberpihakkannya kepada pemerintah, nampak dari pernyataan : "Seloeroeh rakjat Soerakarta ta'at dan toendoek sepeoe-h-penoe-hnja kepada Presiden".⁶⁰⁾ Akhirnya ketika pemerintah mendakwah, bahwa *dalang* dibalik "peristiwa 3 Juli" yang menghebohkan itu adalah Tan Malaka dan kawan-kawannya, kembali *Lasjkar* menyatakan sebagai berikut :

NICA asjik mentjatoet daerah Indonesia. djanganlah kita asjik tjatoet-mentjatoet dalam kalangan sendiri. Tjatoetlah NICA !

MENTJATOET Nica berarti mengoesahkan pengakoean de facto dan jure atas Repoeblik Indonesia. Tapi mentjatoet dalam kalangan sendiri, berarti merobohhkan Repoeblik Indonesia!⁶¹⁾

Sebenarnya, sebelum peristiwa 3 Juli terjadi, surat kabar *Lasjkar* sudah memperingatkan kepada para elite politik Indonesia untuk tidak saling "mentjatoet", karena hal itu hanya merugikan "kita" dan menguntungkan "mereka" (Belanda).

Karikatur berikut ini barangkali, merupakan peringatan yang jelas :



6. Akhirul Kalam dan Refleksi Kekinian

Dari penjelasan di atas menjadi jelas, bahwa pers pada masa awal revolusi di Indonesia memiliki hak mengekspresikan dirinya secara sangat bebas. Dihadapkan pada isu politik nasional tentang pilihan “bertempoer” atau “beroending” dalam mempertahankan kemerdekaan, pers mampu menyuarakan pandangan, sikap dan pendiriannya dalam bahasa yang lugas, tegas, terus terang, dan bahkan ada yang vulgar. Dengan demikian pro-kontra, simpati-antipati, atau sikap moderat-radikal dari pers — sebagaimana ditunjukkan dalam sajian, tajuk rencana, pojok, motto dan karikatur — dalam menanggapi suatu persoalan yang dinilai penting pada jamannya, dibiarkan dan dianggap wajar sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangat kemerdekaan.

Pers sekarang, tentu saja, tidak bisa mencontoh — apalagi mewarisi — kebebasan berekspresi seperti pers pada masa awal revolusi itu. Betapapun dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar anjuran tentang perlunya mewarisi dan melestarikan “nilai-nilai dan semangat ‘45” dalam kehidupan yang nyata. Pers Indonesia sekarang, baik dalam menyajikan berita (*news*) maupun memberikan pandangan (*views*), harus menempatkan dirinya sebagai pers yang bebas tapi bertanggung jawab. Walaupun istilah “bebas dan tanggung jawab menurut dan kepada siapa” ini masih terus diperdebatkan. Pers Indonesia sekarang juga tidak bisa menggunakan bahasa yang lugas, terus terang, apalagi telanjang (vulgar) seperti pers pada masa awal revolusi. Norma-norma kesopanan, kehalusan dan kepantasan harus dijadikan kerangka acuan bagi pers dalam menyajikan *news* dan *views*-nya. Akhirnya pers Indonesia sekarang dituntut, diantaranya, “... harus mampu menangkap pesan-pesan yang seringkali justru tidak terucapkan”.⁶² Suatu kemampuan yang — bagi bukan orang Jawa atau orang Jawa yang belum menjadi Jawa (durung nJawani) — nampaknya agak sulit untuk dilaksanakan.⁶³⁾

Catatan

- *) Tulisan ini, sebelum diringkas dan diperbaiki kembali dalam bentuknya seperti sekarang, pernah disajikan dalam “Diskusi Sejarah Lokal Revolusi Kemerdekaan 1945-1950”, di Semarang, pada 13-15 Oktober 1994.

- 1 Lihat George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca*. New York : Cornell University Press. 1970. terutama bab VI, hlm. 147-212.
- 2 Mochtar Lubis, menggambarkan suasana jaman pada masa itu sebagai, "... Ini revolusi sudah seperti banjir, dan tidak seorangpun yang bisa kuasai lagi perjalanannya. Apa yang kita lakukan, dia ambil jalan sendiri". Lihat novelnya, *Jalan Tak Ada Ujung*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 98.
- 3 Ulrich Kratz, "Peranan Pers dalam Revolusi" dalam Collin Wild dan Peter Carey (peny.), *Gelora Api Revolusi. Sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia, 1986, hlm. 49-51.
- 4 Tentang perubahan surat kabar dari *Asia Raya* ke *Merdeka* dan *Soeara Asia* ke *Soeara Rakjat*, baca JR. Chaniago et.al.(peny.), *Ditugaskan Sejarah. Perjuangan Merdeka 1945-1985*, Jakarta : Pustaka Merdeka, 1987, hlm 23-34; dan Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, *A. Azis Wartawan Kita*, Jakarta : PT Gramedia, 1985, hlm 82-103
- 5 Lihat Wartini Santoso, *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*, Jakarta : Perpustnas-Depdikbud, 1984, ed. revisi, passim.
- 6 Setelah bulan Juli 1946, orientasi berita pers lebih banyak ditujukan ke kejadian-kejadian di luar negeri, terutama yang berhubungan dengan perjuangan diplomasi Indonesia. Isyu politik yang disajikan pers juga berubah, yakni mengenai pro dan kontra terhadap naskah Persetujuan Linggarjati. Mengenai ini, baca Susanto Zuhdi, "Perjanjian Linggarjati Dilihat Oleh Beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa" dalam A.B. Lopian & P.J. Drooglever (peny.), *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta : PT Graffiti Pers, 1992, hlm. 135-50
- 7 Edisi nomor perdana surat kabar ini memakai tanggal. Ada yang menyebut 6 September 1945, ada pula yang menyebut 29 September 1945. Tapi kalau penerbitan surat kabar ini dimaksudkan sebagai tandingan terhadap *Berita Gunseikanbu* (Jepang) yang melarang berita-berita atau kegiatan yang mendukung proklamasi kemerdekaan, mungkin ia diterbitkan pada pertengahan September 1945.

- 8 Informasi mengenai daerah penyebaran surat kabar ini diperoleh dari "Warta Administrasi", *Berita Indonesia*, 20 Oktober 1945, hlm. 4
- 9 Lihat motto *Ibid*, 25 Oktober 1945, hlm. 2.
- 10 Baca "Memperkenalkan Diri", tajuk *Ibid*, No.1, hlm.1
- 11 Baca "Perdjoeangan Kita", *Ibid*, hlm.1.
- 12 Lihat tajuk *Ibid*, No.2, hlm. 1
- 13 Lihat "Masalah Kebangsaan Kita", opini *Ibid*, no. 3, hlm.2
- 14 Lihat pojok *Ibid*, no.2, hlm.4
- 15 Lihat tajuk *Ibid*, 7 Oktober 1945, hlm.3.
- 16 Lihat "Makloemmat Kepada Rakjat", berita *Ibid*, hlm. 3.
- 17 Lihat "Lain doeloe lain sekarang", pojok *Ibid*, 10 Oktober 1945, hlm. 4
- 18 Bagi lawan-lawan politik Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifoedin, pergantian sistem pemerintahan ini merupakan peristiwa *the silent coup* (kudeta diam-diam). Lihat Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, (terjemahan J. Rumbo dari "Java ini a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944-1946"), Jakarta : PT Sinar Harapan, 1988, hlm. 195-218; dan Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, *Kesadaran nasional, Sebuah Otobiografi*, Jakarta : Gunung Agung, 1978, hlm. 414.
- 19 Lihat "Kabinet Baroe", tajuk *Ibid*, 13 Nopember 1945, hlm. 1. Tentang isi selengkapnya brosur ini, baca Sutan Sjahrir, *Our Struggle* (terjemahan dan kata pengantar oleh Benedict R.O.G. Anderson) Ithaca : Cornell Modern Indonesia Project, 1986.
- 20 Lihat "Kearah Indonesia Baroe", tajuk *BI*, 14 Nopember 1945, hlm. 1.
- 21 Lihat "Lenjaplah Burokari Djepang", opini *Ibid*, hlm.2.
- 22 Lihat "Kabinet baroe tidak kenal kompromi", berita utama *Ibid*, 16 Nopember 1945, hlm.1; dimana Sutan Sjahrir, diantaranya, menyatakan, "... djanganlah hendaknja orang salah mengerti kalau

Pemerintah mengadakan peremboekan dengan lai2 pihak, karena kalau ada pihak loear hendak mendekati kita, kita haroes meladeni, sebab kita tidak dapat berboeat seakan-akan doenia tidak ada. dan hanja kita sadja jang ada di doenia ini”.

- 23 Lihat “Kemenangan Kita’ tajuk *Ibid*, 1 Desember 1945, hlm.1. Adalah kebiasaan yang lumrah bagi pers pada waktu itu dalam menuliskan kata Belanda dengan huruf b kecil, dengan maksud untuk mengecilkan arti dan kekuatan mmereka (pihak Belanda).
- 24 Lihat pojok *Ibid*, 30 Oktober 1945, hlm. 4.
- 25 Lihat tajuk *Ibid*, 17 Desember 1945, hlm. 1.
- 26 *Ibid*, 26 Desember 1945, hlm. 1.
- 27 Dalam pandangan Tan Malaka, revolusi Indonesia itu harus ditempatkan sebagai perjuangan revolusioner dan total untuk merubah keadaan struktur sosial-politik yang sudah mapan. Perjuangan harus dilakukan dengan memobilisir semangat dan kekuatan rakyat, mengambil alih dan menguasai sumber-sumber produksi ekonomi, serta menolak berunding dengan pihak musuh sebelum mereka meninggalkan tanah air Indonesia dan mau mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. Tentang Tan Malaka dan brosur *Moesliha*-nya, baca Ben Anderson, *Op. Cit.*, hlm. 299-326; dan Rudolf Mrazek, *Semesta Tan Malaka*, (terjemahan E. Haryono dan B. Setyanto dari “Tan Malaka, A Political Personality Structure of Experience”), Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994, hlm. 81-101.
- 28 Lihat tajuk *BI*, 27 Desember 1945, hlm. 1.
- 29 Tentang peristiwa revolusi sosial di daerah Banten, baca Michael C. Williams, “Utang- Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah” dalam Audrey R. Kahin (ed.), *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, (terjemahan Satyagrana Hoerip dari “Regional Dynamics of the Indonesia Revolution”), Jakarta : PT Grafiti Pers. 1990, hlm. 60-88; sedangkan tentang revolusi sosial di wilayah Keresidenan Pekalongan, lihat Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*, (terjemahan dari " The Bamboo Spear Piaerces the Payung : The Revolution agaibst the

Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945"), Jakarta : PT Grafiti Pers, 1989.

- 30 Lihat pojok *BI*, 11 Januari 1946, hlm. 2.
- 31 *Ibid.* 10 Januari 1946, hlm.1.
- 32 Lihat berita *Ibid.* 16 Pebruari 1946, hlm. 1.
- 33 Hal itu terlihat, ketika *BI* terbit kembali bulan Juni 1946, warna dan isi beritanya menjadi "lain", yaitu lebih mendukung kebijaksanaan politik pemerintah. Foto-foto dan kutipan pidato dari Sutan Sjahrir (Perdana Menteri) dan Amir Sjarifoedin (Menteri Pertahanan) dijadikan sebagai motto, dan ditempatkan pada halaman pertama sudut kiri atas atau kanan surat kabar itu.
- 34 Lihat motto *Warta Indonesia*, 29 September 1945, hlm.1.
- 35 Lihat "Dekrit Presiden Kita", tajuk *Ibid*, hlm. 1.
- 36 Lihat "Diplomasi Kita", tajuk *Ibid.* 1 Oktober 1945, hlm. 1.
- 37 *Ibid.* 26 Oktober 1945, hlm. 1.
- 38 *Ibid.* 30 Oktober 1945, hlm. 1.
- 39 *Ibid.* 2 Nopember 1945, hlm. 1
- 40 Lihat "Kata Nabi Moehammad S.A.W. ", pojok *Ibid.* 10 Nopember 1945, hlm 2.
- 41 Sebenarnya sejak 3 Nopember 1945, *WI* sudah menurunkan tajuknya dengan mengharapkan Sutan Sjahrir sebagai " bintang toentoenan, lintang panoetan, atau guiding star" untuk memimpin revolusi Indonesia ini.
- 42 Menurut pihak Redaksi, *Lasjkar* ini merupakan leburan dari surat kabar *Merah-poetih* dan *Banteng*. Lihat "Berita Tata Oesaha", *Lasjkar*, 1 Desember 1945, hlm 2.
- 43 Barangkali untuk melihat tinggi -rendahnya harga surat kabar pada masa itu, kita bisa membandingkannya dengan harga beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Pada akhir 1945 harga eceran surat kabar, sebagaimana ditunjukkan *Lasjkar*, sekitar 30 sen: sedangkan harga beras 1 kg, menurut harga resmi dari pemerintah, sekitar 15 sen. Sekarang, harga eceran surat kabar sekitar 5-600

rupiah; sedangkan harga beras 1 kg sekitar 750-1000 rupiah. Jadi harga surat kabar pada masa revolusi, nampaknya pada masa itu, satu surat kabar suka dibaca oleh banyak orang secara bergiliran.

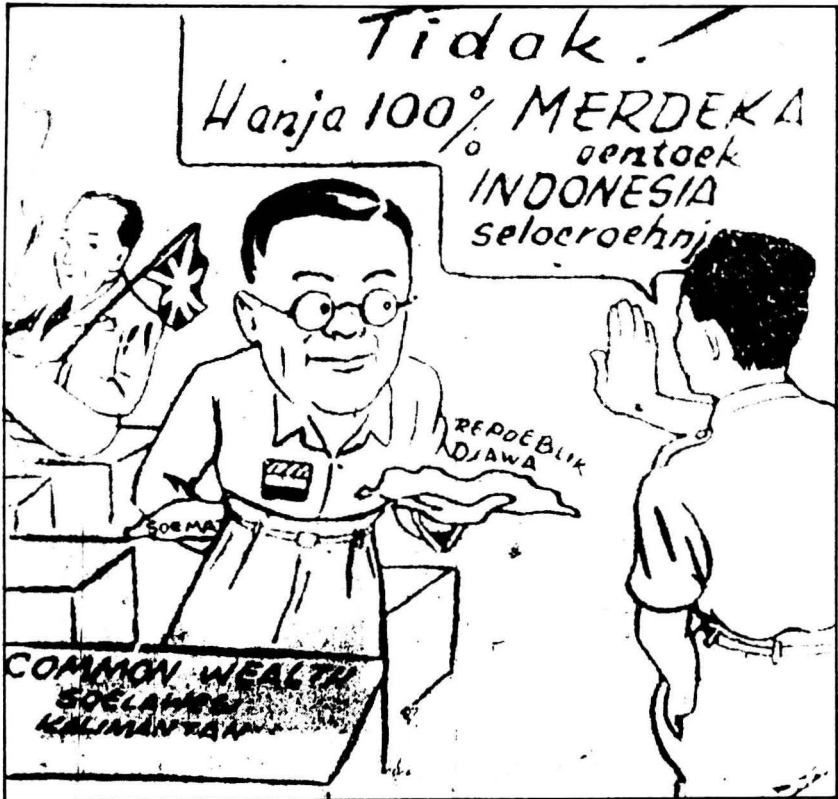
- 44 Informasi daerah penyebaran surat kabar ini, diperoleh dari surat-surat pembaca yang masuk ke meja Redaksi dan dikomentari oleh *Sepandri* (penjaga kolom pojok) setiap hari Sabtu dengan judul "Pinggir Garis : Malem Minggu". Selanjutnya lihat pojok *Lasjkar*, 12 dan 19 Januari 1946, hlm. 2.
- 45 Lihat motto *Ibid*, 1 Desember 1945, hlm. 1.
- 46 Sikap moderat *Lasjkar* nampak juga ketika salah seorang pembacanya meminta agar nama surat kabar ini diganti saja menjadi *Darah Ra'jat*, sesuai dengan dinamika revolusi yang semakin hebat, ternyata tidak disetujui oleh pihak Redaksi. Lihat "Pinggir Garis : Malem Minggu", pojok *Ibid*, 26 Januari 1946, hlm. 2.
- 47 Lihat tajuk *Ibid*, 26 Desember 1945, hlm. 1; yang menyatakan, diantaranya, "... kedaulatan rakyat itoe boekan berarti rakyat dapat atau boleh bertindak sendiri², semaoe-maoenja sadja. Haroes ada atoeran, ada tatanan. Karena kalau tidak ada atoeran, berarti anarchie".
- 48 Lihat *Ibid*, 1 Pebruari 1946, hlm. 2.
- 49 Lihat "Permoesjawaratan Persatoean Perdjoengan, Hari Kedoea", berita *Ibid*, 30 Januari 1946, hlm. 2.
- 50 Lihat "Persatoean Perdjoengan Tidak Iri Bereboet Kerosi", berita *Ibid*, hlm. 2.
- 51 Lihat berita utama *Ibid*, 27 Pebruari 1946, hlm. 1. Tentang pandangan, sikap dan perilaku politik Pnaglisma Besar Jenderal Sudirman selama revolusi, baca Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics*, 1945-49, Jakarta : PT Sinar Harapan, 1992.
- 52 Lihat pojok *Lasjkar*, 14 Maret 1946, hlm. 2.
- 53 Lihat pojok *Ibid*, 9 Maret 1946, hlm. 2.

- 54 Lihat *Berita Repoeblik Indonesia*, Jakarta : 15 April 1946, hlm. 110.
- 55 Menurut Aboe Bakar Loebis, dialah yang bersama-sama dengan pemuda Imam Slamet, mmelakukan penangkapan itu dilakukan atas ijin Sutan Sjahrir (PM) dan Dr. Soedarsono (Mendagri), perintah Amir Sjarifoedin (Menhan), dan disetujui (bahkan dibiayai dan diberi fasilitas kendaraan) oleh Presiden Soekarno. Lihat Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi. Kenangan. pelaku dan Saksi*, Jakarta : UI Press, 1992 hhlml. 152-156.
- 56 Lihat "Penangkapan Politik di Solo", tajuk *Lasjkar*, 25 Mei 1946, hlm. 1.
- 57 John D. Legge, *Sukarno, Sebuah Biografi Politik* (terjemahan dari "Sukarno, A Political Biography"), Jakarta : Sinar Harapan, 1985, hlm. 254.
- 58 Ben Anderson, *Op.Cit.*, hlm. 439.
- 59 Lihat motto *Lasjkar*, 5 Juli 1946, hlm. 1.
- 60 Motto *Ibid*, 6 Juli 1946, hlm. 1.
- 61 Motto *Ibid*, 8 Juli 1946, hlm. 1.
- 62 Lihat Pidato Presiden Soeharto dalam hari Pers Nasional di Menado, berita utama *Republika*, *Kompas* dan *Media Indonesia*, Jakarta : 10 Pebruari 1995, hlm. 1.
- 63 Adalah menarik, bahwa harian *Pikiran Rakyat*, Bandung : 10 Pebruari 1995, dalam tajuknya "Pak Harto tentang Pers Kita", diantaranya menyatakan, "... Menampilkan yang tidak terucapkan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Seringkali apa yang tidak terucapkan itu tidak dapat tampil karena jajaran pers khawatir terhadap akibat dari berita yang mereka muat. ..." Sedangkan Goenawan Mohammad, pemimpin *Tempo*, pernah diberi isyarat tidak langsung agar hati-hati dalam menyajikan berita dan supaya menggeser posisi Fikri Jufri sebagai ketua redaksi, karena kurang disenangi oleh pemerintah. Pesan yang tak terucapkan ini nampaknya tidak dilaksanakan dan akibatnya majalah yang bermotto "enak dibaca dan perlu" ini tewas alias almarhum pada 21 Juni 1994. Tidak terkecuali dengan majalah *Editor* dan tabloid

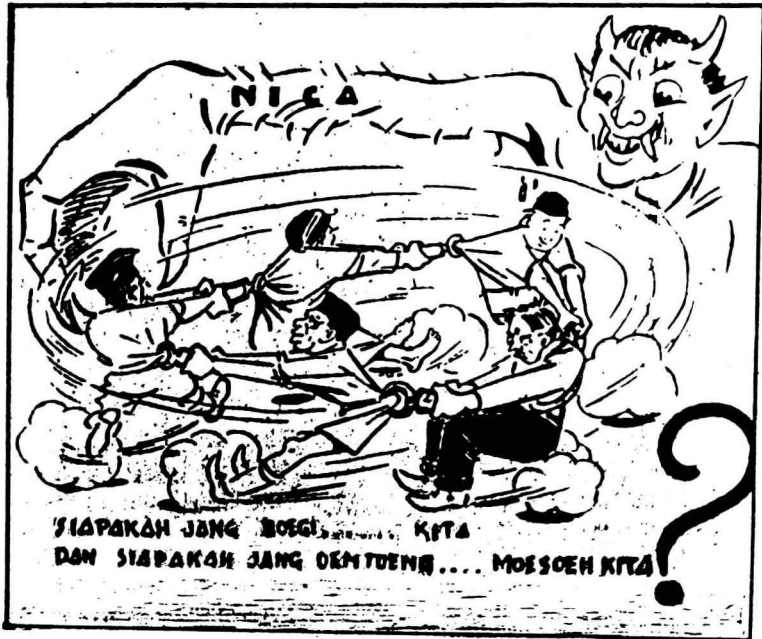
Detik. Selanjutnya lihat Goenawan Mohammad, "Pembredelan, Kenyataan, dan Takhyul Politik" dalam Ayu Utami et.al. (peny.), *Bredel 1994*, Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen, 1994, hlm. 28-36; dan Tim Wartawan Tempo (peny.), *Buku Putih Tempo : Pembredelan Itu*, Jakarta : Alumni Majalah Tempo, 1994.



(Sumber : Merdeka, 12 Oktober 1945, hlm 1)



(Sumber : Lasjkar. 8 Mei 1946, hlm 1)



(Sumber : Lasjkar, 9 Mei 1946, hlm 1)

KNI DAN PERGOLAKAN INTERNAL

Dwi Purwoko

1. Pendahuluan

Kajian sejarah lokal kini semakin marak. Beberapa seminar muncul untuk membahas kajian ini, termasuk seminar ini.

Sejarah lokal itu sendiri sebagai bahan pelengkap dari apa yang untuk mudahnya disebut sejarah nasional, seperti yang sering diajukan hanyalah suatu sikap rendah diri yang tak perlu. Hasil akhir dari studi khusus yang baik terkadang akan memberikan bahan bagi pengetahuan yang lebih umum adalah benar (Lihat juga Taufik Abdullah, 1985: 18). Bahkan terkadang sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekstra lokal (Taufik Abdullah, 1985:18). Namun tidak semua peristiwa-peristiwa nasional dapat berdampak pada dinamika politik di tingkat lokal.

Seperti halnya dengan institusi Komite Nasional Indonesia (KNI). Pergolakan internal yang terjadi dalam tubuh KNI terutama di tingkat pusat belum tentu berdampak pada KNI-lokal.

Makalah ini lebih memfokuskan pada masalah pergolakan internal yang terjadi dalam KNI tingkat pusat yang disebabkan antara lain oleh soal penambahan jumlah anggota KNIP lewat PP. No. 6 dan soal peratifikasikan perjanjian dengan pihak Belanda (terutama Linggajati), serta sejauhmana keputusan-keputusan dan pergolakan yang terjadi di KNIP mempunyai dampak terhadap KNI-lokal.

2 Terbentuknya KNI

Sebagaimana telah diketahui bahwa dasar pembentukan KNI adalah keputusan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian dituangkan dalam pasal IV Aturan Tambahan dan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional."

Sesuai dengan perkembangan waktu, KNI dikembangkan menjadi KNIP. Pada mulanya KNIP merupakan badan pembantu presiden. Tugas ini didasarkan pada keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Perlu diketahui bahwa embrio dari KNIP berasal dari PPKI. Anggota-anggotanya terdiri dari sebagian anggota PPKI, tokoh-tokoh terkemuka masyarakat yang berasal dari berbagai daerah atau memegang peranan dalam perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian KNIP itu sendiri beberapa anggotanya adalah mantan anggota PPKI. Beberapa data menunjukkan bahwa jumlah anggota PPKI adalah sekitar 137 orang. Pada tanggal 29 Agustus 1945, anggota ini dilantik oleh Presiden.

Pada awal kepengurusan KNIP dipegang oleh Mr. Kasman Singodimedjo (Ketua), Soetardjo (Wakil Ketua I), Mr. Latuharhary (Wakil Ketua II) dan Adam Malik (Wakil Ketua III).

Dalam perjalanan selanjutnya, KNIP yang semula berstatus sebagai pembantu Presiden berubah fungsi menjadi institusi yang bekerjasama dengan Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas legislatif. Perubahan fungsi ini atas desakan sebagian anggota KNIP yang tidak setuju pada fungsi KNIP yang lama. Mereka ini juga yang mendesak agar KNIP berubah menjadi semacam MPR.

3. Pergolakan di Tingkat KNIP

Beberapa sidang KNIP telah berlangsung. Salah satu sidang KNIP yang mencerminkan suasana revolusi adalah sidang KNIP II yang

berlangsung pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 1945. Sidang ini dihadiri oleh Presiden Sukarno dan wakil Presiden M. Hatta.

Suasana ketegangan setelah kemerdekaan masih tampak. Pembukaan sidang kedua diselimuti suasana tegang dan dibuka tanpa upacara resmi. Tidak terdengar lagu kebangsaan, tanpa mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan mendoakan arwah para pejuang yang telah wafat. Bendera merah putih hanya terdapat di kanan-kiri meja Ketua-KNIP. Suasana ini berlangsung pada awal sidang dan sidang-sidang KNIP berikutnya.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 diadakan pelantikan anggota KNIP. Banyak harapan agar sidang kali ini dapat menghasilkan keputusan yang akan semakin memperkuat kedudukan negara RI.

Sidang yang dibuka Kasman sebagai ketua KNIP, mendapat serangan dari Sukarni. Ia menganggap Kasman tidak pantas memimpin KNIP, mengingat ia dianggap telah mengkhianati janji untuk bersama Barisan Pelopor dalam menggerakkan kekuatan rakyat guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, jika keduanya menolak memproklamasikan kemerdekaan menurut versi pemuda. Bahkan dalam masa-masa yang nyaris memecahkan urat syaraf itu Daidancho Kasman, kata Sukarni, malah bertemu dengan pimpinan tertinggi militer Jepang kawasan Jawa-Madura di Bandung. Sukarni juga menuduh Kasman membiarkan Peta dilucuti senjatanya oleh Jepang.

Kritikan tajam Sukarni dengan gaya yang memukau, telah menyudutkan posisi Kasman. Tampaknya hadirin yang berada di dalam sidang KNIP pun merasa terpana mendengarkan alasan-alasan Sukarni dalam rangka menyudutkan Kasman. Pendukung Kasman dalam sidang tidak dapat membalas serangan Sukarni, yang juga, akhirnya dibenarkan sidang. Hal ini terlihat dari usul Sukarni yang disegera didukung anggota lainnya.

Dengan demikian, Sukarni yang dapat dikatakan sebagai wakil yang representatif dari golongan "muda" melihat bahwa KNIP yang terdiri dari golongan "tua" termasuk Kasman pernah melakukan sikap kooperatif dengan Jepang. Hal ini dilihat sebagai cacat dalam perjuangan.

Sukarni kemudian mengajukan alternatif pengganti Kasman sebagai Ketua KNIP. Salah seorang hadirin pendukung Sukarni menawarkan diri untuk menjemput Syahrir. Ia pun menjemput Syahrir yang kemudian oleh kelompok pendukungnya diangkat menjadi Ketua KNIP.

Setelah Syahrir berhasil memegang kekuasaan sebagai Ketua KNIP, ia membentuk Badan Pekerja dari berbagai aliran dan golongan, sehingga lebih mencerminkan sikap demokrasi. Syahrir kemudian merangkul tokoh-tokoh muda dari berbagai aliran seperti : Mr. Syafruddin Prawiranegara, M. Natsir, Mr. Amir Syarifuddin dll., menjadi anggota Badan Pekerja KNIP. Namun komposisi Badan Pekerja KNIP tetap didominasi oleh kelompok Syahrir.

Sidang KNIP seringkali diwarnai oleh gelombang ketegangan antar elitnya. Instruksi Presiden Sukarno tentang pembentukan partai tunggal, mendapat bahasan yang serius dari partai politik yang ada. Pada akhirnya instruksi Presiden itupun gagal. Bahkan pemerintah mendekritkan diperbolehkannya mendirikan partai politik secara bebas. Pada tanggal 3 Nopember 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat X yang berlaku surut sejak tanggal 16 Oktober 1945. Dengan dikeluarkannya maklumat ini berdirilah partai-partai baru. Dengan maklumat itu terbentuknya kabinet parlementer. Sejak ini pula lembaga perwakilan di Indonesia, menurut Herbert Feith, diwarnai oleh pengelompokkan wakil berdasarkan ideologi. Pertentangan ideologi antara kekuatan politik dalam KNIP baru tampak pada sidang pleno KNIP di Solo, yang membicarakan isu-isu politik dalam negeri (Lihat LRKN-LIPI, 1985: 26).

Pertentangan antar kekuatan politik serikat dengan adanya beberapa kekuatan politik umat Islam seperti Masyumi yang mempunyai sikap yang tidak setuju terhadap perubahan sistem kabinet yang didesakkan Sutan Syahrir dalam BP KNIP.

Natsir dalam sidang KNIP sebagai wakil Masyumi menolak perubahan tersebut. Dalam pandangan Masyumi, sistem kabinet presidentil akan lebih menjamin stabilitas pemerintahan dan perubahkan tersebut bertentangan dengan UUD. Namun telah terjadi

kesepakatan antar KNIP dengan Presiden, perubahan itupun dianggap mempunyai kekuatan hukum.

Kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan PM Syahrir telah terbentuk. Dengan kekuasaannya, Syahrir telah memperlihatkan kecenderungannya untuk berunding dengan Belanda (Perundingan Linggajati). Masyumi dan beberapa kekuatan politik lainnya bersama-sama membentuk Persatuan Perjuangan yang menolak sikap Syahrir tersebut. Bahkan ketika sidang BP KNIP di Malang yang sedang menyidangkan Linggajati, Barisan Banteng, Masyumi dan PNI menenggalkan sidang (Lihat Abdul Hakim, 1981: 53).

Akibat semakin kerasnya desakan dari oposisi PP, Kabinet Syahrir akhirnya mengundurkan diri. Akan tetapi pada bulan Maret 1946, Presiden Sukarno dalam sidang KNIP di Surakarta, memberi kembali kepercayaan kepada Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Terpilihnya kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri semakin mengerasnya sikap oposisi terhadap pemerintahannya. Peristiwa 3 Juli 1946 dapat dikatakan merupakan salah satu sikap oposisi yang menculik Syahrir dan beberapa stafnya. Dengan serta merta pemerintah menuduh Persatuan Perjuangan sebagai dalang gerakan tersebut yang dinilai berusaha merebut kekuasaan.

Peristiwa penculikan itu sendiri menyebabkan negara dalam keadaan bahaya. Akibat peristiwa tersebut untuk sementara, Presiden mengambilalih kekuasaan pemerintahan dan menyatakan negara dalam keadaan bahaya (SOB).

Campur tangan Sukarno dalam memegang pemerintahan telah menimbulkan situasi normal kembali. Syahrir pun dibebaskan dan ditunjuk kembali sebagai formatur kabinet pada tanggal 14 Agustus dengan mengumumkan susunan kabinetnya. Kabinet Syahrir pun terbentuk.

Pada Kabinet Syahrir III ini pun perjanjian Linggajati terus diperjuangkan. Menurut pihak oposisi, Syahrir terlampau banyak memberi konsesi terhadap pihak Belanda. Semakin kerasnya sikap oposisi terhadap Syahrir menyebabkan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 27 Juni 1947.

Setelah perjanjian Linggajati yang didukung Kabinet Syahrir, KNIP menjadi ajang pertemuan dalam membahas perundingan selanjutnya seperti Renville maupun KMB sebagaimana yang diprjuangkan pada Kabinet Amir Syarifuddin dan Hatta.

4. KNI-Daerah

Ketua KNIP pada awal kepemimpinannya dipegang oleh Kasman Singodimedjo menganjurkan kepada gubernur-gubernur untuk KNI-Daerah mereka; bahkan ada yang terbentuk sampai tingkat kabupaten. Komunikasi dengan KNI-Daerah dilayani oleh KNIP dengan hanya diberi penjelasan lisan saja. Apabila mereka meminta pendapat atau instruksi, mereka akan melaksanakan perintah lisan tersebut, tanpa surat, tanpa tanda tangan dan tanpa stempel. Sedangkan KNIP bertugas untuk memimpin dan memberi petunjuk kepada komite nasional dan daerah (lihat Sekretariat DPR-GR, 1983: 4).

Persoalan-persoalan yang dialami daerah dan pusat, yang dapat mengakibatkan kegaduhan atau keributan, KNIP segera bertindak menyelesaikannya, mengingat ketika itu masih belum ada kepolisian yang normal (Lihat juga Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 140).

Pembentukan KNI-Daerah sampai juga ke Sumatera. Dari tahun 1945-1949 di Sumatera terdapat sekitar 9 Karesidenan, kecuali Bangka-Belitung yang masih dikuasai Belanda. Pada setiap keresidenan dibentuk KNI-Daerah.

Mekanisme pengiriman setiap wakil keresidenan ke KNIP dipilih oleh gubernur yang ketika itu dipegang oleh Mr. M. Hasan. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat 9 unsur utusan dari karesidenan yang masing-masing karesidenan dipilih oleh gubernur 1-3 orang atau lebih dari berbagai latarbelakang kekuatan politik untuk mengikuti sidang-sidang di KNIP.

Memang terdapat mekanisme keterikatan antara kekuatan-kekuatan politik yang mengadakan penawaran politik di dalam KNIP dan utusan KNI-Daerah yang diwakili oleh kekuatan-kekuatan politik daerah yang juga mempunyai keterikatan tertentu. Namun gejala

yang terjadi dalam KNIP Jakarta tidak mempunyai pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan politik di Sumatera. Bahkan ketika terjadi pemberontakan PKI-Madiun-Muso tahun 1948, di Sumatera tidak terpengaruh. Padahal Hatta (Wakil Presiden) telah mengirim kawat kepada Hasan (sebagai gubernur Sumatera) untuk mengmabil tindakan untuk menangkap orang-orang PKI di Sumatera. Namun Hasan tidak melaksanakan kawat tersebut, mengingat PKI di Sumatera tidak mengadakan huru-hara. PKI di sana merupakan partai kecil dan orang-orang PKI sebagai tokoh yang masuk dalam birokrat pemerintahan tidak mengadakan gerakan.

Demikian juga hubungan antara kekuatan-kekuatan politik di Sumatera ketika revolusi, berjalan dengan baik. Hubungan antara PNI, PKI, Masyumi yang mempunyai orang-orangnya di KNI-Lokal tidak menampakkan egoisme yang berlebihan. Mereka tidak terpengaruh oleh atmosfer politik di tingkat pusat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sumatera mempunyai Dewan Perwakilan Sumatera yang membawahi KNI-Daerah Sumatera. Fungsi Dewan Perwakilan Sumatera adalah mengontrol aktivitas Gubernur. Namun demikian, sebenarnya aktivitas gubernur cenderung absolut, karena gubernur memegang kekuasaan sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat.

Pada awal revolusi, terutama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan hari-hari berikutnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baru saja dibentuk dan roda pemerintahan belum berjalan. Adapun tugas awal komite nasional adalah membantu badan eksekutif setelah terbentuknya KNIP pertama, yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, diantaranya juga bekas anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa sebagian bekas anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan itu ada pula yang telah ditetapkan menjadi menteri/kepala daerah.

Dengan terbentuknya KNIP, maka mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, terutama mereka yang berasal dari daerah pulang ke daerah masing-masing untuk melaksanakan tugas membentuk Komite Nasional Daerah, dengan mendapat mandat sebagai wakil dari KNIP (Lihat Seperempat Abad DPR-RI, 1983:6).

Pada bulan Oktober 1945 ada semacam instruksi dari KNIP agar Komite Nasional di daerah dapat mengusahakan berdirinya organisasi-organisasi tani untuk menguatkan Republik Indonesia yang baru merdeka. disamping itu diinstruksikan pula agar dapat memperkuat kemerdekaan.

Ketika awal proklamasi dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan kemerdekaan, Hatta melalui pidato yang diucapkan pada tanggal 29 Agustus 1945 agar KNI baik di pusat maupun daerah golongan dan aliran paham yang ada dalam masyarakat, mengingat dalam persepsi Hatta bahwa Indonesia merdeka harus bersatu, tidak ada perselisihan paham sedikitpun yang merasa mempunyai sifat manusia dan mempunyai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, Komite Nasional baik di Pusat maupun daerah merupakan penjelmaan dari kebulatan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite Nasional juga menerima kewajiban untuk membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum. Dalam pandangan Hatta, pembentukan Komite Nasional di seluruh daerah merupakan wadah bagi pemuda untuk menjadi penggerak rakyat di pelosok-pelosok atau di desa-desa yang paling jauh sekalipun.

5. Penutup

Ternyata lokalitas tidak selalu mewarnai pusat atau sebaliknya. Demikian juga produk yang dihasilkan pusat tidak selalu bisa berpengaruh terhadap lokal.

Keputusan-keputusan yang dikeluarkan KNI Pusat yang tidak disetujui kekuatan politik yang ada dan membawa ketegangan, tidak selalu dapat menciptakan ketegangan di tingkat lokal.

Intrik-intrik antar elit politik yang berlainan warnai ideologi telah mempertajam dinamika konflik kepentingan di tingkat pusat. Usul Syahrir dalam KNIP tentang penambahan jumlah anggotanya segera ditanggapi oleh lawan politiknya sehingga Program-program kabinet Syahrir mengalami hambatan.

Tampaknya KNIP dipakai watak permainan politik antara elit untuk mencapai tujuan mereka. Dan pergolakan yang ada di tingkat pusat ternyata tidak mempunyai dampak langsung pada KNI-Daerah.

Dapat dikatakan bahwa KNI-Daerah ternyata tidak mempunyai struktur hirarki yang tegas terhadap pusat. Misalnya dukungan kekuatan-kekuatan politik KNI-Daerah di Sumatera kepada satu kekuatan politik di KNIP hanyalah didasarkan pada kesamaan ideologi semata.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 1985.
- Achmadn Nadjamudin. *Inventaris Arsip BP-KNIP 1945-1950*. Depok: FSUI, 1986.
- Arsip nasional, *Di antara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950*. Jakarta: Arsip Nasional, 1981.
- Anak Agung Gde, Ide., *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Berita Republik Indonesia* Tahun I No. 2 halaman 12 kolom 2 dan Tahun I no. 1 halaman 4 kolom 1.
- Erviza, "Peranan Kelompok Nasionalis (PNI) Dalam KNIP", dalam *Dinamika Perkembangan Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K, 1991.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press, 1968.
- LRKN-LIPI. *Penelitian Tentang Fungsi DPR Dalam Teori dan Praktek (Periode 1945-1950)*. Jakarta: LRKN, 1985.
- Mestenhauser, Josef A., *Ideologies in Conflict in Indonesia (1945-1955)*. Minnesota: University of Minnesota, 1960.
- Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat RI*, Jakarta: Sekretariat DPR, 1983.

Wawancara

Mr. Teuku M. Hasan, Mantan Gubernur Sumatera 1945-1949.

Endah Mara, anggota KNIP dan notulen pada kantor gubernur Sumatera sewaktu kepemimpinan Mr. Teuku M. Hasan.

KOMITE NASIONAL INDONESIA DAERAH DAN PERGOLAKAN INTERNAL DI TINGKAT LOKAL : KASUS BANTEN

Mohammad Iskandar

1. Pendahuluan

Menurut pakar politik Amerika Serikat, Samuel Huntington, revolusi membutuhkan kehadiran lembaga politik, terutama bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi.¹ Dalam kajian-kajian sejarah revolusi Indonesia, boleh dikatakan masih jarang yang mengungkapkan peranan lembaga Komite Nasional Indonesia tingkat daerah (KNID). Umumnya yang menjadi topik pembicaraan hanyalah mengenai aktivitas Komite Nasional Pusat (KNIP) dengan Badan Pekerja KNIP yang berskala nasional. Akibatnya sebagian besar gambaran pemerintah daerah beserta aktivitasnya semasa revolusi menjadi kabur. Tentu saja banyak alasan yang dapat diajukan, mengapa kajian dengan perspektif kedaerahan seringkali terabaikan. Pertama, penulisan sejarah dengan perspektif kedaerahan seringkali dikhawatirkan dapat memancing munculnya semacam kajian-kajian primordialisme yang pada gilirannya nanti mendorong timbulnya disintegrasi nasional. Kedua, langkanya sumber-sumber primer yang berkaitan langsung dengan aktivitas KNID, yang membuat para sejarawan memilih kajian yang berspektif nasional, yang sumbernya relatif lebih banyak. Namun menurut Robert Bridson Cribb, alasan utama kelangkaan kajian dengan perspektif kedaerahan itu

adalah karena kelangkaan gagasan yang jelas tentang peristiwa di tingkat daerah.²

2. Situasi dan Kondisi Banten pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah pertempuran Midway, angkatan perang kerajaan Jepang terus menerus mendapat tekanan berat. Satu persatu daerah-daerah yang didudukinya dapat direbut kembali oleh angkatan perang Amerika Serikat. Tekanan itu tidak saja terasa di garis depan, tetapi juga terasa jauh sampai ke daerah-daerah yang tidak mendapat serangan langsung dari angkatan Amerika Serikat, terutama daerah-daerah pendudukan seperti Indonesia. Di Banten, pemerintah pendudukan Jepang telah memerintahkan masyarakat setempat untuk mengumpulkan dan menyerahkan bahan makanan serta bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh Jepang untuk mempertahankan peperangannya di Asia Pasifik.

Di samping tuntutan untuk menyerahkan sebagian (besar) harta kekayaannya, pemerintah melalui *tonarigumi* (lembaga rukun tetangga), juga menuntut adanya penyerahan tenaga, terutama dalam rangka memenangkan perang. Banyak penduduk dari residensi Banten dijadikan pasukan militer bantu seperti *heiho*, yang dikirim ke medan perang. Selain itu tidak sedikit pula yang dijadikan tenaga kerja paksa *romusha* alias 'pahlawan ekonomi'.³ Para pahlawan ekonomi ini, antara lain dipaksa untuk membangun jaringan jalan kereta api dari Saketi ke Bayah; membangun lapangan terbang Gorda; membuat basis pertahanan di pulau Panaitan; serta menambang batu bara di pertambangan Bayah Kozan.⁴ Tidak sedikit dari para *romusha* ini yang meninggal dunia karena kurang makan atau karena tidak tahan mendapat siksaan dari para pengawas Jepang.⁵

Dalam rangka memelihara semangat tempur para serdadunya, pemerintah pendudukan Jepang telah mendirikan tempat-tempat hiburan lengkap dengan wanita-wanita penghiburnya, yang umumnya diambil dari kalangan Pribumi. Para wanita penghibur ini dikenal dengan sebutan *jugun ianfu*.⁶ Di kabupaten Serang para *jugun ianfu* ini mendapat sebutan *jobong Jepang* - dan mereka banyak ditempatkan di hotel-hotel atau tempat-tempat peristirahatan para

perwira, atau dekat tangsi militer Jepang yang terdapat di Cirendong.

Sudah barang tentu tindakan pemerintah pendudukan Jepang yang refresif itu, bukan saja menambah beban kehidupan rakyat setempat, melainkan juga telah mengikis simpatinya kepada Jepang, dan lambat laun berubah menjadi kebencian dan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan rakyat Banten terhadap Jepang waktu itu adalah dengan munculnya gerakan perlawanan bawah tanah, yang menamakan dirinya sebagai 'Gerakan Joyoboyo'.

Sebenarnya 'Gerakan Joyoboyo' telah berdiri di Bandung sebelum Jepang mendarat di Indonesia, yaitu pada tahun 1941. Pendirinya adalah sekelompok orang yang nati facis militer Jepang yang diketuai oleh Mohammad Yusuf. Kemudian organisasi ini membuka cabangnya di Serang, dengan tokohnya adalah Mohammad Mansjur dan Tje Mamat. Perlu dicatat di sini, tokoh Tje Mamat ini dikenal juga sebagai seorang *jawara*, dan pada tahun 1920 pernah menjabat sebagai ketua PKI sehingga dia dijatuhi hukuman dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah waktu itu.⁸

Selain ditunjuk sebagai pimpinan 'Gerakan Joyoboyo' di kabupaten Serang, Tje Mamat diberi wewenang untuk menorganisir kegiatan serupa di wilayah Banten lainnya, Tangerang dan Jakarta. Aksi perlawanan mereka terutama dalam bentuk aksi sabotase. Misalnya aksi pembongkaran rel kereta api antara Banjar - Pangandaran, yang diketahui sering dipergunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengangkut kepentingan militernya.⁹ Namun gerakan perlawanan ini dalam relatif singkat berhasil dibongkar oleh pihak Jepang. Beberapa tokohnya antara lain: Haji Sinting dan Tje Mamat, berhasil ditangkap. Kemudian Haji Sinting dijatuhi hukuman mati, sedangkan Tje Mamat dipenjarakan di penjara Tanah Abang III, Jakarta.¹⁰

Setelah 'Gerakan Joyoboyo' ditumpas, lalu muncul organisasi baru yang mempunyai sifat hampir sama dengan 'Gerakan Joyoboyo'. Namun mempunyai hubungan lebih luas. Organisasi yang disebut terakhir ini, selain bergerak sendiri, juga menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan bawah tanah lainnya, terutama 'Gerakan Angkatan

Baru Indonesia” (GABI) yang berada di Jakarta.¹¹ Dengan adanya kerjasama ini, banyak informasi skala lokal maupun internasional yang mereka terima melalui GABI.

Di samping kelompok yang melakukan perlawanan, tidak sedikit pula tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Banten yang melakukan kolaborasi. Dengan alasan tertentu mereka bekerja pada lembaga-lembaga bentukan Jepang, seperti : ‘Poetra’, *Jawa Hokokai*, “Barisan Pelopor”, dan Pembela Tanah Air (PETA). Beberapa tokoh Banten yang terlibat dalam Peta antara lain :

1. Kiai Haji Tubagus Achmmad Chatib yang diangkat sebagai dai ichi daidan (komandan batalyon I) Peta yang berkedudukan di Labuan.
2. Entol Ternaya yang diangkat menjadi dai ni daidan (komandan batalyon II) Peta yang berkedudukan di Kandang sapi, Malingping.
3. Kiai Haji Sjam’un yang diangkat menjadi dai san daidan (komandan batalyon III) Peta yang berkedudukan di Serang.¹²

Kedua kiai yang menjadi *daidan* itu merupakan dua tokoh yang cukup kharismatis di wilayah Banten. Mereka dikenal dan disegani bukan saja karena perannya sebagai guru dan pemimpin pesantren, melainkan karena riwayat keluarganya serta aktivitasnya, baik yang bersifat sosial maupun politik.

Achmad Chatib adalah anak seorang ulama di daerahnya, yaitu Kiai Waseh. Ia mengenal dunia pesantren sejak masih kecil. Mula-mula ia belajar di pesantren Kadupiring, Pandeglang. Setelah menginjak masa remaja dia melanjutkan pendidikannya ke pesantren Caringin yang terkenal dengan ilmu tarekatnya. Kecerdasannya dalam menyerap pelajaran telah menarik pemimpin pesantren itu, yaitu Kiai Asnawi yang dikenal masyarakat dengan sebutan Kiai Caringin. Kemudian Achmad Chatib diambil menjadi menantunya, dan setelah itu disertai tugas untuk menggantikan kedudukan Kiai Caringin memimpin pesantren itu. Melalui guru yang sekaligus mertuanya itu, Achmad Chatib berkenalan dengan SI/PKI. Dalam partai inilah dia berkenalan dengan Tje Mamat, yang waktu itu menjabat sebagai ketua PKI cabang Anyer. Bersama mertuanya itu Achmad Chatib terlibat

dalam pemberontakan PKI di Banten tahun 1926, sehingga untuk beberapa waktu terpaksa dia harus bernukim di Boven Digul.

Seperti halnya Achmad Chatib, Kiai Haji Sjam'un juga berasal dari keluarga ulama yang cukup terkenal pula. Kakeknya terkenal sebagai salah satu tokoh dalam peristiwa *Geger Cilegon* tahun 1888, yaitu Kiai Wasid.¹³ Sewaktu masih kecil dia sempat belajar di dua pesantren, yaitu pesantren Teneng dan Kemasari. Setelah remaja dia pergi ke Mekkah dan bermukim di sana selama lima tahun (1905 - 1910). Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Al-Azhhar, Cairo. Sekembalinya dari Timur Tengah dia membuka pesantren di daerah Serang, serta mendirikan koperasi Bumi Putera, yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1924.¹⁴

Sewaktu masa pendudukan Jepang, kedua tokoh ini sering dihubungi Tan Malaka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam aktivitasnya di daerah Banten, Tan Malaka menggunakan nama Ilyas Husen dan mengaku sebagai wakil pemuda Bayah, Banten Selatan.¹⁵ Oleh karena itu sejak awal bulan Agustus 1945, berita tentang akan dicetuskannya proklamasi telah sampai ke telinga tokoh-tokoh pergerakan di wilayah Banten. Pada tanggal 9 Agustus 1945, telah diadakan pertemuan di rumah pemuda Tachril di Rangkasbitung. Dalam pertemuan itu Ilyas Husen memberitahukan tentang perkembangan di Eropa dan Pasifik, terutama tentang posisi Jepang yang pasti kalah. Kemudian dia menganjurkan kepada para pemuda yang tidak mau dijajah lagi, agar bersiap sedia dan secepatnya menghubungi para *daidanco*, yaitu Kiai Haji Tubagus Achmad Chatib, Kiai Haji Sjam'un dan Entol Ternaya, guna memperoleh perlengkapan militer.

3. Masa Transisi

Meskipun desas-desus akan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan telah tersiar di beberapa kalangan masyarakat Banten, namun berita suka cita itu sendiri relatif terlambat sampai ke wilayah ini. Tepatnya berita itu baru sampai pada tanggal 20 Agustus, dibawa oleh Pandu Kartawiguna, Ibnu Parna, Abdul Muluk dan Azis. Keempat

pemuda itu mengaku sebagai pemuda Jakarta yang diutus oleh Chaerul Saleh untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan R.I. kepada masyarakat Banten, dan khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti : Kiai Haji Achmad Chatib, Kiai Haji Sjam'un dan beberapa tokoh pemuda yang sebelumnya telah mereka kenal, seperti : Ali Amangku dan Ajip Dzuchri.¹⁶ Selain menyampaikan kabar suka cita itu, keempat pemuda itu juga menganjurkan agar para pemuda Banten segera merebut kekuasaan dari tangan penguasa Jepang. Sesuai dengan anjuran itu, pada tanggal 22 Agustus 1945, pemuda Sri Sahuli memelopori penurunan bendera Jepang dari hotel Vos, Serang. Keesokan harinya banyak pemuda yang menurunkan bendera-bendera Jepang pada kantor-kantor pemerintah daerah.

Adanya aksi-aksi itu ternyata membuat orang-orang sipil Jepang yang dikenal dengan sebutan Jepang Sakura, bergegas dan cepat pergi meninggalkan Serang menuju Jakarta. Yuki Yoshii, Residen Banten waktu itu, juga merasa takut dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, Raden Tirtasujatna. Sementara itu kelompok militernya tetap bertahan untuk menjaga *status quo*, sesuai dengan perintah Sekutu.

Satu hal yang menarik dan patut dicatat di sini adalah kepergian para pamongpraja yang berasal dari daerah Priangan. Mereka pun merasa tidak tenang lagi tinggal di daerah Banten. Namun kepergian mereka ini bukan karena kesetiaannya kepada Jepang, melainkan karena takut oleh desas desus yang sebelumnya memang sudah ada, yaitu masalah kebencian orang-orang Banten terhadap para bangsawan asal Priangan. Selama masa kolonial daerah Banten memang seakan-akan daerah jajahannya orang Priangan. Jabatan Bupati, wedana dan bahkan juga camat, umumnya dipegang oleh para sentana dalem asal Priangan. Isu-isu serta desas desus mengenai kebencian itu pada awal kemerdekaan ini kembali mencuat dan dari hari ke hari semakin santer. Oleh karena itu Raden Tirtasujatna pun tidak berani berlama-lama lagi tinggal di daerah Banten. Seperti halnya Yuki Yoshii, ia pergi meninggalkan kota Serang menuju kota Bogor yang dirasakan memberi kenyamanan pada hidupnya. Padahal waktu itu dia telah ditunjuk pula oleh pemerintah RI untuk menjabat sebagai Residen Banten.¹⁷

pemuda itu mengaku sebagai pemuda Jakarta yang diutus oleh Chaerul Saleh untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan R.I. kepada masyarakat Banten, dan khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti : Kiai Haji Achmad Chatib, Kiai Haji Sjam'un dan beberapa tokoh pemuda yang sebelumnya telah mereka kenal, seperti : Ali Amangku dan Ajip Dzuchri.¹⁶ Selain menyampaikan kabar suka cita itu, keempat pemuda itu juga menganjurkan agar para pemuda Banten segera merebut kekuasaan dari tangan penguasa Jepang. Sesuai dengan anjuran itu, pada tanggal 22 Agustus 1945, pemuda Sri Sahuli memelopori penurunan bendera Jepang dari hotel Vos, Serang. Keesokan harinya banyak pemuda yang menurunkan bendera-bendera Jepang pada kantor-kantor pemerintah daerah.

Adanya aksi-aksi itu ternyata membuat orang-orang sipil Jepang yang dikenal dengan sebutan Jepang Sakura, bergegas dan cepat pergi meninggalkan Serang menuju Jakarta. Yuki Yoshii, Residen Banten waktu itu, juga merasa takut dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, Raden Tirtasujatna. Sementara itu kelompok militernya tetap bertahan untuk menjaga *status quo*, sesuai dengan perintah Sekutu.

Satu hal yang menarik dan patut dicatat di sini adalah kepergian para pamongpraja yang berasal dari daerah Priangan. Mereka pun merasa tidak tenang lagi tinggal di daerah Banten. Namun kepergian mereka ini bukan karena kesetiaannya kepada Jepang, melainkan karena takut oleh desas desus yang sebelumnya memang sudah ada, yaitu masalah kebencian orang-orang Banten terhadap para bangsawan asal Priangan. Selama masa kolonial daerah Banten memang seakan-akan daerah jajahannya orang Priangan. Jabatan Bupati, wedana dan bahkan juga camat, umumnya dipegang oleh para sentana dalem asal Priangan. Isu-isu serta desas desus mengenai kebencian itu pada awal kemerdekaan ini kembali mencuat dan dari hari ke hari semakin santer. Oleh karena itu Raden Tirtasujatna pun tidak berani berlama-lama lagi tinggal di daerah Banten. Seperti halnya Yuki Yoshii, ia pergi meninggalkan kota Serang menuju kota Bogor yang dirasakan memberi kenyamanan pada hidupnya. Padahal waktu itu dia telah ditunjuk pula oleh pemerintah RI untuk menjabat sebagai Residen Banten.¹⁷

Sementara itu pada tanggal 23 Agustus 1945 pemerintah pusat mengumumkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). KNIP bertugas sebagai badan pembantu Presiden yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga perantara antara pemerintah pusat dan rakyat. Sedangkan BKR bertugas menangani masalah kemiliteran. Kemudian pemerintah pusat menistruksikan kepada setiap pemerintah daerah agar secepatnya membentuk KNI dan BKR di daerahnya masing-masing.

Pembentukan KNI dan BKR di keresidenan Banten pelaksanaannya sedikit mendapat hambatan. Sebab sejak Raden Tirtasujatna pergi meninggalkan posnya, pemerintah pusat belum juga menunjuk penggantinya. Para pejabat daerah pun tidak ada yang mau mengambil alih tugasnya, karena pada dasarnya mereka pun sama seperti Raden Tirtasujatna, yaitu orang Priangan.¹⁸

Dalam situasi yang tidak menentu itu, para pemuda cepat mengambil inisiatif membentuk semacam badan perjuangan, baik yang bersifat lokal, maupun yang merupakan cabang dari kota lain, seperti cabang dari Jakarta. Salah satu organisasi pemuda yang cukup menonjol perannya waktu itu ialah "Angkatan Pemuda Indonesia" (API), yang didirikan Chaerul Saleh pada tanggal 1 September 1945 di Jakarta. Ketua API cabang Serang adalah Ali Amangku, dan Sri Saiuli sebagai ketua bagian putrinya. Kelompok-kelompok pemuda inilah yang kemudian bergerak melucuti militer Jepang.¹⁹ Atas prakarsa pemuda API, pada pertengahan bulan September 1945 diadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat se kabupaten Serang. Pertemuan itu diadakan di rumah Zulkarnaen Surja Kertalegawa yang terletak di dekat rumah Sakit Serang. Hadir dalam pertemuan itu antara lain: Kiai Haji Achmad Chatid, kiai Haji Sjam'un, Ali Amangku dan Zulkarnaen Surja Kertalegawa selaku tuan rumah.

Pertemuan itu akhirnya menghasilkan satu kesepakatan, yaitu :

1. Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang diserahkan kepada Zulkarnaen Surja Kertalegawa.
2. Masalah keamanan diserahkan kepada Kiai Haji Achmad Chatib.
3. Urusan yang berkaitan dengan badan-badan perjuangan dan pemuda diserahkan kepada Ali Amangku dan API.

Dalam kesempatan itu, secara aklamasi para hadirin memilih Kiai Haji Achmad Chatib sebagai Residen Banten dan mendesak pemerintah pusat untuk melantik kiai itu secara resmi dalam waktu secepatnya. Rupanya pemerintah pusat setuju dengan tuntutan itu. Hal ini terbukti, pada tanggal 10 September 1945 Presiden Soekarno melantik Kiai Haji Achmad Chatib menjadi Residen Banten.

Setelah resmi menjadi residen, Kiai Haji Achmad Chatib segera menyusun aparatur pemerintahannya. Ia menunjuk Zulkarnaen Surya Kertalegawa sebagai wakil residen. Sedangkan masalah BKR dan badan-badan perjuangan diserahkan kepada rekannya Kiai Haji Sjam'un. Untuk jabatan bupati, Kiai Haji Achmad Chatib berusaha untuk mempertahankan para pejabat lama, seperti Raden Hilman Djajadiningrat (kabupaten Serang), Raden Djumhara (kabupaten Pandeglang) dan Raden Hardiwinangun (kabupaten Lebak).²⁰ Adapaun jabatan ketua Komite Nasional di ketiga kabupaten itu adalah: Tje Mamat sebagai ketua KNI Serang; Mohammad Ali sebagai ketua KNI Pandeglang; dan Raden Djaja Roemantara sebagai ketua KNI Lebak.

Sebenarnya kebijakan Kiai Haji Achmad Chatib mengangkat para pamongpraja lama pada posisi semula, banyak mendapat tantangan dari kelompok pemuda dan kaum tua berhaluan keras seperti Tje Mamat. Sebab, mereka menganggap para mantan pamongpraja itu sebagai kaki tangan penjajah yang tidak patut untuk ikut dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kelompok ini mengajukan nama-nama tokoh kiai dan tokoh masyarakat lainnya sebagai alternatif untuk jabatan-jabatan itu namun Kiai Haji Achmad Chatib mempunyai pertimbangan lain. Ia memerlukan orang-orang yang trampil dalam bidang administrasi pemerintahan. Sehingga baginya tidak ada jalan lain kecuali menempatkan kembali para mantan pamongpraja pada kedudukannya yang semula.²¹ Sebab para tokoh dan kiai yang diajukan kelompok itu, umumnya tidak mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang pemerintahan, bahkan tidak sedikit di antaranya yang tidak mampu menulis dan membaca huruf latin.²²

Selain masalah pengangkatan mantan pamongpraja tadi, masalah yang harus secepatnya ditangani oleh para pemimpin daerah ini adalah

masalah pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang, berikut segala peralatannya, termasuk perlengkapan militer, tanpa harus melalui pertumpahan darah. Jika dibandingkan dengan Jakarta, kondisi politis Banten agak berlainan. Di Jakarta, umumnya kesadaran politis di kalangan pemuda dan tokoh masyarakatnya, relatif lebih tinggi, ditambah dengan adanya berita tentang akan datangnya pasukan Sekutu dalam waktu yang dekat; sehingga kegiatan secara kekerasan (militer) relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat politis.²³ Sementara di daerah Banten, tokoh-tokoh baik kaum tua maupun pemuda yang mempunyai kesadaran politis seperti itu relatif kecil. Oleh karena itu, jika situasi tidak cepat ditanggulangi, maka keadaan akan bertambah buruk, sehingga sulit dikendalikan lagi. Dengan adanya persetujuan Residen Kiai Haji Sjam'un mengadakan kontak dengan pihak Jepang. Setelah dua kali pertemuan, pihak Jepang meminta agar penyerahan semua peralatan milik Jepang itu dilakukan secara resmi, yang dihadiri Residen beserta stafnya.

Mulanya proses rekapitulasi dan pengumpulan pasukan-pasukan Jepang di Serang berjalan lancar. Namun karena kurangnya persiapan, sehingga terjadi kesalahpahaman di beberapa daerah seperti di Sajira. Rangkasbitung, maka pekerjaan yang tadinya mulus tadi menjadi berantakan. Akibatnya pada tanggal 10 Oktober 1945 terjadilah kontak senjata antara pihak Indonesia melawan pasukan-pasukan Jepang itu. Pertempuran baru berhenti setelah pasukan Jepang meloloskan diri ke luar kota Serang.

4. Tje Mamat, KNI dan Dewan Rakyat

Di atas telah disinggung di atas, kebijakan Residen Kiai Haji Achmmad Chatib mengangkat kembali para mantan pamongpraja pada jabatan semula telah mendapat tantangan, baik dari kalangan tua maupun pemuda. Salah satu tokoh yang demikian 'benci' kepada para mantan pamongpraja itu adalah Mohammad Mansjur, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Tje Mammam. Tokoh ini sebenarnya baru menghirup kembali kebebasannya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan dicetuskan. Ia dibebaskan dari penjara Tanah Abang oleh para pengikut Chaerul Saleh. Setelah itu dia diminta untuk segera

menuju Serang guna mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang beserta antek-anteknya.²⁴

Dalam perjalanannya menuju Serang, ia sempat berjumpa dengan Kiai Haji Achmad Chaerun, tokoh yang berpengaruh di Tangerang.²⁵ Dalam kesempatan itu ia menyampaikan amanah dari Chaerul Saleh untuknya, yaitu untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang yang ada di Tangerang dan membentuk satu dewan.²⁶ Tje Mamat baru tiba di Serang bertepatan dengan aksi penurunan bendera-bendera Jepang dari kantor-kantor pemerintahan. Di kota itu ia menjumpai Kiai Haji Achmad Chatib dan menyampaikan amanah Chaerul Saleh.

Walaupun Kiai Haji Achmad Chatib mempunyai pandangan yang sama dengan Tje Mamat mengenai pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang, namun dalam beberapa hal ia mempunyai pertimbangan yang berbeda. Achmad Chatib cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga kelihatan lamban dalam mengambil tindakan. Sementara Tje Mamat cenderung lebih radikal, seperti umumnya kaum Murba waktu itu.

Setelah Kiai Haji Achmad Chatib resmi menjadi Residen Banten, ia memanggil Tje Mamat dan menunjuknya sebagai ketua KNI Kabupaten Serang. Sebagai ketua KNID, seharusnya Tje Mamat ikut membantu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur lancarnya pemerintahan daerah yang waktu itu masih belum menentu. Akan tetapi tindakan Tje Mamat justru sebaliknya. Dia memanfaatkan kedudukannya itu untuk kepentingan politiknya. Secara terang-terangan ia mengatakan ketidaksetujuannya terhadap pengangkatan para bekas pamongpraja masa Hindia Belanda dan Jepang untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan RI. Menurutny, pemerintahan RI harus demokratis dan menyuarakan aspirasi rakyat, serta bersih dari bekas-bekas antek penjajah. Oleh karena itu semua bekas aparatur pemerintah kolonial, baik masa Hindia Belanda maupun Jepang, harus dipecat.

Selain menggunakan isu "warisan kolonial", Tje Mamat juga memanfaatkan sentimen kedaerahan yang hidup di kalangan masyarakat Banten, khususnya di kalangan para nigratnya. Dengan aksinya itu, isu "putra daerah" dan "orang luar" muncul kepermukaan. Dalam hal ini sentimen kedaerahan itu terutama tertuju kepada para

ningrat asal Priangan, yang memang sejak masa kolonial selalu “menguasai” jabatan-jabatan penting di daerah ini. Rupanya cara yang ditempuh Tje Mamat ini cukup berhasil membentuk opini masyarakat. Tidak sedikit tokoh ulama yang mendukungnya, termasuk ketua KNI daerah Padeglang meskipun demikian isu-isu yang berkembang itu tidak cukup kuat untuk menekan Kiai Haji Achmad Chatib.²⁷ Residen ini tetap pada keputusannya.

Akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 1945, kurang lebih pukul 10.00, Tje Mamat bersama para pengikutnya mendatangi kantor keresidenan tanpa memberitahu lebih dahulu. Mereka berhasil menyergap Kiai Haji Achmad Chatib, Kiai Haji Sjam'un dan Abdulhadi yang kebetulan berada di tempat. Ketiga pejabat itu dipaksa untuk mengumpulkan masyarakat di sekitar kota Serang dan sekitarnya untuk berkumpul di halaman kantor keresidenan.

Keesokan harinya, di hadapan rakyat yang telah berkumpul di halaman kantor keresidenan, Tje Mamat mengumumkan maklumat penggantian kekuasaan di seluruh keresidenan Banten. Pemerintahan yang lama beserta KNI-nya dinyatakan bubar. Sebagai penggantinya adalah “Dewan Rakyat” yang ketuanya dipegang langsung oleh Tje Mamat. Tidak sedikit kelompok masyarakat Banten yang menganggap maklumat itu sah. Keyakinan itu antara lain muncul karena sewaktu maklumat itu dibacakan, para pejabat lama ikut hadir. Mereka tidak tahu bahwa para pejabat itu hadir di halaman keresidenan karena dipaksa oleh Tje Mamat dan para pengikutnya.²⁸

Ada satu alasan Tje Mamat yang menarik untuk dicatat di sini berkaitan dengan pembubaran KNID di keresidenan Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Menurut Tje Mamat :

“KNI adalah kelanjutan dari program pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PPKI, yang dibentuk pemerintahan Jepang. Orang-orang yang duduk di dalamnya tidak refresentatif sebagai wakil rakyat, karena sebagian besar dipilih oleh pemerintah Jepang. Mereka yang mengandalkan berdiplomasi terus dengan pihak pemerintah kolonial Jepang ... Sedangkan kami, maksud kami kelompok Murba menghendaki suatu kemerdekaan yang tuntas, terlepas dari campur tangan pemerintah asing”.²⁹

Sebenarnya yang mempunyai pendapat itu bukan hanya Tje Mamat saja. Masih banyak ada teman-teman Kiai Haji Achmad Chatib

yang mempunyai pandangan sama seperti Tje Mamat, misalnya: Haji Mukmin, Haji Sulaeman, Haji Achmad, Haji Makmur dan Muhammad Ali. yang semuanya pernah ikut terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1927. Bahkan nama yang disebutkan terakhir ini, seperti juga Tje Mamat, telah ditunjuk oleh Achmad Chatib untuk menduduki jabatan ketua KNID Pandeglang.³⁰

Walaupun maklumat pembentukan Dewan Rakyat itu dibacakan di kota Serang, namun Tje Mamat tidak memilih kota itu sebagai pusat pemerintahannya, melainkan kota Ciomas yang lebih terpencil. Pemusatan kekuatan di kota itu dapat dimengerti karena di daerah itu pengaruh Tje Mamat sebagai seorang 'jawara' cukup besar, terutama di kalangan para jawara dan para jagoan lainnya. Dari tempat inilah Tje Mamat mengirinkan lasykarnya untuk menculik atau menteror lawan-lawan politiknya, atau orang-orang yang dianggap membahayakan kedudukannya. Lasykarnya itu kemudian terkenal dengan sebutan *Lasykar Gulkut*.³¹ Tokoh-tokoh yang berhasil mereka culik antara lain : Bupati Serang Raden Hilman Djajadiningrat, Kepala Kejaksaan Serang Entol Ternaja, dan Kepala Polisi Serang Raden Oscar Kusumaningrat.

Dari daftar tokoh-tokoh yang diculiknya itu tidak terdapat nama Kiai Haji Achmad Chatib dan Kiai Haji Sjam'un. Padahal kedua tokoh itu sebenarnya telah dia kuasai, paling tidak sebelum dan sewaktu maklumat pembentukan Dewan Rakyat itu dikumandangkan di Serang. Namun mengingat pengaruh dari kedua tokoh itu cukup besar dikalangan masyarakat, maka dapat diduga bahwa dilepaskannya kedua tokoh itu bukan semata-mata karena kedua tokoh itu dianggap bekas kawan seperjuangan, melainkan ada kaitannya dengan usaha Tje Mamat untuk membentuk opini dan pengaruh di kalangan masyarakat Banten agar memihak atau mendukung gerakannya.³²

Kiai Haji Achmad Chatib selaku Residen Banten, dalam menghadapi gerakan Tje Mamat dengan aksi daulatnya itu, mulanya mencoba dengan jalan damai, antara lain dengan berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan yang sering dilontarkan Tje Mamat dan para pengikutnya. Langkah pertama adalah dengan penyusunan kembali 'birokrasi' pemerintahan di keresidenan Banten dengan menempatkan

orang-orang yang dianggap bersih dari warisan kolonial. Kiai Haji Sjam'un, selain menjabat sebagai pimpinan tertinggi BKR, ditunjuk sebagai bupati Serang menggantikan Raden Hilman Djajaningrat yang diculik Dewan Rakyat. Kemudian Haji Hilman diangkat menjadi bupati Pandeglang dan Kiai Haji Hasan sebagai bupati Lebak. Selain itu jabatan-jabatan Wedana dan camat pun banyak diserahkan kepada para ulama. Sementara itu KNID yang praktis lumpuh oleh gerakan Dewan Rakyat itu, untuk sementara waktu kedudukannya diganti oleh Majelis Ulama yang dibentuk atas Residen Banten. Jumlah anggota majlis itu adalah 40 orang.³³

Apa yang ditempuh oleh Kiai Achmad Chatib ini sedikit banyak memang membawa pengaruh. Protes-protes yang dialamatkan kepada Residen menjadi berkurang. Akan tetapi kekacauan yang ditimbulkan oleh Gerawan Dewan Rakyat Tje Mamat tidak begitu saja mereda. Lasykar Gulkut yang pada umumnya didominasi oleh para jawara tetap menghantui kehidupan rakyat, khususnya yang dicap sebagai pengikut kolonial, dan yang dicap sebagai bukan orang Banten asli.³⁴ Tuduhan sebagai pengikut kolonial, keturunan pamongpraja atau bukan Banten asli dengan mudah dilontarkan dan dijadikan alasan untuk merampok, merampas harta benda orang-orang yang tidak mereka sukai, bahkan juga membunuhnya. Seperti dilukiskan oleh Ricklefs, kondisi politis di Indonesia waktu itu pada dasarnya memang kacau balau. Struktur masyarakat waktu itu dalam keadaan jungkir balik tak menentu. Gambaran semacam itu terlihat jelas di wilayah Banten.³⁵

Melihat situasi semacam itu, akhirnya Kiai Haji Achmad Chatib memanggil Kiai Haji Sjam'un dan memerintahkan untuk menumpas Dewan Rakyat Tje Mamat. Kiai Haji Sjam'un yang sejak awal kurang setuju dengan langkahh-langkah Kiai Haji Achmad Chatib yang dinilainya lamban, menerima perintah itu. Tanpa banyak membuang waktu, ia menyiapkan pasukannya dan juga memanggil Ali Amangku dan Tubagus Kaking (dua tokoh pemuda dan Lasykar perjuangan) untuk mengatur siasat.

Langkah pertama yang dilakukan Kiai Haji Sjam'un adalah mengirim teluk sandi (*seko*) ke daerah Ciomas dan tempat-tempat yang dikuasai Dewan Rakyat Tje Mamat, seperti daerah Labuan dan

Pandeglang. Berdasarkan hasil penyelidikan itu, kemudian Kiai Haji Sjam'un menyerang kedudukan Dewan Rakyat Tje Mamat di Ciomas dan mengepung kantor kedewanaan yang dijadikan markas mereka. Setelah bertempur cukup lama, kekuatan lasykar Gulkut dapat dipatahkan. Kantor kedewanaan dapat direbut. Di bagian belakang kantor ini pasukan TKR dan Lasykar perjuangan menjumpai Raden Oscar Kusumaningrat dan Entol Ternaya yang terikat pada sebatang pohon dalam keadaan masih hidup. Sementara itu Raden Hilman Djajadiningrat juga berhasil dibebaskan dari penjara Serang yang tadinya juga dikuasai lasykar Gulkut.³⁶

Walaupun Ciomas dapat dikuasai kembali oleh BKR dan badan-badan perjuangan pro pemerintah, namun Tje Mamat sendiri sebagai tokoh utama Dewan Rakyat berhasil meloloskan diri ke daerah Lebak. Di tempat ini dia kembali menyusun lasykar Gulkutnya dan menjadikan kantor CEBEO sebagai markas barunya. Di tempat ini ia mendapat bantuan yang cukup besar artinya, yaitu dari Tachril, seorang tokoh pemuda yang sudah lama dikenalnya. Oleh karena itu pada bulan November 1945 Dewan Rakyat Tje Mamat berhasil menguasai Rangkasbitung dan membubarkan KNID daerah ini dan menggantikannya dengan Dewan Rakyat.

Pada tanggal 9 Desember 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengadakan kunjungan ke keresidenan Banten untuk melihat situasi politis di daerah ini. Kedua tokoh ini menyatakan keprihatinan atas munculnya Dewan Rakyat Tje Mamat. Dalam pidatonya di alun-alun Serang, Presiden menghimbau agar segala pertikaian segera diselesaikan dan fungsi-fungsi lembaga dipulihkan dan dihormati. Terutama Presiden menghimbau agar KNID yang dibubarkan Tje Mamat segera diaktifkan lagi.³⁷

Kehadiran kepala negara di Banten selain membesarkan masyarakat setempat, juga cukup membuat tegang para petugas keamanan setempat. Terutama setelah tersiar berita bahwa lasykar Gulkut akan menculik kedua tokoh nasional itu. Namun penculikan itu tidak pernah terjadi. Yang muncul justru penculikan terhadap tokoh-tokoh setempat, antara lain Raden Hardiwinangun, mantan bupati Lebak. Ia didatangi lasykar Gulkut yang mengaku sebagai utusan

Presiden, yang katanya memanggil mantan bupati itu. Sejak saat itu keluarganya tidak pernah bertemu lagi dengannya dalam keadaan hidup. Mayat Raden Hardiwinangun berhasil ditemukan di sekitar Cisiuh oleh penduduk sekitar daerah itu, dalam keadaan terikat.³⁸ Selain penculikan, Dewan Rakya Tje Mamat juga menyerbu pos polisi Serang.

Akhirnya pasukan TKR berhasil menghancurkan pusat kekuatan Dewan Rakyat Tje Mamat di Rangkasbitung, dan juga berhasil menangkap Tachril, yang menjabat sebagai ketua Dewan Rakyat di daerah itu. Sementara itu untuk kedua kalinya Tje Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Bogor dan bergabung dengan lasykar rakyat pimpinan Kiai Narya. Kiai Narya ini, juga merupakan tokoh yang melakukan aksi daulat di daerah Bogor.

Pemerintah pusat sendiri melalui pemerintah daerah Jawa Barat telah mengirimkan bantuan ke Banten, yaitu pasukan TKR di bawah pimpinan Sukanda Bratamanggala. Pasukan ini bekerjasama dengan TKR setempat di bawah komando Kiai Haji Sjam'un, kemudian memulihkan kembali keamanan di daerah Banten. Sukanda Bratamanggala sendiri karena dicap sebagai sentana dalem dari Priangan, sedikit banyak mendapat kesulitan. Sebab, isu anti Priangan ini sempat membakar masyarakat Banten, dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk mmeredamnya.³⁹

5. Penutup

Komite Nasional Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang muncul dari kancan revolusi kemerdekaan Indonesia. Maksud dari pembentukan lembaga ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk manifestasi adanya demokrasi di negara RI yang baru merdeka. Namun sejak awal berdirinya, lembaga ini justru sudah menjadi ajang pertarungan politik para politisi Indonesia dalam memperebutkan kekuasaan politik, daripada menggalang kekuatan rakyat atau mendengar suara rakyat. Salah satu peristiwa yang cukup fundamental adalah gerakan yang dilakukan Sutan Sjahrir, yang mengubah kedudukan KNI Pusat dari 'pembantu' Presiden menjadi parlemen, yang kemudian mendudukannya menjadi Perdana Menteri RI yang pertama.

Di daerah-daerah penafsiran atas KNID juga berbeda-beda. Tidak semua apa yang diinstruksikan pemerintah pusat diterima begitu saja oleh daerah. Hal ini antara lain terlihat dari sikap Tje Mamat dan para pengikutnya, atau Kiai Haji Achmad Chaerun dari Tangerang, dan Muhammad Ali dari Pandeglang. Jika Sutan Sjahrir menyatakan KNIP sebagai salah satu ciri demokratis, maka Tje Mamat melihat lembaga itu sebagai warisan kolonial, yang sama sekali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, baik lembaganya, maupun para anggotanya diangkat oleh penguasa kolonial. Oleh karena itu Tje Mamat membubarkan KNID Serang dan menggantikannya dengan Dewan Rakyat versinya sendiri. Kelihatannya berbicara masalah demokrasi dalam situasi kacau adalah satu keanehan.⁴⁰

Banten memang berbeda dengan Jakarta. Di daerah ini tidak terlihat adanya persaingan antara kekuatan politik seperti halnya di Jakarta. Baik yang didaulat maupun yang mendaulat, mempunyai latar belakang politis yang relatif sama, yaitu dari *Sarekat Rakyat PKI*, dan pengagum Tan Malaka (Murba). Oleh karena itu dapat saja gerakan Tje Mamat dikatakan sebagai pertentangan intern atau internal. Barangkali yang menjadi ciri kekhasan kasus Dewan Rakyat Tje Mamat ini adalah isu atau sentimen kedaerahan dan kesuburan ikut mewarnai pertentangan politis di daerah Banten waktu itu.

Catatan

- * Dalam menyusun tulisan ini, penulis banyak menggunakan koleksi data milik Sdri Sri Handayani, terutama hasil wawancara dengan para tokoh yang terlibat langsung dalam Aksi Daulat yang terjadi di Residensi Banten pada paruh akhir tahun 1945. Atas kebaikannya itu penulis mengucapkan banyak terima kasih. Walaupun demikian, isi dari tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
- 1. Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Buku kedua Terjemahan CV. Rajawali. Jakarta, 1983, h.1.

2. Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni* Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: Grafitipers, 1990, h.1
3. Naskah sayembara Dewan Harian '45, No. 748, 1977; Wawancara dengan Warno mantan ketua urusan bengkel *romusha* di Bayah, Banten tanggal 2 April 1983; wawancara dengan Ahmad Satibi (mantan *heiho angkatan ke-3*) tanggal 30 September 1992; wawancara dengan Amud (mantan *heiho angkatan ke-2*) tanggal 20 September 1992; wawancara dengan R.M. Djojokoesoemo (mantan *heiho* dan juru bahasa) tanggal 18 Oktober 1992.
4. Wawancara dengan Ahmad Satibi dan Amud (lihat catatan sebelumnya); Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara* jilid III. Djakarta: Widjaja, h.3.
5. Dalam wawancara dengan Khalid Rasyidi (mantan pimpinan Barisan Pelopor *Istimewa Shotai II*) bulan Mei 1982 di Jakarta, dia mengatakan bahwa sewaktu menjadi anggota "Barisan Pelopor" berkesempatan melihat para *romusha* yang meninggal berserakan di sepanjang jalan antara Sayekti - Bayah (Banten Selatan); Lihat juga Sudiro, *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1979; Lihat juga Dr. L. De Jong, ed. *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintah Belanda*. Jakarta: Kesaint Blanc, cetakan ke-2, 1989, bab ii.
6. Gejala seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja, melainkan juga di wilayah-wilayah lain yang diduduki Jepang. Misalnya wanita-wanita Korea yang dikerahkan menjadi wanita-wanita penghibur. Menurut catatan, tidak kurang dari 200.000 wanita Korea yang dijadikan *jugun ianfu* oleh pemerintah Jepang. Lihat *Tempo* No.21/XXII, 25 Juli 1992.
7. Drs. Halwany Mihrob, M.Sc dn Drs.A Mudjahid Chudori. *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Saudara, edisi ke-3, 1993, h.225.
8. Wawancara dengan Tje Mamat di Serang pada tanggal 30 Mei 1982; wawancara dengan Ali Amangku di Jakarta pada bulan Juni

1983; Menurut Tje Mamat, sebelum sampai di Boven Digul, dia berhasil meloloskan diri ke Malaya. Tadinya dari Malaya dia akan pergi ke Moskow untuk menjumpai Semauan. Akan tetapi sebelum berangkat dia bertemu dengan Tan Malaka di Amoy, Cina Selatan. Tan Malaka mencegah kepergiannya dan mengatakan bahwa pandangan mereka dengan Semauan sudah berbeda. Kemudian Tan Malaka menganjurkan agar Tje Mamat kembali lagi ke Jawa dan meneruskan kembali perjuangannya di sana. Dalam buku Poeze disebutkan bahwa Tje Mamat terlibat dalam kegiatan politik yang dilakukan Partai Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Tan Malaka. Lihat Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Levensloop van 1897 tot 1945*. 'sGravenhage-martinus Nijhoff, 1976, h.357.

9. Lihat Benedict R'O.G. Anderson, *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944 - 1946*. Ithaca an London" Cornell University Press, 1972, h.14.
10. Wawancara dengan Tje Mamat tanggal 10 Mei 1982 dan wawancara dengan Adi Soendjojo pada bulan Juni 1983 di Jakarta.
11. Drs. Khalid Rasyidi, *Pengalaman Perjuangan Jaman Jepang sampai Proklamasi*; Yayasan Idayu. Lihat juga Tan Malaka, *op.cit.*
12. Drs. Halwany Michrob, M.Sc.dkk, *op.cit.* h.222.
13. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya; Sebuah Studi Kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984, h.257.
14. Wawancara dengan Kiai Haji Rachmat Allah tanggal 4 Juni 1981 di Serang; dan arsip/catatan keluarga Kiai Haji Rachmat Allah.
15. Khalid Rasyidi, *op.cit.* h 20-21.
16. Naskah/dokumen laporan Gogoh Sandjadirdja mengenai 'pokok-pokok Revolusi Republik Indonesia 1945-1949 di Banten'. *Arsip Kabupaten Serang*.
17. Laporan Gogoh Sandjajadirdja, *op.cit.*
18. *Ibid.*

- 19 Johana Chaerul Saleh dan Syamsuddin Tjan, "Peranan Gedung Menteng 31 dalam perjuangan kemerdekaan" (Ceramah di Gedung Joang'45, Menteng Raya, Jakarta tanggal 28 Juni 1977).
- 20 A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jil.2. Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa, 1977, h.522-523.
21. Wawancara dengan Kiai Haji Rachmat Allah (pimpinan pesantren Citangkil, Cilegon) tanggal 4 Juni 1981; wawancara dengan Ajip Dzuchri di Serang tanggal 30 Mei 1983.
22. Wawancara dengan Ajip Dzuchri di Serang tanggal 30 Mei 1983.
23. Anderson, *op.cit.* h.167-168.
24. Wawancara dengan Tje Mamat di Serang pada tanggal 30 Desember 1982.
25. Menurut Kiai Haji Nursjick (cucu Kiai Haji Asnawi), Kiai Haji Achmad Chaerun adalah kawan seperguruan dengan Kiai HHaji Achmad Chatib di pesantren Caringin. Wawancara dengan Kiai Haji Nursjick pada tanggal 29 Desember 1982.
26. Menurut Robert B. Cribb, pada tanggal 18 Agustus 1945, Kiai Haji Achmad Chaerun justru telah melakukan perebutan kekuasaan. Lihat Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara otonomi dan hegemoni*. Terjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: Grafitpers. 1990, h.44-45.
27. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Pusat Sejarah ABRI, dikatakan bahwa Tje Mamat adalah orang PKI yang berusaha memanfaatkan KNI untuk menyebarkan ideologi Komunis di kalangan masyarakat. Sedangkan gerakan aksi daulatnya dikatakan sebagai strategi Komunis untuk membentuk pemerintah lokal sebanyak-banyaknya. Namun penulis buku itu tidak menjelaskan komunis yang mana yang dimaksudkan, Murba atau PKI. Penjelasan dalam buku itu semakin kabur setelah kasus Tje Mamat itu dikaitkan begitu saja dengan aksi daulat Kiai Haji Achmad Chaerun (Tangerang), Mohammad Yusuf (Cirebon) dan Atmaji (Surabaya). Akibatnya di sana-sini muncul data-sata yang anakronistik dan tidak akurat. Lihat *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*.

Jilid I. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1991, h.29-35.

28. Menurut Ratu Fatmah (anak Kiai Haji Achmad Chatib) yang waktu itu menjabat ketua organisasi wanita Maklumat, Kiai Haji Achmad Chatib terpaksa menyerah karena rumahnya yang sekaligus merupakan kantor keresidenan telah dikepung oleh lasykar Tje Mamat. Wawancara dengan Ratu Fatmah tanggal 30 Mei 1983 di Serang. sementara menurut Ajip Dzuchri, Achmad Chatib mengenai tabiat Tje Mamat keras. Wawancara dengan Ajip Dzuchri tanggal 30 Juni 1982.
29. Wawancara dengan Tje Mamat di Serang tanggal 30 Juni 1982.
30. Laporan Gogoh Sandjajadirdja, *op.cit*; Nasution *op.cit*. bab.4.
31. *Gulikut* = gulung bukit. *Bukut* artinya pamongpraja. Jadi maksud sebutan itu adalah lasykar yang bertugas menggulung para pamongpraja yang dianggap sebagai kaki tangan para penjajah.
32. Dalam kesempatan berwawancara dengan Tje Mamat di tempat kediamannya di Serang, Tje Mamat tidak menjelaskan secara gamblang mengapa dia tidak menahan Kiai Haji Achmad Chatib dan Kiai Haji Sjam'un. Dia hanya menyebutkan bahwa Kiai Haji Achmad Chatib adalah temannya dan pernah sama-sama ikut berontak melawan kolonial Belanda tahun 1927.
33. *Soeara Merdeka*, tanggal 26 Oktober 1945. Menurut Anderson, tokoh Kiai Haji Sjam'un telah memimpin para rakyat di daerah Banten Selatan dan melakukan aksi daulat, seperti menculik dan membunuh bupati Lebak Raden Hardjawinangun, lalu kedudukannya diberikan kepada Kiai Haji Hasan. Demikian pula bupati Pandeglang berusaha diculik, namun berhasil meloloskan diri. Kedudukannya kemudian diganti oleh Kiai Haji Tubagus Abdulhalim. Sedangkan para wedana banyak yang dibunuh dan melarikan diri. Setelah berhasil sebagai bupati Serang. Lihat B.R.O.G. Anderson, *op.cit*. h.336-337.
34. Ali Amangku dan Adi Soendjojo, *op.cit*.

35. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan oleh : Drs. Dharmono Hardjowodjojo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991. h.317.
36. Nasution, *op.cit.* Jil.2. h. 523-524. Wawancara dengan Tubagus Kaking tanggal 31 Mei 1983 di Serang; Wawancara dengan Adi Soendjojo tanggal 5 Juni 1983 di Jakarta.
37. Lihat *Rakjat*, 13 Desember 1945.
38. *Sin Po*, tanggal 11 Desember 1945; Nasution, *Ibid.* bab.4
39. Wawancara dengan Sukanda Bratamanggala tanggal 23 April 1982 di Bandung; Wawancara dengan Adi Soendjojo tanggal 7 Juni 1983 di Jakarta.
40. Pendapat seperti ini sempat juga terlontar dari William Frederick dalam presentasinya dalam Seminar Internasional Revolusi Nasional yang diadakan pada tanggal 11 Juli - 14 Juli 1995 di LIPI. Jakarta.

PEMERINTAH GERILYA SEWAKA DAN NEGARA PASUNDAN SURIA KARTALEGAWA : Suatu Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat

Susanto Zuhdi

1. Pendahuluan

Kiranya sudah cukup banyak karyatulis tentang perjuangan gerilya di Jawa Barat dan Negara Pasundan pada masa Revolusi Indonesia. Makalah ini berusaha memperlihatkan peran Sewaka dalam pemerintahan gerilya dan Suria Kartalegawa dalam Negara Pasundan, melalui pemaparan perbedaan orientasi, sikap dan tindakan dari dua orang Sunda itu dalam menanggapi revolusi Indonesia. Hal itu menarik karena keduanya, pertama merupakan elit yang berangkat dari masyarakat kolonial, berpendidikan dan bekerja pada srutktur yang sama, kedua, merupakan elit yang tidak berasal dari tradisi tua, seperti halnya para keluarga bupati di Priangan.

Jika dapat dipahami betapa revolusi memperlihatkan kekacauan dan penuh gejolak sosial, maka boleh jadi kita akan menghargai—bukan karena kita setuju atau tidak setuju—siapapun yang karena keyakinannya menentukan sikap sebagai pendukung atau kontra revolusi Indonesia. Dari refleksi pribadi seorang Soedjatmoko tentang periode revolusi Indonesia dapat dianalisis dengan kerangka “pilihan dan peluang”. Siapapun dalam membuat pilihan berdasarkan pada pandangannya—persepsi yang diasah oleh pengetahuannya yang terbatas, oleh nilai, aspirasi dan kecemasan, oleh perasaan di luar

kemampuan atau pengetahuannya. Hal itu terlebih berlaku pada masa revolusi, ketika peristiwa-peristiwa yang berlangsung sangat dipercepat oleh kegiatan manusia dijiwai oleh emosi dengan intensitas yang besar, dengan dinamika internalnya sendiri, malahan lebih sering berada di luar pengendalian para pemimpinnya.¹

Kiranya, dapat diterima jika diterangkan bahwa para bangsawan terutama pangrehpraja yang bekerja dengan Belanda dan Jepang, pada umumnya merasa was-was menghadapi masa revolusi 1945. Pilihan sebagai pihak-pihak yang pro dan kontra revolusi mungkin sama besar resikonya. Pilihan mereka tentu sudah dipertimbangkan sebagai yang terbaik. Pilihan itu tidak semata-mata dorongan pribadinya melainkan juga terdapat sejumlah faktor-faktor yang lain. Jadi jika seorang sejarawan dalam kerangka pikir penjelasan R.G. Collingwood bertanya "Mengapa Brutus menikam Caesar" berarti "apa yang dipikirkan Brutus, yang membuatnya menikam Caesar", sekarang banyak dipertanyakan sejarawan. Karena harus diperhatikan pertanyaan yang menyangkut gerakan kolektif, seperti halnya tindakan pribadi yang terlihat dalam peristiwa-peristiwa.² Dengan demikian ada sejumlah faktor yang melingkarinya. Oleh sebab memberikan sumbangan terhadap sikap yang dipilih seseorang tentu saja harus diperhatikan.

2. RTA. Sewaka

Raden Tumenggung Ario (Mas) Sewaka lahir di Cirebon pada 1995.4 Setelah lulus dari ELS, Sewaka menyelesaikan OSVIA pada 1915. Pendidikan ke pemerintahannya dilanjutkan dengan mengikuti *Bestuurschool* selesai pada 1936. Pikiran-pikiran Sewaka muda tentang politik sudah mulai bersemai pada masa ia bersekolah di OSVIA itu. Secara tidak langsung ia belajar dari direktur OSVIA sendiri yang sering berbicara di depan kelas dengan mengatakan : "*Het woord politieke moet je uit je woordenboek schrappen, want politiek is vuil*". Justru karena kata-kata itulah yang mendorong Sewaka dan teman mencari arti kata itu yang sebenarnya. Dengan cara tertentu dr. Ciptomangunkusumo pada tiap hari minggu yang ditetapkan, di tempat tertentu, memberikan sekedar pengertian arti kata "politik" kepada murid-murid kelas terakhir. Ternyata karangan Suwardi Suryaningrat

"*Als ik een Nederlander was*" yang terkenal itu telah pula dibaca murid-murid OSVIA termasuk Sewaka.⁵

Pengalaman bekerja sudah dimulai sebagai tenaga magang pada pemerintahan bumiputera dan magang jurutulis wedana Losari tahun 1915 dan 1916. Gagasan-gagasan awal Sewaka tentang politik khususnya berkaitan dengan gerakan nasional, paling sedikit terlihat dalam sikap yang tentu saja harus dibalut dengan kehati-hatian ketika ia menjadi mantri polisi dalam rapat-rapat Sarekat Islam, rupanya menjadikan alasan bagi atasannya untuk memindahkannya ke Indramayu dengan menjabat sekretaris pengadilan bidang keuangan (*Fiscaal Griffier*) Pada masa itu Sarekat Islam nampak aktif memperjuangkan pelaksanaan pembelian padi yang memberatkan rakyat khususnya di Weru Cirebon.⁶

Menjelang kedatangan Jepang Sewaka menjadi Patih di Bogor dan Indramayu 1938-1941. Pemerintah militer Jepang mengangkat Sewaka sebagai Cirebon *Shicho* pada 29-4-1941 dan menjadi bupati Cirebon pada 29 April 1943.

Pengalaman menjadi anggota perkumpulan diperoleh Sewaka ketika memasuki perkumpulan pegawai Bestuur Boemipoetera (PPBB) dari 1935-1939. Tiga tahun kemudian ia menjabat komisaris pengurus Besar dan Ketua Cabang PPBB cabang Indramayu.

Jabatan Sewaka setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diangkat sebagai Residen Jakarta. Ketika dalam suatu kunjungan kerja di Rengasdengklok, di tengah jalan dekat Klender, kendaraannya diccgat kumpulan orang bersenjata rupa-rupa dengan teriakan "... bunuh, bunuh, bunuh". Kebetulan datanglah seorang Haji yang mengatakan ia bukan NICA melainkan Bapak Residen Jakarta dari Negara R.I.⁷

Oleh karena pertimbangan keadaan keamanan semakin gawat. Nopember 1945, Residen Jakarta berpindah ke Purwakarta dengan mendapat laporan mengenai kejadian yang berlangsung di Jakarta. Setelah bekerja selama 6 bulan, sejak Mei 1946, Sewaka dipindahkan lagi ke Tasikmalaya, sebagai residen diperbantukan pada Gubernur Jawa Barat. Pada 1 April 1947, ia diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pada masa yang bersamaan di Jawa Barat sedang ditegakkan

pemerintah pendudukan Belanda. Ketika Sewaka diminta menggantikan residen Gaos di Bogor, ia menolak karena ia harus memberi laporan kepada Kepala tentara sekutu mengenai daerahnya dan tidak diperbolehkan melakukan kunjungan ke kabupaten Cianjur dan Sukabumi.

Apa yang harus dilakukan Sewaka menghadapi gerakan Suria Kartalegawa dengan Negara Pasundannya, ia sering mengadakan kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Barat untuk memberikan penjelasan tentang gerakan itu. Ia menyadari betul bahwa Belanda kemudian menjadikan Konferensi Djawa Barat sebagai sarana untuk mendirikan Negara Pasundan sebagai perwujudan ide negara federal. Untuk itulah sebelum hal itu tercapai Belanda mengangkat Recomba (*Regeringscommissaris voor Bestuursangelegenheden* atau kurang lebih seperti gubernur juga) untuk Jawa Barat, mula-mula R. Abdulkadir Wijoyoatmojo kemudian R. Hilman Djajadiningrat.

Sekembali dari kunjungan ke Banten, Sewaka melalui jalan Selatan menuju Tasikmalaya, kota yang dalam Aksi Militer pertama (21 Juli 1947) diserang hebat oleh pasukan Belanda. Gubernur Sewaka beserta stafnya mula-mula menuju selatan Tasikmalaya dan tinggal di Sukaraja. Oleh karena penembakan Sewaka terus bergerak menuju Karangnunggal kemudian ke Lebaksiu kira-kira 70 k.m. sebelah selatan Tasikmalaya, sebuah desa di tepi hutan. Di desa ini, Sewaka membuka kantor gubernur darurat untuk menjalankan pemerintahan dengan kebijaksanaan sendiri karena hubungan dengan Yogya terputus.

Dengan batuan dari beberapa anggota kantor berita "Antara" seperti A.Z. Palindih, Moh. Rayani dan Moh. Saman, pemerintah gerilya Sewaka memiliki pemancar radio dan penerangan listrik. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sewaka mendapat informasi dari letkol Sutoko pasukan Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat sebagai konsekwensi dari perundingan Renville, situasi Jawa Barat semakin gawat. Hal itu menyebabkan Sewaka berpindah lagi ke Tawang Banteng dekat Singaparna.

Jika Cribb berpendapat tentang penangkapan Sewaka oleh karena kegiatan rahasianya di Bandung dengan orang-orang pro Republik di Parlemen Pasundan, ia bercerita lain. Ia memang didatangi dua orang

yang memintanya menjadi wali Negara Pasundan. Tetapi kemudian yang datang kemudian adalah 25 polisi yang senjata lengkap dan menangkapnya dan dibawa ke Bandung. Kemudian ia dihadapkan kepada Residen Priangan dengan menanyakan apakah mau bekerjasama dengan Belanda (*"Wilt U met ons samenwerking?"*). Dalam Linggarjati dan Renville menurut Sewaka toh sudah dijelaskan tentang kerjasama itu, lalu jenis kerjasama macam apa yang ditawarkan itu ? (*"Hoe wilt U dan de samenwerking tot stand zien komen?"*) Sewaka tidak menginginkan jenis kerjasama itu seperti hubungan antara majikan dan pembantu (*"Ik geen geval de soort samenwerking welke te zien is bij de verhouding tussen baas en knecht"*). Mendengar jawaban itu, residen Priangan marah dengan mengatakan kalau begitu anda masuk penjara (*bui*) Tangerang. (*"Dan gaat U naar de Boei Tangerang"*).

Menarik ungkapan Sewaka ketika ia selepas dari penjara Tangerang dipindahkan ke Yogya oleh karena dianggap berbahaya untuk tinggal di Jawa Barat. Pernyataan *staatsgevarlijk* oleh *Recomba* itulah yang dipertanyakan Sewaka, dipandang dari negara yang mana, bukankah keputusan itu dibuat oleh bangsanya sendiri.⁸

Pada akhirnya Sewaka menerima juga jabatan sebagai wali Negara pada 8 Februari 1950, tetapi ketika orang-orang yang pro Republik di dalam Negara Pasundan sudah begitu besar, sehingga dalam beberapa bulan kemudian Parlemen Pasundan membubarkan diri dan bergabung dengan Republik.⁹

3. RAA. Muhammad Musa Suria Kartalegawa

Berbicara tentang Negara Pasundan tidak bisa tidak harus dikaitkan dengan seorang tokoh bernama Raden Adipati Aria Muhammad Musa Suriakartalegawa. Dengan didukung Partai Rakyat Pasundan, ia menyatakan berdirinya Negara Pasundan pada 4 Mei 1947. Perlu dibedakan dua konsep Negara Pasundan yang didirikan Suria Kartalegawa dan Negara Pasundan yang dalam proses pembentukan melalui Konferensi Djawa Barat. Meskipun tidak ada kaitan langsung antara keduanya, tetapi Suria Katallegawa

mengganggu yang disebut terakhir itu merupakan penjelmaan kembali cita-citanya.¹⁰

Berkenaan dengan aktivitasnya itu, Suria Kartalegawa di berbagai tulisan disebut dirinya seperti misalnya "NICA-Legawa", Suriakartalegawa adalah *wayang* yang dimainkan Van Mook", "Dengan meminjam tangan Suriakartalegawa Belanda mengadakan gerakan separatisme pertama di Jawa dengan membentuk Partai Rakyat Pasundan untuk mencapai tujuan mendirikan Negara Pasundan". Ungkapan-ungkapan itu tentu saja tidak sederhana untuk diterangkan.

Dilihat dari latar belakang perkembangan sosial budayanya, daerah Priangan (Provinsi Jawa Barat) tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Jawa (Mataram). Itulah sebabnya terdapat penduduk yang bukan hanya Sunda tetapi juga penduduk yang berbahasa Jawa atau campuran keduanya seperti terlihat pada bahasa Cirebon. Cirebon merupakan daerah yang tidak semua penduduknya berbahasa Sunda. Pada masa VOC, wilayah Cirebon meliputi daerah luas mencakupi Priangan Timur sampai bagian selatan berbatas laut, termasuk Galuh (Ciamis), Sukapura (Tasikmalaya) dan Limbangan (Garut). Akan tetapi pada 1813, Daendels mengalihkan dua daerah kabupaten terakhir itu ke Priangan, meskipun nampaknya secara resmi Galuh merupakan bagian dari Cirebon. Pada 1915 satuan-satuan geografik, etnik, bahasa dan budayamengaitkan Galuh lebih dekat ke Sunda dan menjadi bagian dari Residensi Priangan.¹¹

Ketika proses pembentukan Negara Pasundan dalam kerangka Negara Indonesia Serikat sedang diperdebatkan, muncullah perbedaan pendapat antara pendukung Sunda dan pendukung Cirebon, mengenai bahasa dan penamaan negara. Dalam sidang Konferensi Djawa Barat III, 23 Februari 1948, Suriakartalegawa dan kawan-kawan mengajukan sebuah mosi supaya dalam pembicaraan dalam rapat Badan Perwakilan agar dibolehkan menggunakan bahasa Sunda. Menanggapi mosi itu anggota Soekardi mengatakan " Djika dibolehkan berbitjara dalam bahasa Soenda, orang-orang jang ingin memakai bahasa daerah lainnja poen haroes diidzinkan, oempamanja bahasa Daerah Tjirebon".¹² Dalam perdebatan selanjutnya akhirnya mosi Suriakartalegawa di tolak sidang.

Akan halnya penamaan Negara, orang Cirebon lebih menyukai Djawa Barat. Hal itu dapat dilihat dalam telegram Sultan Cirebon :

"kepada Sidang Conferentie Djawa Barat 3 Bandoeng kami Soeltan Anom Tjirebon Ketoea Poesat PRI (Partai Ra'jat Tjirebon:SZ) Tjirebon atas nama seloeroch ra'jat 300.000 orang jang tergaboeng dalam PRT Tjirebon dengan ini menjatakan simpati dan setoedjoe terhadap conferentie Djawa Barat 3 dan mendonga conferentie ini dapat melahirkan Negara Djawa Barat djoega kami menoenitoet berdirinja Daerah Istimewa Kesoeltanan Tjirebon dengan berparentahan autonoom dalam lingkoengan Negara Djawa Barat.¹³

Usulan agar Cirebon diberi hak sebagai daerah istimewa sebenarnya telah diajukan pada Konferensi Djawa Barat Pertama (13 - 18 Oktober 1947).¹⁴

Di lain pihak aspirasi orang Sunda yang seperti ditunjukkan pendukung Partai Ra'jat Pasundan mengusulkan bahwa nama negara harus Pasundan, seperti terbaca di bawah ini :

"..... Dari pihak Partai Ra'jat Pasundan telah dikemoekakan keberatan nama "Djawa Barat", oleh karena nama itoe sebetoenja adalah soeatoe terdjemahan dari sebagian besar bangsa Soenda. Oleh karena dalam tehoen 1926 oleh Pemerintah Belanda nama Pasoendan jang bersedjarah itoe telah diakoei dengan dibentoecknja Propinsi Pasoendan, sedangkan dalam segala soerat-soerat resmi dipakainja nama "Pasoendan", maka soedahlah dapat dimengerti, bahwa kami menggoegat perihal nama terseboet".¹⁵

Bahwa Belanda selalu berusaha dan untuk sebagian besar telah berhasil memanfaatkan pemimpin-pemimpin pribumi sudah ditunjukkan sejak masa VOC. Para pedagang VOC (1602-1799), telah memanfaatkan kepentingan-kepentingan politik lokal untuk tujuan mereka. Ketika VOC semakin melibatkan diri pada kepentingannya di Jawa, maka harus dilakukan konsolidasi untuk meningkatkan hubungannya dengan penguasa-penguasa pribumi dan pegawai-pegawai istana termasuk bupati-bupatinya.¹⁶

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda meneruskan pola kerjasama dengan pribumi. Dalam perkembangan birokrasi tradisional sesuatu hal yang nampak adanya kesinambungan dan keterputusan keturunan keluarga bupati. Gambaran yang mengesankan tentang pemerintahan yang berkesinambungan oleh para keluarga Bupati di Priangan, seperti umumnya di Jawa, selalu ada mereka yang menarik yakni perbedaan antara dinasti yang tua dan yang relatif baru yang karena perkawinan

dengan yang disebut pertama. Sebagai contoh, bupati-bupati Garut yang baru, yakni keluarga Suria Kartalegawa (R.A.A. Suria Kartalegawa 1915-29; R.A.A. Muhammad Musa Suria Kartalegawa, 1929-44) di dalam istilah disebut *homines novi*, yang menerima nama terkemuka dari nenek moyang terkenal mereka Haji Mohammad Musa, kepala penghulu Garut, seorang yang mengetahui banyak tentang masyarakat Sunda dan mempunyai hubungan baik dengan seorang pengusaha perkebunan berpengaruh dan berpendidikan K.F. Holle. Keenambelas anak-anak kepala penghulu itu menjadi pegawai-pegawai tinggi Pangreh Praja atau yang mengawini mereka. Ini sering disebut lebih karena koneksi daripada karena kepandaiannya. Akan tetapi seperti biasanya pada waktu sudah menjadi anggota keluarga itu dapat memperlihatkan ikatan darah dengan keluarga-keluarga yang sudah mapan. Dalam hal ini Sutherland menyebut bahwa persoalan tentang bagaimana pertalian darah Kartalegawa baru bergantung pada perspektif seorang pribadinya, sebab beberapa anggota keluarga yang tua lainnya, mungkin akan tersinggung oleh karena kemunculan keluarga Kartalegawa dianggap sebagai memulai dari atas tanpa akar-akar nyata di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.¹⁷

RAA. Muhammad Musa Suria Kartalegawa (dengan panggilankecil Uca) dilahirkan di Garut pada 26 Oktober 1907 (wafat 12 Maret 1978). Dalam usia 16 tahun Uca tamat dan berijazah ELS, lima tahun kemudian menyelesaikan HBS 5 tahun dan pendidikan resminya berakhir dengan menamatkan *Technische Burgerschool* dan *Burgerschool* pada 1935. Pengalaman pekerjaan Uca dimulai dengan magang sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda di Cianjur pada 1928. Karirnya di pemerintahan sebagai asisten wedana di Langkaplancar dan Cibeureum, kemudian asisten wedana kelas I di Sukabumi, wedana soreang Bandung pada 1936. Tahun berikutnya menjadi wedana Patih dan Wedana Bupati Bandung dan dalam jabatan yang sama antara Desember 1938 sampai 1943 di Garut. Sejak 13 Januari 1944 sebagai pegawai Priangan *Shucho*. Mohammad Musa juga adalah anggota Provinsi Residen Jawa Barat pada 1936 dan anggota Dewan Rakyat (Volksraad) pada 1939.¹⁸

Masa pendudukan Jepang bagi kalangan pangreh praja pada umumnya merupakan periode ujian berat dalam memikul tugas

pekerjaannya. Pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan militer Jepang, harus dilakukan mulai dari penyediaan tenaga Romusha, pengumpulan padi, sampai dengan penyediaan wanita penghibur. Jika tugas ini dijalankan dengan baik, mmaka sebaliknya dapat menjadi sasaran kebencian dan dendam yang tidak jarang dilampiaskan rakyatnya setelah Jepang kalah. Apa yang menarik untuk disampaikan berkenaan dengan kiat Suria Kartalegawa untuk memenuhi permintaan *yugun ianfu*, ia jelaskan demikian. Permintaan Jepang terhadap yang satu ini sangat dirasakan berat oleh para bupati dan demikian seterusnya pejabat-pejabat bawahannya. Sebab kalau tidak dapat dipenuhi, maka sebagai gantinya isteri-isteri mereka atau anak-anak perempuan mmereka. Ketika Suria Kartalegawa harus menyediakan wanita penghibur untuk 50 orang Jepang. tentu bukan pekerjaan mmudah. Dengan bantuan salah seorang bawahannya, Suria Kartalegawa bukan saja ia dapat memenuhi permintaan itu melainkan juga hanya dalam waktu yang singkat hajat kelimpuluh opsir Jepang dapat dilayani dengan baik. Maka ketika Suria Kartalegawa bertanya kepada bawahannya, darimana dan siapa perempuan-perempuan yang kamu bawa itu?, lalu dijawabnya : “ mereka adalah para pelacur”.¹⁹

Dihadapkan pada berbagai peluang yang ada sebenarnya tidak mudah bagi seseorang untuk memilihnya. Secara teoritik memang dapat dijelaskan sebagian oleh latar belakang pengetahuan dan tetapi yang sebagian besar lagi karena ketidaktahuannya akan masa depan. Suria Kartalegawa adalah pribadi berstatus sosial tinggi (menak), yang tidak aktif dalam perkumpulan/organisasi apalagi yang bercorak nasional. Hal itu pula memungkinkan kita menjelaskan mengapa ia kontra proklamasi Soekarno-Hatta. Tapi bukankah berbicara tentang pihak yang mula-mula kontra Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah didahului oleh Sjahrir?²⁰ Dasar pemikiran dan argumentasi sajalah yang membedakannya. Suria Kartalegawa begitu erat dan setia berhubungan dengan Belanda, itulah sebabnya ketika Proklamasi 17 Agustus 1945, ia mengatakan “kita sekarang telah bebas dari penjajahan Belanda tetapi janji kemerdekaan tidak diberikan”.²¹ Memang tindakannya itu dianggap tidak mengikuti arus perkembangan besar, suatu gerak sejarah yang sedang menuju negara nasional berbentuk kesatuan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ia memilih itu ? Kebanyakan

golongan yang mapan tidak suka kepada perubahan yang dianggap akan mengancam kedudukannya. Apalagi revolusi dalam konteks seseorang seperti Kartalegawa harus memilih. Sikap dan ketidaksukaannya kepada pribadi tertentu dapat menjelaskan faktor lain.

Ketidaksenangan Suria Kartalegawa setelah Proklamasi kemerdekaan (kepada Presiden Soekarno) menanggapi perkembangan politik pemerintahan di Jawa Barat adalah karena ditujukannya orang bukan Sunda yang menjadi gubernur pertama, kedua dan ketiga—soetardjo Kartohadikusumo, Datuk Jamin dan Dr. Murjani—baru kemudian Sewaka yang orang Sunda, sebagai gubernur keempat.²² Pertikaian antara elit di Priangan dapat merupakan kerangka penjelasan lain yang dapat dianalisis.

Ketidaksenangan kedua Kartalegawa kepada Soekarno, dalam hal mengapa Republik mau mengikuti Negara Indonesia Timur tetapi tidak mau mengakui Negara Pasundan. Ketiga, ketika Soekarno menyuruh anak Kartalegawa untuk berbicara di corong radio dengan mengatakan bahwa dia baru menikah kalau ayahnya sudah mati.²³ Satu dari ketiga alasan itu bisa saja dikatakan tidak berdasar kuat—mengenai pengakuan kepada Negara Pasundan—tapi bagaimana dengan dua yang lain. Sesuatu yang masih diingat mengenai ketidaksenangannya dengan pengangkatan Soetardjo, ketika Kartalegawa dalam perjalanan di bawah ke penjara Wirotunan. Di Yogya ia bertemu Soetardjo yang karena sebagai pejabat pemerintah seperti biasanya diatur dengan protokoler resmi dengan menumpangi mobil pejabat. Padahal Kartalegawa ingat betul ketika di Yogya bukankah yang feodal itu adalah Soetardjo.²⁴

Jika dilihat dari sisi Republik, seorang Kartalegawa merasa dirugikan, lalu apakah ia mendapat kompensasi dari Belanda. Untuk sebagian dapat dijawab ya, tetapi dalam beberapa hal ia juga merasa dibohongi. Kalau di satu pihak ia mendapat kemudahan dari Kolonel Thompson di Bogor, Residen Priangan M. Klassen dan pemangku jabatan gubernur Jawa Barat C.W.A. Abbenhuis, tetapi tidak begitu saja dari Van Mook. Terhadap gerakan Kartalegawa, Van Mook sesungguhnya ragu-ragu apakah ia dapat dijadikan “wayang” yang

handal. Bagi Van Mook tindakan proklamasi Negara Pasundan 1947 malahan telah menyusahkannya. Seperti dikatakannya :

"You act like Hitler. You made it very difficult for me with regards to the Republic. Your proclamation had no antecedents. Without proving that the Sundanese people support the PRP, you have done good with the proclamation. You are against the Republic and have made things difficult for us".

("Kamu bertindak seperti Hitler. Kamu telah membuat hal itu sangat menyulitkan saya berkenaan dengan Republik. Proklamasi mu tidak mempunyai persiapan. Tanpa pembuktian bahwa orang Sunda mendukung PRP, kamu berbuat tidak baik dengan proklamasi itu. Kamu adalah lawan Republik dan telah membuat hal-hal sulit bagi kami.")²⁵

Akhir Negara Pasundan yang didirikan Suria Kartalegawa sesungguhnya masih belum jelas, karena aktivis-aktivis Republikeken membuat pamflet-pamflet yang seolah-olah ditanda tangani Suria Kartalegawa yang menyatakan ia mencabut proklamasi itu dalam menyatakan loyal kepada Republik. Pernyataan itu dikeluarkan pada 6 Mei 1947. Hal ini meragukan karena pada tanggal 11 Mei PRP masih mengadakan rapat umum di Jakarta. Pada akhir bulan itu bahkan PRP mengadak gerakan-gerakan teror dengan menculik sejumlah pejabat Republik di Bogor.²⁶

Bahwa Kartalegawa berpredikat sebagai "kaki tangan" Nica, bukan tidak diketahuinya. Dalam sidang Parlemen Pasundan 14 Mei 1948, pernah ia mengalihkan pembicaraan kepada ungkapan hatinya dengan mengatakan :

"Dahoeloe golongan Republieken telah membladjar anak2 disekolah oentock berjanji dan njanjian itoe semata-mata ditoedjoecken kepada diri saja. Njanjian itoe dinjanjikan dihadapan saja oleh seorang keponakan perempuan jang beoesia 7 tahoen tersaksi oleh seorang opsir KNIL. Peristiwa ini terdjadi pada waktoe masih ada demarcatielijn jang dahoeloe dan boenjinja njanjian itoe adalah sebagai berikoet :

Halo2 Garoet, kota aman djadi riboet,
Halo2 Garoet, tempat orang toekang tjatoet.
Boepati Garoet dahoeloe SoeriaNICAlegawa
marilah boeng kita tangkap dia."²⁷

Masih dalam pidatonya, Kartalegawa meneruskan :

" Ini njanjian adalah semata-mata oentock membangkitkan kebentjiaan rakyat terhadap diri saja, sebagai seorang Agen Nica sebagai pemimpin gerakan jang didirikan oleh Nica, katanya."

Terhadap ketetapan hati Kartalegawa untuk memilih sikapnya dapat dilihat dalam kata-katanya:

“Walaupoen saja seorang Muslimin, akan tetapi saja dengan sepenoehnja menjetoedjoeinja perkataan jang dioetjapkan oleh Paus dalam Paasboodschapnja dan jang demikian boenjinja: Dalam massa ketakoetan dan bahaja, maka doenia haroes mengambil poetoesan2 jang tidak dapat dibatalkan lagi. Pada waktoe ini tidak ada tempat bagi jang bersikap setengah-setengah dan beragoe-ragoe, jang berpendapat bahwa dapatlah ia mengabdikan kepada doea madjikan.”²⁸

Siapa yang dianggap Suria Kartalegawa sebagai orang-orang yang mempunyai dua majikan (tuan) adalah mereka yang memanfaatkan Konferensi Djawa Barat III untuk memperjuangkan Negara Kesatuan. Meskipun cara perjuangan itu disebut sebagai taktik saja.

4. Penutup

Pencarian suatu kerangka penjelasan untuk menjelaskan interaksi antara tindakan individu dengan struktur-struktur masyarakatnya kiranya perlu dilakukan. Paham individualisme dalam penulisan sejarah dapat dilihat dari cara pengungkapan yang cenderung unik, bahwa peristiwa-peristiwa terpisah dari struktu- struktur (nilai-nilai, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat). Sebaliknya paham holisme, memandang tindakan manusia luluh sepenuhnya di dalam kerangka struktur masyarakat. Interaksi antara struktur mikro dan makro itulah kiranya yang dapat menjelaskan sejarah secara kompherenship, dengan pendekatan strukturis. Paham strukturis memandang masyarakat sebagai struktur nyata dari perangkat aturan, peran-peran relasi-relasi dan makna-makna yang dihasilkan dan berubah oleh para individu yang merupakan kondisi sebab akibat dari tindakan, keyakinan dan keinginan-keinginannya.²⁹

Demikianlah maka dapat dijelaskan mengapa ungkapan-ungkapan tentang Suria Kartalegawa dikaitkan dengan strategi Van Mook untuk menerapkan negara federal, tidak sepenuhnya tepat. Oleh karena potensi Suria Kartalegawa sebagai individu seolah-olah tertelan oleh struktur makro secara begitu saja. Hal itu misalnya dapat dilihat pada keraguan-raguan Van Mook sendiri kepada kemampuan Kartalegawa.

Dalam pribadi Sewaka nampak bahwa potensi pribadi dapat mempengaruhi struktur makro (baca:kolonial) betapapun skalanya. Dalam perkembangan selanjutnya struktur makro Revolusi Indonesia telah "membawa" jalan yang bergerak lurus bagi Sewaka untuk menapaki sejarah Indonesia tetapi tidak sebagaimana dialami dan dirasakan oleh Kartalegawa.

Catatan

1. Soedjatmoko, "Pilihan dan Peluang: Revolusi Indonesia Setelah 45 Tahun: Beberapa refleksi Pribadi", *Sejarah, Media Komunikasi Masyarakat Sejarawan Indonesia*, No. 1, 1991.
2. Peter Burke, "Overture: The New History, its Past and its Future", dalam Peter Burke (Ed), *New Perspectives on Historical Writing*. Cambridge. Polity Press, 1991. hlm.5
3. Untuk bagian ini penulis masih bertumpu pada tulisan Sewaka, *Tjorat Tjaret Dari Djaman Ke Djaman*, Bandung, 1955.
4. *Orang Indonesia Jang Terkemoeke Di Djawa*, Tjetakan Pertama diterbitkan oleh Gunssseikanbu 2604 (1944) hlm.77.
5. Sewaka, *Tjorat Tjaret Dari Djaman Ke Djaman*, Bandung, 1955 hlm.1-2.
6. *Ibid* hlm. 35-36
7. *Ibid* hlm. 83
8. *Ibid* hlm 99-105
9. Robert Cribb, *Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Jakarta, Graffiti, 1990. hlm. 139-140.
10. Helius Sjamsuddin dkk, *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*, Jakarta, Proyek IDSJ, Depdikbud, 1992. hlm. 33.
11. Sutherland, "Notes on Java's Regent Families", *Indonesia*, No. 16 (October) 1973, hlm. 113.
12. Notulen Sidang Konferensi Djawa Barat III, 23 Februari 1948. *Algemene Secretarie* No. 1221 ANRIJ.

13. *Ibid.*
14. Tuhuteru, *Riwayat Singkat Terdirinja Negara Pasoendan*. Djakarta, Penerbit Djawatan Penerangan Pemerintah t.t. hlm.4
15. Notulen Sidang Badan Perwakilan Sementara Negara Djawa Barat 1 Maret 1948, *Algemene Secretarie* ANRIJ no. 1221 hlm. 6.
16. Sutherland, "Notes on Java's Regent" hlm 130-131.
17. *Ibid.*
18. *Orang Indonesia Jang Terkemoeaka di Djawa*. hlm. 93.
19. Wawancara Machfudi Mangkudilaga dengan R.A.A. Moehammah Musa Suria Kartalegawa 4 Desember 1974, kaset tersimpan di ANRIJ.
20. Kahin, *Nationalisme and Revolution in Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press, 1952. hlm. 147.
21. Wal. Dr. S.L., Van der, *Officiele Beschiden Betreffende de Nederlandsch-Indonesische Betrekkingen 1945-2949*, Aschste Deel, s'-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. hlm 629.
22. Wawancara Machfudi Mangkudilaga dengan R.A.A. M.M. Suria Kartalegawa.
23. *Ibid.*
24. *Ibid.*
25. Yong Mun Cheong, *H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role in Dutch-Indonesian Relation, 1945-1948*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1982, hlm. 107.
26. Robert Cribb, *Gejolak Revolusi*, hlm. 148 ; lihat surat kabar Api Rakjat 6 Mei 1947.
27. Notulen Sidang Parlemen Negara Pasundan 14 Mei 1948, *Algemene Secretarie* No. 1223 ANRIJ.
28. *Ibid*
29. Lloyd, Christopher, *The Structures of History*, Oxford, Blackwell, 1993.

DINAMIKA POLITIK DI DAERAH MMTg MRAGGEN SEMARANG, 1945--1949

Djuhar Noor & S. Sigit Wahyudi

1. Latar Daerah Mraggen

Mraggen pada masa revolusi fisik berstatus sebagai kewedanaan yang membawahi 4 kecamatan, yaitu Genuk, Mraggen, Karanggawen, dan Gubug, yang kesemuanya ini termasuk daerahh Kabupaten Demak. Kata daerah ini menunjuk pada kesatuan wilayah atau teritorial (Taufik Abdullah: 1979, 10-14).

Topografi daerah Mraggen merupakan tanah hamparan rata dengan ketinggian 0-1 meter dari permukaan laut, sedangkan tanah terdiri atas susunan sedimen kwaster. Jenis tanah ini termasuk aluvial hidromart berwarna cokelat kekuning-kuningan, mengenai bahan induk tanahnya merupakan endapan tanah liat dan pasir (Kerjasama Pemda Tk I Demak dengan Undip: 1976, 8). Tanah semacam ini agak sulit ditanami padi dan hanya baik untuk tanaman pisang, ketela, jagung, kacang, dan ilalang.

Kawedanaan Mraggen terletak 15 km di sebelah timur dan tenggara dari kota Semarang. Namun terdapat desa-desa seperti Penggaron, Pedurungan, Bugen, Genuk yang berjarak 6 km hingga 3 km dari markas Belanda yang pada waktu itu berada di Kabluk maupun BAT, sehingga sangat strategis bagi pertahanan melawan Belanda. Mraggen sebagai Markas Medan Tenggara (MMTg) paling dekat dengan

Semarang apabila dibandingkan dengan Markas Medan Selatan (MMS) di Ungaran atau Markas Medan Barat (MMB) di Boja, ataupun komando Markas Medan Timur (MMT) di Demak. Maka Mraggen sangat potensial dan merupakan front terdepan bagi TKR untuk menghadapi Jepang, Sekutu, maupun Belanda (A.H. Nasution: 1986, 71 dan Catatan pribadi Sugito: ³¹⁾

Tempat MMTg berada di Mewedanan Mraggen, sedangkan Markas Pusat Hisbullah dan Sabilillah (MPHS) dari MMTG. Selain pasukan resmi, di Mraggen juga ditempatkan Badan-badan Kelaskaran. Pasukan RI menyebar pada pos-pos pertahanan yang telah ditentukan, seperti: Tegalmulyo, Nyangkringan, Alastuo, Bugen, Pedurungan, Pucanggading, Klipang, dan Gendongan (Wawancara Adnan dan Sudjak: 1994). Selain pentingnya mempertahankan jalan raya jalur Semarang-Purwodadi, dan jalur utara jurusan Semarang menuju Demak, Kudus, Surabaya, maka jalur kereta Api dari Semarang menuju Purwadadi, Solo tetap mendapat prioritas utama. Di Mraggen terdapat stasiun Brumbung yang dilewati oleh Kereta Api dari stasiun Tawang (Semarang) menuju stasiun Balapan di Solo. Jalur Kereta Api ini dapat dipakai untuk mengirim logistik dan pasukan dari luar daerah, seperti: Boyolali, Salatiga, Purwodadi dan Surakarta. Pasukan yang datang dari Salatiga dan Ungaran ditempuh dengan jalan kaki atau menggunakan truk dari peninggalan Jepang yang jumlahnya terbatas (Soepanto: 1992, 113-115 dan wawancara Ali Nur Chalib: 1993). Sehingga untuk pengamanan jalur Kereta Api ini, perlu khusus ditempatkan sepasukan TKR dengan senjata penangkis serangan udara. Mraggen, Pedurungan, Alastuo merupakan medan yang paling berat di seluruh Semarang karena tanahnya datar, berawa-rawa, sehingga tidak ada tempat untuk berlindung dalam menghadapi Belanda (A.H. Nasution: 1986, 72). Karena beratnya medan MMTg, maka di utara rel Kereta Api Alastuo ditempatkan satu pasukan t4 di medan timur (MMT) yang selalu koordinasi dengan MMTg. Pasukan T4 mempunyai tugas untuk menghadang pasukan Belanda lewat jalur Kereta Api dari stasiun Tawang Ke Purwadadi atau ke Surakarta. Selain itu, tugas Pasukan T itu adalah untuk menguasai jalan raya paling utara menuju Demak, Kudus dan Surabaya. Pasukan T4 ini bertempat di sebelah timur pasar Genuk dengan beranggotakan

Pasukan gabungan dari Salatiga, Purwadadi, Pati di bawah komandan pertempuran ada di Sayung, sedang di Batu terdapat pos penghubung. Medan T4 ini di bawah komandan mayor Wardjonitiprawiro bersama Iskandar Jayusman yang mempunyai induk pasukan Devisi V Ronggolawe di bawahh Djatikusuma yang berkedudukan di Pati (Iskandar Jayusman BBA: 1984, 16 dan wawancara dengannya pada 1993).

Mraggen sejak pusat-pusat pendidikan hingga sekarang masih terdapat pusat-pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam berupa sekolahan, madrasah dan pondok pesantren Subaran di bawah asuhan K.H. Muslichh yang merupakan pusat kegiatan torikhot Kodiriyah Nakhsinbandiyah. Pondok ini karena torikhotnya dapat menjalin hubungan dengan pesantren lainnya di seluruh Jawa hingga ke Arab. Melalui pesantren dan torikhotnya merupakan saluran yang sangat idial untuk menanamkan idiologi perang sabil dan merekut massa untuk melawan penjajah Belanda. Idiologi Perang suci yang menonjolkan penolakan masyarakat muslim terhadap pemerintahan Belanda yang dianggapnya kafir (Sartono Kartodirdjo: 1978, 8-10).

Peranan pemimpin yang dimainkan oleh para Kiai dan Haji menyebabkan ideologi perang suci menjadi senjata yang hebat untuk menentang penjajah Belanda. Ideologi oleh para Kiai dan Haji merupakan ajakan dan himbauan yang kuat kepada semua umat Islam agar Kartodirdjo: 1984, 50). Semangat jihad tidak akan dapat dipisahkan dari kebencian dan rasa dendam terhadap Belanda sebagai kaum kafir yang dianggapnya telah mencemarkan kehormatan agama Islam (Wawancara I.M. Soedarno: 1994 dan Prisma: 1981, 9).

2. Pembentukan Markas Medan Tenggara (MMTg)

Pada tanggal 15 Desember 1945 Sekutu mulai mmeninggalkan Ambarawa mundur melalui Bawen, Ungaran terus menuju Semarang (Disejarah Militer Kodam VII/Diponegoro & Pemda TK.II Semarang: 1979, 91). DiUngaran pasukan Sekutu hhanya bertahan satu malam. Dalam pengunduran diri ke Semarang, Sekutu dibantu kapal terbang dengan memuntahkan peluru, meriam di atas daerah Candi, Bagian

timur Semarang, meliputi Mraggen, Pedurungan, Alastuo tidak luput dari serangan Sekutu. Setelah Sekutu masuk Semarang tidak lagi terjadi pertempuran secara besar-besaran, tetapi sifatnya hanya patroli-patroli saja (A.H Nasution: 1977, 350 dan wawancara Jacob Hidayat: 1994. Lihat Lampiran).

Pada tanggal 17 Mei 1946 di Semarang terjadi serah terima Komandan Pendudukan dari Brigadir Darling (Inggris) Kepada Kolonel Van Langen sebagai Komandan Brigade "T" KNIL (Disjarah Kodam VII/Diponegoro: 1977, 260). Sebulan kemudian yaitu tanggal 1 Juni 1946 Soenarto Koesoemodirdjo dari pasukan gabungan Surakarta, diangkat menjadi komandan Markas Pimpinan Pertempuran (MPP) Jawa Tengah. Fungsi MPP sebagai koordinator di seluruh sektor pertahanan Jawa Tengah dengan pengurus yang terdiri dari wakil-wakil Badan Perjuangan (A.H. Nasution: 1968, 69). Untuk mengepung Semarang maka MPP Jawa Tengah membuat sistem pedoman kerja dengan pembagian sektor, sebagai berikut :

- (1) Sektor Markas Medan Timur (MMT) dengan pimpinan komandan sektor di Demak, wilayahnya batas pantai utara Jawa ke selatan hingga Alastuo.
- (2) Sektor Medan Tenggara (MMTg), pimpinan sektor di Mraggen, dengan batas sebelah utara rel Kereta Api di Alastuo jurusan Semarang ke Kedungjati, hingga selatan di Matesih.
- (3) Sektor Markas Medan Selatan (MMS) pimpinan sektor di Ungaran, batas wilayah sebelah timur Matesih dan barat hingga Gunungpati.
- (4) Sektor Markas Medan Barat (MMB), pimpinan sektor di Boja dengan batas wilayah selatan Gunungpati dan utara pantai laut Jawa (A.H. Nasution: 1968, 71 dan Wawancara Immam Handrongi: 1994).

Sebelum dibentuk MMTg, di wilayah Mraggen telah ditempatkan pasukan dari Yogyakarta di bawah pimpinan Umar Slamet kemudian digantikan oleh kesatuan dari Surakarta di bawah Soenarto Koesoemodirdjo bersama komandan kesatuan pemuda oleh Slamet

Rijadi, Sarsono, Raksono dan lain-lain. Jadi kebenaran MMTg sekitar akhir bulan Juni 1946 hingga Juli 1947 semasa Agresi Belanda I.

(a) Struktur Organisasi MMTg

Sektor Markas Medan Tenggara di bawah pimpinan Mayor Sockarto dan Mayor Basoeno, namun karena pertentangan dengan Mayor Basoeno mengenai pendirian, maka Mayor Soenarto ditarik ke MPP Jawa Tengah untuk membantu Staf II. Kepala Staf Umum dipegang oleh Mayor Hhatmodarmojo. Sektor ini berkekuatan 1 Bataliyon, dibawahnya berupa Kompi, kemudian Seksi dan Regu, setiap Seksi beranggotakan 3 regu sedangkan setiap Regu beranggotakan kurang lebih 15 orang. (Reorganisasi 10 Divisi menjadi 7 Divisi: 1947, 8 dan Wawancara Imam Hadrongi: 1994).

Selain pasukan resmi, di MMTg juga terdapat Badan-Badan Kelaskaran yang diurus oleh Biro Perjuangan Karesidenan Semarang di Salatiga (D.XXII) di bawah Letkol A. Rachman dan wakilnya Mayor Sugijono. Badan-badan Kelaskaran ini antara lain: BPRI, Laskar Kere dari Surakarta, Pesindo, Hisbullah dan Sabilillah, Barisan Banteng dari Surakarta, Barisan Srikandi, Polisi Istimewa, Laskar Rakyat, Laskar Buruh dan lain-lain (Reorganisasi dari 10 Divisi ke 7 Divisi: 1947, 2. Wawancara H.Muh. Afwazym Priyatno: 1994). Badan-badan Kelaskaran tersebut yang paling besar adalah Barisan Hisbullah dan Sabilillah. Hal ini disebabkan karena selain Hisbullah dan Sabilillah berasal dari daerah setempat, seperti pimpinan K.H Muslich dan Sukaemi di Mraggen, K.H Moestofa di Bugen, K. H Husni Arifin di Pedurungan, Balita Umar dari Demak, masih dikirim 1 Batalyon di bawah Kiai Abdul Rahman dari Surakarta (Soepanto: 1992, 37).

Menjamurnya Badan-Badan Perjuangan ini bisa dipahami karena suasana revolusi terjadi masa krisis sebagai situasi penuh dinamika, sewaktu golongan muda menunjukkan aktifitas yang luar biasa, penuh antusiasme dan rasa bebas, yang lepas dari ikatan struktural. Semasa Jepang, semua kegiatan diawasi dan diatur secara ketat, pemuda ingin bebas, menonjolkan dan individualitasnya. Ketegangan yang bertahun-

tahun tersimpan, akhirnya meledak. Pertumbuhan Badan Perjuangan sebagai proses ke arah institusinalisasi pada kelakuan dan hubungan sosial antar individu dan antar golongan. Namun sebagai bentuk solidaritas baru masih menunjukkan ciri-ciri tradisional di satu pihak dan ciri-ciri modern di pihak lain (Sartono Kartodirdjo: 1988, 10).

b. Jalur Perintah MMTg

Dalam membahas jalur perintah di setiap Markas terutama di wilayah Semarang, pada akhir tahun 1945 hingga pertengahan 1946 nampak berbeda dengan akhir 1946 hingga 1947. Hal ini disebabkan makin rapinya struktur organisasi baik yang menyangkut tentara reguler maupun Badan-Badan Kelaskaran. sebelum diadakannya Reorganisasi dari 10 Devisi ke 7 Devisi, maka Markas di Mraggen dikendalikan dari 3 komando, yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Pati. Bagi Badan Kelaskaran perintah langsung berasal dari Markas Besar yang dipimpin oleh Komandan Devisi, atau oleh Kepala Staf. Bagian kelaskaran dengan pimpinan daerah merupakan satu kesatuan, sehingga pimpinan daerah merupakan pembantu utama Devisi, sebagai contoh adalah Barisan Banteng (Panitia Penyusun Sejarah : 1959, 4. dan Wawancara Hendropardjoko : 1994).

Dalam medan pertempuran, semua Badan-Badan Kelaskaran tetap berdiri sendiri sebagai badan-badan ter-sendiri dibawah masing-masing pimpinan, akan tetapi harus tetap tunduk kepada satu pimpinan pertempuran atau satu komando di bawah TRI. Namun bilamana dalam keadaan genting misalnya pimpinan TRI belum ada, maka barisan itu berusaha tetap tegaknya pertempuran (Kedaulatan Rakjat: 1946). MMTg. di bawah Mayor Basoeno sifatnya koordinatif dan integratif serta harus dapat memobilisir kekuatan yang ada.

Pada periode Juli 1946 sampai Juli 1947, struktur organisasi sudah tertata rapi, sehingga jalur komandopun nampak jelas. Komandan Devisi IV perintah pada MPP Jawa Tengah di Salatiga, kemudian diteruskan ke setiap markas medan seperti MMTg di Mraggen ini, begitulah sebaliknya. Demikian halnya dalam Biro-Biro Perjuangan Karesidenan Semarang juga berkedudukan di Salatiga dan nanti setelah Clash pertama kedudukan pindah ke Purwadadi. Dalam menyampaikan

perintah ini peranan seorang Kurir memegang peranan yang amat penting (Reorganisasi 10 Devisi menjadi 7 Devisi: 1947, 4). Bagi MMS mendapat jalur perintah dari Devisi V di bawah Djati Kusumo yang berkedudukan di Pati. Namun MMS ini selalu koordinasi dengan pasukan yang berada di MMTg (Iskandar Jayusman : 1984, 17).

c. Logistik

Persenjataan, komunikasi, logistik, dan obat-obatan sangat mendukung keberhasilan di dalam setiap perjuangan. Senjata dan logistik baik bagi pasukan reguler ataupun Badan Kelaskaran sudah diurus oleh induk pesukannya masing-masing. Hal ini seperti Barisan Banteng atau Barisan Hisbullah dan Sabilillah. Barisan Banteng yang bermarkas di Surakarta, melalui seksi dana telah berusaha mendirikan usaha dagang, mencetak majalah berkala yang terbit 1 Minggu sekali berupa Majalah Banteng, Surat Kabar Pasifik, Bank Pusat Banteng, dan mendirikan koperasi baik di tingkat pusat ataupun daerah. Demikian pula dengan Barisan Hisbullah dan Sabilillah. Sumber dana barisan ini berasal dari donatur para Kiai dan Haji, sehingga dapat untuk membiayai setiap perjuangan. Pada tahun 1946 urusan persenjataan dan logistik pusat Hisbullah dan Sabilillah Surakarta diurus oleh Sayuto dan Abdul Jalil serta Ali Atmojo. Setiap 3 bulan sekali markas pusat bisa mengirim secara bergantian dengan membekali uang saku ke setiap medan. Namun karena banyaknya anggota nampaknya pengurus pusat juga merasa kewalahan.

Kebutuhan logistik dan senjata tidak hanya mengharapkan suplay dari pusat, sebab walaupun ada untuk mengirimkan ke front-pun mengalami kesulitan. Maka dengan inisiatif sendiri harus dapat mengatasi keadaan sebaik-baiknya. Maka atas bantuan rakyat yang dikoordinir oleh pamong desa dalam hal ini Camat dan Lurah, disetiap pos-pos penjagaan dapat disediakan nuk berupa nasi bungkus dengan lauk-pauk seadanya yang cukup untuk makan tiga kali sehari. Pengadaan makanan ini dikoordinir lewat dapur umum oleh wanita dan para pemudanya secara bergantian. Pembuatan makanan di dapur umum ini biasanya terletak agak jauh dari medan pertempuran, untuk daerah MMTg berada di desa Rowsari, setelah nuk itu jadi, pengiriman ke markas menggunakan kendaraan lori yang didorong oleh

manusia. (Wawancara Suhendro:1994). Setelah nasi sudah sampai ke markas, maka oleh pelayan diteruskan ke pos-pos di semua medan yang ada di wilayah MMTg. Walaupun bagaimana, bagi medan MMTg dan MMT mengenai logistik terutama menyangkut bahan makan yang dirasakan sangat kurang. Pada tahun 1946 dan 1947 perlengkapan tentara reguler terutama Angkatan Darat tidak mendapat perawatan yang cukup dari pusat, sehingga tergantung dari daerah gerilya masing-masing. Keadaan di medan MMT lebih menyedihkan lagi dikarenakan pengiriman logistik selalu terlambat, apalagi dimusim hujan, maka semangat pasukan menurun yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban. Ketika dilaporkan kepada Panglima Devisi V di Mlantingan dan Djatikusumo hanya memberikan tanggapan antara lain sebagai berikut : "... dalam perjuangan semacam ini, kita harus dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi, sebab tidak *angles sing so sweet* (Iskandar Jayusman: 1984, 19).

3. Struktur Masyarakat Mraggen dan Integrasi

Pada umumnya penduduk Mraggen hidup dari pertanian dan hanya sedikit yang berdagang. Dilihat dari profesinya ada kelompok pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal terdiri dari Bupati hingga Lurah. Aparat Kelurahan terdiri dari Lurah sebagai pimpinan yang dibantu oleh Sekretaris ditambah dengan perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan dan kepala dusun yang kesemuanya ini bergabung dengan para pejuang. Paling tidak mereka ini menggerakkan masyarakat untuk ikut berjuang dan menyediakan bahan makanan. Sedangkan pemimpin informal di Mraggen terdiri dari Kiai dan para guru agama lainnya. seperti diketahui bersama bahwa di daerah Mraggen ini banyak terdapat pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai yang dapat menjadi panutan dan tempat umat mengadukan persoalan yang dihadapinya. Apalagi disini ada pesantren yang beraliran Tariqat Naqsabandiyah, bagi pengikutnya, Kiai itu karena kepandaianya dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan memberikan kekebalan. Pada masa revolusi karena para Kiai tergabung dalam pasukan Hisbullah dan Sabilillah maka para santri dan umat sekitarnya akan ikut didalamnya. Tidak terkecuali para wanita ikut

aktif dalam menyediakan makanan dan mengurus dapur umum bagi para pejuang.

Secara dominan penduduk Mraggen hidup dari usaha pertanian yang dapat diklasifikasikan menjadi petani pemilik, orang numpang, petani nusup atau petani mondok dan buruh tani. Petani pemilik dapat pula dibagi menjadi tiga macam yaitu, petani kaya yang mempunyai tanah sampai lima hektar, pemilik menengah yang memiliki tanah di bawah satu hektar. Petani pemilik ini mempunyai tanah persawahan dan pekarangan. Biasanya mereka memperkerjakan buruh tani untuk menggarap tanahnya dengan cara bagi hasil, cara menyewa dan ada pula dengan cara upah. Sebutan wong numpang ditujukan kepada petani yang tidak memiliki tanah, tetapi memiliki rumah di atas tanah orang lain. Istilah wong nusup atau wong mondok adalah sebutan bagi petani yang tidak mempunyai tanah dan rumah. Mereka ikut pada orang lain seperti ikut pada petani kaya atau pada petani menengah (Sdujak: 1994). Selain itu ada lagi kelompok buruh tani dan buruh bangunan. Buruh tani bekerja menggarap tanah persawahan dan mereka tidak mempunyai ketrampilan lainnya. Lain halnya dengan buruh bangunan sebab di antara mereka ada yang mempunyai keahlian sebagai tukang, seperti membangun rumah dan membuat mebel dan sebagainya. Mereka ini hidup dari upah yang mereka terima. Walaupun demikian pada masa revolusi mereka ini juga ikut berjuang, paling tidak mereka dapat membantu sebagai kurir atau pelayan.

Pada masa revolusi struktur masyarakat Mraggen menjadi kacau dan heterogin karena banyaknya pengungsi dari Semarang yang karena ancaman Belanda. Badan-Badan Perjuangan datang ke Mraggen untuk bergabung dalam MMTg bersama pasukan lainnya dalam menghadapi Belanda. Sedang-kan yang datang dari luar kota Semarang adalah orang-orang nasionalisme yang ingin bergabung dalam badan-badan perjuangan, kelaskaran dan kesatuan TKR. Mereka datang dari Surakarta, Kartosuro, Klaten, Yogya, Boyolali, Magelang dan Salatiga. Pada waktu itu markas besar badan-badan perjuangan tersebut berada di Surakarta. Hendroprajoko, 1994. Letak Mraggen dengan Surakarta tidak terlalu jauh dan bisa dicapai dalam waktu satu hari pulang pergi dengan kereta api.

Situasi di kota Semarang menjadi semakin gawat sejak bulan Oktober 1945 karena pertempuran lima hari baru saja selesai kemudian di lanjutkan dengan pertempuran melawan Sekutu dan Belanda. Oleh karena itu birokrasi pemerintahan tidak berfungsi. Gubernur Mr. Wongsonegoro berada di Magelang sedangkan Wali Kota Mr. Ikhsan ditangkap oleh Belanda, maka pemerintahan Kodya Semarang pindah ke Kedungjati di Mraggen. Kekuasaan walikota diambil alih oleh Mayor Sukardi dari TKR yang ketika itu menjadi Komandan KMK Semarang (Soekirna, 1953:55). Dengan situasi yang demikian para pejuang yang berada dalam kota terpaksa menyingkir ke luar kota guna mempertahankan dukungan rakyat. Walaupun pada dasarnya mereka tidak setuju meninggalkan kota Semarang karena tindakan demikian berarti menyerahkan kota Semarang kepada Belanda. Pengungsian ini diikuti pula oleh penduduk. Mereka merasa terancam oleh tentara Belanda yang mencurigai setiap orang lewat sebagai atau membantu para pejuang RI. Pemeriksaan di jalan-jalan diperketat dan setiap orang ditanyai identitasnya. Bagi yang tidak jelas identitasnya mereka ditahan, karena itulah banyak penduduk yang mengungsi ke Gunungpati dan ke Mraggen. Pengungsian yang paling banyak adalah ke Mraggen karena mungkin mengingat letak Mraggen dekat dengan Surakarta, sehingga mereka mudah lari kearah selatan dan timur. Ada empat buah kampung di kota Semarang yang kosong karena penduduknya mengungsi, antara lain kampung Pendirikan, kampung Rejosari. Selain pengungsian mereka juga sebagai pasukan Hisbullah dan Sabilillah, AMRI BPRI, Barisan Banteng, Pesindo, dan TP serta Lasykar Rakyat, Lasykar Kere dan Lasywi. Selain datang dari berbagai nama kelasykaran dan badan perjuangan mereka juga berasal dari berbagai aliran. Ini dapat dapat disimak dengan jelas setelah tahun 1948 yaitu setelah pemerintah dengan sah mengakui partai-partai politik. Dengan munculnya Maklumat Dewan Pertahanan Negara tahun 1945 maka banyak parpol mempunyai badan perjuangan dan kelaskaran guna memperkuat pertahanan negara. (Hendroprajoko, 1994). Partai Mayumi yang sudah membentuk Hisbullah pada masa pendudukan Jepang berusaha memperbesar jumlah anggotanya, ditambah dengan membentuk Pasukan Sabilillah. Maklumat Dewan Pertahanan tadi memperbolehkan membentuk badan perjuangan dengan

anggota paling banyak satu resimen termasuk di Mraggen. Kalau Hisbullah adalah wadah para pemuda Islam, maka Sabilillah adalah wadah bagi orang tua-tua. Bersamaan dengan itu terbentuk pula barisan Kiai yang merupakan kekuatan moral bagi para pejuang. Barisan Kiai ini membacakan doa pada saat pasukan akan mengadakan penyerangan. Di MMTg pasukan Hisbullah dan Sabilillah paling banyak datang dari Surakarta, mereka datang silih berganti, setelah satu bulan bertugas maka diganti dengan yang secara bergantian. Kalau Badan perjuangan atau lasykar lainnya hanya ada satu markas, untuk Hisbullah ada tiga markas yaitu di sebelah Pasar Mraggen, di Kauman dan di Dusun Bugen. (Soepanto: tt, 106 dan M. Prayitno: 1994). AMRI sudah lama dibentuk sebelum MMTg, mereka tampak sekali peranannya pada waktu pertempuran lima hari, setiap pemuda yang datang ke Mraggen selalu bergabung dengan TKR untuk menghadapi tentara Belanda. Demikian pula halnya BPRI, mereka menanamkan organisasinya sebagai barisan pemberontak karena memberontak kepada Belanda yang akan kembali menjajah. Barisan Banteng pada umumnya terdiri dari orang-orang nasionalis dan menggunakan berseragam hitam dengan saputangan warna merah di lehernya. Mereka datang dari Surakarta, Klaten, Boyolali dan bergabung dengan TKR di MMTg. Tidak kecuali Pesindo yang markasnya terletak di Salatiga mempunyai cabangnya di Semarang dan Surakarta. Pesindo adalah dibentuk oleh Amir Syarifuddin yang beraliran sosialis-marxis. Mengenai Tentara pelajar mereka berasal dari semua aliran dan sekolah asalkan sudah duduk di Sekolah Menengah Atas. Peranan Lasykar Rakyat, Lasykar Kere dan Lasywi dapat dikatakan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai andil ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan RI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kemerdekaan itu karena jasa dari sekelompok saja. Sekarang permasalahannya dengan menyimak heterogennya badan-badan perjuangan dan kelasykar dalam arti asal dan alirannya, mengapa tidak terjadi pertentangan dan konflik? Bertolak dari permasalahan tersebut perlu dilihat revolusi sebagai proses politik yang cenderung ke arah akselerasi dan polarisasi (Sartono : 1981, 4). Dilihat secara global revolusi Indonesia adalah revolusi yang bersifat multi atau komplit. Satu pihak dengan diplomasi dan senjata menghadapi musuh dari luar untuk

mempertahankan kemerdekaan, dipihak lain melawan kelompok lain yang tidak seialiran dengannya, bahkan melawan dan menumbangkan birokrasi setempat. Jadi revolusi itu penuh oleh pertentangan, konfrontasi, pergolakan dan ledakan kekerasan untuk mempertaruhkan ideologi, aliran politik dan golongan. Tetapi semuanya itu terjadi pada level nasional dan tidak terjadi ditingkat desa.

Pada masa revolusi itu tentara yang profesional yang diakui oleh pemerintah adalah TKR yang pimpinan dan struktur organisasinya sudah jelas. MMereka umumnya bekas perwira Peta yang banyak jumlahnya dan kader pemimpin militer. Merekalah yang menjadi kekuatan utama dalam setiap pertempuran. Pengalaman yang mereka dapat dari Peta, terutama bagi komandan seksi dan komandan kompi adalah pengalaman mengenai kemahiran militer dalam perang gerilya dan pertahanan daerah (Ben Anderson, 1988: 268). Kepada para perwira inilah telah ditanam konsepsi negara secara berangsur-angsur. Di MMTg yang menjadi komandan di setiap sektor adalah berasal dari TKR. Mereka bertindak sebagai bapak dari anak buahnya karena mereka berpengalaman dalam pertempuran, sehingga semua pejuang dan lasykar harus patuh pada perintah komandan. Bilamana terdapat gejala ke arah konflik ataupun penghianatan dapat dipantau. Ada suatu keyakinan bagi para pejuang waktu itu, siapa tidak jujur akan hancur. Jadi disini penempatan badan perjuangan dan kelasykaran secara terpisah dengan TKR supaya terhindar dari konflik. Tidak akan ada perebutan daerah kekuasaan dan tidak akan terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan dan ideologi seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.

4. Simpulan

Setelah Semarang dikuasai Belanda, maka diperlukan markas medan untuk mengepung kota itu. Salah satu di antaranya MMTg. medan ini amat berat apabila dibandingkan dengan medan lain di seluruh Semarang, selain datar tidak ada tempat untuk berlindung serta persediaan logistikpun kurang memadai, sehingga menimbulkan banyak korban politik di tingkat pusat nempaknya makin menghangat. namun pada tahun 1946 dan awal 1947 belum terasa di tingkat daerah seperti dalam pertempuran di Mraggen.

Kegagalan pengepungan Belanda di Semarang, karena pemerintah menganut politik diplomasi, sehingga dilarang bertempur secara luas dan defensif. Sebaliknya Belanda bertempur secara ofensif dari sektor ke sektor lain, maka akan terhindar dari serangan umum secara serentak. Pasukan Belanda walaupun jumlahnya sangat kecil, tetapi lebih teratur, berkemampuan profesional dan bergerak sangat lincah dan cepat. Pasukan RI hanya bersifat statis di sektor yang luas, sehingga Belanda dengan mudah menghantam RI. Pimpinan tentara tidak membentuk Bataliyon-bataliyon yang riil, terlatih, bersenjata lengkap, berkemampuan ofensif yang terdiri dari tenaga-tenaga yang terlatih dan didukung dengan peralatan yang ada. Maka tentara kita yang jumlahnya sangat banyak itu hanyalah mempunyai kemampuan untuk bergerilya saja.

Daftar Pustaka

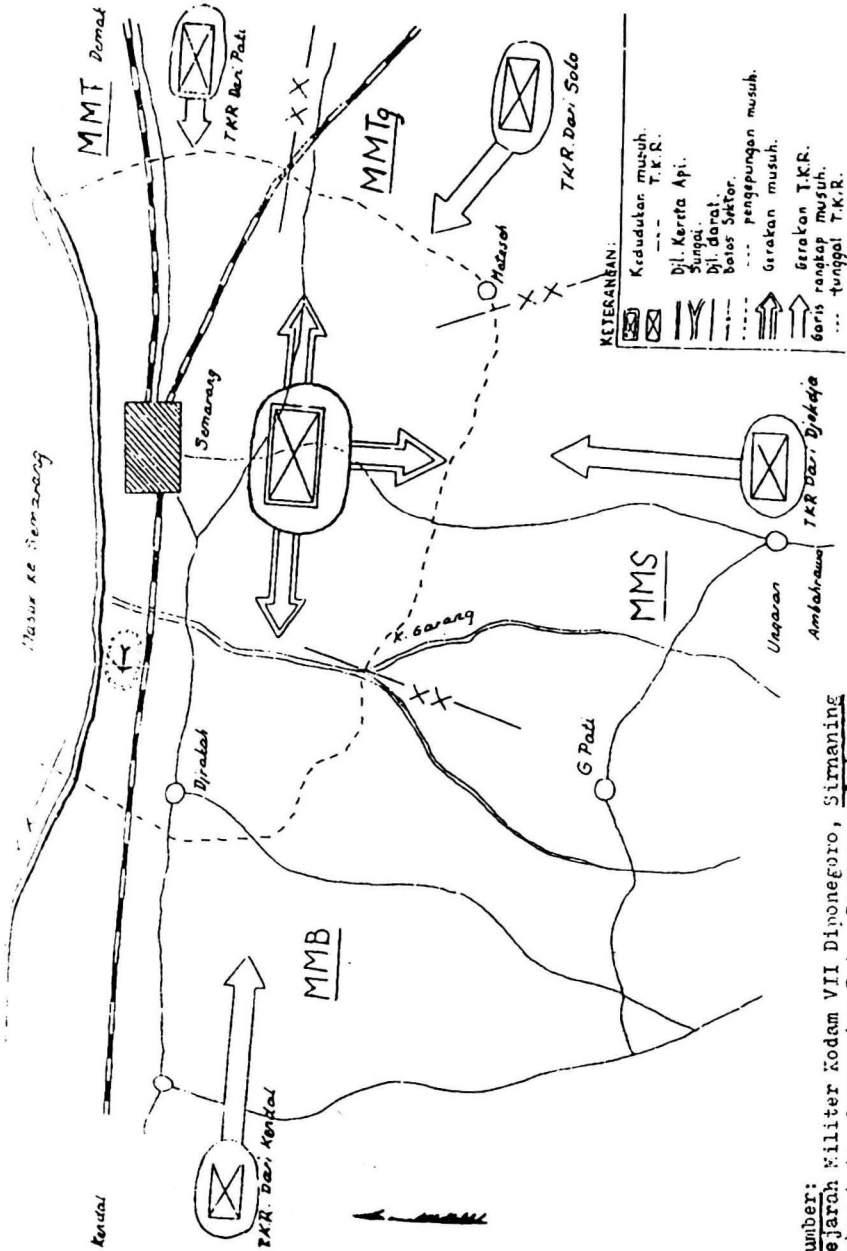
- Abdullah, Taufik. 1979. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- A.B Lopian (Penyunting), t.t. *Menelusuri Jalur Linggajati*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Ben Anderson, 1988. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka.
- Crouch, 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- C. Geertz, 1973. *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book In. Corporation.
- Disjarah Militer Kodam VII Diponegoro dan Pemda Tk II Semarang. 1979. *Palagan Ambarawa, Semarang*.
- _____, 1977. *Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*. Semarang : C.V Borobudur.
- Depdikbud, 1978. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Iskandar Jayusman BBA, *Catatan-Catatan Yang berserakan Tentang Peristiwa Dan Pertempuran Selama Perjoeangan Tahun 1945-1950*. Semarang: Aneka Ilmu.

- Yahya Muhaimin, 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1949*. Yogyakarta: GAdjah Mada University Press.
- Kedaulatan Rakjat, 11 Januari 1946.
- Kahin. Mct., 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornel University Press.
- Nasution, A.H., 1968. *Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*. Semarang: Jajasan Penerbit Diponegoro.
- _____. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2*. Bandung: Angkasa.
- Panitia Penyusun Sejarah, 1959. *Sejarah Perjuangan Barisan Pelopor Banteng*. Surakarta: Naskah.
- Prisma*. No. 8 1981.
- Reorganisasi 10 Divisi Menjadi 7 Divisi TRI, 5 Juni 1946 / 5 Juni 1947.
- Sartono Kartodirdjo, 1978. *Protest Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- _____. 1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1988. "Suasana Revolusi Salatiga Semasa Revolusi Dari Masa Bersiap Sampai Clash Pertama" Makalah Seminar Sejarah Revolusi Pada 1945-1949 (MSI) Cabang Yogyakarta & Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta 22-23 Agustus 1988.
- _____. Marwati Djoened Poespo Negoro, Nugroho Notosusanto, 1983. *Sejarah Nasional Jilid III*, Jakarta: Depdikbud.
- Soekirno dkk. 1956. *Semarang*. Djawatan Penerangan Kota Besar Semarang.
- Soepanto, 1992. *Hisbullah Surakarta 1945-1950*. Surakarta: t.p.
- Smit, C. 1986. *Dekolonisasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka: P.T. Surya Tensindo.
- Catata Pribadi :
- Soegito. Kenang-Kenangan Semasa Perjuangan Fisik Melawan Agrasi Belanda Pada Tahun 1945 s/d Akhir Tahun 1950.
- H. Soepanto. C. Situasi Sektor Medan Tenggara.

Daftar Informan

- Nama : Drs. H.M.A. Prayitno SH
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk 53. Semarang
 Umur : 69 tahun
 Pek. Sekarang : Dosen UNISSULA Semarang
 Waktu Revolusi : Komandan Batalyon Sunan Bonang
 Kesatuan : TKR
 Pensiun dari : Dinas Militer Tahun : 1979 (Nov) Dengan Pangkat Letnan Kolonel
- Nama : Hendro Prajoko
 Alamat : Jl. Indrapura 5 Candi Semarang
 Umur : 65 tahun
 Pek. Sekarang : Pensiunan ABRI
 Waktu Revolusi : Ikut Barisan Banteng
 Kesatuan : Sesudah Tahun 1947 melanjutkan karir Militer berpangkat Mayor
 Pensiun dari : Dinas Militer tahun 1972 dengan pangkat Kolonel
- Nama : Sumarno
 Alamat : Jl. Gemahsari RT. 07 RW.I Kel. Sendangguwo Semarang Timur
 Umur : 65 tahun
 Pek. Sekarang : Pensiunan ABRI
 Waktu Revolusi : Bergabung dengan BPRI, berperang di daerah Sendangguwo MMTg.
 Pensiun dari : Dinas Militer tahun 1970 dengan pangkat Pelda
- Nama : Sudjak
 Alamat : Candisari RT.01/III Mraggen Kota
 Umur : 70 tahun
 Pek. Sekarang : Petani
 Waktu Revolusi : Berperang dalam wilayah MMTg. Mraggen
 Kesatuan : Hisbullah
- Nama : Suhendro
 Alamat : Jl. Brigjen Katamso 16 Semarang

Umur	: 73 tahun
Pek. Sekarang	:
Waktu Revolusi	: Bergabung dalam Barisan TP
Kesatuan	:
Pensiun dari	: Dinas Militer
Nama	: Iman Hadrongi
Alamat	: Jl. Wonodri Kopen 10, Semarang
Umur	: 75 tahun
Pek. Sekarang	: Pensiun ABRI
Kesatuan	: TKR
Pensiun dari	: Dinas Militer
Nama	: Yacob Hidayat
Alamat	: Jl. Jangli No. 4 Semarang
Umur	: 70 tahun
Pek. Sekarang	: Pensiunan Depnaker
Waktu Revolusi	: Aktif di TP. / Anggota
Kesatuan	: TP
Pensiun dari	: Depnaker
Nama	: Ali Nur Cholib
Alamat	: Gondang, Sragen
Umur	: 72 tahun
Pek. Sekarang	: Tani
Waktu Revolusi	: Aktif berjuang di MMTg
Kesatuan	: TP
Pensiun dari	: -



umber:
 ejarah Militer Kodam VII Diponegoro, Sirmaning
 akso katon Capuraning Natu, Semarang: Jajasan
 enrit Diponegoro, 1968.

EKONOMI PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI ACEH (1945--1949)

Muhammad Gade Ismail

1. Pendahuluan

“Merdeka ! Pekik kebebasan itu bukanlah suatu yang baru bagi rakyat Aceh. Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gelora menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perang melawan kezaliman serta kebatilan, Aceh dikenal dengan semangat jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Perang mencapai puncak bangunan tertinggi budaya umat manusia yang dilandasi tauhid dan tamadun ke arah kebenaran hakiki.

Semangat menyuarakan dan memperjuangkan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, telah mendarah daging bagi putra-putri Serambi Mekah. Kenyataan itu telah teruji, tekristal dan terkuat dalam riwayat bangsa Indonesia etnis Aceh. Ratusan tahun lalu Aceh bergulat dalam kemelut perlawanan menentang penjajahan.

Ribuan syuhada telah syahid dalam pertempuran demi pertempuran. Daftar nama-nama pahlawan pria wanita cukup panjang menghiasi buku-buku sejarah perjuangan rakyat Aceh baik yang tertulis maupun yang tidak, yang sah atau pun yang belum diakui.

Sejak Keumalahayati, Iskandar Muda, Teuku Umar Johan Pahlawan, Teungku Chik Di Tiro, Cut Meutia, Cut Nyak Dhien, Teuku Fakinah, Pocut Meurah Intan, Pocut Baren, Teuku Ben Mahmud.

Teuku Raja Angkasah, Cut Ali, sampai pada pejuang kemerdekaan 1945, rasanya cukup fantastis. Semuanya merupakan untaian persembahan Tanah Rencong dalam mencapai Indonesia merdeka. Oleh karena itu, bagi rakyat Aceh, kemerdekaan ibu pertiwi dan proklamasi 17 Agustus 1945, dinilai sebagai rahmat dari Allah SWT yang dilimpahkan atas beban derita bangsa Indonesia. Di samping itu, tak pelak lagi, adalah hasil jerih payah dalam tempo yang sangat panjang disertai pengorbanan yang amat banyak. Keringat dan darah telah lama tumpah, membasahi tanah leluhur”.

Demikian tulisa Amran Zamzani dalam bukunya “Jihad Akbar di Medan Arca” (Zamzani, 1990: 27). Buku yang ditulis tersebut, setebal 509 halaman, menceritakan tentang peranan rakyat Aceh selama perang kemerdekaan 1945-1949. Buku ini amat menarik untuk dibaca agar menambah pengetahuan tentang hal yang dibicarakan. Apabila Amran Zamzani dalam menulis buku itu bertitik tolak dari pengalaman pribadinya, masih terdapat sejumlah buku lain yang membicarakan masa revolusi kemerdekaan di Aceh. Dua diantara buku tersebut yang membahas secara lebih komprehensif ditulis oleh Ibrahim Alfian dan Abdullah Ali (Alfian, 1982 dan Ali, 1985). Oleh karena itu, tulisan ini tidak perlu membahas tentang perjuangan rakyat Aceh secara fisik melawan Belanda dalam periode perang kemerdekaan. Apa yang ingin dibahas dalam tulisan ringkas ini adalah terbatas pada aspek ekonomi saja pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh.

Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan ekonomi. Faktor ekonomi disamping faktor-faktor lain, berperan amat penting bagi para pejuang untuk melawan penjajah Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Dapat dikatakan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi ekonomi, politik dan keamanan masih belum stabil, oleh karena itu pemerintah mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Kesulitan ini bertambah lagi akibat berbagai gangguan dan tekanan yang dilakukan oleh Sekutu dan Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia.

Setelah Agresi Militer pertama dan kedua Aceh adalah daerah yang masih terbebas dari pendudukan kembali Belanda, kecuali Sabang

(Morris: 151) dan karenanya menjadi tumpuan harapan untuk dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam melanjutkan dan meneruskan cita-cita revolusi. Keadaan itu karena Aceh memiliki potensi ekonomi dan militer yang dapat membantu negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Belanda yang memaksakan diri untuk menguasai lagi Indonesia.

Membahas tentang ekonomi pada masa revolusi di Aceh pembicaraan akan dipusatkan kepada sumbangan ekonomi masyarakat Aceh kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sumbangan itu baik dipergunakan di daerahh Aceh sendiri, Medan Area, maupun kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas terlebih dahulu ialah tentang keadaan ekonomi di Aceh sendiri yang memungkinkan adanya kontribusi tersebut.

2. Aktivitas Ekonomi pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh

Pada awal kemerdekaan ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan. Inflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru memproklamkan kemerdekaannya. Sumber inflasi itu selain akibat dari peperangan yang dikobarkan oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya, juga beredarnya mata uang rupiah Jepang yang sangat banyak dikalangan masyarakat yang diperkirakan mencapai 4 miliar. Jumlah ini bertambah besar lagi setelah Sekutu berhasil menduduki kota-kota besar di Indonesia dengan menguasai beberapa bank. Selain itu ditambah lagi dengan diedarkannya mata uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk tujuan operasi dalam usaha mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. (Notosusanto, 1993: 172).

Kesulitan di atas diakibatkan karena pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang pengganti sebagai alat pembeli yang sah. Kas pemerintah kosong, pajak dan biaya masuk lainnya sangat berkurang. Sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Oleh karena itu untuk sementara pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengeluarkan ketetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah Republik Indonesia. Ketiga macam mata uang itu adalah

mata uang De Javasche Bang, mata uang pemerintahan Hindia Belanda dan mata uang Jepang.

Kelompok yang paling menderita sebagai akibat inflasi adalah para petani. Petani pada masa pendudukan Jepang sangat banyak yang memiliki dan menyimpan mata uang Jepang. Pemerintah sangat sulit untuk mengendalikan keuangan karena blokade ekonomi yang dilakukan Belanda dalam berbagai sektor. Banyak barang-barang yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor ke luar negeri, demikian pula sebaliknya terhadap barang-barang impor dari luar negeri yang selalu di blokade oleh pihak Belanda.

Situasi ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pada umumnya pada awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan perkembangan ekonomi di Aceh.

Kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan dapat dilihat pada dua sektor ekonomi, sebagai lanjutan dari perkembangan ekonomi di masa akhir kekuasaan Hindia Belanda dan masa pendudukan Jepang. Dua sektor ekonomi yang dimaksud adalah sektor asing dan sektor setempat. Munculnya dua sektor ini, yang hidup secara berdampingan di Aceh telah di mulai sejak awal abad ke-20. Di samping ekonomi rakyat setempat yang bergerak dibidang pertanian, terdapat sejumlah perkebunan besar milik Swasta Barat yang bergerak dibidang perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi. (Ismail, 1994).

Pada sektor setempat yang berkenaan dengan perekonomian rakyat, kesulitan pada awal kemerdekaan adalah lanjutan dari kondisi masa pendudukan Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang rakyat Aceh tidak dapat secara leluasa untuk menikmati produksi pertanian mereka. Hal ini terjadi karena sebagian hasil tanaman rakyat diambil untuk pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan perang. Selain itu kesempatan memproduksi juga menjadi berkurang karena pengurusan tenaga rakyat untuk kepentingan perang.

Pemerasan tenaga petani membawa pengaruh terhadap kehidupan pertanian. Banyak sawah-sawah yang terbengkalai dan kurang teratur pengelola lainnya. Semua hasil panen rakyat terutama padi dikutip oleh Jepang untuk mensuplai keperluan militer. (Ibrahim Alfian, 1982: 18). Implikasinya adalah menurunnya etos kerja masyarakat

untuk meningkatkan produktivitas, karena semua hasil panen akan diambil oleh Jepang. Sebagai akibat dari nurunnya kegiatan bekerja masyarakat adalah merosotnya produksi yang pada gilirannya menimbulkan kelaparan.

Pada masa awal kemerdekaan kelesuan dibidang perekonomian rakyat masih cukup terasa sebagai pengaruh dari masa pendudukan Jepang. Banyak anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam usaha menghempang masuknya kembali Belanda, dengan berangkat ke Medan Area menyebabkan berkurangnya tenaga yang produktif di bidang pertanian.

Sama halnya dengan sektor setempat, sektor asing juga mengalami stagnasi pada awal kemerdekaan. Banyak perkebunan besar tidak berkembang sebagaimana mestinya pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu juga terjadi pengurangan areal perkebunan karena penduduk yang bekerja sebagai buruh-buruh perkebunan menanam bahan makanan pada perkebunan-perkebunan untuk kebutuhan sendiri (Waspada, 28 September 1947).

Pada awal kemerdekaan keadaan perkebunan-perkebunan itu belum sepenuhnya dapat dioperasikan secara maksimal. Oleh karena itu hasil yang diperolehpun menjadi tidak maksimal pula. Namun demikian, hasil dari perkebunan ini terutama karet menjadi sumber pemasukan utama guna membiayai perjuangan (Alfian, 1982: 136). Hasil sewa tanah perkebunan (*landbouwconcessie*) yang terletak di Aceh Timur saja pada tahun 1947 diperoleh pemasukan sebesar f. 19.800,- (RNAS. DEP. A. DOC. 1945-1949. No.12).

Menghadapi keadaan perekonomian rakyat yang kurang menguntungkan itu, Pemerintah Daerah di Aceh berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama dengan memperluas areal persawahan. Tanah-tanah yang kosong diusahakan kembali untuk dijadikan sawah dan ladang. Sehingga daerah Aceh pada masa itu dapat meningkatkan hasil pertanian. dan untuk menutupi kekurangan bahan pangan di daerah tersebut. (Muhammad Ibrahim, 1978: 192). Usaha-usaha lain yang ditempuh pemerintah di Aceh di bidang ekonomi yaitu misalnya dengan pengaturan pembawaan barang-barang perniagaan ke luar daerah Aceh. Pengaturan ini di atur dengan

Peraturan Daerah Aceh No. 1 N.K. tanggal 21 Januari 1946. Berdasarkan putusan tersebut bahan-bahan makanan seperti padi, beras dan kebutuhan pokok lainnya dilarang dibawa ke luar Aceh (ARNAS. DEP. A. DOK. 1945-1949. No. 7).

Pada bulan Oktober dalam tahun yang sama Residen Aceh. T.M. Daoed Syah juga mengeluarkan maklumat yang melarang pendudukan atau para pedagang di Aceh menumpuk barang-barang bahan makanan pokok di gudang-gudang. Barang-barang tersebut harus diperdagangkan secara terbuka. Maklumat ini dimaksudkan untuk menghindari para spekulasi mengambil keuntungan besar dalam masa yang sulit itu. (ARNAS. DEP. A. DOK. 1945-1949. No. 7).

Pengaturan mengenai pelarangan membawa barang-barang makanan yang ditetapkan pada tahun 1946 mengalami sedikit perubahan pada tahun 1947, yaitu dengan ketetapan tanggal 21 Juli 1947. Perubahan itu yakni mengenai diperbolehkannya ternak dari Aceh untuk dimasukkan ke Sumatera Timur (ARNAS. DEP. A. DOK. 1946-1949. No. 8).

Untuk memajukan perdagangan dengan luar negeri Pemerintah Daerah di Aceh mengeluarkan ketentuan tentang perdagangan dengan luar negeri yang memperhatikan keseimbangan ekonomi rakyat dan memberikan keuntungan kepada pemerintah (ARNAS. DEP. A. DOK. 1945-1949. No. 8).

Terhadap barang-barang impor pemerintah melarang pedagang memasukkan barang-barang produksi Negeri Belanda (ARNAS. DEP. A. DOK. 1945-1949. No. 9).

Di dalam bidang keuangan pemerintah menganjurkan agar rakyat menyimpan uang di bank-bank untuk menghindari terjadinya inflasi (ARNAS. DEP. A. DOK. 1945-1949. No. 9).

3. Perdagangan dengan Luar Negeri

Dalam bidang perdagangan untuk mengatasi barang-barang impor akibat blokade Belanda, telah diusahakan untuk melakukan perniagaan ke daerah Semenanjung Melayu dengan menembus blokade Belanda. Melalui perdagangan ini telah dilakukan pertukaran hasil-hasil perkebunan dan pertambangan yang ada di daerah Aceh dengan

Malaya dan Singapura. Para saudagar dan perahu motor menyeberangi ke Malaya dan Singapura untuk menjual hasil dagangan. (S.M. Amin, 1978: 103). Hasil yang diperoleh para pedagang Aceh sangat ditentukan oleh perjuangan yang cukup berat, karena bila dalam penyeberangan ini mereka berhadapan dengan Angkatan Laut Belanda, maka seluruh barang dagangan dan jiwanya akan menjadi taruhan. Para saudagar ini yang ikut dalam percaturan ekonomi nasional pada waktu itu antara lain adalah Muhammad Saman dari PT. PUSPA, Nyak Neh dari Lhok Nga Co, Muhammad Hasan dari PIM (Perdagangan Indonesia Muda) dan Abdul Gani Mutiara.

Disamping para pedagang ini, dua tokoh lain yang juga aktif dalam perdagangan dengan luar negeri, terutama dengan daerah-daerah di Semenanjung Melayu yaitu John Lie dan Usman Adami. Kedua mereka ini termasuk personil Angkatan Laut dan Darat Republik Indonesia. John Lie dengan perahu motornya yang diberi nama "The Out Law" bertugas menembus blokade laut Belanda (Lie, 1982). Usman Adami bertugas menyediakan barang-barang hasil perkebunan besar dan tanaman rakyat seperti karet, kopra, dan pinang untuk diangkut John Lie ke Semenanjung Melayu. Di sana barang-barang ini dijual dan selanjutnya dari penjualan tersebut dibelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk dan militer di Aceh. Barang-barang tersebut setibanya di Aceh diserahkan kepada Usman Adami, Kepala Jawatan Keuangan dan Perlengkapan Divisi Militer. Ke dalam barang-barang yang dimasukkan termasuk perlengkapan militer dan sebuah alat pemancar radio yang kemudian dikenal sebagai radio rimba raya (Adami, 1982).

Dari sejak awal kemerdekaan hingga dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, perdagangan antara Aceh dengan Pulau Penang, Port Swettenham dan Singapore dilakukan dengan cara ini.

Volume perdagangan antara Aceh dengan Semenanjung Melayu tidak dapat diketahui secara pasti. Hanya saja, berdasarkan catatan-catatan yang fragmentaris, perkiraan kasar dapat ditunjukkan di sini sebagai indikasi saja. Pada tabel 1 ialah mengenai ekspor karet Aceh ke Pulau Penang 1947-1950.

**Tabel 1 Ekspor Karet Aceh Ke Pulau Penang
1947—1950**

Tahun	Ekspor (ton)
1947	18.314
1948	19.028
1949	4.225
1950	32.530

Sumber : Economic offices, Penang, Report on the entrepot trade of Penang, April 1951.

Ekspor tahun 1949 menunjukkan penurunan yang drastis oleh karena ketatnya kontrol Belanda di daerah-daerah penghasil karet yang berdekatan dengan daerah yang telah berada di bawah kekuasaannya. Sementara itu pada tahun 1950 ketika kontrol itu tidak ada lagi dan juga karena harga karet meningkat naik, angka ekspor pada tahun itu menunjukkan peningkatan yang besar.

Sementara itu ekspor kopra Aceh ke Penang ditunjukkan dalam tabel 2.

**Tabel 2. Ekspor Kopra Aceh Ke Pulau Penang
1947—1950**

Tahun	Ekspor (ton)
1947	2.084
1948	10.230
1949	12.838
1950	14.259

Sumber : Memorandum submitted by the Penang Atjeh Traders Association to the Penang Working committee of custom duties, dated 5-7-1955.

Angka ekspor kopra yang cukup rendah pada tahun 1947 oleh karena komoditi ini berada dibawah pengawasan Internasional Emergency Food Control (I.E.F.C) Ferh: 1947: 3. Selama tiga tahun

berturut-turut dari 1948 kopra memiliki nilai yang cukup tinggi di pulau Penang. Akibatnya ekspor dari Aceh juga mengalami peningkatan.

Angka ekspor kopra dari Aceh ke Penang menunjukkan keadaan yang cukup stabil. Hal ini terjadi karena permintaan kilang minyak makan yang ada di Penang cukup konstan.

Disamping karet dan kopra, komoditi ekspor lainnya dari Aceh dalam jumlah besar ialah pinang. Dalam tabel 3 ditunjukkan besarnya ekspor komoditi itu selama tahun 1947-1950

**Tabel 3. Ekspor Pinang Aceh Ke Pulau Penang
1947—1950**

Tahun	Ekspor (ton)
1947	15.986
1948	14.202
1949	19.648
1950	16.650

Sumber : Economic offices, Penang, Report on the entrepot trade of Penang, April 1951.

Bagaimanapun volume ekspor barang-barang dari Aceh ke Pulau Pinang dipengaruhi oleh harga rata-rata yang berlaku di sana. Harga rata-rata masing-masing barang tersebut diberikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Harga Rata-rata Karet, Kopra dan Pinang Di Pulau Penang 1947—1950 Diukur Dalam Straits Dollar

Tahun	Karet Pond/Sen	Kopra/Pikul	Pinang/Pikul
1947	37.31	21.09	23.61
1948	42.15	33.55	21.61
1949	38.19	30.45	20.96
1950	108.18	37.74	23.73

Sumber : Monthly Statistical Bulletin, Federation of Malaya. 1948-1951. dan Penang Chamber of Commerce.

Mengenai barang impor Aceh dari Pulau Penang hanya tersedia sedikit informasi, yaitu impor tekstil pada tahun 1948 sebanyak 11.073.955 yard. Sementara pada tahun 1938 jumlah itu hanyalah 377.352 yard saja (Kee, 1956: 12).

Untuk kelancaran transaksi ekonomi dan untuk mengatasi kesulitan keuangan telah mendorong pemerintah untuk mencetak uang sebagai alat pembeli yang sah. Untuk daerah Sumatera mata uang yang berlaku adalah Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (ORIPS). Selain itu juga didirikan bank-bank untuk mengatur peredaran uang. Untuk daerah Aceh pada tanggal 11 Maret 1946 didirikan Bank Dagang Nasional Indonesia cabang Kutaraja. Perkembangan nilai dalam wilayah propinsi Sumatera masing-masing telah mencetak uang yang berlaku untuk daerahnya. Akibatnya nilainya semakin menurun, sedangkan barang-barang untuk keperluan sehari-hari sulit diperoleh di pasar. Oleh karena pemerintah daerah dalam wilayah Sumatera masing-masing telah mencetak uang, sehingga uang yang tersebar saat itu adalah: Oeang Republik Sumatera Timur (ORITS), Oeang Republik Tapanuli (ORILAP) dan Oeang Republik Bagian Aceh (ORIBA). Muhammad Ibrahim, 1978: 193; Natasuwarna, -:20).

Percetakan uang tersebut telah disetujui oleh Badan Pekerjaan Dewan Perwakilan Aceh dalam nilai Rp. 2,50,- Rp. 1 dan Rp. 0,50. Setiap bulan uang yang dicetak pada Percetakan Negara Banda Aceh itu diawasi sebuah badan yang terdiri dari M. Insja (Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh) sebagai ketua dan anggotanya terdiri dari Komandan Divisi Rencong Nyak Neh, Komandan Divisi Tengku Chik Di Tiro ialah Cek Mat Rahmany dan Direktur Bank Pesindo yaitu kedaulatan oleh Belanda, di daerah Aceh telah tersebar sejumlah mata uang yaitu Uang Jepang, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera dan Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (URIPSU), Uang Republik Indonesia Keresidenan Aceh (URIKA), dan Uang Republik Indonesia Baru (URIBA). Sedangkan uang dicetak pemerintah pusat tidak tersebar di daerah Aceh. (T.A. Talsya, 1990:171).

Situasi ekonomi dalam masa revolusi fisik mengalami berbagai kesukaran. Pemerintah pusat tidak dapat berbuat banyak akibat agresi

militer Belanda. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi tidak mengalami perubahan ke arah kebaikan yang berarti. Belanda semakin gigih usahanya untuk menguasai kembali Indonesia dengan memblokir pusat-pusat ekonomi bangsa Indonesia. Usaha ini menjadi kenyataan dengan dikuasainya hampir seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk ibu kota negara Yogyakarta. Dipenghujung masa revolusi fisik pemerintah pusat betul-betul mengalami kesulitan, sehingga Ibu Kota Negara Republik Indonesia terpaksa dipindahkan ke Bukit Tinggi (Sumatera Barat). Satu-satunya daerah yang belum dikuasai kembali oleh Belanda adalahh daerah Aceh. Oleh karena itu aktivitas ekonomi tetap berjalan dan tidak mengalami kemerosotan yang berarti. Kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih berjalan sebagaimana mestinya seperti kegiatan perdagangan, pertanian, pertambangan, pertukaran dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.

4. Dukungan Ekonomi untuk Kegiatan Revolusi Kemerdekaan

Beberapa sektor perekonomian seperti perdagangan, perkebunan dan pertambangan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang ikut menunjang kegiatan revolusi dan jalannya roda pemerintahan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya daerah Aceh masih memiliki sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang kuat untuk menunjang jalannya revolusi. Beberapa pedagang Aceh yang sangat berpengaruh dalam percaturan ekonomi nasional telah memainkan peranannya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan pusat. Mereka adalah Muhammad Saman, pengusaha dari PT. PUSPA, Nyak Neh dari pengusaha Lhok nga co, Muhammad Hasanda PIM (Perdagangan Indonesia Muda) dan Abdul Gani dari perusahaan Mutiara. Mereka telah memainkan peranannya dalam bidang perdagangan antara Aceh, Malaya (sekarang Malaysia), dan dengan Singapura. Dengan adanya perdagangan ini berbagai potensi alam dapat dimanfaatkan dan diekspor ke luar negeri. Selain itu juga tumbuhnya lembaga-lembaga perekonomian di Kutara yaitu dengan didirikannya Kantor Pusat Perkebunan Daerah Aceh dan Badan Kemakmuran pada tahun 1947. (Ibrahim Alfian, 1982: 137). Dengan beberapa usaha pembaharuan ekonomi oleh pemerintah dan swasta telah menunjang kelancaran pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

rakyat dan sekaligus telah ikut membantu kelancaran aktivitas para pejuang kita untuk memiliki atau pengadaan fasilitas perang.

a. Untuk Biaya Revolusi di Aceh

Selama revolusi kemerdekaan, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang masih dapat memberikan dukungan ekonomi untuk kelancaran revolusi. Aceh harus berusaha sendiri dalam segala aspek untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat belum sanggup menanggung anggaran belanja bagi daerah-daerah, terutama yang berada di luar pulau Jawa. (S.M. Amin, 1978: 102). Hal ini disebabkan karena Belanda secara terus menerus melakukan agresi dalam menguasai Indonesia. Laut dan darat masih dikuasai oleh Belanda dan masih tidak sanggup dilewati oleh angkatan perang kita akibat terbatasnya sarana perang. Oleh karena itu Aceh terpaksa berdiri sendiri dalam hal keuangan negara, apa lagi untuk membiayai perang yang sedang berkecamuk di daerah ini dengan Belanda.

Berbagai usaha dalam rangka mengintensifkan perjuangan terus menerus dilakukan. Untuk mendukung jalannya revolusi dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan senjata, telah dibuka lima tempat prioritas pembangunan kilang-kilang senjata di daerah Aceh yaitu: pabrik senjata Lhok Nga Aceh Besar, pabrik senjata Rantau Kuala Simpang Aceh Timur, pabrik senjata Kota Bakti Pidie, pabrik senjata di Redelong Aceh Tengah dan pabrik senjata di Macan Kumbang Kutacane Aceh Tenggara. (A.K. Jakobi, 1992: 244).

Pengadaan dan penyaluran logistik merupakan masalah yang rawan. Oleh sebab itu apa yang dapat dipakai dan tersedia di dalam negeri lebih diutamakan. Alat-alat senjata dan barang kebutuhan lainnya terpaksa harus diselundupkan melalui perairan Aceh-Malaya yang penuh dengan resiko berhadapan dengan Angkatan Laut Belanda. Walaupun penuh dengan resiko, namun para pedagang Aceh-Malaya juga sangat menarik minat dalam bidang ini, dan ternyata tidak sedikit keuntungan yang diperoleh oleh pedagang kita.

Usaha perniagaan hasil tanaman rakyat dan perkebunan di Aceh, ditambah lagi dengan anjuran ulama untuk membiayai perang kemerdekaan yang dianggap sebagai perang

fisabilillah, menyebabkan kebutuhan bahan makanan didaerah ini cukup terpenuhi disertai dengan perlengkapan senjata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama revolusi Aceh merupakan daerah yang sangat mandiri dalam bidang ekonomi pangan, senjata dan berbagai kebutuhan lainnya.

b. Untuk Bantuan Perang Medan Area

Blokade Belanda yang ketat harus diakui telah menyulitkan berkembangnya perekonomian bangsa kita. Sumatera Timur pada tanggal 15 November 1946 telah terjadi pengalihan kekuasaan dari Jepang ke Sekutu. (A.K. Jakobi, 1992: 116). Sehingga para pejuang di daerah itu mengalami kesulitan ekonomi dan kekuatan persenjataan. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1946, Aceh telah mengirimkan bantuan senjata berat berupa meriam dan sejumlah para pejuang untuk terjun membantu saudaranya di front Medan Area. Pengiriman bantuan senjata ini dimungkinkan karena Aceh pada saat itu telah memiliki bengkel senjata yang berpusat di lima daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada akhir tahun 1946, para pejuang Aceh mulai membanjiri Medan Area. Untuk maksud tersebut perlu ditunjang oleh penyediaan bahan makanan dan persenjataan yang cukup. Ini semua dimaksudkan untuk kelancaran perjuangan. (Amran zamzani, 1990: 129). Pengadaan dan penyaluran bahan malam hari agar terhindar dari serangan tentara Belanda. Berkat jasa John Lie dan pedagang-pedagang lain mengakibatkan dapat dipenuhinya kebutuhan logistik bagi daerah Aceh dan Sumatera Timur sebagai persediaan untuk menghadapi perang di front Medan Area. (A.K. Jakobi, 1992: 244).

Upaya lain yang dilakukan dalam usaha membantu perang Medan Area adalah keikhlasan hati para prajurit dan pejuang Aceh membawa perbekalan yang terjun ke Medan Area. Mereka membawa uang, bahan makanan, perlengkapan senjata dan berbagai bahan logistik lainnya. Bahkan ada diantara mereka yang secara sengaja menjadi pemasuk barang-barang tersebut yang diambil dari daerah Aceh sambil berjuang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan bahan pangan dan ekonomi demi tercapainya cita-cita perjuangan.

c. Untuk Bantuan Pembiayaan Pemerintah Pusat

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka, khususnya dalam masa revolusi fisik pemerintah pusat mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perang dan perlindungan yang berlarut-larut, sehingga kemerosotan ekonomi mencapai puncak yang sangat memprihatinkan.

Agresi yang dilancarkan Belanda telah memporak-porandakan seluruh wilayah Indonesia. Semua daerah telah dikuasai kembali, kecuali daerah Aceh yang dengan gigih dipertahankannya. Oleh karena itu pemerintah pusat tidak sanggup untuk mengurus daerah-daerah dalam hal keuangan. Pemerintah daerah terpaksa harus mengurus daerahnya masing-masing, termasuk Aceh harus mengusahakan sendiri keuangan dan berbagai keperluan lainnya.

Kenyataan ini memang benar seperti yang diungkapkan oleh S.M. Amin, yang menyatakan bahwa sungguh benar daerah Aceh adalah satu-satunya daerah yang dalam masa perjuangan kemerdekaan tidak pernah dikuasai musuh dan tidak memperoleh pembelanjaan dari pusat. Namun pada saat-saat genting. Semua daerah telah diduduki dan dikuasai kembali lagi musuh, sebaliknya daerah Aceh pernah membelanjai pemerintah pusat di Yogyakarta. (S.M. Amin, 1978:102).

Dalam usaha untuk memenuhi kepentingan revolusi Republik Indonesia, rakyat Aceh telah banyak menyumbang untuk kebutuhan pemerintah pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949, pemerintah daerah Aceh mengeluarkan biaya kepada pemerintah pusat Yogyakarta sebesar S\$. 500.000 (Lima Ratus Ribu Straits Dollar) dengan perincian, untuk membiayai perwakilan di luar negeri (Mr. Maramis) S\$. 100.000 untuk Indonesia Office Singapura S\$ 50.000 untuk angkatan perang S\$. 250.000 dan untuk pengembalian pemerintah ke Yogyakarta sebesar S\$. 100.000 (Ibrahim Alfian, 1982:102).

Untuk mengatasi kesulitan komunikasi antar pulau di Indonesia dan dalam usaha mengadakan hubungan dengan luar negeri serta peningkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemerintah pusat telah mengintruksikan kepada seluruh residen dalam wilayah Republik Indonesia supaya membentuk panitia "Dakota Fonds" dalam rangka mengumpulkan biaya untuk membeli pesawat udara Dakota.

Untuk daerah Aceh pada bulan Juni 1948 presiden Sukarno mengundang tokoh-tokoh pejuang, masyarakat pengusaha dan sejumlah pemuda untuk bertatap muka di Hotel Aceh. Dalam pertemuan itu Sukarno menantang jiwa patriotik rakyat untuk meneruskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Sukarno meminta kepada masyarakat Aceh untuk menyumbangkan dua buah pesawat yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran perjuangan. Menanggapi himbauan presiden itu secara spontan terbentuk panitia Dana Dakota di Aceh.

Dalam tempo dua hari, panitia telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 130.000 Dollar Malaysia dan 20 Kg emas untuk pembelian pesawat dimaksud. Proses pembelian itu memakan waktu selama tiga bulan dan berhasil dibawa ketanah air pada akhir bulan Oktober 1948 dengan nomor register RI-001. Pesawat itu kemudian oleh Sukarno diberi nama "Seulawah RI-001". Sebagai penghargaan terhadap rakyat Aceh, pemerintah pusat menganugerahkan predikat daerah Aceh sebagai "Daerah Modal". (T. Zainal Abidin, 1990: 161).

Pesawat itu sangat membantu pemerintah pusat dalam menembus blokade Belanda dan mengatasi kesulitan ekonomi. Pada mulanya pesawat RI-001 Seulawah mengambil jalur penerbangan Jawa dan Sumatera, mengangkut pemimpin Republik dan berbagai keperluan lain yang berkaitan dengan perjuangan. Setelah itu diambil jalur ke Calcutta, India. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia memutuskan agar pesawat itu dioperasikan di Rangoon Birma. Pengoperasian pesawat komersial itu dimulai pada tanggal 26 Januari 1949 dan sejak tanggal itu RI-001 Seulawah terdaftar sebagai "Indonesia Airways". (Amran Zamzani, 1990: 333).

Dengan bantuan yang diberikan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia itu menunjukkan bahwa rakyat Aceh mampu menjadi pendukung Republik Indonesia sejak awal lahirnya karena potensi ekonomi yang dimilikinya. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah semangat kesatuan dalam memperjuangkan keutuhan Republik Indonesia.

5. Simpulan

Sejak Proklamasi dan Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, rakyat Aceh telah menunjukkan kesetiiaannya yang amat mendalam terhadap keutuhan Republik Indonesia. Selama Perang Kemerdekaan itu, rakyat Aceh mengambil bagian yang aktif dalam usaha mempertahankan kemerdekaan di Daerah Aceh, menghempang pasukan Belanda di Medan Area.

Keikut sertaan perjuangan yang bersifat fisik itu juga dibarengi oleh perjuangan dalam arti ekonomi dan keuangan. Perjuangan fisik mendapatkan sokongan ekonomi yang cukup berarti pula. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Pusat belum dapat membiayai pemerintah di daerah-daerah, Aceh telah berusaha dan berhasil membiayai sendiri pemerintahan di daerah. Terlebih lagi dalam suasana yang sulit itu rakyat Aceh dapat membantu Pemerintah Pusat.

Keberhasilan rakyat Aceh membantu Pemerintah Pusat, dan juga untuk pembiayaan pemerintahan dan membiayai perjuangan menghadapi Belanda baik di Aceh sendiri maupun di Front Medan Area, sekurang-kurangnya disebabkan dua faktor. Pertama adalah kondisi ekonomi daerah Aceh yang memungkinkan untuk pembiayaan tersebut. Ke dalam faktor ini termasuk upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki keadaan ekonomi rakyat yang mengalami kehancuran selama pendudukan Jepang. Faktor kedua adalah sikap rakyat yang karena anjuran ulama-ulama pada awal Perang Kemerdekaan yang memfatwakan perang itu sebagai perang Jihat, menyebabkan rakyat secara ikhlas membantu perjuangan tersebut, tidak saja secara fisik tetapi juga dengan harta benda yang mereka miliki. Akumulasi dari faktor-faktor inilah yang menyebabkan pembiayaan revolusi di Aceh menjadi lebih mudah untuk dikumpulkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal T., (1991), *Kisah Perjuangan Memperjuangkan Daerah Modal*, Beuna, Jakarta.
- Alfian, Teuku Ibrahim, (1982). *Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945-1949)*. Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh.
- _____, (1990). *Peranan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949)*. Beuna, Jakarta.

- Ali, Abdullah, (1985). *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949)*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amin, S.M., (1978). *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arsip Nasional RI. Depot Banda Aceh: Dokumentasi Residen Atjeh Tahun 1945-1949.
- Economic Offices Penang, Report on the Entrport trade of Penang, 1951.
- Ibrahim, Muhammad, (1978). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Depdikbud, Banda Aceh.
- Jakobi, A.K., (1992). *Aceh Daerah Modal*, Yayasan Seulawah RI-001, Jakarta.
- Kee, Ong Poh, (1955). *Trade of Penang with Atjeh Graduation Exercises Economic (honours) 1955-1956*. University of Malaya, Singapore.
- Lie, John., *Kenag-kenangan (Sweet Memory) Singapore, Labuhan Bilik, Port Swettenham*, memori pribadi John Lie, 1982, tidak diterbitkan.
- Monthly Statistical Bulletin, Federation of Malaya 1948-1951.
- Morris, Eric Eugene, (1983). *Islam and Politics in Aceh: A study of Center-periphery Relation in Indonesia*. Ann Arbor. University Microfilms International.
- Natasuwarna, H., *The Indonesian Revolution and the Paper Money Issued during that Period (1945-1950)*. Tanpa penerbitan dan angka tahun penerbitan dan angka tahun penerbitan (KITLV: i-1086-N+1).
- Notosusanto, Nugroho, (1993). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Balai Pustaka, Jakarta.
- Talsya, T.A., (1990). *Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh)*, Lembaga Sejarah Aceh, Banda Aceh.
- Zamzani, Amran, (1990). *Jihhad Akbar di Medan Area*. Bulan Bintang, Jakarta.

EKONOMI INDONESIA ZAMAN REVOLUSI : Kasus Palembang, 1945--1950

Mestika Zed

1. Pendahuluan

Dalam suatu analisis sejarah ekonomi (di) Jambi, seorang penulis secara jenaka melukiskan hubungan antara ekonomi dan politik bagaikan duduk di kepala dinosaurus.¹⁾ Sekali sentakan bergeser kekanan, manajer lalu memerintahkan agar `semua bergerak ke kiri, maka `semua harus bergerak ke kiri`. Inilah setidaknya cerita pengalaman seorang menejer Perusahaan Shell yang beredar di lingkungan pengusaha Belanda sejak tahun 1920-an.

Ilustrasi di atas, apakah benar-benar terjadi atau sekedar anekdote, telah dipergunakannya untuk menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial mencoba menunggang dinosaurus, suatu kekuatan ekonomi Hindia-Belanda yang penuh intrik dan tarik menarik antara kekuatan politik dan ekonomi. Ilustrasi itu juga mencerminkan paradoks sebuah kekuasaan dan lemahnya kekuasaan di puncak (pusat), dalam mengendalikan sumber daya (dalam arti modal, keahlian dan organisasi) sehingga memaksanya untuk bekerja sama dengan pihak pengusaha swasta. Ini khususnya berlaku untuk kasus ekspansi ekonomi kolonial ke luar Jawa, hingga berhasil menjadikannya sebagai "wingewesten" terpenting bagi pemasukan negara.²⁾

Mirip dengan pengalaman kolonial sebelumnya, usaha pemerintah Republik Indonesia dalam mengendalikan ekonomi pada masa revolusi tampaknya juga bagaikan menunggang dinosaurus. Perbedaan yang utama agaknya ialah, bahwa kekuasaan negara kolonial sudah cukup kuat, setidaknya selama beberapa dasawarsa terakhir sebelum kejatuhannya, sehingga relatif mampu menjinakkan dinosaurus, yang semakin tergopoh-gopoh selama masa-masa Perang Dunia II. Ketika Indonesia memasuki era revolusi, pemerintah dan negara-bangsa yang baru memerdekakan dirinya sejak 17 Agustus 1945 itu harus menunggang dinosaurus yang semakin tampak liar. Suasana revolusi telah menciptakan negeri bekas jajahan Belanda itu dalam keadaan terbakar. Setidaknya pada tahun pertama revolusi, pemerintah nyaris tak mampu duduk di atas kepala dinosaurus, sehingga dalam perang kemerdekaan yang berlangsung ketika itu.

Revolusi Indonesia pada gilirannya adalah urusan yang memerlukan biaya ekonomi, di samping biaya sosial yang tak terelakkan. Bukan saja untuk keperluan perjuangan fisik dan diplomasi, tuntutan biaya untuk kebutuhan hidup dan perputaran roda pemerintahan juga harus dicarikan sumber dananya. Masalahnya lebih ruet lagi karena semua sumber ekonomi terpenting di Indonesia telah dibinasakan Belanda sebelum pendudukan Jepang. Pada masa awal proklamasi restorasi ekonomi Jepang masih belum dapat dikuasai oleh Republik yang baru itu. Dalam keadaan seperti itu, kekuasaan untuk mencari dan memenuhi kebutuhan dana perjuangan revolusioner cenderung bersifat otonom daerah, atau individu-individu dalam kelompok tertentu melalui apa yang mungkin dapat disebut dengan manajemen gaya "kepiangan".³⁾

Di dalam makalah ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana Palembang menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dan pengintegrasian ekonomi lokal dan nasional sekaligus merupakan kekuatan yang bertumpang-tindih dengan kepentingan politik perjuangan, dan yang lebih penting lagi implikasi jangka panjang terhadap perkembangan di Palembang khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

2. Palembang's Connection

Diuntungkan oleh keadaan letak geografisnya yang strategis menghubungkan dua pusat niaga di Batavia dan Singapura sejak awal abad ini, dan sumber alamnya yang kaya hingga dikenal sebagai salah satu "wingewesten" terpenting di Sumatera (yang satu lagi ialah Sumatera Timur), serta keberagaman etniknya yang khusus, hubungan-hubungan politik dan ekonomi di Palembang kelihatan amat menonjol. Karena itu, daerah itu sejak awal revolusi bukan saja merupakan satu-satunya daerah di Sumatera di mana para pemimpinnya relatif siap menjalankan peranannya sebagai poros kekuatan politik, ekonomi dan militer, melainkan juga keterlibatannya yang intens dalam menjembatani antara kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi antara Jawa dan Sumatera.

Kecenderungan ini, khususnya peranan regional yang dimainkannya ditentukan oleh gabungan pelbagai faktor seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi adalah penting untuk memberikan perhatian kepada kepemimpinan A.K. Gani sebagai tokoh "protagonist" yang membawa Palembang ke dalam percaturan politik dan ekonomi yang lebih luas melampaui batas-batas lokal. Sebagai Residen Palembang I, yang di angkat sejak akhir Agustus 1945, Gani telah menggunakan segenap kemampuan dan pengalamannya sebagai bekas aktifis Gerindo terkemuka di Batavia untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh yang bermutu di Sumatera dan dengan demikian juga untuk menyaingi lawan-lawan politiknya, baik di daerah Palembang dan Sumatera bagian selatan khususnya, dan Sumatera umumnya.⁴¹

Tiga pranata resmi Republik yang paling utama di daerah ini (seperti juga terdapat di daerah lain di Sumatera dan Jawa umumnya) yaitu organisasi pemuda BPRI (Barisan Pemuda Pelopor Republik Indonesia), kelompok para pemimpin senior dalam KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) dan kelompok pemuda yang umumnya pernah memperoleh pendidikan militer Jepang, Giguyun, yaitu BKR (Badan Keamanan Rakyat), yang nantinya menjadi cikal bakal TRI, kemudian TNI sedikit banyak mencerminkan pengaruh Gani di dalamnya.

Di dalam lingkaran BPRI misalnya, Gani memiliki hubungan dekat dengan ketuanya Husin Ahmad. Tokoh ini adalah bekas aktifis Gerindo sebelum perang, yaitu partai Gani. Sebagai bekas anak asuhannya, Gani telah menarik Husin Ahhmad ke dalam organisasi "Tokkokan", suatu organisasi mata-mata buatan Jepang untuk membantu Kempeitai. Sedangkan Ketua KNI adalah Dr. M. Isa, teman seprofesi dengan Gani, tetapi lebih penting lagi tokoh ini sama-sama berasal dari Minang, sehingga hubungan keduanya tidak hanya terbatas kepada hubungan formal dalam pergerakan sejak sebelum perang, melainkan juga kekeluargaan "sedaerah" di rantau.⁵⁾ Tidak kurang pentingnya ialah kelompok pemuda BKR. Pada masa Jepang, para pemuda didikan Giguyun umumnya telah tercerahkan ke dalam politik pergerakan dan Gani umumnya sangat dekat dengan mereka, terutama dalam menggerakkan organisasi "bawah tanah" bernama angker "Burtung Hantu", di samping lewat "Tokkokan".

Hubungan Gani dengan kelompok pemuda "militer" dalam BKR dipermantap oleh perkembangan-perkembangan situasi politik dan militer nasional yang kurang menguntungkan. Ketidak-mampuan pemerintah pusat dalam mengendalikan kekuatan pemuda yang bergabung dalam pelbagai organisasi lasykar dan ketidak-tegasannya dalam pembentukan sebuah tentara nasional ternyata telah menimbulkan persoalan serius yang berlarut-larut. Di mana-mana di Indonesia pada masa ini, hak untuk menentukan pangkat, pengangkatan perwira-perwira dan organisasi struktural golongan militer telah menyebabkan pemerintah sipil pimpinan Perdana Menteri Syahrir kehilangan peluang untuk membentuk sebuah tentara nasional yang terikat kepada kesetiaan nasional ketimbang kesetiaan primodal. Para perwira bahkan telah mendapat cap yang kurang menyenangkan dari pemerintah ketika Syahrir memperingatkan mereka akan aba-aba "anti-fasis" akibat radikalisme kelompok militer terhadap prakarsa perundingan dengan Belanda.⁶⁾ Dalam keadaan yang nyaris tak terkendalikan itu, Gani di Palembang terus menerus mencampuri urusan militer di Sumatera. Masih satu bulan sejak proklamasi, Gani mengirim sepucuk telegram dan mengurus seorang ajudannya ke Jakarta untuk meminta kepada Presiden Sukarno, bekas teman dekatnya sewaktu kuliah dan aktifis pergerakan dalam PNI di Batavia,

agar dibentuk suatu Komando militer di Sumatera guna menyatukan kekuatan militer yang masih belum terkordinir baik.⁷⁾ Hasilnya ialah sebuah formasi baru bernama "Koordinator dan Organisator TKR Sumatera" telah dibentuk atas persetujuan pusat dan sesuai dengan keinginan Gani, komando militer itu berada di tangannya, dengan memperoleh pangkat "Jenderal Mayor". Posisinya yang baru itu telah memungkinkannya bukan saja untuk menyusun staf komando divisi-divisi militer di Sumatera dan resimen-resimen yang berada di bawahnya, melainkan juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perwira TKR Sumatera.⁹⁾

Dengan begitu posisi Gani semakin kuat. Di samping tetap mempertahankan jabatannya sebagai Residen Palembang, Gani kini juga memiliki pengaruh yang besar di lingkaran militer Sumatera. Posisi ini selanjutnya membawanya kepada apa yang disebutnya dengan "olie-diplomatie", suatu siasat untuk menguasai sumber-sumber ekonomi Palembang, yang tidak hanya terbatas kepada sumber minyak, melainkan juga kegiatan perdagangan dengan Singapore.

3. Penguasaan Sumber Ekonomi di Palembang (1945--1946)

Kebijakan "diplomasi minyak" yang diambil Gani bertolak dari gagasan yang menggabungkan kebijakan pemerintah sipil yang mengambil garis perundingan, sambil terus menerus membangun kekuatan lasykar dan militer yang diperlukannya bukan saja untuk merebut sumber-sumber ekonomi Palembang, tetapi juga untuk menysisihkan lawan-lawan politiknya, baik didaerah Palembang khususnya maupun di Sumatera umumnya. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Gani dan orang-orangnya menyasiasi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang potensial.

a. Minyak

Sumber minyak menjadi kunci dan sekaligus komoditi terpenting bagi Palembang pada periode awal revolusi. Secara kebetulan tambang minyak Palembang merupakan satu-satunya industri minyak warisan kolonial Belanda yang selamat dari politik bumi-hangus Belanda menjelang kedatangan Jepang di Indonesia. Pejabat Belanda di Palembang mengira bahwa serbuan Jepang ke Palembang akan terjadi

setelah Jepang menduduki Singapore. Tetapi Jepang ternyata melakukan serbuan serentak terhadap kedua tempat yang strategis itu, sehingga ketika Jepang sampai di Palembang, Belanda tidak lagi sempat membumi hanguskan industri minyak di kota itu.

Minyak Palembang telah menjadi andalan utama ekonomi perang Jepang di Indonesia, lebih-lebih lagi mengingat industri minyak di lain tempat dalam keadaan rusak binasa dan perlu waktu yang cukup lama sebelum bisa dioperasikan kembali. Pada bulan-bulan pertama sejak proklamasi, tambang minyak Palembang masih berada di tangan Jepang. Akses Republik ke sumber minyak ini, tentu saja, sudah disiapkan sedemikian rupa lewat formula "diplomasi minyak" Gani. Mula-mula Jepang mengobrol barang-barang simpanannya seperti obat-obatan, ban mobil, pakaian dan bahan pecah belah dan lain-lain. Gani telah melarang penduduk berhubungan secara bebas dengan Jepang, kecuali melalui badan-badan tertentu. Tempat konsentrasi Jepang di daerah tambang seperti di Sungai Gerong, Prabumulih dan Pendopo, Muara Enim, diblokir dan dalam keadaan terisolasi semacam itu, Jepang mulai kesulitan bahan makanan. Tukar menukar bahan makan dengan bahan minyak mulai terjadi, tetapi berada di bawah pengawasan Lasykar-Minyak.¹⁰⁾

Menjelang kedatangan Sekutu ke Palembang, pendekatan-pendekatan Gani dengan penguasa Jepang pada akhirnya menyebabkan semua daerah industri minyak berada di bawah pengawasan Republik, dengan imbalan, bahwa Republik memberikan jaminan keamanan dan bahan makanan bagi Jepang. Sejak akhir September 1945, Palembang telah bertindak sebagai pensuplai minyak untuk hampir semua daerah di Sumatera. Minyak Palembang bahkan juga dikapalkan ke Jawa.¹¹⁾

Meskipun data yang akurat tentang produksi minyak pada masa ini tidak tersedia, sumber Sekutu kemudian menyebutkan, bahwa Palembang telah menikmati keuntungan dari industri minyaknya yang berlimpah ruah.¹²⁾ Sebagian besar keuntungan dari minyak digunakan untuk membiayai keperluan militer (pakaian dan amunisi), di samping untuk keperluan administratif. Tidak kurang pentingnya ialah, bahwa, Gani juga menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam mengurus komoditi diangkatnya menjadi Kepala Urusan Minyak dan

Pertambangan.¹³⁾ Selain itu Gani juga memberikan lisensi perdagangan minyak kepada sejumlah lasykar pengikutnya.¹⁴⁾

b. Tambang Batu-bara Bukit Asam

Sumber ekonomi dari batu bara, meskipun tidak sebesar perolehan dari sumber minyak, juga mendatangkan keuntungan. Mirip dengan cara pendekatan terhadap industri minyak, tambang batu bara juga jatuh ke bawah penguasaan Republik di Palembang. Pada masa Jepang batu bara sanggup menghasilkan sekitar 100.000 ton perbulan. tetapi pada awal revolusi, produksi tambang ini diperkirakan menurun. terutama disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja. Namun demikian, sejak bulan Februari 1946, sebagian besar hasil penjualan tambang batu bara yang dipesan Sekutu di daerah ini, membantu menutup kekurangan beras untuk pegawai.¹⁵ Lebih penting lagi di sini ialah, bahwa Sarikat Buruh Tambang Batu Bara (TABA) merupakan penggerak utama dalam penyatuan bermacam sarikat buruh di daerah ini dan memiliki hubungan dengan Sarikat Buruh di Jawa.

c. Buruh

Sebelum organisasi buruh Indonesia, SOBSI (Sentral Irganisasi Buruh Seluruh Indonesia) dibentuk di Yogyakarta pada bulan November 1946, sebuah organisasi buruh Palembang yang bernaung di bawah BBI (Barisan Buruh Indonesia) telah dibentuk sejak bulan Maret 1946. Setidaknya telah terdaftar.¹⁶⁾ sekitar 15 buah organisasi Sarikat Sekerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. S.S. TABA (Tambang Batu Bara)
2. S.S. Persatuan Pejabatan Umum (Bow lama)
3. Persatuan Guru Keresidenan Palembang
4. Persatuan Pegawai Kereta Api RI
5. S.S Buruh Pelabuhan dan Pelayaran Plb
6. S.S. Rukun Buruh Pertjetakan
7. S.S. Alat Kendaraan Palembang
8. S.S. Pengangkutan dan Pengiriman Barang
9. Gabungan Sarikat Buruh Tani
10. S.S. Persatuan Pegawai Minyak
11. Persatuan Pegadaian Pelembang
12. S.S. Bangun-Bangunan

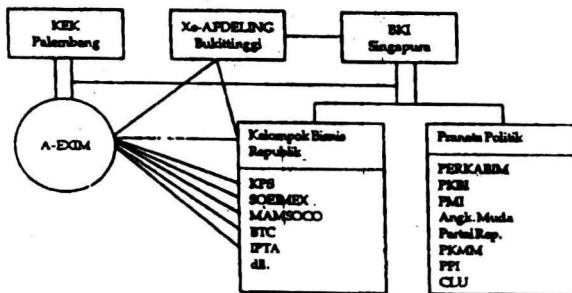
13. Persatuan Kuli Indonesia
14. Persatuan Supir Indonesia
15. S.S. PTT (Pekerja Pos, Telegram dan Telegraf).

d. Perdagangan dan Pranata Ekonomi Lainnya

Garis politik resmi (perundingan) telah diindahkan dan sikap agresivitas pemuda lasykar untuk berkonfrontasi dengan Sekutu dapat diredam. Maka diplomasi minyak yang mengambil jalan damai itu telah dirasakan manfaatnya. Sejak bulan-bulan terakhir 1945 dan selama tahun 1946 dan 47, Palembang telah menikmati keuntungan dari kegiatan perdagangan. Twang Peck Yang, yang menyelidiki peranan kelompok bisnis Cina Indonesia pada periode ini melukiskan perolehan Palembang dari kegiatan perdagangan sebagai "Zaman Emas (the Golden Age) berkat prakarsa-prakarsa yang diambil oleh para pemimpin daerah itu, di samping sumbangan dari kelompok bisnis Cina yang cenderung pro-Republik, khususnya sumbangan mereka dalam menyediakan armada kapal niaga yang menghubungkan Palembang-Singapore.¹⁷⁾

Sejumlah pranata ekonomi yang didirikan selama tahun 1946 mencerminkan hubungan-hubungan yang sangat ruwet, dengan memadukan antara pranata resmi di Keresidenan dan kelompok bisnis swasta, baik bumiputra maupun Cina, di samping melibatkan kelompok militer. Diagram berikut ini hanyalah merupakan percobaan untuk menstrukturkan kembali dari data yang dapat diketahui mengenai jaringan hubungan kelembagaan ekonomi yang ada di Palembang dalam kaitannya dengan kegiatan operasinya di pusat-pusat kekuasaan dan komersial regional Sumatera.¹⁸⁾

DIAGRAM: Hubungan Bisnis Sumatera - Singapura



KETERANGAN :

KEK	(Kordinasi Ekonomi Keresidenan), Palembang
A-Exim	(Afdeeling Export-Import) TRI Sumatera Selatan, Palembang
Xe-Afdeeling	(Bagian Ekspor Impor Komandemen Tri Sumatera, Bukittinggi)
BKI	(Kantor Kebajikan (Indonesia), Singapura)
KPS	(Kantor Perhoeboengan Soematera) Bukittinggi dan Palembang
Soeimex	(Soematera Import-Export), Bukittinggi dan Palembang
Namsoco	(Nusantara MMalaya Singapore & Co), Palembang, Bukittinggi dan Singapura
BTC	(Indonesian Banking and Trading Co), Palembang, Bukittinggi dan Singapura
IPTA	(Indonesian Tourist Pilgrim Association), Singapura.

4. Pengintegrasian Ekonomi Indonesia (1947--1950)

Dapat dilihat, bahwa secara formal integrasi ekonomi Indonesia ke dalam skala nasional tampaknya terjadi lebih kemudian daripada integrasi politik. Segera setelah beberapa hari proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Sukarno-Hatta di Jakarta, reaksi yang datang dari berbagai daerah Indonesia menunjukkan tanda-tanda penuh antusias dan hampir seluruh bagian daerah bekas jajahan Belanda itu terbakar api revolusi. Instruksi-intruksi dari pusat dipatuhi dan lembaga-lembaga politik serupa muncul di mana-mana. Namun lain halnya dengan pranata dan kegiatan ekonomi hampir sepenuhnya otom. Masing-masing daerah memecahkan masalah ekonominya sendiri-sendiri. Pranata dan kegiatan ekonomi yang diprakarsai pusat nyaris tak dikenal di daerah, meskipun usaha ini telah dilakukan lebih awal, bahkan sudah dibentuk beberapa bulan menjelang proklamasi.

Cikal bakal perencanaan ekonomi Indonesia dapat ditelusuri kembali kepada prakarsa mendirikan "Pusat Tenaga ekonomi Bangsa Indonesia" (lebih dikenal dengan singkatan PTE yang dibentuk sekitar awal April 1945, yakni beberapa bulan sebelum kejatuhan Jepang. PTE dicetuskan pada konferensi Bandung (6-8 April 1945) dengan tujuan untuk mempersiapkan penyambutan "orok" Republik yang akan lahir. Dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh terkemuka yang cukup dikenal luas sejak sebelum perang, dan sejumlah pedagang besar.¹⁹⁾ PTE secara lebih khusus dimaksudkan sebagai wadah ekonomi Indonesia, yang nantinya akan bertindak untuk menjembatani kepentingan

ekonomi “nasional”, yakni antara pemerintah dan pengusaha swasta di satu pihak dan berbagai kelompok kepentingan ekonomi di lain pihak.

PTE kemudian mati lemas. Sebagian karena programnya yang terbatas dengan hanya memasukkan pengusaha swasta di Pulau Jawa, sebagian lain karena pengusaha Cina tidak di masukkan, di samping tempat domisili para pengurusnya yang berpencar-pencar. Masih atas prakarsa Moh. Hatta, sebuah pranata baru, yakni “Badan Perencanaan Ekonomi Pusat” (BPEP) didirikan sekitar bulan Januari 1947. BPEP berada di bawah kordinasi Wakil Presiden Moh. Hatta dan A.K Gani, bekas Residen Palembang sebagai wakilnya. Sebuah “Rencana 10 Tahun” yang disusun BPEP segera diajukan dan salah satu programnya yang terpenting, ialah dibentuknya “Banking and Trading Company” (BTC) di Jakarta sekitar bulan Januari 1947. BTC berada di bawah Kementrian Keuangan Syafruddin Prawiranegara, tetapi dalam prakteknya kegiatan BTC berada di bawah pengaruh A.K. Gani, Menteri Kemakmuran.

BTC membuka cabangnya di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera, dan merekut sejumlah pedagang besar bumiputra dan Cina ke dalamnya. Sekitar bulan Februari 1947, Gani telah berhasil menghimpun sekitar 20 komisaris perusahaan besar untuk bergabung dengan BTC. Berkat hubungan-hubungan kepialaman yang dikembangkannya sebelum menjabat Menteri Kemakmuran, Gani juga berhasil menarik pengusaha asing yang memiliki basis usahanya di Singapore, Eropa dan Amerika, “Empire Tentagel”, “Martin Brehman”, “Isbarnsten Inc”. Dan sejumlah pengusaha Cina yang sebelumnya pernah tinggal di Palembang, tetapi kemudian memindahkan usahanya ke Singpra.²⁰¹

Pada paruh kedua tahun 1947, yakni segera setelah agresi militer Belanda pertama (Juli 1947), kontrol Belanda semakin kuat, terutama di Jawa, sejalan dengan blokade ekonominya yang diperkenalkan sejak awal 1947. Karena itu sejak periode ini banyak pengusaha yang beroperasi di Jawa memindahkan kegiatan mereka ke Sumatera. Bagaimanapun juga, kegiatan ekonomi yang dikendalikan pemerintah Republik sudah semakin menintegrasikan pranata ekonomi lokal ke jaringan-jaringan berskala nasional. Bukan hanya jenis komoditi

berskala besar dan perdagangan jauh-jauh seperti yang digalakkan BTC dalam menerobos blokade ekonomi Belanda, melainkan juga perdagangan barang-barang “halus” berharga tinggi, seperti emas dan candu yang dikirimkan dari daerah ke daerah di Jawa dan Sumatera, ikut memperkaya jaringan-jaringan perdagangan lokal dan nasional.²¹

Selepas agresi militer Belanda kedua dan bulan-bulan terakhir revolusi (1949), ketika operasi kelompok bisnis swasta Belanda dan Indonesia cenderung bertumpang tindih, sentimen politik dalam dunia komersial mengingatkan orang akan gejala politik zaman pergerakan. Ada kelompok pengusaha yang “non-Co.”, yang menolak bekerja sama atau melakukan transaksi dagang dengan kelompok perusahaan Belanda, yang umumnya dikuasai oleh kelompok “the Big Five”, yang sudah berpengalaman dan dominan sejak sebelum perang. Pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan komersial dan politik perjuangan zaman revolusi merupakan kekuatan tarik menarik yang selalu muncul dalam setiap era sejarah bukan tak membawa implikasi terhadap perkembangan selanjutnya. Dalam kasus Palembang, percaturan ekonomi zaman revolusi ternyata juga menghasilkan kelompok yang diuntungkan (the winners) dan yang kalah (the loser), atau boleh jadi tak membawa perubahan apa-apa seperti yang dialami oleh kebanyakan kelompok mayoritas penduduk negeri.

Catatan

- 1) Elsbeth Locher_Scholten, “The Establishment of Colonial Rule in Jambi : The Double-Plaited Cord of Politics and Economics” (*Makalah* disampaikan pada Academy Colloquium on the Foundations of National Economy of Indonesia. 1890-1990, Amsterdam, 20-22 September 1994).
- 2) Mestika Zed, “Palembang’s Dualistic Economy in the Late Colonial Period” (*Makalah* disampaikan pada Academy Colloquium, Amsterdam, 20-22 September 1994).
- 3) Tentang konsep “kepialangan” (brokerage) sebagai manajemen Ideologi politik dan ekonomi telah saya kembangkan dalam disertasi saya, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1991, in print. LP3ES, Jakarta).

- 4) Adnan Kapau Gani (1905-1968) lahir di Kapau, Palembayan Bukittinggi, Sumatera Barat. Setelah menamatkan ELS Bukittinggi kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia, Bavia. Tahun 1929 mendaftar pada Medische Hogeschool Batavia dan baru tamat tahun 1940, karena lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kegiatan politik bersama Sukarno, kemudian dengan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Detail informasi mengenai karir politik tokoh ini lihat juga tulisan penulis dalam "Persaingan dan Aliansi. Peranan Kepialangan dalam Revolusi Indonesia", *Prisma* No.6 (1993), pp. 23-46.
- 5) Dr. Moh. Isa, lahir (1911) di Brastagi berasal dari keluarga guru di Bukittinggi menamatkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran NIAS, Surabaya. Sejak 1938 bertugas di Palembang sambil aktif memimpin Parindra di daerah itu. Pada awal revolusi ia diangkat sebagai Ketua KNI, kemudian menggantikan kedudukan Gani sebagai Residen Palembang. Setelah Gani pindah ke pusat menjadi Menteri Kemakmuran Gani sekali lagi mempercayakan penggantinya kepada Isa sebagai Gubernur Muda Sumatera Selatan. Tentang biografi Isa lihat *Rapportage Indonesia*, No. 519/ x dan no. 528, ARA, Den Haag.
- 6) Tentang sikap politik Syahrir terhadap kelompok militer dan dukungan Palembang terhadapnya lihat Mestika Zed (1993), *op.cit.*
- 7) Propinsi Sumatera Selatan (Djakarta: Kementerian Penerangan, tt), p.40. Lihat juga "De Positie van Dr. A.K. Gani op Sumatera", NEFIS Publicatie no. 36, 28 October 1946, Algemene Secretarie, no. 3973, Ara, Den Haag.
- 8) "De Positie A.K. Gani, *ibid.*
- 9) Untuk menunjukkan wibawa dan pengaruh Gani di lingkaran pemuda Giguyun misalnya dapat dilihat dari keputusannya yang berani memecat komandan Giguyun, Emir Moh. Nur, yang diangkat anak buahnya sebagai "panglima" Tkr dan memimpin semua bekas Giguyun Sumatera Selatan. Moh. Nur, yang dipatuhi dan disenangi oleh mantan perwira Giguyun ditangkap dan diganti oleh Hasan Kasim, juga bekas perwira Giguyun. Selaku

Organisator TKR Sumatera Gani malah mengangkat Suhhardjo Hardjowardojo, bukan perwira Giguyun dan sedikit banyak kurang disukai oleh militer, tetapi Gani dapat mempercayainya karena loyalitasnya.

- 10) *Propinsi Sumatera Selatan*, op.cit., p. 37
- 11) Sekitar 80% penyediaan minyak Indonesia pada awal revolusi sampai tahun 1946 berasal dari Palembang karena tidak berfungsinya sebagian besar industri minyak di Jawa dan Kalimantan. Perincian data ini terdapat dalam "local Resources Sumatera", no. 69, *War Office (WO)*, no. 203/2709, Public Record Office, London.
- 12) *Ibid.* Lihat juga "De Positie van Dr. A.K. Gani.", op.cit.
- 13) *Ibid.*
- 14) Tentang "olie diplomatie" (diplomasi minyak) dan hubungan-hubungan pribadi Gani dengan beberapa tokoh lasykar dan penggunaan lisensi perdagangan minyak sebagai cara untuk merekrut pengikutnya telah saya bahas secara panjang lebar dalam salah satu Bab disertai saya (Bab VII), pp. 278 ff.
- 15) "Nota betreffende de Politike en Economische Toestand in de Borkit Asam Steenkolenmijnen te Tandoejng Enim", *Rapportage Indone-sia*, no. 528, ARA Den Haag.
- 16) *Ibid.*
- 17) Twang peck Yang, "Indonesian Chinese Business Communicaties in transformation" (*Djassertation*, ANU, Canberra, 1987), pp. 187-8. Lihat juga data yang diperkaya dari tulisan saya Mestika Zed (1993), p. 41.
- 18) Mestika Zed (1993), pp. 32 ff.
- 19) Dari kalangan tokoh nasionalis misalnya Sukarno, Hatta, Mr. Asaat, Kasman Singodimedjo, Otto Iskandar Dinata. Dari kalangan pedagang besar B.R. Motik, Djohhan Djohor, Abd. Gani Aziz dll. Terpilih sebagai Ketua PTE pada konferensi Bandung itu ialah Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, dan Sekretarisnya B.R. Motik.

- 20) Twang peck Yang, *op.cit.*
- 21) Gejala ini juga terlihat dari jaringan perdagangan candu antar daerah. Lihat misalnya tulisan R. Cribb, "opium and the Indonesian Revolution", dalam *Modern Asian Studies*, 22, 4 (1988), pp. 701-22.

EKOLOGI, EKONOMI, DAN WAJAH REVOLUSI DI PEDESAAN : Kasus Dinamika Masyarakat Desa Gombang Tahun 1945--1949

Yety Rochwulaningsih & Singgih Tri Sulistiyono

1. Pendahuluan

Sampai saat ini karya-karya tentang sejarah revolusi Indonesia sudah cukup banyak. Di samping membahas revolusi Indonesia di tingkat Nasional dengan segala aspek, banyak juga karya yang menggarap Revolusi Indonesia di tingkat daerah atau lokal. Untuk sekedar menyebut beberapa penulis tentang sejarah Revolusi Indonesia antara lain Anderson¹, W.H. Federick², G. McTurnan Kahin³, Lucas⁴, Cribb⁵, Audrey R. Kahin⁶, dan lain-lain.

Makalah ini berusaha untuk mengkaji wajah revolusi yang terjadi di desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada dasarnya revolusi yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah sudah dikaji oleh Lucas, karena daerah ini merupakan salah satu bagian wilayah yang dilanda revolusi sosial Tiga Daerah. Menurut Lucas, eksploitasi dan tekanan yang sangat berat pada jaman Belanda dan Jepang yang dijalankan pangreh praja menimbulkan antipati dan kebencian yang luar biasa di kalangan rakyat. Mereka memandang pangreh praja sebagai antek penjajah. Momentum kemerdekaan telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk membangkitkan dendam rakyat terhadap pangreh praja. Dengan begitu berkobarlah

Revolusi Tiga Daerah yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes.

Meskipun desa Gombang termasuk dalam kawasan tiga daerah tersebut, tetapi memiliki keunikan tersendiri yang luput dari perhatian Lucas. Anasir-anasir yang mencoba melakukan aksi penggulingan kepala desa misalnya, mengalami kegagalan. Apabila di desa-desa lain di wilayah Tiga Daerah anasir-anasir *Lenggaong* memegang peranan yang sangat vital dalam revolusi sosial untuk melakukan aksi *dombreng*⁷ terhadap para pamong desa, maka sebaliknya kelompok ini justru merupakan kelompok yang mempertahankan status quo dari anasir-anasir yang mendukung revolusi Tiga Daerah, sebab anasir-anasir *Lenggaong* ini telah menguasai kepemimpinan pamong desa sejak jaman kolonial. Di samping itu terdapat berbagai keunikan yang lain.

Makalah ini ingin mengkaji bahwa wajah revolusi di desa Gombang menyimpang dari pola umum Revolusi Tiga Daerah yang telah dikaji oleh Anton Lucas. Penyimpangan itu bersumber dari faktor ekologis yang mempengaruhi kondisi ekonomi, yang pada gilirannya memberikan wajah revolusi yang unik di desa ini. Nampaknya, sampai sekarang masih sedikit sejarawan yang menghubungkan faktor ekologis dengan corak revolusi 1945 di tingkat lokal.

Keterkaitan antara ekologi dan ekonomi dapat dipahami dengan memperhatikan pemikiran J. Steward yang menelaah terjadinya hubungan timbal balik antara kebudayaan dan lingkungan dari sudut adaptasi. Ia memandang dinamika sosial budaya sebagai produk dari proses adaptasi manusia dan lingkungannya. Konsepsi ini dilandasi oleh hipotesis, bahwa pada kondisi lingkungan tertentu akan tumbuh beberapa pranata atau institusi yang berpola tertentu, yang dikenal dengan *cultural core* (inti kebudayaan) yang mencakup pranata sosial, budaya dan ekonomi.⁸ Sejalan dengan pemikiran tersebut Pelzer menggambarkan adanya perbedaan besar antara penduduk dataran tinggi dan penduduk dataran rendah masing-masing dengan tata ekonomi sendiri-sendiri.⁹ Berdasarkan kerangka pemikiran itu maka makalah ini berasumsi bahwa ada hubungan antara faktor-faktor ekologis, kondisi ekonomis, dan kekhasan revolusi 1945 di tingkat lokal.

2. Desa Gombang : Dimensi Ekologi, Ekonomi, dan Perkembangan Sejarahnya

a. Deskripsi Ekologi Desa Gombang

Desa Gombang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jarak desa itu dari pusat pemerintahan : kecamatan 5,5 km, kabupaten 48 km dan propinsi 184 km. Desa Gombang terletak di sebelah timur kaki gunung Slamet dan termasuk desa pegunungan yang paling tinggi dibandingkan desa-desa lain di kecamatan Belik, yaitu 1100 - 1150 m, sedangkan desa-desa lain hanya berkisar antara 400 - 770 m dari permukaan air laut.

Topografi desa Gombang bergunung-gunung dan tanahnya termasuk jenis lathosol (berbatu dan berpasir). Iklim tropis dengan kelembaban berkisar 76% dan curah hujan tiap tahunnya berkisar 1000 - 2200 mm. Desa Gombang memiliki dua musim dalam satu tahun, yaitu kemarau dan penghujan. Hanya saja sebagai desa pegunungan, pembagian musim tidak dapat diperhitungkan secara pasti, karena meskipun dalam intensitas yang rendah adakalanya musim penghujan berlangsung sepanjang tahun, demikian juga sebaliknya.

Berbeda dengan desa lain di wilayah kecamatan Belik, areal desa Gombang terdiri dari tanah kering atau tegalan, tidak memiliki tanah sawah, dan tidak terdapat jaringan irigasi. Kebutuhan air dicukupi hanya dengan mengandalkan curah hujan (tadah hujan). Meskipun pada tahun 1919 telah ada upaya pengeboran sumber mata air oleh teknisi pemerintah Kolonial Belanda, tetapi tidak berhasil karena debitnya rendah.¹⁰

b. Desa Gunung yang Miskin

Mata pencaharian utama penduduk adalah sebagai petani, baik petani pemilik maupun buruh tani. Selain itu meskipun jumlahnya tidak banyak terdapat pedagang, jasa (dukun), dan lain-lain. Berdasar wawancara dengan penduduk asli yang telah berumur di atas 70 tahun dapat diketahui, bahwa petani (pemilik) di desa Gombang umumnya termasuk petani gurem yang hidupnya pas-pasan atau subsisten. Hanya sedikit petani yang luas tanahnya lebih dari 1 hektar. Mereka berasal dari lapisan atas masyarakat desa yang hidupnya sugih atau kaya.¹¹

Hasil pertanian desa Gombang yang utama adalah tanaman pangan yang terdiri dari jagung, umbi-umbian, dan adakalanya padi (gogo); tanaman perkebunan khususnya teh, kopi dan tembakau. Selain itu terdapat tanaman keras seperti nangka, juga hutan kayu yang sebelum kedatangan Jepang mencapai luas lebih dari 1/4 luas seluruh desa Gombang.¹² Semua tanaman itu dibudidayakan secara tradisional dengan sistem monokultur pada lahan yang tandus, sehingga hasilnya terbatas dapat memenuhi kebutuhan primer penduduk. Memang kadang-kadang ada pedagang dari luar desa yang datang untuk membeli hasil pertanian seperti teh, kopi, tembakau dan lain-lain, namun itu hanya penghasilan sampingan. Para pedagang datang dengan membawa bahan-bahan pakaian, lauk pauk (ikan kering), bumbu masak (garam).¹³

Dalam kondisi yang seperti itu masyarakat desa ini hanya mengenal dua kelompok sosial yaitu kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin. Kelompok orang kaya terdiri dari para pamong desa yang kebanyakan merupakan keturunan para cikal-bakal desa. Para pamong desa memperoleh kekayaannya dari berbagai jenis setoran dari penduduk, tanah bengkok, dan keterlibatannya sebagai pengayom bagi anasir-anasir lenggong. Kelompok yang disebutkan terakhir ini juga merupakan kelompok orang kaya yang memperoleh kekayaan dengan melakukan kejahatan-kejahatan di luar desa dan membungakan uang kepada para petani. Bapak Suparno menuturkan bahwa jumlah mereka adalah 26 orang.¹⁴ Di samping itu tokoh-tokoh agama Islam yang tidak banyak jumlahnya juga termasuk dalam kelompok orang kaya ini. Mereka memiliki tanah yang relatif luas karena mereka termasuk keturunan pengikut Pangeran Diponegoro yang memiliki perasaan keagamaan yang kuat. Rupanya, meskipun kelompok pamong desa dan elite agama berasal dari cikal-bakal yang sama, namun dalam perkembangan selanjutnya kedua kelompok ini memiliki orientasi keagamaan yang berbeda. Kelompok pertama lebih bergaya hidup abangan sedangkan yang kedua bergaya hidup santri. Sementara itu kelompok orang miskin adalah para petani dan buruh tani yang merupakan mayoritas penduduk desa.

c. Negeri Para Jago

Menurut cerita rakyat, para cikal bakal desa adalah para pelarian pengikut Pangeran Diponegoro yang berasal dari daerah Bagelan dan sekitarnya di bawah pimpinan Raden Mas Sudiro.¹⁵ Satu hal yang menarik adalah bahwa arsip pemerintah Kolonial Belanda juga mencatat nama Sudiro dengan sebutan Jaya Sudira. Ia adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah Bagelan pada tahun 1831. Perlawanan yang dipimpin oleh Jaya Sudira ini dapat dicerai-beraikan oleh Belanda. Ia sendiri dapat ditangkap oleh Belanda, sedangkan para pengikutnya melarikan diri ke hutan-hutan.¹⁶ Dimungkinkan, sebagian dari pengikut Jaya Sudira bersembunyi di hutan yang pada akhirnya menjadi desa Gombang ini. Jadi rupanya sejak awal berdirinya, desa Gombang merupakan desa yang otonom, artinya dibentuk bukan untuk kepentingan penguasa supra desa tertentu baik untuk kepentingan pemerintah Kolonial maupun kerajaan Mataram.¹⁷

Meskipun telah kalah, secara diam-diam para pengikut Jaya Sudira masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan cara menjadi brandalan, kecu ataupun Lenggaong Namun begitu mereka beroperasi di daerah lain.¹⁸ Nampaknya tradisi menjadi kecu ini berjalan terus. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas kecu ini tidak lagi memiliki tujuan utama untuk mengacau pemerintah Kolonial, tetapi telah menjadi semacam profesi yang mendatangkan kekayaan. Hal ini didorong oleh kurang produktifnya lahan yang ada.

Demikian kuatnya pengaruh anasir-anasir kecu, sehingga pemerintah desapun dikuasai oleh anasir-anasir kelompok ini. Oleh sebab itu aktivitas "di luar hukum" ini menjadi kabur karena bersembunyi di balik kepemimpinan para pamong desa. Kepala desa dan stafnya harus memiliki kedingdayaan sebagai seorang jago. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kewibawaan di hadapan rakyatnya, terutama di hadapan anasir-anasir jago lain yang ada di kalangan rakyat. Bapak Suparno menuturkan bahwa untuk menjadi pamong desa paling tidak harus bisa mengalahkan keroyokan 12 orang dewasa.¹⁹

Satu hal yang menarik adalah bahwa para pamong desa yang berasal dari anasir lenggang ini mempunyai kekhasan dalam

memerintahnya. Dalam memperoleh penghasilan, para pamong desa Gombang di samping masih memperoleh tanah bengkok, juga menarik iuran yang berupa uang dan jenis penyerahan lain dari penduduk desa. Penduduk harus membayar uang *janggolan* dan *alingan*, serta penyerahan *bakaran* bila panen jagung. Uang *janggolan* khusus diberikan kepada lurah. Sementara itu uang *alingan* diberikan kepada pamong desa selain lurah yang jumlahnya sekitar 10 orang, sedangkan *bakaran* diberikan khusus kepada lurah.²⁰

Lurah dan pamong desa lainnya merupakan kelompok sosial yang kaya. Di samping dari penghasilan *janggolan*, *alingan*, *bakaran*, dan *renten*, mereka juga menjadi pelindung para kecu yang beroperasi di luar desa sehingga mendapat penghasilan ekstra.

Karena kehidupan para Lenggong didominasi oleh unsur-unsur kedigdayaan, maka sudah barang tentu unsur-unsur kekerasan sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Rakyat desa ini begitu taat kepada pamong desanya. Contoh menarik dialami oleh keluarga Bapak Kasnari. Oleh karena tidak mampu membayar uang *janggolan* dan *alingan* beberapa kali, tanah milik mereka disita lurah dan karena tidak memiliki tanah mereka terpaksa menjadi buruh di desa lain. Penduduk tidak berani melakukan perlawanan terhadap tindakan yang demikian itu.²¹ Jadi rupanya uang *alingan* dan *janggolan* mula-mula lebih berfungsi sebagai imbalan jasa atas perlindungan yang diberikan dari kelompok pimpinan desa yang terdiri dari anasir-anasir lenggong dari gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh kecu lain. Pentolan kecu desa Gombang yang bernama Mantaki dan Kartacari ternyata masih kerabat lurah.²² Desa ini pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda sebagai desa yang bebas dari gangguan kecu. Hal itu tidak mengherankan mengingat desa ini merupakan negeri para kecu sehingga tidak pernah diganggu kecu.

3. Ekologi, Ekonomi, dan Wajah Revolusi

a. Ekologi, Ekonomi dan Eksploitasi Kolonial

Sebagai desa pegunungan, Gombang terletak jauh dari pusat-pusat kekuatan politik, ekonomi dan budaya (kraton). Berdasar kondisi ekologinya, sistem pertanian yang diterapkan adalah perladangan.

tanpa jaringan irigasi, semata-mata hanya mengandalkan pada curah hujan. Sejak jaman kolonial makanan pokok penduduk adalah jagung dan umbi-umbian, sedangkan tanaman perkebunan (kopi, teh dan tembakau) selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual untuk membeli kebutuhan primer lainnya dan untuk membayar pajak serta iuran wajib yang ditarik desa.

Selain kondisi alam yang kurang potensial, masalah utama yang mereka hadapi adalah terbatasnya tanah garapan yang merupakan modal dasar dari setiap usaha pertanian. Luas tanah rata-rata petani desa Gombang kurang dari 1 Ha. Angka ini ternyata tidak berbeda dengan perhitungan de Vries yang didasarkan atas hasil sensus tahun 1930 bahwa luas milik tanah rata-rata rumah tangga di Jawa adalah 0,86 Ha dan lahan seluas ini terlampau kecil untuk melakukan usaha pertanian. De Vries menambahkan bahwa pada tahun 1930-an di wilayah Karesidenan Pekalongan bagian selatan (desa Gombang tercakup di dalamnya) terjadi kemerosotan pertanian dalam arti harafiah tanahnya "sedang sekarat", karena erosi, penggunaan tanah yang tidak cocok/sesuai dengan kondisi ekologi, dan lain-lain.²³

Sebagaimana kesaksian informan, bahwa selama kurun waktu itu kehidupan petani di desa Gombang selalu dihadapkan pada bahaya kekurangan pangan dan uang. Agar mendapatkan uang, petani harus menjual sebagian dari hasil pertaniannya dan dengan demikian mereka selalu dihadapkan pada dilema yang sulit. Tercermin dari kisah pengalaman seorang informan sebagai berikut :

Pada tahun 1930-an ketika beberapa kali hasil panen tidak memuaskan, tanah pertanian saya diminta desa (kepala desa) karena saya tidak dapat membayar pajak. Waktu itu saya bingung, menjual bahan pangan untuk membayar pajak lalu tidak ada yang dimakan atau tidak membayar pajak tapi ada yang dimakan. Akhirnya tuntutan perut lebih utama dari yang lain meskipun resikonya seperti itu. Selain pajak kami juga harus membayar *janggolan* (iuran untuk kepala desa), *alingan* (untuk pangreh praja lainnya seperti polisi desa, bau, bayan, carik), *pitrah* (untuk lebai), dan menyerahkan *bakaran* (jagung untuk kepala desa).²⁴

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pada jaman kolonial tanpa memperhitungkan kondisi riil ekonomi petani, melalui kekuasaan birokrasi di desa (*pangreh praja*), petani harus membayar berbagai

luran wajib. luran wajib itu tidak hanya berdasar pada ketentuan dari pemerintah kolonial Belanda yang berupa pajak, tapi juga berdasar nilai tradisi seperti janggolan, alingan dan lain-lain.

Mengenai pajak, oleh penduduk desa Gombang (pangreh praja sebagai penarik pajak ataupun penduduk biasa sebagai wajib pajak) tidak dirasakan sebagai suatu eksploitasi dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan semua informan (dari unsur pangreh praja ataupun petani) mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka merasa tidak pernah dijajah oleh Belanda dan mereka menyebut jaman sebelum kedatangan Jepang sebagai jaman "londo normal". Jadi karena kondisi ekologis yang kurang menguntungkan secara ekonomi, rakyat desa Gombang "selamat" dari eksploitasi kolonial.

b. Mangan Wareg Ora Nyandhang

Bagi orang Jawa, jaman Jepang merupakan jaman yang paling mengerikan di mana banyak terdapat kelaparan dan berbagai wabah penyakit, mayat bergelimpangan di pinggir jalan dan penderitaan lain. Barangkali baru jaman Jepang inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah jumlah penduduk Jawa mengalami penurunan.²⁵

Tidak terkecuali bencana kekurangan pangan yang kronis juga dialami oleh masyarakat Pemalang. Lucas mengatakan bahwa bencana ini disebabkan oleh politik ekonomi pemerintah pendudukan Jepang yang sangat keras baik dalam hal penyerahan padi, pengerahan tenaga kerja paksa, maupun pengawasan aktivitas pasar. Dalam penyetoran padi misalnya, seringkali petani tidak boleh membawa pulang hasil penennya kecuali yang untuk makan dan benih, selebihnya langsung diserahkan kepada pemerintah dengan harga separoh pasaran. Di banyak daerah, wajib setor padi dilaksanakan dengan cara menetapkan kuota. Namun begitu penetapan kuota kadang-kadang tidak disadari atas jenis kesuburan tanah. Kawedanan Belik, tempat desa Gombang berada, yang tanahnya kurang subur mendapat jatah penyerahan padi sebanyak 1.5 ton per hektar, padahal sawah-sawah di daerah ini hanya menghasilkan 1.4 ton/hektar jika musimnya sedang baik. Ini berarti bahwa penduduk harus menyerahkan padi sebanyak 105%.²⁶

Kondisi umum desa-desa di Tiga Daerah pada jaman Jepang yang digambarkan Lucas demikian buruk dimana rakyat harus makan bubur

singkong, umbi badur (walur), bahkan bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun kelapa yang disebut "bulung".²²

Semua informan mengatakan bahwa bagi penduduk desa Gombong jaman Jepang juga merupakan masa yang berat tetapi hanya dalam soal sandang. Mereka sulit memperoleh kain untuk bahan pakaian. umumnya menggunakan pakaian goni yang penuh dengan kutu, sarung karet mentah, bahkan hanya mengenakan celana pendek dari kulit kayu yang berserat (*waring*). Persoalan sandang menjadikan penderitaan tersendiri bagi penduduk, karena udara di desa ini sangat dingin. Satu-satunya alternatif untuk mengatasi hal itu mereka memperbanyak mencari *waring*, dan selalu membuat tungku kayu yang mereka tebang begitu saja dari hutan sekitar untuk menghangatkan tubuh.

Karena faktor ekologis, desa Gombong hanya bisa menghasilkan tanaman pangan seperti jagung, dan tanaman umbi-umbian sebagai tanaman utama, tanaman sayur-sayuran, tanaman perkebunan seperti teh, kopi dan tembakau sebagai usaha sampingan, sedangkan padi jarang ditanam. Makanan pokok mereka adalah jagung dan umbi-umbian. Akan tetapi, justru karena kondisi seperti itu desa Gombong "selamat" dari penindasan Jepang. Desa ini tidak mendapat jatah untuk menyerahkan padi, padahal kawedanan Belik (Desa Gembong tercakup di dalamnya) mendapat kuota 105%. Desa Gembong sebagai desa miskin dan tidak menghasilkan padi. Dalam situasi seperti ini kondisi subsistensi pangan penduduk sama sekali tidak terganggu. Bahkan menurut kondisinya lebih baik daripada jaman revolusi. Semua informan merasa beruntung, karena mereka tidak dipaksa menyerahkan padi, sebaliknya meskipun dalam jumlah sedikit (2 cangkir/orang setiap minggu) mendapat jatah beras dari pemerintah bagi yang ikut *kinrohoshi* (kerja bakti) penebangan dan pengangkutan kayu, pembuatan lobang-lobang perlindungan di pegunungan-pegunungan sekitar desa. Untuk jaman Jepang ini mereka mengatakan "mangan wareg nanging ora nyandhang".

c. Revolusi Sosial yang Gagal

Aiko Kurasawa mengatakan bahwa meledaknya revolusi sosial di beberapa daerah pada saat segera sesudah proklamasi terutama disebabkan oleh memburuknya hubungan antara pamong praja dengan

rakyat selama pendudukan Jepang. Hal ini di samping bersumber dari perlakuan pemerintah pendudukan Jepang yang ingin "mendemokratisasikan" korps pangreh praja juga bersumber dari tindakan para pangreh praja sendiri baik karena tekanan keadaan maupun atas inisiatif mereka sendiri seperti tindakan korupsi, terlalu membela pemerintah Jepang, dan sebagainya. Dalam hal ini suasana revolusi digunakan untuk balas dendam.²⁸

Demikian juga Lucas berusaha menghubungkan antara eksploitasi kolonial yang berat baik pada jaman Belanda maupun Jepang dan meletusnya revolusi sosial Tiga Daerah.²⁹ Sesungguhnya tidak di semua daerah di Pemalang revolusi sosial mengalami kegagalan. Hal ini juga berarti ada pula daerah di Pemalang yang tidak mengalami eksploitasi kolonial yang berat, sehingga keterlibatan para pamong desa sebagai antek kolonial juga kecil. Dengan begitu maka revolusi sosial tidak populer di sini.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa justru karena kondisi ekologi yang tidak menguntungkan, desa Gombang terhindar dari eksploitasi kolonial. Eksploitasi kolonial yang secara langsung menyentuh kehidupan rakyat desa Gombang tetapi tidak disadari oleh penduduk adalah pajak jaman Belanda. Pada jaman Jepang apa yang dinamakan "kinrohoshi" yaitu pengerahan tenaga kerja untuk kepentingan tentara Jepang di wilayah sekitar yang dalam hal ini menebang dan mengangkut kayu, membuat lobang-lobang perlindungan di lereng-lereng pegunungan di sekitar desa tidak dirasakan sebagai beban berat. Bahkan penduduk yang terlibat dalam pekerjaan ini justru merasa beruntung karena mereka mendapat jatah beras, sehingga mereka dapat merasakan nasi beras. Tindakan-tindakan korup dalam pembagian beras juga bisa dihindari, karena pemerintah pendudukan Jepang mempercayakan hal ini langsung kepada para *kumicho* (ketua Rukun Tetangga). Lagi pula jatah beras tidak diberikan kepada penduduk secara cuma-cuma tetapi hanya kepada mereka yang terlibat dalam *kinrohoshi*.³⁰ Jadi kemungkinan munculnya tindakan sewenang-wenang para pamong desa terutama bersumber dari kekuasaan mereka dilandasi atas kekuatan, kedigdayaan, maka kemungkinan timbulnya pemaksaan dan kesewenang-wenangan sangat besar.

Mereka bukan hanya bertindak sebagai “pelindung” rakyat, tetapi sekaligus juga sebagai tuan yang harus dilayani. Dalam hal ini bila rakyat tidak bisa melayani mereka, maka pemaksaan dan kekerasanpun terjadi. Kasus perampasan tanah milik keluarga Bapak Kasnari sebagaimana yang disebutkan di depan merupakan contoh bagaimana para pemong desa memiliki kekuasaan mutlak atas penduduk desa. Hanya karena penduduk tidak bisa membayar uang pajak, *janggolan* atau *alingan*, lurah dapat merampas tanah mereka. Demikianlah perlakuan semacam ini telah menimbulkan rasa tidak senang di kalangan kelompok elite desa yang lain yaitu elite agama Islam yang didukung oleh tokoh pendidikan yang sudah memiliki hubungan dengan luar desa. Dua tokoh di desa Gombang yang memelopori gerakan untuk melawan lurah pada awal revolusi adalah Kyai Abdurrosyid dan Guru Seto.

Kiai Abdurrosyid adalah seorang penduduk asli desa Gombang yang selama akhir penjajahan Belanda mengembara untuk belajar di berbagai pondok pesantren. Sudah barang tentu gaya hidup para pamong desa sebagai jago yang berkepercayaan *abangan* menimbulkan rasa risih baginya. Lurah menentang penarikan zakat yang akan dilaksanakan oleh Kiai Abdurrosyid karena sudah membayar berbagai iuran untuk pamong desa.³¹ Sementara itu Guru Seto adalah seorang pengajar sekolah Desa setempat yang kemungkinan besar memiliki hubungan dengan guru-guru Sekolah Desa lain yang banyak menjadi anggota Sarekat Rakyat.³²

Pada akhirnya gelombang revolusi sosial menerpa desa Gombang. Pada waktu itu jabatan kepala desa dipegang oleh Atmorejo, yang berasal dari anasir-anasir lenggong dan bertindak kejam jika rakyat lalai membayar pajak, *janggolan* dan *alingan*. Meskipun ia tidak dapat dikatakan sebagai antek penjajah, baik pada jaman Belanda maupun Jepang, tetapi sumber ketidaksenangan yang dirasakan kelompok elite lain adalah dari gaya hidup sebagai lenggang yang penuh dengan kekerasan dan otoriter serta *abangan*.

Suasana revolusi sosial dan pergolakan yang terjadi di seluruh wilayah residensi Pekalongan digunakan oleh Kiai Abdurrosyid dan Guru Seto mengundang pasukan pro Kutil dari Tegal dan

menggerakkan puluhan penduduk setempat guna menangkap dan menyingkirkan lurah.³³ Gerakan yang disponsori Kiai dan Guru sebagai kelompok radikal itu tidak mendapat perlawanan, karena lurah dan keluarganya telah mendapat menyingkir setelah mencium rencana gerakan mereka. Kondisi itu dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mengambil alih kekuasaan di desa dan menjadikan rumah lurah sebagai tempat kegiatan.

Lurah Atmorejo yang tersingkir itu mempunyai cucu bernama Suparno, bekas mantri pasar pada jaman Jepang, yang kemudian menjadi aktivis pejuang republik. Dia merupakan salah satu tokoh PPKRI (Pemuda Pembela Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk oleh Residen Pekalongan.

Suparno memimpin lasykar daerah Pemalang Selatan yang beranggotakan sekitar 300 orang, sedangkan yang berasal dari desa Gombang berjumlah 58 orang merupakan keturunan para lenggong. Mengetahui kakeknya tersingkir dari kedudukannya ia dengan mengajak beberapa anak buahnya pulang ke Gombang mencari Kiai Abdurrosyid dan Guru Seto. Akhirnya gerakan Kiai Abdurrosyid dan guru seto dapat dilumpuhkan dan di depan penduduk desa dua tokoh ini dipaksa bersumpah untuk tidak mengganggu keluarga lurah sampai tujuh turunan.³⁴ Dengan begitu gagal upaya kelompok radikal menggulingkan kekuasaan pemerintah desa Gombang. Sekali lagi rakyat menyaksikan bagaimana lurah dan keluarganya masih memiliki kedigdayaan sebagai jago.

d. Ekonomi Rakyat dalam Kemelut Revolusi

1. Daerah Pendudukan

Ditinjau dari strategi militer, Belik memiliki posisi yang strategis karena kota kecil ini merupakan satu-satunya pintu yang menghubungkan daerah utara Jawa Tengah bagian barat dengan daerah Purwokerto untuk menuju Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta.³⁵ Oleh sebab itu gerakan pasukan Belanda dari Bandung menuju ke Yogyakarta pada Agresi Militer I juga melewati rute ini. Pada akhir bulan Juli 1947 Belik berhasil diduduki Belanda dan sejak itu desa-desa disekitarnya termasuk daerah pendudukan.³⁶ Namun demikian mengingat Gombang merupakan desa pegunungan yang berada di

tempat paling tinggi untuk wilayah Belik dengan hutan kayu relatif lebat, banyak terdapat semak belukar dan medan terisolir (sarana dan prasarana transportasi terbatas), maka desa ini menjadi pilihan terbaik bagi pasukan republik untuk melakukan infiltrasi dan untuk dijadikan ajang perang gerilya. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution bahwa tempat yang strategis dalam perang gerilya diantaranya wilayah luas, daerah sulit dilewati, banyak gunung, bukit, dan hutan.³⁷

Pasukan yang tergabung dalam Kompi Satari dari kesatuan Corps Armada (CA) IV ALRI yang bermarkas di Tegal yang bertugas mempertahankan wilayah Belik adalah pasukan yang pertamakali mengundurkan diri di desa Gombong dari gempuran pasukan Belanda dalam Agresi Belanda I. Dari pasukan inilah penduduk Gombong mendapat kepastian bahwa Belik dan desa-desa sekitarnya telah dikuasai Belanda. Pasukan gerilya yang beroperasi di desa Gombong bermarkas di dukuh Bedahan dan dukun Gombong, tetapi kemudian keberadaan mereka selalu berpindah-pindah yang seringkali juga diikuti oleh kepala desa atau pamong desa lainnya. Jumlah pasukan yang terdapat di desa Gombong semakin bertambah terutama setelah Agresi Belanda II baik dari kesatuan CA IV ALRI/Tegal, divisi Siliwangi, ALRI/Yogyakarta, ataupun badan-badan perjuangan seperti PPKRI (Pemuda Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia) yang dipimpin Soeparno pemuda desa Gombong. Dalam hal ini pasukan Republik melakukan infiltrasi dan gerakan-gerakan militer secara gerilya karena Belanda membangun pertahanan yang kuat di Belik dengan personil cukup banyak, yaitu sekitar 77 orang yang dilengkapi persenjataan lebih mutakhir.³⁸

2 Dukungan Ekonomi Rakyat pada Masa Perang

Seperti telah disinggung bahwa setelah Agresi Belanda II, jumlah pasukan gerilya di Desa Gombong semakin banyak. Sementara itu pasukan Belanda yang berpusat di Belik hampir setiap hari melakukan patroli di desa Gombong, namun mereka tidak pernah berbuat kejam terhadap penduduk. Bahkan mereka sempat mengangkat salah seorang penduduk desa yang bernama Dul Salam sebagai lurah Recomba karena lurah Atmorejo sebagai orang republikan ikut bergerilya bersama pasukan yang terdapat di desa itu. Meskipun begitu karena

gerilyawan berusaha untuk menghindari kontak langsung dengan patroli Belanda pada siang hari, maka tidak pernah terjadi kontak senjata secara besar-besaran antara pasukan gerilya dan Belanda. Kehidupan penduduknya terutama aktivitas pertanian tetap berlangsung seperti biasa. Hanya saja umumnya mereka justru merasa lebih aman bekerja ataupun tinggal di ladang, atau di pinggir hutan. Jarang yang memiliki keberanian untuk pergi ke pasar atau ke luar desa untuk menjual hasil pertanian karena takut pada pasukan republik maupun Belanda.³⁹

Adalah satu hal yang sangat ganjil bahwa penduduk yang merasa tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda dan tidak pernah menyaksikan kekejaman tentara Belanda secara tiba-tiba berubah total menjadi benci dan takut kepada Belanda. Dengan alasan ini pula penduduk tinggal di ladang-ladang mereka yang jauh dari jalan raya. Barangkali masuk akal bila kejadian ini berkaitan dengan strategi gerilyawan sendiri yang berusaha menciptakan *public opinion* dan image yang menempatkan Belanda sebagai musuh dengan segala macam kejelakannya. Tindakan penduduk untuk bertempat tinggal di ladang dan dapat mengerjakan ladang mereka dengan intensif sudah barang tentu akan menguntungkan para gerilyawan, karena mereka akan mendapatkan cadangan logistik yang sangat penting. Diakui oleh penduduk bahwa hasil pertanian selama perang kemerdekaan justru meningkat.⁴⁰ Akan tetapi peningkatan produksi ini tidak diikuti oleh peningkatan kemakmuran, karena yang mengonsumsi jauh lebih banyak yaitu para gerilyawan yang datang hampir setiap malam. Mereka justru merasa bahwa jaman kemerdekaan (masa revolusi) lebih berat daripada jaman Jepang. Akan tetapi hal itu merupakan indikasi bahwa para gerilyawan lebih berkuasa terhadap penduduk desa daripada Belanda meskipun Belanda telah mengangkat lurah Recomba. Pada kenyataannya lurah Recomba, Dul Salam, tidak berani bertindak di luar apa yang dikehendaki oleh para gerilyawan. Hampir tiap malam ia didatangi oleh gerilyawan untuk "diminta keterangan" tentang aktivitas tentara Belanda yang ia ketahui. Jadi dalam banyak hal ia justru menjadi mata-mata gerilyawan; kalau tidak demikian niscaya ia diekskusi oleh gerilyawan.

Lurah Atmorejo beserta stafnya pada waktu-waktu yang memungkinkan menganjurkan kepada seluruh penduduk, terutama para petani kaya, untuk selalu menyiapkan makanan untuk pasukan gerilya. Jenis makanan yang diberikan penduduk Gombong pada pasukan gerilya sama dengan yang mereka konsumsi, yaitu nasi jagung (jagung bakar), umbi-umbian, sayur-sayuran, minuman (teh, kopi) dan adakalanya tembakau.⁴¹

Satu hal sangat menarik adalah bahwa jika pada masa sebelumnya tidak ada penduduk desa Gombong yang berdagang ke luar desa, jadi mereka hanya menunggu pedagang dari luar desa, tetapi pada masa revolusi kegiatan perdagangan dengan luar desa justru sering dilakukan oleh beberapa penduduk. Untuk aktivitas perdagangan pada saat perang, nyawa adalah taruhannya. Baik Belanda maupun gerilyawan sama-sama memiliki kepentingan atas aktivitas perdagangan, di samping untuk menyuplai barang-barang akomodasi juga dimanfaatkan untuk aktivitas intelijen. Untuk itulah seringkali terjalin hubungan yang erat antara pedagang dengan gerilyawan. Pedagang yang tidak kenal baik dengan gerilyawan menghadapi resiko besar untuk dibunuh dan dirampas hartanya dengan tuduhan sebagai mata-mata NICA, apalagi ketika itu pasar Belik sudah dikuasai Belanda (terkenal dengan sebutan "pasar NICA") menjadikan aktivitas dagang penduduk desa Gombong semakin berat.

Maryuni, salah seorang wanita pedagang, menuturkan bahwa setelah mengumpulkan hasil-hasil pertanian dari desa Gombong ia menjual ke pasar Randudongkal yang meskipun letaknya jauh tetapi lebih longgar dari pengawasan/kontrol Belanda. Sesuai dengan perintah, sepulangnya dari pasar Randudongkal ia selalu membawa barang-barang yang dibutuhkan pasukan gerilya seperti kertas, tinta, bolpoin dan adakalanya surat untuk komandan pasukan lainnya. Semua barang itu diselipkan di sela-sela barang dagangan yang berbau seperti terasi, ikan asin, dan sebagainya sehingga bisa lolos dari cegatan patroli, penjagaan ataupun pengeledahan oleh pasukan Belanda. Resiko dari petani atau yang lain, tetapi secara ekonomis para pedagang ini yang paling banyak mendapatkan keuntungan karena mereka mendapatkan harga barang murah kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Untuk jenis makanan tertentu seperti ikan asin/

ikan tongkol yang dibeli dari pasar Randudongkal dan dijual di desa Gombang bisa mendapatkan keuntungan sampai sepuluh kali lipat.⁴²

Bagi para gerilyawan, aktivitas perdagangan yang tidak menguntungkannya atau bahkan dipandang menguntungkan Belanda diawasi dengan ketat. Tuduhan mata-mata merupakan senjata pamungkas untuk menghabisi jenis pedagang yang demikian itu sebagaimana tercermin dari kasus terbunuhnya Kartoji, seorang pedagang kambing dari desa Gombang. Ia membawa kambing dari desa Gombang kemudian dijual di pasar Belik. Pada saat dalam perjalanan pulang dari pasar Belik, ia digeledah oleh gerilyawan. Oleh karena didapati membawa uang dalam jumlah banyak, ia dicurigai oleh gerilyawan sebagai mata-mata NICA dan tanpa pengusutan lebih lanjut ia dieksekusi. Ternyata nama Kartoji tidak populer di kalangan gerilyawan dan komoditi kambing jelas bukan merupakan konsumsi penduduk biasa pada masa revolusi. Jadi pengiriman kambing ke daerah yang berada di bawah kekuasaan NICA dipandang sebagai aktivitas yang ikut mendukung suplai pangan pihak musuh (Belanda). Nasib naas juga dialami oleh Janeri yang sedang membawa hasil pertanian untuk dijual di pasar Belik. Dari penuturan beberapa informan dapat diperhitungkan terdapat sekitar 12 orang yang dieksekusi oleh gerilyawan karena dicurigai sebagai mata-mata NICA. Jadi rupanya setiap aktivitas ekonomi baik pertanian maupun perdagangan akan lancar bila didukung dan menguntungkan gerilyawan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa gerilyawan di desa Gombang mengendalikan dan mengontrol dengan ketat kehidupan perekonomian penduduk dan bahwa secara de facto gerilyawanlah yang berkuasa di desa Gombang dan daerah perbukitan di sekitarnya.⁴³ Jadi kalau di tingkat nasional Belanda yang melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia, tetapi di desa Gombang dan wilayah di sekitarnya gerilyawan Republik-lah yang melakukan blokade.

Sementara itu terdapat fenomena menarik bahwa beberapa penduduk yang ketika jaman Jepang aktif dalam kegiatan Seinendan, Keibodan dan lain-lain, pada jaman revolusi banyak yang menjadi lasykar atau bertindak sebagai mata-mata pasukan gerilya dengan menyamar sebagai pedagang atau petani. Bapak Sanmuhid misalnya, sebagai anggota lasykar Banteng Wulung bertindak sebagai mata-mata

yang menyamar sebagai petani. Sebagai penduduk asli ia lebih paham liku-liku atau medan desa Gombang sehingga sambil bekerja di ladang jika mengetahui gerakan pasukan Belanda dapat dengan cepat memberitahu pasukan gerilya supaya menyingkir. Pernah ia ditangkap Belanda dan ditawan serta dihajar di markas militer Belik, tapi akhirnya dilepas. Menjadi mata-mata resikonya berat, terutama jika menjadi mata-mata Belanda, pasti akan dibunuh dengan cara yang mengerikan oleh pasukan Gerilya. Dua orang keponakan Bapak Sanmuhid dikubur hidup-hidup oleh gerilyawan republik karena terbukti menjadi mata-mata Belanda. Hal yang tidak berbeda juga dialami Kaper dan Kisut karena terbukti menjadi mata-mata Belanda dibunuh oleh pasukan gerilya. Hanya satu orang mata-mata pasukan gerilya yaitu Suud yang ditembak oleh Belanda.⁴⁴

Apapun antisipasi yang dilakukan oleh penduduk desa Gombang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka sendiri maupun para gerilyawan, situasi perang membuat kondisi ekonomi mereka lebih berat daripada jaman Jepang. Berdasar laporan peninjauan yang dibuat oleh Sub Teritorium Militer Pekalongan tanggal 30-3-1949 dapat diketahui, bahwa secara umum pada waktu itu keadaan perekonomian penduduk di desa Gombang minus, karena merupakan daerah jagung (alamnya kurang potensial). Beban penduduk Gombang lebih berat lagi karena daerahnya sebagai lalu lintas pasukan Siliwangi dan pengungsi serta pusat dari pasukan-pasukan gerilya. Hal itu terjadi karena Belik yang secara geografis merupakan pintu utama dari jalur selatan Jawa Tengah, oleh Belanda dijadikan benteng pertahanan yang kuat dimana mereka membuat kubu dan perlindungan.⁴⁵

2. Tentara sebagai Pelindung: Dari Lenggong Menjadi Jagoan Republik

Banyak penulis mencoba memberikan peranan kepada kaum bawah tanah seperti kecu, jago, lenggong dan lain-lain dalam revolusi Indonesia. Onghhokham misalnya mengatakan bahwa tindakan revolusioner dalam revolusi Indonesia tidak disponsori oleh orang-orang militer resmi, tetapi justru dimulai oleh berbagai kelompok dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai pimpinan, anak buah, senjata, dan kepentingan sendiri-sendiri. Dalam situasi inilah golongan

jago dan para bandit, yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai "orang kuat" secara informal mengaktualisasikan dirinya untuk tampil secara formal.⁴⁶

Sartono mengaitkan tampilnya para jago dengan berkembangnya situasi krisis dalam revolusi. Menurutnya dalam menghadapi situasi krisis yang berkepanjangan, orang dipaksa untuk mengikuti salah satu kelompok. Disamping untuk memenuhi kebutuhan identitas diri, hal itu juga berfungsi sebagai sarang untuk berlindung dari segala macam bahaya yang sewaktu-waktu datang. Dalam situasi seperti itulah kehadiran para jagoan, orang kuat, orang digdaya, entah dari mana asalnya, sangat diharapkan sebagai pelindung dan pemimpin alamiah.⁴⁷ Dalam konteks peristiwa Tiga Daerah, Lucas menggambarkan peranan yang luar biasa besar dari para jago, yang ia sebut sebagai lenggaong. Para *lenggaong* inilah yang memimpin aksi *dombreng* dan menyerang lurah-lurah.⁴⁸

Di desa Gombong para lenggaong setempat tidak memelopori aksi dombreng terhadap lurah (kepala desa), karena memang desa ini sejak jaman Belanda telah dikuasai oleh anasir-anasir lenggaong ataupun jago. Orang tidak akan berani menjadi lurah dan pamong kalau tidak mempunyai kedigdayaan sebagai jago.

Di bawah lindungan pamong desa yang terdiri dari anasir-anasir lenggaong inilah penduduk desa Gombong tidak pernah dijarah kecu dari daerah lain. Peranan anasir-anasir kekuatan lenggaong yang sangat kuat di desa ini mudah dipahami karena kontrol keamanan pemerintah Kolonial tidak pernah sampai secara efektif di desa ini. Bahkan semua informan ketika itu tidak tahu kalau Belanda sedang menjajah mereka. Dengan begitu lurah di sini dapat bertindak seperti raja-raja kecil.

Keadaan di atas tetap mempengaruhi suasana pada masa revolusi. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa para pamong desa bertindak sebagai pelindung penduduk desa. Kebutuhan akan perlindungan ini justru meningkat setelah meletusnya revolusi. Revolusi telah menimbulkan suasana tidak aman, ketidakpastian, dan kegelisahan, apalagi setelah Agresi Belanda I desa Gombong merupakan daerah pendudukan yang berbatasan dengan pertahanan daerah Republik. Pada waktu itu para gerilyawan Republik selalu

mengadakan perembesan dan sabotase terhadap wilayah dan patroli Belanda. Hampir tiap malam gerilyawan dari berbagai kesatuan berdatangan ke desa ini untuk minta makan dan bahan akomodasi lain serta informasi inteligen dan kadang-kadang melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata NICA. Siang harinya mereka bersembunyi di pegunungan sekitar desa dan melakukan jebakan terhadap patroli Belanda yang berpusat di Belik. Penduduk desa yang umumnya takut terhadap NICA mengosongkan rumah terutama yang berada di pinggir jalan dan membuat gubug/ rumah darurat di ladang atau di pinggir hutan sambil menggarap ladang mereka.

Dalam situasi seperti itu dapat dicatat adanya fenomena yang menarik yaitu hadirnya gerilyawan sebagai kekuatan supra desa yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Dalam situasi yang serba tidak menentu kedudukan mereka semakin penting dan sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai pelindung, sebab merekalah yang memiliki senjata sebagai instrumen kekerasan untuk mengatasi situasi yang penuh kekerasan pula. Dalam hal ini beraliansi dengan gerilyawan merupakan satu-satunya pilihan yang terbaik, sebab kalau tidak mereka akan dipandang sebagai mata-mata NICA dan selanjutnya akan mudah “dihabisi” oleh gerilyawan dengan tanpa ampun. Dengan pro gerilya mereka dengan mudah menghindari patroli NICA dengan jalan menjauhi jalan raya, sebaliknya jika pro NICA, mereka akan mudah dicari oleh gerilyawan. Jadi gerilyawanlah yang berkuasa di kawasan pegunungan ini, meskipun daerah ini merupakan daerah pendudukan Belanda secara *de jure*.

Menarik sekali bahwa anasir-anasir lenggaong yang pada masa Kolonial bertindak sebagai protektor masih dapat mengekalkan kedudukannya dengan cara bergabung dengan tentara Republik. Bahkan Suparno, salah seorang cucu lurah yang dikenal sebagai “orang kuat” sudah sejak awal kemerdekaan telah aktif dalam PPKRI, dan pada masa agresi Belanda memimpin lasykar Banteng Wulung dengan anggota sekitar 300 orang. Ia juga sangat ditakuti oleh para mata-mata NICA, sebab dia-lah yang sering mengeksekusikan mereka. Ia telah menjadi jagoan Republik yang dielu-elukan penduduk desa. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di kawasan Tiga Daerah

lainnya dimana anasir-anasir lenggaong yang berkuasa selama peristiwa Tiga Daerah ditindas oleh tentara Republik. Di sini bisa dilihat bahwa penduduk desa Gombong tetap memerlukan protektor, dan dalam hal ini tetap memberikan peranan yang besar kepada bekas anasir-anasir lenggaong yang telah menjadi jagoan Republik. Setelah revolusi selesai Suparno dipilih sebagai lurah untuk menggantikan kakeknya yang telah sangat tua.

4. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa secara ekologis desa Gombong terisolir, bergunung-gunung dan kurang subur, sulit mendapatkan air, banyak semak belukar dan huta kayu. Kondisi ekologi seperti itu menyebabkan ekonomi masyarakat desa Gombong subsisten. Di satu sisi kondisi seperti itu justru "menyelematkan" mereka dari eksploitasi Kolonial. Akan tetapi di sisi lain kondisi seperti itu pada masa revolusi telah menjadikan desa Gombong sebagai tempat "persembunyian" atau persinggahan pasukan gerilya, sehingga ekonomi penduduk yang subsisten itu masih harus memenuhi kebutuhan hidup para pendatang dari luar baik pasukan gerilya maupun pengungsi. Oleh karena itu bagi masyarakat desa Gombong, revolusi selain menciptakan suasana yang menegangkan karena adanya teror, intimidasi dan konflik, sekaligus juga merupakan masa yang paling sulit dalam perekonomian mereka.

Kondisi ekologi tersebut juga merupakan alasan kuat mengapa desa ini menjadi sarang yang aman bagi anasir-anasir lenggaong. Bahkan pamong desa di sini dikuasai oleh dan menjadi pelindung anasir-anasir lenggaong dan bandit. Oleh karena itu berbeda dengan daerah Pemalang lain di awal revolusi, para anasir lenggaong justru berjuang untuk mempertahankan kepemimpinan desa yang dipegangnya sejak jaman Belanda dari kelompok Islam dan anasir-anasir pro gerakan Kutil. Dalam konflik dengan Belanda, anasir-anasir lenggaong desa Gombong bergabung dengan kekuatan gerilyawan Republik. Mereka berubah dari bandit menjadi jagoan Republik. Berbeda dengan desa-desa di kawasan Tiga Daerah yang lain, revolusi sosial di desa pegunungan ini mengalami kegagalan.

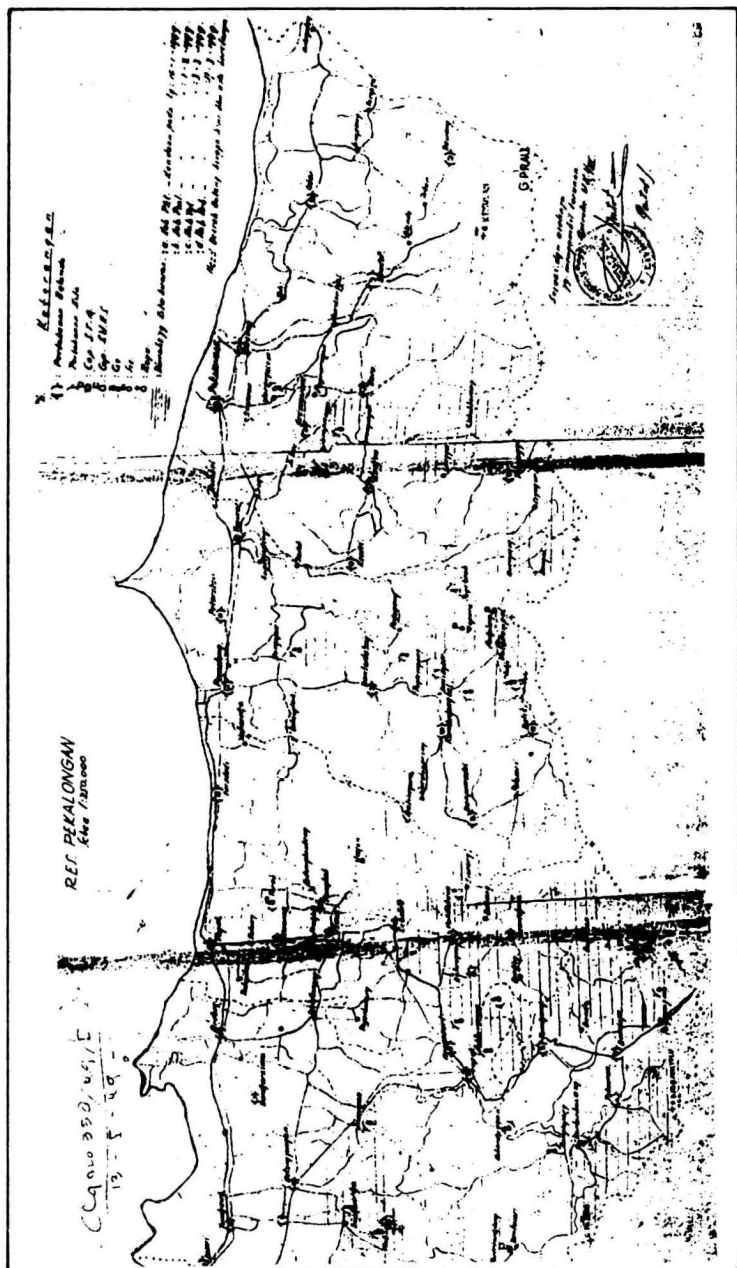
Catatan

1. B. Anderson, *Revelusi Pemoeda*. (Penerjemah Jiman Rumbo). Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
2. W.H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* (Surabaya 1926-1946). (Penerjemah Hermawan Sulistyio). Jakarta: Gramedia, 1989.
3. George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
4. Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi*. (Terjemahan Pustaka Utama Grafiti). Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
5. Robert Bridson Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta*. (Penerjemah Hasan Basri). Jakarta: Grafiti Pers, 1990.
6. Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1990.
7. Lenggong merupakan istilah khas untuk menyebut gerombolan bayaran setengah bandit untuk kawasan Pemalang dan sekitarnya. Istilah lain untuk menyebut kelompok ini adalah "jago", namun di daerah lain istilah "jago" seringkali bermakna positif yaitu orang digdaya. Para lenggong memiliki kedudukan istimewa di mata masyarakat baik karena kebaikannya maupun kejahatannya. suatu campuran antara pemenuhan kewajiban kesejahteraan sosial dan regimatisnya yang berupa "ngelmu", kedigdayaan, atau "kasekten" dengan perampokan dan pemerasan yang mereka lakukan. Mereka biasanya kebal terhadap senjata. Istilah "kecu" lebih mengacu kepada perampok atau pencuri yang murni. Sementara itu aksi *dombreg* merupakan aksi massa mengarah sosial Tiga Daerah, diirngi bunyi pukulan pada kaleng kosong atau kayu kentongan serta teriakan hinaan. Lihat Lucas, op.cit., hlm.32.
8. J. Steward, *Evolution and Ecology*. Urbana-Chicago-London: University of Illinois Press, hlm. 21-25.
9. Karl. J. Pelzer, "Peran Manusia Mengubah Wajah Alam Asia Tenggara", dalam Sajogyo, *Ekologi Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 1982, hlm. 1-22.

10. Lihat misalnya F.H. Hchewert "Rapport over Een Onderzoek van Twee Waterbronnen bij Gombang", dalam *Geneeskundige Tijdschrijft voor Nederlandsch Indie* (GTNI), 1919, hlm. 564. Lihat juga tulisan S. Kroonenberg, "Tweede Rapport over Een Onderzoek van Twee Waterbronnen bij Gombang", dalam *Geneeskundige Tijdschrijft voor Nederlandsch Indie* (GTNI), 1920, hlm. 616.
11. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo (82 th) bekas pimpinan PPKRI dan Laskar Banteng Wulung, tgl. 30 Juli 1994.
12. Wawancara dengan Bapak Karta Sapun (75 th), petani, tgl. 1 Agustus 1994.
13. Wawancara dengan Ibu Asroji (79 th), pedagang, tgl. 1 Agustus 1994.
14. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
15. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
16. Lihat *Proces Verbaal Onrust in Bagelen 1831-1832: Aankomende Brieven*. Koleksi Arsip Bagelen 1828-1894 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 6/1.
17. Banyak desa yang sengaja dibentuk untuk kepentingan penguasa baik penguasa pribumi maupun pemerintah Kolonial. lihat misalnya Onghokham, "Elite dan Monopoli dalam Perspektif Sejarah" dalam *Prisma* No. 2, 1985, hlm. 4-5. Lihat juga M.R. Fernando dan W.J. O'Malley, "Petani dan Pembudidayaan Kopi di Karesidenan Cirebon 1800-1900", dalam Anne Booth, W.J. O'Malley, Anna Wideman (Peny), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. (Penerjemah Mien Joebhaar). Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 239.
18. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
19. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
20. Sebelum datangnya Jepang uang janggolan sebesar f 1.-/th. uang alingan f 7.-/th, sedangkan bakaran f 1.-/bau setiap panen. Wawancara dengan Bapak Idris (80 th), petani, dan Bapak Karta Sapun tgl. 1 Agustus 1994.

21. Wawancara dengan Bapak Kasnari (75 th), petani, tgl. 30 Juli 1994.
22. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
23. Lihat de Vries, "Persoalan-persoalan yang dihadapi Petani Jawa", dalam Sajogyo (Peny.), *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 107-125.
24. Wawancara dengan Bapak Karta Sapun tgl. 2 Agustus 1994.
25. Lihat Aiko Kurasawa dan saya Shiraishi, "Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial: Penyerahan Padi Secara Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu", dalam Akira Nagazumi (Peny.), *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor, 1988, hlm. 83.
26. Lucas, *op.cit.*, hlm. 44.
27. *Ibid.*, hlm. 51.
28. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. (Penerjemah Hermawan Sulistyio). Jakarta: Grasindo, 1993, hlm. 421-427.
29. Lucas, *op.cit.*, hlm. 2.
30. Wawancara dengan Bapak Salim (71 th), petani tgl. 30 Juli 1994.
31. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
32. Lihat Lucas *op.cit.*, hlm. 158.
33. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
34. Wawancara dengan Bapak Suparno Atmowidodo tgl. 30 Juli 1994.
35. Budi Harni, *Perlawanan Rakyat Kabupaten Pemalang dalam Perang kemerdekaan 1947-1949*. (Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, 1984. Perhatikan juga peta dilokasi Residensi Pekalongan terlampir.
36. Lihat peta dilokasi Residensi Pekalongan terlampir.
37. Nasution, *pokok-pokok Gerilya*. Jakarta: Pembimbing, 1954.
38. Wawancara dengan Bapak Sanmuhid (76 th), anggota Laskar Banteng Wulung, tgl. 2 Agustus 1994.

39. Wawancara dengan Ibu Suti (71 th), pedagang, tgl. 1 Agustus 1994.
40. Wawancara dengan Bapak Kasnari, Karta Sapun, Ibu Jayeri (69 th), Pedagang, tgl. 2 Agustus 1994.
41. Wawancara dengan Ibu Jayeri dan Ibu Maryuni (70 th), pedagang, tgl. 1 Agustus 1994.
42. Wawancara dengan Ibu Maryuni, tgl. 1 Agustus 1994.
43. Wawancara dengan Ibu Suti, Ibu Maryuni, dan Bapak Sanmuhid tgl. 1 Agustus 1994. Hal yang serupa juga dialami oleh daerah lereng Tengger di mana para gerilyawan berkuasa di daerah pegunungan dan hutan, sedangkan tentara Belanda mendominasi daerah persawahan. Lihat R.W. Hefner, *The Political Economy of Mountain Java*. Barkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press, 1990, hlm. 73-73.
44. Wawancara dengan Ibu Jayeri, Ibu Maryuni, dan Bapak Sanmuhid. tgl. 1 Agustus 1994.
45. Lihat *Laporan Peninjauan Komandan Sub Terr. Militer Pekalongan tanggal 30 Maret 1949*. Koleksi Perpustakaan dan Museum KODAM IV Diponegoro.
46. Lihat Onghokham, "Revolusi Indonesia: Mitos dan realitas" dalam *Prisma* No. 8, 1985, hlm. 5.
47. Lihat Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektif Struktural", dalam *Prisma* No. 8 1981, hlm. 5.
48. Lucas *op.cit.*, hlm. 143.



BADAN PERJUANGAN, MOBILISASI DAN RASIONALISASI TENTARA DI SULAWESI SELATAN

Mukhlis Paeni

Sulawesi Selatan adalah sebuah jazirah yang hampir tak pernah sepi dari pergolakan. Perang Makassar di abad ke-17 disusul dengan berbagai gerakan sosial di abad ke-18, perang perlawanan lokal dari kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar pedalaman melawan Belanda sepanjang abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada perang Bone dasa warsa abad ke-XX.

Perlawanan-perlawanan pisik ini mengantarkan lahirnya berbagai organisasi perjuangan di awal abad ke-XX dan mencapai puncaknya ketika Dr. Ratulangi mendirikan organisasi S U D A R A (Sumber Darah Rakyat). Suatu organisasi yang tersusun rapi dan berbentuk badan perjuangan. Organisasi ini sangat cepat memperoleh dukungan dan pengaruh di Sulawesi Selatan. Hal ini dimungkinkan karena hampir semua raja-raja lokal yang berpengaruh dan elite tradisional Sulawesi Selatan memihak pada SUDARA.

Para tokoh SUDARA lah yang aktif mewakili Badan Perjuangan daerah ini dalam berbagai kegiatan PPKI di Jakarta menjelang 17 Agustus 1945. Mereka juga mengikuti rapat-rapat PPKI tgl. 18-19 Agustus 1945. di Jakarta. Sekembali dari Jakarta menghadiri Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat PPKI, para tokoh SUDARA lebih aktif menggalang mobilisasi mempertahankan proklamasi di

daerah “Sulawesi Selatan”. Akibatnya, arus Mobilisasi pemuda memerlukan penyalur ke berbagai Badan Perjuangan. Keinginan ini mengalir seakan tak terkendali. Luapan dinamika ini adalah perwujudan dari respon para pemuda terhadap kemerdekaan dan sebagai tanggung jawab moral mereka mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17-8-1945. Melihat realitas ini para tokoh SUDARA menciptakan wadah perjuangan tempat para pemuda menyalurkan semangat patriotismenya. Dibentuknya. Dibentuklah BPKR (Badan Pusat Keselamatan Rakyat) pada akhir September 1945 oleh Dr. Ratulangi dan PPNI (pusat Pemuda Nasional Indonesia) dibawah prakarsa Manai Sophian awal Oktober 1945.

Dalam berbagai kegiatannya BPKR dipandang sangat moderat, karena lebih mengutamakan perjuangan politik dibidang diplomasi sedang PPNI sedikit radikal, keras dan mengarah ke perjuangan melalui kontak senjata.

Sekalipun PPNI masih berada dibawah pengawasan BPKR karena tokohh utamanya Manai Sophian adalah juga tokoh BPKR, yang menjunjung tinggi perjuangan melalui diplomasi. Manai Sophian berpendapat bahwa kontak senjata dan kekerasan sangat membahayakan, karena akan berakibat korban jiwa yang sia-sia bagi ratusan pemuda-pemuda harapan bangsa. Para tokoh BPKR termasuk Manai Sophian yang juga ketua PPNI sangat menyadari adanya kekuatan senjata yang dimiliki NICA yang sangat berbahaya dan tidak seimbang jika diarahkan ke pemuda yang masih kurang pengalaman dan tidak memiliki persenjataan modern. Akan tetapi dalam PPNI, hanya Manai Sophianlah yang moderat, sementara tokoh PPNI lainnya sangat radikal. Mereka umumnya pemuda-pemuda berusia 20 tahun. PPNI lah kemudian menjadi embrio berbagai nama diberbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Memasuki era perjuangan mempertahankan proklamasi yang kian hari memperoleh tekanan dari pihak NICA, Dr. Ratulangi mengganti BPKR menjadi PKRS (Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi), Pebruari 1946. Pergantian ini dimaksudkan untuk lebih menfokuskan perjuangan mereka dibidang diplomasi yang murni. Sementara dipihak lain PPNI lebih terfokus pada perjuangan bersenjata.

Sekalipun dalam drap perjuangan, kedua kelompok ini sering terlibat dalam perdebatan atas jalan yang ditempuh, namun pada dasarnya mereka tetap sepaham bahwa tujuan mereka pada dasarnya sama "mempertahankan kemerdekaan".

Dalam memobilisasi kekuatan baik PKRS maupun PPNI atau badan-badan perjuangan bersenjata yang lahir kemudian, faktor keterlibatan para bangsawan dan elite tradisional sangat menentukan, terutama dalam memobilisasi tenaga-tenaga muda di berbagai daerah. Secara kuantitatif dengan jujur dapat dikatakan bahwa kebanyakan anak-anak muda anggota dari berbagai kelasykaran itu umumnya melibatkan diri dalam organisasi perjuangan tanpa memahami arti keterlibatan mereka secara ideologis. Mereka terlibat dan terjun ke medan perjuangan hanya karena patron mereka (*Ajoareng*), Bangsawan yang menjadi simbol primordialnya terlibat/terjun di dalamnya. Dalam keadaan demikian, menjadi kewajiban bagi mereka untuk terjun mengikuti sang patron (*Ajoareng*). Karena dalam tatanan etika tradisional Bugis-Makassar, adalah kewajiban utama seorang pengikut, menjaga harga diri *Ajoarengnya* dan jika perlu ia rela mati berkorban jiwa selama kewajiban sang *Ajoareng* padanya dan keluarganya terpenuhi. Kewajiban itu adalah menjaga siri joanya (harga diri pengikutnya), menjamin masa depan anak keturunan joanya, dan tidak membiarkan Joanya kelaparan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hampir semua tokoh kelasykaran dan badan-badan perjuangan di berbagai daerah adalah juga para bangsawan, elite tradisional setempat, yang membawa serta pengikutnya dalam organisasi perjuangan.

Satu hal yang unik dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi Selatan ialah adanya faktor pendidikan yang rendah bagi kebanyakan bangsawan. Namun keunikan ini ada hikmahnya, karena menyelamatkan mereka untuk tidak terlibat dalam kerjasama dengan Belanda. Hal ini berbeda dengan bangsawan di beberapa daerah di Indonesia lainnya yang berpendidikan tinggi dan karena bekal pendidikan itu ia terlibat dalam sistem administrasi kolonial sebagai aparat pemerintah. Di Sulawesi Selatan kebanyakan bangsawan tidak dapat direkrut dalam sistem administrasi kolonial karena pendidikannya dianggap rendah. Keadaan itulah yang menjadikannya berdiri di posisi yang berlawanan dan menjadi embrio

keterlibatannya dalam badan-badan perjuangan menentang kekuasaan asing, khususnya Belanda.

Untuk membiayai perjuangan dan memberi hidup para anggota lasykar dari berbagai badan perjuangan, para komandan yang juga patron (Ajoareng) dalam Tatanan Tradisional, menjual habis ternak, sawah, kebun, tanah dan warisan untuk membiayai perjuangan dan menopang hidup anak buahnya yang juga pengikutnya.

Hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dimana terdapat pusat kekuasaan tradisional berdiri badan-badan perjuangan dalam bentuk kelasykaran dengan berbagai nama. Dalam struktur organisasi kelasykaran, para Raja/penguasa lokal yang terdiri atas elite tradisional umumnya menjadi Komandan dalam badan perjuangan sebagai salah satu usaha mempertahankan Sulawesi yang telah dinyatakan sebagai bahagian dari RI maka pada akhir bulan Desember 1945 delegasi pemuda Sulawesi tiba di Jawa, mereka menghadap Presiden Soekarno di Yogya pada bulan Januari 1946. Mereka juga menemui Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Panglima Sudirman. Delegasi meminta kepada pemimpin RI agar memberi perhatian khusus atas Sulawesi yang berada diambang pertempuran. Hasilnya, mereka memperoleh bantuan berupa perbekalan, peralatan radio penerima dan pengirim serta surat kuasa untuk membentuk Divisi TRI-PS di Sulawesi (Tentara Republik Indonesia-Persiapan Sulawesi).

Di Jawa ketika itu telah berdiri organisasi yang bernama KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). Para pemuda Sulawesi Selatan yang datang ke Jawa dengan cepat bergabung dalam KRIS, tetapi dalam KRIS sendiri ada masalah, karena dalam keanggotaan KRIS, tampaknya pemuda-pemuda asal Minahasa, Sulawesi Utara memegang peranan penting, karena KRIS pada dasarnya adalah organisasi yang secara khusus diciptakan untuk melindungi orang-orang Minahasa dari para Republikan yang curiga pada masa lampau orang Minahasa yang dahulu banyak bekerjasama dengan Belanda. Disamping itu organisasi ini digunakan pula secara efektif sebagai badan propaganda pro Republik. Dimata sebahagian anggotanya yang berusia muda, KRIS sendiri dinilai sangat moderat dalam menghadapi Belanda, sementara dalam KRIS sendiri ada masalah, tidak hanya masalah garis perjuangan

yang dianggap kurang keras tetapi juga masalah etnis, antara Utara - Selatan.

Munculnya masalah etnik dalam badan perjuangan KRIS merupakan masalah non militer yang berdampak jauh. Di Jawa Timur JF. Warouw lebih mempertegas keetnisannya dalam KRIS dengan membentuk PERISAI (Pemuda Republik Indonesia Daerah Sulawesi) yang anggotanya hampir seluruhnya orang Minahasa (Sulawesi Utara). Melihat realitas ini Abd. Kahar Muzakkar, salah seorang tokoh KRIS (Sekretaris Pertama KRIS) membentuk pula BKI (Batalyon Kemajuan Indonesia) yang anggotanya terdiri atas anak-anak Sulawesi Selatan, yang berintikan narapidana dari Nusakambangan.

Untuk merealisasikan persetujuan MBT (Markas Besar Tentara) dalam upaya membentuk TRI-PS, para tokoh pemuda Sulawesi Selatan (Andi Mattalatta dan Saleh Lahade) yang diberi mandat membentuk TRI-PS mengajak Abd. Kahar Muzakkar pimpinan BKI untuk bekerjasama mewujudkan terbentuknya TRI-PS, karena ketika itu BKI memiliki persiapan tenaga dan senjata yang cukup. Tanggal 24 April 1946 TRI-PS resmi terbentuk. Kahar Muzakkar komandannya, A. Mattalatta wakil Komandan dan Saleh Lahade Kepala Stafnya. 23 Mei 1946 kelompok pertama dikirim ke Sulawesi. Dari 12 kali pengiriman, 8 yang berhasil mendarat. 4 kelompok gagal, ditangkap atau kembali.

Di Sulawesi Selatan mereka yang selamat membentuk TRI Divisi Hasanuddin dan Andi Mattalatta sebagai Komandan sementara, karena jabatan Komandan yang seharusnya ditangan A. Abdullah Bau Massepe tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tertangkap Belanda.

Menghadapi gerakan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh TRI Divisi Hasanuddin, Belanda kemudian mendatangkan pasukan Komando Khusus dibawah Kapten Westerling dan melakukan aksi terornya di Sulawesi Selatan. Seperti yang telah diramalkan oleh para tokoh pejuang dalam BPKR sebelumnya, kekuatan senjata yang digunakan oleh Belanda ternyata mampu menekan hampir seluruh gerakan bersenjata di Sulawesi Selatan, baik yang dilakukan oleh TRI Divisi Hasanuddin yang anggotanya berasal dari TRI-PS, maupun oleh berbagai kelasykaran. Akibatnya banyak

anggota TRI Divisi Hassanuddin dan pejuang kelasykaran terpaksa harus menyingkir ke gunung-gunung atau meninggalkan Sul-Sel dan kembali ke Jawa untuk menyelamatkan diri, untuk kemudian menyusun kekuatan baru dalam menghadapi aksi teror Belanda. Diperkirakan diantara 1000 orang pemuda yang datang ke Sulawesi Selatan dalam kelompok-kelompok ekspedisi TRI-PS, hanya sekitar 100 orang saja yang selamat kembali ke Jawa, termasuk Andi Mattalatta dan Saleh Lahade. Ini berarti Tiga Batalyon TRI-PS yang dikirim ke Sulawesi Selatan "lumpuh total" menghadapi aksi militer KNIL dibawah Kapten Westerling. Sisanya Satu Batalyon tinggal di Jawa, oleh Kahar Muzakkar dibentuk menjadi *Barisan Berani Mati*. Pasukan inilah yang melakukan operasi-operasi singkat di garis depan di daerah Madiun, Jawa Timur. Dalam banyak hal aksi yang dilakukannya diakui sangat ditakuti oleh pihak musuh. Namun seringkali dianggap sangat merugikan karena tindakannya tidak dalam garis komando yang dilakukan secara terpadu. Masalah-masalah semacam inilah yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan reorganisasi Angkatan Darat, dengan mempersatukan atau membubarkan satuan-satuan bersenjata non reguler. Untuk itulah maka organisasi/kelasykaran/badan perjuangan di luar Jawa dan Sumatra disatukan dalam *Laskar Seberang* dan dijadikan kesatuan yang diberi nama Kesatria Reserve X (KRU-X), dan kemudian dilebur ke dalam TNI dan menjadi Brigade XVI.

Sesuai dengan kehendak Komando Angkatan Darat, bahwa pembentukan Lasykar Seberang dalam Brigade XVI dimaksudkan sebagai wadah bagi para pemuda yang akan disalurkan untuk kembali ke daerah asalnya untuk berjuang melawan Belanda di daerah masing-masing. Sesuai dengan kehendak Komando Angkatan Darat, selama th 1948-1949 telah dikirim kembali ke Sulawesi Selatan beberapa orang anggota Brigade XVI.

Dalam tubuh Brigade XVI peranan orang Sulawesi Utara sangat penting. Komandannya sendiri Kolonel Lembong serta kepala stafnya Letkol JF. Warouw keduanya orang Minahasa.

Kahar Muzakkar, sangat berang dengan pengangkatan Kolonel Lembong yang disebutnya sebagai orang asing yang tidak bisa

dipercaya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kolonel Lembong dan stafnya serta membawanya ke Klaten.

Ketika JF. Warouw diangkat menggantikan Kolonel Lembong, Kahar Muzakkar diangkat sebagai wakil komandan, H. N. Ventje Samuel (Mayor) sebagai Kepala Staf, ia merasa terjepit diantara dua orang Minahasa, dan tidak pernah merasa menjadi wakil Komandan. Konsentrasi Brigade XVI yang bermarkas di Jawa Timur, tak pernah dijamah oleh Abd. Kahar Muzakkar sekalipun ia sebagai wakil Komandan. Sebaliknya ia memegang Komanda sendiri atas sisa Brigade XVI yang berkedudukan sekitar Yogya. Melihat ketidakserasian dalam Brigade XVI, pada Bulan Oktober 1949 Pimpinan Angkatan Dara mengangkat Abd. Kahar Muzakkar sebagai Komando Group Seberang (KGS). Dalam kedudukan ini ia kemudian melebur sisa Brigade XVI yang berada di bawah kekuasaan komandonya ke dalam KGS (Komando Group Seberang). Komando ini bertujuan mengirim pejuang-pejuang ke berbagai daerah di Kalimantan dan Indonesia Timur, serta mengkoordinasikannya dengan kegiatan gerilya di berbagai daerah dan bersama-sama mempersiapkan satu kekuatan teritorial, yang disebutnya KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) beranggotakan sekitar 7000 orang. Kesatuan ini disebutnya Brigade Hasanuddin.

Terbentuknya Brigade Hasanuddin yang merupakan penampungan para anggota berbagai kelasykaran di Sulawesi Selatan diwarnai oleh suasana perdebatan di kalangan para tokoh AD tentang Profil Tentara Nasional Indonesia.

Persoalan ini bersumber dari rendahnya pendidikan orang Sul Sel. dalam hubungannya dengan "Rasionalisasi Tentara".

Persoalan Rasionalisasi tentara bermula dari adanya silang pendapat yang terjadi di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Tentang profil Tentara Nasional Indonesia.

Kolonel Bambang Supeno, Kepala Staf Teritorial Jawa, disatu pihak berpendapat bahwa yang diutamakan dari seorang tentara adalah semangat revolusioner yang tinggi dan keamatan hubungan dengan rakyat. sementara itu Kolonel Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat. Dipihak lain berpendapat bahwa tentara haruslah terdiri atas orang-

orang yang cakap secara teknis dan profesional dan harus diorganisir atas hirarki yang jelas. Karena itu faktor pendidikan sangat diutamakan.

Ketika perdebatan kian memuncak di MBAD, Panglima Sudirman sakit keras dan meninggal th 1950, kelompok Kolonel Bambang Supeno terpojok dan akhirnya golongan militer profesional memegang peran di MBAD apalagi karena Menteri Pertahanan Sultan H.B. IX disebut-sebut sebagai pendukung golongan militer profesional. Dengan keadaan demikian dapat diduga akibatnya : ribuan orang gerilyawan perang kemerdekaan yang pada umumnya berpendidikan rendah bahkan banyak yang buta huruf, berhadapan dengan satu dilema yang sangat menentukan masa depannya. Persoalan inilah yang dihadapi oleh Brigade Hasanuddin Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Tetap berkarier dalam kemiliteran sebagai TNI atau kembali ke masyarakat. Pihak MBAD mengajukan syarat bagi mereka (gerilya) yang akan masuk ke TNI, antara lain :

- a. Badan : Pemeriksaan atas berat/tinggi badan, lebar dada, mata, telinga, gigi, penyakit kadas dll. Melalui tim dokter tentara.
- b. Jiwa : Kecerdasan berpikir, kelancaran berbicara (Bahasa Indonesia), pengetahuan umum, pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah tim.

Bagi sebahagian besar gerilya di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Brigade Hasanuddin persyaratan yang diajukan oleh MBAD tidak lebih dari satu kemunafikan belaka, karena jika rasionalisasi dijalankan berdasarkan syarat itu maka banyak gerilya yang tidak dapat diterima dalam TNI, karena sebahagian besar ditolak sebelum diseleksi oleh tim. Persoalan rasionalisasi ini, ternyata kemudian membawa "bencana" besar, yang tidak hanya menimpa masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan saja tetapi juga Indonesia Timur pada umumnya.

Pada tanggal 22 Juni 1950 Abd. Kahar Muzakkar tiba di Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugasnya. Ia berkeliling dan mendatangi kesatuan-kesatuan gerilya untuk menyatukan mereka agar mau menerima syarat yang diajukan pemerintah. Sementara itu Kahar mengajukan pula syarat agar mereka diakui sebagai prajurit dulu.

barulah rasionalisasi dijalankan kemudian. Karena adalah hak sejarah mereka untuk diakui sebagai TNI. Setelah itu, apakah mereka masih dibutuhkan atau tidak itu soal kemudian. Sekembali dari perjalanannya menjumpai kesatuan-kesatuan gerilya di pedalaman, Kahar mengajukan usul kepada Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Territorium Indonesia Timur agar gerilya diterima sebagai tentara dan sedikitnya berkekuatan satu brigade dan diresmikan dalam satu brigade ini tidak terpecah-pecah dalam sejumlah satuan-satuan yang berbeda-beda. Mereka yang tidak dapat diterima akan dimasukkan dalam satu "depot" khusus sambil menunggu untuk dikembalikan kemasyarakat.

Usul KGSS lewat Kahar tidak dapat diterima oleh Kawilarang. Panglima Teritorial Indonesia Timur Kawilarang bahkan mengeluarkan pengumuman untuk membubarkan KGSS. Alasannya adalah karena persyaratan resmi untuk menjadi tentara, secara umum tidak dapat dipenuhi oleh anggota gerilya (KGSS).

Kawilarang sebagai seorang militer profesional dengan latar belakang berpendidikan militer yang baik, sulit menerima usulan Kahar dan bahkan dianggapnya lucu, dan tidak masuk akal karena penempatan dalam tugas militer baginya haruslah berdasarkan garis komando dan hirarki kemiliteran yang jelas. Sedangkan usul Kahar lebih mengutamakan ikatan emosional, kekeluargaan dan ikatan sosial yang lebih mengarah ke hubungan Bapak-Anak dalam patronklien atau *Joa-Ajoareng* (Bhs. Bugis), bukan hubungan Komandan Bawahan dalam militer yang sesungguhnya.

Tgl 1 Juli 1950 Kahar mencopot tanda pangkat dipundaknya dan semua simbol-simbol kemiliteran yang dimilikinya atas kemauannya sendiri dan kemudian menyerahkannya dengan hormat kepada Kolonel Kawilarang, Panglima Teritorial Indonesia Timur. Sejak itu ia menyatakan diri keluar dari tentara dan bergabung bersama kesatuan gerilya Sulawesi Selatan di hutan-hutan pedalaman Sulawesi Selatan.

Apa yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar ini adalah manifestasi dari puncak perdebatan dalam MBAD sendiri, dan perbuatan Kahar itu ternyata tidak dapat dukungan secara langsung dari perwira-perwira tinggi di MBAD, termasuk Kolonel Bambang Supeno, karena pada dasarnya sejak kematian Panglima Sudirman, corak militer profesional

yang ditanamkan oleh Nasution mendominasi MBAD, dimana Kawilarang termasuk salah seorang pendukungnya yang sangat keras.

“Satu kisah militer yang sangat menarik di th 1950 an ketika Batalyon 110 Seulawah Jantan di bawah Kapten Hasan Saleh diperintahkan oleh KSAD Kolonel Nasution untuk berangkat ke Indonesia Timur, tepatnya ke Sulawesi Selatan untuk berhadapan dengan dua batalyon “KGSS”, Batalyon Batu Putih dan Batalyon Empat Puluh Ribu”. Pemilihan Batalyon 110 oleh KSAD bermakna ganda. Disatu sisi dari segi pengalaman militer Batalyon 110 mutunya mungkin sama dengan prajurit-prajurit KGSS yang berada di bawah Kahar. Apakah ada maksud tertentu dari KSAD sehingga kedua kekuatan ini diperhadapkan di medan perang, mungkin. Disisi lain pihak Batalyon 110 dianggap memiliki banyak kesamaan dalam banyak hal sosiokultural dan religi dengan pasukan KGSS. Sebahagian dari dugaan ini ternyata betul, karena ketika Batalyon 110 Seulawah Jantan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan operasi militernya, ternyata Batalyon ini lebih dahulu dilucuti seluruh persenjataannya, sehingga dalam keadaan persenjataan yang seadanya, kata lain dari tak bersenjata sama sekali ia diterjunkan ke medan operasi. Satu keganjilan dalam operasi militer, bagaimana mungkin mengirim tentara ke medan perang tanpa senjata. Panglima Kawilarang mengatakan : Bagaimana hal itu bisa terjadi ? Baik Kawilarang maupun Hasan Saleh sampai sekarang tidak pernah memberi penjelasan atas peristiwa lucu itu. Akan tetapi masalahnya sebenarnya cukup jelas. Semua ini terjadi dibawah rekayasa wakil KSAD, Kolonel Bambang Supeno yang dikenal sebagai salah seorang perwira tinggi di MBAD sahabat dekat Kahar Muzakkar.

Dalam kedudukannya sebagai wakil KSAD Bambang Supeno tidak dapat menghalangi pengiriman Batalyon 110 Seulawah ke Indonesia Timur untuk menumpas Kahar di Sulawesi Selatan. Karena pengiriman pasukan sepenuhnya berada ditangan Kepala Staf Angkatan Darat, Kolonel Nasution. Bambang Supeno, tidak ingin melihat sahabat dekatnya terbunuh dalam operasi militer. Karena itu pasukan boleh berangkat ke medan perang tetapi soal logistik, dan senjata itu soal lain, keduanya ada ditangan Bambang Supeno. Melalui wibawanya itu ia mencoba menolong Kahar, mungkin tindakannya ini merupakan pertolongan untuk terakhir kalinya kepada seorang sahabat lama.

Karena itu bantuan senjata untuk Seulawah Janan distopnya dan membiarkan Hasan Saleh meninggalkan Tanjung Priok menuju Makassar untuk satu operasi militer tanpa senjata berarti.

Akan tetapi sebenarnya bukan nasib Hasan Saleh yang beruntung melainkan Nasution dan para militer profesional di MBAD dan menteri Pertahanan yang sangat cerdas. Pemilihan Batalyon 110 Seulawah Jantan dari Aceh ke Sul-Sel adalah bahagian dari taktik militer yang sudah dipertimbangkan sedalam-dalamnya. Nasib Hasan Saleh dengan Seulawah Jantannya sangat beruntung karena dengan kondisi persenjataan yang sangat minim, Batalyon 110 itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan KGSS yang berkekuatan 11000 orang dengan persenjataan sebanyak 4000 pucuk dengan berbagai jenis persenjataan bukan kekuatan kecil yang dapat disepelekan apalagi ditambah dengan pengalaman tempur yang kaya. Bisa dibayangkan jika MBAD mengirim pasukan dari Jawa ketika itu, maka mungkin akan terjadi perang yang amat mengerikan dan korban yang berjatuhan di kedua belah pihakpun tidak dapat dihindari. Prajurit-prajurit Batalyon 110 Seulawah Jantan yang umumnya beragama Islam dan sangat fanatik serta taat beragama. Merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh MBAD dalam operasi militernya.

Keadaan ini ternyata banyak menolong Batalyon 110 untuk menutupi kekurangan senjata yang dimilikinya. Karena itu suatu "keajaiban" yang terjadi, Seulawah yang tadinya dikirim untuk operasi militer menumpas Kahar, ternyata menjalin persahabatan di lapangan. Kahar yang secara militer memiliki jumlah pasukan dan persenjataan yang besar berbaik-baik dengan Seulawah dan bahkan meminta Hasan Saleh menjadi penengah dan melimpahkan tanggung jawab kepada Hasan Saleh untuk memperjuangkan nasib 11000 lasykar KGSS.

Rujuk militer yang terjadi antara Seulawah dan KGSS rupanya sudah dalam skenario yang dipikirkan semula oleh Nasution dan ini tampaknya merupakan rekayasa yang dilakukannya untuk menjaga perasaan Bambang Supeno wakilnya dan kelompok yang sejalan dengan Bambang di MBAD, sementara Nasution berupaya untuk menyelesaikan ekor perselisihan pendapat dalam MBAD dengan menghindari konflik antara sesama militer. Nampaknya Nasution masih

ingin menyelesaikan soal Kahar dengan damai ibarat menarik benang dari tepung. Karena masalah Kahar sebenarnya bukan semata-mata masalah gerilya, tetapi bahagian dari persaingan berbagi kedudukan pada pucuk pimpinan di MBAD dan dalam MBAD sendiri.

Sekalipun pada mulanya Kawilarang tidak menyetujui taktik terbaik-terbaik antara Seulawah dengan KGSS, tapi pada akhirnya iapun menyerahkan tanggung jawabnya kepada Hasan Saleh untuk menangani KGSS, dan ia berhasil. Pasukan KGSS pun turun dari gunung-gunung, tak ubahnya kawanannya lebah yang pindah sarang.

Dengan turunnya pasukan KGSS dan telah menempati penampungan yang disiapkan, maka selesailah tugas militer Seulawah di Sul-Sel selanjutnya masalah gerilya akan ditangani oleh satu Komando penyelesaian tersendiri dari Pimpinan-pimpinan Gerilya di Makassar. Merekalah yang akan menyelesaikan masalah rasionalisasi dan pengembalian ke masyarakat pasukan KGSS.

Satu bulan setelah pasukan KGSS ditampung di Barak penampungan, penyelesaian belum tercapai antara penguasa militer dan pihak Komando. Pihak Komando dan sebahagian perwira setuju mentoleransi permintaan Kahar untuk membentuk resimen baru dengan nama Resimen Hasanuddin untuk anak buahnya yang ingin melanjutkan karier militernya dan menyediakan tempat penampungan/penyaluran dalam masyarakat bagi mereka yang dikembalikan ke masyarakat.

Sementara itu sebahagian lagi berprinsip tidak akan pernah menerima tuntutan gerilya, karena bila itu dilakukan itu berarti menyerah. Bagi mereka dekretnya Kawilarang 1 Juli 1950 adalah satu penggarisan yang sangat tepat :

1. Bahwa kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan lain-lain organisasi-organisasi gerilya di luar APRIS dengan ini dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkannya kembali organisasi gerilya dimaksud diatas, termasuk larangan tentara.
2. Semua pihak yang bersangkutan kami perintahkan untuk mengakhiri pekerjaan peleburan/peralihan organisasi gerilya

ditempatkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Kepada mereka, bekas anggota gerilya yang sampai sekarang menuruti peraturan kami dan telah aktif membantu gerakan operationel/politionel dari APRIS setempat, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas sikap dan jasa-jasa mereka terhadap negara, nusa dan bangsa.

Tetapi tampaknya bukan hanya perbedaan pendapat yang menyebabkan terkatung-katungnya penyelesaian masalah gerilya ini. Dana yang besar bagi penyelesaian masalah gerilya tidak dapat mengendalikan nafsu korupsi dari beberapa pihak yang terlibat dalam masalah ini. Tampaknya masalah korupsi ini lebih parah akibatnya dan membuat persoalan gerilya menjadi semakin rumit dan tak terselesaikan.

Dua bulan setelah KGSS dilokasikan keadaan mereka berubah dengan sangat drastis. Penderitaan ditempat penampungan mulai terasa dan kian hari semakin bertambah parah. Mereka bukan lagi sekumpulan manusia yang hidup di barak-barak, melainkan seperti kawanan hewan yang hidup dalam kandang yang tidak beratap. Wajah mereka yang berseri-seri penuh harapan sewaktu turun gunung, kini pucat dengan ekspresi putus asa. Sementara penyakit beri-beri mulai tampak gejala-gejalanya. Ketika keadaan yang menyedihkan itu dilaporkan kepada Kawilarang dengan alasan bahwa alangkah sayangnya jika mereka kembali ke hutan, ibarat burung dalam sangkar kemudian lepas dan terbang kembali. Keadaan gerilya yang menyedihkan itu tidak menggoyahkan hati Kawilarang. Ia tetap berteguh sebagai Panglima Perang sejati "Biarkan mereka kembali ke hutan" saya akan gempur mereka dalam waktu tiga bulan hingga mereka tidak akan berkutik lagi. Apa yang terjadi kemudian, persoalan ini baru selesai setelah 15 tahun dengan menelan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Mengapa masalah ini baru dapat diselesaikan setelah selang 15 th lamanya. Apakah tentara (TNI) tidak mampu menjalankan operasi militer dengan baik, atau gerombolan KGSS yang kemudian menjelma menjadi TII dibawah Darul Islam sangat kokoh untuk ditaklukkan. Tampaknya persoalannya bukan terletak pada operasi militer yang ada dalam tubuh MBAD sendiri.

Karena itu ketika A.Yani diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, maka bertambah jelaslah bahwa perang konsep di MBAD berakhir dan sebagai bukti usainya perang konsep itu ialah keputusan yang diambil Ahmad Yani bahwa tidak ada perundingan lagi dengan pemberontak dan situasi harus dijernihkan. Disiplin militer harus ditegakkan. Tidak hanya kepada Kahar sasarannya, tetapi juga kepada perwira-perwira militer yang dianggap tidak disiplin. Sejak saat itulah TNI mulai menemukan dirinya dalam wujud militer profesional.

Daftar Pustaka

- Barbara Sillar Harvey, *PERMESTA, Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta :Grafiti Pers, 1984, Cet. I.
- Barbara Sillar Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989, Cet. I.
- Cornelis Van DIJK, *Darul Islam*, Jakarta : Grafiti Pers, 1983, Cet. I.
- Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi, *Propinsi Sulawesi*, Makassar : Departemen Penerangan Sulawesi, 1953.
- Leirissa. R.Z PRRI PERMESTA, *Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1991, Cet. I.
- Mangemba, H.D, *Kenalilah Sulawesi Selatan*, Jakarta : Timun Mas, 1956.
- Pawiloy, Sarita *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan*, Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 1985-1989, 1987.
- Salah. Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1992, Cet. I.

HIZBULLAH-SABILILLAH DIVISI SUNAN BONANG DALAM REVOLUSI KEMERDEKAAN : Lahir dan Pertumbuhannya

Tashadi

I

Sejak kemenangan Jepang terhadap Belanda di Indonesia pada tahun 1942, maka terjadilah perubahan kekuasaan di Indonesia yakni dari pemerintah Hindia Belanda menjadi pemerintah Militer Jepang dan selanjutnya Jepang berusaha menduduki dan menguasai wilayah Indonesia. Pada jaman pemerintahan Militer Jepang ini kekuasaan dipegang oleh pembesar bala tentara Jepang.¹ Selanjutnya wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu :

- (1) Pemerintahan militer angkatan darat atau tentara ke-25 untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi.
- (2) Pemerintah militer angkatan darat atau tentara ke-16 untuk Jawa, Madura, Bali berkedudukan di Jakarta.
- (3) Pemerintah militer angkatan laut atau Armada Selatan Kedua untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang, sekarang).

Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas *Gunseireiken* (Panglima tentara) dan disebut Saiko Syikikan sebagai pucuk pimpinan. Di bawah Saiko Syikikan adalah *Gunseikan* (Kepala pemerintahan militer). Panglima pemerintahan militer ke-16 di Jawa

pertama adalah Letnan Jenderal Hitosyi Imamura, sedangkan kepala pemerintahan militernya adalah Mayor Jenderal Seizaburo okosaki. Staf pemerintahan militer pusat dinamakan Gunseikanbu yang terdiri atas 5 macam *Bu* (semacam departemen) yaitu *Somubu* (Departemen Dalam Negeri) *Zoimubu* (Departemen keuangan), *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, Pertanian dan Kerajinan Tangan). *Kotsubu* (Departemen Lalu-lintas) dan *Syihobu* (Departemen Kehakiman).²

Pada tanggal 8 Agustus 1942 pemerintah Jepang membentuk 17 daerah pemerintahan yang tertinggi di pulau Jawa yaitu *Syu* yang terdiri dari Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. *Syu* Merupakan pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi di bawah pimpinan *Syucokan* yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur. *Syucokan* memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif. Khususnya untuk Yogyakarta dan Surakarta dibentuk daerah istimewa yang disebut *Koci*. Sama halnya dengan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, maka pemerintah militer Jepang dalam menanamkan kekuasaannya di Indonesia banyak melakukan perubahan-perubahan yang berarti tidak baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Kolonialisme Belanda semata-mata hanya digantikan oleh pemerintahan militer Jepang.³

Pada waktu pemerintahan militer Jepang keadaan rakyat makin tertekan dan makin sengsara. Apalagi dengan adanya kondisi angkatan perang Jepang di laut Pasifik yang semakin terdesak akibat serangan pasukan Sekutu yang sangat gencar dengan semboyan, *I Shallreturn*, maka rakyat Indonesia semakin tertekan karena dipaksa membantu menghadapi serangan Sekutu.

Dalam keadaan sulit dan terdesak pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi rakyat Indonesia. Mula-mula membentuk gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942 dengan semboynannya yakni "Jepang Pemimpin Asia", "Jepang Cahaya Asia". Gerakan ini tidak mendapat dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia.

Sementara itu pemerintah militer Jepang menaruh perhatian dan kepercayaan kepada umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Para penguasa Jepang mempunyai keyakinan bahwa orang-orang Islam sangat fanatik dan anti terhadap orang-orang Barat, sehingga dapat diajak bekerja sama, asal agama mereka dihormati.⁴ Oleh karena itu pemerintah militer Jepang banyak memberikan peluang dan kedudukan kepada orang-orang Islam. Seperti misalnya umat Islam dibebaskan dari kewajiban *Seikerei* kepada Maharaja Jepang. Disamping itu untuk mengambil simpati terhadap golongan Islam agar mendukung rencana Jepang di Indonesia, maka pada tanggal 13 Juli 1942 Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) dihidupkan kembali dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1943 diganti dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).⁵

Jepang juga memobilisasi para pemuda untuk digunakan dalam angkatan bersenjata Jepang dan digunakan dalam organisasi pertahanan sipil. Kemudian dibentuklah Seinendan (barisan pemuda yang berumur 14 - 22 tahun) pada tanggal 29 April 1943 dan Keibodan (barisan pembantu polisi) pada tanggal 29 April 1943. Para anggota Seinendan dan Keibodan itu mendapat latihan kemiliteran.

Disamping itu Jepang juga membentuk *Heiho* (Pembantu Prajurit) pada tanggal 22 April 1943. *Heiho* semula merupakan tenaga pekerja kasar, tetapi kemudian dikerahkan untuk tugas-tugas bersenjata dan merupakan barisan pembantu tentara yang menjadi bagian langsung dari kesatuan angkatan darat dan angkatan laut. Anggota *Heiho* adalah pemuda-pemuda yang berumur antara 18 tahun - 30 tahun. Sebagian masyarakat pada umumnya tidak tertarik memasuki *Heiho* karena anggota *Heiho* sebagian ada yang dikirim ke luar Jawa maupun ke luar Indonesia seperti Birman.⁶

Pemerintah militer Jepang selain membentuk barisan militer juga membentuk organisasi militer yang disebut Pembela Tanah Air (PETA) pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembela Tanah Air dibentuk atas dasar surat permohonan Gatot Mangkuprojo yang ditujukan kepada *Gunseikan* pada tanggal 7 September 1943, yang antara lain meminta supaya bangsa Indonesia dipernahkan membantu mempertahankan wilayah Indonesia. Tentara PETA merupakan tentara teritorial yang

memiliki kewajiban mempertahankan masing-masing daerahnya. Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air ini diatur dalam Osamu Sirei No. 44. Para pemuda yang mendaftarkan untuk menjadi anggota PETA mendapat latihan di Bogor. Pemuda-pemuda Islam yang menjadi anggota peta dan mengikuti latihan di Bogor adalah Sudirman, Mulyadi Joyomartono, Aruji Kartawinoto, Kiai Khotib, Iskandar Idris, Iskandar Sulaiman, Kiai Basuni, Mr. Kasman Singodimejo, Yunus Anis, Kiai Idris, Kiai Haji Mochfuda, Kiai Kholiq Hasyim, Kiai Sami'un dan sebagainya. Mereka itu pada umumnya banyak yang dilantik menjadi Daidanco dan shodanco dan akhirnya pada masa kemerdekaan, mantan tentara Peta ini menjadi BKR (Badan Keamanan Rakyat). Sementara itu para pemimpin Islam cukup tanggap terhadap situasi peperangan di Laut Pasifik dimana angkatan perang Jepang makin terdesak. Oleh karena itu tokoh-tokoh Masyumi yang terdiri dari KH. Mas Mansur, Moh. Adnan, H. Abdul Karim, Amarullah, H. Cholid, KH. Abdul Majid, H. Yakub, KH. Jumaidi, H. Moh. Sadri, H. Muchtar, KH. Mohammad Adnan, pada tanggal 13 September 1943 datang ke kantor Gunseikanbu mengajukan surat permohonan kepada pemerintah militer Jepang untuk mendirikan barisan perjuangan pemuda Islam yang diberi nama Hizbullah. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah militer Jepang, dan pada tanggal 14 September 1944 Hizbullah didirikan secara resmi di Jakarta.⁷ Adapun tujuan didirikannya Hizbullah pada hakekatnya adalah untuk membentuk masyarakat baru sebagai hamba Allah yang berbakti dan taat kepada nusa dan bangsa, serta sebagai cadangan tentara sukarela PETA dalam usaha membantu peperangan melawan pasukan Sekutu.

Selanjutnya pada bulan Januari 1945 diumumkan susunan pengurus Hizbullah, sebagai berikut :

Ketua	:	KH. Zainul Arifin
Wakil Ketua	:	Mohammad Roem
Pengurus Umum	:	1. S. Surowijono 2. Sujono
Urusan Propaganda	:	1. Anwar Tjokroaminoto 2. KH. Zarkasi 3. Masyhudi

Urusan Perencanaan	:	1. Sumarjo Mangunpuspito 2. Jusuf Wibisono 3. Mohammad Djunaidi
Urusan Keuangan	:	1. RHO. Djunaidi 2. Prawoto Mangunsasmito

II

Pemerintah militer Jepang mengizinkan berdirinya Hizbullah yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam baik yang berasal dari lingkungan masyarakat maupun yang berasal dari lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia, karena mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Menurut keyakinan pemerintah militer Jepang unsur Muslim di dalam pergerakan nasional Indonesia merupakan unsur yang secara politik paling dapat dipercaya oleh pihak Jepang, karena mereka merupakan kelompok yang anti Barat dan anti kafir. Di samping itu, Jepang menganggap bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki loyalitas yang tinggi terhadap para pemimpin Islam.

Oleh karena itu Jepang mengadakan pendekatan terhadap golongan Islam dan memberi kesempatan kepada pemimpin Islam untuk mengembangkan peranannya dalam meningkatkan posisi agama Islam serta memberikan prestise sosial. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para pemimpin Islam di Indonesia dapat mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang.⁸

Sementara itu setelah para ulama berhasil merekrut para pemuda untuk berjuang melalui badan perjuangan melalui badan perjuangan Hizbullah, maka mereka dilatih pada suatu pusat latihan yang terletak di Ciburusa, ± 28 km dari Bogor, Jawa Barat. Pusat latihan di buka oleh Abdul Kahar Muzakir pada tanggal 28 Februari 1945, dan disaksikan oleh tokoh Masyumi antara lain KH. Wahid Hasyim dan Moh. Natsir. Latihan diikuti kurang lebih 500 orang pemuda Islam berasal dari berbagai daerah Jawa yakni karesidenan Banten, Jakarta, Sukabumi, Priangan, Purwakarta, Cirebon, Bogor, Pekalongan, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Malang, Surabaya, Besuki. Khusus untuk Madura diadakan latihan

tersendiri.⁹ Latihan ini berlangsung selama $\pm$ 3 bulan dari tanggal 28 Pebruari hingga 15 Mei 1945. Pelatihanya berasal dari serdadu-serdadu Jepang yang dibantu sejumlah instruktur Peta dan diawasi oleh perwira Jepang yang bernama Yanagawa. Sedang dibagian rohani pengajarnya antara lain KH. Mustofa Kamil dari Jawa Barat, KH. Mawardi dan Kyai Tohir Dasuki dari Surakarta, Kh. Zarkasi dari Ponorogo. Kyai Mursid dari Pacitan, Kiai Sahid dari Kediri, KH. Abdul Halim dari Majalengka, Kiai Roji'un dari Jakarta.¹⁰

Latihan di Cibarusa yang berlangsung selama tiga bulan itu meliputi bidang jasmani dan rohani. Di bidang jasmani diajarkan cara mencegah serangan dari udara, mengatasi bahaya kebakaran, latihan keprajuritan, baris-berbaris dan cara melindungi penduduk. Sedang bidang rohani diajarkan tafsir Al Qur'an, keimanan, dan sejarah nabi-nabi. Latihan di bidang rohani diajarkan dengan tujuan untuk membiasakan pemuda Islam berjuang dijalan Allah SWT., meningkatkan ibadah dan keimanan serta rela membantu berbagai kepentingan umum. Di samping itu juga untuk mendidik semangat jihad fii sabilillah. Latihan di Cibarusa ini berlangsung secara teratur, tertib dan sangat disiplin. Pada pukul 04.00 mereka sudah bangun dan langsung menunaikan sholat Subuh, selanjutnya melakukan gerakan kebersihan di lingkungan asrama, dan disusul dengan senam pagi model Jepang yang dinamakan "taiso" hingga pukul 06.00. Kemudian dilanjutkan apel pagi dan mengucapkan janji kesetiaan secara Islam disertai takbir tiga kali. Pada pukul 08.00-10.00 diadakan pengajian dan ceramah agama Islam, dan dilanjutkan dengan latihan kemiliteran dari pukul 10.00 - 12.00. Setelah makan siang dan shalat Dhuhur, dilanjutkan latihan kemiliteran kedua hingga pukul 15.00. Pada sore hari, setelah shalat Ashar diadakan latihan bela diri pencak silat dan olah raga. Pada malam hari diadakan apel malam diberakannya masing-masing, dan belajar tentang cara mengadakan penyerangan. Pada hari pertama latihan para pemuda diberi seragam warna biru laut, lengan pendek, celana komprang, topi terbuat dari bambu anyaman daerah Tasik serta simbol Hizbullah berupa bulan sabit dan bintang berwarna kuning dipasang di tengah topi.¹¹

Demikianlah latihan-latihan kemiliteran yang diberikan kepada pemuda-pemuda Islam yang nampak sangat berat dengan disiplin yang

keras dan ketat serta makan seadanya. Latihan-latihan itu diberikan guna memberikan semangat dan motivasi serta menyadarkan para pemuda Islam bahwa perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu memang berat.

Pada 15 Mei 1945 latihan di cibarusu itu ditutup secara resmi oleh KH. Wahid Hasyim dan Abdul Kahar Mudzakkir, keduanya dari Masyumi. Selanjutnya para pemuda yang telah mengikuti latihan di Cibarusu itu kembali ke daerah asalnya dan mendirikan cabang-cabang Hizbullah di daerahnya masing-masing. Karesidenan Surakarta yang mengirimkan 25 pemuda Islam untuk ikut latihan Hizbullah yang pertama di Cibarusu itu berasal dari Madrasah dan pondok pesantren. Mereka itu adalah Dimyati Muid (Mualimin), Jamhari Ikhsan (Mambaul Ulum), Muhammad Munawar (Mambaul Ulum), Jumika (Mualimin), Zaed (Mambaul Ulum), A. Bakri (Al Islam), Muhammad Shodiw (Mambaul Ulum), Sokimin HS (Mualimin), Jaelani (Mambaul Ulum), Sukardi Ciptosuwarno (Mambaul Ulum), Suwarno (HIS), Umar Syahid (Mambaul Ulum) Dimyati Soleh (Mambaul Ulum), Usman (Mualimin), Abdulmadjid HS (Mambaul Ulum), H. Abdul Madji/BKN (Mualimin), Sunarto (Mualimin), Syahri (Al Islam), Musni Arifin (Al Islam), Ahmad Subaiyo (Mambaul Ulum), Rojimun (Mambaul Ulum).¹²

Sementara itu setelah mereka tiba kembali di daerah Surakarta pada tanggal 26 Mei 1945 disambut dengan meriah oleh ummat Islam Surakarta bertempat di Masjid Agung Surakarta. Pada pertengahan bulan Juli 1945 diadakan pembicaraan pembentukan Hizbullah Surakarta, dan kemudian dilanjutkan dengan latihan kader Hizbullah di asrama Kustati yang selesai pada bulan Agustus 1945. Pembentukan Hizbullah Surakarta itu dipimpin oleh Muhammad Munawar. Tanggapan para pemuda Islam Surakarta sangat positif, dan mereka berasal dari madrasah Mambaul Ulum, Tsanawiyah, Salawiyah, Kalliyat, Mualimin, dan juga dari pondok pesantren Jamsaren, kacangan, Boyolali, dan lain-lain yang semuanya ikut mendaftarkan diri menjadi anggota Laskar Hizbullah Surakarta.

Adapun pusat latihan yang sekaligus merupakan markas yang pertama untuk sementara dipilih gedung Sie Dian Hoo Purwosari

(sekarang Purwosari Plaza). Tetapi karena dipandang kurang strategis, kemudian dipindah ke markas yang baru yakni di rumah Sakit Kustati Surakarta, yang disamping penduduk sekitarnya mayoritas beragama Islam juga terdapat lapangan untuk latihan dan telah mempunyai masjid.

Dalam pada itu Sabilillah yang pusatnya di Malang munculnya lebih belakang daripada Hizbullah. Prakarsa untuk mendirikan muncul pada waktu kongres pertamma Masyumi yang diadakan sesudah proklamasi yang berlangsung pada tanggal 7 dan 10 November 1945 di Yogyakarta. Kongres itu memutuskan bahwa Masyumi memerlukan badan perjuangan di luar kesatuan-kesatuan Hizbullah yang bersifat militer untuk mobilisasi penduduk yang beragama Islam secara umum. Adapun pengurus pusat barisan Sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur.¹³

Sabilillah dan Hizbullah tidak memiliki perbedaan yang tajam dan tegas, bahkan satuan-satuan gerilya Islam disebut Hizbullah-Sabilillah tanpa perbedaan fungsi mereka yang berlainan.¹⁴ Hanya saja barisan Hizbullah terdiri atas kesatuan pejuang ummat Islam yang dikoordinasi di asrama, sedangkan barisan Sabilillah tersebar di masyarakat dan dikoordinir melalui susunan organisasi di kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian Hizbullah dan Sabilillah di Surakarta itu sama. Pada mulanya barisan Sabilillah tersebar di masyarakat dan terkoordinasikan lewat susunan organisasi di kelurahan dan kecamatan yang beranggotakan orang tua, meskipun akhirnya Sabilillah mempunyai pasukan sendiri yang menggantikan orang-orang tua itu. Adapun barisan Hizbullah terdiri atas kesatuan pejuang ummat Islam yang berada di asrama.¹⁵

Sementara itu situasi negara yang makin berbahaya sehubungan datangnya tentara Sekutu yang tergabung dalam South East Asian Command (SEAC) dan kurangnya kekuatan Islam yang lebih terorganisasi, maka pada tanggal 25 Maret 1947 Hizbullah Jawa dan Madura mengadakan konferensi kilat di Malang yang bermaksud untuk membicarakan rencana Markas Tertinggi melaksanakan reorganisasi dua atau tiga daerah menjadi satu Divisi, dengan nama masing-masing. Misalnya penyatuan divisi Magelang dan Yogya dengan nama Divisi

Sultan Agung, Semarang dan Surakarta dengan nama Divisi Sunan Bonang. Khususnya Hizbullah Sabilillah Surakarta dan Semarang yang ditetapkan menjadi Divisi IV, kemudian pada tanggal 18 April 1947 secara resmi bersatu dengan nama Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang. Markas Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang berkedudukan di Surakarta dengan komandan Divisi, Muhammad Munawar. Nama Sunan Bonang diambil dari nama salah seorang Wali Sanga yakni Sunan Bonang yang nama lengkapnya adalah Maulana Makhdum Ibrahim. Dengan menggunakan nama Sunan Bonang dimaksudkan agar para pejuang Islam yang sejati.¹⁶

Lasykar Hizbullah Sabilillah adalah merupakan suatu organisasi rakyat yang bersifat mmiliter dan bergerak dalam perjuangan bersenjata. Pada waktu itu struktur organisasi Lasykar Hizbullah Sabilillah masih sederhana, namun demikian memiliki disiplin yang tinggi dan tangkas sehingga mampu berperan sebagai pasukan pendukung yang tangguh. Kesederhanaan organisasi yang dimiliki Lasykar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang nampak dalam penerapan struktur organisasi antara tingkat pusat, Cabang, dan ranting. Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang pusat meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah yang struktur organisasinya terdiri atas Komandan, sekretaris, staf umum, staf penghubung, staf perlengkapan, dan staf persenjataan. Sedang Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang cabang dan ranting yang terdapat di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak seluruhnya menerapkan struktur seperti yang ada di pusat. Dalam organisasi Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang juga memiliki nama jabatan seperti batalyon, kompi, peleton dan seksi. Akan tetapi nama-nama jabatan itu tidak dilengkapi dengan nama-nama kepangkatan. Laskar Hizbullah Sabillah Divisi Sunan Bonang terdiri dari satu Divisi yakni Divisi IV, dan memiliki dua batalyon yaitu Batalyon 18 yang bermarkas di rumah sakit Kustati dengan komandan Jumika yang kemudian digantikan oleh Muhammad Munawar, dan Batalyon 19 yang bermarkas di Purwosari dengan Komandan Gafar Ismail.¹⁷

Dalam struktur organisasi Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang yang bertanggungjawab sebagai komandan pelaksana tugas-tugas operasional dan teknis pertempuran adalah Muhammad

Munawar. Komandan bertanggungjawab terhadap jalannya aktivitas Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang. Dalam melaksanakan tugasnya komandan dibantu oleh :

Komandan Batalyon 18	: Jumika
Komandan Batalyon 19	: Gafar Ismail
Skretaris	: Sakimin Hanang Siswoyo
Staf Umum	: Muh. Shodiq
Staf Tata Usaha	: Muh. Usman
Kuangan	: Muh. Thoyib
Penghubung	: Abdul Madjid
Penerangan dan pendidikan	: Dimyati Mungit, Sarwono Projodikoro
Perlengkapan	: Abdul Jalil, Ali Atmojo
Persenjataan	: Suyoto

Di daerah kabupaten terdapat Batalyon Hizbullah seperti misalnya di Boyolali, Sragen, Klaten, dan di tingkat kecamatan terdapat Kompi Hizbullah. Adapun cara mencari bantuan untuk kehidupan Laskar Hizbullah Sabilillah menggunakan surat dinas dari pemerintah (Gubernur Militer) keperusahaan-perusahaan yang diusahakan oleh petugas dari perbekalan umum berupa garam, jagung, kacang, dan kedelai. Sedang bantuan dari ummat Islam berupa beras, lauk-pauk.¹⁸

Anggota Laskar Hizbullah Sabilillah berjumlah sekitar 3000 pemuda Islam yang berumur antara 17 tahun hingga 24 tahun. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Laskar Hizbullah sangat sederhana yaitu antara lain harus beragama Islam, menjalankan sholat lima waktu, dihimbau dapat membaca Al Qur'an, berakhlak baik, berbadan sehat, mempunyai semangat yang tinggi dan harus mau diasramakan.¹⁹ Anggota Laskar Hizbullah Sabilillah mendapat kartu anggota sebagai tanda pengenalan, dan mendapatkan seragam yang terbuat dari kain blaco yang berwarna hijau atau ada pula yang berwarna coklat dan to. Pada topi dan baju seragamnya diberi emblin dengan warna dasar hijau dan logo "bulan sabit" berwarna kuning serta terdapat tulisan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Penasehat Laskar Hizbullah Sabilillah adalah para ulama atau kiai yang memiliki peran dalam pembinaan mental dan idcologi, tetapi kadang-kadang mereka juga ikut berjuang di medan

perang. Gabungan para ulama atau Kiai dalam Laskar Hizbullah Sabilillah diberi nama Barisan Kiai.²⁰ Mereka itu antara lain adalah Kiai Abdurrachman, Kiai Makruf, Achmad Bakri, Tahir Dasuki, Marchaban, dan Kiai Zuhri (Boyolali). Imam dan Anggota Laskar Hizbullah dan Sabilillah tidak mendapatkan gaji dan juga tidak mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Keikutsertaan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia didasarkan pada keikhlasan dan semangat mempertahankan negara dan agama. Semangat perjuangan Laskar Hizbullah Sabilillah muncul karena adanya ajaran agama agar ummat memiliki sifat jihad fii sabilillah yang berarti berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini berarti bahwa perang membela kebenaran dengan cara memperkuat sarana-sarana pertahanan dan mengatur barisan militer sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian pada dasarnya mereka menjadi anggota Laskar Hizbullah Sabilillah bukan karena ingin memperoleh harta dan kedudukan, tetapi untuk membela tanah air sesuai dengan ajaran Islam yang dianutnya.

Oleh karena itu apabila dilihat dari bentuk dan susunan organisasi, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan organisasi kemiliteran yang berideologi Islam yang dikoordinasikan oleh ummat Islam guna membantu pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang secara taktis kemiliteran dan organisatoris, sejak adanya dekrit presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947 tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka berada di bawah TNI. Oleh karena itu sebagian anggota Laskar Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang ikut serta masuk menjadi TNI dan sebagian lainnya kembali ke masyarakat, ada yang meneruskan sekolah, ada yang menjadi petani, penguasa dan lain sebagainya. Sedang yang masuk menjadi anggota TNI ternyata mereka masih tetap melekatkan identitas "Hizbullah Sabilillah" dalam kesatuan-kesatuannya. Sebagai contoh pada tanggal 18 September 1947 resimen TNI ex Hizbullah Surakarta mengadakan rapat yang diikuti oleh sesama para komandan batalyon Hizbullah Surakarta. Dalam pertemuan itu Resimen VI, Brigade XXIV, Divisi IV, ditetapkan terdiri dari tiga batalyon dengan para komandan sebagai berikut :

- (1) Komandan Resimen adalah Muhammad Munawar
- (2) Komandan Batalyon XIX adalah A.G. Ismail
- (3) Komandan Batalyon XX adalah Moh. Alip
- (4) Komandan Batalyon XII adalah M. Muhdi.²¹

Catatan

1. ODP Sihombing, *Pemuda Indonesia menentang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962 halaman 69.
2. Sartono Kartodirdjo (ed), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Depdikbud, Jakarta, 1975, hal 151-153
3. AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, penerbit Angkasa, Bandung, 1977, halaman 100
4. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari terbit*, terjemahan Daniel Dhakidoe, pustaka jaya, Jakarta, 1980, hal.153
5. ODP Sihombing, *op.cit* hal. 183
6. George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terjemahan Ismail Bin Muhammad dan Zaharom bin Abdul Rashid, Kuala lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980, hal 135.
7. "Hisbullah", *Suara Muslimin*, No. 23, tahun II, 15 September 1944, halaman 24
8. Harry J. Benda, *op.cit* halaman 241
9. Abdul Basit Adnan, dkk, *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang. 1945 - 1949 di Surakarta*, Diktat yang belum diterbitkan.
10. H. Soepanto, BA, *Hizbullah Surakarta, 1945 - 1950*, penerbit UMS Karanganyar, halaman 7
11. Wawancara dengan H. Umar Sahid, pada 24-11-1991. Lihat juga Abdul Basit Adnan, dkk. *op.cit* halaman 11
12. H. Soepanto, BA, *op.cit*, halaman 20
13. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terjemahan Grafiti Press, Jakarta, 1983, halaman 66

14. *Ibid.* halaman 67
15. Wawancara dengan Mohammad Sodik pada tanggal 24-11-1991 di Surakarta
16. Abdul Basit Adnan, dkk, *op.cit.* halaman 23
17. Wawancara dengan Joni Yuwono pada tanggal 24 Nopember 1991 di Surakarta
18. Wawancara dengan Badrun Toto Suprianto pada tanggal 1 Desember 1991 di Tempel, Kalijambe, Sragen.
19. H. Soepanto, BA, *op.cit.* halaman 17.
20. Wawancara dengan Tamsiri Hadi Suprianto, tanggal 1 Desember 1991 di Surakarta.
21. H. Soepanto, BA, *op.cit.* halaman 150

Daftar Sumber

- Adnan Abdul Basit, dkk. *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang, 1945 - 1949 di Surakarta*, diktat yang belum diterbitkan.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Terjemahan Daniel Dhakidae, pustaka Jaya, Jakarta 1980.
- Hizbullah, Suara Muslimin, No. 23 tahun II, 15 September 1944, halaman 24.
- Kahin, George Mc. Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terjemahan Ismail bin Muhammad dan Zaharom bin Abdul Roshid, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
- Nasution, AH. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1977.
- Sartono Kartodirdjo (ed), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Depdikbud, Jakarta, 1975
- Sihombing, ODP, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962.

Soepanto. H. BA. Hizbullah Surakarta, 1945-1950, Penerbit UMS, Karanganyar.

Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terjemahan Grafiti Press, Jakarta 1983

Nara Sumber

Nama	: H. Umar Syahid
Alamat	: Kauman, Jl. Trisula 2 Surakarta
Umur	: 72 tahun
Pendidikan	: Madrasah Mambaul Ulum tingkat Aliyah
Peran	: Pelatih Hizbullah Surakarta
Nama	: Mohammad Sodiq
Alamat	: Jl. Kiai Mojo 120, Surakarta
Umur	: 75 tahun
Pendidikan	: Schakel School, Surakarta
Peran	: Pelatih Hizbullah di Jatinom, Klaten
Nama	: Joni Yuwono
Alamat	: Sedah Romo Utara Rt. IV, Rw. VI Kartosura, Sukoharjo
Umur	: 63 tahun
Pendidikan	: HIS, SR, ST Klas 1
Peran	: Staf Kelaskaran Hizbullah
Nama	: Tamsiri Hadi Supriyanto
Alamat	: Surakarta
Umur	: 73 tahun
Pendidikan	: SMA
Peran	: Wakil Regu, Kepala Regu Hizbullah
Nama	: Badrun Toto Supriyatno
Alamat	: Tempel Kalijambe, Sragen
Umur	: 67 tahun
Pendidikan	: Tsanawiyah
Peran	: Anggota kelaskaran Hizbullah Surakarta.

PERANSERTA HIZBULLAH-SABILILLAH SURAKARTA DALAM PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI TAHUN 1948

A. Adaby Darban

1. Prolog Pemberontakan PKI Tahun 1948

Partai Komunis Indonesia (PKI) telah merencanakan untuk menguasai negara dan pemerintahan Indonesia. Sebelum Muso datang dari pengkaderannya di Rusia, di tanah air Indonesia juga telah dipersiapkan kader-kader komunis untuk merebut kekuasaan. Munculnya Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Syahrir II, memberikan peluang dan kesempatan yang luas untuk mempersiapkan perebutan kekuasaan.

Kebijakan Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan untuk mendirikan Inspektorat Biro Perjuangan (IPB), guna mengontrol/mengawasi kelasykaran, menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Pada bulan Februari 1947 partai politik Masjumi dan PNI diikuti oleh partai-partai politik yang non-komunis menentang kebijakan Amir Syarifudin dalam membentuk Inspektorat Biro Perjuangan (IPB). Demikian pula Gabungan Kelasykaran Pertahanan Surakarta, pada tanggal 10 Maret 1947 membuat "Resolusi Menolak Inspektorat Biro Perjuangan" ciptaan Amir Syarifudin.

Rupanya rencana Amir Syarifudin telah diketahui oleh beberapa tokoh organisasi politik di Indonesia. Maka pada tanggal 19 Desember

1947 Burhanuddin Harahap dan kawan-kawannya membuat "Mosi tentang Rasionalisasi dan Rekonstruksi Kementrian Pertahanan dengan Seluruh Jajarannya". Mosi itu secara langsung menunjukkan adanya ketidak puasan partai-partai politik non-komunis terhadap struktur dan kebijakan yang ada di Kementrian Pertahanan. Mosi dari Burhanuddin Harahap dan kawan-kawannya itu ditentang oleh partai-partai politik yang berhaluan kiri pro-komunis pendukung Amir Syarifudin. Dengan demikian, maka benturan politik sudah terjadi di tingkat atas antara partai-partai politik yang pro-komunis dan yang anti komunis.

Sebagai puncak pertentangan itu ialah ketika Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri, melakukan penandatanganan persetujuan perundingan Renville. Hasil perundingan Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin tanggal 17 Januari 1948 sangat merugikan pihak Republik Indonesia. Oleh karena itu ditentang oleh partai-partai agama dan nasionalis, yang kemudian berposisi pada pemerintahan Perdana Menteri Amir Syarifudin. Maka terjadilah Mosi tidak percaya terhadap Amir Syarifudin. Oleh karena mosi tidak percaya itu mendapat dukungan kuat dari partai-partai politik dan sebagian militer, Maka pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifudin jatuh. Pemerintahan Republik Indonesia dipegang oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta merangkap sebagai perdana menteri.

Kejatuhan Kabinet Amir Syarifudin menambah panas situasi di dalam negeri, karena para pendukungnya dan kader-kader golongan kiri pro komunis yang telah dipersiapkan untuk berontak menampakkan aksi brutal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provokasi golongan kiri pro komunis berhasil mempengaruhi kesatuan TNI ALRI yang berada di daerah pertempuran PP IV B (meliputi daerah-daerah garis depan Klego - Karanggede dan juga daerah garis belakang Gemolong - Sumberlawang dan Gundi). Mereka yang termakan provokasi komunis itu membuat kebijakan antara lain : Pertama, pertahanan persenjataan yang ada di garis depan sebagian ditarik mundur ke garis belakang yaitu daerah pertahanan II. Kedua, pada tempat-tempat yang strategis di garis belakang seperti Gemmolong, sumber lawang dan Gundi diduduki TNI ALRI dan TNI AD Resimen 24 dari front Demak dan Purwodadi.1) Demikian pula aksi unjuk rasa dari TNI ALRI dengan

pakaian compang-camping membawa senjata modern dan mmasih baru secara mencolok berjalan mengitari Stadion Sriwedari yang pada saat itu sedang diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional pertama. Unjuk rasa itu menyebabkan panasnya situasi, baik dengan kesatuan-kesatuan TNI maupun juga dengan masyarakat yang non komunis, namun masing-masing masih dapat mengendalikan diri, sehingga tidak terjadi benturan pisik.

Pada dini hari tanggal 13 Agustus 1948, pasukan TNI ALRI yang dipimpin oleh Mayor Sutarno secara mendadak mengadakan serbuan ke asrama penampungan TNI AD dari kesatuan Siliwangi yang Hijrah, di kampung Srambatan, Barat Daya Stasiun Balapan. Pihak TNI ALRI dalam serbuan itu mengarahkan dua Bataliyon, dengan persenjataan senapan, granat, dan metraliur berat. Pihak TNI AD Siliwangi yang berada dalam kompleks asrama itu dalam keadaan tidak siap, namun berusaha menyerang keluar dan bertahan, sampai menunggu datangnya bala bantuan. Kepungan dan serangan dari TNI ALRI ketat serta lama hingga siang hari, namun tidak berhasil menguasai asrama. Pihak TNI AD Siliwangi dengan gencar pula membalas serbuan itu dengan melalui pertahanan dinding-dinding asrama. Ketika bala bantuan datang, maka penyerbuan dari TNI ALRI melarikan diri dan mundur bertahan di Utara Kota Solo. Dalam pengunduran itu banyak yang tewas termasuk komandannya yaitu Mayor Sutarno.

Kota Solo berhasil dikuasai oleh TNI AD, sedangkan pasukan penyerbu dari TNI ALRI bertahan di daerah skip Utara kota Solo. Pasukan penyerbu memperkuat diri dengan dibantu oleh bekas lasykar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia, yang berhaluan kiri pro komunis), dan sebagian dari oknum TNI AD Divisi IV Penambahan Senipati. Mereka para penyerbu tetap mengincar kota Solo, sedangkan pasukan TNI AD Siliwangi memperkuat pertahanannya di dalam kota. Dengan demikian situasi tagang menyelimuti kota Solo dan sekitarnya.

Perang urat syaraf dilancarkan untuk mendiskreditkan pasukan TNI AD Siliwangi, dengan mengatakan bahwa pasukan Siliwangi akan merebut kekuasaan Pemerintah RI. Dengan demikian sebagian masyarakat dan khususnya dari golongan kiri pro komunis termakan

oleh issue yang di buat oleh PKI dan para pendukungnya. Dari pihak non-komunis, Kapten Moehdi mewaspadai gerakan bersenjata yang ada di daerah Kecamatan Kalioso (11 Km. Utara kota Solo). Dari para pengamatnya dilaporkan bahwa pasukan TNI ALRI dan AD dari Resimen 24 memperkuat daerah ini untuk menghadapi serangan TNI AD Siliwangi. Kapten Moehdi ketika kembali dari Kompi Sudarno di Kalijambe menyaksikan sendiri adanya dua batalyon TNI ALRI dengan komandan masing-masing Mayor Rasimin dan Mayor Suwondo yang kemudian menguasai Kalioso. Kebetulan kedua komandan batalyon itu kenal Kapten Moehdi. Dalam perbincangan di warung makan terlontar kata-kata dari komandan batalyon itu antara lain, bahwa Divisi IV Panembahan Senopati dihina Tentara Hijrah kaki tangan Belanda, dan semua kekuatan RI harus kompak menggempur Belanda dan tentara Siliwangi, yang dikatakan memihak Belanda.²¹

Gerak persiapan pemberontakan kaum komunis semakin tampak. Pada tanggal 11 September 1948 semua pasukan ALRI dan Lasykar Rakyat ditarik mundur. Diperkirakan pasukan-pasukan yang pro komunis itu sedang mengadakan konsolidasi dalam rangka persiapan untuk berontak. Keadaan ini juga telah diketahui oleh pemerintah pusat, sehingga Menteri Dalam Negeri Sukiman Wiryosanjoyo (tokoh Masjumi) melalui seorang kurir mengirim surat kepada Kapten Moh. Moehdi, yang isinya supaya menyelamatkan Ir. Syofwan dan Hendramartana dari Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) Pusat yang sedang bertugas di Purwodadi. Pada tanggal 16 September 1948, pukul 06.00 pagi Kapten Moh. Moehdi berangkat ke Purwodadi hanya dikawal oleh tobang (pelayan pasukan, seorang pemuda berusia 14 tahun). Perjalanannya dari Solo ke Purwodadi lewat Gundi dengan menggunakan kereta api memakan waktu lebih dari 10 jam, sampai di Purwodadi pada pukul 16.15.

Stasiun Purwodadi dijaga oleh tentara, namun Kapten Moh. Moehdi berhasil keluar stasiun bersama rombongan para bakul yang pulang dari Solo. Situasi kota Purwodadi sangat sepi dan lenggang, kampung Kauman yang biasanya banyak hilir mudik penduduk dan anak-anak, saat itu sangat sunyi. Ia menuju rumah Sucipto, namun rumah itu tertutup rapat dan sepi, setelah diketuk berkali-kali tidak ada yang menanggapi. Akhirnya Kapten Moh. Moehdi menuju Majid Besar

untuk menjalankan sholat jama-dzuhur & ashar. Masjid pun dalam keadaan sepi, hanya terlihat dua orang penjaga yang bersembunyi. Ketika saat Maghrib datang, hanya dibunyikan bedug tanpa adzan, kemudian sholat maghrib hanya diikuti oleh 5 orang, setelah selesai sholat hanya sersalaman dan mereka terus pergi tanpa berkata sedikitpun kepada Kapten Moh. Moehdi.

Pada kira-kira pukul 21.00 malam datanglah anak buah bapak Sucipto, yaitu seorang dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Pemuda itu memberikan informasi yang sangat penting, antara lain ialah : Pertama, Kota Purwodadi di dalam keadaan bahaya bagi umat Islam, karena penguasa militer adalah Resimen 24 di bawah komando Letnan Kolonel Sudiarto yang anti kepada pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta, dengan demikian mereka pro komunis. Kedua, telah diadakan penangkapan terhadap Ketua Masjumi bapak Sujoto dan para tamunya termasuk Ir. Syofwan dari STII Pusat Jakarta. Penangkapan itu dilakukan pada tanggal 15 September 1948, dan mereka itu ditahan oleh Batalon V Martono. Pada waktu itu umat Islam dan para pejabat yang taat kepada pemerintahan RI meninggalkan kota Purwodadi, yang dianggap tidak aman lagi. Informasi ketiga ialah Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta onderbownya akan mengadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Purwodadi, dengan pembicara Amir Syarifudin. Untuk persiapan rapat raksasa PKI, telah dipasang panggung dengan lambang Palu Arit dan juga disekelilingnya dipasang bendera PKI yang berdasar merah, sehingga hampir seperti lautan darah merah.

Setelah mendengarkan informasi itu menjadi jelaslah bahwa orang yang akan dikawal sudah ditangkap, sehingga Kapten Moh. Moehdi pagi harinya kembali ke Surakarta. Dengan naik dokar keluar dari kora Purwodadi, di stasiun kecil ia naik kereta api menuju Gundi, kemudian meneruskan perjalanannya ke Surakarta. Kereta api sampai di desa Siboto Kalijambe berhenti lama dan tidak langsung ke stasiun Kalioso. Keadaan ini mencurigakan, Kapten Moh. Moehdi kemudian turun dan berjalan kaki memasuki desa Siboto. Di perjalanan masuk ke desa ia dicegat oleh seorang tobang (anak pelayan tempur) dari Batalyon XXI. Tobang itu telah kenal dengannya, kemudian melaporkan situasi yang gawat di daerah ini. Laporan itu antara lain

untuk menjalankan sholat jama-dzuhur & ashar. Masjid pun dalam keadaan sepi, hanya terlihat dua orang penjaga yang bersembunyi. Ketika saat Maghrib datang, hanya dibunyikan bedug tanpa adzan. kemudian sholat maghrib hanya diikuti oleh 5 orang. setelah selesai sholat hanya sersalaman dan mereka terus pergi tanpa berkata sedikitpun kepada Kapten Moh. Moehdi.

Pada kira-kira pukul 21.00 malam datanglah anak buah bapak Sucipto, yaitu seorang dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GP II). Pemuda itu memberikan informasi yang sangat penting, antara lain ialah : Pertama, Kota Purwodadi di dalam keadaan bahaya bagi umat Islam, karena penguasa militer adalah Resimen 24 di bawah komando Letnan Kolonel Sudiarto yang anti kepada pemerintahan Perdana Menteri Moh. Hatta, dengan demikian mereka pro komunis. Kedua, telah diadakan penangkapan terhadap Ketua Masjumi bapak Sujoto dan para tamunya termasuk Ir. Syofwan dari STII Pusat Jakarta. Penangkapan itu dilakukan pada tanggal 15 September 1948, dan mereka itu ditahan oleh Batalon V Martono. Pada waktu itu umat Islam dan para pejabat yang taat kepada pemerintahan RI meninggalkan kota Purwodadi, yang dianggap tidak aman lagi. Informasi ketiga ialah Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta onderbownya akan mengadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Purwodadi, dengan pembicara Amir Syarifudin. Untuk persiapan rapat raksasa PKI, telah dipasang panggung dengan lambang Palu Arit dan juga disekelilingnya dipasang bendera PKI yang berdasar merah, sehingga hampir seperti lautan darah merah.

Setelah mendengarkan informasi itu menjadi jelaslah bahwa orang yang akan dikawal sudah ditangkap, sehingga Kapten Moh. Moehdi pagi harinya kembali ke Surakarta. Dengan naik dokar keluar dari kora Purwodadi, di stasiun kecil ia naik kereta api menuju Gundi. kemudian meneruskan perjalanannya ke Surakarta. Kereta api sampai di desa Siboto Kalijambe berhenti lama dan tidak langsung ke stasiun Kalioso. Keadaan ini mencurigakan, Kapten Moh. Moehdi kemudian turun dan berjalan kaki memasuki desa Siboto. Di perjalanan masuk ke desa ia dicegat oleh seorang tobang (anak pelayan tempur) dari Batalyon XXI. Tobang itu telah kenal dengannya, kemudian melaporkan situasi yang gawat di daerah ini. Laporan itu antara lain

ialah : Pertama, pada tanggal 16 Juli 1948 dinihari pasukan ALRI berhasil menguasai daerah ini, sehingga semua staf Batalyon XXI ditahan, sedangkan peralatan kantor, persenjataan dan obat-obatan dirampasnya. Kedua, pasukan ALRI sekarang sedang mencari bapak Kapten Moh. Moehdi untuk ditangkap. Ketiga, ALRI merencanakan juga nanti malam akan melucuti Kompi Hizbullah di Titang.³⁾

Dengan menyamar sebagai seorang petani memanggul cangkul, Kapten Moh. Moehdi berhasil menembus penjagaan ketat dari pasukan ALRI di desa Pilang. Kemudian ia meneruskan perjalanan ke markas asrama Komandan Kompi Hizbullah M. Afwan di Titang. Di Hizbullah itu ia mengadakan brifing kepada komandan kompi beserta stafnya. Setelah brifing selesai, maka pasukan Hizbullah pada pukul 22.00 harus sudah meninggalkan asrama Titang menuju ke desa Karanglo, kemudian menuju desa Krapyak di Kartosura. Dari tempat ini Kapten Moh. Moehdi beserta kawan-kawannya mengumpulkan beberapa pasukan untuk menyusun kekuatan, guna menghadapi bahaya pasukan untuk menyusun kekuatan, guna menghadapi bahaya pasukan yang pro komunis/PKI.

Gerakan Front Demokrasi Rakyat (FDR), Pesindo dan beberapa pasukan pro komunis pendukung Amir Syarifudin bertambah semangat setelah kehadiran Muso seorang kader komunis dari Rusia. Di samping gerakan militer yang mendapat provokasi PKI, juga gerakan rakyat dan kaum buruh menunjukkan keradikalannya. Mereka mengadakan aksi sepihak, pemogokan buruh, perlawanan terhadap kaum pengusaha, dan pembunuhan keji di pedesaan.

Salah satu kasus yang menonjol di dalam sejarah prolog pemberontakan PKI 1948 ialah adanya pemogokan buruh pabrik rami Delanggu, Klaten. Kaum buruh baik penanam rami maupun pekerja pabrik rami Delanggu yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh Pabrik Republik Indonesia (Sarbupri) yang pro Komunis/ PKI mengadakan pemogokan masal dan aksi sepihak. Karena aksi mogok dan aksi sepihak itu akan merugikan pemerintah maka golongan buruh yang anti komunis tetap bekerja sebagai mana biasanya. Buruh muslim yang tergabung dalam Sarekat Tani Islam Indonesia (STII sebagai ondebaw Masyumi) beserta kaum buruh

nasionalis tetap bekerja dan mmengawasi tanaman rosela (Rami) di sawah dari gangguan kaum komunis?PKI.

Kaum buruh yang tergabung dalam BTI dan Sarbupri di monotori oleh FDR dan Pesindo bersenjata mengadakan unjuk rasa dan akan mengadakan aksi sepihak yang sifatnya merusak. Melihat aksi kaum komunis itu bersenjata, maka STII menjalin kerjasama dengan satu regu dari Batalyon 18 Brigade 24, dan beberapa lasykar Hizbullah dari Surakarta. Untuk sementara keadaan dapat dikuasai, kaum buruh komunis meninggalkan tempat unjuk rasa. Untuk penjagaan selanjutnya satu regu pasukan ditempatkan di rumah Bapak Busairi di jalan Stasiun Delanggu. Pada malam tanggal dua Romadhon (1948) Ujang Sarbini pimpinan STII dan anggota pasukan hijrah melaporkan bahwa akan terjadi unjuk rasa yang lebih besar. Pada esok harinya kejadian itu memang terbukti, kaum buruh komunis yang jumlahnya lebih kurang 400 orang berkumpul di sekitar pabrik karung Delanggu. Kaum buruh itu dikawal oleh pasukan Pesindo dan FDR bersenjata. Pasukan TNI dari Batalyon 18 Brigade 24 yang hanya satu regu (12 orang) beserta buruh muslim STII dan beberapa orang lasykar Hizbullah Surakarta berusaha mengamankan pabrik karung tersebut. Semakin siang kaum komunis pengunjuk rasa semakin brutal dan mendahului untuk berkontak senjata dengan petugas pengaman pabrik. Dengan demikian maka baku tembak dan baku hantam secara masal tidak dapat dihindarkan. Pada babak pertama benturan pisik yang tidak seimbang itu, pasukan TNI terdesak, tujuh orang tertangkap diinterogasi dan disiksa, satu orang wafat yaitu Ujang Sarbini. Berkat datangnya bantuan dari pemerintah, akhirnya serangan itu dapat dihentikan, sehingga tujuh orang korban dapat diselamatkan, kemudian berobat di Rumah Sakit Tegalyoso Klaten. Adapun jenazah Ujang Sarbini dimakamkan di Delanggu. Dari ketujuh korban komunis itu antara lain Johny Jumana (anggota Hizbullah) dan Busairi pemilik rumah yang digunakan sebagai pos TNI. Peristiwa Delanggu ini merupakan percikan pertarungan pisik yang menghantarkan adanya pemberontakan PKI 1948. Peristiwa ini memanaskan situasi dan mempertajam pertentangan antara pemerintah dengan kaum komunis, dan juga antara Masyumi, Hizbullah, STII dengan PKI beserta onderbownya yaitu FDR, BTI dan Pesindo.⁴⁾

Kejadian lain sebagai prolog pemberontakan PKI 1948 adalah kasus di desa Tempurejo kecamatan Walikukun, Kabupaten Ngawi. PKI dengan agitasinya mempropagandakan aksi sepihak, yaitu mempengaruhi rakyat untuk ikut komunis dan diajak berjuang merampas tanah perkebunan negara bekas milik Belanda dan juga tanah petani-petani kaya, katanya akan dibagikan kepada rakyat. Adapun yang menjadi incaran adalah termasuk tanah milik kaum muslimin dan tanah pesantren. Dengan demikian kaum muslimin dan pondok pesantren Tempurejo merasa gelisah dan perlu pengamanan. Maka diutuslah Imam Suhadi aktifis pelajar Islam Indonesia (POO) dan GPII untuk menemui komandan Hizbullah Divisi Sunan Bonang di Surakarta. Maksud kedatangan Imam Suhadi untuk melaporkan situasi Tempurejo Walikukun dan meminta bantuan perlindungan keamanan ummat Islam dan masyarakat desanya. Untuk kepentingan perlindungan keamanan itu, maka Munawir Syadzali dan Mohammad Munawar selaku pimpinan Hizbullah Divisi Sunan Bonang mengirimkan pasukannya sebanyak 50 personel di bawah pimpinan masing-masing regu : Kapten A.G. Ismail, Letnan bardaini, Letnan Muzni Arifin, dan Maksu.⁵⁾ Pasukan Hizbullah Sunan Bonang itu ditempatkan di rumah Ibu Mukti (Ibunya Imam Suhadi). Dari tempat itu kemudian disebar ke daerah rawan antara lain di beberapa pesantren yang dekat dengan basis kaum komunis, seperti Pondok Pesantren Katerban.

Walikukun merupakan salah satu daerah konsentrasi kaum komunis/PKI. Pada tanggal 17 September 1948, yaitu sehari sebelum adanya proklamasi pemberontakan PKI di Madiun, pasukan merah komunis bersenjata pada pagi subuh memulai serbuan ke Tempurejo Walikukun. Desa Tempurejo yang basis muslimin dikepung oleh kekuatan tentara dan lasykar PKI yang didatangkan dari berbagai daerah, sehingga jumlahnya sangat banyak. Pasukan Hizbullah Divisi Sunan Bonang yang jumlahnya hanya 50 orang dibantu oleh kaum komunis. Dalam kontak senjata yang berlangsung lama itu dan kurang seimbang itu, pasukan Hizbullah terpaksa mundur ke daerah Mantingan, Sragen. Pihak komunis (PKI) yang memang kekuatannya dipusatkan di Madiun dan sekitarnya, untuk sementara waktu berhasil menguasai daerah itu, sehingga memperlancar meletusnya

Pemberontakan PKI 1948. Sebelum datangnya pasukan yang setia pada Republik Indonesia untuk menumpasnya, PKI dan pasukan yang bersenjata dari FDR, Pesindo dan oknum angkatan perang yang berpihak pada PKI, mengadakan aksi pembantaian kejam terhadap para Kiai, umat Islam, kaum nasionalis dan pamong praja yang anti komunis.

2. Epilog Pemberontakan PKI Tahun 1948

Pada tanggal 18 September 1948 tokoh PKI Muso dan Amir Syarifudin di Madiun menyatakan berdirinya Negara Komunis Sovjet Indonesia, yang langsung menjadi anggota atau salah satu satelite dari Comintern/komunis internasional. Setelah mencetuskan adanya negara komunis di Indonesia, kemudian mengadakan aksi pengambilalihan kekuasaan pemerintahan yang diawali di Madiun dan sekitarnya. Selain itu juga mengadakan gerakan pembantaian atau pembunuhan masal besar-besaran terhadap masyarakat yang anti komunis. Korban pembantaian PKI ditujukan antara lain terhadap para Kiai, umat Islam, tokoh nasionalis, pamong praja dan sebagainya.

PKI menyusun *black-list* yaitu daftar orang-orang yang akan dibunuh. Dalam *black-list* itu tercatat terutama orang-orang Masyumi dan pendukungnya, karena dianggap sebagai musuh bebuyutan, kemudian juga orang-orang PNI dan juga aparat pemerintah yang bukan komunis. Di Surakarta yang diincar PKI antara lain Hendrosudarmo tokoh Masyumi dan Ketua STII, sebab jadi musuh utama wikana dan Amir Syarifudin. Hendrosudarmo yang menolak usul Amir Syarifudin tentang menjadikan Wikana sebagai wakil Residen Surakarta, dan juga berhasil mengagalkan mendapatkan pensiun bagi Amir Syarifudin di BP KNIP di Yogyakarta. Selain Hendrosudarmo, dokter Muwardi ketua Barisan Banteng juga diincar oleh kaum komunis.

Beberapa hari menjelang meletusnya pemberontakan PKI 1948. Hendrosudarmo beserta Ir. Moh. Sofwan dan Suyoto bertugas memberikan penerangan pada petani dan alim ulama di Purwodadi. Setelah tugas selesai mereka akan kembali ke Solo, pada malam hari menjelang pulang, pondokan mereka digrebeg pada pukul 02.00, oleh pasukan dari FDR dibantu ALRI yang sudah menguasai Purwodadi.

Mereka diculik, disekap di STO, kemudian dibawa ke markas ALRI dan selanjutnya ditahan di Grobogan selama 20 hari. Mereka para tokoh Masyumi dan STII itu di interogasi dan disiksa hingga pisiknya banyak luka, gigihnya pun ada yang rampal.

Menurut penuturan Hendrosudarmo yang diselamatkan Allah swt. dari pembunuhan PKI menyatakan antara lain, “semua yang disekap sudah pasrah dan tawakal kepada Allah subhanahu wata’ala.6) selain mereka ditahan pula Kusnadi Dokter Syqansu Harjowardoyo, dan Sastrosutiknyo. Di tahanan Grobogan mereka tiga hari sekali baru diberi makan dan minum, tempatnya tanpa diberi lampu pada malam hari. Pada tanggal 4 Oktober 1948 sekitar pukul 21 malam hari mereka dibawa oleh pasukan FDR ke suatu tempat yang mendaki yang masih asing. Ketika Hendrosudarmo diam-diam berhasil mencari air wudhu dan sholat, bertemu dengan wanita tua yang menyebutkan nama tempat itu adalah “Alas Jati Pohon”. Pada tanggal 5 Oktober 1948, sekitar pukul 05.30 para tahanan diberi minum secangkir teh hangat secara bergantian, kemudian pimpinan pasukan FDR meminta sarung dari salah satu tahanan. Pasukan FDR komunis kemudian menembak satu-persatu dari mereka itu. Giliran pertama Sastrosutiknyo ditembak mati, dan akhirnya semuanya ditembak. Hendrosudarmo ditembak lehernya sebelah kanan sampai tembus ke leher kiri, namun pelurunya hanya melewati sela-sela tulang dan batang tenggorokan, serta ditembak mata kakinya hingga pecah, sehingga tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Oleh karena mereka semua sudah dianggap mati, kaum komunis FDR menutupi dengan daun jati dan tidak dikuburkan, kemudian terus ditinggalkan pergi. Setelah enam jam, Hendrosudarmo sadar, kemudian membuka ikat tangan dan penutup matanya. Meskipun sakit ia tetap ingin melihat situasi sekitarnya. Sebelum bangun ia merasakan ada burung berkicau hinggap di dadanya, dengan demikian membuktikan di sekitar itu sudah tidak ada orang, barulah ia berani bangun. Sekitar pukul 17.00 sore hari terdengar ada serombongan orang datang. kemudian ia kembali ke posisi semula ditutup dengan daun jati. untuk menghindari penganiyaan dari FDR kembali. Namun, ternyata yang datang ada yang berbahasa sunda dan setelah dilirik memakai tanda kesatuan Siliwangi dan Hizbullah, sehingga Hendrosudarmo bangkit. dan ditolong oleh pasukan itu. Ia dibawa ke RS Purwodadi.

kemudian dibawa ke RS Surakarta dibawah penanganan dokter Suharso.

Di Madiun PKI membunuh dengan kejam terhadap para kiai dan umat Islam pedesaan. Pembunuhan itu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : Mereka ada yang diculik dari pesantren maupun rumahnya, kemudian dimasukkan dalam gerbong kereta api dan ditembaki dari luar, sehingga terjadi genangan darah dalam gerbong itu. Ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam sebuah rumah dikunci rapat dan kemudian tiga hari tidak diberi makan, setelah itu dalam keadaan lemas diberondong tembakan, sehingga rumah itu terdapat genangan darah setinggi mata kaki.⁷⁾ Di Walikukun kaum komunis menyerbu pondok Tempurejo dan Katerban. Di tempat itu selain membangati umat Islam juga menculik KH. Dimiyati ketua Masyumi dan Sabilillah Ngarambe dan Suwandi Ketua Muhammadiyah. Setelah dianiaya dengan sadis keduanya dibunuh, jenazahnya dikubur membujur ketimur di perkuburan Belanda.⁸⁾ PKI tidak hanya mengadakan pembunuhan, namun juga mengadakan perampasan harta benda rakyat. Aksi pembunuhan kejam di Madiun dan sekitarnya saja, namun juga terjadi di Surakarta, Purwodadi, Pati dan Kudus.

3. Penumpasan Terhadap Pemberontakan PKI Tahun 1948

Setelah PKI memproklamasikan sebuah negara Komunis untuk Indonesia, dan dilanjutkan dengan aksi pembantaian serta penggarongan terhadap rakyat, kemudian meminta kepada rakyat agar **"PILIH SOEKARNO-HATTA ATAU AMIR-MUSO"**. Pernyataan itu menjadi bumerang bagi PKI; sebab sebagian besar rakyat Indonesia masih menghargai nama besar proklamator kita **"Soekarno-Hatta"**. Di samping itu, basic pendukung PKI masih terbatas pada proletariat buruh pabrik dan kereta api, buruh tani masih sedikit yang dalam pengaruh mereka. Buruh tani sebagian besar bernaung di bawah para kiai atau partai politik Islam yang besar, yaitu Masyumi. Dengan demikian maka akar komunis pada waktu pemberontakan PKI tahun 1948 belumlah kokoh. Oleh karena itu apa yang mereka tempuh banyak mengalami kegagalan.

Bila pada prolog dan epilog pemberontakan PKI tahun 1948 kelihatannya dapat menguasai daerah basisnya, namun kemudian

terjadilah arus balik yang berupa penumpasan terhadap pemberontakan itu. Penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 itu dilakukan oleh pemerintah yang syah Republik Indonesia dengan tentaranya yang loyal, yaitu sebagian besar dari Siliwangi dan bekas lasykar Hizbullah Divisi Sunan Bonang yang sudah tergabung dalam TNI. Di samping itu tidak kalah penting adanya support dan peran serta rakyat yang sebagian besar kaum muslimin yang membantu bahkan ikut dalam penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 itu.

Kolonel Gatot Subroto selaku Gubernur Militer mendapat perintah untuk mengadakan penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948. Maka ia menyerukan agar satuan-satuan yang taat pada pemerinta RI melaporkan diri menghadap Gubernur Militer Daerah Surakarta/Semarang yang berkedudukan di Loji Gandrung Solo. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Munawar (bekas Lasykar Hizbullah) yang pertama kali menghadap Tentara Pelajar (TP) pimpinan Mayor Achmadi juga menghadap. Adapun satuan-satuan lain, seperti eks Divisi P. Senopati bersikap pasif atau tidak melapor, dengan alasan berkonsentrasi di garis perbatasan.

Muhammad Munawar eks Komandan Hizbullah Divisi Sunan Bonang yang kemudian pada saat itu sebagai Komandan Batalyon II Brigade VIII Ko. PPS, setelah melapor Gubernur Militer kemudian mempersiapkan anak buahnya untuk menjalankan perintah menumpas Pemberontak PKI. Beberapa kompi pasukannya ada yang beroperasi di Madiun dan sekitarnya beserta pasukan Siliwangi, Kompi Rujito bertugas di sekitar Ampel - Tenganan bersama Kompi Sumitro, sedangkan Kompi Sukanto bertugas di medan tenggara dan bergerak ke utara menyatu dengan Gerakan wilayah utara dibawah pimpinan Letkol. Kusno Utomo. Munawar membawa sisa pasukannya ke utara untuk bergabung dengan Kompi Sukanto dan Rujito.

Operasi penangkapan tokoh-tokoh pemberontak dimulai dengan serangan-serangan terhadap nasis PKI. Meskipun terjadi kontrak senjata, namun pihak militer RI terdiri dari Siliwangi dan Batalyon eks Hizbullah berhasil menghancurkannya. Pasukan Munawar dalam perjalanan ke utara berhasil mematahkan serangan pasukan PKI, namun setelah memasuki Kudus terjadi keraguan, sebab Batalyon

Sutarno yang berbasis di Kudus masih diragukan keberpihakannya. Batalyon Sutarno tidak menghendaki pasukan Siliwangi masuk ke Kudus.⁹⁾ Kemudian Munawar dan pasukannya kembali ke Undaan dan terus kembali ke markas komando, melapor pada Panglima Operasi Let. Kol. Kusno Utomo. Laporan Munawar tentang perjalanan operasinya sampai Kudus diterima dengan baik, dan diijinkan pula bergabung dengan induk pasukannya di Klaten.

Pada tanggal 19 September 1948 beberapa kompi bekas Hizbullah sudah berkumpul di Kartosura. Setelah mereka kumpul, maka diadakan brifing mengenai situasi negara RI dalam menghadapi pemberontakan PKI tahun 1948. Dalam brifingnya itu Kapten Moh. Moehdi menyatakan antara lain : Pertama, menjelaskan PKI telah mekar dan mendirikan negara komunis di Indonesia. Kedua, negara RI terancam pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifudin. Ketiga pemerintah RI membentuk Gubernur Militer II yang berwenang atas daerah eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, dan eks Karesidenan Madiun. Pemerintah menggunakan angkatan perang yang setia terhadap RI untuk menumpas pemberontakan PKI 1948 yang berpusat di Madiun, dan mengembalikan keteritiban umum.

Setelah brifing dilakukan, maka pasukan TNI eks Hizbullah itu dipersiapkan untuk operasi melawan PKI. Letnan Satu Sudiono ditetapkan sebagai Komandan tempur operasi dengan kekuatan riil satu kompi lengkap diperbantukan dalam Komando Operasi Brigade Kosno Utomo. Lettu. Moh Afwan sebagai wakil Lettu Sudiono bertindak sebagai seksi terdepan. Letnan Ahmad dan Letnan A. Chaidir masing-masing memegang komandan seksi, kemudian Kapten Moh. Moehdi dan Mayor Basuno sebagai koordinator informasi intelligens, penyuluh dan penggerak masyarakat melawan PKI.

Adapun jalannya operasi penumpasan pemberontakan PKI itu antara lain :

Di daerah Utara, pada tanggal 25 September 1948 terjadi pertempuran di garis pertahanan Utara Skip yang membentang dari timur ke barat hingga melampaui rel kereta api. Untuk mematahkan pasukan pemberontak PKI dihujani meriam pada sayap kiri dan kanan sampai satu jam, setelah tidak ada perlawanan, maka tengah pusat

pertahanan PKI dihujani meriam dan tembakan hingga dua jam, meskipun pasukan PKI melawan, namun mereka kalah dan mundur ke Pungkruk. Daerah ini menjadi pusat perlawanan PKI untuk menahan serangan pihak RI, oleh karena itu terjadilah pertempuran sengit, yang akhirnya pasukan PKI hancur berantakan dan banyak korban. Pasukan RI melanjutkan operasinya menuju Purwodadi. Meskipun musuh menyerang dan menghancurkan jembatan dan jalan KA, pasukan RI tetap dapat bergerak maju dan menghancurkannya. Di daerah ini pasukan PKI di bantu oleh Brigade XXIV di bawah Batalyon Purnawi dan Rohadi. Walaupun demikian kuatnya pasukan pemberontak PKI namun berhasil dipukul mundur oleh pasukan RI yang di dalamnya terdapat bekas Hizbullah yang gigih melawan komunis.

Setelah Kabupaten Purwodadi direbut dan dikuasai oleh pasukan RI, maka dilanjutkan operasi penumpasan dengan pembagian tugas antara lain, Mayor Basuno terus mengikuti Komandan Operasi Letkol Kusno Utomo yang bergerak kearah Pati dan Kudus. Untuk Kapten Moh. Moehdi ditugasi membantu Batalyon Kemal Idris (dari Siliwangi) bertahan menduduki Purwodadi dan sekitarnya. Sebab daerah ini masih banyak kekuatan PKI dan pendukungnya yang bersenjata sering menghadang pasukan RI.

Dalam tugas pengamanan Purwodadi ini sering terjadi kontak senjata. Kontak senjata itu antara lain dalam pertempuran di Tawangharjo (9 Km. Timur Purwodadi), ketika itu pasukan Tentara pelajar (TP) pimpinan Ahmadi terjebak oleh pasukan Batalyon Purnawi Resimen 24 pendukung PKI. Dalam pertempuran itu pihak TP banyak korban, namun untuk segera datang bantuan dari pasukan Kemal Idris. akhirnya tertolong, dan pihak Batalyon Purnawi lari mengundurkan diri. Pasukan Lettu Sukanto dari TNI eks Hizbullah berhasil mengambil alih Pos Sektor Godong yang tadinya dikuasai oleh pasukan PKI.

Pada akhir bulan Oktober 1948 Kota Kudus berhasil dikuasai oleh tentara RI dari Divisi Siliwangi dan Divisi Brawijaya. Pasukan PKI dari pertempuran ini terpecah menjadi tiga, yaitu : Pertama, pasukan cukup besar yang dipimpin langsung oleh Amir Syarifudin. Kedua, pasukan PKI bersenjata dipimpin oleh Mayor Jenderal Joko Suyono, dan ketiga sisa pasukan dipimpin oleh Muso.

Setelah ada perundingan antara Letkol Sudiarto dengan Komandan Operasi Letkol Kusno Utomo, maka Komando Resimen XXIV menyatakan tidak melibatkan diri dalam pemberontakan PKI. dan setia pada pemerintah RI. Namun tiga batalyonnya, yaitu Batalyon Purnawi, Batalyon Rohadi, dan Batalyon Martono tidak mau tunduk atasan. dan terus bertempur membela PKI.¹⁰⁾

Komando Operasi Letkol Kusno dan stafnya kemudian mempersiapkan diri menghadapi pasukan yang masih setia pada PKI. yaitu menghadapi 3 batalyon dari Resimen XXIV, satu Resimen ALRI. dan 2 Batalyon eks Lasykar Rakyat dan Pesindo. Untuk mmenghadapi itu dipersiapkan kekuatan dari : Satu Brigade Siliwangi; satu Batalyon Darmono/Condrobirowo; satu Batalyon eks Hizbullah Semarang (Yon 21); satu Batalyon eks Hizbullah / Ronggolawe Pati; satu Kompi eks Hizbullah dari Solo; satu pleton Ateleri; dan masanya rakyat anti komunis di medan pertempuran telah disiapkan.

Baku tembak dan pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Pertempuran itu terjadi di daerah Wirosari dan Ngaringan, sebelah timur Purwodadi. Pada pertempuran itu dua kompi Yon Purnawi dapat dikalahkan. Pertempuran di hutan Grobogan, di wilayah kecamatan Sukalila dan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, yaitu anak buah Yon Purnawi dan Yon Rohadi berhasil dikalahkan. Dalam pertempuran di Gembong sekitar pabrik kopi di Lereng G. Muria, pasukan RI berhasil memporak porandakan pasukan PKI. Pertempuran yang cukup dahsyat di Juwana, yaitu di daerah-daerah pabrik Gula Trangkil dan Banyumanik, serta di pegunungan Dukuh Seti. Dalam pertempuran di Juwana itu Mayor Purnawi dan Mayor Rohadi dari Resimen XXIV berhasil ditembak mati sehingga perlawanan anak buahnya dengan mudah dipatahkan. Para tawanan yang disekap oleh PKI di pabrik Gula Trangkil berhasil dilepaskan. Tawanan itu antara lain para Ulama. tokoh politik, aparat negara yang setia pada RI, serta staf Batalyon XXI yang ditawan PKI.

Setelah Mayor Kemal Idris Komandan Operasi di Purwodadi dan sekitarnya mendengar laporan intel bahwa Amir Syarifudin dan Mayor Jenderal Joko Suyono beserta lebih kurang seribu orang komunis bersenjata lengkap memasuki Pegunungan Kendeng, bergerak ke Barat

menuju Purwodadi, maka dipersiapkanlah pasukan untuk mencegatnya. Pencegatan itu dilakukan secara gabungan dengan pasukan Komando Operasi Kusno Utomo dari daerah utara.

Informasi tersebut setelah dinyatakan dan dipelajari ternyata benar. Amir Syarifudin dikawal oleh satu kompi pasukan tempur inti pimpinan Kapten Kahartan, diikuti lasykar bersenjata jumlahnya lebih kurang 1000 orang. Untuk menghadang rombongan itu, maka sepanjang pegunungan Kendeng sejak dari Kecamatan Tawang Harjo, Wirosari, Grobogan, Brati hingga Purwodadi telah dijaga ketat oleh beberapa kesatuan. Kesatuan penjaga itu ialah : Batalyon Darmono, Batalyon Sabilillah/APS Mataram, Pasukan TP, Legiun Mangkunegara dan Batalyon Kemal Idris dari Siliwangi. Daerah ujung barat Kecamatan Penawangan, Klambu, Godong dijaga ketat dari 2 kompi eks Hizbullah Semarang pimpinan Komandan Sektor Godong Lettu Sukanto, diperkuat pula oleh 1 Kompi eks Hizbullah Surakarta dan 2 Kompi eks Legiun Mangkunegara. Sebagai pusat Komando berada di bawah Komando Operasi Kemal Idris yang berkedudukan di Purwodadi. Untuk daerah Utara seberang Pegunungan Kendeng, yaitu daerah-daerah Kabupaten Pati dan Kudus diperkuat oleh Batalyon ks Hizbullah Pati pimpinan Iskhak serta Batalyon Brimob. Sebagai Komandan berada pada Mayor Kosasih dari Siliwangi.

Pada awal bulan November terjadilah kontak senjata dimulai dari daerah Jatipohon, kemudian meluas ke daerah sekitar pegunungan Kendeng, yaitu medan pertempuran antara Sukolilo dan prawoto. Di sebelah selatan pegunungan Kendeng terjadi pertempuran di daerah utara Grobogan, jalan Grobogan - Purwodadi, namun pihak komunis berhasil dihalau, kemudian kembali ke utara dan mundur menghindari pasukan RI berjalan ke arah barat. Dalam pertempuran itu pihak komunis yang mati 10 orang, sedangkan pihak RI satu orang, yaitu Kapten Abdul Hamid.

Pada tanggal 15 November 1948 pukul 24.00 diam-diam Kompi pengawal Amir Syarifudin berhasil menerobos ke selatan melalui sebelah barat Kecamatan Branti dan menyeberang sungai Lusi. Kekuatan komunis itu diperkirakan 150 orang. Mereka memasuki hutan Karangsono - Kedungjati - Juwangi, namun menurut laporan pasukan

itu dicegat oleh Batalyon Slamet Riyadi. Setelah terjadi kontak senjata pihak Komunis kalah dan menyerah, kemudian ditahan. Penjagaan di pos Branti diperketat dengan tambahan pasukan dari Kompi Effendi Siliwangi, sehingga ketika terjadi penyusupan pasukan komunis ke selatan, dapat digagalkan dan berhasil ditangkap.

Pasukan komunis sudah berantakan, mereka berusaha menghindarkan diri dari kontak senjata secara langsung, bahkan berusaha mencari daerah aman dengan cara sopan. Demikian halnya dengan rombongan tokoh PKI yang dipimpin oleh Amir Syarifudin, mereka berusaha menyusup melalui hutan Klambu, namun pasukannya berhasil dihancurkan dan menyerah. Untuk sementara Amir Syarifudin dan empat tokoh pemberontak komunis berhasil lolos Meskipun mereka menyamar sebagai petani, namun berhasil ditangkap oleh pasukan Lettu Slamet dan Lettu Luki Anwar yang pada waktu itu sedang berpatroli.¹¹⁾ Ketika akan ditangkap di sekitar Desa Klambu, salah satu tokoh PKI itu akan menembak, namun oleh Lettu Luki Anwar diultimatum, bila tidak menyerah akan ditembak semuanya. Akhirnya lima tokoh pemberontak PKI, yaitu Amir Syarifudin, Mayor Jenderal Joko Suyono, Suripno, Setiajidi, dan Sarjono menyerah. Pada tanggal 22 November 1948 diserahkan kepada Mayor Kosasih selaku Komando Operasi dari Siliwangi.¹²⁾ Tawanan gembong pemberontak PKI itu kemudian dibawa ke Yogyakarta, diserahkan kepada Letkol Kusno Utomo yang pada waktu itu bermarkas di Benteng Vredenburg. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda menyerbu Yogyakarta, maka tawanan pemberontak komunis itu segera dibawa ke luar pihak Belanda pun berkepentingan dengan Amir Syarifudin, karena ternyata ia juga jadi kaki tangan Belanda. Amir Syarifudin adalah kolaborator NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service) yang mendapat bantuan uang jumlahnya besar dari Belanda.¹³⁾ Untuk mengacaukan Republik Indonesia. Atas perintah Gubernur Militer II Gatot Subroto, tahanan yang terdiri 11 gembong PKI dijatuhi hukuman mati. Mereka itu ialah : Amir Syarifudin, Maruto Darusman, Wikana, Tan Ling Ji, Darsono, Supeno, Sugito, Suripno, Joko Suyono, Ronomarsono, dan Oey Gee Hwat. Kesebelas tokoh pemberontakan PKI tahun 1948 itu di

tembak mati di desa Ngalihan Karanganyar, dan dikubur di pekuburan umum sebelah timur waduk Lalung, Kabupaten Karanganyar.

Gembong pemberontakan PKI tahun 1948 Muso rupanya terpisah dari kelompoknya. Muso hanya dikawal oleh dua orang FDR berseragam hitam-hitam. Dalam pelariannya Muso berusaha menyamar, namun tingkah lakunya yang menembak seorang polisi bernama Reksosudarmo, dan kemudian melarikan diri dengan mengendarai dokar, akhirnya dapat dikejar oleh Lettu Sumadi. Dalam pengejaran itu Muso dan dua pengawalinya melawan, sehingga terjadi baku tembak yang akhirnya Muso dan pengawalinya tertembak mati. 14)

Dengan tertangkapnya Amir Syarifudin dan kawan-kawannya, serta tertembaknya Muso, maka pemberontakan PKI tahun 1948 dapat ditumpas. Penumpasa ini berhasil atas kerjasama antara pasukan TNI Angkatan Darat yang di dalamnya terdapat bekas lasykar Hizbullah, Tentara pelajar dan lasykar lain yang loyal pada pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu peranan rakyat Indonesia yang anti komunis, khususnya umat Islam tidak dapat diabaikan dalam penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 itu.

Catatan

- 1) M. Mochdi, *Hizbullah-Sabilillah dalam Kancah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia*, (Surakarta: t.p., 1987), hlm.22.
- 2) *Ibid.*, hlm.23.
- 3) *Ibid.*, hlm.25.
- 4) Basit Adnan, Sumardi Ahmad Semangun, Soepanto, *Sejarah Perjuangan Lasykar Hizbullah-Sabilillah Divisi Sunan Bonang 1945 - 1950 di Surakarta.*, (Surakarta : Badan Penanggung Jawab Pembukuan Sejarah Hizbullah - Sabilillah, 1988), hlm. 45 - 46.
- 5) *Ibid.*, hlm. 44.
- 6) Soepanto, *Hizbullah Surakarta 1945 - 1950* (karanganyar : Penerbit UMS, 1992), hlm. 169 - 170.
- 7) *Harian Jawa Pos*, tanggal 18 September - 14 Oktober 1989. Artikel berseri tentang Pemberontakan PKI 1948 Madiun.

- 8) Abdul Basit Adnan dkk., *op.cit.*, hlm. 44.
- 9) *Ibid.*, hlm. 42. Pada catatan Mayor Muhammad Munawar.
- 10) M. Moehdi, *op.cit.*, hlm. 27.
- 11) *Ibid.*, hlm. 30. Lihat pula Harian Jawa Pos, tanggal 12 Oktober 1989.
- 12) *Ibid.*, hlm. 30-31.
- 13) *Harian Jawa Pos*, tanggal 12 Oktober 1989, artikel berjudul "Amir Syarifudin Ditangkap Batalyon Kosasih".
- 14) *Harian Jawa Pos*, tanggal 5 Oktober 1989, artikel berjudul "Musu Ditembak Kompi Sumadi di MCK Umum".

HIZBULLAH - SABILILLAH DIVISI SUNAN BONANG DALAM KLES II

A. Adaby Darban

Baru saja selesai ikut berjuang menumpas pemberontakan PKI tahun 1948, eks Hizbullah-Sabilillah Sunan Bonang yang sudah tergabung dalam TNI Angkatan Darat, memenuhi tugas baru untuk melawan agresi Belanda yang II. Pada tanggal 19 Desember 1948 pihak Belanda mengkhianati hasil perundingan Renville, dengan mengadakan serbuan ke Ibu Kota RI Yogyakarta. Pada hari itu juga Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Presiden Soekarno, Hatta dan beberapa anggota kabinet ditahan oleh Belanda. Menteri Kemakmuran yang sedang bertugas di Sumatera Barat mendengar berita itu kemudian mengambil inisiatif mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang kemudian mendapat mandat dari Soekarno. Jenderal Soedirman memimpin sendiri Perang Gerilya melawan penguasa penjajahan Belanda. Instruksi Jenderal Soedirman dalam persiapan perang gerilya itu sebagai berikut :

Pertama, tidak akan melakukan pertahanan linier; Kedua, memperlambat serangan musuh, serta mengadakan pengungsian total aparatur negara, dan membumihanguskan kantor dan peralatannya. Ketiga, bagi pasukan yang asalnya dari daerah federal, seperti Tentara Siliwangi yang berhijrah agar *berwingate* (menyusup kembali ke daerah asalnya) dengan tugas baru membentuk kantong-kantong.

sehingga seluruh Pulau Jawa merupakan daerah perang yang luas. Adanya instruksi itulah maka semua Angkatan Perang RI telah bersiaga untuk mengadakan perang gerilya.

Pasukan eks Hizbullah - Sabilillah Divisi Sunan Bonang yang telah menyatu dalam berbagai batalyon TNI AD juga terpanggil untuk siap berperang gerilya. Dari mereka itu ada yang berjuang di sebelah Barat Surakarta sampai di Klaten dan sekitarnya; berada di medan Tenggara Surakarta sampai dengan Karanganyar; dan ada pula di daerah pantai Utara Jawa Tengah. Pada eks Hizbullah - Sabilillah ada yang mengikuti induk batalyonnya, dan ada yang bergabung dengan pasukan lain. Mereka itu ada yang bergabung pada PM Kt. (Pemerintah Militer Kecamatan); Mopel (Mobil Pelajar); dan juga di TP (Tentara Pelajar). Mereka eks Hizbullah - Sabilillah itu menganggap yang penting ikut berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia dan melawan penjajahan Belanda.

1. Perjuangan di Tenggara Surakarta

Sebagian pasukan TNI AD baik dari Artileri (pasukan meriam) dan juga eks Hizbullah - Sabilillah bergerak ke arah tenggara Surakarta menuju Karanganyar. Beberapa pasukan telah sampai Karanganyar, namun pasukan artileri baru sampai timur jembatan Bengawan Solo Jurug. Pihak Belanda tanggal 21 Desember 1948 sudah menguasai Surakarta, dan berhasil menemukan pasukan artileri. kemudian merampas meriam itu ditariknya kembali ke Surakarta. Dengan demikian pasukan RI kehilangan persenjataan berat yang dapat dibanggakan. Akan tetapi, pasukan gerilyawan RI tidak putus asa. tetap berkonsentrasi di Karanganyar untuk menyusun perang gerilya selanjutnya.

Divisi IV TNI masih memiliki persenjataan dan amunisi yang cukup banyak. Sebagai gudang amunisi dan persenjataan di Karanganyar digunakan rumah Pak Karas, tempat itu jaraknya kira-kira 1 km. Sebelah timur jembatan Suwaluh, utara jalan menuju Matesih. Kekayaan persenjataan dan amunisi ini yang akan mendukung perang gerilya selanjutnya. Namun, ketika Belanda mengadakan ekspansinya menuju Karanganyar, kekhawatiran terhadap gudang senjata jatuh ketangan Belanda mulai muncul. Kusrin dan Kusno

sebagai penjaga gudang senjata itu mengusulkan bahwa agar persenjataan itu tidak jatuh ketangan Belanda, lebih baik gudang senjata itu dibakar. Usul itu ditolak oleh Supanto karena pembakaran gudang itu akan membahayakan seluruh desa terbakar. Setelah dimusyawarahkan, disepakati diadakan kerja-bakti massal rakyat pedesaan untuk memindahkan gudang amunisi dan persenjataan ke desa-desa sekitar Karanganyar. Pada malam hari itu juga dikerahkan 200 orang memindahkan senjata dan amunisi. Di antara mereka ada yang membawa *tomblok* diisi peluru, ada yang membawa Karabyn, *houwitser*, bermacam-macam granat, ranjau, sepapan, pistol dan juga senjata tajam seperti parang, tombak, pisau sangkur dan sebagainya. Selain itu juga ada peralatan bertani dan rumah tangga yang jumlahnya cukup banyak. Sebagai imbalan rakyat mendapatkan peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga, sehingga mereka bekerja merasa senang. Rumah pak Bakdi seorang pegawai Kantor Agama di gali dan digunakan untuk menyimpan peluru dan senjata. Setelah selesai pemindahan gudang senjata, kemudian jembatan Sulawuh diusahakan putus, untuk menghambat serangan Belanda. Namun setelah di ledakkan dengan trekbom, ternyata jembatan itu tidak runtuh semuanya. Pagi harinya Konvoi Belanda masih dapat melewati jembatan itu, untuk menuju ke Karangpandan dan Tawangmangu.

Dalam rangka menegakkan pemerintahan, maka di Kabupaten Karanganyar dibentuk Pemerintahan Gabungan Sipil dan Militer, adapun pemimpinnya Mayor Suharso dan Bupati Salim Harjohantoro, dengan nama Pemerintahan Militer Kabupaten Karanganyar. Kantor kabupatennya berjalan berpindah-pindah di daerah yang aman. Adapun yang pernah menjadi kantor kabupaten antara lain: Desa Dari, Daren, Jumantoro, Ngunut, dan Kayen.

Pasukan Belanda bermarkas di Sanggarahan Karangpandan dan Tawangmangu. Dengan tempat itu dijadikan markas, maka sering terjadi konvoi Belanda hampir setiap hari melalui jalan raya sekitar Karanganyar. Pemandangan ini menarik perhatian para pejuang Republik Indonesia. Lebih kurang satu minggu dari peristiwa pendudukan itu, maka pasukan RI dibantu oleh para pemuda dari pedesaan mulai mengadakan perang gerilya. Markas Belanda di pabrik Gula Tasikmadu menjadi incaran para gerilyawan. Usaha pertama ialah

menyebarkan potongan kawat berduri di sepanjang jalan ke luar dari pabrik. Pada pagi harinya ketika konvoi Belanda keluar dari markasnya, truk-truk konvoi itu bannya kempes kena kawat berduri, sehingga pasukan Belanda terpaksa jalan kaki, dengan penuh kemarahan dan senjata siap tembak. Di perjalanan itu pasukan Belanda menembaki orang yang dicurigai, sesampainya di pasar juga membabi buta menembaki kerumunan orang, sehingga jatuh korban 16 orang tidak berdosa tewas.

Para gerilyawan mulai bergerak malam hari memasang ranjau di sepanjang jalan raya dari Palur sampai tawang mangu. Ranjau dan peluru serta persenjataan yang dialihkan dari Gudang Senjata itu banyak manfaat untuk perang gerilya. Pagi harinya setiap konvoi pasukan Belanda yang melewati jalan raya itu meledak terkena ranjau, dan banyak yang mati. Namun Belanda mengadakan pembalasan dengan menembak setiap bertemu dengan laki-laki, mengadakan pembersihan dan pembakaran rumah-rumah penduduk.

Pasukan Gerilyawan RI meningkatkan serangannya ke jantung markas Belanda di Karangpandan. Mereka bergerak melalui desa strategis yaitu Gayamdonpo, dan pasukanya juga bergiliran, antara AURI, TNI AD eks Hizbullah dan TP mengadakan pencegahan dan penyerbuan. Mereka banyak berhasil menyerap dan membunuh tentara Belanda yang sedang berpatroli maupun konvoi. Serangan itu banyak menewaskan pihak Belanda yang bermarkas di Karangpandan.

Pihak Belanda rupanya mempelajari daerah tempat penyerbuan gerilyawan RI. Pada saat 13 pelajar telah siap akan menyerbu Belanda telah menjebaknya lebih dahulu. Sejak malam hari Belanda sudah siap di lereng-lereng bukit. Oleh karena itu ketika pasukan pelajar yang berjumlah 13 orang mulai bergerak, diketahui Belanda dan ditembaki. Pada pertempuran itu yang gugur 9 orang pelajar, yaitu : Soenarto, Slameto, Adenan, Priyadi Moejoto, Salmanhadi, Soemarjo, Soeryadi, Lakstoto (Jegot).¹⁾ Untuk mengingat dan mengabdikan jasa para pahlawan muda itu, maka dibuatlah monumen yang diberi nama "JOKO SONGO" di Taman Pancasila Karanganyar.

Di Tawang Sari Sukoharjo Kiai Asnawi Hadisiswaya yang dikenal dengan nama Kiai X mengadakan konsolidasi pasukan untuk perang

gerilya. Ia sebagai pegawai Kementerian Agama dengan menjalankan inspeksi ke kantor-kantor Agama, juga mengadakan konsolidasi pasukan. Dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain dengan dikawal oleh PM Kt. Daerah yang dikunjungi antara lain : Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Jumantono. Di Jumantono ditemui oleh Salimulhadi Kepala Kantor Agama Kabupaten Karanganyar. Di tempat ini diadakan pertemuan konsolidasi dengan umat Islam. Kiai X mengadakan ceramah dan penanaman semangat untuk berani melawan Belanda. Malam itu juga Kiai X dikawal oleh PMKt. Matesih. memotong jalan raya Tawangmangu menuju ke Ngargoyoso, dekat markas Belanda di Pesanggarahan Karangpandan. Perjalanan selanjutnya ke Junawi, kemudian menuju Sragen. Di Daerah Gondang Sragen ketika melintasi sawah ditembaki Belanda, meskipun penuh lumpur disekujur bandanya, ia selamat. Perjalanan Kiai X ini memiliki arti penting untuk memberikan semangat di medan gerilya, sehingga gerilyawan kita tetap tegar, berjihad dan berani mati syahid melawan Belanda.

2. Pertempuran di Klaten dan Sekitarnya

Didaerah Klaten dan sekitarnya merupakan ajang perjuangan eks. Hizbullah - Sabilillah yang sudah tergabung dalam TNI AD, berkumpul untuk melawan penjajahan Belanda. Mayor Munawar salah satu pemimpin pasukan yang terkenal di front Klaten dan sekitarnya.

Dalam rangka perang gerilya melawan Belanda, dibagilah tugas operasional sebagai beriku : Pertama, kompi I bersama staf Batalyon bertugas di Klaten Bagian Selatan. Kedua, kompi II bertugas di bagian Timur jalan raya Yogya - Solo. Ketiga, kompi III bertugas di sebelah Barat jalan Raya Yogya-Solo. Adapun Mayor Munawar bertugas di daerah Klaten bersama dengan L. Sumitro.²⁾

Setelah pembagian tugas operasional perang gerilya itu terbentuk, maka mulailah gerakan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 8 Februari 1949 Kompi II dari Batalion 20 KDM Klaten menyerang pos Belanda di Pabrik Gula ceper yang diperkirakan punya kekuatan I kompi. serangan itu mulai bergerak pada pukul 02.00 dini hari. Dalam waktu satu jam berhasil memasuki pabrik gula yang menjadi

sasarannya. Maka mulailah baku tembak yang amat seru sampai siang hari. Dalam pertempuran itu pihak gerilya menang. Belanda mengosongkan markasnya dengan meninggalkan 2 truk dan beberapa pucuk senapan laras panjang serta perbekalan. Dari pihak gerilyawan RI yang menjadi korban ialah: Sukri guur' dimakamkan di desa Sentono Ngawonggo, Lettu Masyudiyanto (komandan pleton) luka-luka dan jari tangannya putus, dan pratu Suhir kepadanya terserempet peluru. Pasukan Belanda yang mati jumlahnya 5 orang. Pihak Belanda yang kalah itu, kemudian beberapa lama datang kembali dengan bantuan dari markas karangwun, Ngawonggo dan dilindungi oleh Pesawat Terbang merebut Pabrik Gula ceper.³⁾

Pasukan gerilya dari kompi II Batalyon 20 yang dipimpin oleh Syaiful Bakhri, dengan Dan Ki Fuad, dan di bantu oleh kompi II pimpinan kapten Yuslam, mengadakan pecegatan terhadap patroli Belanda di Juwiring Klaten. Kontak senjata terjadi antara pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 siang hari. Dalam baku tembak yang pasukan belanda lebih banyak serta lengkap persenjataanya itu, terjadilah ketidak seimbangan. Dengan demikian terjadilah korban yang banyak dikalangan gerilyawan. Dalam pertempuran itu 7 orang gugur sebagai syuhada, dan 3 orang luka-luka. Tujuh orang syuhada' yang gugur itu dikubur di samping Masjid Gumantar, Juwiring. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Februari 1949.⁴⁾

Pada tanggal 18 April 1949 kompi I, Batalyon 20 KDM klaten, pada waktu tengah malam mengadakan penyerbuan ke Pos Belanda di kota Klaten. Pihak gerilyawan RI mengalami kemenangan moral, meskipun tidak menduduki pos Belanda itu. Memang serangan itu ditunjukan untuk mengacaukan pertahanan Belanda. Pada siang harinya pihak Belanda mengadakan serangan mortir dan canon dengan membabibuta tanpa arah. Salah satu peluru Canon itu jatuh di rumah Letnan Tihimin Senden. Secara kebetulan Letnan Tohimin Komandan PMKt. Cawas itu sedang berada di muka rumahnya, sehingga ia gugur bersama rimah dan kerbaunya.

Serangan gerilyawan RI di Pedan yang dilakukan mulai pukul 02.00 dinihari pada tanggal 15 Maret 1949, berhasil mengusir Belanda yang menduduki Pos Pedan. Dalam pertempuran yang berlangsung

empat jam itu, Belanda kalah dan mengosongkan markasnya, sedangkan di pihak gerilyawan yang gugur sebagai syuhada' adalah Kopral Sriyono.

Pada tanggal 25 April 1949 Pleton I Kompi III bertugas untuk merusak jembatan-jembatan di Jalan Raya Yogyakarta Solo, dengan maksud agar menghambat kemajuan militer Belanda. Usaha itu diketahui Belanda, sehingga pihak Belanda mengerahkan pasukannya. Terjadilah pertempuran di Mlese, Ceper. Dalam pertempuran itu gugur di pihak gerilyawan yaitu: Syuhada' Pratu Zaini dan Pratu Joyodiharjo.

Pertempuran di desa Jlopo, Padas, Jatinom terjadi pada tanggal 29 April 1949. Pada waktu itu pukul 09.00 Kompi III pimpinan Kapten Abd. Sirat mengadakan sergapan terhadap patroli dan mata-mata Belanda. Dalam kontak senjata terjadi pertempuran yang seru sampai pukul 02.00 siang hari. Dalam pertempuran itu pihak Belanda yang mati sebanyak 15 orang, sedangkan pihak gerilyawan yang gugur sebanyak 6 orang. Keenam orang syuhada' itu ialah : Kapten Abd. Sirat, Lettu M. Thahir, Prada Asmuri, prada Kemis, prada Masykur, dan prada komarun.⁵⁾

Pada perang gerilya itu masing-masing kesatuan memiliki otonomisasi untuk melakukan serangan, namun juga masih dalam suatu koordinasi. Dengan demikian maka sering terjadi pertempuran-pertempuran di beberapa tempat, seperti : pada tanggal 25 Mei 1949 pasukan Pleton II Kompi II pimpinan Saifuk Bakhri menghadang patroli Belanda di desa Kemit. Terjadilah baku-tembak yang seru selama empat jam, sejak dari pukul 10.00 sampai pukul 14.00. Dalam pertempuran itu pihak Belanda mati 16 orang, sedangkan pihak gerilyawan gugur 9 orang. Kesembilan orang yang syahid itu ialah : Nurman, abdurrazaq, Alipan, Zuhdi, Dawami, Sudiyo, Ismadi, Sarjono, dan suripto. Para Syuhada' yang gugur itu dimakamkan di dukuh kemit, kwaren, ketandan.⁶⁾

Pada tanggal 10 Juni 1949 para gerilyawan mengadakan penghadangan patroli Belanda di karangwuni, Ceper. Pada pukul 14.00 siang hari terjadilah pertempuran, sehingga kedua belah pihak menderita korban. Korban yang gugur dari pihak gerilyawan seorang yaitu Anis, ia dikuburkan di Karangwuni Ceper.

Pertempuran kemit yang membawa gugurnya 9 syuhada⁷ merupakan cambuk bagi kapten Sofyan komandan Kompi II. untuk mengadakan serangan pembalasan. Kompi II dengan perhitungan yang masak memilih medan pertempuran antara Troso dengan Kunden. Dengan kekuatan satu Kompi penuh menghadang konvoi Belanda yang datangnya dari arah Jatinom. pada pukul 09.00 datanglah konvoi Belanda melewati daerah itu. Kapten Sofyan dengan segera mengomandokan untuk menyerang, dan terjadilah pertempuran yang sengit. Dalam pertempuran itu pihak Belanda kocar-kacir, dan jatuh korban 20 orang mati dan beberapa orang luka-luka. Pihak gerilyawan tidak ada satupun yang jadi korban, sehingga serangan pembalasan itu dengan sukses. Pihak Belanda tidak berani langsung mengambil jenazah pasukanya yang mati dan terluka. Baru beberapa saat kemudian dengan mengerahkan pasukan yang lebih kuat disertai kawalan pesawat terbang, mereka mengambil jenazah korban perang. Pada saat itu pasukan Sofyan sudah meninggalkan tempat.⁷⁾

Selain bertempuran melawan Belanda, pasukan ex pasukan Hizbullah juga mengusahakan keadaan daerahnya tentram tidak terjadi tindakan yang merugikan rakyat. Selain itu ex pasukan Hizbullah juga bersikap waspada terhadap bahaya yang dilakukan oleh kaum komunis, atau sisa-sisa pemberontak PKI tahun 1948. Hal inilah yang nantinya akan berhadapan dengan beberapa pasukan yang menyeleweng dalam tugasnya dan pasukan yang menerima kembali bekas-bekas PKI masuk dalam jajarannya.

Batalyon Munawar ex Hizbullah sering mengadakan operasi pembersihan penjahat-penjahat yang memeras rakyat. Selain itu mereka juga tidak mau menerima sisa-sisa PKI masuk dalam TNI⁸⁾. Pada tanggal 16 Juli 1949 terjadi bentrokan sesama TI, yaitu Batalyon Munawar ex Hizbullah dengan Batalyon Sunitiyoso yang mau menerima rehabilitasi orang-orang PKI. Bentrokan bersenjata itu terjadi di daerah Truketon, Pedan, dan menimbulkan beberapa korban. Kejadian itu dapat diselesaikan setelah ada surat dari Panglima Besar Jendral Sudirman No. 938/SCC/G.M./49. yang isinya :

“ Hapus semua pertengkarani idiologi dan galang persatuan dan kesatuan yang kuat dalam melenyapkan kolonialisme dari bmi Indonesia “

Surat seruan ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian yang diselenggarakan oleh Letkol Slammet Riyadi. Hasil perdamaian itu ialah : Dipisahkannya kedua pasukan yang bentrok, yaitu Pasukan Sunitiyoso menempati daerah-daerah sebelah utara jalan Yogya - Solo kecuali karanganom dan ketandan. Pasukan Munawar menempati sebelah selatan Yogya - Solo, di daerah semula, yaitu: daerah-daerah Ceper, Trucuk, Karangdowo, dan Juwiring.

3. Perjuangan di dalam Kota Surakarta

Kota Surakarta dikuasai oleh Belanda, sedangkan kraton kasunanan Surakarta mendapatkan bantuan pejuang keamanan dari Belanda dengan nama Teritoriale Batalyon Surakarta (TBS). Selain itu pasukan Belanda juga setiap malam mengadakan patroli di Karton dan sekitarnya.

Kekuatan bersenjata ini menjadi incaran gerilyawan RI, khususnya yang bertugas sebagai gerilyawan kota. Gerilyawan kota ini kebanyakan masih muda, yaitu para pelajar yang ikut bagian dalam perjuangan RI. Di pusat kota Surakarta terdapat kelompok gerilyawan Pelajar Islam Indonesia dengan nama Corps Pelajar. Markasnya di sebuah gedung bertingkat rumah Haji Anwar Shodiq (almarhum) di jalan Slompretan. Sebagai pengelola markas itu ialah ibu Siti Aisyah, sebagai orang tua yang akrab dengan para pelajar pejuang ia dianggap sebagai orang tuanya dan yang melindungi perjuangan para palajar. Dari rumah inilah dipersiapkan berbagai gerakan gerilyawan kota oleh para pelajar Islam, GPII dan Hizbulllah-Sabilillah.

Salah satu perencanaan operasi gerilya kota ialah mengadakan penyerbuan untuk melucuti Tentara Semut Ireng yaitu tentara keamanan kraton kesunanan dan Mangkunegaran yang dipersenjatai oleh Belanda. setelah acara itu dimatangkan, namun untuk palaksanaannya masih ada kendala, yaitu adanya mata-mata Belanda yang sering mengamati gerak gerik palajar. Oleh karena itu, sebelum operasi gerilya kota dilakukan, terlebih dahulu “ membereskan ” mata-mata Belanda yang membahayakan itu. Ditunjuklah dua orang palajar Gatot Abdullah dan temannya, untuk membereskan mata-mata itu. Keduanya berboncengan sepeda sudah siap mencegat di sekitar alun-

alun Utara. Tepat pukul 08.00 mata-mata itu keluar dari Jalan Supit Urang Kulon, kemudian dikuntit oleh dua petugas gerilya. Sesampainya di antara dua ringin kurung, Gatot menubruk mata-mata dan ditembak jidatnya dengan pistol Colt hingga mati. Kemudian mereka berdua dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Oleh karena masih pagi dan tidak banyak orang, akhirnya mereka selamat.

Setelah operasi membereskan mata-mata itu berhasil, kemudian dilanjutkan operasi gerilya melucuti pasukan Semut Ireng penjaga Kraton. Setelah sholat Isya', satu regu gerilyawan pelajar mulai bergerak mendekati Benteng kraton Solo. Pasukan yang dipimpin oleh Fuad itu kemudian memutuskan kabel telepon, dan menjebol tembok benteng yang tebalnya 1 meter. Setelah berhasil, mereka pancing dengan pohon pisang, namun tidak ada reaksi, akhirnya satu regu itupun masuk dalam benteng sebagian masuk lewat kampung Hordenasan, Gambuhan, terus menuju regol kemandungan. Demandungan inilah jadi pos pasukan Semut Ireng yang menjadi sasaran. Dengan gertakan yang penuh wibawa, pasukan Semut Ireng ketakutan dan tidak melawan. Dengan demikian gerilyawan pelajar Islam itu berhasil melucuti persenjataan mereka. Mereka tidak membunuh pasukan Semut Ireng. Pasukan Semut Ireng yang sedang berjaga itu hanya diikat kaki dan tangannya, serta mulumnya disumbat. Gerilyawan Corps Pelajar Islam itu setelah mendapatkan persenjataan terus kembali ke markas dengan selamat.⁹¹

Jam malam di berlakukan di kota Solo, namun bila malam tiba pendudukan merasa resah, karena adanya gerombolan yang menggarong harta benda rakyat. Situasi yang demikian itu menjadikan keprihatinan para pejuang ex Hizbullah yang kemudian mengupayakan untuk bertindak mengamankan rakyat. Setelah diselidiki ternyata yang menggarong rumah-rumah orang kaya dan keluarga muslim itu ialah bekas-bekas Laskar Pesindo - FDR/PKI. Oleh karena itu ditempatkan satu pleton gerilyawan muslim ex Hizbullah-Sabilillah di kampung Laweyan sebagai pusatnya. Mereka bertugas mengamankan daerah rawan garong, yaitu di Tegalsari, Mangkuyuda, Sondakan, Keprabon. Bumi dan Kauaman. Pasukan eks Hizbullah berhasil menangkap dan menghajar para garong yang membuat kerusakan di Kota Solo itu. Dengan demikian pendudukan yang ada di dalam kota merasa aman.

4. Perjuangan di Utara Surakarta Hingga Pantai Utara

Batalyon TNI eks. Hizbullah yang berada di Kudus dan sekitarnya berusaha untuk konsultasi memperkuat diri dalam menghadapi akan adanya serbuan Belanda. konsolidasi ini dilakukan baik dengan penataan pasukan dan disertai juga mujadallah. Para pemimpin Hizbullah antara lain kapten Moh. Moehadi dan Lettu Bardaini, disertai ulama muda hafidz Al Qur'an Kyai Muhammad, memohon kekuatan dari Allah SWT. Untuk pasukan eks Hizbullah. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan manauver dengan pesawat cocor merah dan yogger menyerbu Kota Kudus. hal ini merupakan suatu tanda pasukan Belanda bergerak menuju kudus dan akan menguasai Kudus. Pada pukul 16.00 sore hari pasukan Belanda mulai memasuki Kudus dengan menggunakan dentuman meriam dan rentetan mitraliur mereka menghujani Kudus. Di tengah-tengah serbuan Belanda itu, Kapten Moh. Moehdi mengumumkan pembentukan Batalyon baru yang merupakan kekuatan eks Hizbullah, batalyon itu dinamai : Batalyon Muria. Pengumuman itu bunyinya sebagai berikut : ¹⁰⁾

“ Bismillahirrahmanirrohiem, di tengah tengah rentetan mitraliur dan dentuman meriam musuh, dengan ini kami mengumumkan, bahwa sejak tanggal 19 Desember 1948, di kota Kudus telah berdiri kesatuan Batalyon “ SUNAN MURIA “ yang siap bertempur melawan musuh-musuh Agama, Bangsa, dan tanah Air serta Pemerintah RI.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar !!! “

adapun susunan Komando Batalyon Sunan Muria itu ialah : Mayor Basuno (Komandan Batalyon), kapten Moh. Moehdi (WaDan Yon / Kep. Staf), Lets. F. Rujito (Dan. Ki. I), Lets. Sukanto (Dan. Ki. II), Lettu Im Sudarno (Dan Ki III), dan Lettu Amin Fatah (Dan Ki IV).

Pada tanggal 22 Desember 1948 Konvoi besar pasukan Belanda mulai memasuki kota Kudus. Mereka berkendara tank, panser, jep dan Truk berisi tentara. Masuknya pasukan Belanda itu disambut dengan perang gerilya selama satu minggu terus menerus. Para gerilyawan menyerang pos-pos Belanda di Kompleks Pabrik Gula Rendeng, dan di Gedung Bapera. Serbuan itu dipimpin oleh Lettu Baraini, yang berhasil mengacaukan dan membikin bingung pihak Belanda.

Di dalam menghadapi pendudukan tentara Belanda itu terjadi di beberapa batalyon RI yang ditinggalkan oleh komandannya, kemudian anak buahnya bergabung dengan Batalyon Sunan Muria yang masih bertahan di Kudus untuk menghadapi Belanda. Pada tanggal 28 Desember 1948 Komando Batalyon Sunan Muria mendapat Surat Perintah Siasat peran dari Brigade II melanjutkan pemerintah Siasat Kilat dari komando Jawa Kolonel A.H. Nasution. Surat isinya agar supaya Batalyon Sunan Muria menggerakkan pasukannya menuju ke daerah pendudukan Belanda mendekati Semarang. Mulai tanggal 30 Desember 1948 Batalyon Sunan Muria sudah berkonsentrasi di Welahan atau Mijen, dan pada tanggal 31 Desember 1948 berhasil menguasai daerah Wadung. Untuk menjaga daerah Kudus diberikan tanggung jawab Lettu Bardaini dengan pasukan 1 pleton dari Letnan Sholeh, yang bertugas untuk mengacaukan pasukan Belanda. Kompi amin Fatah diserrahi perthanan Kota Jepara dan panBangsi yang sering untuk pendaratan Belanda dari kapal peranganya.

Pasukan Kompi F. Rujito sering mengadakan serbuan ke Demak. Pada tanggal 3 Januari 1949 terjadi baku tembak di desa Wedung yang dibatasi oleh Sungai Serang. Serangan itu meskipun belum berhasil maju ke Demak, namun telah dapat menghancurkan sebagian pasukan Belanda. serangan pasukan pleton A. h. Sutrisno berhasil menghancurkan : 2 jeep, membunuh 10 tentara Belanda, dan menawan 2 tentara Belanda, serta merebut 12 pucuk senjata laras panjang dan pendek, dan 12 stel pakaian Belanda . Pihak gerilyawan kehilangan seorang prajurit yang tidak dapat dikemukan.

Belanda mengadakan serangan balasan ke Wadung pada tanggal 5 januari 1949, pukul 07.30 pagi hari, dengan megerahkan pesawat cocor merah dan yagger, memuntahkan tembakan mitraliur dan bom. Mereka itu menyerang posisi tempat pasukan RI berada. Dari serbuan Belanda itu beberapa rumah penduduk hancur dan terbakar. Selain itu pasukan gerilyawan Pleton A. Ch. Sutrisno gugur 6 orang, yaitu 4 di Wedung dan gugur di desa Mutih. Berdasarkan situasi dan cuaca pada waktu itu tidak menguntungkan untuk bertahan dan bergerak maju, maka Komando Batalyon menarik seluruh pasukan beristirahat di desa-desa Betealit, Darmajiti, dan desa-desa di sekitar lereng Gunung Muria lainnya

Pada bulan Februari 1949 pasukan eks Hizbullah membagi tugas, yaitu pertama Mayor Basuno dengan kekuatan kompi Sudarno dan kompi Amin Fatah bermarkas di Muria, dan bertugas operasi gerilya di Kudus, Jepara dan sekitarnya. Kedua kapten Moh. Moehdi dengan kompi F. Rujito dan Kompi Sukanto menguasai basis Gunung Kendeng, Klambu dan Gundi, serta operasi gerilya di Pati, Purwodadi dan sekitar Kudus.

Pada tanggal 5 Maret 1949 kedua bagian pasukan Komando Batalyon Sunan Muria berkumpul kembali di desa Mejing Prapatan, di kaki Gunung Lawu. Oleh Gubernur Militer II Kol. Gatot Subroto, Batalyon Komando Sunan Muria dikukuhkan dengan Surat Keputusan baru sebagai Pengawal GM II yang bermarkas di kecamatan Jenawi, tepi barat laut Lawu. Di daerah baru ini secara ajeg melakukan serangan gerilya di daerah pendudukan Belanda sekitarnya secara routine.

Serangan ditujukan ke kota Sragen seminggu sebanyak lima atau tujuh kali. Serangan-serangan itu bergilir dilakukan oleh Batalyon Sunan Muria dari Ton I Ki II, dikoordinir oleh Lettu A. Prayitno dibantu Peltu Sudewo, bergiliran dengan Ki III di bawah pimpinan Lettu Sudarno, dan dibantu pasukan lain yaitu dari Polisi Istimewa (PI) dan dari Yon Condrobirowo yang bergaris di Utara Bengawan Solo.¹¹⁾

Batalyon Komando Sunan Muria berhasil mendirikan pos-pos gerilya di kota Sragen. Pos-pos itu sebagian besar dipegang oleh pejuang-pejuang Puteri. Pasukan ini dibantu dari beberapa pasukan yang bermarkas di luar kota selalu mengadakan serbuan ke daerah yang dikuasai Belanda. Dalam serangan ini Belanda selalu mundur dengan membawa korbannya, sehingga desa-desa di sekitar Sragen dapat direbut. Desa-desa yang dapat direbut antara lain : Desa Pucuk, Kecamatan Masaran; Desa Karangmalang, Kecamatan Karangmalang; Desa Dawung; Desa Blimbing, Kecamatan Sambirejo.; Desa Ngrampal; dan Desa Pondok sekitar Mantingan. Dalam operasi perang gerilya selama empat setengahh bulan itu tidak ada korban di pihak gerilyawan eks Hizbullah.

Pasukan eks Hizbullah dalam perang gerilya selalu mendapat dua tugas. pertama di garis depan menggempur Belanda, dan kedua di garis belakang memberi penyuluhan pada rakyat tentang perjuangan serta memulihkan keadaan dari propaganda kesesatan PKI.

Pada bulan Juli diadakan serangan ke Kota Sragen Dalam serangan itu berhasil menghancurkan markas polisi Belanda, dan membunuh Komandan Polisi, informan Belanda dan anggota tentara Belanda. Gerilyawan juga berhasil melarikan 49 polisi OW dengan 49 pucuk senjata gerent lengkap dengan pelurunya, serta pakaian seragamnya.

5 Serangan Umum Terhadap Surakarta

Desas-desus akan adanya Ceasfire atau gencatan senjata antara Belanda dan pihak Indonesia akibat dari hasil perundingan Roem - Royen sudah sampai pada para gerilyawan pejuang bangsa eks Hizbullah. Oleh karena itu, untuk memperjelas, maka diadakan pertemuan para komandan pada tanggal 3 Agustus 1949 di Jenggrik Gondangrejo. Pertemuan itu dipimpin oleh Mayor Ahmadi. Dalam pertemuan itu diinformasikan tentang Ceasfire (gencatan senjata). Gerakan offensif gerilyawan kita dan situasi politik. Pada pertemuan itu pula diputuskan tentang : pertama, tetap berpegang teguh pada perintah Kol. Gatot Subroto No. 16. A Kedua, Perintah Siasat No.1/8/SWK/A3/PS.49 tanggal 5 Agustus 1949 yang isinya : "Mengadakan Serangan umum secara besar-besaran ke kota Solo sejak tanggal 7 Agustus 1949 sampai pada saat berlakunya Caesfier tanggal 10 Agustus 1949, pukul 12.00 siang."

Serangan umum ke kota Solo yang sudah direncanakan itu untuk menggempur pos-pos Belanda di 20 tempat dalam kota Solo. Pos-pos atau markas Belanda yang akan diserang itu ialah :⁽¹²⁾

- (1) Panggung Jebres; (2). Kompleks Nargoyudan; (3). Banjarsari
- (4) Markas MP, (5). Komplex Balapan; (6) Kompleks Beteng; (7) Komplek Purbayan; (8) Kompleks Timuran; (9) Suryosuwitan; (10) Ngapeman; (11). Muslim Sriwedari; (12) Gedung Pengadilan; (13) Bekas Asrama Banteng; (14). Kodim; (15) Kantor Petani Beron; (16)

Rumah muka Gereja Gendengan; (17). Pesanggrahan (18) Bekas Markas Hizbullah Sie Dian Ho (Purwosari); (19) Jembatan Jurug dan Jembatan Gading; (20) Jembatan Purworejan Kabakkaramat.

Tepat tanggal 7 Agustus 1949 pasukan TNI eks Hizbullah - Sabilillah sudah masuk kota Solo. Mereka mengadakan pengepungan markas-markas Belanda yang telah direncanakan dengan menunggu perintah gempur. Pusat-pusat logistik Belanda dikuasai, diantaranya pabrik-pabrik roti yang selalu setor makan pada Belanda ditutup. Dengan demikian markas-markas Belanda kebingungan tidak dapat makan pagi dan siang itu. Begitu jam "D" dan perintah gempur diserukan, maka terjadilah pertempuran yang dahsyat. Pihak Belanda tidak dapat keluar markas. Itupun dihadap pasukan dan banyak yang terkena ranjau darat dan howitser. Kejadian mengerikan di lintasan kereta api Jebres Tank Belanda hancur kena howitser, serdadunya banyak yang mati.

Pasukan yang berasal Timur Surakarta bergerak menuju keutara. kemudian masuk kota dan berhasil menguasai kampung-kampung Warungmiri, Jagalan, Purwopuran, dan Kampung Sewu. Pada tanggal 8 Agustus 1949 berhasil pula menguasai kampung-kampung: Kauman, Palugunan, Pasar Kliwon, Batangan, dan kampung Baru. Dalam pertempuran membebaskan kampung-kampung itu terjadi baku tembak yang cukup lama. Ketika mmarkas polisi Belanda di Jagalan dikepung, mereka berusaha keluar dengan kendaraan berlapis baja, namun oleh para gerilyawan tetap diserang. Dalam pertempuran itu Suwarno gugur, namun kendaraan berlapis baja penembak itu akhirnya juga hancur. penumpangnya mati semua akibat kena howitser yang dipasang di perempatan Buk Bolong.

Pasukan eks Hizbullah yang dari Barat Surakarta, mereka masuk dari Klodran, kemudian menyusup masuk kampung Gremet, Kerten dan Pesanggrahan. Pada pertempuran memasuki Pesaggrahan Suyono tertembak tangannya oleh pasukan Belanda. Pasukan gerilyawan eks Hizbullah yang datang dari arah Utara Surakarta, melalui Banyuanyar terus langsung masuk kota, berhasil menguasai kampung Purworejo, Punggawan, Grogolan, dan Jageran. Sctelah itu para gerilyawan langsung menyerbu Pos

Polisi Belanda di De Sosoteit Mangu Negara. Dalam penyerbuan itu banyak korban di pihak Polisi Belanda.

Pada pukul 10 malam, tanggal 7 Agustus 1949 tentara Belanda mengadakan patroli besar-besaran mengelilingi kota Solo. Sesampainya di perempatan Pasa Kembang dihalang-halangi oleh rintangan yang dibuat oleh para gerilyawan. Pasukan Belanda itu marah, turun dari kendaraan lapis baja, dan mengadakan pembersihan di kampung sekitarnya. Penduduk kampung itu dikumpulkan, kemudian ditembak mati secara kejam. Tercatat dalam laporan ada 24 orang yang ditembak mati, termasuk di dalamnya 6 wanita dan 2 anak-anak. Pada operasi pembantaian itu berhasil meloloskan diri seorang mahasiswa kedokteran dan 2 orang penduduk.¹³⁾

Pada tanggal 10 Agustus 1949 pasukan gerilya mengadakan operasi untuk menguasai jembatan yang dikuasai oleh Polisi Belanda. Jembatan yang akan diserbu ialah jembatan di daerah Kampung Purworejan dan Kampung Sroyo Kebakramat. Jembatan itu vital menghubungkan Sragen dan Solo. Penjaga jembatan itu 12 orang, 10 orang Polisi Belanda dan 2 orang Jawa anggota AP (Algemene Politie). Sebelum penyerbuan dilakukan 2 orang TGP (Tentara Genie Pelajar) yaitu Sumarno dan Sutoyo, mengadakan perundingan dengan 2 orang Jawa yang jadi Polisi Belanda, di rumah Kamituwo Purworejan. Mereka sepakat bersandiwara untuk merebut jembatan dan melucuti polisi Belanda. Pada pukul 19.00 para gerilyawan mulai membunyikan tembakan ke atas, langsung dibalas oleh Polisi Belanda yang jaga Jembatan. Dalam pertempuran itu polisi Belanda ditembak oleh dua orang kawannya sendiri hingga tewas. Akhirnya tinggal polisi yang orang Jawa. mereka menyerah semuanya, dan juga menyerahkan : 9 senapan Moesoer, 2 brengun, 2 stengun, 1 senapan LE, seperangkat pemancar, dan ratusan peluru.

Dari beberapa pertempuran memasuki dan menguasai kota Solo berhasil dengan bai, kampung-kampung yang telah dikuasai dan bebas dari kekuasaan Belanda diberi tanda dengan Berkibarnya Bendera Merah Putih. Namun Belanda juga tidak tinggal diam, mereka membalas dengan serangan membabibuta dengan pasukan tank lapis baja dan sibantu oleh pesawat udara. Rumah-rumah kampung sekitar

markas Tentara Belanda dirobuhkan, untuk memperluas pandang dalam menghadapi serbuan para gerilyawan. Selain itu pihak Belanda minta bantuan dari Semarang, karena merasakan kesulitan menghadapi serangan para gerilyawan di Solo.

Banyaknya korban mati dikalangan Tentara Belanda, mengakibatkan setelah datangnya bantuan dari Semarang, kemudian mengadakan balas dendam. Balas dendam ini terjadi di beberapa tempat. Antara lain di daerah Petetan Pungawan, di daerah ini pernah 2 orang serdadu Koningklijke Leger (tentara kerajaan Belanda) mati tertembak. Maka pada tanggal 10 Agustus 1949, pukul 09.00 pagi tentara Belanda mengadakan operasi pembersihan di sepanjang jalan sekitar perempatan Masjid Sholikhin ke Barat sampai Pasar Nangka. Tentara Belanda menggunakan kendaraan lapis baja membunuh 36 orang penduduk, termasuk di dalamnya 5 orang wanita, dan seorang bayi baru berusia 3 bulan ditembak. Salah satu dari penduduk yang dibantai itu adalah mahasiswa AMN. Akan tetapi operasi pembersihan itu akhirnya dapat dihentikan oleh serbuan para gerilyawan, sehingga tentara Belanda ketakutan dan mundur kembali ke markasnya.

Puncak dari pertempuran adalah pada tanggal 10 Agustus - 1949, sebab tanggal itu pukul 24.00 adalah batas akhir untuk sampai pada gencatan. Oleh karena itu pihak gerilyawan dengan gencar mengadakan serangan - serangan ke markas dan pos Belanda. Komandan Brig. V/II Let. Kol Slamet Riyadi yang juga merangkap Komandan Wehrkreise I/WK I. dan Komandan Brig. XVII TP Mayor Ahmadi, keduanya ikut langsung masuk kota Solo. Mereka menari support dan menghantarkan Afscheids Aanval (serangan perpisahan), yang menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia mampu menandingi pasukan Belanda. Pada tanggal 10 Agustus 1949 mulai pukul 06.00 pagi sampai malam pukul 24.00, serangan para gerilya tidak berhenti. Pihak tentara Belanda mengalami kebingungan dan banyak kekalahan di setiap front. Pasukan Green Cup (Baret Hijau), yaitu pasukan elite yang diharapkan datang dari Semarang untuk membantunya, ternyata datangnya terlambat, sehingga mereka sangat kecewa. Kedatangan pasukan Baret Hijau yang baru masuk Solo setelah pukul 24.00 tidak dapat berbuat apa-apa terhadap para gerilyawan. Mereka tidak dapat berkutik, karena harus menta'ati hasil perjanjian Roem - Royen, yaitu gencatan senjata.

Pada pagi harinya tanggal 11 Agustus 1949 pasukan gerilyawan Republik Indonesia bebas menampakkan diri di kota Solo, bahkan mendapat sambutan dari rakyat yang merasa gembira. Dengan takbir Allahu Akbar dan pekik Merdeka, rakyat menyambut Gerilyawan dengan bersyukur kehadiran Allah swt.¹⁴⁾

Green Cup (pasukan Baret Hijau) Belanda kemudian berbuat licik, diam-diam mengadakan operasi liar di tempat orang yang tidak berdaya, yaitu markas Palang Merah Indonesia (PMI) dr. Padmonegoro. Pada tanggal 11 Agustus 1949, mulai pukul 05.00 pagi membantai dengan menyembelih dan menembak secara sadis tanpa kemanusiaan terhadap para pasien yang sakit di Markas PMI dr. Padmonegoro Gading Solo. Korban yang dibantai ada 21 orang, terdiri : 13 orang penduduk yang sedang sakit, 7 orang petugas PMI, dan 1 orang pejuang gerilyawan.¹⁵⁾

Belanda sambil mundur juga mengadakan operasi pembakaran toko-toko dan rumah penduduk di sekitar Gading. Selain itu mengadakan pembantaian di beberapa kampung yaitu : Kratonan, Jayengan, dan Gading, korbannya ada 50 orang dibunuh. Oleh karena itu menyebabkan para gerilyawan marah, kemudian mengajar tentara Belanda dan berhasil membalas dengan menembak mati 7 orang tentara Belanda orang tentara Belanda dan menawan 3 orang lainnya.

Untuk mencegah berkobarnya perang kembali, maka komandan pasukan Belanda mengajak berunding. Letkol Van Ohl komandan tentara Belanda di Solo datang menghadap Let.Kol Slamet Riyadi untuk berunding sejam pukul 14.00 sampai pukul 16.30. Hasilnya ialah masing-masing untuk menahan diri berada di pinggir kota, sehingga pada komandan tidak puas. Akan tetapi demi keselamatan rakyat, GM Gatot subroto mengharap agar para komandan pasukan dapat mengekang diri. Dan diberitahukan bahwa pada tanggal 12 November 1949 Kota Solo akan diserahkan pada RI.

Pada tanggal 12 November 1949 Kota Solo diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia. Serah terima kota Solo dilakukan oleh Let.Kol. Van Ohl kepada Let.Kol. Slamet Riyadi dan kawan-kawan di Istana Kembang Banowati Baron. Dengan demikian pasukan Belanda hari itu juga meninggalkan Solo.

Catatan

- 1) Soepanto, *Hizbullah Surakarta 1945 - 1950* (Karanganyar: Penerbit UMS, 1992), hlm.187.
- 2) *Ibid.*, hlm.192
- 3) Abdul Basit Adnan, Sumardi Ahmad Semangun, dan Supanto *Sejarah Perjuangan Laskar Hizbullah-Sabilillah Divisi Sunan Bonang 1945 - 1950, di Surakarta.* (Surakarta : Badan Penanggung Jawab Pembukuan, Sejarah Hizbullah-Sabilillah, 1988), hlm.68.
- 4) *Ibid.*, hlm. 69.
- 5) *Ibid.*
- 6) *Ibid.*, hlm. 70.
- 7) soepanto, *op.cit.*, hlm 21.
- 8) *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Klaten Tahap I.* (Klaen : Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45, ttt), hlm. 175 - 178. Lihat juga Supanto, *Ibid.* dan Basit Adnan dan kawan-kawan. *op.cit.*, hlm. 75.
- 9) Abdul Basit Adnan, *Ibid.*, hlm 76 - 79.
- 10) M. Mochdi, *Hizbullah-Sabilillah dalam Kancah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia* (Surakarta: t.p. 1987). hlm. 33.
- 11) *Ibid.*, hlm. 37.
- 12) Soepanto, *op.cit.*, hlm.216.
- 13) *Ibid.*, hlm. 218.
- 14) *Ibid.*, hlm. 220.
- 15) *Ibid.*, hlm. 222

PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN RAKYAT : Tinjauan di Dua Daerah

Yuwono Dwi Priyanto

1. Pendahuluan

Tulisan ini merupakan suatu studi tentang terbentuknya Badan Keamanan Rakyat yang lahir beberapa hari setelah proklamasi dicetuskan. alasan pemilihan topik ini karena BKR merupakan suatu fenomena di dalam perkembangan sejarah Indonesia khususnya di dalam periode revolusi fisik yang menarik untuk dibahas. Oleh karena hampir seluruh daerah yang merespons dari masyarakat, tentunya pendukungnya terdiri dari berbagai lapisan, seperti unsur politik, keagamaan, juga mantan PETA dan KNIL. Barangkali cukup menarik juga untuk mengikuti aktifitas mantan-mantan PETA di dalam keikutsertaannya di dalam BKR, tanpa mengesampingkan unsur-unsur masyarakat yang lain mendukung revolusi fisik.

Metode pengumpulan dilakukan melalui studi pustaka dan serangkaian wawancara (Oral History) dengan para mantan tentara PETA dan unsur-unsur lain yang mengalami masa perjuangan waktu itu.

2. Di Sekitar Proklamasi

Pada mulanya Jepang di dalam peperangan mengalami kemenangan-kemenangan, namun pada akhirnya juga mengalami

kekalahan-kekalahan di dalam peperangan tersebut. Hal itu mengakibatkan juga kebijaksanaan terhadap daerah jajahannya berubah, seperti janji Perdana Menteri Koiso untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.¹⁾ Pernyataan Koiso itu disambut hangat oleh pemimpin-pemimpin Indonesia pada umumnya walaupun janji kemerdekaan kelak kemudian hari menjadi sangat samar-samar serta tidak memuaskan aspirasi pemuda Indonesia khususnya di Jakarta.

Sementara itu muncul pemberontakan PETA di Blitar pada bulan Pebruari 1945. Tidak berapa lama kemudian kesatuan PETA di Banyumas pun melakukan tindakan pembangkangan. Pemberontakan-pemberontakan itu membuktikan adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah militer Jepang. Sungguhpun beberapa bulan kemudian Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 hingga pembentukan PPKI pada tanggal 29 April 1945 hingga pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus setelah BPUPKI dibubarkan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghilangkan keragu-raguan para pemuda dan rakyat terhadap janji-janji Jepang.

Realitas yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah langkah pemerintah Militer Jepang membubarkan kesatuan-kesatuan militer bentukan Jepang, seperti PETA. Kenyataan ini menunjukkan indikasi adanya kekuatan pemerintah militer Jepang terhadap rakyat. Untuk menutupi kekhawatiran dan kekuatan itu Jepang menggunakan cara mempengaruhi orang-orang dalam PPKI bahwa status mereka dimata sekutu tidak akan diperbaiki. Akan tetapi di sisi lain Jepang tentunya ingin meneruskan monopoli pasukan militer mereka sepenuhnya.²⁾

Usaha-usaha Jepang dalam membubarkan PETA ternyata justru mendapatkan kemudahan-kemudahan, dalam Jepang berhasil pula mencegah perubahan-perubahan pikiran anggota-anggota PETA dengan memperingati mereka bahwa sekutu mungkin akan menganggap mereka sebagai pasukan gerilya di luar perlindungan hukum militer internasional.³⁾

Disamping itu Jepang juga mampu membujuk para anggota PETA untuk mengumpulkan senjata-senjata mereka dengan alasan akan ditukar dengan persenjataan yang baru misalnya. Oleh karena itu

proses pengumpulan senjata para anggota PETA itu tidak banyak mengalami hambatan walaupun di beberapa daerah yang tidak dapat dilucuti senjatanya.⁴⁾

Beberapa hari setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika, maka rakyat Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu merupakan kristalisasi dari hasrat dan kebulatan tekad perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa lain dalam pergaulan internasional. Dengan modal proklamasi, maka secara yuridis rakyat Indonesia telah memegang kedaulatan penuh di seluruh tanah air dan secara berangsur-angsur menyempurnakan kedaulatan *de facto* yang esensial dari pernyataan kemerdekaan itu.⁵⁾

Pada tanggal 18 Agustus Jenderal Yamamoto (Gunseikan) secara resmi menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah menerima *Deklarasi Postdam*, maka dari itu status quo kepulauan Indonesia harus dipelihara, Jepang hanya menjaga keamanan dan ketertiban sampai kedatangan sekutu. Pada tanggal 19 Agustus PPKI mengadakan sidang dan mengubah PPKI menjadi Komite Nasional Indonesia. Abikusno Tjokrosujoso dan Otto Iskandar Dinata dalam sidang hari itu mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara. Usul mereka berdua ditolak dengan alasan memancing bentrokan dengan tentara penduduk Jepang yang masih mempunyai senjata lengkap. Juga usul untuk membentuk tentara kebangsaan yang terdiri dari bekas PETA, Heiho dan unsur-unsur lain ditanggihkan.⁶⁾ Putusan untuk membubarkan PETA dan ditolaknya usulan dua anggota PPKI menghebohkan para pemuda yang sudah bergerak di Jakarta. bagaimana hendak membela negara kalau tentara yang sudah ada (PETA) dibubarkan, maka tuntutan untuk membentuk suatu kekuatan militer menjadi lebih keras. salah seorang pemuda itu adalah Daan Yhya salah seorang mahasiswa Ika Daigaku yang dikeluarkan dari sekolah setelah mengadakan pemogokan dan akhirnya menjadi seorang Perwira PETA, dia dengan gigih menginginkan suatu pembentukan kekuatan militer untuk menggantikan PETA yang sudah dibubarkan tersebut.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 Badan Penolong keluarga Korban Perang (BPKKP) didirikan bersamaan pula dengan didirikannya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari BPKKP, seperti yang dikatakan A.H. Nasution dalam bukunya sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia berikut ini: ⁷⁾

“ ... Di masa sekarang ini maka sangatlah perlu mengadakan satu badan yang dapat menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan, pertolongan dan bantuan.

Pertolongan dan bantuan ini hendaknya secara lahir dan bathin, maka itu pada tanggal 20 Agustus 1945 berdirilah di kota Jakarta suatu badan yang diberi nama : Badan Penolong Keluarga Korban Perang.

Dalam garis-garis besarnya akan ditetapkan Anggaran Dasar dan khususnya akan tetapi yang penting harus dipentingkan dahulu, maka itu ada satu bagian yang sekarang juga sudah dapat dengan segera bekerja yaitu : Badan Keamanan Rakyat... ”

Tugas BKR adalah menjaga keamanan rakyat bersama-sama dengan suatu badan perjuangan rakyat bukan lembaga pemerintah, tetapi akan ditinggikan ke arah 23 Agustus 1945 yang antar lain berkata :

“ ... Kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera dimana-mana BKR, untuk membantu penjagaan keamanan. Banyak sekali tenaga yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semuanya adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Karena itu saya mengharapkan kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho dan pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam BKR. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia!” ⁸⁾

Jadi jelas dari pidato Bung Karno itu bahwa proklamasi harus melahirkan suatu tentara kebangsaan. Karena tanpa tentara proklamasi tidak lengkap dan sempurna jalannya. Serta proklamasi harus dibela secara politis dan militer.

Walaupun BKR bukan suatu organisasi militer, tetapi aktivitas sejak pembentukannya adalah aktivitas militer⁹⁾ dan sejak saat itulah di daerah-daerah mulai dibentuk BKR-BKR daerah baik di Jawa maupun di Sumatera. Satuan-satuan BKR di daerah mengambil inisiatif

sendiri untuk mengabil alih jawatan-jawatan pemerintah sipil dan militer sari tangan Jepang.

Mantan anggota PETA dan pemuda yang ada di Jakarta berkumpul dan menentukan struktur BKR sesuai dengan struktur teritorial jaman pendudukan Jepang, maka akan dibentuk BKR tingkat pusat sampai Daerah juga membentuk Pengurus Pusat yang terdiri dari Kapriwi, Satalaksana, Latif Hendraningrat, Arifin abdurachman, Mahmud, dan Zulkifli Lubis. Dalam pertemuan di Jakarta itu juga direncanakan para pemimpin BKR untuk daerah Jawa Barat (Arudji Kartasasmita), Jawa Timur (Drg. Moestopo), Jawa Tengah (Sudirman). Oleh para pemuda yang terpikirkan untuk membentuk BKR laut yang akan dipimpin oleh M. Sardi.

3. Tinjauan Terbentuknya BKR di Dua Daerah

Sebagaimana dikatakan pada bagian depan tulisan ini, bahwa BKR merupakan respon bangsa Indonesia terhadap adanya proklamasi dan berdirinya Republik Indonesia. Dimana sebuah negara pasti harus mempunyai tentara. BKR dibentuk sebagai sebuah badan yang nantinya dalam perkembangannya akan menjadi sebuah *Tentara Nasional*. Bagian ini mencoba menguraikan terbentuknya BKR di daerah-daerah, walaupun disadari banyak didirikan BKR di daerah-daerah, tetapi barangkali ini dapat mewakili suatu bentuk mobilisasi masyarakat Indonesia yang secara spontan mendukung revolusi pada masa awal.

a. Terbentuknya Barisan Keamanan Rakyat Surabaya.

Pada tanggal 22 Agustus di Surabaya, Anggota-anggota tentara PETA diperintahkan komandan Jepang untuk berkumpul di lapangan latihan, kemudian datang tentara Jepang untuk melucuti seluruh senjata anggota PETA. Baru setelah senjata dikuasai Jepang, diumumkan pembubaran PETA. Bekas prajurit dan perwira disuruh pulang ke rumah masing-masing. Pada tanggal 9 September 1945 mantan perwira PETA dari seluruh bekas daidan-daidan (batalyon) di Surabaya dan sekitarnya mengadakan rapat di Gudang Nasional Indonesia (GNI) yang dihadiri antara lain Suryo, Suropo, Mustopo, Rono Kusumo, Sungkono, Yono Sewoyo dan Abdul Wahab.

Pada rapat itu diputuskan untuk membentuk BKR lengkap dengan personilnya :

1. BKR Jawa Timur dengan Ketuanya drg. Moestopo, Wakil ketua Kartono Hadi, Penulis Sutopo Bendahara Muhamad Mangundiprodjo dan mengambil markas di Gedung H.V.A.
2. BKR Karesidenan Surabaya, Ketuanya Abdul Wahab, Wakil Ketua Yono Sewoyo, penulis Susilo, dan mengambil markas di paviliun GNI.

Ada suatu kekhususan idiologis di kota Surabaya, yaitu adanya paham komunis yang ingin juga membentuk barisan bersenjata sendiri diluar BKR dan yang menjadi sasaran kekuatannya adalah para pelajar. Menyadari suasana seperti itu pada tanggal 21 September 1945, maka para pelajar bergabung dalam BKR. Oleh Sungkono diresmikan sebagai BKR Pelajar (5 Oktober menjadi TKR Pelajar dan menjadi TRIP). Sedangkan kelompok pemuda yang terkana paham komunis menjadi Pesindo (September 1948 ikut pemberontakan PKI di Madiun.¹⁰⁾ BKR Pelajar itu anggotanya hampir mencapai 1500 pemuda di kota Surabaya di bawah pimpinan Isman, Mulyosudjono, Sudarto. Pansa Tampubolon, Abdulsyukur, dengan mempunyai cabang hampir di seluruh Jawa Timur.

BKR Keresidenan Surabaya dalam waktu singkat dapat membentuk delapan barisan. Tiap-tiap barisan tergabung dalam satu kompi dengan seorang pimpinan, yaitu : Barisan I - Suyoto, Barisan II - Basuki, Barisan III - Subiarso, Barisan IV - Kaotono, Barisan V - Tajudin Lubis, Barisan VI - Muhamad Umar, Barisan VII - Suwarto, dan Barisan VIII - Bambang Yuwono.

Barisan-barisan itu kemudian mendapat bantuan dari bekas pasukan Heiho yang datang dari Doping Sengkang (Sulawesi Selatan) berjumlah 250 orang dibawah pimpinan Abel Pasaribu dan Anwar Batubara.¹¹⁾ Sedangkan BKR di Kota Surabaya setelah terbentuk pengurusnya kemudian membentuk cabang-cabangnya di Baliwerti, Tembaan, Peneleh, Sambongan dan Gubeng.

BKR Surabaya Mempunyai tugas untuk merebut senjata dari tentara Jepang. Persenjataan dan peralatan perang Jepang yang jatuh

ke tangan rakyat Surabaya terdiri dari 19.000 senapan, 700-846 pistol otomatis, 422-700 senapan mesin ringan, 480-504 senapan mesin sedang, 148 pelembar granat, 17 meriam infrantri, 63 mortir, 400 mortir baru, 15-25 meriam anti tank, 62 panzer dan 1990 kendaraan bermotor.¹²⁾ Sedangkan senjata-senjata bekas tentara HIndia Belanda, Inggris, Australia yang tersimpan digudang-gudang yang jatuh ke tangan rakyat tidak ada.

Sejak terbentuknya BKR di Surabaya, praktis patroli-patroli Jepang sudah tidak menampakkan diri di jalan-jalan. Keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan oleh pasukan-pasukan BKR dan polisi Istimewa, dibantu oleh rakyat yang melakukan penjagaan di kampung masing-masing. Ada satu kekhususan lain di Surabaya, yang sejak September 1945 sampai Nopember mengalami pertempuran-pertempuran terus menerus mengakibatkan nam BKR tidak dapat diganti dengan TKR (setelah 5 Oktober 1945). Hingga pasukan yang bertempur ada yang menggunakan bendera BKR, ada pula yang menggunakan bendera TKR. Keadaan itu baru berubah setelah pertahanan rakyat Surabaya bertahan di Mojokerto pada awal Desember 1945 dapat disatukan menjadi TKR.

b. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat di eks Keresidenan Banyumas

Pada umumnya awal proklamasi berita pembubaran PETA di Jakarta belum terdengar didaerah-daerah. Demikian juga untuk tentara PETA di Dai II Daidan Sumpiyuh yang sampai tanggal 18 Agustus pagi belum mendengar kedua berita penting tersebut, yaitu proklamasi dan pembubaran PETA. Pada tanggal 18 Agustus 1945 semua anggota tentara PETA mendapat hiburan, tentara Jepang masuk dalam barak-barak mereka untuk mengambil senjata-senjata kemudian dinaikkan ke dalam truk dan diperkirakan dibawa ke Purwokerto.¹³⁾ Setelah selesai menikmati hiburan, mereka kembali ke barak dan terkejut melihat senjata-senjata tidak ada, maka timbul keributan dengan Jepang. Mereka dikumpulkan oleh perwira piket Jepang dan diberi tahu bahwa perang Pasifik sudah berhenti dan Jepang kalah perang, tentara PETA

oleh Jepang mulai hari itu sudah dibubarkan. Mulia tanggal 19 Agustus 1945 tentara PETA disuruh meninggalkan barak masing-masing untuk kembali ke kampung masing-masing.

Dalam situasi yang belum menetap tersebut, kebanyakan mantan pemimpin PETA terus bergerak dan berkumpul, walaupun belum teratur untuk mencari kebenaran adanya berita proklamasi. Setelah mendapat berita yang pasti mereka bertindak untuk mengadakan kontak hubungan dengan kawan-kawannya. Mereka yakin dengan adanya proklamasi, pasti akan dibutuhkan suatu tentara kebangsaan dan mereka sebagai mantan PETA yakin akan dibutuhkan dalam pembentukan dalam tentara kebangsaan itu. Kebanyakan mantan PETA itu hanya 3 hari di rumah, karena pada tanggal 23 Agustus 1945 setelah mendengar berita pembentukan Badan Keamanan Rakyat dari pemerintah pusat untuk semua daerah kabupaten, secara naluri terpanggil dan kemudian berduyun-duyun datang ke kabupaten untuk mencari para pemimpinnya waktu di tentara PETA. Demikian juga mantan para pemimpin tentara PETA juga secara otomatis berkumpul di tiap kabupaten dan langsung ikut membentuk BKR. Dapat dilihat pada pembentukan BKR-BKR:

- (1) Di daerah Cilacap para mantan Syo, Chu dan Daidancho berkumpul membentuk BKR, diantaranya mantan Daidancho Suito dan mantan Chudancho Abimanyu.
- (2) Di daerah Purwokerto dibentuk BKR dipimpin oleh mantan Daidancho Sudirman (memerangkap koordinator BKR keresidenan Banyumas).
- (3) Di daerah Purbalingga berhasil dibentuk BKR dengan pimpinan mantan Chudancho Broto Siswo.
- (4) Di daerah Banjarnegara berhasil dibentuk BKR dengan pimpinan mantan Chudancho Mohammad Bachrum.

Melihat adanya kemungkinan dibutuhkan suatu tentara di dalam suatu negara yang baru merdeka, maka mantan Daidancho Sudirman mengambil beberapa tindakan :

- (a) Dalam waktu singkat mengumpulkan semua mantan syodancho dan Daidancho yang berada di daerah keresidenan Banyumas

untuk berkumpul di Purwokerto untuk konsolidasi dan menghimpun kekuatan dari semua lapisan masyarakat.

- (b). Supaya mengambil senjata atau merebut senjata dari tentara Jepang yang disimpan di gudang-gudang dan mengambil secara damai.¹⁴⁾ Dengan cara mengkonsolidasi kekuatan rakyat, maka Sudirman berhasil menyusun BKR yang nantinya di dalam TKR menjadi 2 resimen masing-masing terdiri dari 4 batalyon.

4. Penutup

Melihat uraian di atas dan melihat fenomena peristiwa sejarah pada awal proklamasi, maka dapat dilihat bahwa respons masyarakat terhadap proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Berbagai golongan dan lapisan masyarakat mendukung proklamasi tersebut. Untuk mendukung sebuah negara yang baru berdiri, maka perlu dibentuk suatu tentara kebangsaan. Pada langkah awal dibentuk suatu badan yang diberi nama *Badan Keamanan Rakyat* yang merupakan bagian dari *Badan Penolong Keluarga Korban Perang*, yang tugas pokoknya membantu korban perang, tetapi di dalam perkembangan selanjutnya mejadi embrio sebuah tentara kebangsaan (menjadi TKR dan TNI). BKR merupakan suatu contoh mobilisasi kekuatan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan baik golongan politik, agama, mantan Heiho, KNIL dan PETA. Uraian di atas mencoba membuktikan mobilisasi kekuatan tersebut dengan mengambil contoh agak banyak dari mantan-mantan PETA yang mendukung berdirinya BKR di daerah-daerah, tanpa melupakan bahwa BKR itu terdiri dari berbagai laisan masyarakat.

Catatan:

- 1) Aboebakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi : Kenangan Pelaku dan Saksi*, Jakarta: Penerbit Universita Indonesia, 1992 Hal. 70
- 2) Benedict R O G Anderson, *Java in Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1972, hal. 103-105.
- 3) *Ibid*.

- 4). Wawancara dengan Sudianto Sastroatmodjo, 2 Oktober 1994.
- 5) J. Leimena. *Perselisihan Indonesia-Belanda*, Jakarta: Grafika, 1949, hal. 5.
- 6).
- 7) A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia I*, Bandung: Tinta Mas, 1980, hal. 226
- 8). Ruslan Abdulgani, "Sedikit Catatan Tambahan Tentang Keprajuritan di Indonesia" (Makalah *Senimar Sehari Lahirnya TNI* di Pusjarah ABRI Jakarta, 31 Oktober 1991, hal. 2.
- 9). Wawancara dengan Purbo Suwondo, 19 September 1994.
- 10). Ruslan Abdulgani, *op.cit.* hal. 5.
- 11). *Manuskrio* Drg. Barlan setiadijaya, hal. 5.
- 12). Ruslan Abdulgani, *op.cit.* hal. 6.
- 13). Wawancara dengan Supardijo, 29 September 1994.
- 14). Yayasan Pembela Tanah Air Unit Banjarnegara. *Sepintas Lintas Sejarah tentara PETA di Eks Karesidenan Banyumas*. Banjarnegara, 1992, hal. 61.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Ruslan, "Sedikit Catatan Tambahan tentang Keprajuritan di Indonesia", *Makalah Seminar Sehari Lahirnya TNI*, di Pusjarah ABRI Jakarta, 31 Oktober 1991.
- Anderson, Benedict R O G, *Jaya in Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946*, Ithaca and London : Cornell University Press, 1972.
- Arsip Nasional RI. *Pendudukan Jepang di Indonesia : Pengalaman 42 Orang yang Mengalaminya*, Seri Penerbitan Sejarah Lisan. Jakarta 1989.
- Buletin YAPETA Nomor 1, Pebruari 1987.
- Buletin YAPETA Nomor 2, Maret 1987.
- Buletin YAPETA Nomor 3, April 1987.

De Jong, L., *Pendudukan Jepang di Indonesia Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintah Belanda*. Jakarta: Kesaint Blanch, 1987.

Keputusan Presiden RI Nomor 63 tahun 1993 tentang *Penghargaan kepada Mantan Anggota BKR*.

Presiden RI Soeharto, "BKR adalah cikal bakal Tentara Nasional Indonesia", Pidato Presiden Pada *Sarasehan BKR di Jakarta*, 27-28 Agustus 1991.

Michrab, Halwany, *Banten Dalam Gerakan Menentang Penjajah Untuk Mencapai Kemerdekaan : Bahan Muatan Lokal Bidang Sejarah Budaya Jawa Barat*, Bandung: PT. Interimas sejahtera. 1993.

Mirhad, Purnommo, "Tentara Sukarela PETA: Fungsi dan Peranan Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945", *Manuskrip*, Jakarta 5 Oktober 1986.

Miyamoto, Sizuo, "Dokumen Tentang Proses Likuidasi Tentara Jepang di Indonesia", penterjemah YAPETA, Jakarta 1992.

Notosusanto, Nugroho, *Pertempuran Surabaya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1982.

—————, *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di indonesia*. Jakarta; Gramedia 1979.

Reid, antony, *Indonesian National Revolution 1945-1950*. Australia : Longman 1974.

Sastroatmojo, Soedianto, "Corp Polisi Militer dan Gerak Perjuangannya di Lereng Gunung Kawi", *Manuskrip*. Jakarta 1985.

—————, "Pelajar Dalam Alamm Pendudukan Jepang", *Manuskrip*.

Sitorus, L.M. *Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat 1988.

Surjomihardjo, Abdurrachman, "Rekonstruksi Sejarah BKR", *Makalah dalam Sarasehan BKR*. Jakarta 27-28 Agustus 1991.

Yamazaki, Hajime, *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah air*.
Jepang, Ohira Memorial Foundation, 1982.

Wawancara

Purbo S. Suwondo, 19 September 1994.

R. Suprpto, 29 September 1994.

Supardijo, 29 September 1994.

Soedianto, 3 Oktober 1994.

Soebiono, 3 Oktober 1994.

Setiadi Kartohadikusumo, 19 September 1994.

PEMERINTAH DAERAH 1945--1950

KHUSUSNYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PJ. Suwarno

1. Pengantar

Ketika Proklamasi Kemerdekaan dibacakan secara agak sembunyi-sembunyi dengan harap-harap cemas di halaman rumah kediaman pribadi Sukarno di Pengangsaan Timur 56, maka begitu didengar oleh rakyat di daerah-daerah, semangat nasionalisme mereka menggelora. Mereka mendukung kemerdekaan itu dengan tindakan nyata. Para birokrat yang tidak cepat tanggap dipaksa oleh kelompok nasionalis untuk segera mendukung kemerdekaan Indonesia dan bersatu dengan kelompok nasionalis mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan bangsa Indonesia.

Ketika Belanda dengan Sekutu mendarat di Indonesia mereka berhasil menduduki daerah-daerah penting di Jawa dan di luar Jawa. Belanda membentuk pemerintah-pemerintah boneka di daerah-daerah dan mendesak pemerintah pusat RI dari Jakarta. Pemerintah daerah RI bertahan terhadap desakan Belanda. Para Birokrat daerah RI yang mampu bertahan tetap berpegang pada prinsip non kooperasi dengan memindahkan pemerintahannya ke pedalaman atau mengubah pemerintahannya menjadi pemerintahan bawah tanah. Sedangkan para nasionalis yang pemerintahan daerahnya dikuasai oleh Belanda tetap bertahan pro RI, meskipun berapa di lingkungan pemerintahan daerah yang didirikan oleh Belanda.

Dengan demikian tampak fenomena di satu pihak muncul pemerintah daerah yang dengan gigih menolak datangnya Belanda di Indonesia di lain pihak muncul pemerintah daerah yang berdiri atas dukungan Belanda. Faktor-faktor apakah yang berada di balik perbedaan antara pemerintah daerah yang pro RI dan yang pro Belanda tersebut? Untuk dapat menjelaskan faktor-faktor itu perlu dikaji agak rinci terutama mengenai hubungan birokrat daerah dengan kelompok nasionalis, kepercayaan birokrat terhadap pemerintah Belanda dan pemerintah RI, dan semangat nasionalisme para birokrat daerah.

Terdapat bermacam-macam hubungan antara pejabat pemerintah atau birokrat dan kelompok-kelompok rakyat termasuk kelompok nasionalis. Hubungan antara tuan dan hamba akan melahirkan pemerintahan otoriter, sebaliknya hubungan antar manusia atau antar umat yang sederajat melahirkan pemerintahan yang bermaksud mendirikan suatu pemerintah demokratis, maka mereka menentang Belanda yang bermaksud mendirikan pemerintahan kolonial yang merupakan tuan dari rakyat Indonesia yang dijajahnya. Maka dari itu dapat diduga bahwa pemerintah daerah yang menentang Belanda dipimpin oleh birokrat yang bersemangat nasionalis. Dalam hal ini dapat terjadi mereka sudah bergabung dengan kelompok nasionalis baik yang bekerjasama dengan Jepang maupun yang bergerak di bawah tanah. Akan tetapi dapat terjadi juga mereka itu kelompok nasionalis yang mengambil alih kekuasaan birokrat yang ragu-ragu mendukung proklamasi kemerdekaan, sehingga terjadi semacam revolusi sosial di daerah-daerah tersebut.

Maka untuk mendapatkan penjelasan faktual mengenai nasionalisme birokrat daerah, hubungannya dengan kelompok rakyat termasuk kelompok nasionalis, yang menyebabkan pemerintah daerah tetap bertahan dalam perang kemerdekaan tahun 1945-1950, akan diamati pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia khususnya pemerintah daerah Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diambil sebagai objek pengamatan khusus sebab DIY merupakan pemerintahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat RI sampai ke desa-desa. Kahin menyebut Yogyakarta dan ekonomi daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berdasarkan UUD dan sesuai berhasil disebarluaskan ke daerah-daerah lain.¹

Dengan demikian dapatlah dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kegigihan pemerintah daerah dalam melawan Belanda ditengah-tengah pemerintah daerahhh yang dapat dibentuk oleh Belanda menjadi negara boneka dalam periode 1945-1950.

2. Pemerintah Daerah yang Gigih Melawan Belanda: Rakyat Daerah Menyambut Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi kemerdekaan diumumkan PPKI bersidang menetapkan UUD memilih Presiden dan wakil presiden dan menetapkan wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan propinsi tiga propinsi di Jawa, satu di Sumatra, dan empat di Indonesia Timur. Daerah-daerah di bawahnya dibiarkan seperti sedia kala dan untuk membantu kepala daerah dalam mengalihkan kekuasaan ke bangsa Indonesia ditetapkan pembentukan Komite Nasional.²

Sementara itu begitu mendengar Proklamasi Kemerdekaan diumumkan oleh Sukarno dan Hatta, tokoh-tokoh nasionalis baik birokrat maupun pemimpin partai politik lama dan kelompok-kelompok pemuda yang dibina oleh gerakan bawah tanah menyambut gembira kemerdekaan tersebut. Para birokrat nasional menyatakan pemerintahan daerahnya bebas dari pemerintah Jepang yang sudah menyerah dan menyatakan dukungannya kepada pemerintah RI yang dipimpin oleh Sukarno dan Hatta. Hal ini tampak di Yogyakarta, Semarang Surabaya, dan Aceh, yang dipelopori oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam IX, Mr. Wongsonegoro, Fuku Syutyookan Semarang, Sudirman, asisten residen Surabaya, dan tokoh-tokoh Ulama di Aceh seperti Teungku M. Daud Bereu'eh, Teungku Ahmad Hasballah, dll. Kemudian disusul pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat baik pemimpin-pemimpin rakyat yang formal maupun pemimpin rakyat yang informal.³

Gerakan menyambut Proklamasi Kemerdekaan ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pemerintah yang nasionalis dan pemimpin-pemimpin rakyat nasionalos yang terdiri atas tokoh-tokoh partai politik

pada zaman Belanda, tokoh-tokoh muda yang dibina oleh Syarir dan partainya secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian berusaha mendominasi KNID, mantan Peta, Heiho, Kenpeiho, yang mendominasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di daerah yang birokratnya ragu-ragu terhadap Proklamasi Kemerdekaan dan secara diam-diam masih mengharapkan kedatangan Belanda disingkirkan oleh tokoh-tokoh politik dan pemimpin kelompok pemuda dengan kekerasan seperti yang terjadi di Surakarta.⁴ Di daerah-daerah yang birokratnya mengharapkan kedatangan Belanda dan segera setelah Proklamasi Kemerdekaan pihak Sekutu dapat menduduki daerah tersebut, maka Belanda dengan *Netherlans Indies Civil Administration* (NICA)-nya berhasil membentuk pemerintah boneka yang dipimpin oleh para birokrat yang sebenarnya mengharapkan kedatangan Belanda tersebut, sedangkan pemimpin-pemimpin yang pro-Republik menarik diri ke pedalaman atau tetap tinggal di kota dan memasuki parlemen yang dibentuk oleh pemerintah dukungan NIC sebagai faksi oposisi seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.⁵

Daerah-daerah yang dipimpin oleh birokrat nasional seperti Yogyakarta dan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang pro RI seperti Aceh dan tidak segera dimasuki oleh tentara Belanda merea mampu mengembangkan otonomi daerah seluas-luasnya, sebab Pemerintah pusat belum mampu mengembangkan kekuasaannya untuk mengontrol daerah-daerah yang sama dengan Yogyakarta dan Aceh tetapi diduduki oleh Belanda, mereka melarikan diri dan memindahkan pemerintah daerah yang sudah dibentuknya ke daerah pedalaman seperti dialami oleh Keresidenan Semarang yang memindahkan pemerintahannya ke Salatiga dan pemerintah Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Sewaka yang menyingkir ke pedalaman.⁶

a. Hubungan Birokrat dan Kelompok nasionalis

Para birokrat nasionalis itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri sejak mereka masih berada di bawah penjajahan Jepang. Seperti Yogyakarta. Sultan sebagai kepala pemerintahan Kesultanan sejak zaman Jepang sudah berusaha membersihkan pengaruh penjajahan Belanda dari Kesultanan Yogyakarta. Sebelum Jepang memerintahkan Sultan sudah memerintahkan mengganti nama-nama instansi pemerintah yang

berbahasa Belanda dengan bahasa Jawa semula titik berat kekuasaan pada Papatih Dalam pada diri Sultan sendiri, sehingga Jepang tidak dapat mengontrol pemerintah lewat Papatih Dalam seperti Belanda dulu. Kecuali itu Sultan juga berusaha merekrut Wakil Camat (*Fuku Sontyoo*) dari guru-guru sekolah untuk mendampingi Camat (*Sontyoo*) yang diangkat oleh Papatih Dalam di bawah pengaruh Belanda. Kecuali itu Sultan juga menghapus wilayah kewedanan (*Gun*) dan Wedananya (*Guntayoo*) ditarik ke kabupaten, sebab mereka itu juga diangkat oleh Papatih Dalam di bawah pengaruh Belanda. Kecuali itu Sultan juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti diketahui Ki Hajar Dewantara dengan perguruan Taman Siswanya mengakomodasi pemimpin-pemimpin nasional baik yang beraliran nasionalisme maupun yang beraliran sosialisme yang nanti menjadi pemimpin pergerakan dalam melawan Jepang dan kemudian Belanda.

Dengan demikian waktu Proklamasi Kemerdekaan diumumkan birokrat Yogyakarta sudah siap baik secara organisatoris dan personal mendukung negara baru yaitu Republik Indonesia dalam mendukung negara baru yaitu Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda yang diduga Sultan akan segera datang di Indonesia lagi. Hal ini agak berbeda dengan di Aceh yang birokratnya tidak mempunyai hubungan yang serasi dengan tokoh-tokoh dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diikuti oleh rakyat dan menyatakan pro RI. Pada waktu Proklamasi kemerdekaan di Aceh justru terjadi konflik besar antara birokrat yang dulu dilindungi oleh Belanda dan kemudian diangkat lagi oleh Jepang dengan para ulama yang tergabung dalam PUSA. Dalam konflik ini golongan ulama yang tergabung dalam PUSA berhasil keluar sebagai pemenang dan membentuk pemerintah Republik Indonesia di Aceh, seperti halnya di Yogyakarta. Belanda tidak segera menduduki Aceh ketika mereka tiba di Sumatra bersama Sekutu.

Hubungan yang baik antara birokrat dan para pemimpin nasionalis itu menghasilkan kerjasama yang baik antara birokrat dan KNID serta BKR yang dibentuk oleh tokoh nasionalis dan mantan Peta. *Heiho* dan *Kenpeiho*. Mereka menggerakkan rakyat memasyarakatkan simbol-simbol kemerdekaan dengan bendera Merah Putih, di Yogyakarta dilakukan pada tanggal 21 September dengan penurunan bendera Jepang di *Tyookan Kantai* kantor dan tempat kediaman *Kooti Zimu*

Kyooku Tyookan di Surabaya terjadi insiden di hotel Yamto. Di Yogyakarta pertumpahan darah dapat dihindakan berkat campur tangan Sultan yang masih dihormati oleh Jepang. Gerakan ini berlangsung terus sampai tanggal 17 Oktober 1945 dengan dipatahkannya kekuatan militer Jepang yang bermarkas di Meguwo.

b. Penyusunan Perintahan Daerah

Pada saat terjadi gerakan rakyat itu di Yogyakarta terdapat tiga pemerintahan yang masing-masing berusaha memimpin rakyat yaitu birokrat *Kesultanan* yang dipimpin oleh Sultan dan Paku Alam VIII. KNID yang dipimpin oleh Mohammad Saleh mantan *Daidancho* Bantul yang berasal dari Madura, dan sisa pemerintahan pendudukan Jepang yang disebut *Kooti Zimu Kyooku*. Sultan yang sudah menyatakan *Kesultanan* Yogyakarta sebagai bagian dari daerah istimewa RI yang diikuti oleh Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945, berusaha untuk menyatukan ketiga organisasi kekuasaan itu menjadi pemerintahan DIY yang bulat.

Setelah KNID mengadakan reorganisasi dan membentuk Badan Pekerja KNID (BP-KNID) pada tanggal 29 Oktober, maka pada tanggal 30 Oktober Sultan mengeluarkan Amanat yang menyatakan KNID sebagai lembaga legislatif dan dengan resmi Sultan menyerahkan kekuasaan membuat undang-undang dan menetapkan haluan *Kesultanan* Yogyakarta kepada BP-KNID yang disebutnya sebagai wakil rakyat Yogyakarta. Dengan demikian Sultan dapat mencegah KNID berkembang menjadi lembaga pemerintahan tandingan dari birokrasi *Kesultanan* yang sudah disusun rapi. KNID tidak menolak Amanat 30 Oktober itu karena semua anggota KNID menghormati Sultan sebagai raja yang sah, juga karena alasan untuk menyesuaikan struktur pemerintah DIY dengan struktur pemerintah pusat dan UUD.

Seperti diketahui anggota KNID terdiri atas *abdi dalem* dan politisi dari bermacam-macam aliran yang dalam bidang politik pemerintah merupakan *hominesnovi*. Kalau mereka tidak diakomodasikan oleh Sultan tentu akan berkembang diluar birokrasi pemerintahan *Kesultanan*, yang tentu mengandung resiko konflik dengan para birokrat *Kesultanan* yang dulu bekerjasama dengan Jepang.

Setelah KNID menjadi lembaga resmi dan BKR menjadi TKR, maka Sultan mulai mengambil alih kekuasaan dari birokrasi yang ditinggalkan oleh Jepang dengan instruksi untuk menyerahkan semua kekuasaan eksekutif kepada birokrasi *Kesultanan* yang sudah disusun menjadi jawatan-jawatan (*paniradya*) yang rapi. Ketika Pemerintah Pusat mengizinkan berdirinya partai politik, maka Sultan mengerahkan perhatiannya ke rakyat pedesaan. Kecuali menggalakkan pembentukan Laskar Rakyat untuk menjaga keamanan desa, Sultan juga mengeluarkan Maklumat No. 7/1945 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan, yang efektif tanggal 6 Desember 1945. Maklumat ini menentukan setiap kalurahan di DIY harus membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan (Dewan Kalurahan). Dewan Kalurahan mewakili rakyat membuat peraturan-peraturan yang mengatur rumah tangga kalurahan. Peraturan-peraturan itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan untuk dilaksanakan. Setelah Dewan kalurahan dibentuk KNI kalurahan dibubarkan. Anggota Dewan Kalurahan dipilih oleh warganegera yang sudah berumur delapan belas tahun dan sudah tinggal di desa itu selama enam bulan. Setiap satu anggota mewakili seratus pemilih dan masa baktinya selama tiga tahun.⁸

Tindakan Sultan itu untuk mengantisipasi perkembangan partai politik di desa. Setelah Maklumat 3 November diumumkan, di Yogyakarta berdiri partai Islam Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Barisan Tani Indonesia yang semua dibentuk oleh pemerintah DIY, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang dipimpin oleh orang-orang sosialis dan komunis yang kelak pengaruhnya terhadap petani sangat besar. Dengan disusunnya pemerintahan desa sesuai dengan UUD lebih dulu dari pembentukan partai politik itu, partai-partai politik belum sempat secara resmi masuk kedalam dewan-dewan kalurahan. Lebih-lebih setelah Dewan Kalurahan diubah dengan Maklumat No. 14/1946 dan Maklumat No. 15/1946 yang mengatur pemilihan anggota Dewan kalurahan dipilih oleh kepala keluarga. Kecuali itu dibentuk Majelis Permusyawaratan Desa yang anggotanya terdiri atas kepala somah seluruh desa.⁹

Sesuai dengan UUD setelah diamandemen dengan Maklumat No. X dan Maklumat Pemerintah 14 November, maka kepala desa

memimpin pamong desa menjalankan keputusan-keputusan Dewan Kalurahan dan bertanggung jawab kepada Dewan Kalurahan. Dengan demikian pemerintah desa tradisional disesuaikan oleh Sultan beserta stafnya dengan UUD 1945. Oleh karena pembiayaan pemerintah itu dibebankan pada kas desa, maka desa-desa yang kecil digabungkan menjadi satu, hingga menjadi desa yang cukup besar dan kas desanya mampu membiayai pemerintahan desa. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan blengketan yang hasilnya dikukuhkan dengan Maklumat No. 5/1948 pada tanggal 19-4-1948: Kabupaten Sleman semula terdiri atas 262 kalurahan menjadi 86 kalurahan, Bantul : 195 menjadi 60, Gunungkidul : 168 menjadi 141, Kulonprogo: 118 menjadi 47 dan Adikarto: 51 menjadi 41.¹⁰

Setelah pemerintah desa diatur dan Laskar Rakyat diorganisasi di samping organisasi barisan perjuangan lainnya, maka BKPND mengatur pemerintah daerah dari kabupaten sampai ke propinsi di BKPND ada yang berusaha meniadakan status istimewa pemerintah daerah Yogyakarta. Memang kalau diamati lebih cermat terdapat suatu perebutan pengaruh dalam pemerintahan antara birokrat yang duah dibina Sultan sejak zaman Jepang dan para politisi yang mendapat kedudukan sejak proklamasi kemerdekaan diumumkan. Sultan menghendaki mereka menduduki jabatan di lembaga legislatif, karena mereka mempunyai ide, sedangkan birokrat kesultanan menduduki jabatan di lembaga eksekutif dalam bidang administratif dan mempunyai pengalaman dalam birokrasi pemerintahan cukup lama. Kecuali itu Sultan dengan gigih mempertahankan status istimewa Yogyakarta.¹¹

Setelah tercapai kesepakatan antara Sultan dan BKPND, maka diumumkanlah Maklumat No. 18/1946 yang mengatur birokrasi pemerintahan DIY. Untuk seluruh DIY dibentuk Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta (Dewan Daerah), untuk kota Yogyakarta dibentuk Dewan kota dan di Setiap kabupaten dibentuk dewan Kabupaten. Setiap dewan bersama kepala daerah masing-masing membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah itu dijalankan oleh Dewan Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Daerah. Anggota Dewan Pemerintah baik bersama-sama maupun masing-masing

bertanggung jawab kepada Dewan Daerah yang bersangkutan kecuali Suktan Hamengku Buwono IX dan Oaku Alam VIII.¹²

Dengan dibentuknya Dewan Daerah itu BPKID dan KNID bubar dan ketua Dewan Daerah Yogyakarta dijabat oleh Marlan, ketua Partai Sosialis Cabang Yogyakarta. Dengan demikian tiga lembaga pemerintahan (*Kesultanan*, KNID dan *Kooti Zimu Kyooku*) yang semula berjalan sendiri-sendiri terintegrasikan secara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada UUD. oleh karena perkembangan pemerintah daerah Yogyakarta itu Presiden dan Wakil Presiden RI yang merasa di Jakarta tidak aman karena provokasi Belanda, memilih Yogyakarta sebagai ibukota RI yang baru. Maka pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan wakil Presiden sudah tiba di Yogyakarta dan disambut dengan hangat olehh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbeda dengan di Yogyakarta di Jakarta pemerintah daerah dipimpin oleh Wakil Walikota Jakarta yang dulu pernah diangkat oleh Jepang yaitu Suwiryo yang dipilih oleh pemimpin-pemimpin RI sebagai kepala Pemerintah Nasional Kota Jakarta (PNKJ) dan berkedudukan di balai Agung di Selatan Lapangan Banteng. Dia dipilih tanggal 23 September dan diangkat secara resmi sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 September 1945. PNKJ yang dipimpin Suwiryo ini tidak mempunyai akar sampai ke desa-desa. PNKJ bekerjasama dengan pemerintahan Belanda yang dibentuk Ch. O. van der Plas dan kemudian H.J. van Mook dengan pengawasan Inggris. Namun pemerintahan daerah di Jakarta yang dipimpin oleh Suwiryo ini hanya bertahan sampai 20 Juli 1947. Ketika Inggris meninggalkan Jakarta tanggal 21 Juli 1947. Ketika Inggris meninggalkan Jakarta tanggal 21 November 1946 Belanda mulai mendesak sedikit demi sedikit. akhirnya pada tanggal 20 Juli itu Suwiryo dan stafnya ditangkap oleh Belanda.¹³

Di Sulawesi keberadaan pemerintah daerah RI sangat menyedihkan, karena Australia yang mewakili Sekutu dan Belanda tiba di Makasar (Ujung Pandang) pada tanggal 21 September 1945. Ratulangi beserta anggota delegasi yang ikut diskusi dalam sidang PPKI di Jakarta pulang ke Makassar seminggu sesudah proklamasi

kemerdekaan diumumkan. Akan tetapi dia ragu-ragu dan tidak membentuk pemerintahan daerah di Sulawesi dengan alasan agar tidak mendapat kesulitan dengan pihak Jepang dan sekutu. Namun Ratulangei menghimpun tokoh-tokoh pro RI yang tergantung dalam Sumber Daya Rakyat (Sudara) yang dipimpin oleh Andi Mappanjukki, Raja Bone. Dukungan kaum nasional tua dan muda cukup besar, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah kehadiran tentara Sekutu yang dipimpin Australia yang diboncengi NICA. Meskipun kaum nasionalis berusaha menunjukkan kehadirannya dengan mengadakan serangan terhadap markas-markas Belanda dan Australia meninggalkan Sulawesi Selatan Belanda dengan NICA-nya menangkap Ratulangei dan mengasingkannya ke Irian Barat pada bulan April 1946 dan berikutnya Andi Mappanjunki dan anaknya Andi Pangeran juga diasing. Dengan demikian sudah sejak tahun 1946 Belanda berhasil mengembangkan pemerintahan yang anti RI di Sulawesi Selatan, meskipun banyak tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat nasionalisme yang pro RI.¹⁴

Sementara daerah lain sudah terdesak oleh Belanda dengan NICA-nya, maka pemerintah daerah di Yogyakarta menjadi semakin mantap. Keberadaan Presiden dan Wakil Presiden di Yogyakarta semakin mempermudah pemerintah daerah Yogyakarta menyesuaikan diri dengan pemerintah pusat dan sebaliknya pemerintah pusat juga mengambil manfaat dari pemerintah daerah yang sudah berjalan baik itu dalam hal melengkapi personalia dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah pusat, kecuali mendapat tenaga administratif yang terampil dari pemerintah DIY, juga mendapat masukan dalam membuat UU. Maklumat No. 18/1946 yang dikeluarkan DIY dijadikan pola UU No. 22/1948 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku untuk semua daerah yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah RI, meskipun baru efektif sesudah Agresi Belanda II berhasil menduduki Yogyakarta.

Pemerintah daerah Non Kooperatif

Pada tanggal 19 Desember 1948 Militer Belanda menyerang Yogyakarta dan mendudukinya. tentara Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa menteri dan mengasingkan mereka ke Sumatera. Sultan Hamengku Buwono IX tetap tinggal di *Keraton*.

demikian juga Paku Alam VIII. Kecuali menjadi menteri negara Sultan juga menjadi Kepala Daerah. Maka ketika Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, Sultan mengatur pemerintahan daerah DIY dengan menginstruksikan kepada pamong praja dari pusat sampai ke desa-desa supaya berada di wilayah pemerintah masing-masing untuk tetap memimpin rakyat dan mengusahakan supaya pemerintahannya tidak jatuh ke tangan Belanda, meskipun Belanda menduduki wilayah itu. Komunikasi dilakukan dengan kode yang tidak diketahui oleh musuh. Jawatan Praja menjadi penghubung antara kepala daerah dan kabupaten, *kapanewon*, tentara, dan kementerian. Kantor *Kepatihan* tutup sampai ada pemerintah dari Sultan.¹⁵

Sesudah berhasil menduduki Yogyakarta Belanda membentuk pemerintahan pendudukan yang dipimpin oleh Residen Stok dan pembantunya Purbosudibyo dari Jakarta. Pemerintah pendudukan ini membujuk pegawai dan pamong praja Yogyakarta untuk bekerjasama, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya mau menjalankan pemerintah kalau mendapat izin dari Sultan. Belanda tidak berhasil membujuk sri Sultan untuk bekerjasama, bahkan ketika Belanda memaksa dengan ancaman senjata para pegawai air minum pada tanggal 1 Januari 1949, Sultan marah dan menyatakan meletakkan jabatan. Ia hanya mau memimpin rakyat sebagai pemimpin rakyat Mataram, kalau diminta oleh rakyat sendiri. Dengan demikian kalau ada kekacauan Sultan tidak bertanggung jawab. Pernyataan Sultan itu mendapat tanggapan yang bersemangat dari rakyat. Mereka beramai-ramai mengirim surat kepada Sultan memohon agar mau menjadi pemimpin rakyat Mataram. Gejala ini menunjukkan bahwa karisma Sultan menjadi motor serangan gerilya rakyat, pamong praja, dan tentara terhadap pos-pos jaga dan markas Belanda.¹⁶

Pengalaman tersebut dialami juga oleh daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, ketika negara Pasundan dibentuk Gubernur Sewaka melarikan diri ke pedalaman, meskipun akhirnya dapat ditangkap oleh Belanda juga. Tokoh-tokoh pro RI yang terpaksa bekerjasama dengan Belanda dalam negara pasundan, mereka masuk dalam parlemen dan menjadi partai oposisi.¹⁷ Hal ini terjadi juga di Indonesia Timur dan oposisi mereka itu efektif. Hal ini tampak pada jatuhnya kabinet warrouw yang mendukung serbuan Belanda terhadap RI bulan Juli

1947 oleh mosi tidak percaya dari parlemen yang dimotori oleh anggota-anggota parlemen yang pro RI.¹⁸

Pemerintah DIY itu berlangsung sampai tanggal 1 Mei 1949. Setelah keluarnya *Rum-Rojen Statement* yang antara lain berisi pihak Belanda akan menarik diri dari Yogyakarta; RI dan Belanda sepakat akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB). Untuk itu Presiden menginstruksikan kepada Sultan untuk melakukan persiapan di Yogyakarta. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Sultan untuk memulihkan pemerintah daerah DIY yang kantornya ditutup sejak tanggal 19 Desember 1948.

Kesempatan tersebut digunakan untuk membereskan masalah-masalah tentang pemerintah daerah yang belum dapat dibereskan pada waktu sebelum Agresi militer Belanda II. Masalah-masalah itu adalah konflik laten antara birokrat *kesultanan* dan politisi dalam Dewan Daerah yang berasal dari tokoh-tokoh partai politik dan pemimpin pergerakan. Kemudian masalah Kabupaten Yogyakarta yang dipisahkan dari Pemerintah Daerah DIY oleh Pemerintah Pusat menjadi Haminte Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Pusat seperti yang diatur oleh UU No. 17/1947.¹⁹

Pada saat itu Sultan sebagai menteri koordinator Keamanan dan sebagai kepala daerah DIY menelurkan keputusan bahwa dirinya memegang kekuasaan tertinggi atas DIY termasuk Haminte Kota Yogyakarta. Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari Sultan dibantu oleh Staf Pemerintah dan staf keamanan. Staf Pemerintah dipimpin oleh paku Alam VIII yang mengkoordinasikan para bupati paniradyapati yang mengepalai sekretariat pemerintah daerah bagian praja, bagian keuangan, bagian penerangan, bagian sosial, bagian kemakmuran, dan walikota Yogyakarta. Lewat bagian praja staf pemerintahan memerintah walikota, para bupati pamong praja, Mantri Pamong Praja (camat), *panewu pamong praja* (camat), lurah dan dukuh, yang seluruhnya disebut pamong praja. Dewan-dewan daerah yang sudah dibentuk sejak tahun 1946 tidak diberi fungsi legislatif, tetapi hanya diberi fungsi penasehat sataf pemerintahan.²⁰

Dalam Staf keamanan komandan Tentara dijadikan kepala, sedangkan anggota-anggotanya komandan CPM dan komandan Polisi.

Unsur pamong praja diangkat menjadi sekretaris merangkap anggota. Baik komandan Tentara maupun komandan CPM dan komandan Polisi masing-masing membawahkan jajarannya sesuai hirarkinya. Demikianlah perkembangan pemerintahan daerah DIY dalam masa revolusi kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 sampai mundurnya tentara Belanda Yogyakarta tanggal 30 Juni 1949.

3. Penutup

Dari uraian di atas tampak bahwa rakyat daerah-daerah begitu bersemangat menyambut Proklamasi Kemerdekaan. Kaum nasionalis yang terdiri atas birokrat, pemimpin rakyat, dan para pemuda dengan tegas berusaha memindahkan kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan bangsa Indonesia. Jepang yang bertahan dengan kekuatan militernya diserbu, birokrat Indonesia yang masih ragu-ragu dicopot dan diganti dengan tokoh nasionalis, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran baik dengan tentara Jepang maupun dengan birokrat Indonesia yang masih mengharapkan kedatangan Belanda.

Ternyata kaum nasionalis itu sudah mempersiapkan diri sejak zaman Jepang. Mereka tokoh-tokoh nasionalis tua yang dibina oleh partai-partai pada zaman Belanda dan tokoh-tokoh muda yang mendapat ajaran pada zaman Jepang dengan indoktrinasi para nasionalis tua yang mendapat fasilitas dari Jepang. Mereka memanfaatkan kesempatan terlambatnya kedatangan Sekutu untuk mmelemparkan penindasan yang selama itu dirasakan baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Maka setiap komandan oleh Belanda maupun oleh Jepang. Maka setiap komando dari Pemerintah RI yang berkaitan dengan kemerdekaan selalu disambut hangat. Mereka yang beruntung daerahnya tidak segera diduduki oleh tentara Belanda membangun pemerintah daerah sesuai dengan instruksi pemerintah RI seperti yang terlihat di Yogyakarta Sultan sudah sejak zaman Jepang mengadakan debelandanisasi terhadap pemerintahn *Kesultanan* dan Jepang simpati terhadap tindakan Sultan itu. Kecuali dalam struktur masyarakat Yogyakarta yang terdiri atas Sultan dan para bangsawan, *abdi dalem*, dan *kawula dalem*, yang menempatkan Sultan pada posisi panutan. Sultan juga mempunyai semangat nasionalis yang tinggi.

sehingga hubungannya dengan kaum nasionalis di Yogyakarta sangat baik. Nasionalismenya semakin jelas ketika Proklamasi Kemerdekaan diumumkan. Dia bersama Paku Alam VIII berdir di belakang negara RI baru yang belum jelas masa depannya, sehingga Presiden menghargainya dengan memberi piagam kedudukan daerah istimewa di negara RI bagi Kasultanan dan Paku Alam am. Kekuasaan karismatis dan kekuasaan yang dilegitimasi oleh negara RI itu ternyata memberi kesempatan kepada Sultan untuk menyusun pemerintahan daerah yang sesuai dengan UUD 1945.

Hal tersebut tidak dapat dinikmati oleh daerah-daerah yang segera diduduki oleh Sekutu dan Belanda dengan NICA-nya seperti Slawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Pemimpin-pemimpin daerah yang berusaha mengorganisasi pemerintah daerah segera didesak oleh Belanda atas bantuan Sekutu. Selama Sekutu masih berada di tengah-tengah mereka, Belanda masih menahan diri, tetapi begitu Sekutu pergi Belanda menangkap pemimpin-pemimpin daerah atau mendesaknya ke pedalaman. Yang terakhir dialami oleh pemerintah daerah Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948.

Namun fenomenanya menunjukkan bahwa di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia pada dasarnya setia kepada RI Proklamasi. Dengan segala cara mereka menunjukkan sikap non kooperatif terhadap Belanda. Di Yogyakarta hhal ini tampak pada sikap para birokrat yang tidak mau diperintah oleh Belanda tanpa seizin Sultan. Di daerah-daerah lain yang dikuasai oleh Belanda dan Belanda berhasil membentuk negara boneka, para nasionalis itu masuk ke dalam lembaga legislatif dan menjadi faksi oposisi yang jiwanya mendukung RI. sedangkan mereka yang menerima pengangkatan sebagai pejabat-pejabat negara buatan Belanda itu sebenarnya tidak sekuruhnya anti RI. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh nasionalis, tetapi karena sesuatu dan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pribadi mereka menerima jabatan yang ditawarkan oleh Belanda. Namun mereka yang ragu-ragu terhadap Negara RI yang baru saja dibentuk dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan itu begitu Belanda datang menawarkan kedudukan segera menerimanya. Mereka ini sejak semula tidak mempunyai hubungan yang baik dengan kelompok nasionalis.

mereka lebih setia pada hirarki pemerintah yang sudah sejak zaman Belanda diikutinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya rakyat Indonesia dan pemimpin-pemimpin nasionalis siap membentuk pemerintahan daerah yang menganggap ini merupakan kesempatan emas yang harus digunakan dengan segala kekuatan yang mereka miliki sebagai realisasi nasionalisme yang sudah sejak lama ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin nasional dan dimantapkan pada zaman Jepang. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin di pusat yang harus berpikir keras bagaimana dapat memindahkan kekuasaan dari Jepang yang masih memiliki militer dan dari Belanda yang oleh Sekutu dianggap masih berhak memerintah Hindia Belanda. Maka dapat dikatakan bahwa daerah-daerah lebih cepat mewujudkan *national integration* dalam *state integration* yang merupakan dasar nation-state yang demokrasi daripada di pusat. kalau analisis ini benar maka otonomi daerah seluas-luasnya sebenarnya tidak akan membahayakan *state integration* asal pemerintah pusat akan membahayakan *state integration* asal pemerintah termasuk nasionalismenya secara proporsional.

Cacatan

1. Kahin, 1970: *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 142.
2. Muhammad Yasin, 1959: Naskah *Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Prapantja, Djakarta, hlm. 439-445.
3. Cf. Suwarno, 1994: *Hamengku Buwono IX dan sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, kanisius, Yogyakarta; Frederick. 1989: *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, Terjemahkan, Gramedia, Jakarta; Morris dalam Kahin, A., 1990: *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Terjemahan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
4. Anderson, 1988: *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Tejemahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 385-387.

5. Harvey dalam A. Kahin, *op.cit.* dan Sewaka, 1955: *Tjorat-Tjoret dari djaman ke djaman*, Bandung.
6. Sewaka, 1955: *Tjorat-Tjoret dari djaman-ke djaman*, Bandung, hlm. 95.
7. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 95.
8. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 211.
9. *Ibidem*, hlm. 215.
10. *Ibidem*, hlm. 232.
11. *Ibidem*, hlm. 218-224.
12. *Ibidem*, hlm. 224-228.
13. Cribb dalam A. Kahin, *op. cit.*, hlm. 196-201.
14. Harvey dalam A. Kahin, *op. cit.*, hlm. 216-221.
15. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 242.
16. *Ibidem*, hlm. 243.
17. Sewaka, *op. cit.*, hlm. 91-111.
18. Harvey dalam a. Kahin. *op.cit.*, hlm. 238.
19. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 238.
20. *Ibidem.*, hlm. 254.

Daftar Pustaka

Anderson, Ben,

1983: *Revousi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terjemahan Jiman Rumbo, cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Federick, William H.,

1989 : *Pandangan dan gejolak masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, Gramedia, Jakarta.

Kahin, goarge McTurnan,

1970 : *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithhaca and London.

Kahin, audrey R..

1990 : *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta.

Muhhammad Yamin, penghimpun,

1959 : *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*.

Prapantja, Djakarta.

Sewaka,

1955 : *Tjorat-Tjoret dari djaman ke djaman*, Bandung.

Suwarno, P.J.

1944 : *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan
Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Kanisius.
Yogyakarta.

REVOLUSI KEMERDEKAAN DALAM SATRA JAWA DAN INDONESIA

Yudiono K.S.

Sesuai dengan arahan Panitia, makalah ini bertugas menjawab pertanyaan sejauh manakah semangat dan suasana revolusi kemerdekaan Indonesia telah mewarnai sejumlah karya sastra yang sezaman atau pada sekitar tahun 1950. Dasar pemikirannya ialah revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dampak atau pengaruhnya telah menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat. Apabila dunia sastra dipandang sebagai salah satu segi kehidupan masyarakat, timbullah pertanyaan sejauh manakah semangat dan suasana revolusi kemerdekaan itu mewarnainya.

Pemikiran seperti itu sejalan dengan teori sosiologi sastra yang hakikatnya menyatakan bahwa hubungan antara pengarang, sastra, dan masyarakat bukanlah sesuatu yang dicari-cari, bahkan sesuatu yang sah untuk dipermasalahkan. Sebabnya ialah karya sastra apa pun pasti diciptakan oleh pengarang sebagai individu yang berada dalam masyarakat dan zaman tertentu. Dalam penciptaan sastra itu pengarang tidak berada dalam kondisi kosong. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, yang sering menjadi bahan sastra, adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat. akan tetapi perlu dicatat bahwa hubungan tersebut tidaklah

sederhana, sedangkan penciptaan sastra itu sendiri berada dalam dunia fiksi yang memiliki kaidah-kaidah yang khas. salah satu kaidahnya menyatakan bahwa masuknya masalah-masalah kemasyarakatan ke dalam karya sastra telah melewati proses seleksi di pihak pengarang, sehingga apa pun yang terdapat dalam karya sastra itu bukanlah data empiris, melainkan dunia fiksi berdasarkan kenyataan sosial objektif yang melindungi kehidupan pengarang. Dengan demikian karya sastra tidak dapat dipandang sebagai dokumen sosial atau dokumen sejarah, walaupun berpotensi mencerminkan atau merefleksikan kehidupan masyarakat pada zaman tertentu.

Teori hubungan antara pengarang, sastra, dan masyarakat telah berkembang rumit dalam sosiologi sastra (Damono, 1978: 5), tetapi intinya menegaskan adanya hubungan timbal balik antara pengarang dan masyarakat, sehingga sastrana pada zaman tertentu, terlepas dari baik-buruknya karya sastra itu menurut pandangan kritik sastra.

Pertanyaan lebih lanjut ialah sastra manakah yang dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan pada awal makalah ini. Sesuai dengan ruang lingkup revolusi kemerdekaan Indonesia di tingkat lokal yang berarti revolusi kemerdekaan Indonesia di daerah Jawa Tengah, dengan sendirinya sastranya ialah sastra Jawa dan sastra Indonesia pada sekitar tahun 1950. Yang dimaksud dengan sastra Jawa dalam makalah ini ialah prosa dan puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa pada sekitar tahun 1950, sedangkan sastra Indonesia berarti prosa dan puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia pada kurun masa yang sama. Tentu saja batasan itu masih dapat diperdebatkan, tetapi sementara ini dapatlah kiranya dijadikan pegangan untuk pembahasan berikut.

1. Revolusi Kemerdekaan dalam Sastra Jawa

Berbagai peristiwa revolusi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di daerah Jawa Tengah pada kurun masa 1945-1950 telah direkonstruksi oleh banyak orang dalam karangan-karangan nonfiksi yang tersebar di koran, majalah, dan buku-buku. Datanya terlalu banyak untuk dicatat dan memang di luar jangkauan makalah ini. Akan tetapi hal itu tampaknya tidak berlaku dalam kehidupan sastra Jawa.

Menurut Tim Peneliti Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada Tahun 1976/1977) penerbitan berbahasa Jawa pada sekitar tahun 1945 tidak berkembang sedikit pun karena terlanjur dilarang atau dihentikan oleh pemerintah pendudukan Jepang, sehingga yang dapat berlangsung hanya penerbitan berbahasa Indonesia dengan sensor yang kuat. Kegiatan penulisan berbahasa Jawa brulah terlihat sesudah tahun 1950, yaitu setelah surutnya gejala revolusi kemerdekaan. Sementara itu menurut J.J.Ras dalam bukunya berjudul *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (1985: 20), pertumbuhan ke arah kedewasaan sastra modern mulai sesudah tahun 1950, ketika perjuangan untuk kemerdekaan telah selesai dan berlangsung suatu rangkaian perkembangan sosial politik yang baru.

Kedua catatan prosa dan puisi Jawa pada masa revolusi kemerdekaan, sehingga jawaban atas pertanyaan awal makalah ini hendaknya bertumpu atau bersumber pada sastra Jawa sesudah tahun 1950. Akan tetapi sebagian besar pada masa itu termuat majalah seperti *Penyebarkan Semangat*, *Jaya Baya*, dan *Mekar Sari* sehingga datanya sekarang sudah sulit diperoleh. Sementara itu buku-buku sastra Jawa yang terbit sesudah tahun 1950 pun ternyata saat ini merupakan "barang langka" yang tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan tersebut di atas hanya dapat didasarkan pada beberapa sumber tertulis yang terjangkau selama penulisan makalah ini.

Sebagai gambaran tentang sastra Jawa yang bernapaskan semangat revolusi kemerdekaan itu baiklah disajikan beberapa pendapat berikut.

Menurut Tim Penelitian Fakultas Sastra dan kebudayaan Universitas Gadjah Mada (1977 : 10), tema dan amanat dalam roman sastra Jawa periode 1930-1959 ialah (1) pertentangan antara golongan tua dan muda dalam kebebasan menentukan teman hidup, (2) masalah penderitaan istri yang dimadu, (3) percintaan, (4) rahasia kejahatan yang terbongkar atau usaha membongkar kejahatan, dan (5) semangat kebangsaan. Akan tetapi roman Jawa yang menggambarkan semangat tersebut hanyalah *Serat Gerilya Solo* karangan Sri Hadidjoyo terbitan Balai Pustaka 1952. Sementara itu Ras (1985: 22-25) mencata

beberapa roman atau novel Jawa yang bernapaskan revolusi kemerdekaan, yaitu *Serat Gerilya Sala* karangan Sri Hadijaya (=Sri Hadidjoyo), *Rante Mas* karangan Any Asmara (1961), *Timbreng* karangan Satim Kadaryana, dan *Lara lapane Kaum Republik* KaranganSuparta Brata (1966). Roman ini pada mulanya dimuat dalam majalah *Penyebar Semangat* tahun 1958 dan diterbitkan sebagai buku pada tahun 1966. Dengan novel inilah pengarangnya memperoleh hadiah untuk novel terbaik dari majalah *Peyebar Semangat* (Ras, 1985: 25).

Penggalan dari novel tersebut telah dimuat oleh Ras dalam *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (halaman 51-58) dengan judul “Dedemitan Mlebu Kuta” (Sembunyi-sembunyi Masuk Kota) yang salah satu bagiannya terbaca sebagai berikut : ²⁾

Wayah bangbang-surup Wiranta sakanca padha mangan bebarengan ing omahe pak lurah, diladeni Waginah, anake Sadikrama, Lan Kartini Putrane den Wira, priyayi Bromantakan sing ngungsi mrono, sarta ditunggoni para sepuh kaya ta pak lurah sekaliyan lan bu Danu, padha rerembungan sing lucu-lucu. Mangan bebarengan mengkono iku dianakake mung yen arep mlebu kutha. Dene kaanan sadina-dinane mangan iku sakarepe bocahe dhewe-dhewe, ana sing wayah surup, ana sing wayah isa, nanging kabeh wis entuk cadhongane dhewe-dhewe.

Sadadyan mengkono ya isih ana bocah-bocah sing nakal, cadhongane kancane dikrowoki, kang mengkono mau kadhangkala dadi geguyon, nanging sok dadi ladakan, marga bab mangan bocah-bocah mau lagi padha drembadrembane, mangka cadhangan Tumprahe Cumpen. Mula panganan sing tinemu saka njaban cadhongan, kaya ngunduh kates, mancing erok-erok lan nawu iwak ing kali, mbakar pohung, dadi kareman lan kalengane bocah-bocah mau. Sok-sok ya mung dadi crita kang nengsemake pengamalan-pengalaman kang aneh-aneh golek sumbal pangan jaman perang ing padesan kuwi, kaya ta mbedhil derkuku nganggo karaben.

(Saat menjelang petang Wiranta dan kawan-kawan makan bersama di rumahnya Pak lurah, dilayani Waginah, anaknya Sadikrama, dan Kartini, anaknya Den Wira, priyayi Bromantakan yang mengungsi ke situ, dan ditunggu para orang tua seperti Pak Lurah berdua dan Bu Danu, sama berbincang-bincang yang lucu-luccu. Makan bersama seperti itu diadakan hanya jika hendak masuk kota. Sehari-harinya makan itu diserahkan kehendak anaknya sendiri-sendiri. Namun demikian masih ada anak-anak yang nakal, jatah temannya dikurangi. Yang seperti itu kadangkala menjadi bahan tertawaan, tetapi kadang juga menjadi sumber pertengkaran, sebab dalam hal makan itu mereka sedang lahap-lahapnya, padahal jatahnya terbatas. Maka makanan yang

diperoleh di luar jatah seperti memetik pepaya, memancing erok-erok dan menguras ikan di kali, membakar ketela, menjadi kegemaran yang menyenangkan dalam pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh mencari pengganjal makan jaman perang di pedesaan itu, seperti menembak burung derkuku dengan karaban).

Judul roman tersebut memang sudah membayangkan isinya yang berkisar pada penderitaan kaum repunlik, yaitu orang-orang Indonesia yang mencintai kemerdekaan bangsa dan negara. Judul lain seperti *Serat Gerilya Sala* pun jelas membayangkan semangat dan suasana revolusi kemerdekaan yang harus dijalani dengan perang gerilya. Sementara itu dapat dipertanyakan pula sejauh manakah semangat dan suasana revolusi kemerdekaan Indonesia terungkap dalam genre cerita pendek dan puisi Jawa. Jawaban Tim Peneliti Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (1977: 359) menyatakan bahwa penggarapan tema dan masalah menjadi semakin beragam pada masa sesudah tahun 1950. Coraknya berupa pantulan revolusi, peperangan, korupsi, pengorbanan demi kebenaran, dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sementara itu tim tersebut berpendapat bahwa puisi Jawa pada sekitar tahun 1945 tidak berkembang subur, karena pada masa itu tidak terdapat penerbitan berbahasa Jawa. Puisi Jawa barulah mekar sesudah tahun 1950 dengan tema yang berkisar pada masalah kemelaratan, kelaparan, dan segala masalah sosial seperti kepincangan dan keburukan dalam masyarakat.

Catatan tersebut tentu saja mengisyaratkan langkanya puisi Jawa pada masa 1945-50 yang berbicara tentang semangat revolusi kemerdekaan. Ternyata masalah itu pun tidak disebut-sebut oleh Suripan Sadi Hutomo ketika membahas puisi Jawa dalam nuku *Telaah Kesustraan Jawa Modern* (1975). Menurut Suripan (1975: 22-37) Puisi Jawa pada masa revolusi kemerdekaan masih berwarna tradisional, sedangkan pembaharuannya tampak pada masa sesudah tahun-tahun 1950.

Pendapat lain relevan dengan telaah sastra Jawa ialah pendapat Sapardi Djoko Damono dalam disertainya berjudul *Novel Jawa Tahun 1950-an Telaah Fungsi, isi, dan Struktur*.³⁾ Menurut Sapardi Djoko Damono (1989: 402) Novel Jawa tahun 1950-an merupakan gambaran mengenai kaum abangan yang berusaha mendapatkan status priyayi

atau yang berusaha mendapatkan status priyayi atau yang berusaha melestarikan status itu. Dalam cerita-cerita yang berlatar zaman Belanda digambarkan usaha rakyat kecil untuk mendapatkan status yang lebih tinggi, sedangkan novel-novel sesudah kemerdekaan kebanyakan menampilkan dunia priyayi yang merupakan pandangan dunia pembaca. Sementara itu R.S. Subalidinata (1983: 22-28) berpendapat bahwa novel-novel Jawa sesudah kemerdekaan ada yang mengungkapkan tema percintaan dengan latar perjuangan melawan penjajah seperti *Gerilya Solo*, *Kanggo Bumi Pertiwi* karangan Hadjana Hp, *Pangurbanan* karangan Any Asmara, dan *Kanggo Bumi Kinasih* karangan N. Sakdani.

Dari dua pendapat terakhir itu dapat dicatat bahwa semangat dan suasana revolusi kemerdekaan Indonesia telah mewarnai sastra Jawa, tetapi tampaknya bukanlah tema yang dominan. Barangkali hal ini bersangkutan dengan kedudukan sastra Jawa sebagai sastra ini bersangkutan dengan kedudukan sastra Jawa sebagai sastra daerah yang mulai "terdesak" oleh berkembangnya sastra Indonesia.

2. Revolusi Kemerdekaan dalam Sastra Indonesia

Pengamatan sepintas membuahkan catatan bahwa dalam sastra Indonesia telah terbit sejumlah roman (novel) yang bertemakan revolusi kemerdekaan, antara lain : *Keluarga Gerilya*, *Perburuan*, *Bukan Pasar Malam*, *Mereka Yang Dilumpuhkan* karangan Pramoedya Ananta Toer; *Pulang* karangan Toha Mochtar, *Jalan Tak Ada Ujung* karangan Mochtar Libis, *Surabaya Tumpah Darahku* karangan Suparta Brata, *Dari Hari ke Hari* karangan Mahbub Djunaidi, *Dan Perangpun Usai* karangan Ismail Marahimin, *Burung-burung Manyar* karangan Y.B. Mangunwijaya, sedangkan kumpulan cerita pendek (cerpen) yang bernapaskan revolusi kemerdekaan dapat disebut antara lain *Laki-laki dan Mesiu* karangan Trisno Yuwono, *Tiga Kota* karangan Nugroho Notosusanto, *Hujan Kepagian juga* karangan Nugroho Notosusanto, *yang Terempas dan Terkandas* karangan Rusman Sutiasumarga, *Percikan Revolusi* karangan Pramoedya Ananta Toer, dan *Manusia dan Tanahnya* karangan Aoh K. Hadimadja. Di antara karangan-karangan tersebut tampaknya cerita-cerita yang berlatar semangat dan

suasana revolusi kemerdekaan di daerah Jawa Tengah, yaitu *Bukan Pasar Malam, Tiga Kota, dan Burung-burung Manyar*. Sementara itu perlu juga dicatat bahwa dari pengarang Nh. Dini telah lahir cerita-cerita kenangan yang bersangkutan dengan revolusi kemerdekaan, yaitu *Sekayu, Padang Ilalang di belakang Rumah, dan Langit dan Bumi Sahabat kami*. *Bukan Pasar Malam* mengisahkan kepulangan tokoh "aku" ke kota kelahirannya, Blora, Untuk memenuhi harapan ayahnya yang sakit keras setelah selesainya perang kemerdekaan. Meskipun novel ini tidak mendeskripsikan kisah dan masalah revolusi, pada bagian akhirnya terdapat penjelasan yang relevan dengan masalah tersebut.⁴⁾

Sore itu dengan perlahan saja datang. Dan di kala matahari hampir saja lenyap di ufuk barat, datanglah tamu baru.

Katanya:

"Aku sudah lama kenal pada almarhum ayah tuan. Kami dulu mengembara menjalankan tugas di daerah gerilya. Ya, aku kenal betul ayah tuan. Ia bekerja pada Belanda, tapi terus saja marhum bekerja bawah tanah. Banyak yang telah dikatakannya padaku. Tapi apa yang sudah dikatakannya itu tak perlu kukatakan. Pasti tuan dan adik-adik tuan mengetahui sudah. Hanya yang bisa kukatakan dengan pasti, dan barangkali inilah yang tak tuan ketahui, ialah: ayah tuan gugur di lapangan politik."

Aku kaget. Kupandang mulutnya. Bibirnya bergerak-gerak pula. Dan terdengarlah suaranya.

"aku lihat tuan kaget. Tapi sesungguhnya begini. Ayah tuan jatuh sakitoleh kekecewaan - kecewa oleh keadaan yang terjadi sesudah kemerdekaan tercapai. Rasa-rasanya tak sanggup lagi ia melihat dunia sekelilingnya yang jadi bobrok itu - bobrok dengan segala akibatnya. Mereka yang tadinya menduduki kedudukan-kedudukan penting sebelum Belanda menyerbu, jadi pemimpin pula di daerah gerilya dan jadi bapak rakyat sungguh-sungguh. Dan bukan tanggung-tanggung lagi ayah tuan membela kepentingan mereka itu. Tapi kala kemerdekaan telah tercapai, mereka itu sama berebutan gedung dan kursi. Dan barangsiapa tak memperoleh yang diinginkannya, mereka pergi - karena mereka tak perlu mengharap gaji. Dan ayah tuan, ayah tuan tak sanggup melihat keadaan seperti itu. Tapi dalam hidup manusia ini orang harus bergaul. Dan pergaulan yang harus dimasuki oleh orang inilah yang mengeramkan penyakit dalam diri marhum ayah tuan. Ayah tuan tak bicara apa-apa tentang mereka itu. Segala kekecewaannya itu diredamnya saja dalam hatinya. Tapi akibat yang sangat besar tak diduganya akan memimpa dirinya. Tbc kilat. Dua setengah bulan sakit, dan beliau terus pergi."

Sakit dan mati memang hanya terjadi dalam masa revolusi, tetapi sakit dan mati sebagai akibat revolusi seperti yang dialami sang ayah itu memiliki makna yang khas dalam sebuah roman. Hal itu dapat terjadi pada banyak manusia Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, tetapi bolehlah dikatakan sebagai masalah yang tak disentuh karangan-karangan ilmiah, sejarah, atau pun jurnalistik. Dari novel ini dapatlah dipetik informasi bahwa di kota kecil Blora terdapat pejuang kemerdekaan yang kepribadiannya pantas dibanggakan. Di sini tidak perlu dipertanyakan siapakah sebenarnya ayah dalam novel tersebut, sebab yang lebih penting ialah penokohnya dengan latar sosial yang berwarna revolusi kemerdekaan. Pribadi seperti sang Ayah itu pastilah berada di mana-mana meskipun tidak tercatat oleh sejarah.

Kalau Blora telah terangkat namanya dalam novel *Bukan Pasar Malam*, kota Rembang di sebelah utara Blora telah terekam abadi dalam kumpulan cerpen Nogroho Notosusanto yang berjudul *Tiga Kota*.⁵⁾ Buku ini berisi sembilan cerpen yang terbagi menjadi tiga kelompok di bawah judul Rembang, Yogya, dan Jakarta, tiga kelompok di bawah judul Rembang, masing-masing "Mbah Danu", "Pengantin" dan "Tayuban", sedangkan yang di bawah judul Yogya ialah "Gunung Kidul" dan "Jeep 04-1001 hilang". Empat cerpen di bawah Judul Jakarta ialah "Lagu", "Vickers Jepang", "Puisi" dan "Kemayoran 1954". Di antara cerpen-cerpen tersebut, cerpen "Jeep 04-1001 hilang" menyimpan gambaran sisa-sisa revolusi kemerdekaan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Kisahnya berkisar pada niat seorang pemuda bernama Totok yang setelah aktif berjuang hendak membangun masa depan keluarganya dengan mendirikan perusahaan angkutan. Pada mulanya Totok mengajak Nug, pencerita, untuk merampas sebuah mobil jeep opsir Belanda, tetapi pada perkembangan selanjutnya Totok membangun usahanya dengan modal dari bank. Ternyata uang hasil rampasan mobil itu tidak bermanfaat dan lenyap dalam kebangkrutan usahanya. Tetapi hal itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga dari revolusi. Sebuah adegan yang menggambarkan semangat perjuangan berada di atas kepentingan keluarga tampak pada kutipan berikut.

Sehari sebelum kami pulang ke luar kota, aku dengan tak sengaja menjadi saksi akan perjuangan batin Totok. Aku baru kembali dari Malioboro mencari

sabun. suatu hal yang sangat penting untuk kami. Setiba di muka rumah kudengar suara-suara yang bertengar dari dalam kamar depan. aku kenali suara Totok dan adiknya di sweet seventeen yang agak pudar kemanisannya karena badannya kurus kisut, pipinya kempong dan matanya pudar karena kurang tidur.

"Jadi kau berkeras kepala mau kembali ke luar kota." kudengar suara gadis itu.

"Ya. "suara Totoko yang besar.

"Sampai hati membiarkan ibumu yang sudah habis tenaganya terlantar dengan lima orang adikmu"

" Di luar. satu seksi menjadi tanggungannya," suara Totok menyela.

"Satu seksi itu tidak akan apa-apa kalau kau tidak ada. Tapi di sini tenaga adalah suatu keharusan mutlak, suatu kebutuhan yang mendesak. Tak ada tenaga laki-laki seorang pun. kalau Tomo dan Tanto tak kau hitung sebagai laki-laki. Di sini tugasmu menanti, di sini engkau dapat benar-benar berjasa."

" mengapa suaramu sudah lain benar dengan ketika tentara Belanda belum masuk? Mana semangat perjuanganmu yang berkobar-kobar dari jaman clash I. Mana karelaanmu melepaskan aku ke front pada waktu yang lalu. Sudah melempem semangatmu? "

"Kau tidak berhak menuduh begitu Mas Totok. Kalau seandainya ayah masih ada pasti ikut denganmu ke luar kota, dan kau tahu akan hal itu. Tapi aku ingat itu. Ibu butuh tenaga kita. Berbakti kepada ibu sama dengan berbakti kepada Ibu Pertiwi."

"Pemandangan terlalu sempit. Terlalu egoistis. Kita harus sanggup memberikan segal-galanya kepada kemerdekaan. Ini perjuangan yang penghabisan. kalau sekali ini kita kalah, hilang sudah kemerdekaan. Kakayaan untuk diri sendiri mmasih dapat dicari kelak, itu urusan belakang. Tapi perjuangan tak dapat ditunda."

" Apakah ibu juga masih dapat dicari kelak seandainya, seandainya ibu meninggal kepayahan? dan gadis itu menangis tersedan-sedan.

(Tiga Kota, Hal. 39-40)

Perdebatan antara Totok dan adiknya peremouan tentang makna perjuangan dan pengorbanan itu bersangkutan dengan sakitnya sang ibu yang semakin payah. Saat itu Totok harus kembali bertugas ke luar kota untuk memimpin pasukannya, tetapi adiknya sangat mengharap Totok memikirkan sakitnya sang ibu. Kelak ternyata Totok menyesal setelah membaca surat adiknya yang mengabarkan kematian ibunya dalam keadaan yang menyedihkan. Itulah sebabnya Totok bertekad mendirikan sebuah perusahaan angkutan dan bahkan hendak kembali

ke bangku kuliah untuk menebus pengorbanan keluarganya semasa revolusi.

Pengorbanan adalah sepatah kata yang wujudnya bermacam-macam. ada pengorbanan harta benda, Jiwa, raga, cinta, dan sebagainya. Dalam *Burung-burung Manyar*⁶⁾ berbagai pengorbanan itu terungkap menjadi cerita yang panjang dengan konflik yang berbelit. Pada intinya novel tersebut mengisahkan pengorbanan cinta tokoh Setadewa yang tak mungkin mempersunting Atik berpihak pada Indonesia. Setadewa adalah anak tunggal dari seorang wanita Indo-Belanda dengan seorang bangsawan keraton Solo yang bertugas sebagai tentara setelah lulus dari Akademi Militer Breda di Nederland. Setelah dewasa Setadewa pun bergabung dengan tentara belanda untuk malawan perjuangan bangsa Indonesia. Alasannya ialah sang ayah telah menjadi korban keganasan Jepang, padahal Indonesia pun dianggapnya binaan Jepang.

Novel setebal 261 halaman ini terdiri dari tiga bagian, masing-masing ditandai dengan angka tahun. Bagian I berangka tahun 1934-1944, bagian II berangka tahun 1945-1950, dan Bagian III bertahun 1968-1978. Novel ini dimuali dengan semacam pengantar yang diberi judul Prawayang, isinya semacam sinopsis lakon pewayangan Jawa yang berpusat pada tokoh Baladewa yang berkonflik antara memihak Pandawa dan membela Kaurawa.

Sebagai novel, tentu saja *Burung-burung Manyar* bukanlah sumber sejarah. akan tetapi kisah-kisah dan lukisan di dalamnya dapat memperkaya wawasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan yang lepas-lepas sekedar informasi mengenai suasana dan semangat revolusi.

Ketika itu aku memondok di Semarang meneruskan sekolahku di SMT. Aku senang di Semarang, karena ternyata ada grup pelajar yang berselera anti Jepang. Tetapi suasana memanglah menjengkelkan bagiku. Kami diindoktrinasi dan dilatih bermodal Jepang. Untung guru-guru kami intelektual-intelektual yang tahu, apa yang harus mereka berikan kepada murid-muridnya. Ada seorang pelajar yang mlitan pemuja Jepang. Bisma namanya. yang jadi komandan kami dalam ulah kemiliteran. Bisma ini sungguh kami kagumi karena bakat-bakat kepemimpinannya, tetapi dari pihak lain kami benci. karena begitu hina menjilat Jepang.

Tetapi secukupnya semua pelajar anti Belanda ... kecuali aku. Barangkali ada lainnya juga yang seperti saya, tetapi pastilah ia cukup lihay untuk menyembunyikan perasaannya. Seperti aku juga. Tetapi aku sungguh merasa betapa sedihnya punya simpati yang jelas bukan simpati kawan. Serasa paira terkucil. Dan selalu harus bersandhara, ini yang paling memuakkan. (Halaman 26)

Pada bagian lain terungkap kisah sebagai berikut.

Pokoknya mami mendapat ultimatum dari kepala Kempetai yang berwenang atas nasib Papi. mami boleh pilih. Papi mati atau Mami suka menjadi gundiknya. mami memilih yang terakhir. Dan Mammi tidak mau segala kenyataan dirinya ditutup-tutupi. Setadwa anaknya, harus tahhhu segala-galanya beserta mengapanya. Disertai cium cinta seorang ibu dan permintaan doa serta maaf. Doa kontan kuledakkan dari hati. Tetapi maaf? Aku menangis seperti anak kecil. (Halaman 34)

Tahun 1956 bagiku serba simpang siur dan aku sendiri sudah tidak tahu lagi harus berpikir apa. Patroli rutin semakin membosankan, karena terus-terang saja kami orang-orang tentara tidak paham soal diplomasi dan segala kemunafikan kaum diplomat, sehingga merasa dijadikan bulan-bulanan. Jenderal Spoor jelas mengarah ke suatu penyerangan total. Kamitahu, tekun dia sedang mempersiapkan operasi tidak kecil-kecilan. Tetapi dari pihak lain van Mook sudah sama-sama minumm teh dengan kue-kue dengan si penghasut Soekarno. Ya, tentu saja orang-orang Inggris biang keladinya. Tentu saja, seperti yang kami dengar. spoor dan Pingke dengan sendirinya naik pitam. Apa lagi kami ini mau ke mana? (Halaman 79)

Siang hari itu juga ketika masuk markas besar Inggris, hatiku hampir meledak melihat suatu peleton kaum Republik yang gagah-gagah berbaris sigap dan rapi di muka markas tentara Sekutu. Jelaslah itu suatu show besar, dan memang mereka pandai main show. Pakaian mereka dril khaki baru buatan pabrik yang memang kurang berkualitas dibanding seragam kami, tetapi yang menyolok ialah bentuk seragam mereka sama sekali bukan bergaya Jepang seperti yang kami kenal. Celananya panjang dan bermodel Sekutu, pakai saku-saku besar di paha dan betis. Sepatu model separuh lars yang memberi kesan orang-orang itu lebih tinggi. (Halaman 82)

Aspek atau sisi yang menarik dari novel ini ialah pandangan atau penilaian revolusi kemerdekaan Indonesia dari seorang tokoh Indo-Belanda yang jelas-jelas berpihak kepada Belanda, tetapi hatinya terlanjur bersimpati kepada seorang gadis Indonesia yang berjiwa republik.

Pandangan semacam itu pastilah berbeda dengan pandangan pengarang Nh. Dini yang menulis cerita kenangan sekitar revolusi seperti dalam *Langit dan Bumi Sahabat Kami*.⁷⁾

Selama beberapa waktu tentara Sekutu berada di kotaku. Dalam kekacauan alih pemerintah, bahkan makanan menghilang dari pasaran. Kami meneruskan bergiliran antri di warung-warung untuk mendapatkan sekedar jagung penuh ulat, kacang hijau yang penuh serbuk dan gaplek yang busuk. Kerap kali, bahkan pulang ke rumah tanpa seragam makanan pun karena barang dagangan itu sudah habis. Lalu malam-malam kami berlari ke toko atau warung lain. Meskipun pintunya masih tertutup, ada berita yang mengatakan bahwa keesokan harinya akan mmenjual menor yang baru diturunkan dari gudang di pelabuhan. (Halaman 9)

Ketika pemerintahan kota diambil oleh tentara Belanda, Bapak mengatakan kekhawatirannya bahwa perang akan berlangsung lebih lama. Dengan tidak adanya listrik, Ayah kehilangan alat buat mendengar berita dari radio Australia. Semua kabar yang sampai kepada kami berupa desas-desus, dari mulut ke mulut yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Berhubungan dengan itu pula, orang tua kami menentukan sikap lebih nyata. Mereka mulai memberitahukan kepada pemondok-pemondok yang ada di kamar depan agar setiap bulan menyumbang sejumlah uang atau makanan sebagai sewa tempat yang mmereka pergunakan dan air yang mereka habiskan. Bapak menerangkan bahwa seseorang tidak bisa hhidup tanpa penghasilan. Hingga waktu itu orang tua kami menggerogoti semua harta yang tersimpan, sedangkan keluarga-keluarga muda yang menempati kamar-kamar kami mulai mapan, memiliki pekerjaan sampingan yang lumayan dan tertentu. Tidak ada salahnya jika Bapak menentukan jumlah sewa kamar tersebut. (Halaman 51-52)

Hingga di sini telah disajikan sejumlah gambaran singkat sekitar revolusi kemerdekaan Indonesia yang ternyata merupakan sumber inspirasi yang tak kering-keringnya ditimba para pengarang. Cerita-cerita kenangan Nh. Dini yang ditulis dan diterbitkan 20-30 tahun setelah pecahnya revolusi kemerdekaan itu merupakan bukti otentik betapa banyaknya aspek yang dapat dan pantas diungkapkan dari zaman revolusi. Dalam hal ini sastra Indonesia dengan roman, novel, cerpen, dan sajak-sajaknya yang terus berkembang itu tidak hanya mmencatat peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi menghidupkannya kembali sesuai dengan tafsiran dan pandangan hidup pengarangnya.

Catatan

- 1 Tim Peneliti terdiri atas : Dra. Siti Sundari Tjirosubono (Ketua). Drs. Rachhmad Djoko Pradono, Drs. Moch. Syratno, Drs. Harjana Hardjawijana, Dra. Sri Widati Pradopo dan Dra. a. Sarman. Naskah laporan stensilan 371 halaman berjudul Sastra Jawa Mod-

ern untuk Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 2 Dikutip dengan penyesuaian ejaan bahasa Jawa, dh menggani-kan d.
- 3 Disertasi untuk memperolehh gelar Doktor pada Universitas Indonesia tahun 1989, tebal 450 halaman, membahas novel Jawa tahun 1950-an dengan pendekatan sosiologi sastra.
- 4 Dikutip dengan penyesuaian ejaan dari *Bukan pasar Malam* terbitan Balai Pustaka Jakart, 1951 (109 Halaman).
- 5 Diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka tahun 1959, mengalami cetakan ke-3 pada tahun 1983, tebal ... halaman.
- 6 Novel ini diterbitkan oleh Penerbit Djambatan pertama kali tahun 1981 (Agustus) dan mengalami cetak ulang kedua pada tahun itu juga (Desember).
- 7 Diterbitkan pertama kali oleh Pustaka Jaya tahun 1979, kemudian diberbit kembali oleh Gramedia tahun 1988 tebal 135 halaman.

Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa : Jakarta.
- Damono, Sapardi Djoko. 1989. *Novel Jawa Tahun 1950-an Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Disertasi Univeristas Indónesia.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *telaah Kesusastraan Jawa*. Pusat Pemmbinaan dan Pengembangan Bahasa: Jakarta.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai sastra Jawa Mutakhir*. Grafitipers: Jakarta.
- Subalidinata. R.S. 1983. *Sekelumit Tinjauan Novel Jawa Modern*. Proyek Javanolog: Yogyakarta.
- Tim penelitian Fakulta sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 1977. *Sastra Jawa Modern*. Laporan Penelitian untuk Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta.

“ UBEL-UBEL “ SEBAGAI REALITAS SEJARAH DALAM NOVEL *JALAN TAK ADA UJUNG* KARYA MOCHTAR LUBIS (1952)

Prapto Yuwono

1. Pendahuluan

Harapan penitia seminar Sejarah Lokal ini terhadap sub-tema karya reflektif dan Imajinatif yang terkait pada Revolusi kemerdekaan, sungguh menggembirakan. Hharapannya adalah bahwa paling tidak ada bagian-bagian tertentu dari karya sastra seperti ini yang mengungkapkan suasana zaman, yang nantinya dapat lebihh menghidupkan data-data sejarah Baru.¹⁾ Dengan demikian karya sastra dihargai oleh sejarawan.

Apakah pemmbicaraan ini dapat atau tidak memenuhi harapan itu, yang penting adalah diberikannya kesempatan berbicara mengenai sastra dihadapan sejarawan; yang seringkali menganggap bahwa karya sastra hanya semata-mata fiktif belaka. Kalaupun ada juga yang mempergunakan karya-karya sastra ini sebagai sumber, seringkali ‘menyakitkan’ perlakuannya. Mereka menganggap bahwa karya sastra hanya sebagai benda yang tak “berjiwa”. Analisis yang dilakukan misalnya sekedar mencari informasi dan data yang terkandung di dalam karya tersebut, tanpa melihat dan menyadari bahwa data-data itu adalah merupakan aspek-aspek karya yang memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam membangun makna karya tersebut. Dan

barangkali, data maupun informasi yang diperoleh itu pun bukan merupakan fakta yang dimasukkan oleh sejarawan, karena membaca karya sastra tidak hanya memerlukan kemampuan intelektual semata, tapi yang lebih penting adalah kemampuan imajinatif dan kepekaan intuitif yang tinggi.

Judul makalah ini memang agaknya perlu terlebih dahulu dijelaskan, bahwa pada akhirnya memang saya tidak dapat menampilkan sebuah contoh pembicara berdasarkan sumber-sumber karya-karya sastra Jawa, karena beberapa hal yang saya jelaskan dibelakang nanti. Dan mengenai istilah *ubel-ubel* dalam judul di atas, justru inilah keunikan novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis ini. Keunikan ini mungkin adalah masalah saya pribadi ketika membaca novel tersebut, karena dari sejak awal hingga hampir selesai membaca novel tersebut, saya masih tidak merasa tahu makna istilah tersebut. Aneh memang. Tapi itulah yang saya alami. Tapi meskipun pada akhirnya pun saya tahu apa makna istilah itu, saya menjadi sadar bahwa ternyata yang menyebabkan itu adalah karena telah jauh jaraknya saya dengan konteks jaman novel tersebut. Ini membuktikan pula bahwa persepsi pembaca masa kini tentang peristiwa-peristiwa revolusi kemerdekaan seringkali salah bahkan tidak sampai. Dengan demikian, mungkin membaca novel-novel sejarah dibutuhkan terlebih dahulu pemahaman sejarah yang sebenarnya.

2. Persoalan Memilih Karya Sastra

Dilihat dari konteksnya, menurut pendapat saya karya-karya sastra yang bertemakan revolusi kemerdekaan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, sbb: (1) Karya-karya sastra yang bertemakan revolusi kemerdekaan, ditulis oleh pengarang-pengarang yang mengalami sendiri peristiwanya dalam waktu penulisannya pun sejaman, maka karya-karya sastra seperti ini dapat disebut bersifat *faktual* (periode 1945-1950). (2) Karya-karya sastra yang bertemakan revolusi kemerdekaan, ditulis oleh waktu penulisannya tidak sejaman lagi melainkan sesudah peristiwanya itu berlangsung, maka karya-karya sastra ini dapat dikatakan bersifat *nuansa* (periode sesudah tahun 1950-an). (3) Karya-karya sastra yang bertemakan revolusi kemerdekaan.

ditulis oleh pengarang-pengarang yang tidak mengalami senri peristiwanya itu sendiri, maka karya-karya sastra ini dapat dikatakan bersifat *imajinatif*.

Dalam kategori yang faktual banyak karya-karya sastra Indonesia Modern yang dapat kita teliti, misalnya karya-karya pengarang yang digolongkan ke dalam angkatan '45,2) seperti Chairil Anwar, Rivai Apin, Idrus dan Pramudya Ananta Tour. Mereka semua adalah pengarang-pengarang yang banyak berkarya dalam masa-masa berlangsungnya revolusi kemerdekaan semenjak tahun 1943 hingga tahun 1950. Tapi berkenaan dengan sastra Jawa Modern, sayangnya tidak ada pengarang-pengarang (khususnya novel) yang dapat digolongkan dengan ukuran angkatan '45 tersebut. Di samping dalam sastra Jawa modern belum ada tradisi penyebutan angkatan pengarang seperti dalam sastra Indonesia Modern, munculnya penyebutan sastra Jawa Modern pun justru baru dimulai pada dekade '50-an.³⁾ Persoalan modern atau tidaknya dalam sastra Jawa sebenarnya tidak menyangkut ada tidaknya dalam sastra Jawa sebenarnya yang *discover* oleh para pengarangnya. Tapi memang kenyataannya sebelum tahun 50-an belum banyak karya-karya sastra Jawa modern yang membicarakan tentang revolusi kemerdekaan. Barangkali persoalan-persoalan nasionalisme semacam itu baru di tingkat pusat atau dengan media bahasa Indonesia saja, bahasa-bahasa daerah seperti Jawa, Sunda Bali dll. itu, barangkali masih berkutat dengan masalah-masalah adat istiadatnya. Dengan demikian banyak pula ditemukan tema-tema revolusi kemerdekaan dalam karya sastra Jawa modern setelah tahun 50-an, itu artinya bersifat nuansa, bukan faktual, sehingga tidak akan dipilih sebagai obyek kajian makalahh ini. Dengan alasan inilahh lalu kemudian saya melirik karya-karya Sastra Indonesia Modern.

Bagi sejarawan jika diharuskan memilih karya-karya sastra dalam kategori yang mana yang akan dipilih untuk dijadikan obyek penelitiannya, maka saya kira pasti akan memilih kategori yang pertama. Sudah barang tentu, mengingat karya-karya itu aendiri sudah dengan sendirinya adalah faktual. Diharapkan bahwa karya-karya itu sudahh dengan sednirinya pula mengungkap suasana jamannya.

Dalam kenyataan, meskipun angkatan '45 yang dipelopori Chairil Anwar telah banyak berkarya pada masa-masa revolusi kemerdekaan berlangsung, akan tetapi kesan yang tampak bukan menanggapi secara langsung, akan tetapi kesan yang tampak bukan menanggapi secara langsung persoalan-persoalan revolusi itu, melainkan lebih pada persoalan-persoalan pribadinya, individualitasnya, yang ingin bebas lokal, melainkan universal. Chairil Anwar dengan puisi-puisinya misalnya lebih menyuarakan gejolak batin pribadinya untuk bebas dari segala kungkungan, bahkan ingin berontak terhadap maut sekalipun ia nyatakan dalam puisinya. Sementara Idrus dengan cerpen-cerpennya meskipun gaya bahasanya langsung, tegas dan meledak-ledak tapi belum tampak dewasa. Tema-tema revolusi yang digarap Idrus sering nampak sumir, tidak tampak kontemplasinya. Seperti dalam novelnya yang berjudul Surabaya ⁴⁾, ia justru menolak revolusi.

Dengan menguraikan kenyataan itu sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan bahwa meskipun kita telah dapat memilih sebuah atau lebih karya sastra yang bertemakan revolusi kemerdekaan untuk dijadikan sumber pendukung penulisan sejarah, dan pemilihan itu memang telah didasarkan pada ukuran kategori pertama: bahwa karya sastra tersebut memang merupakan fakta, sebaiknya juga sini adalah apakah pilihan itu juga telah mempertimbangkan ukuran yang disebut sastra yang baik? Pertanyaan ini mungkin agak berlebihan terutama bagi sejarawan. apakah sejauh itu yang harus dilakukan?

Jalan yang paling aman dan praktis untuk memenuhi tuntutan itu adalah dengan membaca terlebih dahulu hasil-hasil tulisan perbincangan para kritikus sastra. sejauh mana karya dan pengarang yang dipilih itu telah dibicarakan dan dinilai oleh para kritikus. Seperti Yassin ⁵⁾ dalam menilai novel keluarga Gerilya karya Pramudya Ananta Tour, berkata:

Mengenai romman Keluarga Gerilya (1950), sejak mula terbitnya penghargaan orang terhadapnya terbagi dua. Yang menerima dan menolak sebagai hasil sastra, malah ada yang menyebutnya Kitsch atau sampah. Saya sendiri berada dipihak orang yang menyenangkannya, meskipun dengan beberapa catatan. Tapi bahwa ini hasil yang bernilai sastra, saya tak pernah meragukannya.

Ditambahkannya:

Buku ini adalah satu analisa jiwa revolusi yang murni dan merupakan satu dokumen manusia Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Apa

yang tidak ditemui Indrus sebagai pembuka jalan ke prosa Indonesia Baru, kita temui dalam roman revolusi ini, yakni arti dan isi revolusi, tanpa patos yang palsu, dalam kesederhanaannya.

Satu lagi yang membuat cerita ini meyakinkan bagi saya ialah ketelitian observasi dan pengetahuan soal sampai sekecil-kecilnya, mengenai kesejarahan, semangat jaman, keadaan front, jalannya pertempuran, cara melakukan hukuman mati dan sebagainya.

“ Prajurit Kantung” dan “ gerakan baris jauh” adalah istilah-istilah yang begitu saja ditelan masa dan hilang dalam kelupaan, tapi dalam cerita ini seolah-olah dipahatkan dalam ingatan kita, hingga kita tidak akan lupa lagi.

Dengan kutipan-kutipan di atas bukan maksud saya ingin menonjolkan sosok Yassin yang memang dianggap sebagai kritikus yang cukup berwibawa, melainkan ingin menunjukkan bahwa apa yang disebut karya sastra yang baik memang berbeda dengan karya sastra yang biasa. Syarat penting yang dapat diterapkan terhadap karya sastra yang baik adalah bahwa karya sastra tersebut dapat meyakinkan pembacanya, karena di dalamnya berisi *kejujuran, kedalaman, kepekaan, keintelektualan dan keterpaduan semua unsurnya*. Kalau sejarawan telah memahami bahwa realitas sejarah di dalam karya sastra pada hakekatnya berupa *kualitas kehidupan batin, moralitas, heroisme, patriotisme dan semangat jaman*,⁶⁾ hal itu pun harus lebih disadari bahwa untuk mencapai pemahaman itu tidak mudah. Kesemuanya itu akan terwujud hanya di dalam karya sastra yang baik dalam arti tadi. Bisa saja karya-karya yang tidak bernilai sastra mengemukakan juga masalah-masalah di atas, akan tetapi mungkin sampai kepada pembacanya akan terbata-bata, kurang jelas dan tidak padu. Sehingga kesan buruk kita terhadap karya tersebut akan segera muncul. Kita *tidak puas, kecewa dan merasa dobohong* oleh pengarangnya. Kalau sudah begitu, bagaimana kita dapat menangkap “ suasana jaman” dari karya sastra yang kita hadapi itu, jika cara penyampaian kepada kita tidak baik. Dengan demikian kandungan isi atau makna (suasana jaman) akan sangat berjaln erat dengan cara penyampaian atau struktur karya tersebut. Dengan kata lain realitas sejarah di dalam karya sastra akan sedemikian rupa dilukiskan oleh pengarangnya dengan seluruh ketrampilan; *kemampuan intelektual, kemampuan imajinatif dan kepekaan intuitif*.¹⁾ Jadi antara fakta dan imajinasi (rekaan) di dalam karya sastra secara bersama-sama

membangun makna karya tersebut. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menganalisa karya sastra?

3. Novel *Jalan Tak Ada Ujung* Sebagai Pilihan

Pilihan terhadap novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis didasarkan pada beberapa alasan :

- (1) Saya sebagai pembaca merasa yakin benar bahwa novel ini syarat mengandung realitas sejarah, fakta sejarah ataupun informasi sejarah. Mungkin karena pengarangnya sendiri adalah seseorang yang telah banyak menyaksikan dan mengalami perjuangan fisik, sehingga keseluruhan detailnya dapat memberikan keyakinan tersebut.
- (2) Dan meskipun diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1952, tapi tidak masalah, Mengingat kesulitan-Kesulitan yang ditemui para pengarang dalam proses suatu penerbitan (pengecekannya) seringkali mengalami waktu yang lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Hal ini mengandaikan bahwa karya sastra ini pun mungkin telah diselesaikan pada beberapa tahun sebelum diterbitkan, sehingga karya ini pun sudah dengan sendirinya sebagai fakta sejarah.
- (3) Dilihat dari segi kesastraannya karya ini termasuk karya sastra yang baik, karena novel ini pernah mendapat hadiah sastra BMKN.

Novel *Jalan Tak Ada Ujung* melukiskan kehidupan jiwa seorang guru yang senantiasa dalam ketakutan pada masa revolusi dan untuk menyembunyikan rasa takutnya itu ia justru pada akhirnya melakukan keberanian dan bersifat kepahlawanan.

Apa yang mau dilukiskan dalam novel ini memang konflik batin yang terjadi dalam diri tokoh-tokohnya, terutama Guru Isa dan Hazil dalam latar belakang revolusi kemerdekaan sekitar tahun 1946 -- 1947 di Jakarta. Kita tahu bahwa setelah diproklamasikannya kemerdekaan RI tahun 1945 di Jakarta, keadaan kehidupan sosial masyarakat bukannya jadi tenang dan tentram melainkan justru sebaliknya. Situasi ternyata justru mulai memanas, dengan di mana-mana terjadi insiden antara Belanda -- yang memang pun mereka berada. Di Jakarta, dalam

cerita ini. bulan-bulan pertama tahun 1946 itulah dimulainya teror Belanda dengan tentara NICA-nya, yang juga dibantu tentara-tentara Gurkha, mulai mencengkeram Jakarta.

4. Ringkasan Cerita

Cerita dimulai pada bulan *September tahun 1946 dan berakhir bulan April 1947* di Jakarta.

Pada pagi itu terlihat beberapa orang berkumpul di sebuah warung kopi, mereka mengobrol tentang berbagai hal terutama adalah masalah-masalah perjuangan. Tak jauh dari tempat itu terlihat beberapa anak bermain layang-layang. Daerah itu adalah wilayah kelurahan *Kebon Sirih di Jakarta Pusat* (Tepatnya di belakang Sarinah). Empat orang dari mereka adalah pegawai (opas) Kota Praja di Kebon Sirih. Sedang asyik mereka mengobrol tiba-tiba terdengar suara orang berteriak nyaring dan saut-menyaut, yang sebenarnya sudah mulai biasa mereka dengar, “-siaaap! Siaaaaaap”. Dan benar, dari arah kebon sirih dua buah truk penuh berisi serdadu memakai topi waja masuk *Gang Jaksa*. Pada saat yang bersamaan mereka yang sedang mengobrol itu panik, dan beberapa orang opas itu dengan ketakutan lari menuju *Kantor Kota Praja*. Kepanikan itu tampak oleh para serdadu, dengan tidak menunggu-nunggu lagi keluarlah rentetan tembakan mereka. Karena tembakan itu cukup membabi buta jatuhlah korban beberapa orang opas itu, termasuk seorang penjual barang loak dan seorang anak kecil. Suasana tenang kembali setelah para serdadu itu pergi.

Peristiwa seperti ini ternyata sering berlangsung di hampir semua tempat di Jakarta. seperti yang juga pernah diceritakan oleh tukang loak yang kena tembak itu, katanya ia di *Tanah Tinggi* pernah dipaksa oleh beberapa pemuda agar mau membawakan senjata pistol untuk diselundupkan melewati pos penjagaan Belanda. Untung saja tidak ketahuan, kalau ketahuan sudah pasti akan ditembak langsung di tempat.

Situasi mencekam itulah yang terlukiskan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Di jalan, di pasar, di bioskop, di sekolah atau di mana pun kalau mendengar “siaaaaaap! siaapppppp”! semua orang harus cepat lari bersembunyi. Tampaknya hampir di semua tempat di

Jakarta ini sudah tidak aman lagi. Tidak seperti dulu di jaman Belanda. Jakarta adalah kota yang aman dan tentram, di mana semua orang dapat hidup bahagia. Itu kata mereka yang mulai membandingkan dengan kehidupan sebelum masa revolusi kemerdekaan ini berlangsung. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang memang sukses di masa kolonial, karena mereka adalah para pegawai Belanda. Dan mereka-mereka ini banyak menyindir, para pemuda yang mulai ikut berjuang, katanya: *"pemuda-pemuda itu sudah gila, mau melawan Belanda yang persenjataannya sangat kuat"*. Dan lucunya kadang-kadang serdadu-serdadu Belanda yang menembaki para pejuang muda itu pun sambil berteriak mencemooh :

"Mampus lu. Anjing Sukarno ! Mau Merdeka? ini Merdeka!!!" dan sten-gun dan senapan ditembakkan tidak tentu arah.

Melihat dan merasakan teror yang demikian itu Guru Isa merasa prihatin sekali. Timbul berbagai perasaan tidak berdaya dan patah semangat hidupnya. Ia merasakan takut, takut yang tadinya oleh teror itu lalu meningkat bersamaan dengan berjalannya waktu, sehingga ia mulai kehilangan identitas. Tapi ia harus hidup ikut arus yang ada. Ia pun terlibat dalam perjuangan, di sini pun takut. Takut ditangkap, dibunuh, ditembak. Apa yang ditakutkan itu pada akhirnya memimpinya. Ia ditangkap Belanda, dijebloskan ke penjara. Ia ternyata difitnah temannya. Di penjara ia mengalami siksaan: pukulan, tendangan, tamparan setiap hari bahkan setiap saat. Tapi anehnya ia tidak mau mengaku kepada Belanda, Siapa dirinya. Ia mulai meresakan "keanehan" bahwa ia merasa bahagia dengan siksaan-siksaan itu. Segala siksaan pada akhirnya malah sengaja dirasakannya, diterimanya dengan tidak mengeluh. Dan dengan demikian, hilanglah semua rasa takutnya itu.

Berlainan dengan tokoh *Hazil* sebagai tokoh protagonisnya. Hazil justru seorang pemuda pejuang tulen. Ia selalu membawa pistol ke mana-mana sementara teman-temannya hanya membawa Bambu Runcing. Hal ini membuat Hazil percaya diri dan bangga. Hazil digambarkan pemuda berani dan sangat bersemangat untuk berjuang. Banyak kegiatan perjuangan yang sudah ia dan teman-temannya lakukan misalnya membeli senjata di Senen lalu diselundupkan ke

Kerawang, baik lewat jalan kereta maupun mobil. Setiap saat dan dimana pun tempat ia selalu digambarkan sebagai pejuang yang tangguh. Akan tetapi kebalikannya dengan tokoh Guru Isa, ketika Hazil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan juga mengalami siksaan-siksaan. Ia tidak tahan. Ia tidak merasa kuat mengalami penderitaan itu dan terpaksa mengaku kepada Belanda siapa teman-temannya itu. Termasuk yang diberikan informasinya adalah Guru Isa sebagai salah satu temannya. Keberanian Hazil musnah karena ia menjadi takut, takut dipukuli, takut dibunuh, dan takut pada kematian. Terlihat Hazil di sudut kamar tahanannya sendiri mengigil ketakutan setiap hari.

5. Analisis

Jalan Tak Ada Ujung bagi pengarang novel ini adalah sebuah konsep *hidup* yang digambarkan oleh pengarangnya melalui perjalanan hidup tokohnya: Guru Isa dan Hazil. Marilah kita lihat bagaimana novel ini membuka ceritanya:

Sebuah truk itu berisi serdadu-serdadu bermuka keras menderu di atas jalan-jalan yang kosong. Patroli yang membelok ke kanan, terus, ke kiri, ke kanan, terus dan terus, terus di jalan-jalan yang sunyi, kosong dan sepi. Jalan dalam malam hujan gerimis gelap, jalan berliku tidak habis-habisnya. Jalan tak ada ujung. (hal 7)

Dalam kutipan itu pengarang memberikan suatu ilustrasi awal, meskipun imajinatif, mengenai “sesuatu” yang akan disampaikan kepada pembacanya, namun sekaligus merupakan suatu padahan atau bayangan ke depan mengenai apa-apa yang akan terjadi dalam situasi dan kondisi yang demikian itu. Dan “Sesuatu” itu akan kita ketahui bersama jika kita sampai pada akhir cerita ini oleh karena itu usaha pengarang adalah bagaimana dengan ketrampilannya setahap demi setahap membangun peristiwa, situasi sehingga mencapai klimaknya.

Kalimat “*serdadu-serdadu bermuka keras*” rupanya akan terus selalu diulang dalam cerita ini, dan justru karena merekalahh sebenarnya peristiwa dan suasana menjadi memcekam. Termasuk tokoh Guru Isa dan Hazil.

Teriakan-teriakan “ *Siaaap! Siaaapppppp !!!!*” yang seringkali terdengar rupanya memang menandai akan terjadinya sebuah peristiwa. Dan beberapa menit kemudian pasti akan terjadi tembak-menembak. Kalaupun tidak ada yang kena tembak pasti ada yang ditangkapnya. Ini sangat menakutkan semua orang. Dan siapa sebenarnya yang ditandai oleh teriakan-teriakan itu.

“Truk ubel-ubel di ujung jalan. Mereka mau ke mari dari Tanah Abang Bukit. Hati-hati.” (hal 12).

Ubel-ubel ternyata adalah sebuah *ikon* (tanda) yang mewakili sesuatu itu ialah serdadu-serdadu yang bermuka keras itu. Serdadu-serdadu ini dalam cerita novel ini memang tidak digambarkan bagaimana mereka berpakaian. Tapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bahwa serdadu-serdadu itu adalah “sewaan” Belanda yang berasal dari India atau bangsa Sikh, maka bayangan kita adalah mereka memakai tutup kepala yang unik, yang berupa kain yang dugulung ke atas biasanya disebut *Destar*. Kata ubel-unel. Dalam cerita ini sangat sering kata ini diucapkan dan disebut. Oleh karena itu Ubel-ubel menandai “sesuatu”.

Ubel-ubel bagi Guru Isa adalah sumber sebab ketakutannya. Setiap kali ia mendengar orang berteriak “*siaaapp! siaaaaaap! awas ubel-ubel!*”, maka mulai kembanglah rasa takutnya. Lihatlah awal mula rasa ketakutannya ini :

Ketika tembakan pertama di Gang Jaksa itu memecah kesuntian pagi Guru Isa sedang berjalan kaki menuju sekolahnya di Tanah Abang. Selintas masuk ke dalam pikirannya rasa was-was tentang keselamatan istri dan anaknya. Ah, Fatimah akan hati-hati, pikirnya kemudian. Telah aku suruh dia jangan keluar-keluar rumah. (hal 12)

Kemudian cerita berjalan terus. Dan ubel-ubel terus pula melakukan aksinya menggeledah dan menangkapi orang. Pada suatu hari ketika Guru Isa sedang bersembunyi di suatu rumah, rumah sebelahnya justru digeledah. Dengan kasar bahkan bengis para ubel-ubel itu melakukan aksinya. Tiba giliran seorang perempuan, istri tetangga sebelah rumah itu. Guru Isa melihat perempuan itu digeledah dengan tidak senonoh, terjadi pelecehan seks. Bagaimana perasaan guru Isa:

Isa teringat pada istrinya, dan sebentar dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang akan dilakukan, jika rumah mereka digeledah, dan serdadu kasar menggeledah istrinya? akan melawankah dia? Tidak dipikirkannya lama-lama karena dalam hati kecilnya dia tahu, dia tidak akan berani juga melawan. Perasaan takut matinya juga yang akan menang. (hal 14)

Dan ketika ada yang tertembak oleh para serdadu itu, Guru isa pun berpikir:

Kalau aku kena, bagaimana dengan istri dan anakku, pikir Guru Isa. Dalam hatinya rasa tidak enak ketika membayangkan dirinya terbaring di tanah berlumur darah, mengerang-ngerang kesakitan. Pemandangan demikian melukai hatinya yang lembut. Terasa sebagai perkosaan pada kehormatan manusia baginya.(hal 15)

Ketika ia sampai di rumah atau kalau di rumah ia tak ada pekerjaan, Guru Isa tidak sdar sering melamun dan berpikir. Memang benar bahwa inilah masa revolusi. Sebagai kebanyakan orang di hari-hari pertama revolusi Guru Isa belum pernah menganalisa benar-benar kedudukannya, Kewajibannya dan pekerjaannya dalam revolusi. Selama ini ia membiarkan dirinya dibawa arus. Arus semangat rakyat banyak. Arus pikiran-pikiran dan kata-kata yang menderas keluar dari macam-macam orang. Dia ikut jadi anggota jaga kampung. Malah karena kedudukannya sebagai guru, maka dia menjadi wakil ketua panitia keamanan Rakyat, dan menjadi pensehat *Badan Keamanan Rakyat*, lebih dikenal dengan BKR.

Sudah hampir setiap saat dia bertemu muka dengan segi-segi keras dan tajam dari revolusi. Penumpahan darah. Darah manusia. Guru Isa akan merasa terluka hatinya. Jika dikatakan padanya, bahwa perasaan yang dirasakannya sekarang adalah rasa takut. Tetapi pada dirinya sendiri dia tidak hendak mengakui, bahwa dia takut. Demikianlah perasaan takut itu menjalar terus di dalam dirinya. Sampailah ia berjumpai dengan Hazil, seorang pemuda pejuang, yang selalu ingin berkhotbah mengenai perjuangan kepadanya. Maka didengarlah Hazil:

“ Dalam perjuangan kemerdekaan ini tidak ada tempat pikiran kacau dan ragu-ragu” kata Hazil. “Saya tidak pernah ragu, dari mulai. Saya sudah tahu — semenjak semula — bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah tidak ada ujung. Dia tidak akan habis-habisnya kita tempuh. Mulai dari sini, terus, terus, terus, tidak ada ujungnya. Perjuangan ini meskipun kita sudah merdeka, belum juga sampai ke ujungnya. Di mana ada ujung jalan perjuangan dan perburuan

manusia mencari bahagian? Dalam hidup manusia selalu setiap waktu ada musuh dan rintangan yang harus dilawan dan dikalahkan. Habis satu muncul yang lain, demikian seterusnya. Sekali kita memilih jalan perjuangan, maka itu jalan tidak ada ujungnya. dan kita, engkau, aku, semuanya telah memilih jalan perjuangan.

Guru Isa tidak dapat menjawab cepat-cepat. Mendengar kata-kata Hazil, dalam pikirannya terbayang jalan tak ada ujung, sebuah jalan yang membentang sari depan matanya, jauh tak habis-habis, tidak berujung, muali dalam gelap, menghilang dan menerus dalam gelap-gelap. Jalan itu hanya segores kilat ada ujung yang menggembirakan Hazil, bagi Guru Isa adalah khayal yang mengganggu orang tidur yang menakutkan dan mengerikan. (hal 39)

Karakter antara Guru Isa dan Hazil memang berbeda: Guru Isa adalah seorang yang penakut/pengecut sedang Hazil adalah seorang yang pemberani. Dalam menghadapi teror Ubel-ubel "ketakutan" Guru Isa sangat mendalam sekali sehingga ia menjadi orang yang hampir mengalami putus asa. Akan tetapi pada akhir cerita justru yang terjadi sebaliknya, Guru Isa menjadi seorang yang "pemberani"; ia kalahkan semua rasa takutnya, bahkan ia menjadi pejuang revolusi yang tangguh. Semua hal itu dapat terjadi kerana justru rasa putus asanya sudah sampai puncaknya, yakni ketika ia ditawan Belanda; setiap hari diinterogasi dan dipukuli terus menerus. Barangkali karena sudah merasakan segala hal "siksaan", bukan sekedar fisik melainkan batin juga, rasa takutnya akhirnya memudar berganti dengan pasrah, tapi tanpa disadarinya menimbulkan keberanian dalam dirinya. Demikianlah, Guru Isa dalam cerita ini digambarkan mengalami perubahan karakter ke arah yang positif.

Sedangkan Hazil, yang pada mulanya digambarkan sebagai seorang yang pemberani, apalagi karena memang ia adalah seorang pemuda pejuang yang terkenal tangguh, pada akhir ia adalah seorang sebaliknya menjadi seorang "pengecut". Hazil pun pada akhir cerita ditawan Belanda, setiap hari diinterogasi dan juga dipukuli terus-menerus. Bahkan karena tidak kuatnya ia membuka mulut, bahwa Guru Isa pun sebenarnya adalah teman seperjuangannya juga, dan yang mengakibatkan Guru Isa pun ditawan. Hazil tidak seperti Guru Isa, ia lama kelamaan justru mengalami stress yang berat, bahkan "ketakutan" bertambah menghantui dirinya sehingga sampai mengganggu jiwanya.

Simpulan

Ubel-ubel adalah *ikon*, yang menandai “sesuatu”. Realitasnya adalah *tutup kepala para serdadu (sewaan) Belanda yang berasal dari india atau bangsa Sikh*. Ubel-ubel di dalam novel *Jalan Tak Ada Ujung* ini menjadi suatu “pemicu” bagi pengarangnya untuk berkisah, tentang peristiwa-peristiwa, konsep-konsep atau pandangan-pandangan hidupnya, berkaitan dengan realitas sejarah yang sedang dihadapinya.

Dengan demikian “ketakutan” Guru Isa atau Hazil adalah juga merupakan realitas (realitas batin). Termasuk di sini adalah perubahan-perubahan karakter kedua tokoh itu. Tampaknya pengarang dengan novel *Jalan Tak Ada Ujung* ini ingin mengatakan bahwa dalam menghadapi suatu peristiwa yang “menakutkan” seperti peristiwa-peristiwa revolusi kemerdekaan itu, manusia tak dapat diterka tindakan-tindakannya. Tidak semua orang akan menjadi berani menghadapi kondisi itu, di samping itu ada juga yang takut. tapi mungkin juga ada yang mengalami perubahan, dari itu adalah realitas. Novel *Jalan Tak Ada Ujung* ini ternyata menyajikan realitas; bukan sekedar realitas sejarah (peristiwa revolusi kemerdekaan), akan tetapi realitas batinnya sekaligus. Dengan demikian Novel ini dapat dianggap berhasil mengungkap suasana jaman atau jiwa jamannya dengan baik.

Catatan

- 1 Edaran, Pengarahan Panitia Seminar Sejarah Lokal 1994.
- 2 Istilah angkatan '45 dalam kesusastraan Modern diciptakan oleh HB. Yassin, yang melihat bahwa angkatan '45 punya ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan angkatan sebelumnya: sangat radikal, bebas dan revolusioner, seakan-akan mengikuti arus perkembangan jaman yang pada waktu itu sedang bergejolak. Pelopor angkatan ini adalah Chairil Anwar yang dengan puisinya (yang terkenal “Aku”) merupakan ekspresi individual yang ingin bebas dan lepas dari keterbelakangan dari segalanya.
- 3 Suripan sadi Hutomo dalam bukunya *Telaah Kesusastra Jawa Modern* (1975:13) mengatakan bahwa penyebutan itu didasarkan pada munculnya geguritan (puisi Jawa) yang betul-betul bebas.

lepas dari ikatan-ikatan konvensi puisi tradisional, termasuk di sini bahwa puisi digunakan oleh para penyair sebagai ungkapan masalah keseharian dan bersifat individual-rasional.

- 4 HB. Yassin membeicarakan novel ini dan menilainya sebagai bersifat setiris; selalu mengejek dan menertawakan kenyataan atau keadaan. Hal ini menurut Yassin menunjukkan sikap yang belum dewasa, belum banyak pertimbangan dan kebijakan, dengan kata lain masih bersifat kekanak-kanakan. Oleh karena itu novel ini banyak diejek dan diolok, apalagi didalamnya Idrus menggambarkan tokoh-tokohnya anti revolusi, dengan tanpa alasan-alasan yang rasional. (HB. Yassin dalam *kesusastraan Indonesia Dalam Kritik dan Esei II*, Gramedia: Jakarta 1985).
- 5 *Ibid.*, hal. 69.
- 6 Lucaks, dalam Kuntowijoyo, 1987: 133.
- 7 Sastrowardoyo, subagyo, dalam *Bakat alam dan Intelektualisme*. Pustaka Jaya, Jakarta, 1971: 27.

Daftar Pustaka

- Kuntowijoyo, 1987. *Budaya Dan Masyarakat*. Yogya; PT Tiara Wacana.
- Suripan Sadi Hutomo, 1975. *Telaah Kesusasteraan Jawa Modern*. Jakarta. Pusat pembinaan pengembangan Bahasa.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Pengantar Teori Sastra. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
- 1984. *Sastra Indonesia Modern II*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
- Wardoyo, HB. 1985. *Kesusasteraan Indonesia Dalam Kritik Dan Esei I dan II* Jakarta. Gramedia.

KARYA-KARYA SENI RUPA MEWARNAI SEJARAH

Soedarso Sp.

Ketika kita mencoba melacak usia wayang kulit purwa kita, maka biasanya sampailah kita pada sebuah bait yang sangat menarik dari *Kakawin Arjunawiwaha* buah karya Mpu Kanwa yang hidup pada jaman pemerintahan raja Airlangga sebagai berikut. (Nyayian ke V. Bait 9):

Hananonton ringgit manangis asikel muda hidepan
huwus wruh towin yan walulang inukir molah angucap

Yang kurang lebih berarti mengherankanlah orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang kulit itu, walaupun mereka sudah tahu bahwa yang dilihatnya itu hanyalah wayang yang dibuat dari kulit yang dipahat dan dimainkan seolah-olah dapat dan berbicara, namun bisa juga mereka itu merasa sedih dan menangis. Walaupun pada dasarnya sumber-sumber sastra itu akurasinya tergolong tidak nomor satu, namun kiranya yang terkenal itu pasti wayang yang terbuat dari kulit yang dipahat tersebut sudah ada, karena apa yang ditonjolkan oleh sang penulis yang menarik (*Einfuhling*) yang ada di dalamnya. Maka apa yang ditulisnya tentunya adalah sesuatu yang ada sekitarnya, bukan khayalan yang dibuatnya.

Berlawanan dengan uraian di atas adalah apa yang akan dipaparkan berikut ini. Apabila kita menyaksikan lukisan "Le Sacre" karya besar pelukis Perancis Jacques-Louis David (1748-1825) yang

tergantung di dinding museum Louvre di Paris. Kita akan menyaksikan sebuah dokumen sejarah yang sangat menarik, walaupun barangkali ada sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Lukisan raksasa yang berukuran 5,18 x 9,29 meter itu rupanya merupakan lukisan potret kelompok yang paling besar. Temanya adalah penobatan Napoleon sebagai Emperor pada tahun 1804, namun ketika ia meminta untuk berpose untuk itu seperti puluhan pejabat lainnya, ia menolak dengan alasan bahwa nanti tidak akan ada yang hirau bagaimana aktualitas wajah dirinya. Yang penting, menurutnya, orang-orang besar dalam sejarah itu harus dilukiskan sedemikian rupa sehingga penontonnya akan dapat menangkap kebesarannya. Katanya *"Do you think the great men of antiquity posed for ththeir portraits? who cares whether the busts of Alexander the great look like him? it is enough that we have an image of him that confrorms to his genius. Taht is the way great men should be painted."* walaupun akhirnya toh seniman besar seperti David tidak kehabisan akal untuk memecahkan masalahnya, namun inti dari cerita itu perlu diperhatikan dan dipertimbangan agar kita tidak akan cerita itu perlu diperhatikan dan dipertimbangkan agar kita tidak akan salah dalam menarik konklusi. Akhirnya, untuk memenuhi petunjuk sang raja, David melukiskan peristiwa besar itu tidak pada saat Napoleon sedang dinobatkan oleh Sri Paus— yang berarti harus ditunjukkan bahwa Napoleon ada di bawah pejabat keagamaan itu—tetapi ketika beberapa saat kemudian ia memahkotai permaisurinya. Dengan demikian maka ia kelihatan anggun dan berwibawa.

Dalam hal kita menggunakan karya-karya lukis atau patung untuk membantu merekonstruksi sejarah, paling tidak dua contoh tersebut perlu menjadi perhatian, karena harus didasari bahwa karya-karya seni itu sebagian besar memang tidak dimaksudkan sebagai sarana merekam jalannya sejarah. Memang, dengan segala keterbatasannya seni lukis dan seni patung pernah bertugas sebagai perekam peristiwa-peristiwa penting, yaitu ketika fotografi belum lahir di dunia. Periksa misalnya, patung-patung potret Sokrates, Plato atau Augustus, lukisan-lukisan potret Louis XIV, Ratu Juliana, atau potret Sultan Hamengku Buwono VI yang dilukis oleh Raden Saleh itu ataupun potret-potret peristiwa penting seperti *'Le Sacre'* tersebut di atas. *'Pembunuhan Marat'* yang juga dilukis oleh pelukis yang sama, Jacques-Louis David. *'Penyerahan*

di Breda' oleh Velazques. atau 'Penangkapan Pangeran Dipanegara' buah karya Raden salehh. Namun, sesuai dengan fitrahnya alat tersebut memang memiliki banyak kelemahan yang terutama berpusat pada subjektivitas "alatnya", yaitu si seniman yang punya pendapat dan kepentingan di dalamnya. Keterbatasan teknis juga perlu mendapat perhatian, walaupun artinya tidak begitu besar, khususnya dalam kasus ini, karena dalam masa revolusi fisik di sekitar tahun 1946-'49 teknik melukis *visioplastik* atau *trompel'oeil*, yaitu melukis alam sekitar sebagaimana tampaknya oleh mata sudah bukan masalah lagi. Berbeda misalnya dengan lukisan-lukisan yang menyuguhkan kontak-kontak pertama antara Belanda, Inggris atau Spanyol dengan penguasa setempat. Lukisan-lukisan tersebut secara *visioplastik* tidak sempurna sehingga masih perlu interpretasi di sana-sini untuk dapat menangkap maksudnya dengan akurat.

Dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia memiliki lumayan banyak pelukis, walaupun keberadaannya tidak menyebar di seluruh tanah air dan dalam hal dokumentasi kita ternyata agak miskin sehingga tidak mudah untuk mengumpulkan datanya. Buku "Lukisan-lukisan dan Patung-patung koleksi Presiden Sukarno dari Republik Indonesia" yang lama jilid itu hampir merupakan satu-satunya kumpulan bahan yang bisa dilihat. Yang lain dapat dicuplik dari sana-sini yang jumlahnya tidak memadai untuk merekonstruksi revolusi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka kita terpaksa harus menyerah pada kenyataan ini dan bagaimana juga marilah kita lihat apakah yang dapat diperoleh dalam keadaan kesempitan data seperti itu. Kalau boleh sedikit cengeng, kiranya dapat pula dikemukakan bahwa untuk tugas berat itu diperlukan waktu yang cukup panjang.

1. Bombardement

Salah satu lukisan S. Sudjojono adalah 'Setelah Pemboman' (1949) yang kini tersimpan di balai Seni Rupa Jakarta; menggambarkan puing-puing bangunan yang sudah kehilangan seluruh atapnya dan tinggal lagi beberapa dinding tegaknya. Dengan bongkahan-bongkahan yang berserakan di tanah pemandangan itu amat mengerikan dan akan selalu mengingatkan orang akan keganasan perang. Tentu saja keseraman

tersebut lebih terasa lagi karena pintarnya si pelukis memilih sudut yang kena. Maka meskipun sama-sama menggambarkan objek yang satu bisa saja terjadi sebuah lukisan terasa lebih seram dari yang lain. Sayang, kita tidak tahu kota yang menjadi objek tersebut sehingga sebagai dokumen sejarah nilainya tidak begitu tinggi, walaupun sebagai rekaman suasana nilainya tinggi sekali.

Dalam bentuk yang mirip sekali Sudjojono melukis pula karya yang lain yang dijudulinya 'Seko atau 'Perintis Gerilya' (tahun pembuatan tidak diketahui). Gedung latar belakangnya hampir sama—mungkin memang menunjuk puing yang sama—tetapi di latar depan ada tergambar seorang pemuda menentang senapan berkalung sarung dengan celana yang di bagian bawahnya tersingsing ke atas. Dialah yang mungkin bernama 'Seko' yang adalah seorang perintis gerilya. Di kejauhan, di pinggir tembok sebelah kiri lukisan terdapat dua gerilyawan lagi yang sedang berindung sambil bercakap sehingga menambah kesan akan kepeloporan Seko. Sayang sang pahlawan ini postur maupun tampangnya kurang mendukung fungsinya sebagai tokoh yang sedang ditampilkan. Namun bisa saja hal ini disengaja oleh si pelukis untuk justru memberikan gambaran bahwa seorang pemberani atau pahlawan tidak harus didukung oleh perawakan yang tegap dan gagah, sebagaimana bunyi kata-kata Jawa, "*Janma tan kena kinira*".

Walaupun dilukisnya baru dalam tahun 1985, Sudjana Kerton juga melukis bombardement yang dijudulinya 'Pemboman atas Lengkong'. Secara keseluruhan lukisan ini lebih menunjukkan kesemrawutan dengan garis dan rincian yang rumit, tetapi tidak harus berarti bahwa yang terakhir ini sebagai lukisan lebih berhasil. Yang jelas, Lukisan Kerton ini memang Judul: karena judulnya berbunyi, 'Pemboman atas Lengkong', maka bisa jadi lukisan ini memang menggambarkan Lengkong yang baru saja dibom lawan.

Bombardement mungkin disusul oleh serangan dan pendudukan, dan dalam keadaan demikian biasanya lalu disusul pula dengan pengungsian terutama oleh mereka yang tidak bersedia berada di daerah pendudukan. Dalam kanvasnya yang lain Sudjojono juga melukis pengungsian dengan judul 'Mengungsi' (tahun tidak jelas), yang

menggambarkan tiga orang dewasa dan dua orang anak yang sedang berjuang menghalau kepayahannya untuk berjalan terus sambil menyandang beban masing-masing menuju tempat yang aman. Di paling depan berjalan seorang wanita tua mendukung seorang anak kecil—mungkin cucunya—diikuti oleh wanita muda dengan beban gendongan yang cukup berat dan menjadikan dirinya berjalan terseok-seok. Di belakangnya berjalan seorang lelaki menjinjing kompor sambil menuntun anak yang terpaksa berjalan karena terseret orang tuanya. Mereka berjalan melewati batu-batu karang yang dilukis oleh Sudjojono dalam gaya mirip-mirip foto-realisme. Selain Sudjojono, Henk Ngantung juga melukis pengungsian besar-besaran dengan gaya yang sedikit ekspresionistik. Suasana pengungsian lebih mengena dengan kuas yang lebih ekspresionistik. Suasana pengungsian lebih mengena dengan rombongan yang besar, Semrawut—yang diintensifkan dengan sapuan kuas yang lebih eksotesis dan komposisi diagonal. Rombongan besar ini berjalan dari arah kiri atas menuju kanan bawah, dengan wajah yang berkerut dan muram dan beberapa diantaranya tidak sempat mengenakan pakaiannya secara semestinya. Ada anak telanjang dan ada seorang ibu yang tidak sempat menutup dadanya yang terbuka.

Sekali lagi, dengan goresan yang diacak dan warna coklat kehitaman yang di sana sini ditingkah dengan warna merah, menjadi lukisan ini secara keseluruhan lebih mengesankan kepanikan dalam pengungsian. Kalau 'Mengungsi' karya Sudjojono tidak jelas angka tahunnya, maka lukisan ini jelas berangka tahun 1947.

2. Gerilya

Ada banyak lukisan gerilya, satu diantaranya adalah buah karya Affandi yang diberi judul 'Laskar Rakyat Mengatus Siasat' (1946). Walaupun di tahun 1946 goresan affandi masih belum seliar tahun-tahun kemudian, namun dikenali apa maksudnya; dan diantara yang mudah dikenali ini, di tengah-tengah kerumunan para gerilyawan yang sedang mengatur siasat itu kita temukan peta yang barangkali kurang terhayati dengan baik. Peta yang sedang mereka pelajari adalah peta Indonesia dengan Kalimantan dan Sulawesi berada di tengah-

tengahnya. Mestinya bukan peta seluas Indonesia itu yang harus mereka hadapi. malinkan peta kabupaten Bentul atau sejauh-jauhnya peta Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkinkah dalam hal ini si pelukis menggunakan peta tersebut sebagai generalisasi dari semua peta. karena kalaulah garis-garis jalan di Bantul yang dimunculkan di situ. kiranya akan tidak begitu mudah untuk ditangkap bahwa itu adalah gambar peta.

Dalam masalah gerilya Sudjojono setidak-tidaknya menyerahkan sebuah kanvas dengan judul 'Kawan-kawan Revolusi' (1947) yang rupanya merupakan deretan potret-potret dari teman seperjuangannya. Maka, sekitar waktunya cukup, saya yakin bahwa semua potret yang berderet dalam kanvas Sudjojono tersebut akan dapat diidentifikasi. Dari wajah dan gaya mereka di masa revolusi.

Dari Dullah yang bekas pelukis istana presiden itu kita memperoleh beberapa kanvas yang mengisahkan sekitar perang kemerdekaan. Satu di antaranya berjudul 'Persiapan Gerilya' (tahunnya tidak jelas), yang menggambarkan kesibukan para gerilyawan yang sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugas sucinya. Ada yang sedang membongkar peti mesiu, ada yang sedang mengisi senapannya dengan peluru, dan yang sudah selesai tinggal lagi mmenunggu saat-saat yang mendebarkan. Namun Dullah menggambarkan wajah-wajah mereka itu semuanya dalam keadaan tenang, tidak terpikir bagaimana nasibnya sebentar lagi. Rupanya rileksasi semacam itu di masa lalu bayak dijumpai.

Sementara itu, mereka yang sedang berada di garis belakang juga mengisi waktunya baik-baiak. S. Harijadi berceritera melalui 'Biografi II di Malioboro'nya tentang kegiatannya yang mangasyikkan. Dia yang sedang berpakaian dinas dengan pistol di pinggangnya itu berjalan bergegas mengikuti seorang wanita cantik sehingga saking asyiknya tubuh seorang pengemis yang penuh dengan luka pun diinjaknya. dan entah kelakuan apa lagi yang ditemuinya di Malioboro. Di tempat lain, di masa revolusi pun orang sempat melakukan upacara perkawinan. Hal itu diceritakan dengan sangat halus dan kenanya oleh Hendra Gunawan dalam lukisannya 'Pengantin Revolusi' (c. 1955). Di pedesaan orang-orang berarak menyusuri jalan desa. mengantar

pengantin pria berseragam lengkap dengan merah-putih di dada sambil menuntun sepeda di mana pengantin wanitanya duduk di atas palangnya. Dengan demikian sang bidadari yang berbusana kurung berwarna kuning dengan dandanan hiasan kepala itu seakan didekap oleh sang pengantin pria yang kedua tanganya yang dituntunnya. Tanpa lukisan yang mengasyikkan ini kiranya takkan terpikir leh kita bahwa ada juga yang di sela-sela perang kemerdekaan itu sempat juga menyelenggarakan perhelatan pernikahan yang cukup meriah. Tentu saja untuk ukuran pada waktu itu.

Begitulah. Republik Indonesia yang disangka sudah remuk dan hilang dari muka bumi itu ternyata masih lengkap dengan segala aparat dan isinya. mekanisme kehidupannya masih berjalan dengan irama yang wajar. Arak-arakan pengantin masih terjumpai, begitu pula jalan-jalan berdesakan di Malioboro, mencari kutu, dan entah apa lagi. Ilustrasi yang menghiasi sejarah yang terambil dari buah karya para seniman ini sungguh menyemarakkan dan memperindah lukisan sejarah kita dengan warna-warninya. Sayang, museum seni rupa yang mampu merumahi karya-karya itu belum ada di republik kita yang tersayang ini. Menunggu kapa lagi?

REVOLUSI DAN MENTALITAS : Cebu Sekitar Masa Revolusi Kemerdekaan (1945--1949)

AM. Djulianti Suroyo

1. Revolusi : Suatu Perubahan Sosial

Membicarakan revolusi mungkin merupakan salah satu tema yang paling menarik dalam penulisan sejarah. Tak lain karena istilah revolusi dalam hal apapun mengandung arti perubahan masyarakat yang berjalan relatif cepat. Perubahan itu menunjukkan perbedaan yang tampak jelas dengan waktu sebelumnya. Maka periode revolusi, khususnya revolusi politik, juga merupakan daya tarik tersendiri, karena menggambarkan perubahan-perubahan politik baru, penjurangan rezim lama oleh rezim baru yang sering disertai tindak kekerasan dengan segala implikasinya pada tata kehidupan masyarakat. Sebagai momentum sejarah yang istimewa dan strategis, meminjam istilah Guy Rocher, jaman ini juga penuh pertentangan, kecurigaan, penghiatan, main hakim sendiri, dan berbagai tindakan radikal yang lain untuk berebut kekuasaan di antara pihak-pihak yang bertentangan. Seluruh proses ini membawa perubahan sosial ke arah suatu tatanan masyarakat baru, suatu pemutusan hubungan serta penolakan terhadap situasi dan struktur masyarakat lama yang tidak mereka sukai.²⁾

Revolusi (kemerdekaan) Nasional Indonesia yang diakui sebagai salah satu revolusi dunia yang besar pada masa kontemporer ini juga

telah mendapat banyak sekali perhatian sebagai bahan kajian sejarah, baik oleh sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing.³⁾ Sebagaimana layaknya sebuah revolusi nasional untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan asing, Revolusi nasional Indonesia meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat, serta mempengaruhi segala aspek kehidupan. dalam kenyataan sebagian besar karya sejarah tentang revolusi Indonesia masih berkisar sekitar perang, perjuangan bersenjata, atau perjuangan di bidang politik pada umumnya. Dalam hal ini dapat dimengerti sebab revolusi Indonesia adalah revolusi politik untuk menghapuskan penjajahan di negeri ini. Namun demikian karena proses revolusi itu sendiri telah menyeret seluruh kehidupan masyarakat, ia juga membawa dinamika perubahan pada berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan lain-lain. Dinamika perubahan tersebut sebenarnya sangat menarik untuk diteliti karena sering kali membawa dampak yang jauh hingga masa kini.

Salah satu aspek yang mungkin paling sedikit diteliti adalah aspek kejiwaan dalam arti melintalitas pada masa revolusi merupakan aspek yang sangat penting karena ia merupakan kekuatan pendorong dari masa rakyat untuk bergerak dan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak akan berani dilakukan pada masa-masa normal.

Seperti diketahui Revolusi 1945 adalah revolusi melawan penjajahan asing. Sebagai bangsa terjajah bangsa Indonesia mengalami berbagai perlakuan ketidakadilan serta dalam kondisi yang merugikan dalam bentuk eksploitasi ekonomis, ketergantungan dan ketidakbebasan politik, diskriminasi sosial dan rasial, fragmentasi sosial, superiority-complex di pihak penjajah dan seterusnya.⁴⁾ Kondisi serta perlakuan-perlakuan demikian menimbulkan rasa tertekan, rasa ketidakadilan, rasa rendah diri pada bangsa Indonesia. Mungkin saja hal itu tidak didasari oleh rakyat kebanyakan yang menerima kenyataan hidup sebagai bangsa jajahan, atau oleh mereka yang menikmati kehidupan relatif baik pada masa penjajahan. Kiranya hanya sebagian kecil saja dari rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian sosial yang tinggi yang menyadari ketidakadilan itu, dan lebih sedikit lagi yang berjuang untuk menyadarkan rakyat dan mengajaknya berjuang melawan ketidakadilan.

Namun keadaan menjadi berubah begitu revolusi menemukan peluang untuk melakukan perubahan besar-besaran. Peluang itu datang ketika terjadi *vacuum of power* pada waktu kekuasaan penjajah Jepang mengalami kejatuhannya oleh pukulan akhir Sekutu dengan dijatuhkannya bom atom dan Hiroshima 14 Agustus 1945. Kondisi ekonomi dan sosial yang parah akibat eksploitasi ekonomi pada masa pendudukan Jepang menyandarkan rakyat akan kejamnya penjajahan Jepang. Dengan sigap revolusi melepas tali kekang masa rakyat dari ketakutan, ketertindasan, kesengsaraan, dan dendam kesumat yang ingin dilampiaskan kepada pihak yang menindasnya. Tidak kurang penting pula, masa rakyat ingin menikmati kebebasan sebagai bangsa merdeka, dengan segala eksisnya.

Kedatangan kembali Belanda di Indonesia sebagai pasukan Sekutu yang ingin menduduki kembali jajahannya memunculkan kembali trauma penjajahan selama satu setengah abad pada sebagian besar bangsa Indonesia. Keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih serta ketakutan dijajah kembali telah meningkatkan semangat nasionalisme yang tinggi untuk menegakkan eksistensi sebagai bangsa dan negara merdeka. Perang terbuka tak terhindarkan karena Belanda bersikukuh mempertahankan legitimasinya untuk menguasai Indonesia sebagai jajahannya seperti sebelum Perang Dunia II.

Semangat nasionalisme disertai harapan indah akan kehidupan yang lebih baik dan lebih terhormat di alam merdeka, atau bahkan tanpa perhitungan kalah atau menang, telah mendorong sebagian besar rakyat berani berperang tanpa persenjataan yang memadai. Situasi revolusioner bak gelombang pasang pasang mendorong arus masa rakyat bergerak, bertindak, merobak apa yang mereka tidak sukai, dan melakukan apa yang mereka ingini. Sebagian rakyat ingin mencampakkan pengusur lama yang dinilai sebagai kolaborator Jepang, antek Belanda yang menindas rakyat yang dikenal sebagai aksi pendaulatan para lurah dan pamong praja.⁵¹

Di satu pihak tumbuh nilai-nilai luhur yang tercermin dalam ketaatan kepada pimpinan, kesetiaan kepada Republik meski penuh ketidak pastian akan hari depan, ikhlas berkorban, dan hidup serba

kekurangan. Di pihak lain mereka ingin meninggalkan tata nilai dan sikap lama yang dirasakan merugikan atau merendahkan golongan rakyat kebanyakan, seperti kesombongan ras kulit putih, keangkuhan kelas priyayi/pamong perja dengan gaya feodal aristokratnya. Warisan kolonial ini ingin mereka gantikan dengan nilai-nilai baru seperti kerakyatan, kesamaan kedudukan, demokrasi, kebebasan berpikir, berperilaku dan bertindak, seperti semboyan yang dikumandangkan dalam Revolusi Perancis: *Liberte, egalite, fraternite!* Namun tata nilai lama tidak semuanya hilang sementara tata nilai baru belum seluruhnya mapan beserta aturan-aturan mainnya yang harus ditaati. Sebagai akibatnya terjadi situasi anomali yang memungkinkan perilaku menyimpan seperti konflik politik yang berujung pada tindak kekerasan, penghukuman tanpa proses pemeriksaan, penyerobotan, penggarongan, dan lain-lain.

Inilah gambaran umum dari Revolusi Indonesia, kalau kita melihatnya sebagai perubahan sosial secara lebih khusus perubahan mentalitas, yaitu jiwa atau semangat jaman yang tercermin pada pandangan, perasaan, sikap, dan perilaku masyarakat pada masa Revolusi 1945.

Berangkat dari gambaran umum tersebut makalah ini ingin melukiskan peristiwa sejarah pada masa revolusi dalam ruang dan waktu yang konkrit faktual, yaitu di kota pedalaman Cepu sekitar tahun 1942 sebagai latar belakang masa revolusi hingga akhir tahun 1949. berakhirnya revolusi nasional merebut kemerdekaan. Dalam studi kasus ini dipertanyakan kembali berbagai permasalahan yang terdapat pada pola umum tersebut di atas. Pertama-tama, bagaimanakah peristiwa revolusi itu terjadi di tingkat lokal, dan sejauh mana situasi dan kondisi lokal memberikan warna tersendiri pada revolusi Indonesia. selanjutnya, sejauh mana telah terjadi perubahan mentalitas pada masyarakat, motivasi apa saja yang mendorong perubahan mentalitas yang terjadi merupakan perubahan yang mendasar sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat hingga mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat hingga masa kini, atautkah hanya perubahan sementara karena terdorong oleh situasi revolusi? Akhirnya, apakah apakah benar telah terjadi suatu perubahan struktur sosial dan perubahan tata nilai setelah revolusi, atautkah terjadi semacam change

and continuity dalam masyarakat pasca revolusi seperti dikemukakan oleh Michel Vovelle?⁶¹

2. Cepu: Kota Kewedanaan pada Masa Revolusi

Pada masa revolusi Cepu adalah ibukota Kewedanaan Panolan, di bawah Kabupaten Blora, Keresidenan Pati (Kini hanya ibukota kecamatan). Kota ini terletak di tepi barat Bengawan Solo, jaman dahulu sebagai sarana transportasi, dan diperbatasan propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. 70% dari wilayah Cepu adalah hutan jati, selebihnya merupakan tanah pertanian dan permukiman. Namun tanah pertanian ini tidak cukup subur karena tanahnya mengandung kapur dalam kadar tinggi. Cepu terletak dilingkungan pegunungan kapur utara, sedang wilayah sebelah selatan berada di lingkungan Pegunungan Kendeng yang juga tidak begitu subur. Langkanya irigasi teknis (pada masa itu) menyebabkan penduduk sulit mendapatkan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun tanah pertanian mereka. Hal ini semakin terasa pada musim kemarau.⁶² Kebanyakan sawah merupakan sawah tadah hujan dan berfungsi sebagai tegalan yang ditanami jagung dan palawija. Dengan kondisi ekologis pilihan menjadi petani gurem (kecuali kepala desa yang lebih kaya), yang hidup dari pertanian tegal. *Kuli blandong* (penebang pohon) di hutan-hutan jati milik negara dan buruh atau penambangan minyak.

Berbeda dengan kondisi pertanian yang kurang menguntungkan kondisi ekonomis secara makro kota Cepu dan daerah sekitarnya justru cukup kuat pada awal masa Revolusi. Cepu merupakan satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang memiliki ladang-ladang minyak dan pabrik pengilangan minyak yang merupakan sumber penghasilan bagi negara yang sejak tahun 1984 telah dilakukan penambangan minyak oleh DPM (Duitsche Petroleum Matschappij). Tahun 1911 perusahaan ini dibeli oleh BPM (Bataafsche Petroleum Matschappij) yang memiliki 9 ladang minyak dan sebuah pabrik pengilangan minyak di kota Cepu. Pada masa Revolusi diperkirakan jumlah Laskar Minyak mencapai 12.000 orang. Apabila data 1950 menunjukkan jumlah pegawai perminyakan di kota Cepu sendiri sebanyak 915 orang, sedang pegawai minyak di satu ladang minyak Kawengan (Wonosari) adalah 650 orang, dapat

diperkirakan jumlah pegawai dan buruh minyak di Cepu hanya berkisar sekitar 8.000 orang pada sekitar awal masa Revolusi. Jumlah 12.000 Laskar Minyak (Kalau benar angka itu) jelas termasuk para pemuda yang direkrut menjadi anggota Laskar Minyak.⁸⁾

Sebagai kota kecil yang memiliki industri modern yaitu pertambangan minyak, pabrik penyulingan minyak, serta eksploitasi hutan jati, kota Cepu memiliki corak tersendiri, yang lain dari pada kota-kota lain di Jawa. Komposisi penduduk Cepu sejak akhir pemerintah Belanda telah didominasi oleh besarnya golongan pegawai, khususnya golongan buruh. Apabila penduduk kota Cepu pada tahun 1930 berjumlah 21.861 orang,⁹⁾ diperkirakan jumlah golongan buruh (buruh minyak, buruh kehutanan, buruh lainnya termasuk buruh kereta api yang militan) mencapai 50%. Penduduk yang lain terdiri dari para pegawai negeri maupun swasta, pedagang, dan rakyat biasa dengan pekerjaan berjualan kecil-kecilan dan bertani, serta forfesi bebas. Penduduk Belanda Berjumlah 3,38%, menduduki jabatan-jabatan atas yang umumnya bekerja di pabrik, penduduk Cina 6,98%, Timur asing 0,25%, dan Pribumi 89,61%.

Dengan komposisi penduduk yang didominasi buruh industri merupakan ladang yang subur bagi gerakan politik yang beraliran kiri/sosialis, khususnya dilingkungan para buruh. Meskipun tidak terdengar adanya pemogokan pada akhir tahun 1930-an, namun melihat kenyataan bahwa Laskar Minyak Indonesia yang sangat kuat di Cepu berhaluan Komunis membuktikan besarnya pengaruh golongan kiri di Cepu. Menurut kesaksian, orang-orang Komunis sudah mulai mencari pengaruh terutama di lingkungan pegawai kereta api (NIS). Kelompok inilah yang merupakan sumber infiltrasi Komunis dari Semarang yang menjadi kantor pusat NIS. Mereka berlokasi di Balum.¹⁰⁾ Dari para buruh NIS inilah kiranya ideologi komunisme dimasukkan di kalangan buruh BPM (dan pekerja lainnya), yang pada masa Repunlik mendirikan Barisan Laskar Minyak (kemudian berganti nama Laskar Minak Indonesia).

Suatu hal yang mudah di duga Cepu pada masa Revolusi merupakan basis PKI tidalah mengherankan. Latar belakang budaya masyarakat di sini kuat diwarnai budaya Abangan, meskipun ada juga

golongan Santri dalam Jumlah yang dangat kecil.¹¹⁾ Pada akhir abad XIX dan awal XX di sekitar daerah ini timbul golongan samin, suatu kelompok masyarakat yang menolak kekuasaan pemerintah kolonial, menolak agama dan tradisi islam, dan hidup dalam sub kultur sendiri yang merupakan varian kultur Abangan. Timbulnya golongan ini merupakan protes petani daerah miskin terhadap tekanan pajak pemerintah kolonial, yang dilakukan dalam bentuk perlawanan pasif.¹²⁾ Dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya demikian *pengala.....* revolusi terjadi di Cepu.

Pada masa pendudukan Jepang tidak diketahui jumlah penduduk Cepu. Diperkirakan jumlah penduduk bertambah dengan kedatangan tentara Jepang untuk terutama menduduki pabrik minyak. Disamping itu Cepu juga menjadi salah satu tempat pendidikan dan asrama PETA yang para anggotanya direkrut dari berbagai daerah. Penduduk bangsa belanda dan keluarganya sebaliknya ditawan di tempat lain(?).

Pada masa Revolusi diperkirakan penduduk kota Cepu semakin banyak. Hal ini mengingat kedudukannya yang strategis baik dari segi ekonomi maupun militer, kerana terletak pada jalur transportasi utama baik kereta api maupun jalan raya. Kota Cepu menjadi tempat kedudukan Deasemen XVIII/Batalon VI/Divisi Jaya Negara PTLRI (Polisi Tentara Laut Republik Indonesia). Kota ini juga menjadi markas Batalyon XII/Resimen III/Brigade XVII TNI yang berasal dari berbagai kesatuan kelaskaran, sebagai Pusat Kesehatan Tentara Divisi V/Ronggolawe.¹³⁾ Seluruh kesatuan tentara dan Laskar tersebut membawa keluarga mereka. Disamping terus bertambahnya penduduk pendatang juga terjadi mobilitas spasial yang tinggi, dimana banyak pasukan datang dan pergi, termasuk tentara "hijrah" yang datang dari daera "kantong" di Jawa Barat beserta keluarga mereka. Para pemuda dari desa atau tempat lain datang ke kota untuk bergabung ke dalam salah satu laskar atau tentara reguler. Situasi ini mengakibatkan terjadinya interaksi dan komunikasi yang semakin intensif antara penduduk asli Cepu dengan para pendatang dari berbagai daerah. Penduduk yang semakin heterogen ini terdiri dari berbagai kelompok dengan orientasi politik dan ideologi masing-masing yang menjadi sumber konflik yang potensial.

3. **Gejolak Revolusi di Kota Cepu: Sebuah Gambaran Dini Mengenai perubahan Pandangan, Sikap dan Perilaku Masyarakat.¹⁴⁾**

a. Zaman Jepang : Awal Perubahan

Dari berbagai kesaksian dari mereka yang pernah tinggal di Cepu pada masa Revolusi diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya pada masa penjajahan Belanda sebagian masyarakat belum merasakan suatu kesadaran bahwa mereka dijajah Belanda, atau mempunyai keinginan melawan penjajahan Belanda. Hal ini pertama karena mereka sejak kecil telah menerima kenyataan bahwa ada orang-orang Belanda tinggal di kota mereka sebagai pegawai pabrik yang tidak banyak berurusan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Belanda yang bekerja dipabrik pada umumnya tidak bersikap semena-mena bahkan cukup korek dan disiplin. Kedua, keadaan ekonomi waktu itu (awal tahun 1940-an), dirasakan cukup baik dan stabil, dalam arti pegawai mendapat gaji yang cukup dimakan satu bulan bahkan bisa menabung sedikit. Ini bila dibandingkan dengan pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan. Ketika pendidikan yang dapat menggugah semangat kebangsaan, seperti sejarah, justru memberikan sejarah negeri Belanda dan bangsa Belanda dan Eropa yang berjaya. Sedikit sekali diberikan mata pelajaran sejarah Indonesia.

Apabila kita menggambarkan pelapisan masyarakat pada akhir penjajahan Belanda, maka strata paling atas ditempati bangsa Eropa/ Belanda yang menempati kedudukan birokrasi atau manajerial tingkat atas, baik di pabrik, baik diperusahaan, di kantor, di sekolah. Di Cepu sebagai kewedanan tidak ada *Ambtenaar* Belanda, sedangkan pangreh praja mmulai wedana ke bawah di jabat orang-orang Indonesia. Pangreh praja ini berada dilapisan kedua di bawah tuan-tuan Belanda. Orang Cina yang secara hukum disamakan dengan orang Belanda kiranya masuk ke dalam lapisan kedua juga (khususnya yang memperoleh pendidikan berat, apalagi karena umumnya kaya). Lapisan ketiga adalahh pegawai Indonesia, yang umumnya pegawai rendah, baik swasta ataupun negeri, pedagang Indonesia, atau guru. Lapisan bawah adalah para buruh industri, petani dan buruh tani serta profesi-prefesi lapisan bawah yang lain.

Jarak sosial antara lapisan bawah dan atas, baik Belanda maupun Indonesia harus mengikuti tradisi feodal kolonial dengan penggunaan bahasa Jawa tinggi dan menyembah kepada wedana atau camat. Dengan orang Belanda rakyat tidak perlu menyembah tetapi harus sangat hormat.

Dalam nilai keadaan ekonomi kolonial, mereka yang merasakan hidup sulit adalah para buruh yang diluar buruh pabrik yang tetap karena upah yang rendah, dan petani gurem dan buruh tani, karena harga hasil pertaniannya sangat rendah.

Rasa kesadaran sebagai bangsa yang dijajah akan diperlakukan tidak adil baru tumbuh di kalangan mereka yang aktif di organisasi pergerakan nasional, seperti Bapak Muhamad Kholil yang menjadi anggota Serikat Islam (merah), dan aktivis di lingkungan buruh minyak Bapak Maran Hadi, atau mereka yang aktif di kepanduan. Di Cepu terdapat kepanduan KBI, Hisbulwathon, dan Banu (NU). Saluran-saluran untuk menanamkan semangat nasionalisme dan perjuangan mencapai kemerdekaan dimasukkan melalui saluran organisasi-organisasi ini, meskipun dalam jumlah anggota yang sangat terbatas, serta dengan aktivitas yang sangat terbatas pula. Namun tak berarti tidak ada aktivitas pergerakan yang radikal. Bapak Kholil pada tahun 1928 adalah aktivitas SI (merah) yang ikut dibuang di Sorong.

Kurang adanya gerakan revolusioner di Cepu mungkin juga disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa orang-orang Belanda di Cepu bukan terutama birokrat yang memerintah rakyat, melainkan orang pabrik yang lebih banyak para tehniisi. Berbeda dengan pabrik tebu yang mengadakan hubungan kerja dengan rakyat petani yang memanipulasi tanah dan tenaga petani, perusahaan minyak modern tampaknya justru memberi lapangan kerja cukup alasan untuk menyulut keresahan buruh, disamping mungkin ada larangan mendirikan serikat buruh sejak pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927.

Selain organisasi pergerakan nasional serta organisasi kepanduan (di Cepu terdapat organisasi Serikat Islam, NU, dan Gerindo), pendidikan swasta seperti Taman Siswa dan madrasah serta Pondok Pasantren juga memberikan warna identitas dan semangat kebangsaan.

Taman Siswa melalui kesenian Jawa dan pelajaran sejarah, sedang Madrasah/Pesantren melalui identitas Islam yang berlawanan dengan orang berat yang kafir. Adalah menarik bahwa justru pada masa-masa menjelang pendudukan di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1940 radio Jepang di Tokyo dengan gencar mengadakan propaganda dengan cara mengajak bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Bahkan lagu-lagu Indonesia, juga lagu Indonesia Raya disiarkan di Tokyo (wawancara Umar Said). Siaran ini diam-diam ditangkap oleh mereka yang memiliki radio, dan inilah yang menggugah rasa benci kepada Belanda sebagai musuh dan penjajah, disamping rasa simpati pada Jepang.

Pada masa pendudukan Jepanglah sebenarnya perubahan mentalitas bangsa Indonesia mulai dipupuk sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri secara besar-besaran. Sistem pendidikan yang melarang penggunaan bahasa Belanda serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai penggantinya, serta bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa resmi di samping penggunaan bahasa Jepang sangat meningkat kesadaran nasional rakyat. Mungkin hanya sebagian kecil kalangan terpelajar/ pegawai yang terbiasa berbahasa Belanda yang kurang senang dengan kebijaksanaan Jepang di bidang kebudayaan ini.

Pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia raya yang boleh di nyanyikan ketika Jepang baru menduduki kota Cepu juga sangat menggugah semangat kebangsaan, meskipun kemudian dilarang lagi.

Penjajahan Jepang mulai membawa perubahan-perubahan dalam hal status sosial dan hubungan sosial antar lapisan dan golongan masyarakat. Dengan disingkirkannya manajer dan pegawai-pegawai Belanda di pabrik minyak, Jepang memanggil pegawai-pegawai Indonesia yang telah berpengalaman untuk bekerja kembali di pabrik. Meskipun jabatan atas dipegang oleh orang-orang Jepang, mereka lebih banyak berfungsi mengawasi. Banyak jabatan yang dulu dipegang Belanda kini dipegang orang Indonesia. Hal ini telah menaikkan status serta kepercayaan diri yang semakin besar pada bangsa Indonesia di satu pihak. Namun di pihak lain sikap Jepang yang kasar terhadap

pejabat Indonesia, seperti menempeleng dan sebagainya sebenarnya merendahkan martabat pejabat.¹⁵⁾

Berbagai politik Jepang yang turut membawa dampak perubahan sosial di kemudian hari antara lain perombakan tradisi feodalistik dalam menghormati pejabat Indonesia, yaitu tidak lagi rendah. Dengan demikian mulai terjadi proses demokratisasi. Sebutan *ndoro Wenono* atau *ndoro Seten* tidak lagi digunakan, melainkan cukup dengan mengangguk gaya Jepang dan menyebut: *pak*.¹⁶⁾ Istri-istri pejabat harus masuk organisasi *Fujinkai* bersama Istri-istri pegawai yang lain dengan kegiatan mulai dari baris-berbaris, dapur umum, menjahit pakaian untuk kepentingan perang dan lain-lain. Dengan demikian yang paling mengalami perubahan status sosial, adalah lapisan atas, khususnya *pangreh praja*. Artinya mengalami status penurunan. Menurut sejarawan Aiko Kurasawa Jepang mempunyai sikap ambivalen kepada *pangreh praja*. Di satu sisi ia mencurigai golongan *priyayi* ini sebagai pengikut budaya barat yang setia, jadi setia kepada Belanda. di sini lain Jepang membutuhkan para *priyayi* untuk melaksanakan birokrasi pemerintah.¹⁷⁾ Mungkin defeodalisasi dan pelarangan bahasa Belanda merupakan salah satu cara untuk "melepaskan" kesetiaan kepada Barat.

Lapisan masyarakat bawah kiranya yang paling mendapatkan keuntungan dari adanya berbagai perubahan ini. Jepang merekrut pemuda-pemuda baik dari kota maupun dari desa untuk menjadi PETA, *Heiho*, *Seinendan* (Kepemudaan), *Keibondan* (Polisi Desa), dan *Romushha* (Brigade Pekerja = pekerja paksa). Dengan demikian terjadi mobilitas yang tinggi baik mobilitas spasial maupun mobilitas vertikal. Khususnya pemuda yang masuk *Heiho* dan PETA, banyak dari mereka berasal dari desa dilatih dan dididik di tempat-tempat yang jauh dari desanya, dan ditempatkan di berbagai kota. Sebagian dari mereka mendapat pangkat tinggi. Demikian pula mereka yang masuk di berbagai organisasi buatan Jepang dapat menjadi pejabat di kantor-kantor. Seluruh mobilitas umum ini telah mempertemukan berbagai lapisan dan golongan masyarakat dalam organisasi-organisasi yang sama dan kedudukan yang sejajar dan menumbuhkan perasaan senasib. Latihan kemiliteran, kemampuan berorganisasi dan pengalaman memobilisasi semakin dikembangkan yang ternyata sangat berguna.

Sedikit mengenai peristiwa masuknya Jepang ke Kota Cepu dengan aman karena sama sekali tidak ada perlawanan dari Belanda yang telah menyingkir sambil melakukan bumi hangus membakar pabrik dan jembatan Pandangan. Namun Jepang juga memberi "pelajaran" atau mendorong perilaku baru yang melanggar tatanan yaitu penggarongan pada toko-toko orang Cina oleh orang-orang kampung dan disetujui oleh Jepang. Tentara Jepang mungkin ingin mengambil hati rakyat. "Pelajaran" baru ini ternyata meluas kesasaran rumah-rumah orang Indonesia juga yang ditinggalkan oleh penghuninya. Perilaku menyimpang yang melanggar tatanan umum ini tampaknya kemudian sering muncul juga pada masa Revolusi.

Tak kurang penting adalah penderitaan fisik yang dialami rakyat seperti kelaparan, kurang sandang, kerja paksa serta paksaan-paksaan lain yang sangat menguras sumber daya alam dan manusia, dan menimbulkan trauma kebencian, tetapi juga ikut tertanamnya sikap dan perilaku kekerasan dan perilaku menyimpang seperti tersebut di atas.

b. Zaman Revolusi

Saat-saat proklamasi kemerdekaan merupakan momentum yang sangat berkesan, juga bagi rakyat Indonesia di Cepu. Berita proklamasi kemerdekaan tidak mereka terima persis pada tanggal 17 Agustus namun satu-dua hari sesudahnya ada yang mendengarnya dari radio, ada yang mendapat berita langsung dari aktivitas Masyumi yang sengaja datang dari Jakarta (Wawancara Sazali Usman), dan ada pula yang mendengar dari teman sekantor atau tetangga. Redaksi mereka pada umumnya adalah lega, gembira, bahkan ada yang hiruk pikuk dan bersorak sorai. Namun mereka juga bingung, menghadapi tekateki apa yang bakal terjadi. Rakyat tidak pula membayangkan apa artinya menjadi bangsa yang merdeka, mempunyai negara, dan pemerintahan sendiri.

Waktu berjalan sangat cepat dan transfer of power di Cepu berjalan tanpa kekerasan. Pengalaman perebutan pabrik dari tangan Jepang dilakukan oleh para pemuda karyawan pabrik yang dengan bersenjatakan berbagai senjata tajam yang memasuki pabrik memaksa Jepang untuk menyerahkan senjata mereka dan menyerahkan pabrik.

Oleh Jepang senjata dan pabrik diserahkan tanpa perlawanan, dan mereka kemudian diangkut ke Magetan sebagai tawanan.¹⁸¹ Di sini mulai berkembang kemampuan untuk bertindak cepat, mengambil inisiatif, dan kemampuan mengendalikan masa untuk bertindak tertib dan tidak sewenang-wenang. Kiranya revolusi melahirkan kepemimpinan alamiah yang kharismatik, memiliki wibawa, karena situasi memberinya peluang untuk tampil. Cukup mengagumkan bahwa tidak terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Jepang tawanan itu. Namun di sisi lain terjadi pula pendudukan kantor-kantor Jepang dan rumah-rumah yang dihuni Jepang, mungkin juga ada barang yang diambil. Kiranya revolusi juga menampilkan kepemimpinan yang cari untung sediri.

Tampaknya keamanan dan ketertiban segera dapat dikembalikan dan pemerintah sipil kembali berjalan dengan normal. Sejauh diketahui militer tidak ikut campur dalam pemerintahan sipil, namun koordinasi kiranya sering dilakukan menyangkut keamanan daerah. Militer sibuk dengan pengiriman pasukan-pasukan ke daerah pertempuran dan mengkoordinasikan laskar-laskar yang di Cepu di dominasi oleh Laskar Minyak Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh komunisme.

Tanpa disadari masyarakat waktu itu telah dirasuki oleh semangat revolusi. Para aktivis revolusi dari berbagai aliran bermunculan, mengajak rakyat untuk berjuang, mempertahankan kemerdekaan. Mereka menciptakan simbol-simbol revolusi, seperti semboyan: Merdeka! setiap bertemu di jalan atau dalam pertemuan, lebih-lebih dalam rapat-rapat raksasa. Mereka memakai lencana merah putih di baju atau diikatkan secarik kain merah putih di kepala. Tiba-tiba rakyat menjadi sadar bahwa ia menjadi suatu bangsa yang baru, dan bendera merah putih menjadi begitu sakral sebagai identitas bangsa. Bambu runcing bermunculan sebagai simbol perjuangan, diiringi lagu-lagu perjuangan dan di bakar oleh oratoria revolusi dari para pemimpin kharismatik seperti Bung Karno dan Bung Tomo, agar mereka berani berperang. Memang mereka berani melakukan itu semua? Mungkin karena mempunyai harapan kelak bisa menikmati hidup lebih baik dari pada saat ini. Mungkin ini masalah kehormatan (dignity) sebagai bangsa yang tak ingin dijajah kembali.

atau nasionalisme. Mungkin karena tidak ada jalan lain selain terus berjuang, sampai ada penyelesaian yang baik?

Kembali mengamati perubahan mentalitas pada masa ini, maka perubahan-perubahan yang telah dimulai pada jaman Jepang semakin tampak jelas sosoknya. Rasa setia kawan sebagai bangsa, pandangan kebangsaan, sikap dan perilaku egaliter semakin populer. Sebutan *Bung dan Lur* (*Sedulur*, saudara) kepada sesama warga negara, kepada para tokoh pemimpin masyarakat, dari petani sampai presiden, menunjukkan nilai-nilai egaliter dan persaudaraan. Nilai kebebasan dalam bersikap, berperilaku, dan berbicara/mengeluarkan pendapat ditunjukkan dengan sikap tegak modal tentara, bersuara lebih keras dan relatif bebas mengeluarkan pendapat.

Seiring dengan perubahan struktur, dari sistem kolonial otokratis represif dari *beambtenstaat* Belanda, berubah menjadi sistem militer represif otoriter Jepang, digantikan oleh sistem demokratis "parlementer" (meskipun belum ada parlemen hasil pemilu) yang populis, turut membawa juga perubahan sosial. Dengan enyahnya penguasa asing Jepang dan Belanda, maka strata puncak pada masyarakat diduduki para pemimpin dan penguasa Indonesia baik sipil maupun militer. Namun mobilitas vertikal semakin cepat berjalan, sehingga strata tengah yang dulu dimonopoli golongan priyayi pangreh praja, ini bisa dijabat oleh orang biasa dari kalangan bawah. Mobilitas vertikal paling lancar justru kelas bawah, rakyat biasa yang pada Jaman Jepang telah mulai berpeluang besar ke jenjang yang lebih tinggi, dalam pemerintahan atau hierarki militer. Jarak sosial antara strata semakin kecil dengan luntarnya tradisi feodal, sebutan *ndoro*, dan bahasa Jawa Kromo diganti dengan bahasa Indonesia. Hanya dalam intern keluarga atau antar kerabat unggga-unggguh dan bahasa Jawa halus masih digunakan. Gambaran ini lebih tampak di perkotaan daripada di pedesaan, meskipun terjadi mobilitas dari sebagian pemuda-pemudi desa ke kota dan menjadi egaliter, namun sebagian besar rakyat desa masih belum banyak tersentuh perubahan ini. Mereka umumnya masih menghormati orang kota sebagai priyayi dan berbicara dengan

Apakah terdapat karakteristik pada peristiwa revolusi di kota Cepu. Di samping "pola umum" sebuah revolusi seperti dijelaskan Guy Rocher dan Michel Vovelle, terdapat juga karakteristik agak khusus karena ada situasi dan faktor yang khusus. Antara lain adanya kenyataan sebagai kota industri, kuatnya warna "Abangan" memudahkan masuknya ideologi Marxisme/Sosialisme di lingkungan buruh. Eksistensi pemerintah RI di Cepu mendapat tantangan. Pemerintah bisa bertahan sejauh militer dan kelompok-kelompok laskar yang tidak kiri masih cukup kuat untuk mengendalikan keamanan. Di Laskar Minyak dan Pesindo, keduanya sangat dominan, dan laskar kanan seperti Hisbullah dan Pemuda Marhaen yang tidak terlalu kuat. Meskipun laskar-laskar itu kemudian diintegrasikan ke dalam kesatuan reguler, namun ideologi yang mereka bawa tidak pernah hilang. Keberadaan partai-partai kiri yang kuat di Cepu (PKI, MURBA, FDR) membuat Cepu menjadi basis pemberontakan PKI tahun 1948, setelah Madiun dan Cepu sempat menjadi ajang pembantaian, baik ketika Cepu sempat diduduki "merah" selama 12 hari, dimana PKI menculik beberapa pejabat dan guru, dan membunuh juga dilakukan dengan atau tanpa proses pemeriksaan. Konflik juga terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat, bahkan antara keluarga yang bermusuhan karena berbeda ideologi. Konflik baru berakhir ketika musuh bersama datang menyerbu Cepu, Agresi Belanda ke II tgl. 21 Desember 1948. Sebagian kota dibumi hangus, tentara mengungsi, pejabat mengungsi, sebagian rakyat mengungsi. Akhirnya ada kesepakatan, biarlah sipil kembali ke kota, bekerja sama dengan tentara yang tetap bergerilya. Dan, Republik ternyata bisa bertahan, sampai pengakuan Kedaulatan. Merdeka !.

4. Simpulan : Sebuah Pertanyaan, Apakah Perubahan Sosial sebagai Dampak Revolusi, Suatu Perubahan Besar yang Langgeng ?

Dari pengalaman sejarah yang berhasil digali di kota kecil Cepu, tampaknya Revolusi Indonesia dalam beberapa hal memiliki pola-pola yang sama seperti revolusi di beberapa negara yang lain. Suatu perubahan politik yang besar dan dahsyat. Suatu bentuk baru diciptakan oleh masyarakat yang lain daripada sebelum terjadinya revolusi. Tumbuh nilai-nilai baru yang dulu pernah dicita-citakan :

bangsa yang bebas, egaliter, kerakyatan, persaudaraan antara sesama warga negara dan lain-lain seperti yang diharapkan. Namun benarkah semuanya berubah, dan tetap demikian hingga saat ini? Sejarah-wan Michel Vovelle mengemukakan bahwa nilai-nilai baru sebagai dasar mentalitas baru yang diperjuangkan suatu revolusi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang telah lama ada di masyarakat. Revolusi merupakan titik kulminasi dari harapan, cita-cita, dan nilai lama tersebut. Dan bahkan apa yang ingin dibuang pada masa revolusi ternyata dipakai kembali dalam bentuk lain.¹⁹⁾

Apakah revolusi kita juga demikian?

Catatan

- 1) Makalah diskusi sejarah lokal Revolusi Kemerdekaan, 1945-1950, Bandungan, Semarang, 15-13 Oktober 1994.
- 2) Guy Rocher, *A General Introduction to Sociology. A Thoretical Perspective* (Toronto: Macailan Company of Canada, 1972).
- 3) Sejarahwan asing pertama yang menulis mengenai Revolusi Indonesia dengan penuh simpati dan Indonesia Sentris adalah George Mac Turnan Kahin, penulis disertai dari Cornell University yang kemudian dibukukan. Baca G.McT. Kahin, *Nationalist and Revolution in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1961). Setelah itu menyusul banyak sekali studi tentang Revolusi Indonesia.
- 4) Rocher, *op.cit.*, hal. 501-507.
- 5) Mengenai aksi pendaulation para pejabat dan lurah pada masa revolusi periksa Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: Grafiti, 1989), hal. 1-4.
- 6) Michel Vovelle memberikan analisis yang menarik mengenai sejarah mentalitas pada Revolusi Perancis. Pada intinya ia berkesimpulan bahwa sebenarnya perubahan baru pada masa revolusi hanyalah wujud atau “baju” baru pada struktur dan nilai lama. Baca Michel Vovelle, *Ideologies and Mentalities* (London: Polity Press, 1990), hal. 204-245.

- 7) Dwianto Leksono, *Nasionalisme PPT Migas Cepu: pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Tahun 1950-1970*, Makalah Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, 1993.
- 8) Lihat catatan *Laskar Minyak Cepu*, L.t.
- 9) P.D. Milone, *Urban Areas in Indonesia. Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Research Series No.10. Institute of International Studies University of California ...). hal.116.
- 10) Keterangan Mayjen Purnawirawan Moesnadi, yang pada jaman Jepang masuk PETA, lama tinggal di Cepu dan mengadakan hubungan dengan para pemuda Cepu.
- 11) Wawancara Sazali Hasan, anggota Hisbullah, 5 November 1993.
- 12) W. F. Mertheis, *Indonesian Society in Transition* (Bandung : Sumur Bandung, 1956), hal. 270.
- 13) Nardam dan Imam Soedjono, *Sejarah Sepintas Lintas dari Laskar Minyak Cepu dari Tahun 1945-1949*. Naskah 1959, Perpustakaan Kodam IV/Diponegoro, Semarang.
- 14) Data dikumpulkan dari hasil penelitian sejarah lisan terhadap berbagai tokoh yang pernah tinggal di Cepu pada tahun 1945-1949, oleh tiap Fakultas Sastra Undip. Baca A.M. Djulianti Suroyo. et. al., *Perubahan Pandangan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat pada Masa Revolusi (1945-1950) di Cepu* (Universitas Diponegoro, 1993).
- 15) Wawancara dengan Bapak Umar Said, Mantan Pegawai BPM.
- 16) Wawancara dengan Bapak Abdulkadir dan Naran Hadi.
- 17) Aiko Kurasawa, alih bahasa Hermawan Sulisty, *Mobilisasi dan Kontrol* (Jakarta: Grasindo, 1993), hal. 391-392.
- 18) Wawancara dengan Syazali Usman, Umar Said, dan Abu Kasan.

MENTALITAS REVOLUSI DI INDONESIA ¹⁾

J. Kadjat Hartojo

Sejauh dapat diikuti melalui karangan Philippe Aries tentang sejarah mentalitas yang terbit pada tahun 1978 ² belum ada historiografi tentang Revolusi Perancis yang menggunakan konsep "mentalitas"³. Agaknya demikian pula halnya dengan historiografi tentang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, setidaknya-tidaknya yang menggunakan konsep itu secara eksplisit. Akan tetapi tentu kenyataan dalam historiografi tentang Revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia itu tak berarti bahwa tidak ada gejala mentalitas dalam sejarah kedua revolusi.

Karangan ini bertujuan menunjukkan bahwa di antara gejala-gejala dalam sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dapat dikenali suatu "mentalitas revolusi". Untuk itu mula-mula akan dirumuskan, dari praktek sejarawan, makna "mentalis" sebagai konsep sejarah. Rumusan itu dibuat berdasarkan studi tentang konsep tersebut yang dilakukan untuk sebuah studi tahun 1993 tentang mentalitas golongan Caldoche di Kaledonia Baru.⁴

Konsep itu akan digunakan untuk mengenali mentalitas masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, dengan sumber memoar-memoar Adam Malik⁵ dan Aboe Bakar Loebis⁶, serta karangan W.H. Frederick tentang lahirnya Revolusi Indonesia di kota Surabaya, sebuah hasil penelitian yang memakan waktu sepuluh tahun, dengan menggunakan

pendekatan sejarah sosial.⁷ Akan tetapi, karena “mentalitas” dalam kajian sejarah mentalitas selalu mengacu kepada masyarakat tertentu, tak terhindari upaya mengidentifikasi masyarakat-masyarakat yang hendak dikenali mentalitasnya itu, walaupun secara sangat sumir, sambil lalu, dan mungkin bernilai hipotesis. Sebenarnya seluruh kajian ini bersifat sumir dan hipotesis.

1. Konsep “Sejarah Mentalitas”

Sejarah mentalitas adalah salah satu aset sejarah sosial menurut pengertian para sejarawan les Annales: “sejarah adalah sejarah sosial per definisi”, tidak ada sejarah selain sejarah sosial. Sejarah sosial tidak dipahami sebagai suatu cabang atau rubrik tersendiri dalam sejarah, tetapi dalam arti yang diperhatikan adalah semua perubahan dalam masyarakat. Dengan pengertian seperti ini, penelitian sejarah dapat dilakukan dengan bantuan semua bidang ilmu yang dapat menjelaskan perkembangan masyarakat di masa lampau.

Tentang pengertian “masyarakat” yang menjadi sasaran perhatian sejarah sosial itu, para sejarawan les Annales tidak menentukan batas, baik dalam arti ukurannya maupun dalam arti keterkaitan geografis yang ketat. Cakupannya dapat meliputi suatu masyarakat secara keseluruhan, terikat pada suatu kawasan tertentu yang luas, suatu kelompok masyarakat relatif kecil yang disebut “kolektivitas” di suatu tempat terpencil, tetapi dapat juga kelompok dan pengelompokan, yang keterkaitan geografisnya longgar.

Sebagai salah satu segi dari sejarah sosial, obyek kajian sejarah mentalitas adalah masyarakat juga. Mentalitas yang diminati adalah mentalitas masyarakat. Yang dikaji pada mentalitas perorangan, bahkan kalau perorangan itu orang besar, adalah hal-hal yang ada padanya yang sama dengan orang-orang lain sejamannya. Sejarah mentalitas adalah sejarah tentang perilaku sehari-hari yang otomatis, yang terdapat pada semua warga masyarakat, tidak pada orang tertentu saja. Yang diungkap adalah hal-hal yang ada di dalam budi tetapi tidak khas pada seseorang tertentu. Yang dibicarakan adalah “hal yang ada pada Caesar, tetapi juga ada pada prajurit terendah di dalam legiunnya, ada pada Lpui IX tetapi juga ada pada petani kecil di tanah kekuasaannya.

ada pada Columbus, tetapi juga ada pada awak *caravelle-caravellenya*".

Tidak mudah, atau barangkali tidak mungkin, merumuskan definisi yang pasti tentang pengertian "mentalitas" sebagai konsep sejarah. Akan tetapi dari praktek sejarawan dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah citra mental dan perilaku otomatis yang timbul daripadanya.

Sejarah mentalitas lahir antara lain sebagai tentangan terhadap, dan harus dibedakan dari, sejarah pemikiran. Bagi sejarawan mentalitas bukan gagasan pemikir-pemikir Kristen seperti Thomas Aquinas atau Bonaventura yang membimbing budi manusia Eropa sejak abad XIII, melainkan suatu bentuk kabur dalam budi di mana berperan gema ajaran-ajaran pemikir-pemikir itu, yang bentuknya tidak lagi seperti aslinya, tetapi "berupa kata-kata kandas tanpa konteks, serpihan-serpihan sisa yang sudah kehilangan sebagian besar dari makna aslinya."

Yang digali dalam penelitian sejarah mentalitas adalah hal-hal yang ada dalam budi, sikap yang sudah tercermin dalam perilaku, tetapi tidak khas pada seseorang tertentu, melainkan pada suatu masyarakat: perasaan, impian, ilusi, citra kolektif, endapan populer dari ajaran-ajaran lama, pandangan, konsepsi, sikap, perilaku, kiasan, refleksi elementer tentang atau terhadap sesuatu.

Dalam hubungan dengan usaha mengidentifikasi "mentalitas masa revolusi", tentulah menarik bahwa sejarawan mentalitas melakukan penelitiannya tentang perang salib, yang sejak 1095 menggerakkan masyarakat Eropa Kristen secara besar-besaran. Penelitian itu dilakukan karena penjelasan historis yang sudah ada tentang perang salib dianggap tidak memuaskan. Lonjakan pertumbuhan penduduk Eropa, gairah dagang kota-kota Italia, dan politik kepausan untuk mempersatukan kembali dunia Kristen yang terpecah, merupakan penjelasan yang bagi mereka tidak memadai. Mereka menemukan penjelasan dalam "mentalitas Kristen" yang meliputi suatu "citra kolektif tentang Yerusalem".

2. Penerapan Konsep “Masyarakat”

a. Komunitas Pemuda

Kiranya cukup beralasan jika dalam kajian tentang mentalitas revolusi ini perhatian kita terpusat pada pemuda-pemuda penghuni Asrama Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran, Jalan Prapatan 10, Asrama Angkatan Muda, Menteng 31, Asrama Baperpi, Cikini 71, dan Asrama Perguruan Tinggi Islam, Jalan Kramat, sebagai sebuah komunitas, sebuah masyarakat.

Jika kita sisihkan beberapa penghuni Prapatan 10 yang, sebagaimana dikenang Aboe Bakar Loebis, memilih tetap menekuni pelajaran daripada ikut serta dalam kegiatan memperjuangkan Kemerdekaan, kita dapati kelompok-kelompok pemuda yang secara tetap dan dalam tempo yang meningkat, selama satu, dua atau tiga tahun melakukan kegiatan di seputar gagasan “Indonesia Merdeka”, untuk menjadikan dambaan bersama itu sebuah kenyataan. Dambaan itu, yang tentu mula-mula sekedar rasional, makin lama makin menetap dalam budi mereka serta mengendalikan tingkah laku mereka tanpa memberi mereka kesempatan berfikir panjang. Dambaan itu tidak saja mempersatukan sekelompok pemuda dalam sebuah asrama menjadi komunitas yang mempunyai ikatan erat, tetapi juga mempersatukan pemuda-pemuda dari keempat asrama itu menjadi satu komunitas tunggal yang dengan pekat terlibat dalam usaha-usaha merealisasi “Indonesia Merdeka”.

Mereka lah yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa Decca, Park, Kebun Binatang Cikini, Pertemuan Pemuda se-Jawa di Villa Isola, Bandung. Mereka juga yang mengerahkan massa pada proklamasi serta rapat raksasa di Lapangan Ikada. Kiranya kajian atas komunitas ini dapat dilakukan dengan pendekatan sejarah mentalitas.

Dalam hal Surabaya, perhatian kita terpusat pada masyarakat kampung kota tersebut, yang oleh Frederick disebut “arek Surabaa”. Tetapi tentu juga pada para pemuda “Priyayi baru” yang dapat dianggap sebagai pembawa gagasan “Indonesia Merdeka” kepada masyarakat yang lebih luas itu. Berkat Frederick, walaupun terbatas pada Surabaya, kita mempunyai gambaran tentang akar-akar lebih

dalam dari “mentalitas masa revolusi” sebelum simbol “Indonesia Merdeka” dibawa kepada mereka oleh priyayi baru.

Akar-akar mentalitas masa revolusi masyarakat Indonesia tentulah tidak hanya terdapat pada masyarakat kampung kota Surabaya saja. Andaikata demikian tentulah gagasan “Indonesia Merdeka” tidak akan berhasil menggerakkan masyarakat-masyarakat di luar Surabaya. Tanpa akar dalam mentalitas masyarakat, simbol “Indonesia Merdeka” mungkin hanya menjadi dambaan dalam sebuah gerakan elitis. Betapa pun radikal dan giatnya para pemuda asrama-asrama itu, gerakan masuk keluar kampung yang mereka lakukan untuk mengerahkan massa takkan pernah mendapat sambutan.

Akan tetapi untuk studi kecil ini tidak berhasil diperoleh kajian lain tentang revolusi Indonesia yang menggunakan pendekatan sejarah sosial. Oleh karena itu, upaya menjelaskan “kematangan” masyarakat di luar Surabaya untuk menyambut ajakan para pemuda pada tahun 1945 pun terbatas pada gambar keadaan dan peristiwa yang dapat dianggap sebagai indikasi keadaan kejiwaan masyarakat.

b. Masyarakat Kampung Surabaya

Berkat kajian yang dilakukan W.H. Frederick dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk memahami Revolusi kemerdekaan Indonesia di Surabaya, kita dapat melihat adanya dendam penduduk kampung kota itu terhadap penguasa dan penduduk bagian kota yang teratur hasil ciptaan Belanda. Pada bulan-bulan pertama sesudah Proklamasi, “arek Surabaya” yang mengidap dendam kesumat yang lama terpendam itu menjadi kekuatan perlawanan terhadap Jepang, Belanda dan Sekutu, dengan kulminasi 10 November yang termasyhur itu. Pada bulan September 1945, kiranya dapat dikatakan kemarahan itu sudah terumpan oleh citra masyarakat dambaan dan simbol-simbolnya, yang sejak Jepang masih berkuasa penuh sudah disodorkan kepada mereka oleh “priyayi baru” : Indonesia Merdeka. Merah Putih, Indonesia Raya, Sukarno, dan mungkin juga revolusi. Yang jelas, Frederick mencatat bahwa dalam masa September-Oktober 1945 “tindakan arek Surabaya tampak mengalir sama derasny dengan pemikiran kaum pemimpin, memberi [kepada] mereka gigi yang sesungguhnya dan barangkali kekuatan inspirasional”.

Menurut penelitian Frederick, orang kampung kota Surabaya, yang disebutnya "arek Surabaya", adalah orang Indonesia perkotaan yang terdesak ke belakang-belakang tembok pagar belakang rumah orang kota :

"Pada tahun 1835 kota ini menjadi pusat kedudukan utama pasukan Belanda, dengan menghancurkan kawasan lama dan memaksa penduduk yang padat untuk melakukan pemukiman kembali. Semua orang Jawa, Madura, Bugis dan orang-orang Indonesia lainnya di paksa pindah sementara tempat-tempat di pusat kota dicadangkan bagi orang Eropa, Cina, serta beberapa orang Kristen Indonesia." Kawasan lama itu merupakan kota yang khas Asia Tenggara dengan bangunan-bangunan kayu yang berselang seling dengan pepohonan dan aliran sungai. Struktur baru yang menggantikannya berupa jembatan-jembatan, kanal-kanal, jalan-jalan beraspal, serta bangunan tembok. Di belakang kawasan sempit ini, orang Indonesia Surabaya berusaha membangun kembali lingkungan asal mereka, dan menyesuaikan diri dengan pendatang baru dari tempat-tempat yang jauh seperti Rembang, Kediri dan Banyuwangi. Terutama karena dibukanya wilayah pedalaman Jawa Timur untuk kepentingan Sistem Tanam Paksa, Surabaya dengan cepat memperoleh posisi penting dalam roda perekonomian. Menjelang akhir abad ke-19 kota ini merupakan kota terbesar di Hindia Belanda, dengan gaya dan nilai kultural yang penuh semangat, sekalipun kusut tak terencana. Sebagaimana pada suatu garis depan, tradisi lokal saling berdesakan dalam berhadapan dengan kekuasaan teknologi modern dan kesibukan perdagangan internasional ... Dari sekian banyak perubahan yang bisa dikaitkan dengan akhir abad ke-19, tiada yang lebih jelas dan lebih penting daripada bergantinya persoalan-persoalan etnik dengan kekakuan Eropa, yang jelas makin meningkat - dan sering memaksa, suatu kekuasaan yang mengandung ketegangan rasisme.⁸

c. Di Luar Surabaya

Untuk kajian ini tidak tersedia hasil-hasil penelitian tentang masyarakat-masyarakat Indonesia sebagai korban penataan ruang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di tempat-tempat lain, semacam yang kita dapati dalam karya Frederick tentang masyarakat kampung kota Surabaya itu. Akan tetapi beberapa petunjuk tentang keadaan di bawah pendudukan Jepang saja kiranya menjadi dasar yang masuk akal untuk memperkirakan bahwa ketika para nasionalis menyodorkan gagasan "Indonesia Merdeka", baik melalui jaringan bawah tanah maupun, dalam hal yang disebut "kolaborator", melalui struktur buatan Jepang, masyarakat memang dalam keadaan matang untuk menyambutnya. Lebih-lebih ketika pada tahun 1945 para pemuda

mendatangi mereka di kampung-kampung untuk bergerak ke Pegangsaan Timur, ke Ikada, dan dalam hal Surabaya untuk berkelahi secara sporadis dengan gerombolan-gerombolan Belanda jalanan bekas interniran, serta akhirnya bertempur habis-habisan melawan kekuatan Sekutu pada tanggal 10 November 1945.

Beberapa gambaran keadaan dan peristiwa di berikut ini, kiranya dapat dilihat sebagai petunjuk tentang keadaan Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan kesaksian Aboe Bakar Loebis tentang masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1942, dapat dikatakan bahwa sekurang-kurangnya sebagian dari "rakyat di tepi jalan bersorak dan bertepuk tangan" ketika tentara Nipon masuk.⁹ Karena melihat tontonan hebat? Kiranya pertanyaan seperti itu terlampau menghina masyarakat, seolah-olah mereka terlalu bodoh untuk mengetahui, walaupun barangkali samar-samar, tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kecuali terbukti sebaliknya, kiranya sambutan meriah terhadap musuh Belanda dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa masyarakat, atau sebagian daripadanya, menghendaki pembebasan dari kekuasaan Belanda.

Akan tetapi dalam waktu singkat buyarlah citra Jepang sebagai jagoan pembebas: "mulai beredar di Yogya cerita-cerita tentang tindakan serdadu-serdadu Jepang, yang main pukul saja atas tiap pelanggaran, betapa pun kecilnya. Tukang copet disayat tangannya. Tiap orang yang lewat di depan kantor Jepang, tetapi tidak memberi hormat kepada penjaganya, dengan cara turun dari sepeda dan membungkuk, pasti kena tampar. Dalam beberapa hari saja tentara Jepang menjadi penguasa yang sangat ditakuti".¹⁰

Di Jakarta, pada bulan Oktober 1943 dibuka asrama mahasiswa kedokteran di Jalan Prapatan 10 ... Biaya pemondokan di asrama relatif rendah. Mula-mula makanan yang disediakan cukup baik, tetapi lambat laun berubah, karena keadaan dalam negeri makin lama makin buruk, harga bahan makanan membubung, sedangkan beras sering sukar didapat. Dengan meningkatnya bahan makanan, sedang biaya pemondokan tidak dinaikkan, maka kualitas makanan yang disediakan makin lama makin buruk, sehingga tidak dapat dimakan. Ketika

pemerintah pendudukan Jepang menganjurkan supaya rakyat makan bekicot sebagai pengganti daging, di asrama pun disajikan bekicot.¹¹

Suasana umum di zaman Jepang itu sangat dipengaruhi oleh pengawasan ketat penguasa Jepang terhadap penduduk umumnya, dengan peraturan-peraturan yang hendak memaksakan cara hidup sesuai dengan keinginan Jepang, terutama di bidang politik. Keadaan ekonomi merosot terus. Dengan cara paksa para petani diperintah untuk menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada pemerintah pendudukan, sehingga sering terjadi kekurangan beras. Ketika panen gagal pada tahun 1943/1944, terjadilah pemberontakan-pemberontakan yang oleh Aboe Bakar Loebis disebut "pemberontakan rakyat", yaitu di Singaparna (25 Februari 1944) dan di Indramayu (Mei dan Agustus 1944).

Keadaan pada masa pendudukan Jepang itu tentulah begitu buruk sehingga wacana lisan dan tulisan yang mengkenangnya berbicara tentang romusha, yaitu kuli kerja paksa, celana goni, baju bagor, kutu dan bangsat, wabah borok dan rakyat yang mati bergelimpangan karena sakit dan lapar. "Dengan demikian, suasana sehari-hari pada waktu itu merupakan suasana tertekan, suasana tidak puas dan suasana tidak senang terhadap Jepang," tulis Aboe Bakar Loebis.¹²

3. Mentalitas Masa Revolusi

"Indonesia Merdeka", sebagai gagasan, memang hasil pemikiran, yang mungkin menyangkut gambaran tentang sistem sebuah negara, dalam bentuk kabur atau jelas, dan berbeda-beda dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, menurut ideologi masing-masing dari kelompok itu. Akan tetapi, ketika menjadi dambaan yang menggerakkan dan mempersatukan pemuda-pemuda dari berbagai asrama yang berlain-lainan, bahkan bertentangan ideologinya itu, ide itu sangat boleh jadi hanya berupa citra sebuah negeri besar yang bebas dari penjajahan Belanda atau Jepang, sebuah negara merdeka yang tak jelas bahkan tak terlampau dipikirkan konturnya, tetapi yang realisasinya telah menjadi satu-satunya landasan hidup, satu-satunya *raison d'être* semua warga komunitas pemuda di Jakarta itu. Agaknya, hal ini juga berlaku

bagi komunitas pemuda terpelajar Surabaya, yang disebut "priyayi baru" oleh Frederick.

Jika demikian, dapatlah dikatakan bahwa "Indonesia Merdeka" telah menjadi citra kolektif, dambaan kolektif yang daya penggerakannya teramat besar, semacam citra "Yerusalem" bagi orang Eropa Abad Pertengahan yang Kristen itu sejak akhir abad ke-11.

Dalam arti demikian, citra "Indonesia Merdeka" dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari mentalitas pemuda penghuni asrama-asrama yang disebutkan di muka pada tahun 1945, menjelang Proklamasi dan sepanjang masa Revolusi Kemerdekaan, ketika warga komunitas itu tidak menghuni tempat yang sama, dan mungkin tidak lagi saling menjangkau dengan mudah seperti ketika mendiami tempat-tempat di Cikini, Menteng Raya, Kwitang dan Kramat.

Boleh jadi, dengan perbedaan-perbedaan pada asal mula terbentuknya mentalitas itu, citra "Indonesia Merdeka" jugalah yang menjelaskan keterlibatan pemuda Indonesia di tempat-tempat lain, sepanjang masa Revolusi Kemerdekaan. Sungguhpun demikian, kiranya patut sejarawan menghindari generalisasi yang terlampau jauh, yang menjadikan identifikasi itu dalil yang berlaku umum. Apalagi jika pandangan demikian sampai menghentikan proses kritik yang menggugat kebenaran hasil galian lama dan menciptakan masalah baru.

Seperti sudah disinggung di muka, masyarakat kampung kota Surabaya dapat dianggap siap menanggapi citra dambaan "Indonesia Merdeka" itu ketika "priyayi baru" menyodorkannya kepada mereka. Mungkin hal "arek Surabaya" itu, dalam bentuk dan alasan-alasan teknis yang tidak tepat sama, terdapat di tempat-tempat lain di bekas Hindia Belanda pada tahun 1945. Sampai terbukti tidak demikian halnya, agaknyanya cukup aman untuk menduga bahwa masyarakat kampung kota maupun pedesaan mengidap dendam sebagai korban rejim feodal kolonial. Jika memang demikian, hal itu dapat menjelaskan mengapa dambaan akan "Indonesia Merdeka" meluas kepada mereka, sehingga mereka tergerak untuk ikut serta dalam Revolusi Kemerdekaan.

Seperti juga telah disinggung di muka, keadaan yang terus menerus memburuk selama berada di bawah pendudukan Jepang, dapat pula

menjelaskan termakannya umpan “Indonesia Merdeka” oleh masyarakat luas. Namun kebenaran cermat tentu hanya dapat diperoleh jika penelitian sejarah meminati lingkungan-lingkungan masyarakat lokal yang menjadikan pengandaian homogenitas lebih masuk akal.

Kiranya “Indonesia Merdeka” itu, “Ibu Pertiwi” dan kemudian “Republik Indonesia”, adalah citra dambaan yang mendapat simbol-simbol warna “Merah Putih”, pekik “Merdeka”, lagu dan nyanyian “Indonesia Raya”, yang bersangkutan dengan harga diri dan kehormatan, dan taruhannya total. Ketika bendera Merah Putih boleh berkibar dan Indonesia Raya boleh dinyanyikan pada pertengahan tahun 1944, tentulah kedua simbol “Indonesia Merdeka” itu lebih cepat tersebar luas berkat jaringan Jepang dan jaringan yang disusun para nasionalis yang disebut “kolaborator”.

Di sini kiranya harus disebutkan pula sebuah simbol lain “Indonesia Merdeka” yang sangat khas, tidak saja sebagai simbol, tetapi bahkan sebagai refleksi umum zaman Revolusi Kemerdekaan, yaitu aba-aba “Siaap!”¹³. Inilah semboyan yang secara langsung menggerakkan pemuda dan masyarakat luas untuk menentang kekuatan senjata modern Jepang, kemudian Sekutu dan Belanda. Kesediaan bertindak, kerelaan menempuh bahaya tanpa pertimbangan, kiranya dapat dikenali sebagai mentalitas masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam suasana ketika harta, bahkan nyawa, tidak terlampau dipersoalkan demi realisasi “Indonesia Merdeka” yang menjadi dambaan bersama itu, tidaklah aneh jika ketertiban yang menjadi bagian dari citra kaum nasionalis terpelajar tentang “Indonesia Merdeka” terlindas oleh gambaran tentang Republik Indonesia, ketika Republik ini sudah dilahirkan oleh proklamasi di tengah kehadiran kekuasaan Jepang, dan tidak punya apa-apa. Daulat-mendaulat pun menjadi aspek dari mentalitas masa Revolusi Kemerdekaan, walau sejauh dapat diikuti dari kenangan Adam Malik¹⁴, mula-mula perdaulatan merupakan realisasi sebuah rencana: Waktu itu Proklamasi sudah terjadi. Pada tanggal 29 Agustus “Kabinet Presiden” telah pula disusun. Tetapi, bagi pemuda-pemuda Menteng 31, “susunan ini baru berupa catatan nama-nama yang tertulis di atas kertas dan kemudian

diberikan kepada surat-surat kabar. Kenyataan tidak ada... Pemuda-pemuda tidak melihat dan merasa usaha dari Pemerintah sedikit pun untuk mengisi arti pemerintahan itu dengan kenyataan. Tidak ada kerepotan, tidak ada rencana, tidak ada perintah. BIngung... sementara itu pelopor-pelopr sudah mendarat dan beberapa kapal Sekutu menunggu saat pendaratan di Teluk Jakarta... pun Jepang mulai bertindak positif merugikan Bangsa Indonesia.” Chaerul Saleh “memberi contohh”. Sebuah mobil di Gambir Timur 9 dihidupkan mesinnya dan dilarikan. Contoh itu “diikuti oleh lain-lain Pemuda dan seluruh Rakyat sendiri, sehingga kemudian hampir seluruh mobil jatuh di tangan Pemerintah dan Rakyat Indonesia.”

Agaknya kata dan perbuatan “mendaulat” itu kemudian berkembang menjadi kabur, melampaui batas pengertian hak milik, untuk menjangkau kedaulatan rakyat ketika rakyat itu mana suka menyuruh pemimpin berhenti dan berpidato atau sekedar bersalaman dengan mereka. Hancurlah sekat-sekat hierarki sosial. Ini tentu dapat disebut sebagai manifestasi mentalitas egalitarian, sebuah aspek penting dari mentalitas masa Revolusi Kemerdekaan yang bakhkan berthana ketika paling hebat tentulah sebutan “bung”, yang lama kelamaan kehilangan “hikmat revolusioner”nya untuk menjdai sekedar salah satu sebutan yang diperlukan sebagai alat atau dalih pemilihan dalam birokrasi politik.

4. Sebuah Simpulan

Kalau mereka yang menjadi pelaku aktif atau sekedar terperangkap dalam suasana revolusi yang membahagiakan dan memabukkan itu kini mengenang masa lampau itu dengan nostalgia, atau mungkin dengan menangisi hilangnya suasana egalitarian, agaknya mereka dapat menghibur diri dengan melihat kenyataan, bahwa Perancis, misalnya, yaitu masyarakat yang revolusinya bersemboyan *liberte, efalite, franternite* itu, juga cepat kehilangan sikap egalitetariannya yang mutlak. Notables hanya digantikan notables baru, walau dalam hirarki sosial yang berbeda.

Lagi pula, kiranya patut jika dalam bagian yang agak merenung dari kesimpulan kajian tentang mentalitas masa Revolusi Kemerdekaan

ini, dikemukakan apa yang dikatakan J.D. Legge¹⁵ tentang Revolusi Kemerdekaan Indonesia itu:

"For Indonesians looking back to the birth of the nation.... there is no question that the events of 1945-49 constituted a revolution, a revolution that symbol of national self-reliance and, for those caught up in it, as a vast emotional experience in which the people - the people as a whole - participated directly."

Kiranya Lagge benar. Bagi orang Indonesia masa kini, kirannya kenyataan yang dikemukakannya itu bernilai tinggi: Revolusi itu memberikan kepada kita harga diri sebagai bangsa. Dan di sini sampailah kita kembali kepada kesimpulan yang lebih bersifat intelektual, kesimpulan yang lebih bersifat intelektuak, kesimpulan seorang pelajar sejarah mentalitas: kenangan akan Revolusi Kemerdekaan sudahh menjadi bagian dari citra diri orang Indonesia, menjadi bagian dari mentalitas Indonesia.

Akhirnya perlu dikemukakan dalam kesimpulan ini hal yang telah disinggung pada pengantar kajian, yaitu bahwa studi ini singkat, sumir, tidak cermat tentang fakta historis, dan karena itu sangat disebut sebagai awal sebuah studi sejarah tentang mentalitas Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Catatan ;

1. *Tulisan ini merupakan hhasil perbaikan atas makalah berjudul sama yang disusun untuk Diskusi **Sejarah Lokal**, "Revolusi Kemerdekaan 1945-1950", Bandungan, 13-15 Oktober 1994.*
2. P. Aries, "L'histoire des mentalites", dalam J. Le Goff, *Lanouvelle histoire* (Paris: Retz - C.P.E.L. 1978) hal. 402-423. Karangan ensiklopedit ini, yang bertujuan menjelaskan arti konsep mentalite dalam historiografi, mengandung semacam inventarisasi karya-karya sejarah yang menggunakan konsep tersebut.
3. Banyak sejarawan yang, seperti Marwick (A. Marwick. *The Nature of History*, cenderung mempertahankan kata Perancis Mentalite, mungkin karena arti kata Perancis itu sebagaimana digunakan dalam praktek sejarawan, tidak sama dengan arti kata mentality dalam bahasa Inggris. Mungkin makna Inggris, tetapi

bukankah pada akhirnya arti konsep tergantung pada definisi atau uraian yang menjelaskannya? saya tetap menyarankan penggunaan kata "mentalitas".

4. J. Kadjat Hartojo, *Golongan Caldoche dan Negara kenak Merdeka: sebuah Kajian Sejarah tentang Pendidikan Perancis di Kaledonia Baru*, disertai Doktor, Universitas Indonesia 1993. tidak diterbitkan.
5. Adam Malik, *Mengabdikan Republik Jilid II: Angkatan 45* (Jakarta: Gunung Agung 1984).
6. A.B. Loebis, *Kilas Balik Revolusi : Kenangan, Pelaku dan Saksi* (Jakarta: UI-Press 1992)
7. W.H.H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia* (Jakarta: Gramedia 19989)
8. Frederick, *op. cit.* hal. 8-9. Tanda kutip dibubuhkan pada sebagian dari kutipan, karena teks di luar tanda kutip itu saya sunting sekedarnya agar lebih mudah dipahami.(JKH)
9. A.B. Loebis, *op. cit.* hal 27-28.
10. *Ibid.* hal 28-29.
11. *Ibid.*, hal 57-58.
12. *Ibid.* hal 59.
13. Sebagaimana dieja Adam Malik dalam memoarnya.
14. Adam Malik, *op. cit.*, hal 62-63.
15. J.D. Legge, *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta* (Cornell Modern Indonesia Project Maono graph Series 1988).

SISTEM PEMERINTAH MILITER DI DAERAH GERILYA GUNUNG SUMBING MASA PERANG KEMERDEKAAN II 1948--1949

Supriya Priyanto

1. Pendahuluan

Berdasarkan pengalaman pahit saat menghadapi Agresi Militer Belanda I, maka menghadapi kemungkinan terjadinya agresi Belanda pihak RI telah menyusun strategi pertahanan yang baru. Taktik perlawanan secara frontal ditinggalkan dan selanjutnya akan ditempuh perang rakyat semesta.

Untuk mewujudkan rencana tersebut maka BP. KNIP menyetujui rancangan Undang-undang yang mengarah keperubahan sistem pemerintahan dari kekuasaan sipil kemiliteran. Untuk itu keluarlah Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1948 yang menetapkan semua alat kekuasaan negara berada di bawah militer, kemudian semua badan dan jawatan yang penting dimiliterisasikan, dan juga berlakunya hukum militer. Menyusul kemudian keluarnya Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1948 tentang penghapusan DPD (Dewan Pertahanan daerah) dan Badan-Badan Pertahanan Rakyat yang tidak lagi sesuai, kecuali itu juga menetapkan tanggung jawab para komandan militer sepenuhnya atas pertahanan total dan perintah taktis dari para komandan militer atas kepala-kepala daerah yang sederajat.¹⁾

Dengan adanya ketentuan tersebut berarti di pulau Jawa akan diatur pemerintah militer yang bersifat totaliter, yang akan membawahi secara taktis pemerintahan sipil yang bersifat totaliter pula. Langkah demikian ini dipandang perlu mengingat situasi dan kondisi darurat guna menyelamatkan Negara Kesatuan RI di masa perang.

Peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil kemiliteran itu dipercepat dengan pecahnya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ketika ibu kota negara Yogyakarta diserang musuh, dalam situasi krisis itu keluarlah Order Harian Wakil Presiden RI tanggal 19 Desember 1948 yang isinya memberi perintah dan kuasa kepada Angkatan Perang dan semua instansi untuk berjuang terus. Dengan keluarnya Order Harian Wakil Presiden itu maka pergantian sistem pemerintah itupun memperoleh legalitas.

Walapun semua telah diatur dari pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya pergantian sistem itu tidak dapat berjalan serentak. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat banyak variasi yang berbeda baik bentuk, proses maupun metodenya, tergantung situasi dan kondisi setempat. Dengan adanya varian berikut keunikan masing-masing, maka makalah ini berusaha menyoroti masalah sistem pemerintahan militer di daerah gerilya Gunung Sumbing pada masa Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949.

2. Organisasi Pemerintahan Militer

Sejalan dengan rencana perubahan sistem pemerintahan dari sipil ke bentuk militer totaliter, perlu diadakan perubahan struktur organisasi. Di Jawa Tengah waktu itu terdapat instansi pemerintah sipil dibawah gubernur yang membawahi residen, bupati, wedana, asisten wedana (camat) hingga lurah. Sedangkan instansi militer di bawah panglima divisi terdapat dua bentuk kesatuan, yakni kesatuan tempur berupa brigade dan batalyon, sedang yang lain adalah kesatuan teritorial berupa STC (Sub Teritorium Command), KDM (Komando Distrik Militer) hingga KODM (Komando Onder Distrik Militer).

Untuk menghindari kesimpangsiuran jalur komando sehingga terwujud sistem pemerintah militer totaliter maka instansi sipil harus diintegrasikan dalam sistem pemerintah militer. Dengan keluarnya

Penpres No. 23 tanggal 28 September 1948 dan Penpres No. 25 tanggal 29 September 1948 maka wilayahh Jawa Tengah dijadikan dua daerah Militer Istimewa (DMI). Masing-masing Penpres tersebut mengatur pembentukan DMI Surakarta, Semarang, Madiun dan Pati dengan Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto, dan pembentukan DMI Yogyakarta, Kedu dan Banyumas dengan Gubernur Militer Kolonel Bambang Sugeng.²⁾

Formasi baru tersebut menyebabkan kedudukan Gubernur sipil tergeser. Bahkan dalam perundingan antara pihak MBAP (Markas Besar Angkatan Perang) dan Kementrian Dalam Negeri diputuskan untuk menghapus jabatan Gubernur (sipil) yang selanjutnya dijadikan sebagai penasihat Gubernur Militer. Oleh karena situasi yang mendesak dan kritis, maka keputusan tersebut tidak pernah diumumkan.³⁾

Pembentukan DMI tersebut juga mempengaruhi bentuk organisasi militer. Divisi II/Sunan Gunungdjati kembali berubah menjadi instansi GM. II/DMI II dengan Panglima Kolonel Gatot Subroto, sedangkan Divisi III/Diponegoro menjelma menjadi GM. III/DMI III dengan Panglima Kolonel Bambang Sugeng. Masing-masing berkedudukan di Solo dan Magelang.⁴⁾ Dalam susunan yang baru ini maka terjadi perangkapan jabatan, yakni Panglima Divisi sekaligus merangkap jabatan Gubernur Militer. Hal ini berlaku juga hingga instansi-instansi bawahan. Di tingkat keresidenan, Kabupaten dan Kecamatan pemegang kuasa adalah Komandan STC, Komandan KDM dan Komandan KODM, yang bertindak sebagai residen, bupati ataupun camat militer. Sedangkan pejabat residen, bupati, dan camat sipil diintegrasikan membantu tugas militer.

Mengingat bahwa dalam perubahan taktis komando ini peranan unsur teritorial lebih menonjol, maka disusun suatu markas besar yang akan memegang kendali koordinasi antar daerah dan instansi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan 82 / 48 tanggal 18 Oktober 1948 dibentuklah Markas Besar Komando Djawa (KBKD) dengan Panglima Koloel A.H. Nasution dan Kepala Staf Kolonel Bambang Supeno, sementara di Sumatra (MBKS) dengan Panglima Kolonel Hidayat.⁵⁾

Dalam pada itu kecurigaan pihak R.I. terhdap itikad baik Belanda kirannya cukup beralasan. Gejala kearah itu terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda, disamping itu aksi provokasi dan agitasi juga meningkat, bahkan banyak tindakanyang sengaja untuk memancing-mancing insiden di sepanjang garis demarkasi. Untuk mengimbangi aksi Belanda dan menjaga kemungkinan yang akan terjadi, maka ke luarlah Perintah Siasat Pengsar Jendral Sudirman No. 1 tanggal 9 Nopember 1948 yang antara lain menginstruksikan agar setiap divisi menyusun basis-basis gerilya di daerah pedalaman.

Berkenaan dengan instruksi tersebut, maka pada tanggal 11 Nopember 1948 di Markas MBKD berlangsung rapat yang dihadiri oleh para komandan militer, gubernur (sipil) dan residen untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut. Dalam kesempatan itu pula Panglima MBKD memberi instruksi khusus kepada Panglima GM. III/DMI. III karena di wilayahnya terdapat ibukota RI, yakni Jogjakarta. Karena didesak waktu maka pada hari itu juga Panglima GM. III/DMI. III mengadakan rapat kilat dengan semua Komandan Militer bawahannya dan diputuskan daerah Gunung Sumbing sebagai basis gerilya menghadapi sgresi militer Belanda.⁶⁾

Sampai dengan tahap ini, walaupun sudah ada ketentuan namun organisasi Pemerintah Militer belum tersusun sepenuhnya. Dari segi operasional pola kerja lama. Sistem Pemerintahan Militer baru diterapkan sepenuhnya dengan terjadinya agresi mliter Belanda II yaitu dengan keluarnya instruksi panglima MBKD No. 1/MBKD/48 tanggal 25 Desember 1948 tentang Instruksi Bekerja Pemerintah Militer Seluruh Djawa.⁷⁾

3. Medan Gerilya Gunung Sumbing

Tanda-tanda bahwa Belanda akan melancarkan agresi mulai terasa. Dua hari sebelum Belanda menyerbu Jogjakarta, markas GM. III/DMI. III telah menerima berita dari kawat pasukan yang berada di front Barat mengenai gejala meningkatnya konsentrasi pasukan Belanda. Berita tersebut kemudian diteruskan ke kesatuan yang lain pada kecsokan harinya.⁸⁾ Berhubung Belanda diperkirakan akan

menyerang dari sebelah Utara (Semarang), maka konsentrasi pasukan lebih diarahkan ke sana. Jalan penghubung Semarang-Magelang, di daerah Secang dirusak dan ditaman ranjau guna menghambat gerak maju tentara Belanda. Selain itu, untuk meningkatkan kesiagaan TNI justru merencanakan akan mengadakan latihan perang secara besar-besaran pada tanggal 19 Desember 1949.

Perkiraan TNI ternyata meleset, karena justru pada hari itu Belanda telah melancarkan serangan. Mereka menyerang tidak lewat jalur darat tetapi justru dari udara. Kejadian tersebut benar-benar di luar dugaan, sehingga membuat situasi kalang mabut. Berita tentang serangan atas Yogyakarta diterima Markas GM. III/DMI/III dari Markas Besar Tentara (MBT) melalui telepon dengan kode sandi "DPR bubar".⁹¹

Menghadapi situasi krisis tersebut Panglima Divisi segera memerintah untuk melaksanakan instruksi sebagaimana dalam Pemerintah Siasat No.1. Peralatan penting yang akan dipakai dalam perlawanan gerilya, juga arsip dan dokumen-dokumen penting segera diungsikan ke pedalaman. Selain itu juga dilakukan bumi hangus terhadap gedung-gedung, instalasi dan obyek vital. Kota Magelang yang sejak masa kolonial merupakan kota Garnisun besar dan penuh bangunan militer mengalami rusak berat.¹⁰¹

Hari itu juga Panglima Divisi bersama keluarga, diikuti dr. Kusen sebagai dokter pribadi, juga Kolonel RM. Soesalit (bekas Panglima Divisi III/Diponegoro) dan Mr. Wongsonegoro (bekas Gubernur Jawa Tengah) berangkat meninggalkan Magelang menuju desa Kaliangkrik.¹¹¹ Menyusul kemudian rombongan Kepala Staf Divisi Kolonel Sapari bersama sejumlah perwira, yakni Bargowo, Suwito Haryoko, Wiluyo Puspooyo, D. Ashari, Sutikno Lukitodisastro, dan lain-lain. Mereka baru tiba di Kaliangkrik pada keesokan harinya tanggal 20 Desember 1948.¹²¹

Kaliangkrik, kota kecil di lerang Gunung Sumbing saat itu menjadi ramai karena banjir pengungsi dari Magelang, baik dari kalangan militer, sipil maupun rakyat biasa. Selain pasukan TNI (Brigade 9/III dan Siliwangi), di sana terdapat laskar-laskar seperti Laskar Pemuda Maluku, Pelajar. Dalam suasana sibuk dan kalut, membuat banyak kelompok yang terpisah dari induk pasukan, sehingga terpaksa

bergabung dengan kesatuan lain, bahkan ada yang kemudian mengikuti Pasukan Siliwangi ber- "long march" kembali ke Jawa Barat. 13)

Tanggal 21 Desember 1948 Belanda menyerbu Magelang. Mereka bergerak dari dua arah. Pasukan Brigade W pimpinan Kolonel de Vries bergerak dari Gombong - Purworejo - Salaman terus ke Magelang, sedangkan pasukan Brigade T pimpinan kolonel van Langen bergerak dari Jogjakarta - Salam - Muntilan terus Magelang. Mereka tidak menjumpai perlawanan yang berarti dan menemukan kota Magelang dalam keadaan hampir-hampir kosong. Untuk selanjutnya Magelang diduduki oleh 3 batalyon dari Brigade W ditambah Batalyon KNIL Anjing NICA pimpinan Kolonel van Santen yang terkenal kekejamannya. 14)

Belanda yang mencium kepindahan markas Divisi kemudian melakukan serangan udara terhadap Kaliangkrik pada pagi hari tanggal 21 Desember 1948. Serangan itu kemudian dibalas oleh pasukan Siliwangi yang waktu itu mulai bergerak menuju Wonosobo. Dalam pertempuran itu pasukan Lukas berhasil menembak salah satu pesawat Belanda dan jatuh di depan pasar Kaliangkrik. Senapan mesin yang ada di pesawat itu kemudian dipreteli dan digunakan oleh pasukan GM. III/DMI. III untuk bergerilya. 15)

Dari Kaliangkrik, staf Divisi kemudian mengadakan konsolidasi di desa Ropoh. Dari kemudian beralih ke Kaliurang dan menjadikannya sebagai markas gerilya. Dari sinilah komando perlawanan di wilayah GM. III/DMI. III di kendalikan. Staf Divisi dibagi menjadi sepuluh kelompok dan dipencar menempati desa-desa Simanggis, Igir, Karanganyar dan Mendongan. 16)

Dari markasnya yang baru di daerah Kepurun, Manisrenggo, Prambanan, Panglima MBKD mengeluarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tanggal 25 Desember 1948 yang berisikan tentang pembentukan militer di seluruh Jawa dan penyusunan daerah perlawanan dalam bentuk Wehrkreise (WK), yang kemudian berbagi dalam Sub Wehrkreise (SWK), Sektor hingga Sub Sektor. 17) Sesuai dengan instruksi tersebut dari markasnya di Kaliurang Panglima Devisi III mengkoordinir penyusunan daerah perlawanan bentuk wehreise, dan membagi wilayahnya menjadi 3 WK, yaitu :

- (1) WK. I meliputi Keresidenan Banyumas dan Pekalongan dipegang oleh Brigade 8/III di bawah pimpinan Letkol. Moch. Bakhrun
- (2) WK. II meliputi Daerah Istimewa Jogjakarta dipegang oleh pasukan Brigade 10/III dibawah pimpinan Letkol. Suharto.
- (3) WK III meliputi Keresidenan Kedu dipegang oleh Brigade 9/III di bawahh pimpinan Letkol A. Yani.¹⁸⁾

Sesuai dengan petunjuk perlawanan dalam Instruksi No. 1/MBKD/1948 maka susunan pemerintah militer di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : di dalam wilayah daerah militer pimpinan tertinggi dipegang oleh Gubernur Militer (GM), STC merupakan pemerintahan di Tingkat keresidenan, KDM untuk tingkat kabupaten, KODM di tingkat kecamatan, sedang di tingkat desa terdapat Lurah, kader desa dan Kader dukuh.¹⁹⁾ Di dalam susunan ini camat diperbantukan kepada pemerintahan militer, sementara kita ketahui jabatan gubernur dihapuskan.

Dikarenakan sulitnya medan dan hambatan komunikasi maka hingga beberapa waktu usaha menyusun pemerintah militer belum menampakan hasilnya. Untuk mengisi kekosongan ada beberapa daerah di wilayah GM. III yang bekerja atas dasar inisiatip masing-masing sesuai situasi dan kondisi setempat, sebagai contoh di daerah Sepuran dan Kaliwiro, sejak tanggal 6 Januari 1949 telah disusun suatu pemerintahan militer di bawah pimpinan Mayor CPM prayoga. Daerah tersebut kemudian dijadikan Sektor khusus dengan nama Sektor Kumara.²⁰⁾

Baru pada tanggal 10 Maret 1949 Staf Divisi mengadakan rapat di markas Kaliurang, yang dihadiri oleh para residen, bupati, komandan militer dan tokoh-tokoh pemerintahan yang lain dalam rangka menyusun pemerintahan militer. Menyusul kemudian rapat tanggal 10 April 1949 di desa Sijenes, dan berhasil menyusun petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pemerintahan Militer Kecamatan (P.M.Kt) yang merupakan unsur terendah dalam pemerintahan militer dalam berhubungan dengan rakyat.²¹⁾

Hingga sedemikan jauh markas Divisi di Kaliurang masih dalam keadaan aman. Akan tetapi setelah Belanda menempatkan pasukan

bantuan sebanyak kurang lebih 800 orang di daerah Banjarnegara. kedudukan markas itu mulai terancam. Perhitungan itu ada benarnya karena pada tanggal 15 Maret 1949 pesawat Belanda melakukan pemboman atas desa-desa Balekambang, Candi, Sironteng, Karangmalang, GARdu dan Kuwukan, disusul oleh aksi pembersihan oleh satu kompi pasukan Belanda. Namun mereka hanya menjumpai daerah kosong karena pasukan TNI dari Sektor Kumara yakni Kompi Gaoto sehari sebelumnya sudah pindah ke desa Gambiran.²²⁾

Untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda, Staf Divisi telah menentukan 5 tempat sebagai terugval-basis yakni desa Kepiran, Morgolangu, Singolopo, Karanggedang dan Sikapat, namun sampai dengan akhir bulan April 1949 markas divisi masih tetap bertahan di Kalikarung (Gunung terhadap daerah pendudukan Belanda di Maclang, Wonosobo, Banjarnegara, dan pos-pos dikendalikan sehingga benar-benar memusingkan pihak Belanda.

Akan tetapi sejak bulan Mei 1949 Belanda mulai melancarkan operasi ke pedalaman. Tanggal 6 Mei dengan kekuatan sekitar 400 orang Belanda bergerak ke Ropoh dan bermalam di desa Satriyan. Pagi harinya satu peleton dari mereka bergerak menuju salaman dan melakukan aksi pembersihan di Kalipuru dan Tanjung Anom dan berhasil menangkap doktor divisi yaitu dr. Radjiwan bersama beberapa orang stafnya.²³⁾

Untuk meningkatkan operasi terhadap TNI, sejak tanggal 9 Mei 1940 Belanda membuat lapangan terbang darurat di Krasak dan Wonosobo. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1949 mereka menduduki Sepuran dengan kekuatan satu kompi dan menempatkan pos di desa Karangsari dan desa Tanjungsari. Pada bulan Juli 1949 Belanda melancarkan operasi secara besar-besaran. Mereka bergerak dari tiga titik, yaitu dari Krasak, Sepuran dan Prembun. Kecuali itu juga menempatkan pasukan penutup di daerah Grogol dan Klegen yang terlatak di lereng timur Gunung Sumbing, sementara di sektor Tenggara pasukan penutup ditempatkan di daerah Alihan dan Krakal.

Dalam operasi tersebut Belanda yang berangkat dari Krasak kemudian melancarkan pembersihan di Kaliwiro dan Kalibawang. Sementara mereka yang bergerak dari Sepuran sebagian beroperasi di

Kalibawang dan sebagian lainnya di Kepil. Pasukan yang bergerak di Kepil kemudian dipecah menjadi dua kelompok, masing-masing bergerak ke Bruno dan Maron. Pasukan yang bergerak di Maron meneruskan gerakan di daerah Gebang. Kelompok ketiga yang bergerak dari Prembun seterusnya melancarkan operasi di daerah Wadaslintang.²⁵⁾

Sedemikian jauh usaha Belanda untuk mematahkan perlawanan TNI GM. III/DMI. III menemui kegagalan. Serangan terhadap markas divisi di komplek Gunung Mentosari juga gagal. Staf Divisi berhasil lolos dari kepungan, kemudian meneruskan perlawanan gerilya di daerah Wadaslintang dan Wadasmalang sampai akhirnya tercapai persetujuan gencatan senjata pada tanggal 3 Agustus 1949 disusul dengan terbentuknya LJC (Local Joint Committee) dan gencatan senjata.²⁵⁾

Sebaliknya prestasi tempur pasukan GM. III/DMI. III dapat dikatakan cukup gemilang. Dalam bidang militer, di daerah Pekalongan dan Banyumas pasukan Brigade 8/III berhasil menahan gerak maju pasukan Belanda, dan terpaksa terlibat pertempuran segi tiga melawan Belanda dan DI/TII pimpinan Amir Fatah di Brebes dan Tegal. Di daerah Kedu, Brigade 9/III berhasil menciptakan daerah-daerah maut bagi Belanda, seperti misalnya jalur jalan antara Prembun - Turonggo, antara Naron - Kreteng dan cukup besar adalah keberhasilan pasukan Brigade 10 dalam peristiwa 1 Maret 1949. Kesemuanya ini membuktikan keberhasilan TNI menetralkan sistem pemerintahan militer di Wilayah GM. III/DMI. III.²⁶⁾

4. Mobilisasi dan Distribusi Logistik

Dengan terbentuknya sistem Wehrkreise, selanjutnya Panglima MBKD mengeluarkan Instruksi Nomor 4/MBKD/49 tanggal 1 Januari 1949 tentang Instruksi bekerja untuk supply : Instruksi ini berisi tentang suplai yang harus diwujudkan secara wehrkreise. Jika dahulu setiap satuan mendapat anggaran rutin setiap bulan dari pusat, karena perang maka anggaran belanja itu pun terhenti. Selanjutnya suplai akan diselenggarakan oleh daerah. Untuk itu pemerintah pusat telah memberi wewenang kepada para Komandan KDM untuk melakukan cara: Meminjam atas nama negara, dan mempergunakan semua bahan

kekayaan negara, persediaan uang dan barang sekedarnya dari intendan²⁷⁾

Dengan cara demikian untuk sementara waktu kebutuhan akan suplai bisa dipenuhi. Namun mengingat perjuangan jangka panjang perlu diambil langkah untuk memobilisasi suplai dengan cara :

- (a) Mengumpulkan dari rakyat dengan melalui pungutan padi, pajak, denda berupa barang, bumi hangus dan pensitaan milik musuh.
- (b) Merebut melalui jalan pertempuran, pencegatan konvoi, serangan dan aksi ilegal di daerah pendudukan Belanda.
- (c) Perdagangan, seperti koperasi desa, dagang dengan Kota, mendirikan perusahaan sekedarnya, bercocok tanam, membuat pabrik di daerah gerilya atau di kota secara ilegal.
- (d) Menghemat penggunaan dana.²⁸⁾

Intruksi tersebut akan dilaksanakan oleh jawatan perlengkapan, keuangan dan persenjataan bekerja sama dengan Gubernur Militer dan pada Komandan KDM. Selain itu pada para komandan batalyon juga diinstruksikan untuk membentuk suplai di tingkat Kompi.

Seluruh dana yang terkumpul akan dipakai untuk membiayai perjuangan, baik untuk mencukupi bahan makan, pembelian senjata, amunisi, obat-obatan, pakaian dan sekedar uang saku bagi tentara atau pegawai RI.

Sejalan dengan ketentuan suplai itu, maka Panglima GM. III/DMI. III pada tanggal 22 Mei 1949 mengeluarkan peraturan pungutan "Intilan" berupa hasil bumi. Intilan adalah pengumpulan beras jimpitan sebanyak satu sendok perhari selama satu minggu, dan dikoordinir oleh bantuan lain diurus oleh Staf Keuangan, kemudian didistribusikan untuk keperluan pejuang, mendirikan dapur umum dan lain-lain.

Berhubungan kebutuhan anggaran setiap kesatuan tidaklah sama, untuk menutup kekurangan dana perjuangan, pada tanggal 16 Mei 1949 Pemerintah Militer Keresidenan Kedu menetapkan tambahan pajak bumi. Adapun besarnya pungutan adalah tergantung pada pemilikan tanaman produktif, seperti kelapa dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Satu batang pohon kelapa yang berbuah dipungut Rp. 20 per tahun.
- (b) Satu ru tanaman tembakau dipungut Rp. 2.50 per th.
- (c) Satu ros tanaman klembak dipungut Rp. 5 per tahun.
- (d) Satu hektar tanaman kopi yang berbuah dipungut Rp. 4.000 per tahun ²⁹⁾

Hingga sedemikian jauh nampaknya mobilisasi dana untuk biaya perjuangan di daerah GM. III/DMI. III berjalan baik. Hal itu terbukti dengan adanya keputusan Panglima Divisi tanggal 1 Juni 1949 tentang pemberian tunjangan kepada anggota tentara maupun pegawai sipil yang bertugas beserta keluarganya. Adapun besarnya tunjangan tersebut adalah :

- (a) Anggota tentara mendapat Rp. 900 uang lauk pauk ditambah beras sebanyak 15 kg. per bulan.
- (b) Pegawai negeri yang bertugas mendapat Rp. 325 uang lauk pauk ditambah 12 kg. beras per bulan.
- (c) Setiap anggota keluarga tentara dan pegawai sipil mendapat bantuan beras sebanyak 7.5 kg. per bulan
- (d) Kehidupan para keluarga di desa-desa mendapat bantuan rakyat (desa verbandi) ³⁰⁾

Untuk menjalin kelancaran mobilisasi dana sekaligus mengawasi penggunaannya, maka sejak tanggal 30 Juni 1949 dibentuk Dewan Penilikan mulai tingkat GM hingga kabupaten yang bertindak selaku pengawas. Mereka tergabung dalam Staf OPI (Opsir Pekerjaan Istimewa). Berdasarkan laporan staf tersebut maka dalam PERaturan Nomor : 2/pert/Wk.2/49 Pemerintah Militer Keresidenan Kedu menetapkan jumlah personil. Untuk Staf OPI di tingkat kabupaten (distrik) ditetapkan sebanyak 13 orang, terdiri dari 9 anggota tentara dan 4 orang pegawai sipil termasuk Wedana. Sedang jumlah tenaga di tiap instansi militer kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya 30 orang, terdiri dari 17 orang anggota tentara termasuk komandan P.M. Kt ditambah 13 orang pegawai sipil termasuk Camat (Asisten Wedana). ³¹⁾

Banyaknya kemudahan TNI di wilayah GM. III/DMI. III secara tidak langsung juga dipengaruhi keberhasilan Belanda melakukan konsolidasi di wilayah pendudukan. Sebagai contoh adalah situasi di kota Magelang. Walaupun di awal perang banyak penduduk yang mengungsi, namun karena tidak tahan penderitaan di pedalaman yang kehidupannya serba terbatasi membuat banyak di antara mereka kembali masuk kota. Lambat laun kehidupan kota pun pulih kembali. Kantor-kantor, sekolah dan pasar dibuka kembali dan kehidupan perekonomian pun berjalan normal kembali.

Di sisi lain, sesuai dengan kebijakan MBKD, maka pengungsi Cina diperintahkan masuk kembali. Selain untuk mempermudah pengawasan, mereka sebenarnya juga diperlukan bagi kelangsungan ekonomi. Kondisi demikian itu ternyata cukup menguntungkan pihak RI karena walaupun dengan cara menyelundup namun barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, sabun, rokok dan lain-lain masih mudah diperoleh.

Dalam pada itu walaupun pihak Belanda juga melancarkan blokade ekonomi, namun sedemikian jauh masih bisa ditembus. Salah satu taktik Belanda untuk melemahkan ekonomi RI adalah dengan mengeluarkan uang federal. Dengan keluarnya uang tersebut maka uang ORI (orang repoebluk Indonesia) dinyatakan tidak berlaku di daerah pendudukan Belanda. Selain itu Belanda juga mengedarkan ORI palsu pecahan Rp. 100. Akibatnya nilai tukar ORI merosot sehingga rakyat sulit mendapatkan barang-barang di daerah pendudukan karena harganya tinggi.³²⁾

Didukung oleh situasi dan kondisi setempat yang memungkinkan memobilisir dana serta sistem pengawasan yang baik, maka sampai dengan akhir tahun 1949 nampaknya distribusi logistik di wilayah GM. III/DMI. III masih berjalan lancar. Baik tunjangan berupa uang, bahan in nature, maupun bahan kebutuhan lain masih berjalan baik. Selain alat tulis kantor mereka juga memperoleh bahan kebutuhan yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan Kepala Datasemen staf divisi dalam laporannya tertanggal 19 Desember 1949. Disebutnya bahwa anggota tentara dan sipil yang berjumlah 23 orang, secara rutin menerima distribusi bahan dari bagian intendant. Dalam pertanggung

jawabannya untuk menerima pakaian hitam 1 stel, kain, nahan baju untuk wanita, kaos, celana dalam, handuk dan peci.³³⁾

Dari sini dapat kita lihat bahwa sebegitu jauh sistem pemerintahan militer yang diterapkan selama Perang Kemerdekaan II terbukti efektif dan mampu mengatasi kesulitan di saat negara dalam keadaan bahaya.

5. Fase-fase Sistem Pemerintahan Militer

Dengan tercapainya gencatan senjata, TNI kemudian mengadakan konsolidasi. Di tengah kesibukan perundingan dalam rangka LJC, Panglima MBKD mengeluarkan Perintah Harian No. 164/MBKD/PH/49 tanggal 6 Oktober 1949 tentang rencana penggabungan GM. II/DMI. II dan GM. III/DMI.III. Pemerintah Harian ini dikuatkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 5/D/AP/49 tanggal 31 Oktober 1949.³⁴⁾

Dengan demikian sejak 1 Nopember 1949 seluruh kesatuan TNI di Jawa Tengah dilebur dalam satu divisi yang disebut Divisi III dengan Panglima Kolonel Gatot Subroto. Sesuai dengan Maklumat MBKD No. 36/MBKD/Makl/1949 tanggal 10 Desember 1949 Kolonel Gatot Subroto secara resmi dilantik sebagai Gubernur Militer III meliputi daerah Jawa Tengah sekaligus merangkap sebagai Panglima Divisi III. Berikutnya keluar Instruksi Panglima MBKD No. 69/MBKD/INSTR/1949 tanggal 19 Desember 1949 yang berisi perintah penghapusan daerah perlawanan sejak WK hingga Sub Sektor. Penghapusan akan dilaksanakan sesudah daerah tersebut dikosongkan oleh pasukan Belanda. Selama pemerintahan militer belum dicabut maka pertanggung jawaban daerah masih berada di tangan KDM - KDM.³⁵⁾

Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung serah terima kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak RI atas seluruh Komando di Jawa Tengah. Serah terima yang berlangsung di Semarang tersebut, masing-masing diwakili oleh Kolonel Gatot Subroto dan Jendral Mayor Mollinger. Sejak itu mulailah babakan baru dalam sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia. Secara bertahap TNI meninggalkan basis gerilya dan kembali masuk kota. Satu demi satu daerah gerilya ditinggalkan, demikian juga medan pasukan gerilya di Gunung Sumbing yang merupakan pusat perlawanan GM. III/DMI.III.

6. Simpulan

Pengertian sistem dan pemerintah sipil ke pemerintah militer totaliter di saat negara menghadapi perang terbukti efektif. Hal ini telah terbukti selama RI menghadapi Perang Kemerdekaan II tahun 1948-1949. Yang jelas keberhasilan tersebut adalah karena terintegrasinya seluruh komponen di masyarakat, yang dilandasi oleh motivasi dan semangat pro patria.

Catatan

- 1) Dokumen Maklumat No. 2/MBKD tanggal 20 Desember 1949
- 2) Kusnodiprodjo, 1948, *Himpunan Undang-2, Peraturan-2, Penetapan-2, Pemerintah RI*, Djakarta : SK Seno hal. 580-582.
- 3) Dokumen No. 1/MBKD/mobil/48, tanggal 25 Desember 1948.
- 4) Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968, *Sedjarah TNI-AD, KODAM VII Diponegoro* : Simaning Jakso katon Gapuraning Ratu, Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro, hal 284.
- 5) *Ibid.*
- 6) Sutikno Lukitodisastro, wawancara tanggal 12 Pebruari 1978.
- 7) Dokumen No. 1/MBKD/mobil/48, loc. cit.
- 8) Sutikno Lukitodisastro, loc. cit.
- 9) *Ibid.*
- 10) A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang kemerdekaan Indonesia Jilid 10* : Perang Gerilya semesta II, Bandung : Penerbit Angkasa, hal 48.
- 11) Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1978, *Perjalanan Gerilya Staf Kwartir Divisi III GM III di daerah Gunung Sumbing*, (naskah), hal . 2.
- 12) D. Ashari wawancara tanggal 13 Pebruari 1978.
- 13) Sockimin Adiwiratmoko, 1984, *Pasukan Anthon*, Amgelang, (naskah), hal 3-4.

- 14) Meohkardi. 1983, *Magelang Berjuang. Magelang : AKABRI Darat*, hal 76.KS
- 15) Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *loc. cit.*
- 16) *Ibid.* hal 4.
- 17) Dokumen No. 1/MBKD/mobil/48, tanggal 25 Desember 1948. *loc.cit.*
- 18) Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1958, *op.cit.*
- 19) Dokummen MBKD No. 15/MBKD/49, tanggal 1 Januari 1949.
- 20) Dinas Sejarah militer Kodam VII/ Diponegoro, 1978, *op. cit.* hal. 3.
- 21) *Ibid.*
- 22) *Ibid* hal. 4
- 23) Sutikno Lukitodisastro, *loc. cit.*
- 24) Dokumen No. 142/Lp. 49 tanggal 11 Juli 1949, tentang Kaporan Sekitar Pendudukan Sepuran.
- 25) Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1978 *op. cit.* hal. 5.
- 26) *Ibid.* hal. 4.
- 27) Dokumen No. 4/MBKD/1949 tanggal 1 Januari 1949. Instruksi Bekerdja untuk Supply.
- 28) Dokumen Maklumat No. 2/MBD/1948.
- 29) Dokumen Peraturan Pemerintah Militer Daerah Karesidenan Kedu No. 3/Pert/WK-2/49 tanggal 1 Juli 1949.
- 30) Dokumen Peraturan Militer Daerah Karesidenan Kedu No. 2/Pert/WK-2/49.
- 31) *Ibid.*
- 32) A.H. NAsution, 1977, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4*, bandung: Angkasa, hal 46.
- 33) Dokumen Laporan Keuangan dan Intendasice detachment Staf divisi tanggal 19 Desember 1949.

- 34) Dokumen Pemerintah Harian No. 164/MBKD/PH/49 tanggal 6 Oktober 1949.
- 35) Sedjarah militer Kodam VII/Diponegoro. 1968, op/ cit. hal. 293.

SEJARAH LOKA

Perpustakaan D
Jenderal Kebu

959.803
SEJ